QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Kepala Daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Qanun;

b. bahwa RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati Simeulue untuk masa jabatan 2025–2029, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

8. Peraturan.../3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

14. Peraturan.../4

14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

21. Peraturan.../5

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
24. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
25. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 9);
26. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 76);
27. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025 Nomor 87).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

Dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025–2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

2. Pemerintah.../6

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat SKPK Simeulue.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJMA Tahun 2025–2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN Tahun 2025–2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPK Simeulue Tahun 2025–2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat RKPK Simeulue.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2029 selanjutnya disingkat Renstra SKPK Simeulue Tahun 2025-2029.

13. Rencana.../7

13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat Renja SKPK Simeulue.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada pembangunan Daerah akhir periode perencanaan
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN

Pasal 2

(1) RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 memuat penjabaran visi, misi, dan program Bupati Simeulue hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

(2) RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Pembangunan dan keuangan Kabupaten Simeulue serta Program SKPK yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 5 (lima) tahun.

(3) RPJMK.../8

(3) RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada RPJPK Simeulue Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034, RPJMA Tahun 2025-2029 serta RPJMN Tahun 2025-2029.

Pasal 3

RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN
   1.1 Latar Belakang
   1.2 Dasar Hukum
   1.3 Hubungan Antar Dokumen
   1.4 Maksud dan Tujuan
   1.5 Sistematika Penulisan

b. BAB II: GAMBARAN UMUM DAERAH
   2.1 Kondisi Umum Kabupaten Simeulue
   2.2 Gambaran Keuangan Daerah
   2.3 Evaluasi Hasil Capaian Pembangunan 2020–2024
   2.4 Permasalahan dan Isu Strategis
   2.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)
   2.6 Rencana Pembangunan Infrastruktur (APBN/ APBA)
   2.7 Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Simeulue

c. BAB III: VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
   3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
   3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

d. BAB IV: PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
   4.1 Program Perangkat Daerah
   4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

e. BAB V PENUTUP
   5.1 Pedoman Transisi
   5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pasal 4.../9

Pasal 4

RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang marupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman:

a. SKPK dalam menyusun Renstra SKPK Simeulue Tahun 2025-2029 dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.
b. Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penyusunan RKPK Simeulue setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh SKPK Simeulue dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Simeulue.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Simeulue lingkup Kabupaten.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Simeulue; dan
    b. pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Simeulue.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengedanlian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV.../10

BAB IV

PERUBAHAN RPJMK

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektifitas, Perubahan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Simeulue tentang perubahan atas Qanun Perubahan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029.

(5) Perubahan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renstra SKPK.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Pada saat Qanun ini berlaku, dokumen Perencanaan pembangunan Kabupaten Simeulue yang telah disusun dan ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) Pada.../11

(2) Pada saat Qanun ini berlaku, maka RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2029, serta dapat berfungsi sebagai RPJMK Transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Simeulue Tahun 2030, sebelum ditetapkannya RPJMK Simelue Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati periode selanjutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 03 Desember 2025 M
12 Jumadil Akhir 1447 H

BUPATI SIMEULUE,

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 03 Desember 2025 M
12 Jumadil Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

ASLUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 96

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH (10/150/2025

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengarahkan penyusunan RKPK Simeulue setiap tahun anggaran.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMK menjadi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, serta arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Penyusunannya berpedoman pada RPJPK Simeulue Tahun 2025–2045, RPJMA 2025–2029, dan RPJMN 2025–2029.

RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 memuat prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi makro, arah kebijakan fiskal, serta rancangan program pembangunan yang bersifat indikatif baik dari sisi regulasi maupun pendanaan. Dokumen ini memiliki horizon waktu lima tahun, dan pelaksanaannya diwujudkan melalui rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPK Simeulue, yaitu:

a. RKPK Simeulue Tahun 2026;
b. RKPK Simeulue Tahun 2027;
c. RKPK Simeulue Tahun 2028;
d. RKPK Simeulue Tahun 2029; dan
e. RKPK Simeulue Tahun 2030.

Efektivitas pelaksanaan RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 sangat ditentukan oleh konsistensi, komitmen, dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Simeulue, Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, serta para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mencegah terjadinya kekosongan perencanaan, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa pemerintahannya berkewajiban menyusun RKPK Simeulue dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikut tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan APBK Simeulue (APBK-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

II. Pasal.../13

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 berkedudukan sebagai kerangka dasar pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan Kabupaten Simeulue yang disusun dengan memperhatikan RPJMA dan RPJMN, serta berfungsi sebagai pedoman dalam:

a. penyusunan Renstra SKPK, RKPK, Renja SKPK, dan dokumen penganggaran;
b. mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Simeulue Tahun 2025–2029. Dokumen ini merupakan pedoman utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

RPJMK ini disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dalam bentuk arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan yang terukur. Proses penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, termasuk RPJMN 2025–2029 dan RPJMA 2025–2029.

Dokumen ini juga disusun secara partisipatif melalui pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, dan *top-down–bottom-up*, dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan seluruh perangkat daerah. Harapan kami, RPJMK ini tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan juga sebagai instrumen strategis yang mampu mendorong transformasi Simeulue menuju daerah yang lebih bermartabat, inklusif, tangguh, dan berdaya saing, serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi biru di wilayah barat Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMK ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Simeulue yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sinabang, 03 Desember 2025

BUPATI SIMEULUE

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GRAFIK ..... **xix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 5

1.3. Hubungan Antar Dokumen 8

1.4 Maksud dan Tujuan 12

1.5 Sistematika Dokumen RPJMK 13

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **16**

2.1 Kondisi Umum Kabupaten Simeulue 16

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 16

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah 16

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 16

B. Letak dan Kondisi Geografis 19

C. Topografi 19

D. Geologi 21

E. Hidrologi 25

F. Klimatologi 26

G. Penggunaan Lahan 27

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam 28

A. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 28

B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya 29

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 29

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Penyediaan Air 29
B. Daya Dukung dan Daya Tampung Penyediaan Pangan 31
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 33
A. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik 33
B. Energi dan Sumber Daya Mineral 34
C. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) 38
D. Konsumsi Listrik Perkapita 39
E. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum 40
F. Indikator Ketahanan Pangan 41
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas 45
A. Indek kualitas lingkungan hidup 45
B. Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 50
C. Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 51
D. Persentase penanganan sampah 51
2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 53
A. Penanggulangan Bencana 54
B. Penurunan intensitas Emisi GRK 59
C. Indeks Risiko Bencana 59
D. Indeks Ketahanan Daerah 60
2.1.1.7 Demografi 61
A. Jumlah Penduduk 61
B. Distribusi Jumlah Penduduk 62
C. Struktur Penduduk 63
D. Jumlah Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 65

E. Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan 66
F. Laju Pertumbuhan Penduduk 67
G. Rasio Penduduk 68
H. Kepadatan Penduduk 69
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 71
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 71
A. Pertumbuhan PDRB 72
B. Laju Pertumbuhan Ekonomi 75
C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 76
D. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) 77
E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78
F. Kemiskinan 79
G. Pengangguran 80
2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua 83
A. Jumlah Kematian Ibu 83
B. Jumlah Kematian Bayi 84
C. Usia Harapan Hidup 85
D. Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) 86
E. Jaminan Kesehatan Masyarakat 87
F. Imunisasi 88
G. Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit 89
H. Indeks Keluarga Sehat 90
2.1.2.3 Pendidikan Berkulaitas dan Merata 92
A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 92
B. Angka Harapan Lama Sekolah 93
C. Angka Partisipasi Murni 94
D. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun 95
E. Kemampuan Literasi dan Numerasi 95

F. Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan 96
G. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ... 100
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif 101
A. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 102
2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 103
A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama 103
B. Kebudayaan 110
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif..... 113
A. Indeks Pembangunan Keluarga 113
B. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.. 115
C. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 116
D. Indeks Pembangunan Gender 117
E. Indeks Ketimpangan Gender 118
F. Indeks Pemberdayaan Gender 119
G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..... 120
H. Indeks Pembangunan Pemuda..... 123
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 124
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia 124
A. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) 124
B. Penduduk Bekerja..... 125
C. Kepemudaan dan Olah Raga 128
2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ... 130
A. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB..... 130
B. Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB 131
C. Pariwisata 132
D. Koperasi 135

E. Usaha Kecil, dan Menengah 136
F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 137
G. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB ADHB..... 138
H. Indeks Inovasi Daerah 139
I. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita 140
2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru..... 141
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan..... 141
2.1.3.4 Transformasi Digital..... 143
A. Persandian 143
B. Statistik 144
C. Perhubungan 145
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 152
A. Penanaman Modal 152
B. Pembentukan Modal Tetap Bruto 153
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi..... 154
A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 154
B. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum dan Sanitasi 159
C. Persentase Desa mandiri (Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong) 160
D. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur..... 161
E. Penataan Ruang..... 162
F. Pengairan..... 166
G. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 171
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro..... 172
A. Rasio Pajak Terhadap PDRB..... 172
B. Tingkat Inflasi..... 180

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 181
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif 181
A. Indeks Reformasi Hukum 182
B. Indeks Pelayanan Publik 182
C. Komunikasi dan informatika (Indeks SPBE) .. 183
D. Perpustakaan 183
E. Kearsipan 187
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh Dan Demokrasi Substansial ... 189
A. Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Simeulue 189
B. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 191
C. Sosial 191
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya gentar kawasan 194
A. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 194
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah... 195
A. Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Berdasarkan Indikator Kinerja Makro (IKM) Tahun 2020–2024 195
B. Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020–2024 197
C. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 202
2.2 Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue 215
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 216
2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK 217
2.2.1.2 Pendapatan Daerah 218
A. Pendapatan Asli Daerah 220
B. Pendapatan Transfer 223
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 224

2.2.1.3 Belanja Daerah 226
A. Belanja Operasi..... 229
B. Belanja Modal..... 230
C. Belanja Tak Terduga 232
D. Belanja Transfer 232
2.2.1.4 Pembiayaan Daerah..... 233
2.2.1.5 Neraca Daerah 238
A. Aset..... 244
B. Kewajiban 246
C. Solvabilitas..... 247
D. Ekuitas 248
2.2.1.6 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020–2024 249
2.2.2 Kerangka Pendanaan 251
2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan 251
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 253
B. Pendapatan Transfer 254
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 255
2.2.2.2 Belanja Daerah 255
A. Belanja Operasi..... 258
B. Belanja Modal..... 260
C. Belanja Tidak Terduga..... 261
D. Belanja Transfer 262
2.2.2.3 Pembiayaan Daerah..... 263
A. Penerimaan Pembiayaan..... 265
B. Pengeluaran Pembiayaan 265
C. Pembiayaan Netto 266
2.3. Evaluasi Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024..... 266
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 278
B. Aspek Pelayanan Umum 279

C. Kesimpulan Hasil Evaluasi 280
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis 281
2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah 281
2.4.2 Isu Strategis 295
A. Isu Strategis Global 295
B. Isu strategis Nasional 296
C. Isu Strategis Aceh 299
D. Isu Strategis Kabupaten Simeulue 300
2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 305
A. SPM Pendidikan 306
B. SPM Kesehatan 307
C. SPM Pekerjaan Umum 308
D. SPM Perumahan Rakyat 308
E. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 309
F. SPM Sosial 309
2.6. Rencana Pembangunan Infrastruktur Sumber Pendanaan APBN dan APBA 310
2.6.1 Rencana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Simeulue Sumber Pendanaan APBA 310
A. Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkar Simeulue 310
B. Lanjutan Pembangunan Irigasi Sigulai seluas 1983 Ha. 312
C. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kota Sinabang Kabupaten Simeulue 313
D. Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Simeulue 315
E. Pembangunan gedung transito transmigrasi 317
F. Pembangunan Rumah Layak Huni. 317
2.6.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Simeulue Sumber APBN 317

A. Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkar Simeulue 317
B. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo. 318
C. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi PPK Trans Simeulue. 319
D. Peningkatan Layanan Pelabuhan Penumpang Lokal melalui Penyediaan Armada Kapal Penumpang Lokal sebanyak 2 unit. 320
E. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Modernisasi Armada Tangkap Ikan Kapal Pukat 30 GT 321
2.7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Simeulue 322
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .. 325
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 325
3.1.1 Visi 325
3.1.2 Misi 327
3.1.3 Keterkaitan Visi dan Misi 328
3.1.4 Penyelarasan Visi dan Misi Kabupaten Simeulue dengan Visi Misi dan Aceh dan Nasional 329
3.1.5 Penyelarasan Visi dan Misi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPK Simelue Tahun 2025-2045 334
3.1.6 Tujuan dan Sasaran 338
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Simeulue 350
3.2.1 Strategi Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 350
3.2.2 Strategi Pencapaian Simeulue Bermartabat dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru melalui Pembangunan Wilayah Berbasis Potensi Kewilayaha. 361
3.2.3 Strategi Pendanaan dalam Mewujudkan Simeulue Bermartabat dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru. 383
3.2.4 Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 385
3.2.5 Penahapan Pembangunan 398

3.2.6 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 405
3.2.6.1 Program Prioritas Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2029 405
3.2.7 Prioritas Pembangunan Kabupaten Simeulue 459
3.2.8 Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025–2029 terhadap Kabupaten Simeulue 467
3.2.9 Arah Pembangunan Kewilayahan Aceh RPJMA Tahun 2025–2029 terhadap Kabupaten Simeulue 470
3.2.10 Dukungan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 terhadap Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN dan RPJMA Tahun 2025–2029 472
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 477
4.1 Program Perangkat Daerah 477
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 568
BAB V PENUTUP 599
5.1 Pedoman Transisi 599
5.2 Kaidah Pelaksanaan 600

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2024	18
Tabel 2.2.	Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Ketinggian Tempat	19
Tabel 2.3.	Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan	20
Tabel 2.4.	Perkembangan Curah dan Hari Hujan di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	27
Tabel 2.5.	Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Simeulue	28
Tabel 2.6.	Hasil Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Simeulue	30
Tabel 2.7.	Produktivitas Lahan untuk Kebutuhan Pangan di Kabupaten Simeulue	31
Tabel 2.8.	Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Lahan Pangan (Ha)	32
Tabel 2.9.	Perkembangan Bidang Pembangkit dan Distribusi PT PLN Area Kabupaten Simeulue Tahun 2020 – 2024	34
Tabel 2.10.	Jumlah KWH Terjual dan Jumlah Pelanggan Pada PT PLN (Persero) Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2023	36
Tabel 2.11.	Rasio Luas Lahan Baku Sawah Berdasarkan Jumlah Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun 2024	42
Tabel 2.12.	Luas Tanam dan Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Simeulue, Tahun 2020-2024	42
Tabel 2.13.	Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Masing-Masing kecamatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2024	44
Tabel 2.14.	Jumlah Kelompok Tani Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	45
Tabel 2.15.	Klasifikasi Kategori Rentang Nilai IKLH	47
Tabel 2.16.	Data Pemantauan Aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2024	47
Tabel 2.17.	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	48
Tabel 2.18.	Perkembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	51
Tabel 2.19.	Kajian Bahaya di Kabupaten Simeulue Tahun 2024	55
Tabel 2.20.	Kajian Kerentanan di Kabupaten Simeulue Tahun 2024	57

Tabel 2.21.	Tingkat Kajian Risiko di Kabupaten Simeulue Tahun 2024	58
Tabel 2.22.	Klasifikasi Kelas Risiko Bencana	60
Tabel 2.23.	Jumlah Penduduk Kabupaten Simeulue Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 – 2024.....	62
Tabel 2.24.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Simeulue Tahun 2024	65
Tabel 2.25.	Kepadatan Penduduk per Kecamatan (Jiwa/Km2)	71
Tabel 2.26.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Simeulue, 2020-2024 (Juta Rupiah).....	72
Tabel 2.27.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Simeulue, 2020-2024 (Juta Rupiah).....	73
Tabel 2.28.	Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2020 – 2024 (Persen)	74
Tabel 2.29.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik, Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024.....	81
Tabel 2.30.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024.....	81
Tabel 2.31.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024.....	90
Tabel 2.32.	Perkembangan APM Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	94
Tabel 2.33.	Perkembangan APS Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 ...	95
Tabel 2.34.	Perkembangan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	96
Tabel 2.35.	Capaian Indikator SPM Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	97
Tabel 2.36.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	101
Tabel 2.37.	Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Simuelue Tahun 2025	102

Tabel 2.38. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2020-2024 sesusai Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 104

Tabel 2.39. Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Simeulue berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024 106

Tabel 2.40. Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infaq Kabupaten Simeulue Tahun 2020 – 2024 107

Tabel 2.41. Nama Lembaga Pendidikan Dayah, Alamat, Tahun Berdiri, Tipe dan Status Dayah Tahun 2024 108

Tabel 2.42. Perkembangan Lembaga Pendidikan Dayah (LPD) Tahun 2020-2024 109

Tabel 2.43. Perkembangan Peran Ulama dalam menetapkan Fatwa dan Tausiyah dan Pengkaderan Ulama Tahun 2020-2024 110

Tabel 2.44. Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 111

Tabel 2.45. Situs Cagar Budaya di Kabupaten Simeulue 112

Tabel 2.46. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024 114

Tabel 2.47. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 115

Tabel 2.48. Perkembangan Akseptor KB dan Jumlah Pasangan Usia Subur Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 121

Tabel 2.49. Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2020-2024 121

Tabel 2.50. Perkembangan Kampung KB Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024 122

Tabel 2.51. Jumlah Kampung KB yang Aktif Tahun 2024 122

Tabel 2.52. Status Pekerja Utama Tahun 2024 126

Tabel 2.53. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2024 127

Tabel 2.54. Organisasi Pemuda Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 129

Tabel 2.55. Perkembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Simleulue Tahun 2020-2024 133

Tabel 2.56. Jumlah Usaha Akomodasi di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 133

Tabel 2.57. Perkembangan Obyek Wisata yang Berkembang Menurut Kecamatan di Kabupaten Simeulue s.d Tahun 2024 134

Tabel 2.58. Perkembangan Koperasi di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 135
Tabel 2.59. Jumlah UMKM Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024..... 136
Tabel 2.60. Jumlah Pelabuhan/Terminal/Bandara di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 148
Tabel 2.61. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 150
Tabel 2.62. Nilai Investasi Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024..... 152
Tabel 2.63. Perkembangan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 153
Tabel 2.64. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024..... 154
Tabel 2.65. Proporsi Panjang Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Tahun 2024 156
Tabel 2.66. Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2020-2024.. 157
Tabel 2.67. Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 158
Tabel 2.68. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 161
Tabel 2.69. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 162
Tabel 2.70. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 163
Tabel 2.71. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045 165
Tabel 2.72. Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan Tahun 2024 168
Tabel 2.73. Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2024..... 168
Tabel 2.74. Hasil Capaian Persentase Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten Simeulue dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024 168
Tabel 2.75. Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (Km) 170
Tabel 2.76. Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Simeulue 2020-2024..... 172

Tabel 2.77. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 182
Tabel 2.78. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Simeulue 2020-2024..... 182
Tabel 2.79. Jumlah Sarana dan Prasaran Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024..... 184
Tabel 2.80. Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Umum Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 184
Tabel 2.81. Jumlah Tenaga Fungsiaonal Perpustakaan Umum Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024..... 186
Tabel 2.82. Perkembangan Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 187
Tabel 2.83. SDM Pengelola Arsip Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 . 188
Tabel 2.84. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru IDI..... 190
Tabel 2.85. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 195
Tabel 2.86. Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Berdasarkan Indikator Kinerja Makro Tahun 2020-2024..... 196
Tabel 2.87. Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024..... 198
Tabel 2.88. Capaian Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024 203
Tabel 2.89. Pengesahan/Penetapan APBK Tahun 2020-2024 217
Tabel 2.90. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024..... 219
Tabel 2.91. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 227
Tabel 2.92. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024..... 234
Tabel 2.93. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 237
Tabel 2.94. Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 239
Tabel 2.95. Kontribusi Aset Daerah Tahun 2024 245
Tabel 2.96. Kontribusi Kewajiban Tahun 2024 248

Tabel 2.97.	Kontribusi Ekuitas Tahun 2024	249
Tabel 2.98.	Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024	250
Tabel 2.99.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026-2030.....	252
Tabel 2.100.	Proyeksi Belanja Kabupaten Simeulue Tahun 2026-2030	257
Tabel 2.101.	Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Simeulue Tahun 2026-2030.	264
Tabel 2.102.	Evaluasi Hasil Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024	267
Tabel 2.103.	Peningkatan Jalan Lingkar Simeulue pada Ruas Jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo sepanjang, 62,30 Km dengan rincian ruas.....	311
Tabel 2.104.	Pembangunan Jembatan Lingkar Simeulue pada Ruas Jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo sepanjang, 308meter dengan rincian ruas	312
Tabel 2.105.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	319
Tabel 3.1.	Keterkaitan Misi terhadap Pokok-Pokok Visi Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029	329
Tabel 3.2.	Penyelarasan Visi dan Misi Kabupaten Simeulue dengan Visi dan Misi Aceh dan Nasional	330
Tabel 3.3	Penyelarasan Visi dan Misi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPK Simelue Tahun 2025-2045.....	335
Tabel 3.4.	Tujuan dan Sasaran RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029	341
Tabel 3.5.	Strategi dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029	353
Tabel 3.6.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	386
Tabel 3.7.	Keselarasan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Strategi dan Arah Kebijakan	393
Tabel 3.8.	Penahapan Pembangunan RPMJD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2029.....	399
Tabel 3.9.	Arah Kebijakan dalam Penahapan Pembangunan.....	401
Tabel 3.10.	Program Prioritas RPJMK Kabupaten Simuelue Tahun 2025-2029	406
Tabel 3.11.	Dukungan RPJMK Simeulue terhadap Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2025–2029 dan RPJMA Aceh 2025–2029	474

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah 478
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 569
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) 571
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) 576

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2020-2024	36
Grafik 2.2	Perkembangan Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	37
Grafik 2.3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	38
Grafik 2.4	Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	39
Grafik 2.5	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024.....	41
Grafik 2.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Tahun 2020-2024.....	50
Grafik 2.7	Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024.....	52
Grafik 2.8	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	60
Grafik 2.9	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	61
Grafik 2.10	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	62
Grafik 2.11	Proyeksi Penduduk Kabupaten Simeulue 5 (lima) Tahun Kedepan	66
Grafik 2.12	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 (Jiwa/Km2).....	68
Grafik 2.13	Rasio Penduduk yang Kekerja Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	69
Grafik 2.14	Kepadatan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	70
Grafik 2.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024 (Persen)	75
Grafik 2.16	PDRB Kabupaten Simeulue, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah).....	76
Grafik 2.17	Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	78
Grafik 2.18	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	79

Grafik 2.19	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2020–2024 (%)	80
Grafik 2.20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	82
Grafik 2.21	Jumlah kematian Ibu di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	83
Grafik 2.22	Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	84
Grafik 2.23	Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	85
Grafik 2.24	Prevalensi Gizi Buruk & Gizi Kurang Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	86
Grafik 2.25	Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024	88
Grafik 2.26	Cakupan Imunisasai Dasar Lengkap Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	89
Grafik 2.27	Prevalensi Stunting Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024....	92
Grafik 2.28	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	93
Grafik 2.29	Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024	93
Grafik 2.30	Indeks Kerukunan Umat Beragama Indonesia Kabupaten Simulue Tahun 2020–2024	105
Grafik 2.31	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	116
Grafik 2.32	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	117
Grafik 2.33	Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	118
Grafik 2.34	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	119
Grafik 2.35	Tingkat Ketergantungan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	125
Grafik 2.36	Jumlah Pemuda Menurut Kelompok Umur Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	128
Grafik 2.37	Jenis Olahraga Paling Disukai/Digemari.....	130

Grafik 2.38	Perkembangan Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 (dalam juta)	131
Grafik 2.39	Perkembangan Kontribusi dan Distribusi Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	132
Grafik 2.40	TPAK Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024	137
Grafik 2.41	Kontribusi dan Distribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB ADHB Kab. Simeulue Tahun 2020-2024	138
Grafik 2.42	Indek Inovasi Daerah Tahun 2020-2024	139
Grafik 2.43	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	140
Grafik 2.44	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB Simeulue, Aceh, dan Nasional Tahun 2020–2024	142
Grafik 2.45	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	146
Grafik 2.46	Perbandingan Sumber Data Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Simeulue Tahun 2024	172
Grafik 2.47	PDRB ADHB Simeulue, 2020-2024 (juta rupiah)	173
Grafik 2.48	PDRB ADHK Simeulue, 2020-2024 (juta rupiah)	174
Grafik 2.49	Distribusi Persentase PDRB ADHB Simeulue Menurut Kategori, Tahun 2024 (%)	175
Grafik 2.50	Distribusi Persentase PDRB ADHB Simeulue Menurut Sektor Tahun 2024 (%)	176
Grafik 2.51	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	177
Grafik 2.52	Laju Pertumbuhan Ekonomi Simeulue Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2024	178
Grafik 2.53	PDRB Per Kapita Kabupaten Simeulue, 2020-2024 (juta rupiah)	179
Grafik 2.54	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024	180
Grafik 2.55	Perkembangan Harga Kondisi Januari – Februari Tahun 2024 .	181

Grafik 2.56 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Simeulue Tahun 2020 - 2024 183
Grafik 2.57 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 – 2024 185
Grafik 2.58 Capaian SPM Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 306
Grafik 2.59 Capaian SPM Kabupaten Simeulue Per Bidang Tahun 2020-2024 310

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ..	8
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Simeulue.....	17
Gambar 2.2.	Peta Ketinggian Tempat Diatas Permukaan Laut	20
Gambar 2.3.	Peta Kemiringan Lahan (Kelerengan).....	21
Gambar 2.4.	Peta Geologi (Batuan) Kabupaten Simeulue	23
Gambar 2.5.	Peta Sebaran Jenis tanah Pada Kabupaten Simeulue.....	25
Gambar 2.6.	Peta Ketersediaan Lahan Pangan di Kabupaten Simeulue	32
Gambar 2.7.	Struktur Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2024 (jiwa) ...	64
Gambar 2.8.	Peta Lokasi dan Foto Existing Irigasi Sigulai Kabupaten Simeulue	313
Gambar 2.9.	Peta tempat SPAM IKK PDAM Tirta Fulawan	314
Gambar 2.10.	Peta Lokasi dan Foto Existing Stadion Kabupaten Simeulue	316
Gambar 2.11.	Peta Lokasi dan Foto Jalur Pelabuhan ke luar Kabupaten Simeulue.	318
Gambar 2.12.	Peta Lokasi dan Foto Pelabuhan Lokal di Kabupaten Simeulue	321

PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE



BAB I
PENDAHULUAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2025-2029



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan amanat konstitusional yang dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pemerintahan di Indonesia, mulai dari pemerintah pusat hingga ke tingkat desa. Tujuan utama dari kegiatan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta menjadi perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat.

Agar pembangunan dapat terlaksana secara terarah, efektif, dan efisien, diperlukan proses perencanaan yang sistematis dan berbasis hukum. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tingkat daerah, kepala daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara berjenjang yang terdiri dari:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 20 tahun;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 5 tahun;
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Petunjuk teknis mengenai penyusunan dokumen-dokumen tersebut diatas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, karena bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan menyusun dokumen RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program yang diusung selama masa kampanye dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten peserta Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, dan pasangan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Simeulue adalah **Mohammad Nasrun Mikaris, S.H., M.H. dan Nusar Amin, S.Pd.**

Bupati dan Wakil Bupati Simeulue terpilih telah resmi dilantik oleh Gubernur Aceh pada tanggal 8 Maret 2025. Sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, maka terhitung sejak pelantikan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Simeulue berkewajiban untuk

segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Simeulue Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pembangunan 5 (lima) tahunan pada masa kepemimpinan.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMK memiliki peran strategis dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang terukur dan terarah. RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 juga merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Simeulue Tahun 2025–2045. Penyusunannya dilaksanakan melalui 6 (enam) tahap yaitu: Persiapan penyusunan, Penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan lengkap, Pelaksanaan Musrenbang RPJMK, Perumusan rancangan akhir, dan Penetapan Peraturan Daerah (Qanun) tentang RPJMK. Dalam penyusunannya, RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 menggunakan 4 (empat) pendekatan utama:

- Teknokratik, dengan mengedepankan metode ilmiah dan berbasis data;
- Partisipatif, melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan;
- Politis, melalui pembahasan bersama DPRK Simeulue;
- Top-down dan bottom-up, yakni menggabungkan arahan kebijakan nasional dan provinsi dengan aspirasi masyarakat lokal.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Simeulue Tahun 2025–2029 disusun melalui tahapan yang berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

Instruksi tersebut mengatur langkah-langkah teknis yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahunan, agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan pembangunan provinsi.

Adapun tahapan penyusunan RPJMK Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui beberapa tahap utama sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Tahap Persiapan Penyusunan RPJMK

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJMK
   Dilaksanakan sebagai langkah awal untuk menyiapkan personel yang bertanggung jawab terhadap penyusunan RPJMK, dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025.

b. Orientasi mengenai RPJMK

Memberikan pemahaman kepada anggota tim mengenai tujuan, ruang lingkup, serta tata cara penyusunan RPJMK, dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2025.

c. Penyusunan Agenda Kerja Tim
Menetapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan RPJMK, dilaksanakan pada tanggal 9 April 2025.

d. Penyiapan Data dan Informasi PPD pada SIPD

Mengumpulkan dan menyiapkan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah yang diinput ke dalam SIPD, dilaksanakan pada tanggal 10-23 April 2025.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMK

a. Penyempurnaan Rantek RPJMK
Dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik, dilaksanakan pada tanggal 10-23 April 2025.

b. Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah
Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah, dilaksanakan pada tanggal 10-23 April 2025.

c. Perumusan Tujuan dan Sasaran
Menentukan arah capaian pembangunan jangka menengah, dilaksanakan pada tanggal 10-23 April 2025.

d. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan
Menetapkan strategi pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah, dilaksanakan pada tanggal 10-23 April 2025.

e. Perumusan Program Pembangunan Daerah
Menentukan program prioritas pembangunan lintas sektor, dilaksanakan pada tanggal 10-23 April 2025.

f. Perumusan Program Perangkat Daerah
Menguraikan program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD, dilaksanakan pada tanggal 10-23 April 2025.

g. Telaah KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
Melakukan kajian untuk memastikan rencana pembangunan berwawasan lingkungan, dilaksanakan pada tanggal 10-23 April 2025.

h. Forum Konsultasi Publik (FKP)
Dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025.

i. Pembahasan Ranwal RPJMK dengan DPRK)
Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Bupati dan DPRK, dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025.

j. Konsultasi Ranwal RPJMK ke Gubernur
Konsultasi Ranwal RPJMK ke Gubernur dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2025.

k. Surat Edaran (SE) Bupati tentang Penyempurnaan Ranwal Renstra PD

Diterbitkan untuk menyinergikan Renstra Perangkat Daerah dengan Ranwal RPJMK, dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2025.

3. Tahap Penyusunan Rancangan RPJMK

a. Pelaksanaan Musrenbang RPJMK

Dilaksanakan wadah pembahasan bersama rancangan pembangunan daerah, dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025.

4. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMK

a. Penyesuaian Rancangan RPJMK menjadi Rancangan Akhir RPJMK

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang RPJMK, dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025.

b. Penyampaian Rancangan Akhir RPJMK ke APIP

Penyampaian Rancangan Akhir RPJMK kepada APIP untuk dilakukan review internal, dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025.

c. Penyampaian Rancangan Akhir (Rankhir) RPJMK

Disusun dalam bentuk Rancangan Qanun RPJMK dan disampaikan kepada Sekda melalui Bagian Hukum untuk harmonisasi, paling lambat 5 hari setelah Musrenbang, dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025.

d. Proses Harmonisasi Rancangan Qanun RPJMK

Dilakukan oleh Bagian Hukum bersama Sekda, dilaksanakan pada tanggal 08 September 2025.

e. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun RPJMK dengan DPRD

Dilakukan untuk memperoleh persetujuan bersama, dilaksanakan pada tanggal 15 September 2025.

5. Tahap Penetapan RPJMK

a. Penyampaian Rancangan Qanun RPJMK kepada Gubernur

Disampaikan untuk dilakukan evaluasi, dilaksanakan pada tanggal 17 September 2025.

b. Evaluasi oleh Gubernur

Pemerintah provinsi melakukan penilaian terhadap substansi dan kesesuaian rancangan RPJMK, dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025.

Dokumen RPJMK ini akan menjadi acuan utama bagi SKPK Simeulue menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) setiap tahunnya selama periode 2025–2029.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4590);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
24. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);
25. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 9);
26. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 76);
27. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022 Nomor 87).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, serta guna memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap keterkaitan antar dokumen perencanaan, termasuk hubungan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 dengan dokumen-dokumen lainnya seperti RPJPN, RPJMN, RPJPA, RPJMA, RPJPK Simeulue, RTRW, KLHS, GDPK, TPB, serta dokumen sektoral terkait lainnya. Adapun gambaran hubungan antar dokumen sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

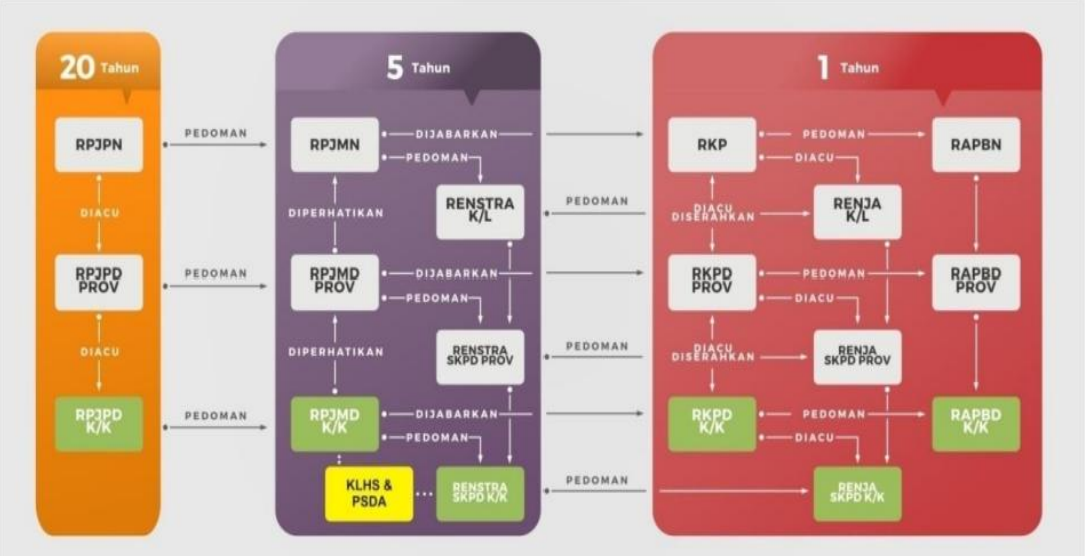

Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diolah.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan Gambar 1.1 tergambar jelas hubungan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 dengan dokumen perencanaan lainnya bertujuan untuk menjamin adanya sinkronisasi, konsistensi, dan integrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan visi jangka panjang, kebijakan nasional, perencanaan pembangunan provinsi, serta penataan ruang wilayah. Adapun hubungan tersebut yaitu:

1. **Hubungan dengan RPJPK Simeulue Tahun 2025–2045**

   RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama pelaksanaan RPJPK Simeulue Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan dalam RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan

jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPK Simeulue Tahun 2025–2045. Keterhubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Keselarasan Visi dan Misi**
   Visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 harus mendukung dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPK Simeulue Tahun 2025–2045.

b. **Konsistensi Periodesasi Pembangunan**
   RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 merupakan tahapan pertama (2025–2029) dalam rangkaian empat tahap pembangunan jangka panjang hingga tahun 2045, sebagaimana tercantum dalam Bab V RPJPK Simeulue Simeulue Tahun 2025–2045 tentang Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan.

c. **Keterpaduan Indikator Kinerja**
   Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPK Simeulue Simeulue Tahun 2025–2045 menjadi acuan bagi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029, sehingga capaian pembangunan daerah pada periode 2025–2029 berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran jangka panjang hingga 2045.

d. **Keterkaitan Program dan Prioritas**
   Program-program prioritas dalam RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 dirancang untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang daerah yang berorientasi pada transformasi ekonomi, penguatan ketahanan sosial dan lingkungan, peningkatan daya saing SDM, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif.

2. **Hubungan dengan RPJM Nasional Tahun 2025–2029**
   Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029, penyelarasan antara RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025–2029 dilakukan untuk memastikan kesesuaian arah kebijakan nasional dan daerah dalam satu kerangka pembangunan yang terpadu. Hubungan antara kedua dokumen tersebut meliputi:

   a. **Kesamaan Periode Pembangunan (Periodesasi)**
      RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 disusun untuk periode yang sama dengan RPJM Nasional Tahun 2025–2029, sehingga sinkronisasi waktu dan tahapan pembangunan nasional–daerah dapat terjaga.

b. Keterpaduan Arah Kebijakan dan Strategi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 harus mendukung Arah Pembangunan Kewilayahan RPJM Nasional Tahun 2025–2029, khususnya dalam konteks wilayah kepulauan, penguatan konektivitas antarwilayah, transformasi ekonomi maritim, dan ketahanan lingkungan.

c. Penyelarasan Indikator Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 menjadi acuan penyusunan Indikator Kinerja Daerah (IKD) di Kabupaten Simeulue, agar capaian daerah dapat terukur dalam konteks pembangunan nasional.

d. Program Prioritas Nasional dan Dukungan Daerah

Program prioritas perangkat daerah dalam RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I RPJM Nasional Tahun 2025–2029, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi wilayah, ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan digitalisasi tata kelola pemerintahan.

3. Hubungan dengan RPJMA Tahun 2025–2029

RPJMK Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029 disusun secara sinkron dan selaras dengan RPJMA Tahun 2025–2029. Kedua dokumen ini disusun dalam periode yang sama dengan memperhatikan hasil Musrenbang Provinsi dan forum koordinasi perencanaan pembangunan antarwilayah, sehingga arah kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Aceh.

RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 harus memperhatikan dokumen RPJMA Tahun 2025–2029 agar tercipta keterpaduan pembangunan antarwilayah dalam lingkup Provinsi Aceh. Sinkronisasi ini meliputi capaian kinerja provinsi, isu strategis regional, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh, termasuk alokasi sumber daya dan lokasi prioritas pembangunan. Dengan demikian, RPJMK Simeulue tidak hanya berorientasi pada kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan regional.

a. Sinkronisasi Arah dan Strategi Pembangunan

RPJMK Simeulue dan RPJMA disusun dengan arah dan strategi pembangunan yang saling mendukung, dengan memperhatikan isu-isu strategis kewilayahan, potensi sumber daya, serta kebijakan pembangunan lintas sektor. Sinkronisasi ini dilakukan untuk memastikan

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Simeulue mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Aceh secara terpadu

b. Keselarasan Visi dan Misi Pembangunan

Visi dan misi RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 disusun sejalan dan saling mendukung dengan visi dan misi pembangunan Aceh sebagaimana termuat dalam RPJMA Tahun 2025–2029. Keduanya menekankan prinsip pembangunan yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman serta kearifan lokal, guna mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan sejahtera.

c. Keterpaduan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan

RPJMK Simeulue memperhatikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Aceh yang bersifat lintas wilayah dan sektoral. Meskipun indikator kinerja pembangunan dalam RPJMK tidak secara langsung mengacu pada indikator provinsi, penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk menjamin kontribusi nyata Simeulue terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi.

d. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Prioritas

Program prioritas dalam RPJMK Simeulue disusun agar selaras dengan arah dan prioritas pembangunan Provinsi Aceh. Sinergi ini dilaksanakan melalui koordinasi antarperangkat daerah dan kerja sama lintas kabupaten/kota, sehingga pembangunan di wilayah kepulauan Simeulue terintegrasi dengan kebijakan pembangunan regional

4. Hubungan dengan RTRW Nasional dan RTRW Aceh

Keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi menjadi penting dalam mengarahkan pembangunan daerah yang berbasis ruang. Dokumen tata ruang ini memastikan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara yang tertib, berdaya guna, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dalam RPJMK harus mengacu pada ketentuan RTRW, agar tercipta pembangunan yang aman, produktif, berwawasan lingkungan, serta mampu mengantisipasi potensi konflik pemanfaatan ruang.

5. Hubungan dengan RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014–2034

RTRW Kabupaten Simeulue menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan pokok dan arah pembangunan daerah, terutama dalam aspek penataan ruang wilayah. Melalui RTRW, pemanfaatan ruang diatur agar sesuai dengan peruntukannya dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJMK yang disusun akan selaras dengan pola ruang, struktur ruang, dan kawasan strategis daerah yang ditetapkan dalam RTRW.

6. **Hubungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

   KLHS merupakan instrumen penting untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMK memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan hidup. Hasil kajian KLHS menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, serta memperhatikan aspek mitigasi dan adaptasi bencana. Dengan integrasi KLHS ke dalam RPJMK, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

7. **Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

   RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 juga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan sektoral dan tematik lainnya, seperti:

   - Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)
   - Standar Pelayanan Minimal (SPM)
   - Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)
   - Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2024–2045
   - RAD serta dokumen sektor lintas perangkat daerah dan sektor lainnya.

Dengan demikian, penyusunan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 merupakan proses integratif yang mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan untuk mewujudkan pembangunan terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan utama bagi seluruh komponen pembangunan daerah baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Simeulue dan juga untuk mengarahkan seluruh upaya pembangunan agar berjalan secara sinergis, terkoordinasi, dan saling melengkapi satu sama lain.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Simeulue terpilih ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang sistematis, terukur, dan implementatif.
2. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergis, berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Simeulue.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, guna mengoptimalkan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, sinergi serta keterpaduan antar dokumen perencanaan kabupaten, nasional dan provinsi.
4. Menyediakan tolok ukur yang dapat digunakan sebagai dasar pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan serta capaian pembangunan daerah baik secara jangka menengah maupun tahunan.
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya, seperti Renstra SKPK, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD Kabupaten Simeulue.
6. Menjadi instrumen evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2025–2029.

1.5 Sistematika Dokumen RPJMK

RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan konteks awal penyusunan dokumen RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029, serta menjabarkan maksud, tujuan, dan kedudukan dokumen ini dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan latar belakang urgensi dan pentingnya penyusunan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Berisi daftar peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RPJMK dan terkait tata cara penyusunan RPJMK.

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMK dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Menjelaskan keterkaitan, konsistensi, dan penyelarasan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 sebagai panduan strategis pembangunan daerah lima tahunan.

1.5 Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran umum mengenai struktur dan isi dokumen RPJMK, mulai dari BAB I hingga BAB V.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menyajikan deskripsi umum mengenai kondisi Kabupaten Simeulue yang mencakup kondisi geografis dan demografis, tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, kualitas pelayanan umum, kondisi keuangan daerah berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun ke depan, serta permasalahan dan isu strategis.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Subbab ini menggambarkan situasi dan karakteristik Kabupaten Simeulue sebagai landasan analisis perencanaan pembangunan ke depan. Uraian meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Subbab ini menyajikan kondisi fiskal daerah yang mencakup realisasi APBD selama 5 (lima) tahun terakhir serta proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan. Informasi ini penting sebagai dasar dalam menyusun target pembangunan dan pembiayaan program prioritas.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Subbab ini membahas tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Simeulue dalam pelaksanaan pembangunan serta isu strategis yang memerlukan penanganan lintas sektor. Identifikasi ini menjadi acuan untuk merumuskan prioritas pembangunan daerah pada periode RPJMK.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan melalui rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah. Seluruh komponen ini menjadi dasar utama penyusunan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029.

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Subbab ini menjelaskan landasan filosofis, arah, dan capaian yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue selama periode 2025–2029. Rumusan dimulai dari visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun uraian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Subbab ini menyajikan langkah-langkah strategis dalam menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, sekaligus menguraikan program prioritas yang akan dilaksanakan pada periode RPJMK SIMEULUE TAHUN 2025–2029. Adapun rincian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi arah kebijakan pembangunan yang dijabarkan ke dalam program perangkat daerah serta ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

4.1 Program Perangkat Daerah

Memuat daftar program perangkat daerah Tahun 2025–2029 beserta indikator, target, dan pagu indikatif untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menguraikan target pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta kualitas tata kelola pemerintahan melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal penutup yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029, termasuk ketentuan transisi dan kaidah pelaksanaan agar dokumen ini dapat dijalankan secara efektif.

5.1 Pedoman Transisi

Subbab ini berisi arahan mengenai masa transisi antara RPJMK sebelumnya dengan RPJMK SIMEULUE TAHUN 2025–2029, sehingga kesinambungan program dan kegiatan pembangunan tetap terjaga.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Subbab ini memuat ketentuan pokok dan aturan pelaksanaan RPJMK yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE



BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2025-2029



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat dengan dasar hukum Undang-undang nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah gugusan kepulauan, Kabupaten ini terletak di sebelah Barat Provinsi Aceh dengan jarak 105 Mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil laut dari Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Simeulue memiliki gugusan kepulauan yang panjangnya + 100,2 Km dan lebarnya antara 8-28 Km. Selain itu, Kabupaten Simeulue memiliki pulau-pulau besar dan beberapa pulau kecil. Berdasarkan kondisi demikian, uraian tentang kondisi umum Kabupaten Simeulue akan dijelaskan secara rinci pada sub-bab berikut.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Pada subbab ini dijelaskan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis kabupaten Simeulue yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kecamatan dan desa.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Aceh dengan ibukota kabupaten berada di Desa Sinabang. Kabupaten Simeulue berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah utara, timur, barat, dan selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten Simeulue memiliki potensi yang besar di sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, wilayahnya yang dikelilingi Samudera Hindia memiliki keanekaragaman pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah.

Sebagai wilayah kepulauan, Simeulue memiliki gugusan kepulauan yang panjangnya +100,2 Km dan lebarnya antara 8-28 Km. Terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, 29 (dua puluh sembilan) Mukim dan 138 (seratus tiga puluh delapan) Desa. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat sekitar 147 buah pulau-pulau besar dan kecil. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan terdapat sekitar 147 buah pulau-pulau besar dan kecil di Kabupaten Simeulue. Diantaranya tiga pulau telah berpenduduk, meliputi Pulau Teupah, Pulau Siumat, dan Pulau Simeulue. Pulau lainnya meliputi Pulau Panjang, Pulau Batu Berlayar, Pulau Mincau, Pulau Simeulue Cut, Pulau Pinang, Pulau Dara, Pulau Langgeni, Pulau Linggam, Pulau Lekon, Pulau Silaut Besar, Pulau Silaut Kecil, Pulau Tepi, Pulau Ina, Pulau Alafula, Pulau Penyu, Pulau Tinggi, Pulau Kecil, Pulau Khala-khala, Pulau Asu, Pulau Baby, Pulau Lasia, Pulau Simanaha, dan Pulau-Pulau kecil lainnya.

Berdasarkan digitasi Bappeda Kabupaten Simeulue Luas wilayah daratan Simeulue adalah 183.809,50 Ha, atau setara 3,26 persen dari luas wilayah daratan Provinsi Aceh, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten Simeulue sebagai berikut :

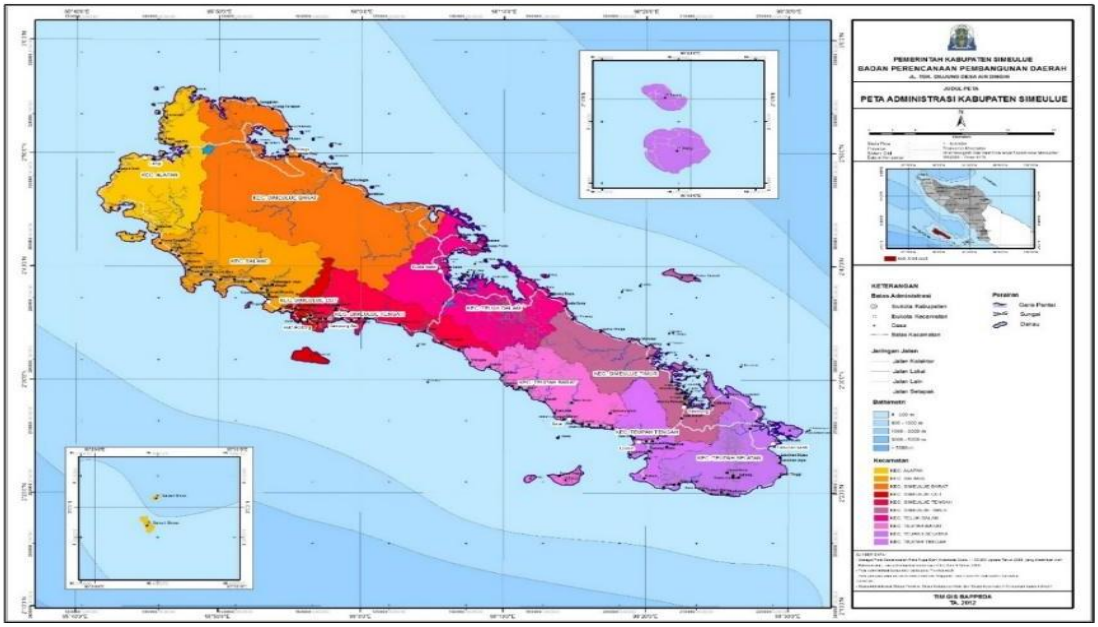

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Simeulue

Secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Simeulue terdiri dari :

1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Simeulue;
2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Simeulue;
3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
4) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Simeulue terbagi menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan 29 (dua puluh sembilan) mukim dan 138 (seratus tiga puluh delapan) desa. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Mukim	Jumlah Desa
Teupah Selatan	Labuhan Bajau	22.223,80	12,09	4	19
Simeulue Timur	Sinabang	17.597,25	9,57	4	17
Teupah Barat	Salur	14.673,05	7,98	3	18
Teupah Tengah	Lasikin	8.369,55	4,55	2	12
Simeulue Tengah	Kampung Aie	11.248,34	6,12	3	16
Teluk Dalam	Selare'e	22.467,74	12,22	2	10
Simeulue Cut	Kuta Padang	3.539,92	1,93	2	8
Salang	Nasreuhe	19.895,55	10,82	3	16
Simeulue Barat	Sibigo	44.607,40	24,27	4	14
Alafan	Langi	19.186,90	10,44	2	8
Jumlah		**183.809,50**	**100,00**	**29**	**138**

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Dari 10 (sepuluh) kecamatan diatas, Kecamatan Simeulue Barat memiliki luas wilayah yang paling luas yaitu 44,6 ribu Ha atau 24,27 persen dari total luas Kabupaten Simeulue, selanjutnya Kecamatan Teluk Dalam seluas 22,4 ribu Ha atau 12,22 persen dari total luas Kabupaten Simeulue dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Simeulue Cut, yaitu seluas 3,5 ribu Ha atau 1,93 persen dari total luas Kabupaten Simeulue. Sedangkan jumlah mukim terbanyak ada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Teupah Selatan, Simeulue Timur dan Simeulue Barat yang masing-masing terdapat 4 (empat) mukim. Lalu Kecamatan Teupah Barat, Simeulue Tengah dan Salang dengan masing-masing 3 (tiga) mukim, selanjutnya Kecamatan Teupah Tengah, Teluk Dalam, Simeulue Cut dan Alafan yang masing-masing terdapat 2 (dua) mukim. Untuk jumlah desa terbanyak ada di kecamatan Teupah Selatan yaitu 19 desa, yang kedua terbanyak ada di Kecamatan Teupah Barat dengan 18 desa dan Kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah kecamatan Alafan dan Simeulue Cut masing-masing 8 desa.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Daratan Kabupaten Simeulue tidak bersinggungan langsung dengan ibu kota Provinsi Aceh dan dengan daratan Pulau Sumatera. Secara geografis Kabupaten Simeulue berada berada pada posisi astronomi antara 02° 15’ 03’’- 02° 55’ 04’’ Lintang Utara dan 95° 40’ 15’’ - 96° 30’ 45’’ Bujur Timur. Sebanyak 106 desa (78,51 persen) dari keseluruhan 138 desa di kabupaten ini merupakan desa pesisir. Desa pesisir ini lebih dominan ditemui di Kecamatan Simeulue Timur, disamping Kecamatan Teupah Selatan dan Kecamatan Teupah Barat. Sementara desa bukan pesisir (dataran) paling banyak terdapat di Kecamatan Simeulue Tengah.

C. Topografi

Keadaan topografi Pulau Simeulue dimana titik terendah terletak pada nol meter dari permukaan laut dan titik tertinggi 600 meter di atas permukaan laut (mdpl). Hasil interpolasi garis kontur interval 50 meter dari peta rupa bumi skala 1 : 250.000, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Simeulue terletak pada ketinggian diantara 0 – 300 meter dari permukaan laut. Adapun bagian yang lain merupakan daerah berbukit-bukit dengan kemiringan di bawah 18°. Daerah tersebut terletak di bagian tengah pulau, terutama pada daerah pegunungan di sebelah utara dan selatan. Secara umum sebaran ketinggian dan lereng wilayah Kabupaten Simeulue terlihat pada tabel dan Gambar berikut :

Tabel 2.2. Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Ketinggian Tempat

Kecamatan	Klasifikasi Ketinggian Tempat (DPL)					Jumlah	
	0-50 m	50-100 m	100-200 m	200-300 m	>300 m	Ha	%
Teupah Selatan	13.496,73	7.664,06	1.004,15	58,85	-	22.223,79	12,09
Simeulue Timur	7.339,61	3.226,32	3.736,34	2.079,07	1.215,92	17.597,25	9,57
Teupah Tengah	3.972,14	2.424,30	1.824,76	148,35	-	8.369,55	4,55
Teupah Barat	4.579,50	2.865,18	3.803,99	2.059,01	1.365,38	14.673,06	7,98
Simeulue Tengah	6.007,90	2.742,29	2.198,37	294,2	5,58	11.248,33	6,12
Simeulue Cut	2.650,82	671,42	191,32	26,37	-	3.539,92	1,93
Teluk Dalam	10.798,69	5.739,08	5.027,65	872,18	30,14	22.467,75	12,22
Salang	10.582,66	4.937,09	3.920,09	430,55	25,15	19.895,55	10,82
Simeulue Barat	16.892,45	14.357,76	10.110,13	3.110,62	136,44	44.607,40	24,27
Alafan	9.566,25	6.144,13	3.134,28	339,41	2,84	19.186,91	10,44
Jumlah	85.886,75	50.771,63	34.951,08	9.418,58	2.781,46	183.809,51	100
Persentase (%)	**46,73**	**27,62**	**19,01**	**5,12**	**1,51**	**100**	

Sumber: RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

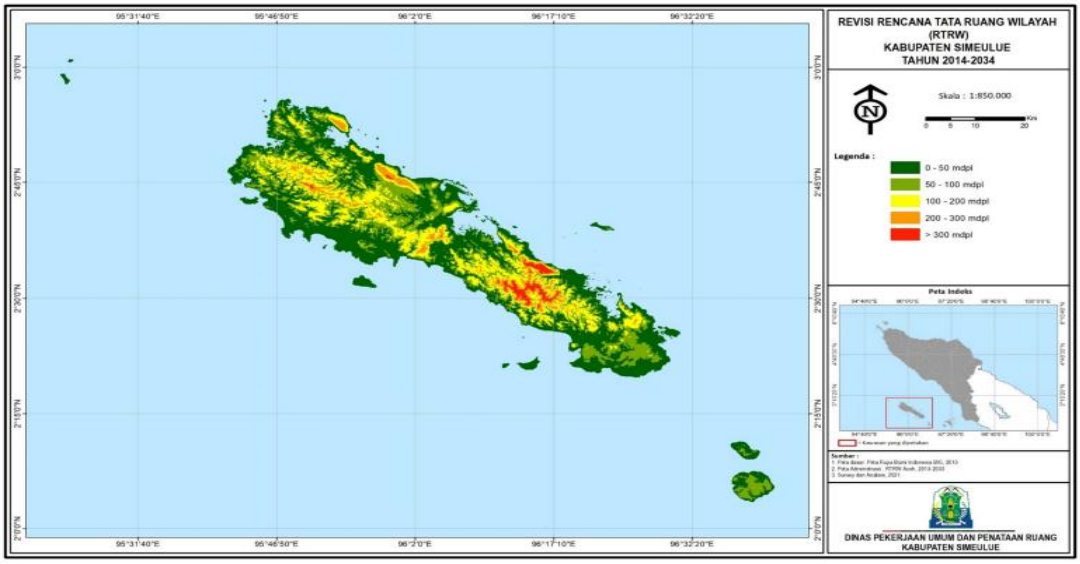

Sumber: RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

Gambar 2.2. Peta Ketinggian Tempat Diatas Permukaan Laut

Tabel 2.3. Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan

Kecamatan	Klas Lereng (%)					Jumlah	
	0-8	8-15	15-25	25-40	>40	Ha	%
Teupah Selatan	21.730,19	475,94	17,24	0,42	-	22.223,79	12,09
Simeulue Timur	9.975,63	5.596,42	1.792,73	214,13	18,34	17.597,25	9,57
Teupah Tengah	6.102,42	2.025,54	239,81	1,78	-	8.369,55	4,55
Teupah Barat	6.817,11	6.247,72	1.507,86	97,96	2,41	14.673,06	7,98
Simeulue Tengah	8.615,69	2.425,55	206,38	0,71	-	11.248,33	6,12
Simeulue Cut	3.164,37	353,75	21,80	-	-	3.539,92	1,93
Teluk Dalam	16.707,54	5.098,59	613,06	46,86	1,69	22.467,75	12,22
Salang	14.240,90	4.853,95	798,11	41,74	0,85	19.895,55	10,82
Simeulue Barat	30.805,31	12.109,49	1.649,46	41,86	1,27	44.607,40	24,27
Alafan	13.580,93	5.001,67	587,24	15,81	1,26	19.186,91	10,44
Jumlah	131.740,08	44.188,61	7.393,71	461,29	25,82	183.809,51	100
Persentase (%)	71,67	24,04	4,02	0,25	0,01	100	

Sumber: RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

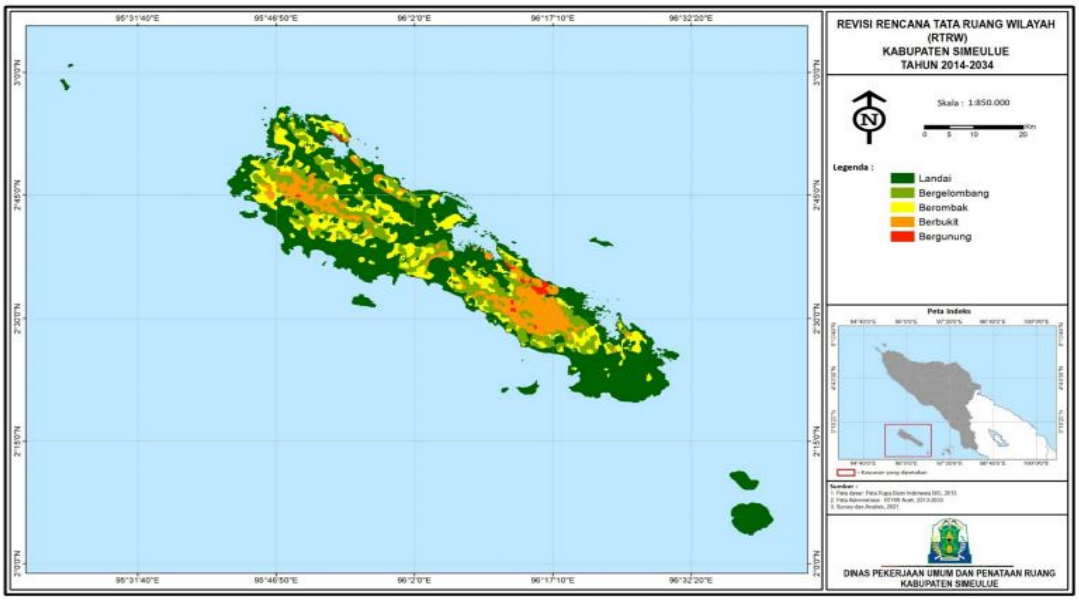

Sumber: RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lahan (Kelerengan)

D. Geologi

Secara litologi, jenis batuan penyusun Pulau Simeulue terdiri dari batuan formasi Bancuh Kuala Makmur yang merupakan batuan tertua dan merupakan batuan dasar (*basement rock*) di pulau ini. Formasi bancuh atau campur aduk ini berupa bongkah batuan aneka bahan yang terdiri dari batuan basal, gabro, sedimen malih, filit, batu sabak dan rijang. Bongkah–bongkah batuan dengan berbagai ukuran (dari beberapa cm sampai lebih dari 250 m) terdapat dalam matriks atau massa dasar batu lumpur) di pulau ini. Formasi bancuh atau campur aduk ini berupa bongkah batuan aneka bahan yang terdiri dari batuan basal, gabro, sedimen malih, filit, batu sabak dan rijang. Bongkah–bongkah batuan dengan berbagai ukuran (dari beberapa cm sampai lebih dari 250 m) terdapat dalam matriks atau massa dasar batu lumpur dan batu lempung yang tergerus kuat. Formasi batuan ini diperkirakan terbentuk selama Oligo Miosen yaitu pada masa tumbukan antara Lempeng India-Australia dengan Lempeng Eurasia.

Susut laut pada Miosen Tengah menghasilkan Endapan Karbonat Formasi Sibigo yang terdiri dari batu gamping koral, kalkarenit dan kalsirudit. Di atas formasi ini dengan lingkungan endapan laut dangkal terendapkan Formasi Sigulai yang terdiri dari napal dan batu pasir kuarsa. Di dalam batu pasir banyak terdapat bahan karbon, setempat tufaan dan gampingan. Sebagai bagian dasar dari formasi ini terdapat Anggota Lasikin yang terdiri dari konglomerat aneka bahan terdiri dari fragmen batuan Ultra Basa, Gabro, Basal, Kuarsa Susu dan Rijang. Formasi dan anggota ini terendapkan selama Miosen Awal-Akhir. Diatas Formasi Sigulai dengan lingkungan endapan darat pada Miosen Akhir- Pliose Awal terendapkan Formasi Layabaung yang

terdiri dari batu pasir tufaan, tufa dan batu lempung tufaan mengandung kuarsa gelas gunung api dan bahan karbon. Formasi layabaung ini berjemari dengan Formasi Dihit yang terdiri dari arenit dengan sisipan batu lanau dan batu lempung. Formasi Dihit dijumpai menyebar secara luas hamper mendominasi Pulau Simeulue. Batu gamping terumbu berupa batu gamping koral, kalkarenit dan kalsilutit, massif, diperkirakan berumur Plistosen hingga Holosen membentuk pulau-pulau kecil dan teras-teras di sepanjang pantai Pulau Simeulue. Endapan paling muda yaitu endapan masa kini, dijumpai endapan danau terdiri dari lempung, lanau dan pasir halus, tersebar di sekitar Danau Amabaan di daerah Sibigo, endapan rawa tersebar dibanyak tempat, terdiri dari lempung, Lumpur dan pasir banyak mengandung sisa tumbuhan, dan edapan alluvium sebagai endapan sungai dan pantai terdiri dari lumpur, pasir, lempung, kerikir dan kerakal.

Pulau Simeulue termasuk di deretan kepulauan busur luar. Struktur geologi Pulau Simeulue mencerminkan suatu kompleks yang dipengaruhi oleh adanya tumbukan dan penyusupan lempung dasar Samudera India-Australia ke bawah lempeng Benua Eurasia. Seperti halnya deretan kepulauan busur luar, penyusupan kedua lempeng yang terletak di Samudera Hindia yaitu sebelah barat daya Pulau Simeulue secara regional menerus dan memanjang disepanjang barat Pulau Sumatera, selatan jawa menerus ke perairan Maluku dan Papua. Struktur geologi yang berkembang di Pulau Simeulue di jumpai beberapa struktur patahan, lipatan, kekar dan perdaunan. Struktur patahan dijumpai berupa patahan geser, patahan bongkah dan patahan naik. Ketiga jenis patahan ini berkembang membentuk pola yang menyebar hampir diseluruh pulau dengan arah umum barat laut-tenggara dan timur laut barat daya. Patahan geser yang paling besar adalah Patahan Pagaja yang berarah barat laut-tenggara memanjang hampir sejajar dengan arah memanjang Pulau Simeulue. Patahan naik dan patahan bongkah dijumpai masing-masing disebelah timur dan selatan Teluk Dalam. Struktur lipatan berupa antiklin dan sinklin sumbu-sumbu lipatannya berarah barat laut-tenggara, dijumpai pada Formasi Layabaung dan Formasi Dihit. Struktur kekar dan perdaunan dijumpai pada batuan-batuan dari hampir seluruh formasi dengan arah dan ukuran yang beragam. Sebaran geologi Kabupaten Simeulue secara spasial dapat dilihat pada Gambar 1.4. berikut :

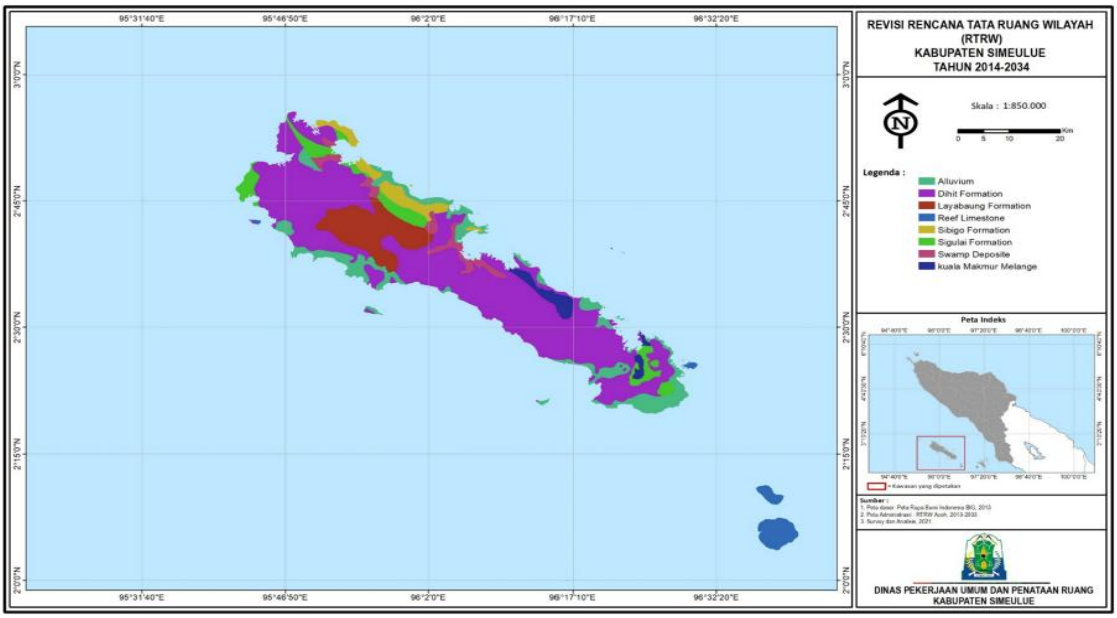

Sumber: RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

Gambar 2.4. Peta Geologi (Batuan) Kabupaten Simeulue

Berdasarkan data dan Peta Puslit Tanah (PPT) Bogor dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Simeulue memiliki lima jenis tanah. Therminologi klasifikasi untuk jenis tanah di ambil menurut sistem yang digunakan oleh PPT (1981).

a. Alluvial

Tanah yang terbentuk sebagai hasil endapan sungai, merupakan tanah muda sehingga belum menunjukkan perkembangan horizon. Tanah berwana kelabu sampai cokelat, pada lapisan atas masih terdapat bahan endapan yang kadang-kadang mengandung zat organik, bertekstur liat atau berpasir sampai kadar 50%, konsistensi keras bila kering dan teguh bila lembab, pH bervariasi, kadar BO rendah namun kadar unsur hara umumnya tinggi. Daya serap air kurang dan mudah tererosi. Produktifitas tanah beriasi dari rendah sampai tinggi. Setara dengan entisol atau inceptisol (therm USDA, 1983).

b. Hidromorf Kelabu

Merupakan tanah berkadar liat tinggi dengan pengaruh reduksi unsur besi. Jenis tanah ini umumnya dijumpai pada daerah datar, solum memiliki kedalaman sampai 100 cm, tanah berwarna kelabu kekuningan. Pada horizon A teksture tanah liat sampai liat berlempung, horizon B bertekstur liat berat. Struktur tanah gumpal, konsistensi tegal dan keras, Ph 4,5 – 6,0, kandungan BO semakin menurun air dengan bertambahnya kedalaman tanah. Permeabilitas lambat, kemampuan menahan air baik, peka terhadap erosi kandungan hara tanah dan produktifitas tanah umumnya rendah sampai sedang setara entisol (therm USDA, 1983).

c. Regosol

Jenis tanah dengan permeabilitas cepat, bertekstur agak kasar sampai kasar, tidak menunjukkan adanya perkembangan horizon. Umum ditemukan didaerah datar. Tanah berwarna kelabu, cokelat, atau coklat kekuningan sampai putih. Bertekstur pasir sampai lempung berdebu, struktur tanah lepas atau butir tunggal. Daya ikat air sangat rendah, porus dan mudah tererosi. Produktifitas tanah rendah sampai tinggi. Setara dengan entisol (therm USDA, 1983).

d. Rendzina

Lapisan tanah terdiri dari horizon A & C. Horizon A tebalnya 20-30 cm, warna kelabu gelap, tekstur liat, struktur lepas, konsistensi gembur, kandungan BO sedang (4-10%). Di bawahnya horizon C berwarna kekuningan tekstur lempung berpasir sampai kerikil, struktur gumpal, konsistensi teal, kadar BO dan hara tanah rendah, pH 7,8 – 8,4 atau tergolong basa. Kemampuan menahan air baik, permeabilitas lambat sedang dan evarorasi. Produktifitas tanah sedang, setara dengan molisol (therm USDA, 83).

e. Podsolik

Merupakan tanah merah yang umum dan sangat dominan ditemukan di lokasi studi. Solum tanah 1-2 meter, warna tanah merah sampai kuning, tekstur lempung berpasir sampai lempung berliat, horizon B berstruktur gumpal, konsisten gembur di atas dan tengah di bawah, pH berkisar 3,5-5, kadar hara rendah-sangat rendah, produktifitas tanah umumnya rendah-sedang, setara dengan ultisol atau inceptisol (therm USDA, 83).

Sebaran jenis tanah pada wilayah Kabupaten Simeulue dapat dilihat secara spasial pada Gambar berikut :

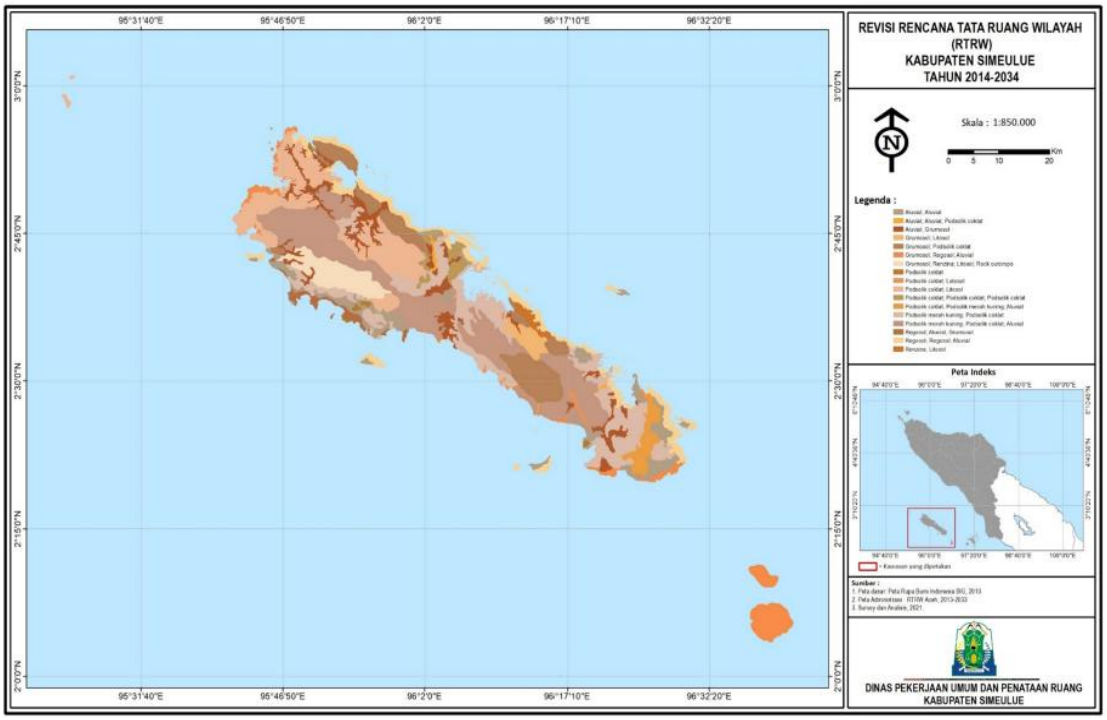

Sumber: RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

Gambar 2.5. Peta Sebaran Jenis tanah Pada Kabupaten Simeulue

E. Hidrologi

Potensi hidrologi Kabupaten Simeulue, sebagaimana kondisi hidrologi kepulauan sangatlah terbatas. Hingga saat ini potensi ini hanya dimanfaatkan untuk keperluan sehari - hari sehingga masih dirasakan cukup. Sumber air permukaan di kepulauan Simeulue berasal dari beberapa mata air, sungai, dan danau. Di Pulau Simeulue banyak dijumpai sungai, baik sungai sepanjang tahun maupun sungai musiman, umumnya berpola dendritik, parallel dan sub parallel. Kualitas air, jernih sampai keruh dengan pH rata–rata 6.5. Rawa umumnya dijumpai didaerah pantai, air berwarna jernih kecoklatan, umumnya payau dengan pH sekitar 6.

Mata air dijumpai di beberapa tempat, umumnya pada Formasi Dihit antara lain di Desa Labuah, Desa Kuala Makmur, Desa Kampung Air dan dibanyak tempat lainnya. Debit air rata-rata < 1 liter/detik, jernih, tawar, tidak berbau dan tidak berasa, pH 6,5 dan dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari masyarakat setempat. Air tanah bebas adalah air tanah yang terdapat diantara permukaan tanah dan lapisan kedap air (akuifer) di bawahnya, dapat muncul sebagai mata air. Air tanah bebas dapat diamati pada sumur-sumur gali penduduk, umumnya jernih sampai kecoklatan, tidak berbau dan tidak berasa. Didaerah sekitar pantai kedalam muka air sekitar 1-2 meter, fluktuasi 1-2 meter dengan debit sekitar 10 ltr/detik.

Biasa juga disebut air tanah dalam yaitu air tanah yang terdapat pada lapisan kedapair (akuifer) yang terdapat di bawah permukaan tanah dengan kedalaman yang sangat bervariasi. Pengamatan hanya bisa dilakukan dengan metode pendugaan geolistrik dan hasil pemboran air didaerah Lasikin. Lapisan pembawa air terdapat pada lapisan batu pasir kedap air, pada kedalaman sekitar 120 m di bawah permukaan tanah, kurang produktif dengan debit < 2 ltr/detik, jernih, tidak berbau dan tidak berasa.

F. Klimatologi

Kabupaten Simeulue termasuk ke dalam zona iklim tropika basah dengan temperatur udara berkisar antara 23°–34,5° C dan rata-rata harian antara 25°–27° C. Berdasarkan data curah hujan yang ada menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata cukup tinggi yaitu 2.884 mm/tahun. Musim hujan umumnya terjadi antara bulan September-Februari, sedangkan musim kemarau pada umumnya antara bulan Maret-Agustus.

Berdasarkan pada tipe iklim Oldeman, Pulau Simeulue memiliki tipe iklim A yaitu daerah dengan bulan basah selama 9 bulan berturut-turut dan selama dua bulan atau kurang mengalami musim kering. Bulan basah adalah curah hujan lebih dari 200 mm/bulan (Whitten, 1984).

Keadaan cuaca di Kabupaten Simeulue ditentukan oleh penyebaran musim, dimana musim Barat berlangsung sejak Bulan September sampai dengan Bulan Februari, ditandai dengan terjadinya musim badai dan gelombang besar yang berasal dari Lautan Hindia sehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim Timur berlangsung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus ditandai dengan musim kemarau diselingi oleh hujan yang tidak merata dan keadaan laut sedikit tenang. Kelembaban udara berkisar antara 60 persen sampai 75 persen dan lamanya penyinaran rata-rata perhari adalah 13–14 jam. Kecepatan angin rata-rata di wilayah ini berkisar antara 50–65 knot/jam. Perkembangan curah hujan dan hari hujan Kabupaten Simeulue Tahun 2016-2020 tertera pada tabel 2.4. di bawah ini.

Tabel 2.4. Perkembangan Curah dan Hari Hujan di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Bulan	2020		2021		2022		2023		2024*	
	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
Januari	75,5	17	177,5	15	75,5	17	177,5	15	75,5	17
Februari	183	19	84	19	183	19	84	19	183	19
Maret	101	19	300	26	101	19	300	26	101	19
April	152	22	340	28	152	22	340	28	152	22
Mei	354	29	358,5	26	354	29	358,5	26	354	29
Juni	332	18	334	21	332	18	334	21	332	18
Juli	387	22	294,5	21	387	22	294,5	21	387	22
Agustus	320,5	17	370	28	320,5	17	370	28	320,5	17
September	202,5	25	234,5	20	202,5	25	234,5	20	202,5	25
Oktober	313	22	390,5	25	313	22	390,5	25	313	22
Nopember	199	25	485	24	199	25	485	24	199	25
Desember	479,5	28	199,5	22	479,5	28	199,5	22	479,5	28

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025
*Keterangan: *)Angka Sementara*

G. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Dokumen RTRWK Simeulue Tahun 2014-2034, kondisi penggunaan lahan Kabupaten Simeulue dapat dikelompokkan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Luas kawasan budidaya mencapai 118.096,70 ha atau setara 64,25 persen dari luas wilayah Kabupaten Simeulue. Adapun luas kawasan lindung sebesar 65.712,80 ha (35,75 persen). Rencana penggunaan untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagaimana tertuang dalam RTRWK Simeulue Tahun 2014-2034 sebagai berikut.

Tabel 2.5. Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Simeulue

Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
KAWASAN LINDUNG	96.094,52	43,90
Kawasan Hutan Lindung	57.644,42	26,33
Kawasan Perlindungan Setempat	3.036,01	1,39
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya	919,59	0,42
Kawasan rawan bencana	8.696,51	3,97
Kawasan lindung Geologi	25.797,99	11,79
KAWASAN BUDIDAYA	122.809,65	56,10
Hutan produksi	23.901,20	10,92
Hutan rakyat	10.811,21	4,94
Kawasan Peruntukan Pertanian	77.358,24	35,34
Kawasan Peruntukan Perikanan	394,01	0,18
Kawasan Peruntukan Pertambangan	469,16	0,21
Kawasan Peruntukan Industri	100,37	0,05
Kawasan Peruntukan Pariwisata	3750,75	1,71
Kawasan Peruntukan Permukiman	1.808,90	0,83
Kawasan Peruntukan lainnya	4215,81	1,93
Jumlah	**218.904,17**	**100,00**

Sumber : RTRW Kabupaten Tahun Simeulue 2014-2034

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan RTRWK Simeulue Tahun 2014-2034 bahwa terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah yang dimiliki Kabupaten Simeulue yang dipolakan kedalam kawasan strategis, antara lain :

A. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lingkup kepentingan kabupaten, kawasan strategis yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi, juga mencakup kawasan terpencil atau terbelakang dan kawasan kritis yang tidak semata-mata pengembangannya meliputi kawasan prioritas cepat berkembang tetapi juga mencakup kawasan prioritas terbelakang dan kawasan kritis. Adapun kawasan strategis kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan ekonomi meliputi :

1) Kawasan strategis nasional berupa KSN Kawasan Pulau-pulau kecil terluar meliputi: Pulau Simeulue Cut di Kecamatan Simeulue Tengah dan Pulau Silaut Besar, Kecamatan Alafan.

2) Kawasan strategis propinsi berupa KSP Kawasan Minapolitan dan Pariwisata meliputi KSP Minapolitan, Kecamatan Simeulue Timur, dan Simeulue Tengah;
3) KSK Koridor Jalan Sinabang – Lasikin;
4) KSK Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah;
5) KSK Perkotaan Sinabang;
6) KSK Perkotaan Kampung Aie;
7) KSK Perkotaan Sibigo;
8) KSK Agropolitan meliputi Kecamatan Simeulue Tengah meliputi: Desa Sebbe. Lambaya, Luan Sorep, Latitik, Lakubang, dan Lamayang, Kecamatan Simeulue Barat meliputi Desa Sefilan, Layabaung, Sinar Bahagia, dan Sigulai.
9) KSK Minapolitan meliputi Kecamatan Simeulue Timur, meliputi desa Lugu, Linggi, Sefoyan, Ganting, Amaiteng, Suka Karya, Suka Jaya, Amiria Bahagia, Sinabang, Suka Maju, Air Dingin, dan Kota Batu.
10) KSK Wisata Bahari meliputi: Pulau Babi, Pulau Lasia, Pulau Teupah, Pulau Mincau.

B. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya berupa KSK Adat Terpencil di Kecamatan Simeulue Barat, yaitu di Desa Amabaan (Dusun Laulo) dan di Desa Layabaung.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam ekologi dan pengelolaan lingkungan. Daya dukung lingkungan mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup dan aktivitas manusia secara berkelanjutan, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam seperti air, tanah, udara, dan energi. Daya dukung mencerminkan jumlah maksimum populasi atau aktivitas yang dapat dipertahankan lingkungan tanpa mengalami kerusakan atau penurunan fungsi ekologisnya. Sementara itu, daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap dan mengelola dampak negatif dari aktivitas manusia, seperti pencemaran, limbah, dan emisi, tanpa menurunkan kualitas lingkungan atau merusak keseimbangan ekosistem.

Beberapa kategori yang termasuk dalam Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan meliputi Daya Dukung Daya Tampung Penyediaan Air, Penyediaan Pangan, dan Lahan Pemukiman

A. Daya Dukung dan Daya Tampung Penyediaan Air

Daya dukung dan daya tampung penyediaan air merujuk pada kemampuan suatu ekosistem dalam menyediakan air bersih secara berkelanjutan untuk

memenuhi kebutuhan makhluk hidup dan aktivitas manusia. Sumber air ini dapat berasal dari ekosistem alami seperti hutan, sungai, danau, rawa, dan akuifer bawah tanah. Status daya dukung ini menunjukkan sejauh mana ekosistem mampu menyediakan air yang cukup secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan kebutuhan penduduk dan aktivitas manusia tanpa merusak keseimbangan lingkungan.

Tabel 2.6. Hasil Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air Di Kabupaten Simeulue

Kecamatan	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih	Status
Alafan	196.482.553,83	2.224.000,00	194.258.553,83	Belum Terlampaui
Salang	94.156.937,68	617.600,00	93.539.337,68	Belum Terlampaui
Simeulue Barat	267.942.183,52	1.961.600,00	265.980.583,52	Belum Terlampaui
Simeulue Cut	24.825.945,89	513.600,00	24.312.345,89	Belum Terlampaui
Simeulue Tengah	123.748.858,78	1.232.000,00	122.516.858,78	Belum Terlampaui
Simeulue Timur	333.192.669,80	2.710.400,00	330.482.269,80	Belum Terlampaui
Teluk Dalam	188.374.599,87	1.529.600,00	186.844.999,87	Belum Terlampaui
Teupah Barat	244.216.783,17	2.124.800,00	242.091.983,17	Belum Terlampaui
Teupah Selatan	262.391.691,72	2.100.800,00	260.290.891,72	Belum Terlampaui
Teupah Tengah	78.987.440,85	984.000,00	78.003.440,85	Belum Terlampaui
Grand Total	**1.814.319.665,11**	**15.998.400,00**	**1.798.321.265,11**	**Belum Terlampaui**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Berdasarkan data ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Simeulue, seluruh kecamatan memiliki ketersediaan air yang jauh melebihi kebutuhan. Secara keseluruhan, total ketersediaan air di Kabupaten Simeulue mencapai 1.814.319.665,11 m^3, sedangkan total kebutuhan air hanya 15.998.400 m^3, dengan selisih sebesar 1.798.321.265,11 m^3. Hal ini menegaskan bahwa status daya dukung jasa ekosistem penyediaan air di Kabupaten Simeulue berada dalam kondisi aman dan belum terlampaui. Ketersediaan air di Kabupaten Simeulue masih jauh di atas kebutuhan saat ini, sehingga daya dukung lingkungan dalam penyediaan air berada pada kondisi optimal.

B. Daya Dukung dan Daya Tampung Penyediaan Pangan

Daya dukung lahan pangan adalah kemampuan suatu lahan dalam menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung produksi pangan dalam jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan penduduk. Ini mencakup aspek kualitas tanah, luas lahan, ketersediaan air, dan teknologi yang digunakan. Sementara itu, daya tampung lahan pangan mengacu pada batas maksimum lahan dalam menampung aktivitas produksi pangan secara berkelanjutan, tanpa menurunkan produktivitas tanah dan merusak ekosistem.

Tabel 2.7. Produktivitas Lahan untuk Kebutuhan Pangan di Kabupaten Simeulue

Kebutuhan Dasar	Produksi (Ton)	Luas Lahan Produksi (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)
Padi	25.805,55	10.911,10	2,3651
Jagung dan Terigu	28,00	23.487,46	0,0012
Umbi-umbian	30.693,04	23.487,46	1,3068
Daging dan Susu	2.364,00	559,70	4,2237
Unggas dan Telur	121.062,66	23.487,46	5,1544
Minyak dan Lemak	698,35	6.904,61	0,1011
Sayuran dan Buah	620,60	23.487,46	0,0264
Pemenuhan Kayu	755,92	131.338,87	0,0058

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Dari data di atas secara keseluruhan, komoditas unggas dan telur memiliki produktivitas tertinggi, diikuti oleh daging dan susu serta padi. Sebaliknya, komoditas seperti jagung, minyak, sayuran, dan kayu memiliki produktivitas yang rendah meskipun luas lahan yang tersedia cukup besar. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan lahan, penerapan teknologi pertanian modern, dan diversifikasi komoditas sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi lahan di Kabupaten Simeulue.

Tabel 2.8. Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Lahan Pangan (Ha)

Kecamatan	Daya Dukung Daya Tampung Penyedia Lahan Pangan (Ha)	
	Belum Terlampaui	Terlampaui
Alafan	13.877,87	3.629,35
Salang	14.826,05	5.043,26
Simeulue Barat	33.392,04	6.552,25
Simeulue Cut	337,17	1.311,91
Simeulue Tengah	21.484,11	3.725,65
Simeulue Timur	12.563,73	3.919,23
Teluk Dalam	10.681,83	5.847,06
Teupah Barat	14.068,80	2.315,06
Teupah Selatan	17.726,45	6.758,14
Teupah Tengah	3.756,12	2.322,71
Grand Total	**183.809,50**	**41.424,62**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

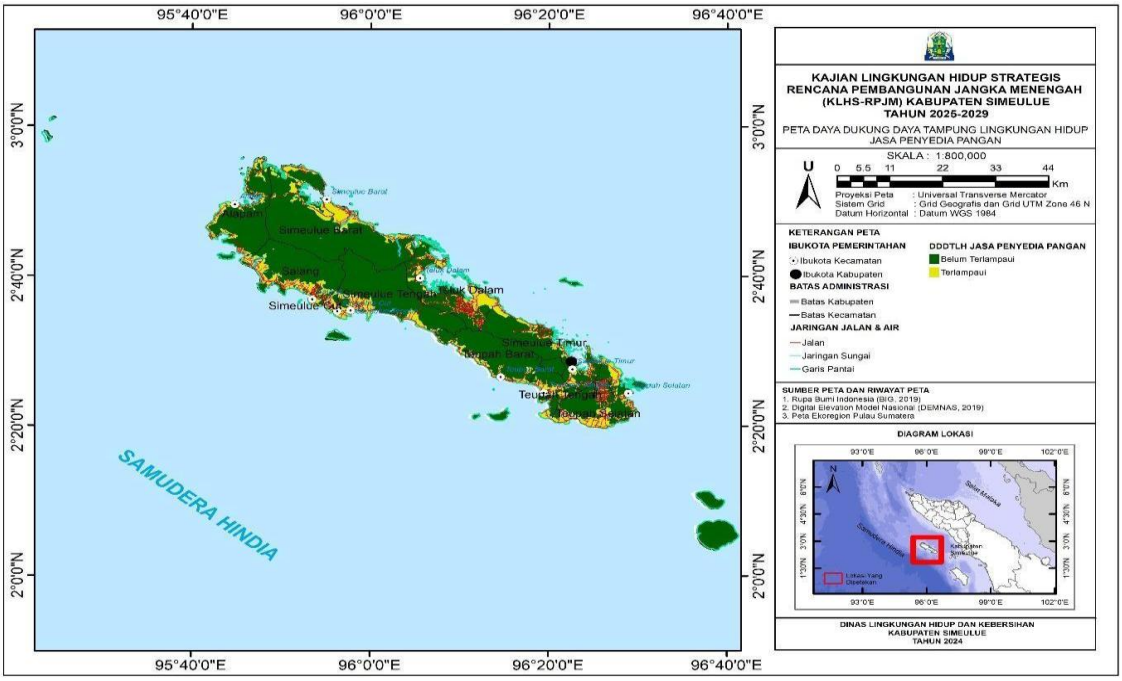

Sumber : RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2014-2034

Gambar 2.6. Peta Ketersediaan Lahan Pangan di Kabupaten Simeulue

Berdasarkan data daya dukung dan daya tampung penyedia lahan pangan di Kabupaten Simeulue, dari total 183.809,50 hektar lahan yang tersedia, sekitar 142.714,18 hektar masih berada dalam kondisi belum terlampaui, sementara 41.424,62 hektar sudah dalam kondisi terlampaui.

Dalam konteks KLHS, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan di Kabupaten Simeulue masih memiliki daya dukung lahan pangan yang belum terlampaui, namun tekanan pada lahan di beberapa wilayah mulai meningkat. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk menghindari degradasi lahan dan memastikan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara produksi pangan dan kelestarian lingkungan melalui strategi seperti:

1) Optimalisasi Penggunaan Lahan: Memastikan lahan yang belum terlampaui dikelola dengan praktik pertanian berkelanjutan untuk mencegah kerusakan.
2) Pengendalian Alih Fungsi Lahan: Mencegah konversi lahan produktif menjadi non-pertanian yang dapat mempercepat lahan terlampaui.
3) Konservasi Lahan Terlampaui: Memulihkan lahan yang telah terlampaui agar produktivitasnya dapat dipertahankan.
4) Peningkatan Teknologi Pertanian: Menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas lahan tanpa merusak daya dukungnya.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Kabupaten Simeulue, sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Aceh, memiliki karakteristik geografis dan ekologis yang unik. Sebagai daerah terluar dan terpencil, tantangan terhadap ketahanan energi, ketersediaan air bersih, dan kemandirian pangan menjadi isu penting dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya pencapaian ketahanan di ketiga sektor ini menjadi kunci strategis dalam mewujudkan Simeulue yang mandiri dan resilien terhadap krisis maupun perubahan iklim.

A. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

1. Sumber Energi Listrik

Simeulue belum terhubung dengan jaringan listrik interkoneksi Sumatera. Listrik umumnya bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PLN dan beberapa inisiatif energi terbarukan berskala kecil (PLTS, mikrohidro). Namun, ketergantungan pada PLTD masih sangat dominan.

2. Cakupan Listrik Rumah Tangga

Berdasarkan data terakhir dari Dinas ESDM Aceh dan PLN Wilayah Aceh:

a. Persentase Rumah Tangga Berlistrik (2023): ± 91,8%
b. Sumber Listrik Rumah Tangga:

1) PLN: ± 88%
2) Non-PLN (genset pribadi, PLTS lokal, dll): ± 3,8%
3) Belum Berlistrik: ± 8,2%

c. Terdapat desa-desa di kecamatan seperti Teupah Barat, Alafan, dan Salang yang masih mengalami keterbatasan pasokan listrik terutama pada malam hari.

3. Ketersediaan Daya dan Durasi Nyala

a. Rata-rata durasi nyala: 16–20 jam per hari
b. Gangguan pasokan masih kerap terjadi akibat cuaca ekstrem, keterbatasan bahan bakar, dan gangguan teknis
c. Kapasitas pembangkit sering belum mencukupi kebutuhan beban puncak

B. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan, pengelolaan dan upaya konservasi energi dan sumber daya mineral, serta Perwujudan ketahanan Energi, dengan fokus pada Pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; pengembangan listrik murah dan hemat. Ketersediaan fasilitas listrik di Kabupaten Simeulue sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Perkembangan Bidang Pembangkit dan Distribusi PT PLN Area Kabupaten Simeulue Tahun 2020 – 2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
PEMBANGKIT	**PLTD**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Unit Mesin	Unit	26	26	31	32	32
Kapasitas Terpasang	KW	18.572	18.572	21.484	22.207	22.207
Kemampuan	KW	11.690	11.690	13.880	14.180	14.180
Produksi Sendiri	KWH per Desember	3.137.486	3.137.486	3.403.147	3.468.729	3.468.729
Produksi yang dibeli	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Pemakaian Sendiri	KWH per Desember	59.668	59.668	51.573	94.997	94.997

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kerugian Energi Listrik	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Penjualan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Pemakaian bahan Bakar	Liter per Desember	1.169.624	1.169.624	948.539	1.020.026	1.020.026
Pemakaian Minyak Pelumas	Liter per Desember	4.689	4.689	4.811	3.882	3.882
DISTRIBUSI						
Gardu Induk Bayu						
Gardu Distribusi	Unit	312	312	313	314	314
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Saluran Kabel Tegangan Menegah (SKTM)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kms	492	492	492	492	492
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Transformator	Unit	312	312	312	314	314
Daya Transformator Distribusi	Kva	19076	19076	19126	19176	19176

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Jumlah KWH yang terjual per pelanggan pada unit ranting sinabang sebesar 25.693.236 KWH dengan jumlah pelanggan pascabaya sebanyak 13.455 unit dan pelanggan prabayar 11.862. Rata-rata jumlah KWH yang terjual perpelanggan sebesar 122,00 KWH. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Jumlah KWH Terjual dan Jumlah Pelanggan Pada PT PLN (Persero) Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2023

Unit	Jumlah KWH Terjual	Jumlah Pelanggan		Rata-rata jumlah KWH yang terjual per pelangggan
Ranting Sinabang	25.693.236	Pascabayar	13.455	122,00
		Prabayar	11.862	

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2024

Perkembangan laju pengadaan listrik dan Gas terhadap PDRB ADHB dan PDRB ADHK dapat dilihat pada Grafik berikut.

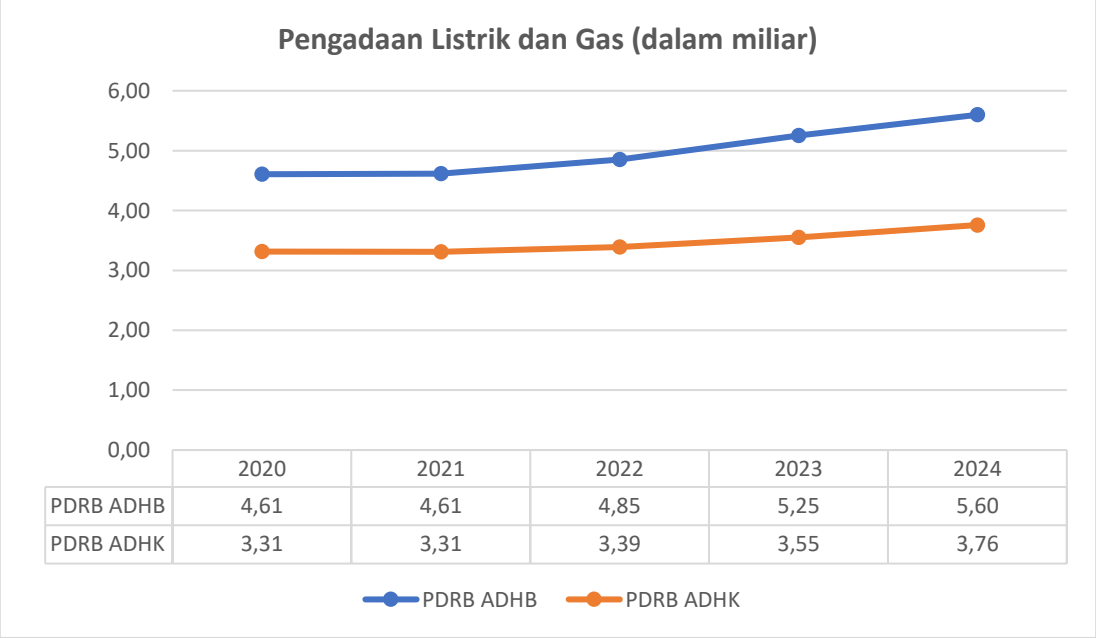

Sumber; BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.1 Laju Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2020-2024

Berdasarkan data diatas, sejak tahun 2020-2024 laju pertumbuhan pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB terus mengalami peningkatan, pada tahun 2024 pertumbuhan PDRB ADHB dari sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 5,60 persen, sedangkan pertumbuhan PDRB ADHB sebesar 3,76 persen.

1. Ketersedian Air Bersih

Ketersediaan air bersih di Kabupaten Simeulue dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi namun cenderung meningkat secara signifikan pada akhir periode. Pada tahun 2020, capaian ketersediaan air

bersih tercatat sebesar 43,28 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 39,52 persen. Penurunan ini diperkirakan disebabkan oleh keterbatasan jaringan distribusi dan sarana penyediaan air bersih yang belum merata di seluruh wilayah kecamatan.

Memasuki tahun 2022, capaian ketersediaan air bersih mengalami peningkatan menjadi 41,60 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan infrastruktur dasar serta peningkatan pelayanan dari unit pengelola air bersih di tingkat daerah. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi kenaikan yang cukup signifikan menjadi 52,38 persen, seiring dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh pemerintah daerah maupun dukungan dari pemerintah pusat.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024, di mana capaian ketersediaan air bersih mencapai 77,77 persen. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan yang pesat dalam penyediaan dan perluasan akses air bersih bagi masyarakat Kabupaten Simeulue, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Secara keseluruhan, peningkatan ketersediaan air bersih selama lima tahun terakhir mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam memperkuat infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan.

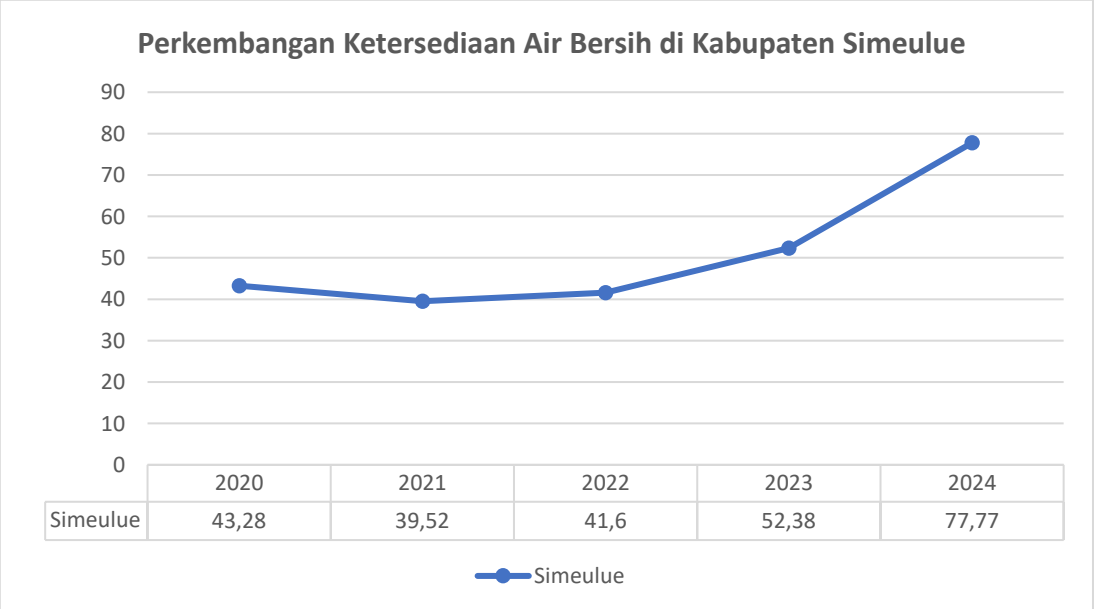

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.2 Perkembangan Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

C. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) adalah indikator yang menggambarkan proporsi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi minimum harian dari pangan yang dikonsumsinya. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pangan suatu wilayah. Metode perhitungannya didasarkan pada distribusi konsumsi energi dalam populasi yang diperoleh dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) serta standar kebutuhan energi minimum yang ditetapkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization) dan BPS. Nilai PoU dinyatakan dalam persentase (%), sehingga semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin besar penduduk yang mengalami ketidakcukupan pangan, sedangkan penurunan angka PoU menunjukkan perbaikan ketahanan pangan masyarakat.

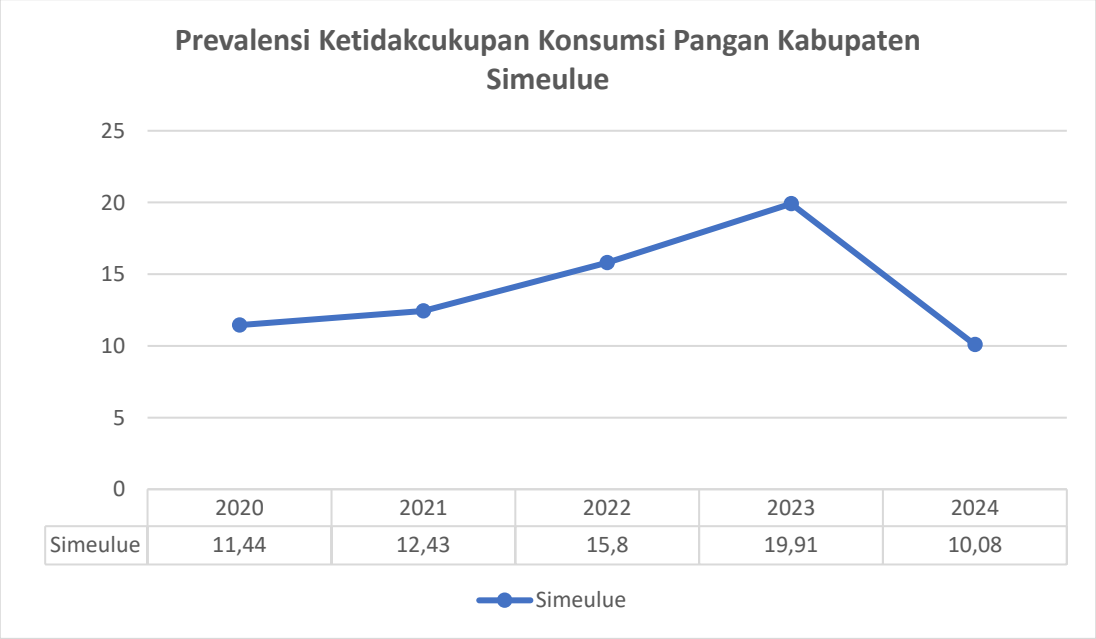

Sumber : *BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025*

Grafik 2.3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Perkembangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) di Kabupaten Simeulue tahun 2020–2024 memperlihatkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 angka PoU tercatat sebesar 11,44%, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 12,43%. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan capaian 15,80%, yang menunjukkan kerentanan pangan masyarakat cukup tinggi pada periode tersebut. Namun, kondisi ini mengalami perbaikan signifikan pada tahun 2023 ketika prevalensi turun menjadi 10,91%, dan berlanjut pada 2024 dengan penurunan lebih lanjut hingga 10,08%. Penurunan dua tahun terakhir ini menggambarkan adanya efektivitas program intervensi ketahanan pangan yang

dijalankan, baik melalui peningkatan produksi lokal, distribusi pangan, maupun program bantuan sosial.

Secara umum, tren lima tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun sempat menghadapi lonjakan risiko pada 2022, Kabupaten Simeulue berhasil memperbaiki kondisi ketahanan pangan sehingga prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada 2024 menjadi yang terendah dalam periode tersebut.

D. Konsumsi Listrik Perkapita

Konsumsi Listrik Perkapita mengacu pada jumlah rata-rata listrik yang digunakan oleh setiap individu dalam suatu wilayah (biasanya negara) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ukuran ini mencerminkan tingkat pembangunan, kesejahteraan, dan aktivitas ekonomi suatu negara.

Di Kabupaten Simeulue, konsumsi listrik per kapita masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Berdasarkan data dari "Kabupaten Simeulue Dalam Angka 2023", total listrik yang terjual pada tahun 2021 mencapai sekitar 36,56 juta kWh untuk melayani sekitar 39.878 pelanggan. Dengan estimasi jumlah penduduk sekitar 98.000 jiwa, maka konsumsi listrik per kapita di daerah ini hanya sekitar 370 kWh per orang per tahun. Angka ini jauh di bawah rata-rata konsumsi listrik nasional Indonesia yang pada tahun 2023 telah melampaui 1.300 kWh per kapita. Rendahnya konsumsi ini mencerminkan tantangan geografis dan infrastruktur di Simeulue, yang merupakan wilayah kepulauan terpencil di Aceh.

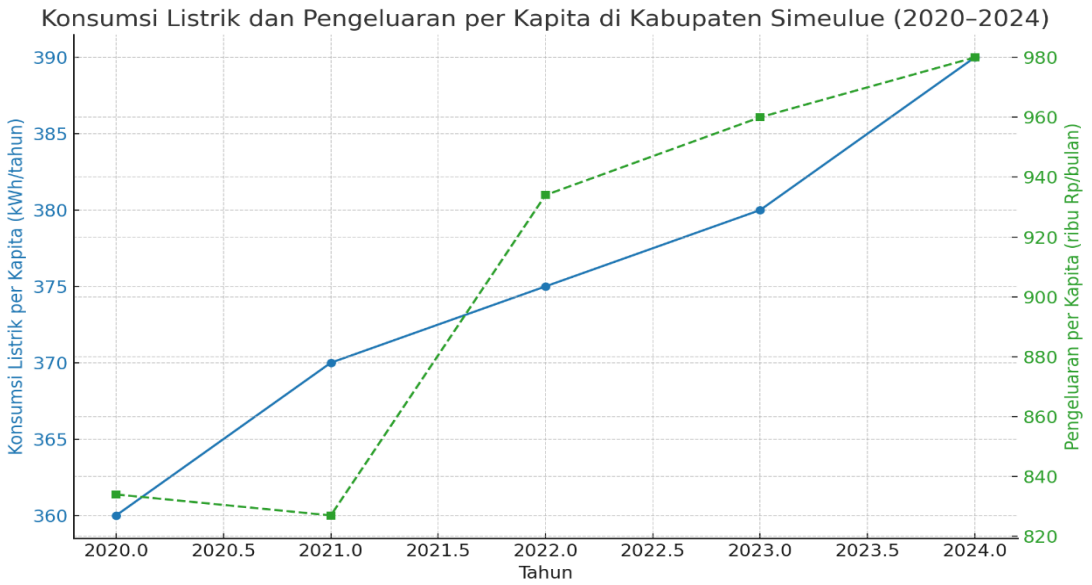

Sumber : *BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025*

Grafik 2.4 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Meskipun begitu, upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas listrik di Simeulue terus dilakukan. PLN telah menambah kapasitas pembangkit diesel (PLTD) serta mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala kecil guna memastikan pelayanan listrik yang lebih andal. Listrik 24 jam baru benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat Simeulue sejak sekitar tahun 2019, menandai kemajuan penting dalam elektrifikasi wilayah tersebut. Namun, ketergantungan pada mesin diesel dan keterbatasan infrastruktur menyebabkan pasokan listrik masih rentan terhadap gangguan teknis dan logistik. Oleh karena itu, konsumsi listrik per kapita di Simeulue tidak hanya menggambarkan tingkat pemakaian energi, tetapi juga menunjukkan perlunya pembangunan infrastruktur energi yang lebih berkelanjutan dan merata di wilayah-wilayah terpencil Indonesia.

E. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam perspektif makro, ketersediaan air minum yang layak tidak hanya berhubungan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada produktivitas, tingkat pendidikan, serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Rumah tangga yang memiliki akses memadai terhadap air minum biasanya lebih terlindungi dari risiko penyakit, sehingga biaya kesehatan dapat ditekan dan waktu produktif meningkat. Sebaliknya, keterbatasan akses air minum layak akan menurunkan kualitas hidup, meningkatkan beban ekonomi rumah tangga, serta berpotensi memperlambat pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih dalam rumah tangga, masyarakat di Kabupaten Simeulue menggunakan berbagai sumber air, antaralain sumur gali, mata air, waduk dan sungai dengan kebutuhan air baku bervariasi sesuai karakteristik masyarakat yang digunakan dari sumber-sumber air tersebut. Kebutuhan air bersih masyarakat diwilayah perkotaan terutama dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Fulawan, dengan sumber air dari labuah, kota batu dan sefoyan. Masyarakat perkotaan yang terlayani tidak hanya terbatas pada pelanggan rumah tangga namun PDAM juga melayani kebutuhan pelanggan instansi pemerintahan, perniagaan serta industri.

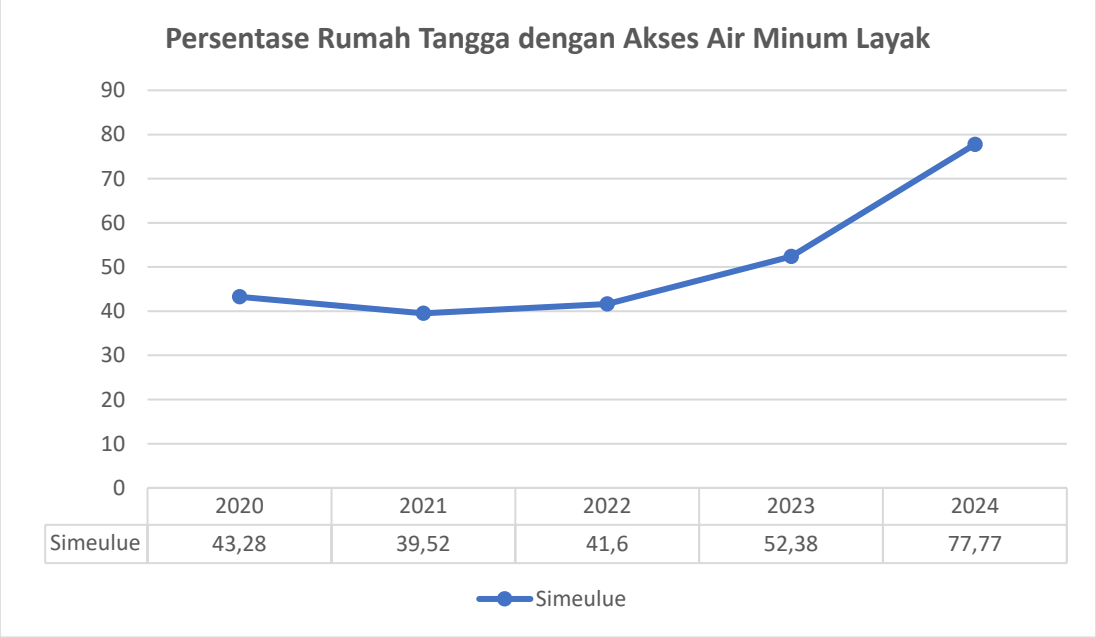

Sumber : PDAM Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.5 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak berada pada angka 43,28%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 39,52%. Kondisi ini mulai membaik di tahun 2022 dengan kenaikan menjadi 41,60%, dan peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2023 yaitu mencapai 52,38%. Puncaknya, pada tahun 2024 terjadi lonjakan yang sangat besar hingga mencapai 77,77%, menunjukkan perbaikan akses air minum yang sangat pesat. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan di awal, tren jangka menengah hingga 2024 memperlihatkan capaian yang sangat positif. Hal ini mengindikasikan adanya intervensi program atau kebijakan pemerintah yang efektif dalam memperluas layanan air minum layak.

F. Indikator Ketahanan Pangan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Upaya penganekaragaman pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan lahan.

Di wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Simeulue termasuk penghasil padi yang masih rendah. Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten

adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan ketersediaan pangan juga semakin baik, Rasio lahan sawah berdasarkan jumlah desa di Kabupaten Simeulue Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Rasio Luas Lahan Baku Sawah Berdasarkan Jumlah Desa Di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

Rasio Lahan Sawah	Jumlah Desa	Persentaase
0.0138	28	20%
0.0239	5	4%
0.0355	3	2%
0.0486	8	6%
0.0659	12	9%
0.0659	82	59%

Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Pada tahun 2024, terdapat variasi dalam rasio luas lahan sawah berdasarkan jumlah desa di Kabupaten Simeulue. Mayoritas desa, yaitu sebanyak 82 desa atau 59%, memiliki lahan sawah (rasio 0.0659). Sebanyak 28 desa (20%) memiliki rasio lahan sawah 0.0138, dan beberapa desa lainnya memiliki rasio yang berbeda. Selain tanaman padi, komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Simeulue, meliputi padi, ubi kayu, dan ubi jalar. Perkembangan jumlah produksi Umbi-umbian tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Luas Tanam dan Produksi Komoditas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Simeulue, Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas Tanam (ha)						
1	Padi Sawah	9.999,70	7.437,50	5.990,08	6.173,74	6.809,33
2	Jagung	200,00	200,00	4	8,4	165
3	Ubi Kayu	47,00	79,00	63,00	63,00	64
4	Ubi Jalar	8,00	5,00	4,20	1,7	2
Produksi (Ton)						

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi Sawah	31.503,98	27,532.00	25.913,20	32.998,18	23.304,21
2	Jagung	736	1.800,00	4,6	4,37	721
3	Ubi Kayu	181,00	280,000	221.000,0	74,8	1.064
4	Ubi Jalar	36,00	36,00	29,00	5,2	17

Sumber : Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, erkembangan luas tanam dan produksi tanaman pangan di Kabupaten Simeulue selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang bervariasi antar komoditas. Padi sawah sempat mengalami penurunan luas tanam pada 2021–2022, namun kembali meningkat pada 2023 dan 2024 dengan luas panen mencapai 6.809,33 hektar serta produksi 23.304,21 ton, walaupun angka ini masih lebih rendah dibanding capaian tahun 2023. Jagung mengalami penurunan drastis pada 2022–2023, namun pada 2024 terlihat pemulihan signifikan dengan luas tanam mencapai 165 hektar dan produksi 721 ton. Ubi kayu relatif stabil dari sisi luas tanam sekitar 63–64 hektar, tetapi produksinya melonjak pada 2024 menjadi 1.064 ton setelah sempat menurun tajam pada tahun sebelumnya. Sementara itu, ubi jalar meskipun diusahakan pada skala lahan yang kecil, pada 2024 menunjukkan peningkatan produksi menjadi 17 ton dari hanya 5,2 ton di 2023.

Perkembangan luas tanam dan produksi komoditas tanaman pangan di Kabupaten Simeulue tahun 2020–2024 menunjukkan adanya dinamika yang cukup signifikan. Padi sawah sebagai komoditas utama tetap mendominasi, meskipun sempat mengalami penurunan produksi pada 2021–2022, kemudian meningkat kembali pada 2023 dan 2024. Jagung serta ubi kayu juga memperlihatkan pola fluktuasi, di mana pada 2024 terjadi peningkatan yang cukup besar, sedangkan ubi jalar masih diusahakan skala kecil tetapi menunjukkan perbaikan hasil pada 2024.

Kondisi ini berkaitan erat dengan ketahanan pangan di tingkat desa. Data tahun 2024 mencatat masih terdapat sejumlah desa rawan pangan di hampir seluruh kecamatan, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Simeulue Barat (11 desa) dan Teupah Selatan (10 desa). Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun produksi pangan daerah mengalami tren peningkatan pada beberapa komoditas, ketersediaan pangan belum sepenuhnya merata hingga ke tingkat rumah tangga di semua wilayah. Oleh karena itu, capaian produksi pertanian perlu diiringi dengan upaya pemerataan distribusi pangan, penguatan cadangan pangan lokal, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat, khususnya di desa-desa yang masih tergolong rawan pangan.

Tabel 2.13. Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Masing-Masing kecamatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa Rawan Pangan
1	Teupah Selatan	10
2	Simeulue Timur	4
3	Teupah Barat	6
4	Teupah Tengah	1
5	Simeulue Tengah	4
6	Teluk Dalam	6
7	Simeulue Cut	5
8	Salang	9
9	Simeulue Barat	11
10	Alafan	7

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor dalam sektor pertanian. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian didaerah. Dengan peran tersebut maka perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani mempunyai kekuatan yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani dibentuklah kelompok-kelompok tani di perdesaan. Perkembangan kelompok tani yang dibentuk tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Jumlah Kelompok Tani Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Teupah Selatan	23	25	21	26	26
2	Simeulue Timur	27	29	28	30	30
3	Teupah Barat	26	26	25	25	25
4	Teupah Tengah	17	17	18	17	17
5	Simeulue Tengah	22	23	25	24	24
6	Teluk Dalam	13	13	14	14	14
7	Simeulue Cut	10	10	10	13	13
8	Salang	19	19	19	19	19
9	Simeulue Barat	15	15	18	18	18
10	Alafan	16	16	12	12	12
Jumlah		**188**	**193**	**190**	**198**	**198**

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Sampai dengan tahun 2022, jumlah kelompok tani di Kabupaten Simeulue sebanyak 190 kelompok, kelompok tersebut tersebar di seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Simeulue. Di Kecamatan Teupah Selatan terdapat 21 kelompok tani, Simeulue Timur 28 kelompok tani, Teupah Barat 25 Kelompok tani, Teupah tengah 18 Kelompok tani, Simeulue tengah 25 Kelompok tani, Teluk dalam 14 kelompok tani Simeulue cut 10 kelompok tani, Salang 19 kelompok tani Simeulue barat 18 kelompok tani dan Alafan sebanyak 12 kelompok tani.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indek kualitas lingkungan hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah berdasarkan beberapa parameter utama yang mencerminkan kualitas lingkungan. IKLH memberikan gambaran umum mengenai seberapa baik atau buruknya kualitas lingkungan di suatu daerah, serta bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas manusia memengaruhi kondisi lingkungan tersebut. IKLH biasanya dihitung berdasarkan tiga komponen utama:

1) Indeks Kualitas Air; Mengukur kualitas air permukaan, seperti sungai, danau, dan waduk, berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biologi.
2) Indeks Kualitas Udara; Menilai kualitas udara berdasarkan konsentrasi polutan, seperti PM10, SO2, dan NO2, yang memengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem.
3) Indeks Kualitas Lahan; Menilai kondisi lahan berdasarkan tingkat kerusakan, seperti deforestasi, erosi, atau degradasi tanah akibat aktivitas manusia.

Adapun manfaat IKLH adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi dan Pemantauan: IKLH digunakan untuk memantau kualitas lingkungan secara berkala sehingga dapat diketahui apakah terjadi perbaikan atau penurunan kualitas lingkungan.
2) Perencanaan Pembangunan: IKLH membantu pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
3) Kesadaran Publik: Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kondisi lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.
4) Pelaporan Internasional: IKLH juga dapat digunakan sebagai bagian dari laporan lingkungan hidup kepada organisasi internasional terkait pembangunan berkelanjutan.
5) Indeks ini biasanya diukur dalam skala 0-100, di mana semakin tinggi nilai IKLH, semakin baik kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut. Pengelolaan lingkungan yang tepat dan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan nilai IKLH, demi mendukung keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat.
6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seluruh daerah di Indonesia. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengklasifikasikan nilai IKLH dalam 5 (lima) kategori, yaitu kategori sangat baik, baik, sedang, kurang dan sangat kurang. Rincian klasifikasi tersebut disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.15. Klasifikasi Kategori Rentang Nilai IKLH

No	Kategori	Angka rentang
1	Sangat baik	90 ≤I KLH ≤ 100
2	Baik	70 ≤ IKLH < 90
3	Sedang	50 ≤ IKLH < 70
4	Kurang	25 ≤ IKLH < 50
5	Sangat kurang	0 ≤ IKLH < 25

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Pada tingkat kabupaten/kota, IKLH hanya dihitung berdasarkan persentase nilai indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Indeks IKLH dihitung berdasarkan analisis:

1) indeks kualitas air, diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfar, Fecal Coli dan Total Coliform;
2) indeks kualitas udara, diukur berdasarkan parameter-parameter SO2 dan NO; dan
3) indeks kualitas tutupan lahan, diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Untuk tingkat kabupaten/ kota, nilai IKLH dihitung berdasarkan jumlah dari nilai IKA (37,6%), IKU (40,5%), dan IKL (21,9) tanpa kontribusi IKAL

Tabel 2.16. Data Pemantauan Aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2024

Data Pemantauan			
Indeks	**Titik Pemantauan**	**Data Masuk**	**Data Terverifikasi**
Udara	5	8	8
Air	12	24	24
Lahan	0	1	1
Total	17	33	33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Tabel 2.17. Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Indeks	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	IKA	n.a	n.a	60,83	63,33	62,50
2	IKU	87,00	88.63	91,48	91,12	94,44
3	IKTL	71,71	81,51	81,51	82,67	82,51
5	IKLH	51,38	n.a	77,77	78,82	79,82

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

1. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)

Kabupaten Simeulue pada Tahun 2022 tercatat pada nilai 60,83 masuk kategori “Sedang”. Nilai tersebut sedikit melampaui nilai IKA rata-rata propinsi Aceh yang hanya 59,73. Sedangkan pada Tahun 2023, nilai IKA Kabupaten Simeulue sudah meningkat menjadi 63,33 dengan katagori “Sedang”. Nilai tersebut sedikit melampaui nilai IKA rata-rata propinsi Aceh yang bernilai 61,30.

2. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU)

Pada Tahun 2019 Nilai IKU Kabupaten Simeulue tercatat di angka 98,44, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai IKU menjadi 87,00, yang mungkin mencerminkan adanya penurunan kualitas udara akibat faktor tertentu, seperti peningkatan aktivitas manusia atau perubahan kondisi lingkungan. Meskipun demikian, Kabupaten Simeulue mulai menunjukkan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, IKU meningkat menjadi 88,63, dan peningkatan kualitas ini berlanjut hingga tahun 2022, di mana nilainya mencapai 91,48, menandakan perbaikan kualitas udara yang konsisten. Pada tahun 2023, IKU sedikit menurun ke angka 91,12, namun masih berada pada Katagori “Sangat Baik”. Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020, Kabupaten Simeulue berhasil memperbaiki dan mempertahankan kualitas udara yang baik dalam beberapa tahun terakhir. Upaya untuk menjaga kualitas udara tetap berada di tingkat yang optimal perlu terus dilakukan agar capaian positif ini dapat dipertahankan. Nilai IKU kabupaten Simeulue tahun 2023 tersebut berada di atas nilai IKU rata-rata propinsi Aceh yang mencapai nilai 90,94.

3. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Pemerintah Aceh mulai tahun 2026 bertekad menaikkan nilai IKTL rata-rata dapat mencapai 80,80, sehingga untuk kabupaten/kota dalam propinsi Aceh untuk dapat menaikkan nilai IKTL melalui berbagai strategi, diantaranya menaikkan tutupan hutan melalui program reboisasi, taman kota/ruang terbuka hijau, mengawasi serta mencegah deforestasi. Langkah utama menaikkan nilai IKTL adalah menambah luas kawasan hutan, ini adalah terlalu sulit, komplek dan membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, langkah strategis kabupaten/kota adalah mempertahankan nilai IKTL yang telah ada, dan dengan perlahan-lahan menjaga dan meningkatan kualitas kawasan yang mempunyai fungsi lindung, seperti sempadan sungai, danau, laut dan lereng), selanjutnya melakukan reboisasi pada lahan-lahan kritis.

Perkembangan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, sepanjang periode 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan peningkatan yang signifikan pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai IKTL mengalami kenaikan menjadi 73,71, mencerminkan adanya intervensi yang lebih intensif dalam meningkatkan kualitas tutupan lahan, melalui kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih ketat atau melalui inisiatif restorasi ekosistem. Pada tahun 2021, dengan nilai IKTL sebesar 81,51, yang menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan di Kabupaten Simeulue telah mencapai tingkat lebih baik dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut tetap stabil hingga tahun 2022. Pada tahun 2023, nilai IKTL kembali mengalami peningkatan menjadi 82,67, yang menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan di Kabupaten Simeulue terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan.

4. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Simeulue menunjukkan hasil yang baik dan berada pada tingkat yang sebanding dengan rata-rata Provinsi Aceh. Berdasarkan data, nilai IKLH Simeulue tercatat sebesar 78,82, yang masuk dalam kategori Baik sedikit lebih tinggi dari nilai IKLH Provinsi yang mencapai 78,53.

Pada tahun 2020, nilai IKLH sedikit menurun menjadi 51,38, namun masih berada dalam kategori “Sedang”. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan atau kondisi alam yang memengaruhi kualitas lingkungan, meskipun secara keseluruhan masih menunjukkan angka yang cukup baik. Memasuki tahun 2022, nilai IKLH Simeulue meningkat pesat menjadi 77,77, yang masuk dalam kategori “Baik” ($70 \leq IKLH < 90$). Angka ini mencerminkan kualitas lingkungan yang baik, dengan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif, serta penurunan polusi udara dan air. Peningkatan ini sangat positif bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023,

dengan nilai IKLH mencapai 78,82, yang tetap berada dalam kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa Simeulue telah berhasil mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tentunya memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan ekosistem di wilayah tersebut.

B. Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Kebutuhan rumah tangga dengan sanitasi aman harus dipenuhi di samping akses terhadap air bersih. Akses aman didefinisikan sebagai rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sendiri dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, sedangkan bangunan dibawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam lima tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Akses terhadap sanitasi yang aman sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan mengakui sebagai HAM.

Kondisi pelayanan akses sanitasi layak juga terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian akses sanitasi layak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10 persen. Sektor sanitasi peningkatan capaian terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik.

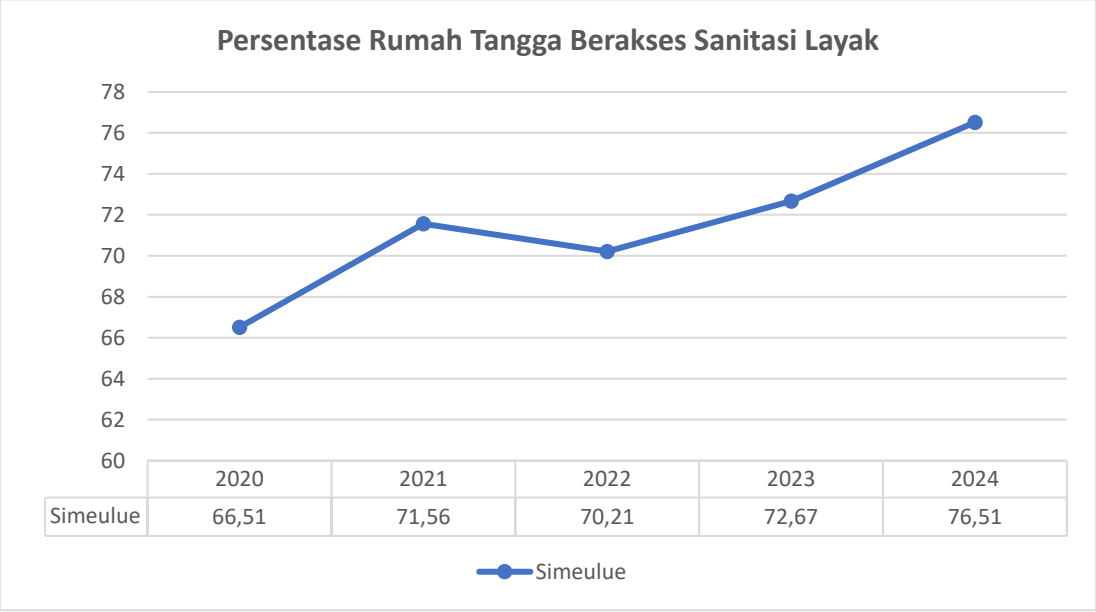

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Tahun 2020-2024

C. Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sampah adalah masalah utama dan serius perkotaan yang juga merupakan salah satu tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Simeulue. Hal tersebut karena tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan. Kota sebagai pusat perekonomian, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain telah mendorong masyarakat untuk berdatangan, baik sementara waktu maupun menetap permanen. Demikian juga yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap masalah sampah perkotaan yang timbulannya setiap tahun terus meningkat. Keterbatasan keuangan daerah telah menjadi kendala utama dalam menangani sampah perkotaan tersebut, sehingga menyebabkan capaian persentase sampah perkotaan tertangani Kabupaten Simeulue tergolong masih rendah. luasan wilayah dan volume sampah yang belum sebanding dengan ketersediaan sumber daya sarana dan prasarana untuk penampungan/mobilisasi sampah masyarakat.

Tabel 2.18. Perkembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume Sampah Ditangani (m^3/hari)	m3/hari	42,00	44,00	51,00	51,00	53,00
2	Jumlah Produksi Sampah (m^3/hari)	m3/hari	131,98	133,56	135,17	136,79	138,43
3	Persentase Penanganan Sampah (%)	persen	33,34	32,94	37,73	37,28	39,01
4	Jumlah TPS (unit)	unit	1140	18	18	20	20
5	Volume Daya Tampung TPS (m^3)	m3	149,8	108,00	108,00	120,00	120,00
6	Jumlah Penduduk (jiwa)	jiwa	94.146	92.865	93.979	95.107	97.403
7	TPS per 1.000 Jiwa (%)	persen	0,63	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

D. Persentase penanganan sampah

Penanganan sampah di Kabupaten Simeulue masih menghadapi sejumlah tantangan yang berkaitan dengan terbatasnya cakupan layanan, sarana, serta kesadaran masyarakat. Secara umum, pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengumpulan dari rumah tangga, pengangkutan ke tempat pembuangan sementara (TPS), hingga pemrosesan akhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Namun, proporsi rumah tangga yang terlayani penuh oleh petugas pengumpulan sampah masih relatif rendah, mengingat sebagian besar wilayah Simeulue merupakan daerah kepulauan dengan akses yang terbatas. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih menangani sampah secara mandiri, baik dengan cara dibakar, ditimbun, maupun dibuang ke lingkungan sekitar. Hal ini menimbulkan risiko pencemaran lingkungan, khususnya pada daerah pesisir dan perairan laut yang menjadi ekosistem penting bagi masyarakat Simeulue.

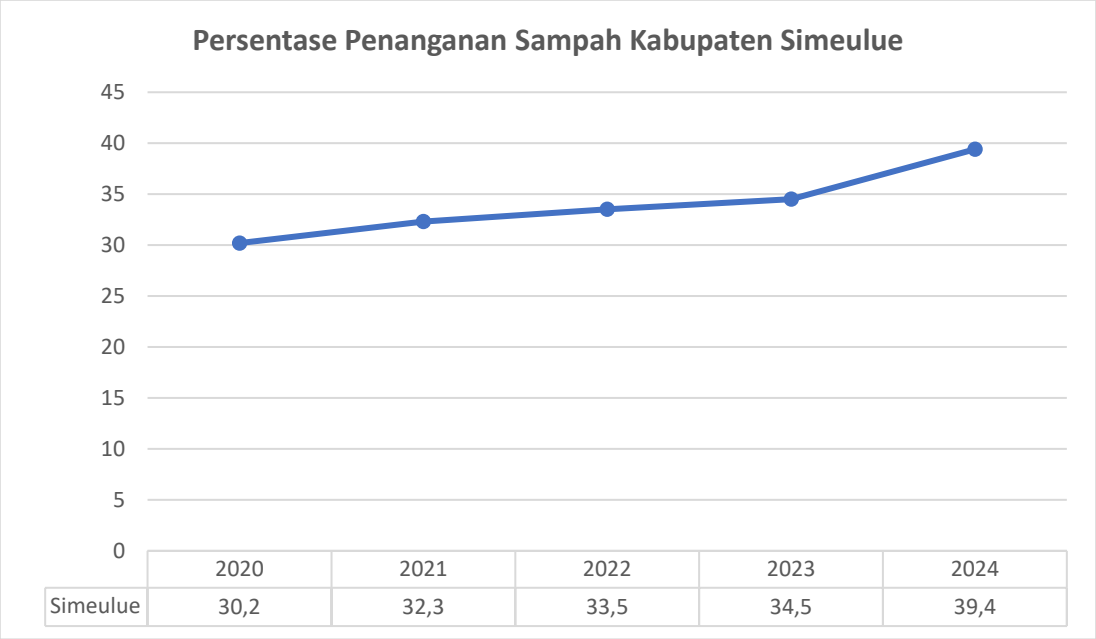

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	30,2	32,3	33,5	34,5	39,4

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.7 Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Data menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga yang terlayani dalam penanganan sampah mengalami tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, cakupan penanganan sampah baru mencapai 30,2%, kemudian naik secara bertahap menjadi 32,3% pada 2021, 33,5% pada 2022, dan 34,5% pada 2023, hingga mencapai 39,4% pada 2024. Rata-rata pertumbuhan tahunan selama periode ini sekitar 2,3% poin per tahun, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada 2024 (naik 4,9% poin dibanding tahun sebelumnya). Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan layanan, baik melalui penambahan armada, sarana persampahan, maupun peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Secara Keseluruhan cakupan layanan masih di bawah 50% rumah tangga. Artinya, sebagian besar masyarakat Simeulue masih menangani sampah secara mandiri, baik dengan membakar, menimbun, maupun membuang ke lingkungan sekitar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, terutama di wilayah pesisir dan perairan laut.

2.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam maupun non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Faktor alam *(natural hazards)* dan faktor non alam atau manusia *(man-made hazards)* yang menurut United Nations International Strategy For Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi *(geological hazards)*, bahaya hidrometeorologi *(*hydrometeorological *hazards),* bahaya biologi *(biological hazards)*, bahaya tekonologi *(technological hazards)* dan penurunan kualitas lingkungan *(environmental degradation)* serta elemen-elemen dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Kabupaten Simeulue merupakan daerah yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam, maupun non alam. Karakteristik fisik Kabupaten Simeulue mempunyai bentuk bervariasi yang tidak lepas dari proses pembentukannya. Sebagaimana layaknya kepulauan, pengaruh kondisi alamnya dan iklim serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya local menyebabkan timbulnya risiko bencana alam, bencana karena ulah manusia dan kedaruratan kompleks, meskipun disisi lain juga memiliki kekayaan sumberdaya alam.

Kondisi iklim tropis Kabupaten Simeulue termasuk ke dalam zona iklim tropika basah dengan temperatur udara berkisar antara 23°C – 34,5°C dan rata-rata harian antara 25°C – 27°C. Berdasarkan data curah hujan dan hari hujan selama 9 tahun yang dikumpulkan oleh Balai Penyuluhan Pertanian menunjukkan bahwa curah hujan rata-rata di Kabupaten Simeulue sangat tinggi yaitu 2.828 mm/tahun. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni yaitu 104 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dengan 331 mm. Keadaan cuaca di Kabupaten Simeulue ditentukan oleh penyebaran musim, dimana musim Barat berlangsung sejak Bulan September sampai dengan bulan Februari, ditandai dengan terjadinya musim badai dan gelombang besar yang berasal dari Lautan Hindia sehingga sangat berbahaya bagi pelayaran. Sedangkan pada musim Timur berlangsung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Agustus ditandai dengan musim kemarau diselingi oleh hujan yang tidak merata dan keadaan laut sedikit tenang. Kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 97,5 % dan lamanya penyinaran rata-rata perhari adalah 13 – 14 jam. Kecepatan angin rata-rata di wilayah ini berkisar antara 50 – 65 knot/jam sehingga menjadi kawasan rawan dan ancaman bencana. Dampak dari bahaya iklim tersebut adalah banjir, tanah longsor, puting beliung, badai angin, liquipaksi, dan kebakaran permukiman.

Kerawanan bencana dapat disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Potensi bencana alam di Kabupaten Simeulue adalah

bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, likuefaksi), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi serta cuaca ekstrem).

Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Potensi bencana non alam di Kabupaten Simeulue antara lain yaitu epidemi dan wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Pandemi Covid- 19 yang terjadi di Indonesia tahun 2020 lalu merupakan salah satu jenis bencana non-alam.

Jenis bencana yang terakhir adalah bencana sosial yang merupakan bencana akibat serangkaian peristiwa oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

A. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana

Sebagai salah satu kunci efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, kajian risiko bencana harus disusun menggunakan metode standar di setiap daerah pada setiap jenjang pemerintahan. Standarisasi metode ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, tingginya akselerasi perkembangan ruang ilmu terkait pengkajian risiko bencana menjadi salah satu bahan pemikiran untuk melaksanakan standarisasi metode. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, dibutuhkan Pedoman Umum yang dapat dijadikan standar minimal bagi penanggungjawab penyelenggara penanggulangan bencana dalam mengkaji risiko bencana.

Oleh karena itu, kajian risiko bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) tahunan serta Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten.

Kajian risiko bencana merupakan upaya dalam menghasilkan informasi terkait tingkat risiko bencana pada suatu daerah. Tingkat risiko diperoleh dari gabungan 3 (tiga) komponen, yaitu **bahaya, kerentanan, dan kapasitas**. Ketiga komponen tersebut ditentukan berdasarkan parameternya masing-masing. Komponen bahaya ditentukan melalui analisis probabilitas (peluang kejadian) dan intensitas (besarnya kejadian). Komponen kerentanan dihitung berdasarkan empat parameter yaitu kerentanan sosial (penduduk terpapar), kerentanan ekonomi (kerugian lahan produktif), kerentanan fisik (kerugian akibat kerusakan rumah dan bangunan), dan kerentanan lingkungan (kerusakan lingkungan). Terakhir, komponen kapasitas ditentukan menggunakan parameter ketahanan daerah (sektor pemerintah). Hasil penggabungan ketiga komponen tersebut berupa risiko yang memberikan informasi mengenai perbandingan antara kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana

1. Pengkajian Bahaya

Pengkajian bahaya bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu luas dan indeks bahaya. Luas bahaya menunjukkan besar kecilnya cakupan wilayah yang terdampak sedangkan indeks bahaya menunjukkan tinggi rendahnya peluang kejadian dan intensitas bahaya tersebut. Oleh karena itu, informasi yang disajikan tidak hanya apakah daerah tersebut terdampak bahaya atau tidak tetapi juga seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut terjadi dan seberapa besar dampak dari bahaya tersebut.

Tabel 2.19. Kajian Bahaya di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

No	Potensi Bahaya	Bahaya Luas (Ha)				KELAS
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Potensi Bahaya Banjir	410	12.646	16.251	29.306	Tinggi
2	Potensi Bahaya Banjir Bandang	23	184	617	825	Tinggi
3	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi	12.103	169	614	12.886	Rendah
4	Potensi Bahaya Gempabumi	208	0	204.940	205.148	Tinggi

No	Potensi Bahaya	Bahaya Luas (Ha)				KELAS
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
5	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	132.798	55.227	705	188.729	Sedang
6	Potensi Bahaya Kekeringan	183.117	22.031	0	205.148	Sedang
7	Potensi Bahaya Tanah Longsor	8.009	41.370	61.739	111.118	Tinggi
8	Potensi Bahaya Tsunami	1.736	1.716	24.058	27.510	Tinggi
9	Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit	205.148	0	0	205.148	Rendah
10	Potensi Bahaya Likuefaksi	0	8.760	933	9.693	Rendah

Sumber: Data Hasil Kajian Risiko Bencana Aceh Tahun 2020-2025

2. Pengkajian Kerentanan

Kerentanan (*vulnerability*) merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Semakin "rentan" suatu kelompok masyarakat terhadap bencana, semakin besar kerugian yang dialami apabila terjadi bencana pada kelompok masyarakat tersebut.

Analisis kerentanan dilakukan secara spasial dengan menggabungkan semua komponen penyusun kerentanan, yang masing-masing komponen kerentanan juga diperoleh dari hasil proses penggabungan dari beberapa parameter penyusun. Komponen penyusun dan parameter kerentanan masing-masing komponen dapat dilihat pada gambar dan komponen penyusun kerentanan terdiri dari:

1) Kerentanan Sosial
2) Kerentanan Fisik
3) Kerentanan Ekonomi
4) Kerentanan Lingkungan

Tabel 2.20. Kajian Kerentanan di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

No.	Potensi Kerentanan	Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelompok Rentan			Kelas
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1	Penduduk Terpapar Bencana Banjir	42.165	4.389	6.844	321	Sedang
2	Penduduk Terpapar Bencana Banjir Bandang	1.578	167	298	14	Sedang
3	Penduduk Terpapar Bencana Cuaca Ekstrim	93.547	9.708	15.604	727	Sedang
4	Penduduk Terpapar Bencana Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	24.680	2.566	4.273	214	Sedang
5	Penduduk Terpapar Bencana Gempabumi	94.251	9.783	15.737	734	Sedang
6	Penduduk Terpapar Bencana Kekeringan	94.251	9.783	15.737	734	Sedang
7	Penduduk Terpapar Bencana Tanah Longsor	5.349	555	821	35	Sedang
8	Penduduk Terpapar Bencana Tsunami	66.420	6.889	11.466	541	Sedang
9	Penduduk Terpapar Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit	94.251	9.783	15.737	734	Sedang
10	Penduduk Terpapar Bencana Likuefaksi	17.833	1.899	3.392	165	Sedang

Sumber: Data Hasil Kajian Risiko Bencana Aceh Tahun 2020-2025

3. Pengkajian Risiko

Hasil pengkajian risiko menunjukkan bahwa Kabupaten Simeulue menghadapi beberapa bencana dengan kategori risiko tinggi, yaitu banjir, banjir bandang, gempa bumi, dan tsunami. Hal ini dipengaruhi kombinasi tingkat bahaya dan kerentanan besar, sementara kapasitas penanganan masih relatif rendah. Situasi ini menuntut adanya strategi mitigasi yang lebih komprehensif, baik melalui pembangunan infrastruktur tangguh bencana maupun peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Selain itu, terdapat beberapa bencana dengan kategori risiko sedang, meliputi cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta likuefaksi. Walaupun risiko sedang tidak menimbulkan dampak sebesar kategori tinggi, ancamannya tetap berpotensi mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penerapan sistem peringatan dini, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Adapun bencana epidemi dan wabah penyakit masuk dalam kategori risiko rendah. Faktor ini dipengaruhi oleh bahaya dan kerentanan yang relatif rendah serta kapasitas penanganan yang lebih baik dibandingkan jenis bencana lainnya. Namun, kewaspadaan tetap dibutuhkan melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, monitoring berbasis data, serta penyuluhan kepada masyarakat agar potensi penyebaran penyakit dapat dicegah secara dini.

Secara keseluruhan, hasil pengkajian ini menegaskan pentingnya prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Simeulue, terutama pada kategori risiko tinggi. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan perlu menyusun strategi yang terarah dan terpadu, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan konsistensi program pembangunan dengan prinsip ketahanan dan keberlanjutan.

Tabel 2.21. Tingkat Kajian Risiko di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

No.	Tingkat Risiko	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Bencana Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2	Bencana Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Bencana Cuaca Ekstrim	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
4	Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
5	Bencana Gempabumi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
7	Bencana Kekeringan	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

No.	Tingkat Risiko	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
8	Bencana Tsunami	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
9	Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah
10	Bencana Likuefaksi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Data Hasil Kajian Risiko Bencana Aceh Tahun 2020-2025

B. Penurunan intensitas Emisi GRK

Perubahan iklim dipengaruhi oleh peningkatan emisi Gas Rumah Kaca berbagai aktivitas yang dilakukan dari berbagai sektor. Hal ini menjadi dasar pentingnya melakukan penilaian dan mitigasi emisi gas rumah kaca sebagai upaya untuk menurunkan atau memperkecil dampak yang ditimbulkan.

Informasi mengenai pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim diperoleh dari kegiatan Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Kebijakan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 98 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) nomor 73 tahun 2017. Kedua peraturan ini menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah sub-nasional, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota, dalam menyusun inventarisasi GRK nasional. IGRK atau Inventarisasi gas rumah kaca merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi gas rumah kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi (*source*) dan penyerapannya (*sink*), termasuk simpanan karbon (*carbon stock*). Inventarisasi gas rumah kaca di tingkat Kabupaten mempunyai peran yang sangat tinggi dalam program penurunan emisi gas rumah kaca.

C. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah, yang menggabungkan berbagai faktor seperti ancaman bencana, kerentanan wilayah, dan kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui risiko yang ada, pemerintah dapat merencanakan dan mengimplementasikan tindakan mitigasi yang sesuai, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, penyediaan sistem peringatan dini, dan pelatihan kesiapsiagaan.

Indeks Risiko Bencana (IRB) diklasifikasikan menjadi tiga kategori: tinggi, sedang, dan rendah.

Tabel 2.22. Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

NO	SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
1	< 13	1	Rendah
2	13 - 144	2	Sedang
3	> 144	3	Tinggi

Sumber: Data Hasil Kajian Risiko Bencana Aceh Tahun 2020-2025

Skor Indeks Risiko Bencana Kabupaten Simeulue sejak Tahun 2020 hingga 2024 tidak mengalami perubahan yaitu 162 dengan Kategori Risiko Bencana yang Tinggi. Hal ini menunjukkan kecenderungan Nilai Kapasitas yang konstan.

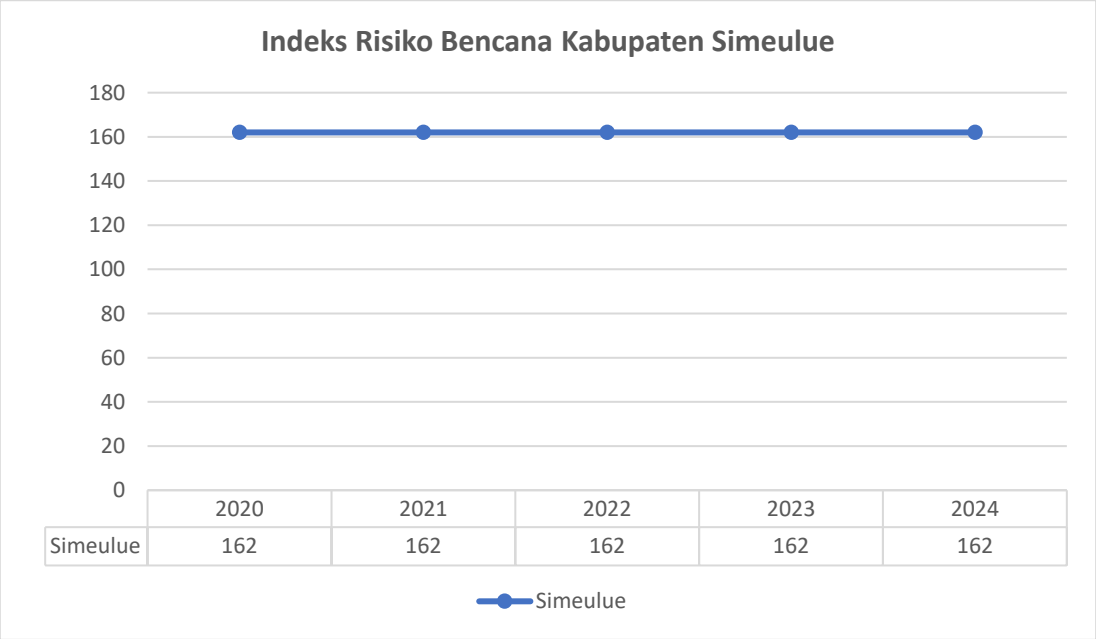

Sumber: Data Hasil Kajian Risiko Bencana Aceh Tahun 2020-2025

Grafik 2.8 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

D. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan

terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

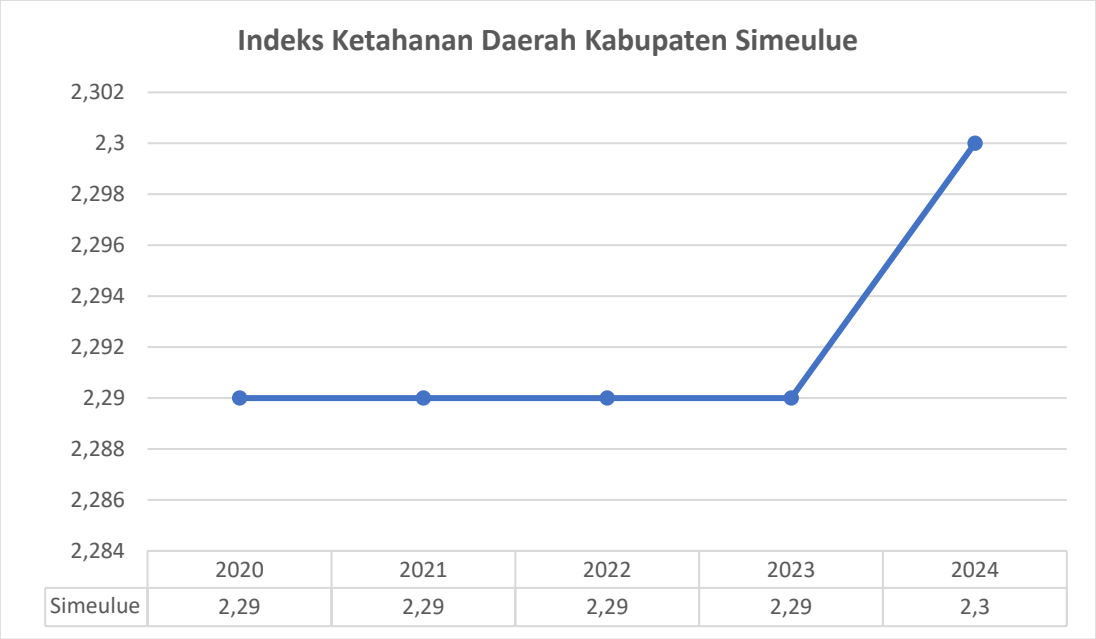

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	2,29	2,29	2,29	2,29	2,3

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.9 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

2.1.1.7 Demografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Simeulue dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Simeulue mencapai 98.633 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 54 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 yang tercatat sebanyak 97.118 jiwa. Berikut ini, adalah Gambar tentang jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan kepadatan penduduk per kilometer di Kabupaten Simeulue selama 5 terakhir.

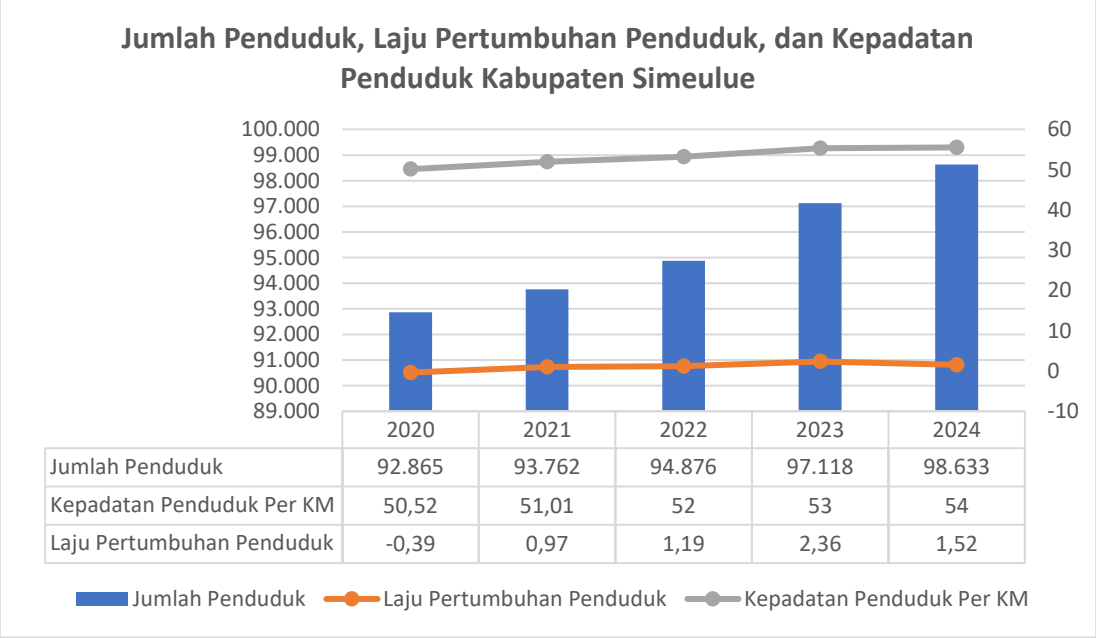

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.10 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

B. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Simeulue antara tahun 2020 hingga 2024 tersebar di 10 kecamatan, namun belum merata. Hal ini dapat dilihat pada table

Tabel 2.23. Jumlah Penduduk Kabupaten Simeulue Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Teupah Selatan	9.030	9.054	9.098	9.444	9.591
2	Simeulue Timur	27.569	27.925	28.349	28.830	29.280
3	Teupah Barat	8.011	8.054	8.115	8.378	8.509
4	Teupah Tengah	6.593	6.649	6.720	6.895	7.003
5	Simeulue Tengah	7.312	7.409	7.523	7.647	7.766
6	Teluk Dalam	5.459	5.492	5.538	5.709	5.798
7	Simeulue Cut	3.382	3.420	3.466	3.537	3.592
8	Salang	8.818	8.907	9.016	9.222	9.366
9	Simeulue Barat	11.763	11.898	12.061	12.302	12.494
10	Alafan	4.928	4.954	4.990	5.154	5.234
Jumlah		**92.865**	**93.762**	**94.876**	**97.118**	**98.633**

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Data diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Simeulue meningkat dari 92.865 jiwa pada 2020 menjadi 98.633 jiwa pada 2024, dengan angka pertumbuhan penduduk tahunan rata-rata sebesar 1,52 persen pada 2024. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi signifikan memperluas pangsa pasar dan menciptakan pusat pertumbuhan antar kecamatan. Hunian penduduk yang relatif merata antar kecamatan turut mempengaruhi terjadinya disparitas pertumbuhan antar wilayah. Kecamatan Simeulue Timur sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Simeulue, dihuni penduduk yang dominan.

C. Struktur Penduduk

Struktur penduduk Kabupaten Simeulue tahun 2024 dapat diklasifikasikan berdasarkan kelompok umur menjadi tiga kategori utama, yaitu penduduk usia muda (0–14 tahun), penduduk usia produktif (15–59 tahun), dan penduduk usia lanjut (≥60 tahun). Pola struktur umur penduduk Simeulue menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan struktur penduduk nasional, yang umumnya dibedakan menjadi tiga bentuk piramida penduduk: piramida muda, piramida stationer, dan piramida tua. Piramida muda mencerminkan komposisi penduduk yang sedang tumbuh dengan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang lebih rendah. Piramida stationer menggambarkan kondisi penduduk yang cenderung stabil akibat tingkat kelahiran dan kematian yang relatif seimbang. Sementara itu, piramida tua mengindikasikan penurunan angka kelahiran yang signifikan dengan tingkat kematian yang tetap rendah.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur tertinggi pada tahun 2024 berada pada kelompok umur antara (20-24) tahun, yaitu 9.556 jiwa (9.69%) dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebesar 5.020 jiwa dan perempuan sebesar 4.536 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok umur terendah adalah pada kelompok umur non produktif antara (70-74) tahun, yakni sebesar 1.434 jiwa (1,45%). Jumlah penduduk usia produktif pada kelompok umur antara (15-64) tahun sebesar 67.412 jiwa (68%). Jika di lihat berdasarkan pengelompokkan umur (15-64) tahun, kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar kelompok tersebut merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) dan sisanya merupakan penduduk lanjut usia (≥65 tahun), yaitu sebesar 5.090 jiwa (5 %).

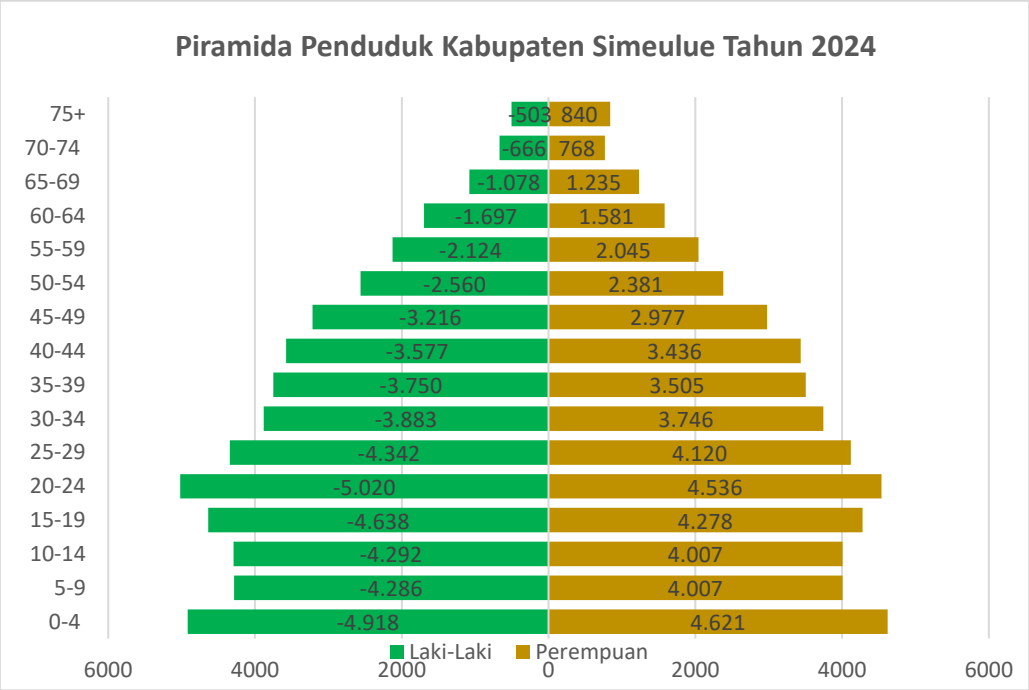

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Gambar 2.7. Struktur Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2024 (jiwa)

Keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan antara lain tercermin melalui perubahan komposisi penduduk berdasarkan struktur umur, khususnya ditandai oleh penurunan proporsi penduduk usia tidak produktif, yaitu kelompok umur 0–14 tahun dan kelompok umur ≥65 tahun. Penurunan proporsi kelompok usia ini berimplikasi langsung terhadap menurunnya angka angka beban ketergantungan. Semakin rendah angka beban ketergantungan menunjukkan bahwa beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif menjadi lebih ringan. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kapasitas produktif suatu wilayah dan memberikan peluang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila didukung oleh kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.

Beban Ketergantungan Penduduk memberi gambaran tentang perbandingan antara jumlah penduduk produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif. Diperkirakan sepuluh tahun ke depan, Kabupaten Simeulue akan mendapat Bonus Demografi dengan struktur penduduk Kabupaten Simeulue akan didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun). Peluang Bonus Demografi ini harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue karena akan memberikan pengaruh positif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.

D. Jumlah Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Simeulue tahun 2024, sebanyak 29.280 jiwa mendiami di Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Simeulue Barat berkisar 12.494 jiwa. Adapun kecamatan lainnya dengan populasi penduduk dibawah 10 persen dari total penduduk Kabupaten Simeulue. Diantaranya, meliputi Teupah Selatan, Salang, Teupah Barat, Simeulue Tengah, Teupah Tengah, Alafan, dan Simeulue Cut. Kecamatan dengan persentase jumlah penduduk terkecil ada pada Kecamatan Simeulue Cut, yaitu sebanyak 3.592 jiwa. Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Simeulue selama periode ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang mengindikasikan adanya pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Penduduk berimplikasi signifikan memperluas pangsa pasar dan menciptakan pusat pertumbuhan antar kecamatan. Hunian penduduk yang relatif merata antar kecamatan turut mempengaruhi terjadinya disparitas pertumbuhan antar wilayah. Kecamatan Simeulue Timur sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Simeulue, dihuni penduduk yang dominan.

Tabel 2.24. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	4.918	4.621	9.539
5-9	4.286	4.007	8.293
10-14	4.292	4.007	8.299
15-19	4.638	4.278	8.916
20-24	5.020	4.536	9.556
25-29	4.342	4.120	8.462
30-34	3.883	3.746	7.629
35-39	3.750	3.505	7.255
40-44	3.577	3.436	7.013
45-49	3.216	2.977	6.193
50-54	2.560	2.381	4.941
55-59	2.124	2.045	4.169
60-64	1.697	1.581	3.278
65-69	1.078	1.235	2.313
70-74	666	768	1.434
75+	503	840	1.343
Simeulue	**50.550**	**48.083**	**98.633**

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Berdasarkan proporsi penduduk menurut jenis kelamin, dari total penduduk Pada tahun 2024 sebesar 98.633 jiwa, proporsi penduduk laki-laki mencapai 50.550 jiwa dan perempuan sebesar 48.083 jiwa. Jika dilihat dari table jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, namun pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki cenderung mengalami peningkatan. Pengelompokan penduduk berdasarkan kelompok umur penduduk dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu penduduk usia muda (0-14) tahun penduduk usia produktif (15-59) tahun dan penduduk usia lanjut (>60). Jumlah penduduk usia produktif pada kelompok umur antara (15-64) tahun sebesar 67.412 jiwa. Jika di lihat berdasarkan pengelompokkan umur (15-64) tahun, kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar kelompok tersebut merupakan penduduk usia kerja (usia produktif) dan sisanya merupakan penduduk lanjut usia (=65 tahun), yaitu sebesar 5.090 jiwa.

E. Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan

Perencanaan pembangunan membutuhkan data kependudukan yang akurat, termasuk proyeksi jumlah penduduk di masa mendatang. Berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Simeulue diperkirakan terus meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Simeulue diproyeksikan sebesar 100.136 jiwa, dan akan meningkat secara bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 105.943 jiwa pada tahun 2029. Ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang konsisten per tahun.

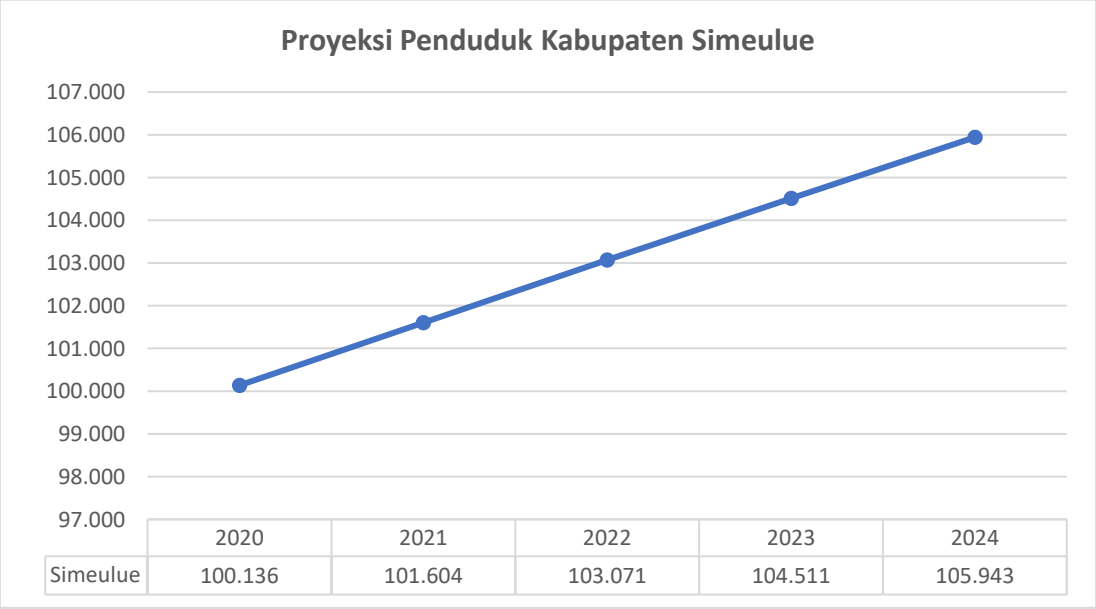

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	100.136	101.604	103.071	104.511	105.943

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.11 Proyeksi Penduduk Kabupaten Simeulue 5 (lima) Tahun Kedepan

Di sisi lain, meskipun terjadi pertumbuhan di semua wilayah, laju pertumbuhan bervariasi. Implikasi dari proyeksi pertumbuhan penduduk tersebut mengisyaratkan perlunya respons kebijakan yang berbeda di setiap wilayah sesuai dengan karakteristik demografinya. Wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi perlu mendapatkan prioritas dalam penyediaan dan peningkatan sarana serta prasarana publik, seperti layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penciptaan lapangan kerja. Sebaliknya, daerah dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif lambat dapat difokuskan pada strategi pengembangan sektor ekonomi unggulan, program revitalisasi wilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Secara keseluruhan, proyeksi kependudukan lima tahun mendatang memberikan landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adaptif, responsif, dan berbasis data, guna menjawab tantangan serta memanfaatkan peluang dari dinamika perubahan struktur penduduk.

F. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Indikator ini mencerminkan dinamika kependudukan yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Laju pertumbuhan yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang cepat, yang dapat berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, perumahan, pendidikan, dan lapangan kerja. Sebaliknya, laju pertumbuhan yang rendah menandakan pertambahan penduduk yang lebih terkendali, namun jika terlalu rendah juga bisa menimbulkan tantangan seperti kekurangan tenaga kerja di masa depan. laju pertumbuhan penduduk selalu dikaitkan dengan produktivitas, investasi sumber daya manusia, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk penting dianalisis untuk merencanakan pembangunan dan penyediaan fasilitas publik secara lebih tepat.

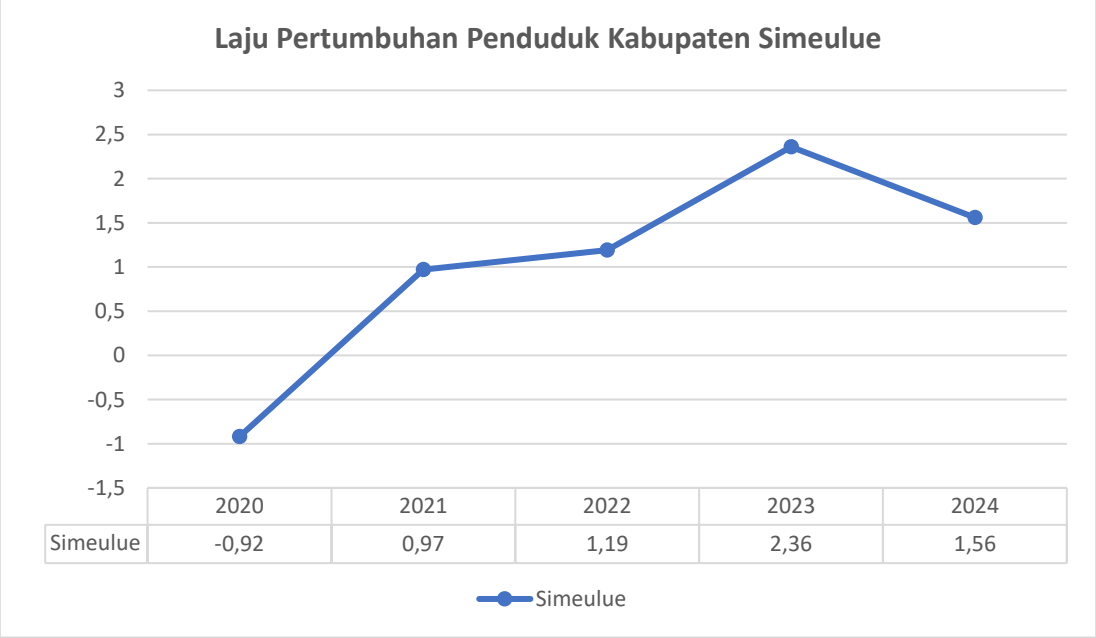

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.12 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 (Jiwa/Km2)

Laju pertumbuhan kepadatan penduduk di Simeulue terus bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan relatif stabil pada 2021–2022 di bawah 1%, kemudian meningkat pada 2023 hingga mencapai puncaknya di 2024 sebesar 2,36%. Lonjakan ini bisa disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran, menurunnya angka kematian, atau adanya arus migrasi masuk. Pertumbuhan penduduk Simeulue masih terkendali dan tidak terlalu tinggi, namun kecenderungan peningkatan di beberapa tahun terakhir perlu diantisipasi agar penyediaan fasilitas umum, lapangan kerja, dan kebutuhan dasar masyarakat dapat seimbang dengan jumlah penduduk.

G. Rasio Penduduk

Rasio penduduk adalah perbandingan jumlah suatu kelompok penduduk terhadap kelompok penduduk lain atau terhadap total penduduk, biasanya dinyatakan dalam bentuk angka per 100 atau per 1.000. Rasio penduduk yang bekerja merupakan indikator penting dalam perekonomian karena menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang terserap dalam kegiatan produktif. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang bekerja terhadap total penduduk usia kerja, kemudian dikalikan seratus persen. Semakin tinggi rasionya, semakin baik pula tingkat pemanfaatan sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, rasio yang rendah mencerminkan masih terbatasnya kesempatan kerja atau rendahnya partisipasi angkatan kerja, sehingga berpotensi menambah beban ekonomi bagi kelompok yang bekerja.

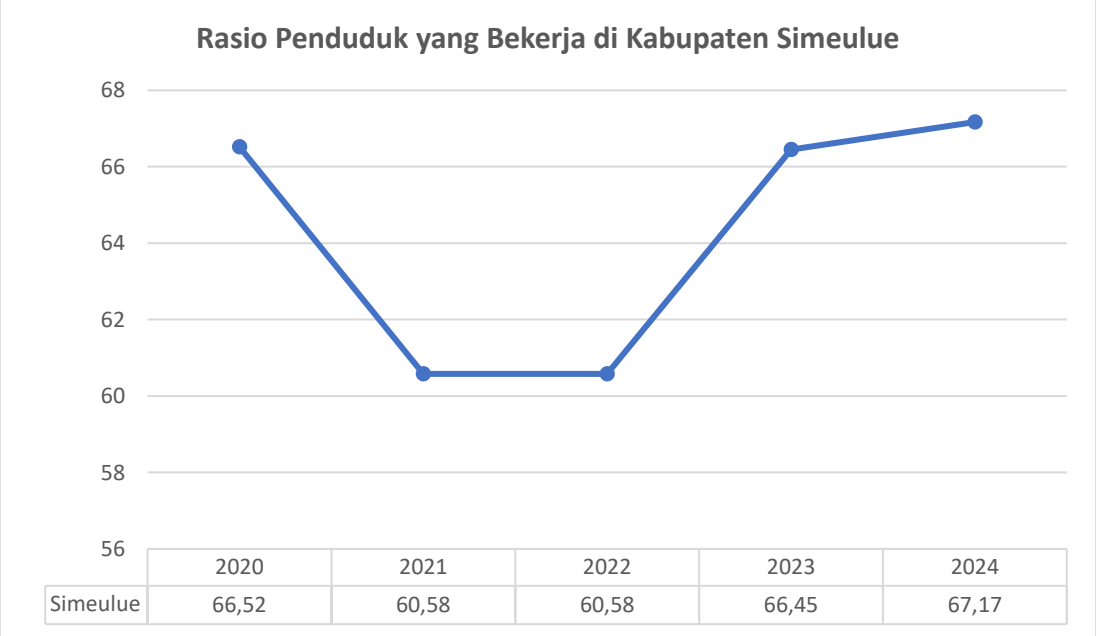

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.13 Rasio Penduduk yang Kekerja Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Berdasarkan data Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Simeulue tahun 2020–2024, terlihat perkembangan yang positif. Pada tahun 2020 data belum tersedia, namun pada tahun 2021 tercatat sebesar 90,18%. Angka ini meningkat menjadi 91,98% pada tahun 2022, dan kembali naik signifikan menjadi 93,79% di tahun 2023, sementara data tahun 2024 belum tercatat. Secara keseluruhan, tren dari 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Simeulue terserap dalam kegiatan ekonomi. Kenaikan rasio ini mengindikasikan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja, meningkatnya peluang kerja, serta tingginya partisipasi penduduk dalam aktivitas produktif. Hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

H. Kepadatan Penduduk

Penduduk merupakan sekelompok orang yang tinggal atau menempati suatu wilayah tertentu. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau crude population density (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah, luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi. Kepadatan penduduk dapat menjadi indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah, dengan wilayah kepadatan tinggi sering kali menjadi pusat kegiatan sosial ekonomi. Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2).



Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.14 Kepadatan Penduduk Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Berdasarkan data kepadatan penduduk Kabupaten Simeulue tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 50,52 jiwa/km², kemudian naik menjadi 51,01 jiwa/km² pada 2021. Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 51,62 jiwa/km², dan terus meningkat hingga mencapai 52,84 jiwa/km² pada 2023. Pada 2024, angka ini kembali bertambah menjadi 53,66 jiwa/km². Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Kenaikan kepadatan penduduk ini dapat dihubungkan dengan faktor pertumbuhan alami (kelahiran lebih tinggi dibanding kematian) serta kemungkinan adanya migrasi masuk. Tren ini memberikan gambaran bahwa kebutuhan ruang, perumahan, serta layanan publik di Simeulue akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepadatan penduduk.

Tabel 2.25. Kepadatan Penduduk per Kecamatan (Jiwa/Km2)

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Teupah Selatan	40,63	40,74	40,94	42,49	43,16
Simeulue Timur	156,67	158,69	161,10	163,83	166,39
Teupah Barat	54,60	54,89	55,31	57,10	57,99
Teupah Tengah	78,77	79,44	80,29	82,38	83,67
Simeulue Tengah	65,01	65,87	66,88	67,99	69,04
Teluk Dalam	24,30	24,44	24,65	25,41	25,81
Simeulue Cut	95,54	96,61	97,91	99,92	101,47
Salang	44,32	44,77	45,32	46,35	47,07
Simeulue Barat	26,37	26,67	27,04	27,58	28,01
Alafan	25,68	25,82	26,01	26,86	27,28
Total	**50,52**	**51,01**	**51,62**	**52,84**	**53,66**

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Kepadatan penduduk di Kabupaten Simeulue menunjukkan tren meningkat dari 50,52 jiwa/km² pada 2020 menjadi 53,66 jiwa/km² pada 2024. Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Simeulue Timur, naik dari 156,67 menjadi 166,39 jiwa/km², sehingga terlihat jelas sebagai pusat konsentrasi penduduk. Sementara itu, kepadatan terendah terdapat di Teluk Dalam dan Alafan yang hanya berkisar 25–27 jiwa/km² sepanjang periode tersebut. Beberapa kecamatan lain juga mengalami pertumbuhan cukup signifikan, seperti Teupah Tengah (78,77 → 83,67 jiwa/km²) dan Simeulue Cut (95,54 → 101,47 jiwa/km²). Kecamatan lain seperti Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah, Salang, dan Simeulue Barat juga mengalami kenaikan, meski dengan laju yang lebih lambat. Secara umum, peningkatan kepadatan ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil, tetapi distribusinya belum merata karena masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi mencerminkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan berkelanjutan. Indikator utamanya meliputi pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, dan akses terhadap layanan dasar. Pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan sektor lokal.

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dengan angka Pertumbuhan Ekonomi tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan cerminan dari kinerja perekonomian Kabupaten Simeulue. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue dalam periode 2020–2024 ditunjukkan melalui perkembangan PDRB ADHK yang menggambarkan kinerja riil perekonomian daerah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Simeulue, perekonomian daerah mengalami tren pertumbuhan positif yang mencerminkan pemulihan pascapandemi COVID-19 dan peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah daerah, dan perbaikan akses infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.

Tabel 2.26. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Simeulue, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	793.623	845.937	958.186	1.095.563	1.199.261
B	Pertambangan dan Penggalian	36.030	36.406	39.600	42.268	42.811
C	Industri Pengolahan	29.788	32.425	38.563	40.634	42.065
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.606	4.615	4.854	5.254	5.598
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	278	294	332	349	383
F	Konstruksi	214.056	222.463	234.159	254.475	262.199
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	284.857	320.917	350.000	384.731	417.822
H	Transportasi dan Pergudangan	47.641	54.387	61.193	72.699	79.151
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.672	34.971	45.769	52.598	54.689
J	Informasi dan Komunikasi	84.370	95.279	109.722	116.146	123.207
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	44.412	46.342	50.438	45.366	51.855
L	Real Estat	83.915	89.596	95.721	100.327	103.160
M, N	Jasa Perusahaan	3.585	3.739	4.279	4.332	4.467
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	385.580	427.242	423.249	438.046	461.697
P	Jasa Pendidikan	87.406	94.156	97.230	100.108	109.862
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114.819	126.909	146.829	151.416	161.094
R, S, T, U	Jasa lainnya	22.724	24.616	27.907	30.791	31.436
	PDRB	**2.274.362**	**2.460.291**	**2.688.028**	**2.935.101**	**3.150.758**

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

PDRB ADHB Kabupaten Simeulue meningkat dari Rp2,27 triliun pada 2020 menjadi Rp3,15 triliun pada 2024. Sektor utama penyumbang PDRB adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang tumbuh signifikan dari Rp793,6 miliar menjadi Rp1,19 triliun. Sektor lainnya yang mendorong pertumbuhan adalah Administrasi Pemerintahan, Perdagangan, Transportasi, dan Informasi dan Komunikasi, yang semuanya menunjukkan tren kenaikan. Secara keseluruhan, ekonomi Simeulue tumbuh stabil dengan dominasi sektor primer dan peran besar belanja pemerintah.

Tabel 2.27. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Simeulue, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	552.860	551.893	577.560	627.310	655.472
B	Pertambangan dan Penggalian	28.441	28.604	28.700	29.940	30.260
C	Industri Pengolahan	21.284	21.945	23.160	23.490	23.675
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.312	3.311	3.390	3.550	3.757
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	160	170	180	190	189
F	Konstruksi	162.584	163.015	163.080	171.300	175.304
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	198.175	214.238	226.650	237.630	251.527
H	Transportasi dan Pergudangan	37.145	41.691	43.850	46.430	50.004
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24.231	22.220	26.440	29.400	30.019
J	Informasi dan Komunikasi	76.059	84.880	95.100	99.360	105.565
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	29.065	28.470	28.490	25.390	28.210
L	Real Estat	58.910	60.940	63.020	64.990	68.099
M, N	Jasa Perusahaan	2.582	2.590	2.780	2.730	2.822
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	254.266	270.680	270.130	269.250	280.021
P	Jasa Pendidikan	58.455	59.300	60.450	61.260	64.732
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	78.597	86.080	94.620	94.110	95.708
R, S, T, U	Jasa lainnya	16.285	17.020	19.030	20.280	21.246
	PDRB	**1.602.411**	**1.657.046**	**1.726.630**	**1.806.610**	**1.886.610**

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Struktur PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Simeulue, 2020-2024 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap ekonomi regional, dengan kontribusi stabil di kisaran 33–35% dari total PDRB. Diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, yang meningkat dari 12,37% menjadi 13,33%, serta Administrasi Pemerintahan yang meski mengalami penurunan proporsional dari 15,87% menjadi 14,85%, tetap signifikan. Sektor Informasi dan Komunikasi mencatat lonjakan kontribusi dari 4,75% menjadi 5,60%, mencerminkan akselerasi digitalisasi. Sementara itu, sektor-sektor yang terdampak pandemi seperti Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan pemulihan, dengan kontribusi kembali naik menjadi 1,59% di 2024. Beberapa sektor seperti Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami penurunan proporsional, dari 1,81% menjadi 1,50%, sedangkan sektor lainnya relatif stabil dengan kontribusi kecil namun meningkat secara nominal.

Tabel 2.28. Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2020 – 2024 (Persen)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,89	34,38	35,65	35,65	38,06
B	Pertambangan dan Penggalian	1,58	1,48	1,47	1,47	1,36
C	Industri Pengolahan	1,31	1,32	1,43	1,43	1,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	9,41	9,04	8,71	8,71	8,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,52	13,04	13,02	13,02	13,26
H	Transportasi dan Pergudangan	2,09	2,21	2,28	2,28	2,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,61	1,42	1,70	1,70	1,74
J	Informasi dan Komunikasi	3,71	3,87	4,08	4,08	3,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,95	1,88	1,88	1,88	1,65
L	Real Estat	3,69	3,64	3,56	3,56	3,27
M, N	Jasa Perusahaan	0,16	0,15	0,16	0,16	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,95	17,37	15,75	15,75	14,65
P	Jasa Pendidikan	3,84	3,83	3,62	3,62	3,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,05	5,16	5,46	5,46	5,11
R, S, T, U	Jasa lainnya	1,00	1,00	1,04	1,04	1,00
	Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Antara 2020 hingga 2024, struktur ekonomi di Kabupaten Simeulue mengalami pergeseran yang signifikan, dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang semakin dominan, meningkat dari 34,89% menjadi 38,06%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tetap konsisten di posisi kedua dengan kontribusi sekitar 13%. Di sisi lain, sektor Administrasi Pemerintahan dan Konstruksi mengalami penurunan kontribusi, masing-masing dari 16,95% ke 14,65% dan dari 9,41% ke 8,32%. Sektor Informasi dan Komunikasi serta Transportasi dan Pergudangan sedikit meningkat, sementara sektor Jasa Keuangan dan Asuransi serta Real Estat mengalami penurunan. Secara keseluruhan, terjadi penguatan sektor pertanian dan perdagangan, sementara sektor pemerintahan dan konstruksi sedikit melemah.

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Angka ini menunjukkan persentase kenaikan atau penurunan nilai PDRB riil dibandingkan periode sebelumnya. Jika pertumbuhannya positif, berarti kegiatan ekonomi, produksi barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhannya rendah atau negatif, maka perekonomian melambat bahkan bisa mengalami kontraksi. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menilai kinerja pembangunan ekonomi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan agar pertumbuhan yang terjadi lebih merata dan berkelanjutan.

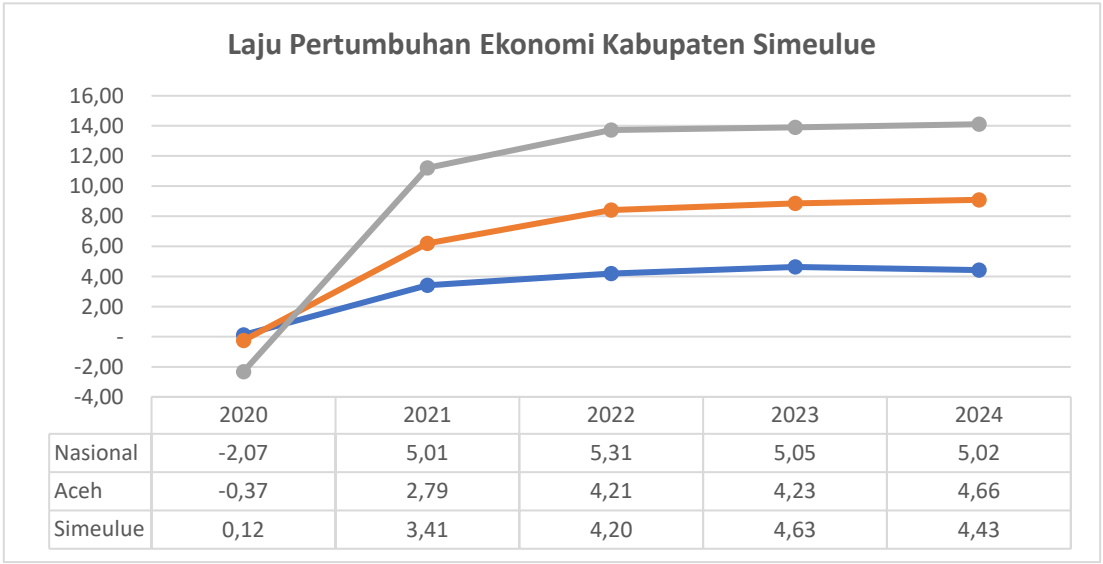

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-2,07	5,01	5,31	5,05	5,02
Aceh	-0,37	2,79	4,21	4,23	4,66
Simeulue	0,12	3,41	4,20	4,63	4,43

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024 (Persen)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue pada periode lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 hanya mencapai 0,12 persen, kondisi ini merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang menekan hampir seluruh sektor termasuk perekonomian. Pada tahun 2021, ekonomi Simeulue mulai bangkit dengan pertumbuhan mencapai 3,41 persen, didorong oleh membaiknya aktivitas masyarakat, dukungan program pemerintah, serta mulai pulihnya sektor perdagangan dan jasa. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,20 persen dan tahun 2023 mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 4,63 persen. Meski demikian, pada 2024 terjadi sedikit perlambatan menjadi 4,43 persen, namun capaian ini tetap menunjukkan bahwa perekonomian Simeulue masih tumbuh stabil di atas 4 persen.

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita adalah indikator ekonomi yang menggambarkan rata-rata output atau pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB per kapita Kabupaten Simeulue tahun 2023 sebesar Rp 30,22 juta mencerminkan pendapatan rata-rata masyarakat yang masih rendah, dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan, terbatasnya infrastruktur, dan dominasi sektor ekonomi bernilai tambah rendah seperti pertanian dan perikanan. Rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan tenaga kerja juga membatasi produktivitas. Meski begitu, Simeulue memiliki potensi besar untuk meningkatkan PDRB melalui pengembangan ekowisata, hilirisasi hasil alam, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia.

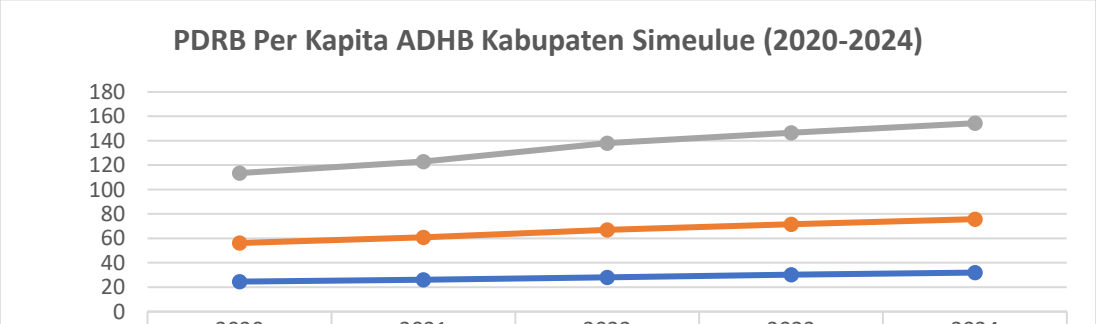

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	57,3	62,2	71,03	75	78,62
Aceh	31,63	34,67	38,9	41,42	43,78
Simeulue	24,55	26,15	28,12	30,22	31,94

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.16 PDRB Kabupaten Simeulue, Aceh dan PDB Nasional Per Kapita ADHB Tahun 2020–2024 (Juta Rupiah)

Selama 2020–2024, PDRB per kapita Simeulue tumbuh stabil dengan rata-rata kenaikan 6–7% per tahun, sedikit melambat pada 2024 menjadi 5,69%. Sementara itu, Aceh mengalami pertumbuhan yang lebih fluktuatif, dengan puncak tertinggi 12,22% pada 2022. Secara nasional, pertumbuhan mencapai 14,20% di 2022 lalu melambat menjadi 4,83% di 2024. Meski menunjukkan tren positif, PDRB per kapita Simeulue pada 2024 hanya sekitar 73% dari Aceh dan 41% dari nasional, mencerminkan kesenjangan ekonomi yang masih lebar antarwilayah.

D. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini adalah indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Rasio Gini di Kabupaten Simeulue menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang tergolong rendah, mencerminkan distribusi pendapatan yang relatif merata di antara penduduknya. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun, ketimpangan yang terjadi masih berada dalam batas wajar dan belum menunjukkan gejala ketimpangan ekstrem, dan ini artinya upaya pemerataan ekonomi di wilayah tersebut cukup berhasil, meskipun tetap perlu diantisipasi potensi peningkatan ketimpangan di masa mendatang melalui kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kurun waktu 2020 hingga Maret 2024, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Simeulue menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung membaik. Setelah sempat meningkat pada 2021, ketimpangan menurun secara signifikan hingga mencapai titik terendah pada 2024. Dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan tingkat nasional, Simeulue secara konsisten mencatat rasio Gini yang lebih rendah, menandakan distribusi pendapatan yang lebih merata di daerah tersebut. Sementara itu, Aceh juga menunjukkan perbaikan ketimpangan pendapatan secara bertahap, sedangkan rasio Gini nasional cenderung stagnan dengan sedikit penurunan pada 2024.

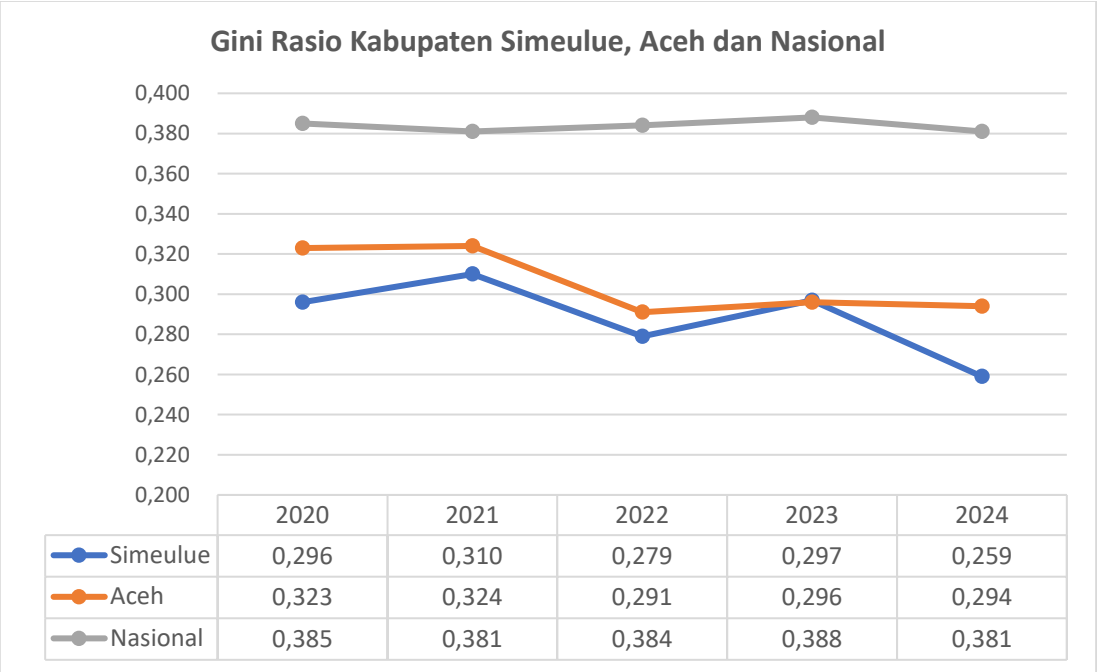

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	0,296	0,310	0,279	0,297	0,259
Aceh	0,323	0,324	0,291	0,296	0,294
Nasional	0,385	0,381	0,384	0,388	0,381

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.17 Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. IPM tidak hanya mencerminkan capaian pembangunan dari sisi ekonomi, tetapi juga aspek sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Simeulue menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024, naik sebesar 4,92 poin dari 66,03 menjadi 70,95, dengan lonjakan terbesar terjadi antara 2022 dan 2023.

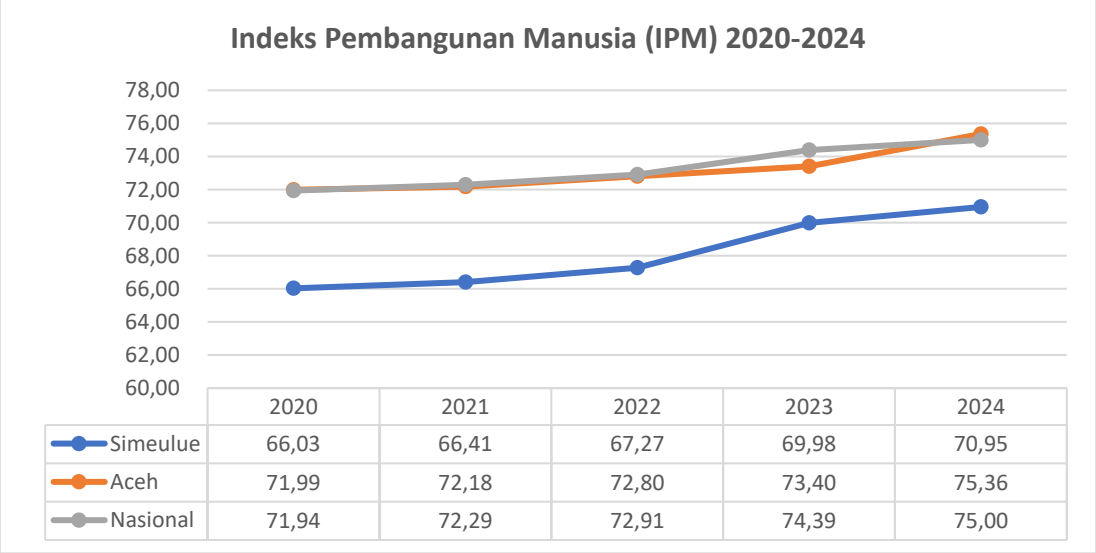

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	66,03	66,41	67,27	69,98	70,95
Aceh	71,99	72,18	72,80	73,40	75,36
Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	75,00

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Meskipun IPM Simeulue masih berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional, laju pertumbuhannya melampaui keduanya, mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Sementara itu, IPM Aceh meningkat lebih lambat, dari 73,29 menjadi 75,36, dan IPM Nasional naik dari 71,92 menjadi 75,02, dengan tren yang relatif stabil namun tetap positif.

F. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang berada di bawah standar kehidupan yang layak dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara memadai, yang meliputi kebutuhan pangan maupun non-pangan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Simeulue masih menjadi tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian serius. Sebagai wilayah kepulauan yang relatif terpencil, Simeulue menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, keterbatasan lapangan kerja, serta dominasi sektor primer yang rentan terhadap gejolak alam dan pasar.

Meskipun telah terjadi penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan Simeulue masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, mencerminkan perlunya strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Upaya pengurangan kemiskinan di Simeulue memerlukan sinergi lintas sektor melalui penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah terpencil dan pesisir.

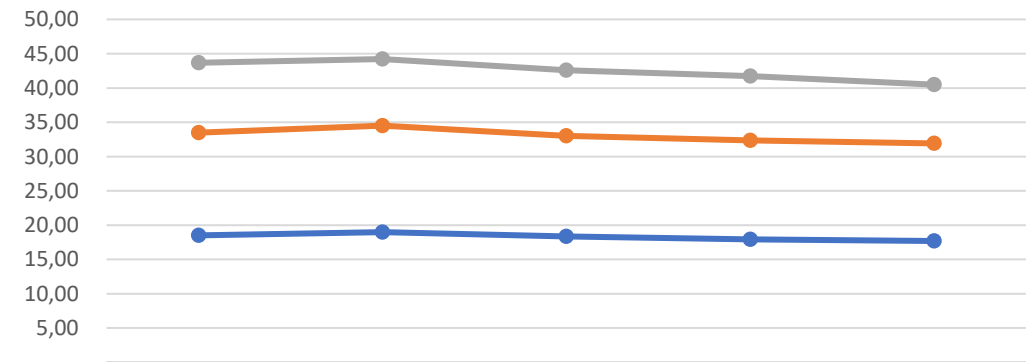

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57
Aceh	14,99	15,53	14,64	14,45	14,23
Simeulue	18,49	18,98	18,37	17,92	17,69

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.19 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2020–2024 (%)

Selama periode 2020–2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Simeulue menunjukkan tren menurun, dari 18,49% pada tahun 2020 menjadi 17,69% pada tahun 2024. Meskipun terdapat fluktuasi pada tahun 2022, penurunan secara umum mencerminkan dampak positif dari berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial. Namun, angka kemiskinan Simeulue masih berada jauh di atas rata-rata Provinsi Aceh (14,23%) dan Nasional (8,57%) pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan struktural dan geografis masih menjadi penghambat utama pengentasan kemiskinan di Simeulue, dan dibutuhkan intervensi yang lebih spesifik, terarah, dan berkelanjutan untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan di wilayah tersebut.

G. Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja, tetapi pada saat survei tidak sedang bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. TPT menggambarkan seberapa besar porsi tenaga kerja yang belum terserap oleh pasar kerja dan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pembangunan ketenagakerjaan.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Simeulue mencerminkan tantangan struktural dalam pembangunan ketenagakerjaan di wilayah kepulauan. Keterbatasan lapangan kerja formal, dominasi sektor primer, serta rendahnya diversifikasi ekonomi menyebabkan sebagian angkatan kerja belum terserap secara optimal. Meskipun sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal seperti pertanian dan perikanan, peluang kerja yang terbatas di sektor industri dan jasa turut mempengaruhi rendahnya produktivitas dan tingginya tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan wirausaha lokal, serta perluasan kesempatan kerja berbasis potensi unggulan daerah untuk menekan angka pengangguran secara berkelanjutan.

Tabel 2.29. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik, Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Karakteristik		Tahun (Orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja		65.875	67.023	68.126	71.487	72.158
a	Angkatan Kerja	46.354	47.689	43.900	50.451	51.293
	- Bekerja	43.819	44.964	41.268	47.502	48.472
	-Pengangguran	2.535	2.725	2.632	2.949	2.821
b	Bukan Angkatan Kerja	19.521	19.334	24.226	21.036	20.865

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Simeulue meningkat dari 65.875 orang pada 2020 menjadi 72.158 orang pada 2024. Angkatan kerja juga naik, didominasi oleh penduduk yang bekerja. Jumlah pengangguran relatif stabil, sementara bukan angkatan kerja cenderung fluktuatif. Ini mencerminkan perbaikan partisipasi kerja meski tantangan penyerapan tenaga kerja masih ada.

Tabel 2.30. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

NO	PENDIDIKAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD	1,49	1,73	3,32	0,48	1,15
2	SMP	2,29	4,90	4,58	4,45	2,37
3	SMA/SMK	8,58	8,80	10,10	10,30	7,88
4	Diploma /SI	8,42	5,18	1,18	5,14	10,28
TPT		**5,47**	**5,71**	**6,00**	**5,85**	**5,50**

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Tingkat pengangguran tertinggi di Kabupaten Simeulue selama 2020–2024 secara konsisten dialami oleh lulusan SMA dan pendidikan tinggi (Diploma/S1). TPT lulusan SMA mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 10,30%, sementara lulusan Diploma/S1 melonjak menjadi 10,28% pada 2024. Sebaliknya, TPT untuk lulusan SD dan SMP relatif lebih rendah dan fluktuatif. Pola ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kualifikasi pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai, terutama bagi lulusan menengah dan tinggi.

Selama periode 2020–2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Simeulue cenderung fluktuatif namun menunjukkan penurunan secara keseluruhan, dari 5,47% pada tahun 2020 menjadi 5,50% pada tahun 2024. Capaian ini masih sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (4,90%), namun berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh yang tercatat sebesar 5,75% pada tahun yang sama.

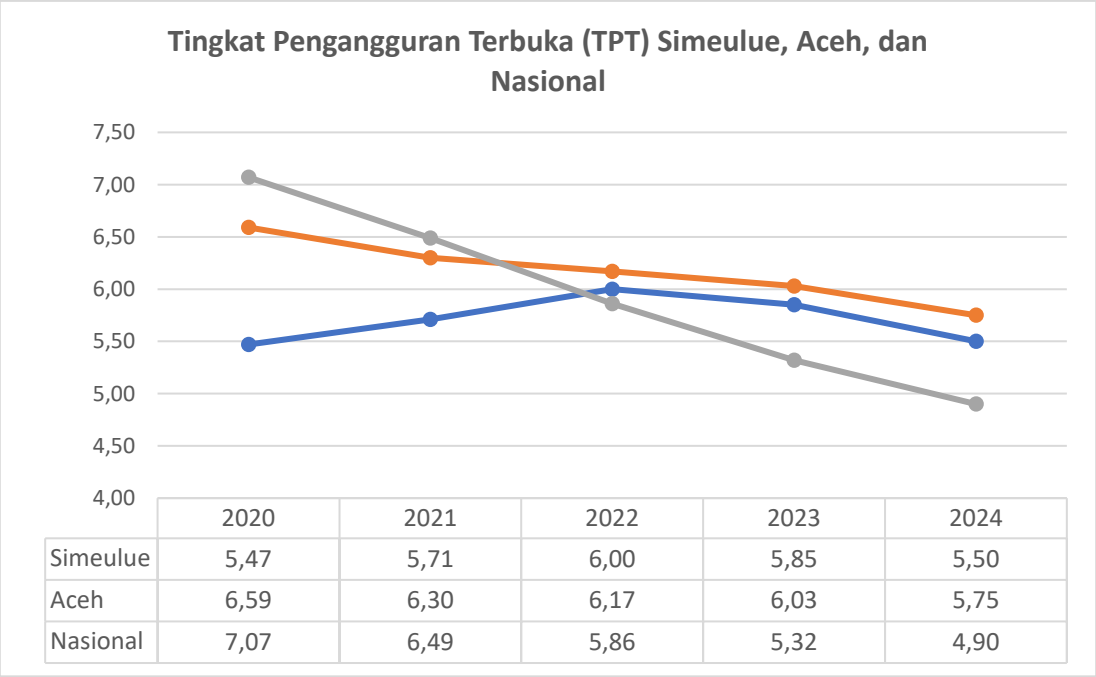

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	5,47	5,71	6,00	5,85	5,50
Aceh	6,59	6,30	6,17	6,03	5,75
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32	4,90

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.20 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun Simeulue menghadapi keterbatasan akses dan kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja lokal terus membaik, didukung oleh sektor-sektor produktif seperti pertanian dan perikanan. Penguatan pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja baru menjadi kunci untuk menurunkan TPT secara berkelanjutan di masa mendatang.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

A. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu merupakan salah satu indikator utama dalam menilai derajat kesehatan masyarakat, khususnya terkait kesehatan ibu. Jumlah Kematian Ibu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan, baik dari aspek aksesibilitas maupun kualitas layanan. Selain mencerminkan kondisi kesehatan ibu, Jumlah Kematian Ibu juga berhubungan erat dengan berbagai determinan lain, seperti status gizi, kondisi lingkungan, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, mutu pelayanan kesehatan selama proses persalinan dan masa nifas, serta faktor sosial ekonomi masyarakat. Penurunan Jumlah Kematian Ibu tidak hanya memerlukan intervensi medis semata, tetapi juga pendekatan yang holistik melalui penguatan sistem layanan kesehatan, peningkatan edukasi masyarakat, serta perbaikan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan ibu dan anak.

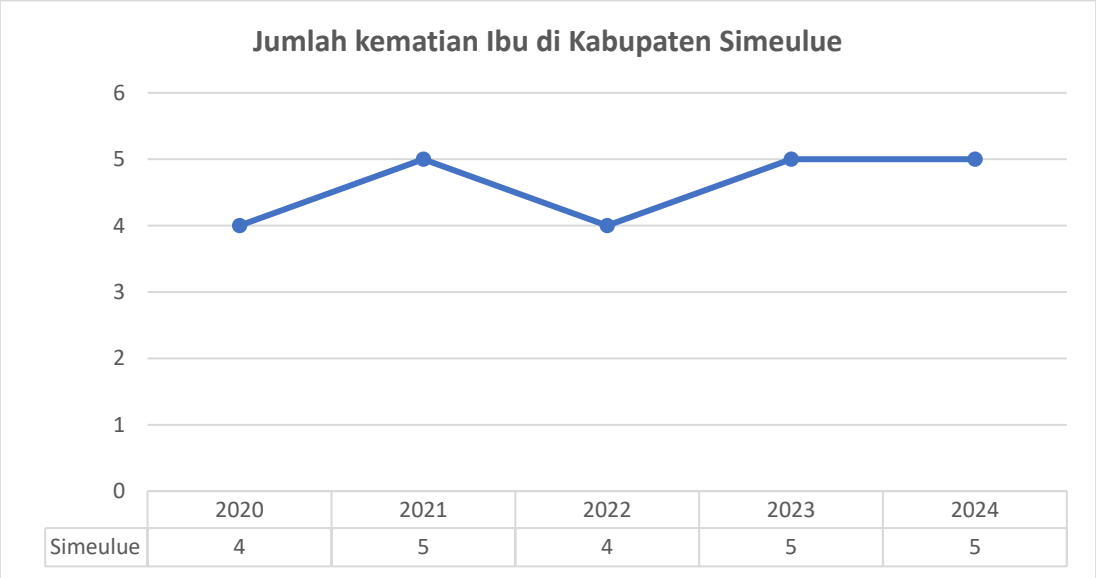

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.21 Jumlah kematian Ibu di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Simeulue menunjukkan data yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2020, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 4 orang. Sementara, pada tahun 2024, angka kematian ibu tercatat sebanyak 5 orang. Fluktuasi ini menggambarkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, tantangan masih tetap ada. Penurunan angka kematian ibu di beberapa tahun terakhir dapat diindikasikan sebagai hasil dari perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pada masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Kondisi ini

menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah daerah melalui program kesehatan ibu telah memberikan dampak positif, meskipun masih diperlukan penguatan berkelanjutan untuk mencapai target yang lebih optimal.

B. Jumlah Kematian Bayi

Jumlah Kematian Bayi merupakan indikator yang menggambarkan jumlah kematian bayi berusia 0 hingga 11 bulan per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun tertentu. Jumlah Kematian Bayi mencerminkan probabilitas seorang bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Penurunan Jumlah Kematian Bayi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya petugas penolong persalinan, pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan beserta sarana pendukungnya, serta peningkatan status gizi ibu hamil.

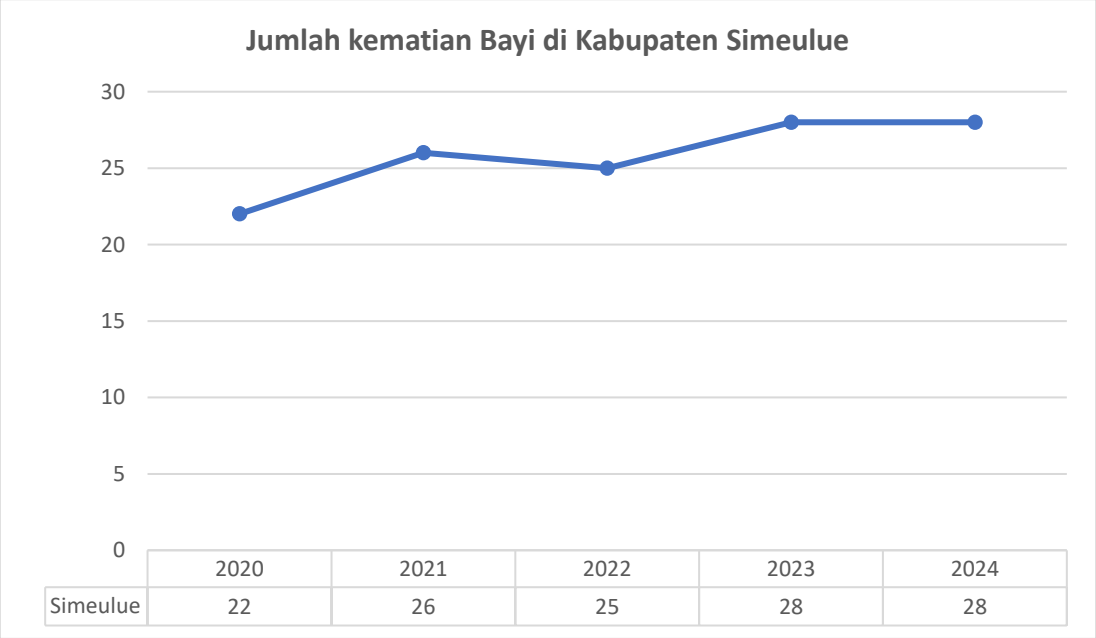

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	22	26	25	28	28

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.22 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah Kematian Bayi Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif setiap tahunnya, berdasarkan data tahun 2024, mencapai 28 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 22 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Angka tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan Jumlah Kematian Bayi pada tahun 2023 dan tahun 2024 diduga kuat berkaitan dengan peningkatan kualitas pelaporan melalui Aplikasi MPDN, yang menghasilkan data yang lebih konkret dan terverifikasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

C. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penduduk yang menggambarkan rata-rata estimasi umur yang dapat dicapai oleh seorang bayi yang lahir pada tahun tertentu, dengan asumsi pola mortalitas yang berlaku saat itu terus berlanjut sepanjang hidupnya. Indikator ini berfungsi sebagai salah satu parameter penting dalam mengukur capaian pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. UHH memiliki keterkaitan erat dengan kualitas layanan kesehatan, gizi, dan lingkungan hidup, sehingga peningkatan nilai UHH mencerminkan membaiknya derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Dengan demikian, Usia Harapan Hidup dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi efektivitas intervensi kebijakan pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup penduduk.

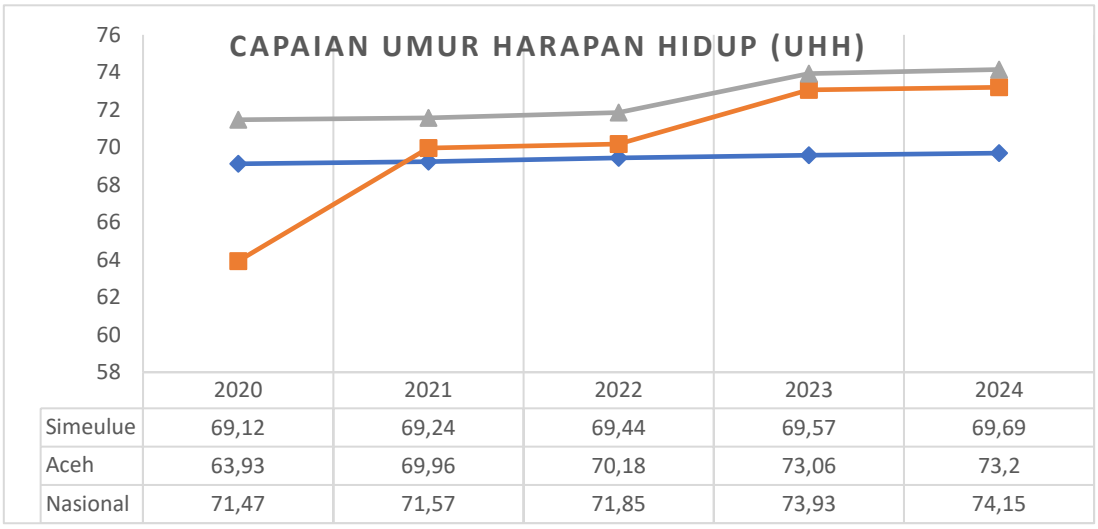

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	69,12	69,24	69,44	69,57	69,69
Aceh	63,93	69,96	70,18	73,06	73,2
Nasional	71,47	71,57	71,85	73,93	74,15

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.23 Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Simeulue menunjukkan tren yang positif selama periode tahun 2020 hingga 2024. Tercatat bahwa pada tahun 2019, angka Usia Harapan Hidup berada pada 65,22 tahun dan mengalami peningkatan menjadi 69,69 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Simeulue masih berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh maupun angka nasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan determinan sosial kesehatan lainnya masih perlu diperkuat agar kesenjangan tersebut dapat dikurangi. Adapun perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, dan tingkat nasional selama periode 2020–2024 menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja pembangunan sektor kesehatan.

D. Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk)

Gizi buruk merupakan kondisi gangguan gizi berat yang ditandai dengan berat badan anak yang sangat rendah jika dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak yang mengalami gizi buruk umumnya memiliki sistem imunitas yang lemah, sehingga sangat rentan terhadap infeksi dan komplikasi penyakit serius, yang dalam kondisi tertentu dapat berujung pada kematian. Faktor utama penyebab gizi buruk adalah ketidakcukupan asupan makanan bergizi yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak berdasarkan kelompok usianya. Kondisi ini sering kali dipicu oleh keterbatasan akses terhadap bahan pangan berkualitas.

Dampak dari kekurangan gizi ini meliputi berat badan yang rendah (underweight), tubuh kurus (wasting), serta peningkatan kerentanan terhadap penyakit dan risiko kematian, terutama pada anak-anak yang berada dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu, penanganan masalah gizi merupakan prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dinas Kesehatan terus berupaya mengendalikan permasalahan gizi buruk dan gizi kurang pada balita melalui berbagai intervensi program. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, serta pemantauan berkala melalui kegiatan di Posyandu oleh petugas Puskesmas yang dilakukan setiap bulan.

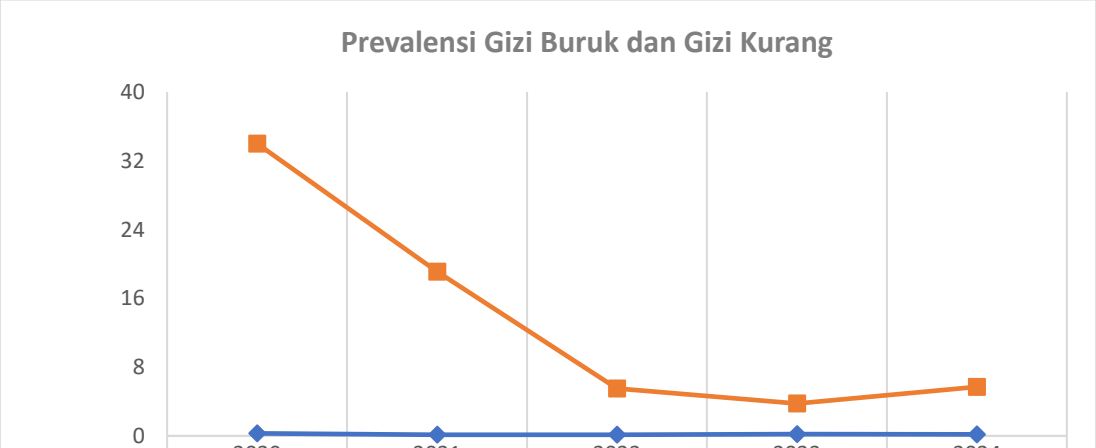

	2020	2021	2022	2023	2024
Gizi Buruk	0,29	0,13	0,13	0,2	0,19
Gizi Kurang	34	19,09	5,5	3,76	5,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.24 Prevalensi Gizi Buruk & Gizi Kurang Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Berdasarkan data prevalensi status gizi balita pada periode tahun 2019 hingga 2023, diketahui bahwa angka gizi buruk di Kabupaten Simeulue menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019 prevalensi gizi buruk tercatat sebesar 0,05 persen, meningkat menjadi 0,36 persen pada tahun 2019, kemudian menurun menjadi 0,29 persen pada tahun 2020, dan kembali turun menjadi 0,13 persen pada tahun 2021 serta tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2022. Meskipun angka tersebut relatif kecil, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa masih terdapat balita dengan status gizi buruk dari total populasi balita yang dipantau. Sementara itu, prevalensi gizi kurang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 1,75 persen, kemudian mengalami lonjakan pada tahun 2019 menjadi 23,39 persen, dan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sebesar 34,00 persen. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 19,09 persen, dan kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 5,50 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada perbaikan, permasalahan gizi kurang pada balita masih memerlukan perhatian dan intervensi berkelanjutan untuk mencapai kondisi ideal.

E. Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Simeulue menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui penyediaan jaminan kesehatan. Cakupan jaminan kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2020, persentase masyarakat yang telah terjamin dalam program jaminan kesehatan mencapai 95,09%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 91,95%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Simeulue berhasil melakukan pemulihan dan peningkatan cakupan secara cepat. Pada tahun 2022, cakupan jaminan kesehatan meningkat tajam menjadi 96,21%, kemudian melonjak lagi pada tahun 2023 hingga mencapai 98%, dan angka tersebut berhasil dipertahankan pada tahun 2024.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem jaminan sosial bidang kesehatan. Stabilitas angka yang tinggi selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem jaminan kesehatan di Kabupaten Simeulue semakin inklusif dan mampu menjangkau hampir seluruh penduduk. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional yang mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

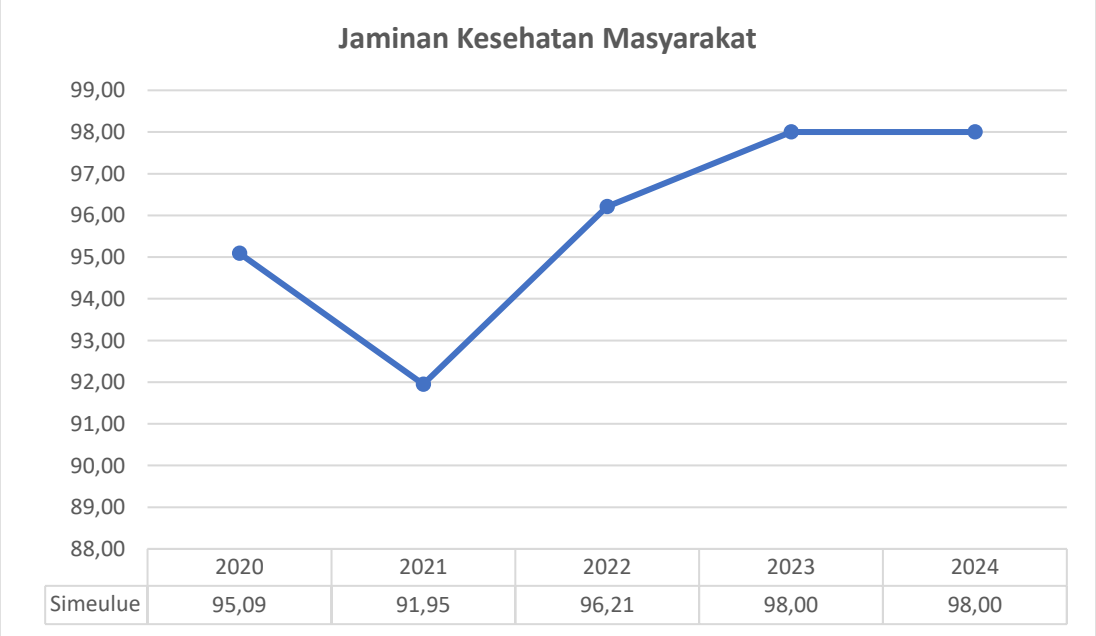

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.25 Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024

F. Imunisasi

Imunisasi merupakan intervensi kesehatan preventif yang bertujuan untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap penyakit tertentu, sehingga dapat menurunkan risiko penularan, keparahan, serta komplikasi penyakit. Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), seperti Hepatitis B, Difteri, Pertusis, Tetanus, Tuberkulosis, Polio (lumpuh layu), Campak, Rubela, Meningitis, dan Pneumonia, merupakan jenis penyakit infeksi yang bersifat sangat menular dan berpotensi menimbulkan kecacatan permanen hingga kematian. Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap akan berdampak pada tidak terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity) yang efektif, sehingga meningkatkan potensi tKejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah penyakit di masyarakat.

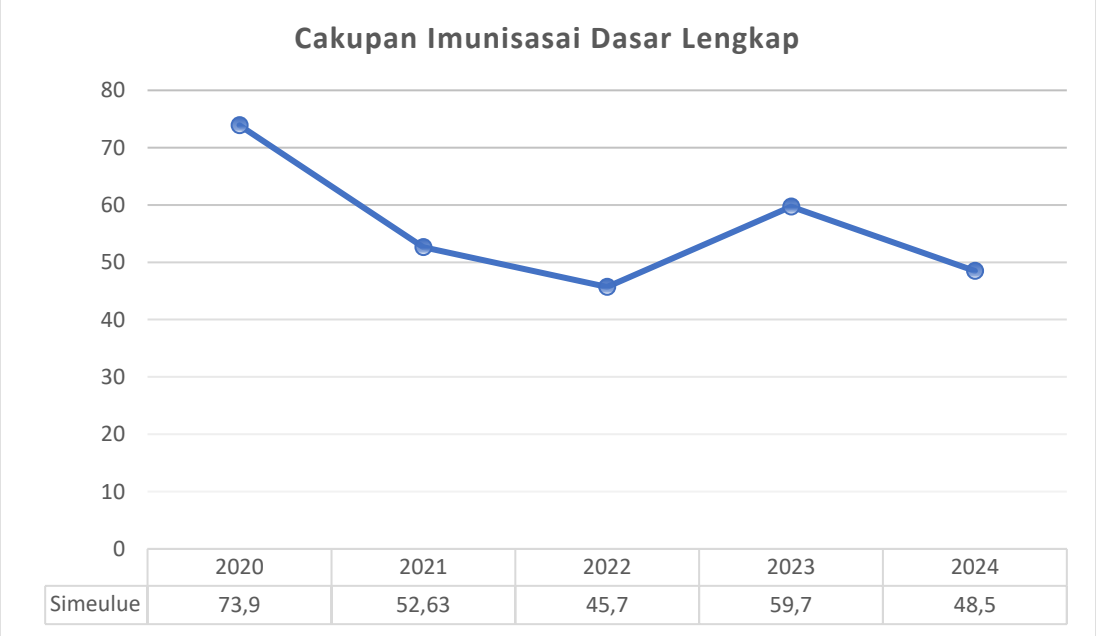

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.26 Cakupan Imunisasai Dasar Lengkap Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Grafik Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, cakupan imunisasi tercatat paling tinggi yaitu sebesar 73,9%, yang mencerminkan capaian optimal dalam pelaksanaan imunisasi dasar. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan signifikan hingga mencapai titik terendah pada 2022 sebesar 45,7%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan layanan kesehatan akibat pandemi COVID-19, keterbatasan logistik, atau penurunan partisipasi masyarakat.

Memasuki tahun 2023, cakupan imunisasi kembali meningkat menjadi 59,7% yang mengindikasikan adanya pemulihan program imunisasi. Sayangnya, pada 2024 angka ini kembali menurun ke 48,5%, menunjukkan bahwa upaya pemulihan belum konsisten atau menghadapi tantangan lanjutan. Data ini menggarisbawahi perlunya strategi yang berkelanjutan dan inovatif dalam meningkatkan cakupan imunisasi secara merata, termasuk penguatan edukasi masyarakat, akses pelayanan kesehatan, serta monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program imunisasi.

G. Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diadakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas ini meliputi peralatan dan tempat. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengadakan pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif ataupun rehabilitatif. Penyedia fasilitas layanan kesehatan meliputi pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Layanan ini menjadi sangat vital karena menyangkut

kehidurpan orang banyak. Fasilitas kesehatan juga merupakan komponen penting dalam melakukan peningkatan pelayanan kesehatan baik dari ketersediaan fasilitasnya maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Simeulue masih perlu ditingkatkan. Jumlah fasilitas Kesehatan di Kabupaten Simeulue dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.31. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Puskesmas	Unit	14	15	15	15	15
3	Jumlah Pustu	Unit	38	38	38	38	38
4	Jumlah Klinik Kesehatan	Unit	2	3	3	3	3
5	Jumlah Posyandu	Unit	168	167	168	168	168

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Pada tahun 2020 hingga 2024, layanan kesehatan di Kabupaten Simeulue menunjukkan kestabilan dan sedikit peningkatan pada beberapa fasilitas. Terdapat 1 Rumah Sakit yang aktif setiap tahun, sementara jumlah Puskesmas meningkat dari 14 menjadi 15 sejak 2021, menunjukkan perluasan akses layanan kesehatan dasar. Puskesmas Pembantu tetap berjumlah 38 unit, menandakan cakupan layanan yang merata di daerah terpencil. Klinik Kesehatan juga bertambah dari 2 menjadi 3 unit sejak 2021. Jumlah Posyandu sempat menurun dari 168 menjadi 167 pada 2021, lalu kembali menjadi 168 unit hingga 2024. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan merata bagi masyarakat.

H. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan keluarga berdasarkan 12 indikator utama, mulai dari aspek pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, perilaku hidup sehat, hingga akses terhadap sarana air bersih dan jamban sehat. Hasil pengukuran IKS dikategorikan menjadi tiga, yaitu keluarga sehat dengan nilai ≥ 0,80, keluarga pra sehat dengan nilai 0,50–0,79, serta keluarga tidak sehat dengan nilai < 0,50. Melalui IKS, pemerintah daerah memetakan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih komprehensif, mengidentifikasi keluarga yang masih rentan terhadap masalah kesehatan, sekaligus merumuskan intervensi yang tepat sasaran. Dengan demikian, IKS bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi gambaran nyata keberhasilan pembangunan kesehatan keluarga dan masyarakat di suatu wilayah.

Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah alat ukur yang menggambarkan kondisi kesehatan keluarga di Indonesia berdasarkan hasil Pendataan Keluarga Sehat (PIS-PK) yang dilaksanakan oleh puskesmas di seluruh wilayah. IKS dihitung berdasarkan 12 indikator keluarga sehat yang ditetapkan Kemenkes, meliputi:

1. Keluarga mengikuti program KB.
2. Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan.
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap.
4. Bayi diberi ASI eksklusif.
5. Pertumbuhan balita dipantau.
6. Penderita TB paru berobat sesuai standar.
7. Penderita hipertensi berobat teratur.
8. Penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan.
9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok.
10. Keluarga menjadi pseserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).
11. Keluarga memiliki akses air bersih.

I. Prevalensi Stunting

Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase stunting berada pada angka 29,00%, lalu mengalami penurunan menjadi 25,90% pada 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 37,20%, yang diduga disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, terganggunya layanan kesehatan, serta penurunan akses pangan bergizi. Setelah lonjakan tersebut, upaya intervensi dan perbaikan gizi mulai menunjukkan hasil. Angka stunting menurun menjadi 30,70% di tahun 2023, dan terus menurun ke 25,50% pada tahun 2024. Meskipun penurunan ini menggambarkan tren positif, prevalensi stunting di Simeulue masih tergolong tinggi dan tetap membutuhkan penguatan program pencegahan stunting secara berkelanjutan, melalui peningkatan edukasi gizi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

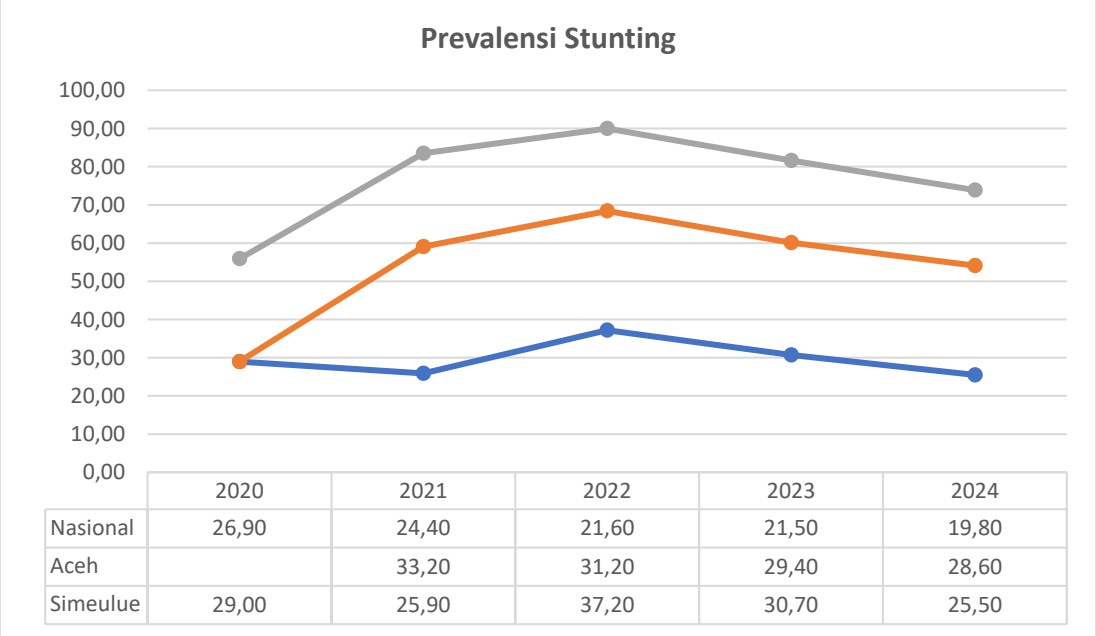

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	26,90	24,40	21,60	21,50	19,80
Aceh		33,20	31,20	29,40	28,60
Simeulue	29,00	25,90	37,20	30,70	25,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.27 Prevalensi Stunting Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

2.1.2.3 Pendidikan Berkulaitas dan Merata

Pendidikan berkualitas yang merata merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait perlu bersinergi untuk mewujudkannya, mulai dari peningkatan kualitas guru, infrastruktur, kurikulum, hingga pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil.

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat pada suatu daerah atau lamanya pendidikan yang dijalani. Makin tinggi RLS berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Jika dilihat perkembangan RLS di Kabupaten Simeulue relative merata seperti yang ditunjukkan pada Tabel dibawah ini:

Apabila ditinjau dari angka rata-rata lama sekolah Tahun 2024, Kabupaten Simeulue berada diatas rata—rata Aceh (9,64 tahun) dan nasional (8,85 tahun). Pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya melakukan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas antara lain dengan memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan antar jenjang Pendidikan. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

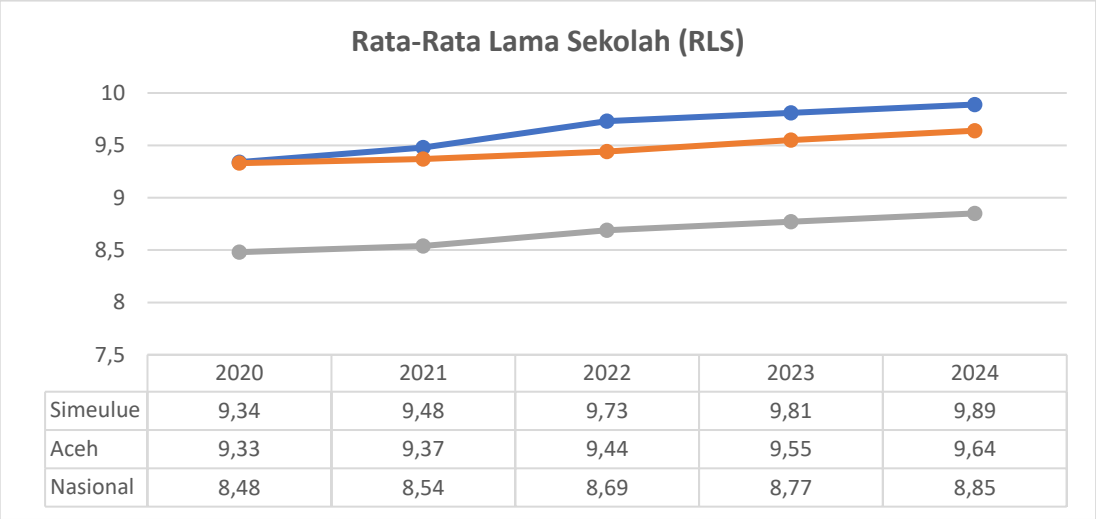

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	9,34	9,48	9,73	9,81	9,89
Aceh	9,33	9,37	9,44	9,55	9,64
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.28 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Simeulue periode tahun 2020 sampai dengan 2024 disajikan dalam Grafik dibawah ini.

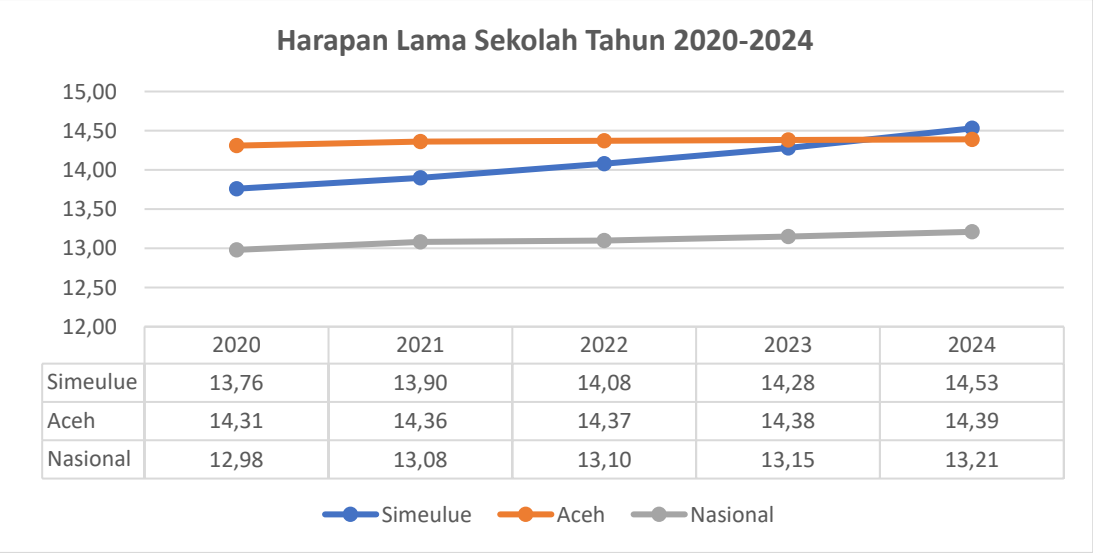

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	13,76	13,90	14,08	14,28	14,53
Aceh	14,31	14,36	14,37	14,38	14,39
Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.29 Harapan Lama Sekolah Tahun 2020-2024

Apabila di tinjau dari Angka harapan lama sekolah Kabupaten Simeulue mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 13,76 tahun menjadi 14,53 tahun pada tahun 2024, hal demikian HLS Kabupaten Simeulue Tahun 2024 masih berada diatas Aceh 14,39 tahun dan Nasional 13,21 tahun. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,53 tahun atau sampai jenjang perkuliahan di tahun kedua. Untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS), diperlukan upaya yang terstruktur dan komprehensif, meliputi peningkatan akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai proporsi daripenduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk denganketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompokusia sekolah yang bersesuaian. Apabila dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Dari data yang diperoleh, berdasarkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP dan SMA tahun 2020-2024, dapat dilihat bahwa capaian APM Kabupaten Simeulue lebih tinggi dari rata-rata capaian APM Provinsi Aceh dan Nasional. Adapun erkembangan APM jenjang SD, SMP dan SMA untuk wilayah Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32. Perkembangan APM Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	Simeulue	90,61	99,19	99,87	99,60	99,60
	Aceh	99,03	98,95	99,07	98,97	97,96
	Nasional	97,69	97,80	97,88	97,86	97,89
SMP/MTS	Simeulue	75,64	89,57	94,92	89,52	86,92
	Aceh	86,86	86,95	88,21	84,85	84,22
	Nasional	80,12	80,59	80,89	81,28	83,63
SMA/SMK/MA	Simeulue	80,90	80,51	81,94	72,56	74,35
	Aceh	70,70	70,80	71,16	71,70	70,94
	Nasional	61,25	61,65	61,97	62,53	64,32

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam pendidikan formal pada kelompok usia tertentu. APS menunjukkan persentase penduduk pada usia sekolah tertentu yang masih aktif bersekolah, dibandingkan total jumlah penduduk dalam kelompok usia tersebut. Semakin tinggi nilai APS, semakin baik tingkat partisipasi pendidikan masyarakat dan mencerminkan akses serta kesadaran yang baik terhadap pentingnya pendidikan. Sebaliknya, APS yang rendah bisa mengindikasikan adanya hambatan seperti keterbatasan ekonomi, akses pendidikan yang sulit, atau faktor lainnya menyebabkan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan Pendidikan lebih tinggi.

Tabel 2.33. Perkembangan APS Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Kelompok Indikator	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 tahun	90,61	99,44	99,87	99,60	99,72
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 tahun	75,64	97,84	97,94	99,73	99,33
	Angka Partisipasi Sekolah Usia (APS)16-18 tahun	88,64	88,29	89,20	90,64	86,42

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

E. Kemampuan Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan dua aspek penting dalam pendidikan yang saling melengkapi dan menjadi dasar bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Literasi mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai jenis teks untuk berpikir kritis dan berkomunikasi secara efektif. Sementara itu, numerasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menganalisis informasi yang berbasis angka serta menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kemampuan ini tidak hanya dibutuhkan dalam lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan numerasi menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

Tabel 2.34. Perkembangan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Kelompok Indikator	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kemampuan Literasi	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD	n.a	42.57	49.74	53.13	53.57
	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP	n.a	53,51	54,00	58,79	61,09
Kemampuan Numerasi	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SD	n.a	31,03	40,00	44,11	49,54
	Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP	n.a	51,37	50,86	56,60	57,50

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

F. Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan pendidikan telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa bidang pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkenaan dengan upaya pembinaan dan pengawasan tersebut serta dalam rangka mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI menyelaraskan SPM Pendidikan dengan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan.

Sesuai Surat Kemendikdasmen Nomor : 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk Indikator SPM Pendidikan Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35. Capaian Indikator SPM Pendidikan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Indikator	Jenjang	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Kemampuan Literasi	SD	n.a	42,57	49,74	53,13	53,57
2	Skor Kemampuan Literasi	SMP	n.a	53,51	54,00	58,79	61,09
3	Skor Kemampuan Numerasi	SD	n.a	31,03	40,00	44,11	49,54
4	Skor Kemampuan Numerasi	SMP	n.a	51,37	50,86	56,60	57,50
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	n.a	71,23	83,95	85,24	83,08
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SD/SMP	n.a	98,95	99,18	99,64	99,61
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Kesetaraan	n.a	3,77	2,76	5,08	8,42
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	n.a	50,00	51,43	51,43	51,43
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	n.a	40,35	50,57	43,79	43,80
10	Iklim Inklusivitas	SD	n.a	67,14	57,57	56,75	60,05
11	Iklim Inklusivitas	SMP	n.a	69,55	56,70	60,29	59,04
12	Iklim Keamanan	SD	n.a	69,26	73,85	76,50	78,20
13	Iklim Keamanan	SMP	n.a	70,32	68,14	72,17	71,36
14	Iklim Kebinekaan	SD	n.a	64,07	65,93	71,14	68,65
15	Iklim Kebinekaan	SMP	n.a	57,85	63,71	73,09	70,00

Sumber : Rapor Pendidikan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Dari tabel yang menggambarkan perkembangan Capaian Indikator SPM Pendidikan Kabupaten Simeulue dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu

1) Skor Kemampuan Literasi jenjang SD:
   Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mendapat skor 42,57 hingga sampai tahun 2024 mendapat skor 53,57, ini menunjukkan terjadi peningkatan skor literasi jenjang SD dari tahun sebelumnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya literasi, peningkatan kualitas pendidikan dan akses terhadap sumber belajar, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
2) Skor Kemampuan Literasi jenjang SMP:
   Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mendapat skor 53,51 hingga sampai tahun 2024 mendapat skor 61,09, ini menunjukkan terjadi peningkatan skor literasi jenjang SMP dari tahun sebelumnya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya literasi, peningkatan kualitas pendidikan dan akses terhadap sumber belajar, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
3) Skor Kemampuan Numerasi jenjang SD:
   Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mendapat skor 31,03 hingga sampai tahun 2024 mendapat skor 49,54, ini menunjukkan peningkatan skor numerasi jenjang SD dari tahun sebelumnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan kualitas pengajaran, penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif, serta peningkatan minat dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika.
4) Skor Kemampuan Numerasi jenjang SMP:
   Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mendapat skor 51,37 hingga sampai tahun 2024 mendapat skor 57,50, ini menunjukkan peningkatan skor numerasi jnejang SMP dari tahun sebelumnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan kualitas pengajaran, penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif, serta peningkatan minat dan pemahaman siswa terhadap konsep matematika.
5) Angka Partisipasi Sekolah (5-6) jenjang PAUD:
   Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mencapai 71,23 persen hingga sampai tahun 2024 mencapai 83,08 persen, ini menunjukkan adanya peningkatan hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, perbaikan fasilitas dan layanan PAUD, serta dukungan pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan.
6) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15 jenjang SD/SMP:
   Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mencapai 98,95 persen hingga sampai tahun 2024 mencapai 99,61 persen, hai ini menunjukkan adanya peningkatan yang disebabkan bebrapa faktor antaranya adalah program pemerintah yang mendukung pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, dan perbaikan fasilitas pendidikan

7) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan jnejang kesetaraan:
Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mencapai 3,77 persen, hingga sampai tahun 2024 mencapai 8,42 persen, ini menunjukkan adanya peningkatan, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, program bantuan pemerintah seperti beasiswa dan subsidi, serta perluasan akses pendidikan kesetaraan. Selain itu, fleksibilitas program kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar sambil bekerja juga menjadi daya tarik tersendiri.

8) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B:
Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mencapai 50,00 persen, hingga sampai tahun 2024 mencapai 51,43 persen, ini menunjukkan adanya peningkatan persentase dari tahun-tahun sebelumnya, disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD, adanya program pendampingan satuan PAUD, serta fokus pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

9) Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4:
Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mencapai 40,35 persen, hingga sampai tahun 2024 mencapai 43,80 persen, ini menunjukkan adanya peningkatan persentase dari tahun-tahun sebelumnya, disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang mendorong kualifikasi pendidikan minimal S1/D4, kesadaran akan pentingnya pendidikan guru yang berkualitas, serta upaya lembaga pendidikan untuk meningkatkan standar pendidikan anak usia dini.

10) Iklim Inklusivitas jenjang SD:
Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mencapai indeks 67,14, hingga sampai dengan tahun 2024 mencapai indeks 60,05, ini menunjukkan adanya penurunan indeks hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya dukungan kebijakan dan implementasi yang tidak konsisten, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, serta masih adanya budaya diskriminasi dan perundungan di lingkungan sekolah.

11) Iklim Inklusivitas jenjang SMP:
Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mencapai indeks 69,55, hingga sampai dengan tahun 2024 mencapai indeks 59,04, ini menunjukkan adanya penurunan indeks hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya dukungan kebijakan dan implementasi yang tidak konsisten, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus, serta masih adanya budaya diskriminasi dan perundungan di lingkungan sekolah.

12) Iklim Keamanan jenjang SD:
Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mencapai indeks 69,26, hingga sampai dengan tahun 2024 mencapai indeks 78,20, ini menunjukkan adanya peningkatan indeks, disebabkan karena beberapa faktor, termasuk upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya iklim sekolah yang aman, peningkatan partisipasi dalam program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, serta perbaikan infrastruktur dan fasilitas sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
13) Iklim Keamanan jenjang SMP:
Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mencapai indeks 71,36, hingga sampai dengan tahun 2024 mencapai indeks 59,04, ini menunjukkan adanya peningkatan indeks, disebabkan karena beberapa faktor, termasuk upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya iklim sekolah yang aman, peningkatan partisipasi dalam program pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, serta perbaikan infrastruktur dan fasilitas sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman.
14) Iklim Kebinekaan jenjang SD:
Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mencapai indeks 64,07, hingga sampai dengan tahun 2024 mencapai indeks 68,65, ini menunjukkan adanya peningkatan indeks, hai ini dapat meningkat karena beberapa faktor, terutama berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan. Faktor-faktor tersebut meliputi penyediaan materi ajar yang beragam, kebijakan sekolah yang mendukung keragaman, serta upaya guru dalam membangun komunikasi dan interaksi positif di kelas.
15) Iklim Kebinekaan jenjang SMP:
Tahun 2020 tidak diperoleh data, tahun 2021 mencapai indeks 57,85, hingga tahun 2024 mencapai indeks 70,00 ini menunjukkan adanya peningkatan indeks, hai ini dapat meningkat karena beberapa faktor penyediaan materi ajar yang beragam, kebijakan sekolah yang mendukung keragaman, serta upaya guru dalam membangun komunikasi dan interaksi positif di kelas.

G. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana masyarakat memiliki akses, kemampuan, dan kebiasaan dalam mengakses, memahami, serta memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup. IPLM disusun berdasarkan berbagai unsur, seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, tenaga pustakawan, kunjungan dan keanggotaan, hingga sosialisasi program literasi. Dengan demikian, IPLM tidak hanya menggambarkan ketersediaan sarana, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi

Untuk Kabupaten Simeulue, data IPLM tersedia mulai tahun 2023 dengan capaian 41,27 dan meningkat menjadi 45,43 pada tahun 2024. Sementara itu, untuk periode 2020–2022 belum tersedia data (n/a), sehingga perkembangan capaian hanya dapat dianalisis sejak 2023. Peningkatan sebesar 4,16 poin dalam kurun satu tahun menunjukkan adanya perbaikan pembangunan literasi, walaupun nilai yang dicapai masih termasuk dalam kategori "Rendah". Kondisi ini menegaskan bahwa literasi masyarakat Simeulue sudah mulai menunjukkan tren positif, tetapi masih membutuhkan perhatian serius melalui perluasan layanan perpustakaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan koleksi bacaan, serta penguatan program pembiasaan membaca. Selain itu, tidak tersedianya data untuk tahun 2020–2022 menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaporan dan monitoring. Perbaikan sistem pencatatan dan publikasi data diperlukan agar perkembangan literasi dapat dipantau lebih konsisten dan dijadikan dasar evaluasi serta perencanaan program di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.36. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Kategori	-	-	-	41,27	45,43

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan daerah. Perlindungan sosial tidak hanya dimaknai sebagai intervensi jangka pendek terhadap kelompok rentan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat resiliensi masyarakat terhadap risiko sosial, ekonomi, dan bencana. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan Pembangunan mulai dari perubahan iklim, ketimpangan sosial, transformasi digital, hingga krisis kesehatan global, konsep perlindungan sosial dituntut untuk semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi. Perlindungan sosial yang adaptif merujuk pada sistem perlindungan sosial yang mampu mengidentifikasi, merespons, dan mengantisipasi risiko yang berkembang dengan cepat, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, rentan, dan marjinal. Sistem ini mencakup integrasi antara bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang fleksibel, berbasis data, serta didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan yang bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengurangi kerentanan sosial.

Pembangunan sistem perlindungan sosial yang adaptif harus diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, pemutakhiran basis data terpadu kesejahteraan sosial, serta kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perlindungan sosial menjangkau kelompok prioritas seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, anak-anak terlantar, serta masyarakat terdampak bencana atau krisis. Selain itu, integrasi antara kebijakan perlindungan sosial dengan program pembangunan ekonomi lokal sangat penting untuk memperkuat strategi graduasi dari kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi produktif. Arah kebijakan perlindungan sosial adaptif menjadi komponen penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Penguatan perlindungan sosial yang adaptif menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, mandiri, dan berdaya saing di tengah dinamika global yang terus berubah.

A. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penyediaan perlindungan sosial bagi tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat daya tahan ekonomi lokal.

Jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya menjadi alat evaluatif, tetapi juga bagian dari perencanaan strategis dalam memperluas akses dan kepesertaan masyarakat terhadap perlindungan sosial. Sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif juga diperlukan untuk memetakan perkembangan indikator secara berkala, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan kebijakan. Implementasi yang konsisten dan inklusif terhadap program jaminan sosial tenaga kerja akan memperkuat ketahanan sosial daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memperkuat kualitas pembangunan manusia secara menyeluruh.

Tabel 2.37. Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Simuelue Tahun 2025

Data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	
Sektor Informal	1.758
Sektor Formal	5.889
Total	**7.647**

Sumber : BPJS Kabupaten Simeulue, Maret 2025

Perlindungan sosial yang menyeluruh bagi tenaga kerja, mendorong peningkatan kepesertaan masyarakat dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah, karena memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, serta hari tua. Berdasarkan data tabel Maret 2025, tercatat sebanyak 7.647 pekerja telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, 5.889 orang berasal dari sektor formal terdiri atas pegawai pemerintah, karyawan BUMD, serta pekerja swasta yang telah terdaftar secara resmi dan mendapatkan penghasilan tetap, sedangkan 1.758 orang merupakan pekerja sektor informal, seperti nelayan, petani, buruh harian, hingga pedagang kecil. Selain itu, berdasarkan data BPJS Kesehatan tercatat 93.873 jiwa telah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan guna peningkatan jaminan sosial Masyarakat.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

1. Syariat Islam

Syariat Islam adalah seluruh aturan dan hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Secara sederhana, syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah (hubungan sosial), hingga hukum. Penerapan syariat Islam di Kabupaten Simeulue, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum pidana (jinayat) hingga aspek sosial dan pendidikan.

Hukuman cambuk, yang merupakan salah satu bentuk penerapan hukum jinayat, sering dilakukan di depan umum sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran syariat. Selain itu, terdapat juga regulasi terkait busana Islami bagi masyarakat dan pembentukan Dewan Syariah Kabupaten untuk memberikan panduan dan fatwa terkait pelaksanaan syariat.

Penerapan syariat Islam di Simeulue juga melibatkan pemerintah daerah meliputi Dinas Syariat Islam, MPU, Satpol PP dan WH, menjalin kerjasama antara berbagai pihak termasuk aparat Penegak Hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan juga turut melibatkan tokoh agama, dan masyarakat.

Tabel 2.38. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2020-2024 sesusai Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

No.	Jenis Perkara	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Khalwat	1	0	2	7	0
2	Ikhtilath	4	3	1	0	0
3	Zina	0	0	3	4	6
4	Qadzaf	0	0	0	0	0
5	Liwat	0	0	0	0	0
6	Musahaqa	0	0	0	0	0
7	Maisir	3	10	2	6	4
8	Pemerkosaan	0	1	3	2	4
9	Pelecehan Seksual	0	0	0	3	1
Jumlah		**8**	**14**	**11**	**22**	**15**

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Tahun 2025

Tabel di atas Menjelaskan kondisi pelanggaran syariat islam pada tahun 2020 sebanyak 8 kasus/perkara, tahun 2021 sebanyak 14 kasus/perkara, tahun 2022 sebanyak 11 kasus/perkara, tahun 2023 sebanyak 22 kasus/perkara, dan hingga tahun 2024 sebanyak 15 kasus/perkara. kondisi pelanggaran Syariat Islam tebanyak di tahun 2023 pada kasus khalwat (mesum) dan maisir (judi online).

2. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah kondisi harmonis dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai pemeluk agama, di mana mereka saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama, tanpa adanya paksaan atau diskriminasi dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Ini adalah kondisi yang penting untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa**.**

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Simeulue adalah forum yang dibentuk untuk menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di wilayah tersebut. FKUB Simeulue bertujuan untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama demi kerukunan dan kesejahteraan bersama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan antar umat beragama di suatu wilayah, biasanya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Indeks ini disusun berdasarkan berbagai faktor yang mencerminkan tingkat toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar berbagai kelompok agama.

Data indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Simeule dan Provinsi Aceh untuk tahun-tahun yang disebutkan (2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024) tidak tersedia secara eksplisit dalam hasil pencarian/belum terdapat data, tetapi beberapa informasi terkait kerukunan umat beragama Indonesia dapat ditemukan. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks KUB tercatat sebesar 67,46, kemudian naik menjadi 72,39 pada tahun 2021, 73,09 pada tahun 2022, dan mencapai 76,02 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, indeks ini kembali meningkat menjadi 76,47, menurut Kementerian Agama RI. Berikut adalah rincian indeks kerukunan umat beragama Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024.

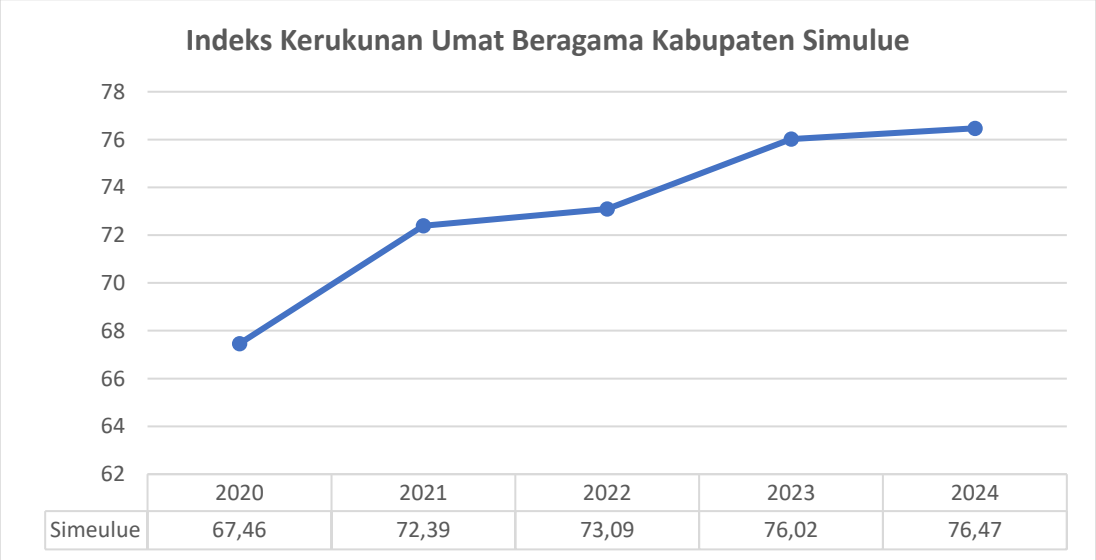

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	67,46	72,39	73,09	76,02	76,47

Sumber : Kementerian Agama RI, Tahun 2025

Grafik 2.30 Indeks Kerukunan Umat Beragama Indonesia Kabupaten Simulue Tahun 2020–2024

3. Rumah Ibadah

Rumah ibadah adalah tempat yang digunakan oleh pemeluk agama untuk beribadah dan melakukan ritual keagamaan sesuai dengan ajaran agamanya. Tempat ini berfungsi sebagai sarana penting bagi umat beragama untuk menjalankan kewajiban agama, memperkuat hubungan spiritual, dan sebagai pusat kegiatan keagamaan. Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan shalat fardhu berjamaah di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.39. Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Simeulue berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Masjid	Musholah	Masjid	Musholah	Masjid	Musholah	Masjid	Musholah	Masjid	Musholah
1	Teupah Selatan	22	37	23	37	23	37	23	37	22	32
2	Simeulue Timur	30	29	30	29	30	29	30	29	36	35
3	Teupah Barat	18	22	18	22	18	22	18	22	18	22
4	Teupah Tengah	14	13	14	13	14	13	14	13	3	0
5	Simeulue Tengah	13	20	13	20	13	20	13	20	18	25
6	Teluk Dalam	11	18	11	18	11	18	11	18	14	18
7	Simeulue Cut	7	5	8	5	8	5	8	5	1	0
8	Salang	19	20	21	20	21	20	21	20	20	22
9	Simeulue Barat	20	47	21	47	21	47	21	47	21	48
10	Alafan	11	21	11	21	11	21	11	21	11	17
Jumlah		**165**	**232**	**170**	**232**	**170**	**232**	**170**	**232**	**164**	**219**

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah mesjid di Kabupaten Simeulue selama 5 tahun terakhir berkurang dari tahun 2020 sebanyak 165 unit menjadi 164 unit pada tahun 2024, begitu juga dengan Musholah selama 5 tahun terakhir juga berkurang dari tahun 2020 sebanyak 165 unit menjadi 219 unit.

4. Pengelolaan Zakat dan Infaq

Baitul Mal adalah lembaga dalam pemerintahan Islam yang bertugas mengelola harta atau keuangan negara, khususnya yang berkaitan dengan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Dengan kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan komitmen pemerintahan Aceh dan Kabupaten Simeulue dalam merealisasikan syariat Islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ummat. Baitul Mal diberikan kewenangan untuk mengelola zakat, infak, shadaqah, wakaf, perwalian (ZISWAF dan Perwalian) dan harta agama lainnya. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat. Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Baitul Mal terus meningkatkan Upaya penerimaan zakat dari masyarakat. Sejak tahun 2018 penerimaan zakat dari tahun ke tahunmengalami peningkatan yang signifikan, seiring dengan kesadaran

dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga amil zakat pemerintah yaitu Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Selain zakat penghasilan, zakat perniagaan, infaq dan sadaqah. Baitul Mal juga melaksanakan pemotongan zakat pada setiap SP2D belanja daerah. Untuk mengetahui secara rinci tentang penerimaan zakat, infaq, pada Baitul Mal di Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40. Pendapatan dan Penyaluran Zakat dan Infaq Kabupaten Simeulue Tahun 2020 – 2024

Tahun	Pendapatan (Rp)	Penyaluran (Rp)
2020	6.336.542.956,92	3.416.105.000,00
2021	6.669.827.647,08	4.220.000.000,00
2022	6.786.584.740,09	7.407.679.590,00
2023	6.937.461.353,37	8.710.847.058,00
2024	8.505.978.641,17	11.735.325.855,00

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Tabel diatas Menjelaskan pendapatan dan penyaluran zakat dan infaq melalui Baitul Mal, juga pengelolaan pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir, Senif Miskin, Senif Amil, Senif Muallaf, Senif Gharimin, Senif Fisabilillah, Senif Ibnu Sabil, Senif Infaq, dilakukan dengan pemberian bantuan kepada fakir, miskin, anak yatim, petugas kebersihan, petugas parkir, Amil, santri dan mualaf dengan sasaran manfaat pada tahun 2024 sebanyak ± 1930 mustahik. Penyaluran zakat dan infak kepada mustahik memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup mustahik, serta memberdayakan ekonomi mustahik. Selain itu, zakat dan infak juga dapat memberikan dampak positif pada aspek pendidikan dan keagamaan.

5. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Pendidikan Islami bertujuan memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Pendidikan Islami bukan semata-mata menekankan pada pengembangan aspek jasmaniah, akal dan moral, tetapi juga menekankan pentingnya ubudiyah dan amal saleh, yang semuanya berkembang secara seimbang. Upaya meningkatkan pendidikan Islami di Kabupaten Simeulue melalui dayah sudah melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Simeulue memiliki lembaga Pendidikan baru, namun masyarakat Simeulue tetap menjaga keberadaan lembaga pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

Urusan penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Kabupaten Simeulue dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah. Pembangunan dayah di Kabupaten Simeulue umumnya diinisiasi oleh masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.44/83 tanggal 26 Januari 2024 Perihal Penetapan Database Dayah di Aceh, Untuk data dayah Kabupaten Simeulue dapat di lihat pada Tabel dibawah ini sebagai berikut.

Tabel 2.41. Nama Lembaga Pendidikan Dayah, Alamat, Tahun Berdiri, Tipe dan Status Dayah Tahun 2024

No	Nama Lembaga Pendidikan Dayah (LPD)	Alamat	Tahun Berdiri	Tipe	Status LPD
1	Darul Aitami	Desa Linggi Kec. Simeulue Timur	2003	A	Terpadu
2	Syekh Banurullah	Desa Nancala, Kec. Teupah Barat	2011	D (NT)	Salafiah
3	Nurul Iman Mutiara	Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat	2011	D (NT)	Salafiah
4	Babul Huda	Desa Air Dingin Kec. Simeulue Timur	2013	D (NT)	Salafiah
5	Syekh Khalilullah	Desa Kuta Baru Kec. Simeulue Tengah	2013	C	Salafiah
6	Nurul Maghfirah	Desa Labuhan Jaya, Kec. Teupah Selatan	2013	D (NT)	Salafiah
7	Ma'had Darul Qur'an	Desa Suka Jaya, Kec. Simeulue Timur	2014	B	Terpadu
8	Ma'had Ashabil Qur'an	Desa Suak Buluh, Kec. Simeulue Timur	2014	B	Terpadu
9	Madinatul Waliya	Desa Ana-ao, Kec. Teupah Selatan	2015	C	Salafiah
10	Al fatah	Desa Kota Batu, Kec. Simeulue Timur	2015	D (NT)	Salafiah
11	Nurul Islam	Desa Ganting. Kec. Simeulue Timur	2015	C	Salafiah
12	Baitul Qur'an	Desa Kampung Aie, Kec. Simeulue Tengah	2016	D (NT)	Terpadu
13	Miftahus Salam Al-Islami	Desa Air Pinang, Kec. Simeulue Timur	2018	B	Terpadu
14	Raudatul Ma'wa Al-Aziziah	Desa Busung Indah, Kec. Teupah Tengah	2019	C	Salafiah

Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Tabel 2.42. Perkembangan Lembaga Pendidikan Dayah (LPD)
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Dayah	14	14	14	14	14

Sumber : Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Dari 2 tabel diatas, menjelaskan bahwa perkembangan dayah di Kabupaten Simeulue dapat dilihat dari tahun berdiri di bawah tahun 2020, maka tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 14 LPD, untuk tipe dayah A sebanyak 1 LPD, tipe B sebanyak 3 LPD, tipe C sebanyak 4 LPD, sedangkan tipe D (Non Tipe) sebanyak 6 LPD. Pada status dayah Terpadu sebanyak 6 LPD, dayah salafiah sebnayak 9 LPD.

6. Peran Ulama Dalam Penetapan Kebijakan Daerah

Ulama memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan daerah, terutama di wilayah yang memiliki kental nilai-nilai keagamaan. Mereka memberikan masukan dan pertimbangan berdasarkan ajaran agama dalam proses perumusan kebijakan, serta memastikan kebijakan yang dibuat selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, ulama juga berperan sebagai penengah dan penasihat bagi masyarakat dan pemerintah.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Simeulue memiliki peran penting dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di daerah. MPU berfungsi sebagai wadah musyawarah para ulama dan tokoh agama untuk memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan syariat Islam. Selain itu, MPU juga berperan dalam memberikan arahan dan fatwa dan tausiyah terkait permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam di berbagai bidang. MPU juga melaksanakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) untuk melahirkan para ulama yang mempunyai kompetensi dalam artian mempunyai wawasan ke-islaman yang luas dan tersebar di wilayah Kabupaten Simeulue.

Tabel 2.43. Perkembangan Peran Ulama dalam menetapkan Fatwa dan Tausiyah dan Pengkaderan Ulama Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Fatwa dan Tausiyah yang ditetapkan	3	3	3	3	5
2	Jumlah kader ulama yang ditingkatkan kompetensinya/ pendidikan Kader Ulama	0	0	50	20	25

Sumber : Sekretariat MPU Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Berdasarkan data Tabel diatas dapat diketahui kinerja sekretariat MPU mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah fatwa dan tausiyah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dari tahun 2020 sebanyak 3 dokumen dan 2024 sebanyak 5 dokumen. Sedang Pendidikan kader ulama tahun 2020 dan 2021 tiadak adanya pelaksanaan Pendidikan kader, sedangkan tahun 2022, 2023, dan 2024 adanya pelaksanaan Pendidikan kader ulama dengan tujuan peningkatan kompetensi.

B. Kebudayaan

1. Perkembangan Seni dan Budaya

Pembangunan seni dan budaya yang bercorak (ciri khas) lokal Kabupaten Simeulue patut menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Kabupaten Simeulue terus mendorong percepatan pembangunan seni dan budaya melalui kegiatan pagelaran seni dan budaya, penguatan organisasi budaya, dan pembinaan sanggar (group) kesenian.

Kabupaten Simeulue mengalami berbagai dinamika dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mempertahankan serta mengembangkan kegiatan seni dan budaya. Data berikut memberikan gambaran tentang perkembangan grup kesenian, gedung kesenian, kegiatan pagelaran seni dan budaya, organisasi budaya, serta rasio dan persentase terkait dengan pelestarian adat istiadat di Kabupaten Simeulue. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.44. Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Grup Kesenian	10	10	11	15	15
2	Gedung Kesenian	1	1	1	1	1
3	Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya	0	1	3	5	5
4	Organisasi di Bidang Budaya	1	1	1	1	1
5	Rasio Grup Kesenian per 1000 penduduk	0,11	0,11	0,12	0,15	0,16
6	Rasio Gedung Kesenian per 1000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7	Persentase nilai-nilai pelestarian adat istiadat	49	50	55	55	60

*Sumber : *Disparbud Kabupaten Simeulue, Tahun 2025*

**Sekretariat MAA Kabupaten Simeulue, Tahun 2025*

Dari tabel yang menggambarkan perkembangan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Simeulue dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu :

1. Grup Kesenian :
   Jumlah grup kesenian tahun 2020 sebanyak 10 grup berkembang hingga tahun 2024 sebanyak 15 grup, peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan minat dan keterlibatan Masyarakat dalam aktivitas seni.

2. Gedung Kesenian:
   Jumlah gedung kesenian tetap konstan sebanyak 1 gedung dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan tidak ada pembangunan gedung kesenian baru selama periode tersebut, yang mungkin menunjukkan kebutuhan untuk peningkatan fasilitas infrastruktur kesenian.

3. Kegiatan Pagelaran Seni dan Budaya:
   Pada Tahun 2020 tidak ada kegiatan yang tercatat, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas public, jumlah kegiatan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 1, kemudian naik menjadi 3 pada tahun 2022, dan mencapai 5 kegiatan pada tahun 2023 dan 2024.

4. Organisasi di Bidang Budaya:

   Jumlah organisasi di bidang budaya tetap stabil sebanyak 1 organisasi setiap tahunnya dari 2020 hingga 2024. Ini menunjukkan stabilitas dalam keberadaan organisasi yang mengelola dan mendukung kegiatan budaya di wilayah tersebut.

5. Rasio Grup Kesenian per 1000 penduduk:

   Rasio ini tetap stabil pada 0,11 dari tahun 2020 hingga 2024 rasio meningkat menjadi 0,16, ini mencerminkan pertumbuhan jumlah grup kesenian meninggkat beriring dengan pertumbuhan penduduk.

6. Rasio Gedung Kesenian per 1000 penduduk:

   Rasio gedung kesenian per 1000 penduduk tetap konstan pada 0.01 selama periode 2020 hingga 2024. Stabilitas ini mencerminkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam aktivitas kesenian, fasilitas gedung kesenian tidak bertambah.

7. Persentase Nilai-nilai Pelestarian Adat Istiadat:

   Persentase nilai-nilai pelestarian adat istiadat meningkat dari 49% pada tahun 2020 menjadi dan terus meningkat menjadi 50% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, persentase ini mencapai 55%, dan 2024 mencapai 60 %, ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam upaya pelestarian adat istiadat. peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program-program pelestarian budaya yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kabupaten Simeulue juga memiliki situs cagar budaya, yang telah dipugar/dilestarikan. Data cagar budaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45. Situs Cagar Budaya di Kabupaten Simeulue

No	Nama Situs Cagar	Jenis Situs	Lokasi	Status Kepemilikan
1	Makam Tgk. Diujung	Makam	Desa Latakayah Kec. Simeulue Cut	Umum
2	Bungker Jepang	Bungker	Desa Naibos Kec. Teupa Barat	Umum
3	Bungker Jepang	Bungker	Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan	Umum
4	Bungker Jepang	Bungker	Desa Ulul Falu Kec. Teupah Selatan	Umum
5	Bakudo Batu	Makam	Makam Desa Salur Kec. Teupah Barat	Umum
6	Auduri	Makam	Makam Latakayah Kec. Simeulue Cut	Umum
7	Bungker Jepang	Bungker	Bungker Desa Kp. Aie Kec. Simeulue Tengah	Umum
8	Bungker Jepang	Bungker	Desa Sua-Sua Kec. Teupah Tengah	Umum

No	Nama Situs Cagar	Jenis Situs	Lokasi	Status Kepemilikan
9	Bungker Jepang	Bungker	Hulu Sua-Sua Kec.Teupah Tengah	Umum
10	Bungker Jepang	Bungker	Araban Desa Kp. Aie Kec. Simeulue Tengah	Umum
11	Bungker Jepang	Bungker	Desa Malasin Kec. Simeulue Barat	Umum
12	Bungker Jepang	Bungker	Babang Kec. Simeulue Timur	Umum
13	Bungker Jepang	Bungker	Desa Lugu Kec. Simeulue Timur	Umum
14	Bungker Jepang	Bungker	Desa Suak Baru Kec. Simeulue Tengah	Umum
15	Bungker Jepang	Bungker	Gunung Menggek Kec. Simeulue	Umum

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Tabel diatas menjelaskan Warisan Budaya ada yang berupa benda, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang diwarisi dan menjadi sejarah masa lalu (cultural heritage). Warisan budaya itu merupakan peninggalan masa sejarah, klasik, Islam, kolonial, Semua peninggalan masa lalu tersebut terdiri dari budaya benda seperti situs Makam Ulama bersejarah, dan bungker bersejarah. Keseluruhannya berjumlah 15 cagar budaya yang tersebar di wilayah Kabupaten Simeulue.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indikator strategis dalam mengukur tingkat keberhasilan program pembangunan keluarga, yang ditinjau melalui tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Indeks ini merefleksikan sejauh mana peran dan fungsi keluarga dijalankan secara optimal dalam kehidupan sosial masyarakat. Pembangunan keluarga yang berkualitas menjadi salah satu sasaran strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian pembangunan keluarga, menjadi indikator kunci yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai representasi dimensi *ketenteraman*, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai representasi *kemandirian*, serta angka kemiskinan sebagai proksi kondisi ekonomi dan kebahagiaan keluarga. Sinergi tersebut berkontribusi langsung terhadap penguatan fungsi-fungsi keluarga dan secara positif memengaruhi indikator pada ketiga dimensi utama pembangunan keluarga.

Tabel 2.46. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024

Tahun	Angka Harapan Hidup *(AHH)* (tahun)	Harapan Lama Sekolah *(HLS)* (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah *(RLS)* (tahun)	Angka Kemiskinan (%)	Skor IPK (0–100)	Kategori IPK
2020	65,26	13,76	9,34	18,49	58	Berkembang
2021	65,28	13,90	9,48	18,98	60	Berkembang
2022	69,44	14,08	9,73	18,37	64	Berkembang
2023	69,57	14,28	9,81	17,92	67	Berkembang
2024	69,69	14,53	9,89	17,69	70	Menuju Berkualitas

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, terjadi peningkatan seluruh indikator. Angka Harapan Hidup meningkat dari 65,26 tahun pada 2020 menjadi 69,69 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan dalam aspek kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan dasar, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Kondisi ini merefleksikan penguatan dimensi ketenteraman keluarga, di mana kesehatan menjadi indikator keberlanjutan kehidupan keluarga yang sejahtera.

Pada dimensi kemandirian, indikator Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan dari 13,76 tahun 2020 menjadi 14,53 tahun 2024, dan Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 9,34 menjadi 9,89 tahun dalam periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kualitas pendidikan menunjukkan perbaikan yang baik berdasarkan capaian pendidikan tidak hanya mencerminkan perbaikan kapasitas individu dalam keluarga, namun juga berkontribusi terhadap produktivitas dan kemampuan keluarga dalam menghadapi dinamika ekonomi dan sosial. Sementara itu, angka kemiskinan menunjukkan penurunan dari 18,49% 2020 menjadi 17,69% pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya penguatan dalam aspek ketahanan ekonomi keluarga. Menurunnya angka kemiskinan juga berkontribusi pada peningkatan dimensi kebahagiaan dan kemandirian, yang merupakan bagian integral dari Indeks Pembangunan Keluarga.

B. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu permasalahan sosial serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menghambat terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ada kaitannya dengan upaya mewujudkan Simeulue sebagai daerah yang ramah anak, menjunjung tinggi kesetaraan gender, dan melindungi kelompok rentan.

Tabel 2.47. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Tahun	Kasus terhadap Anak	Kasus terhadap Perempuan Dewasa
2020	16	2
2021	2	0
2022	6	0
2023	19	0
2024	16	1

Sumber : DP3AKB Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada 2020 tercatat 16 kasus, angka yang menurun drastis menjadi hanya 2 kasus pada 2021—kemungkinan akibat pembatasan sosial selama pandemi yang berdampak pada pelaporan atau pengawasan kasus. Namun, penurunan ini bersifat sementara. Kasus kembali naik menjadi 6 pada 2022, lalu melonjak signifikan menjadi 19 kasus pada 2023. Meskipun pada 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 16 kasus, jumlah ini tetap tinggi dan mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap anak masih menghadapi tantangan serius. Kenaikan kasus ini bisa mencerminkan baik peningkatan kejadian maupun peningkatan kesadaran dan pelaporan masyarakat.

Sebaliknya, kekerasan terhadap perempuan dewasa cenderung jauh lebih sedikit dan tidak konsisten tiap tahunnya. Hanya tercatat 2 kasus pada 2020, diikuti oleh tiga tahun tanpa laporan kasus dari 2021 hingga 2023. Munculnya 1 kasus kembali pada 2024 menjadi pengingat bahwa meskipun angka kekerasannya kecil, isu ini tetap memerlukan perhatian. Bisa jadi kasus kekerasan terhadap perempuan lebih banyak tersembunyi karena korban enggan melapor atau kurangnya mekanisme pelaporan yang ramah korban. Pola ini menunjukkan pentingnya membangun sistem dukungan dan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dewasa, serta memperkuat kesadaran publik agar kekerasan tidak lagi ditoleransi.

C. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang menempatkan anak sebagai subjek utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penguatan perlindungan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kabupaten yang inklusif, ramah anak, serta menjamin hak-hak anak secara utuh. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator komposit yang mencerminkan tingkat pencapaian upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di suatu wilayah. IPA disusun berdasarkan lima klaster utama sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, serta kegiatan budaya; dan (5) perlindungan khusus bagi anak dalam situasi rentan. Kelima klaster ini menjadi tolok ukur komprehensif dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang menyeluruh dan berkelanjutan.

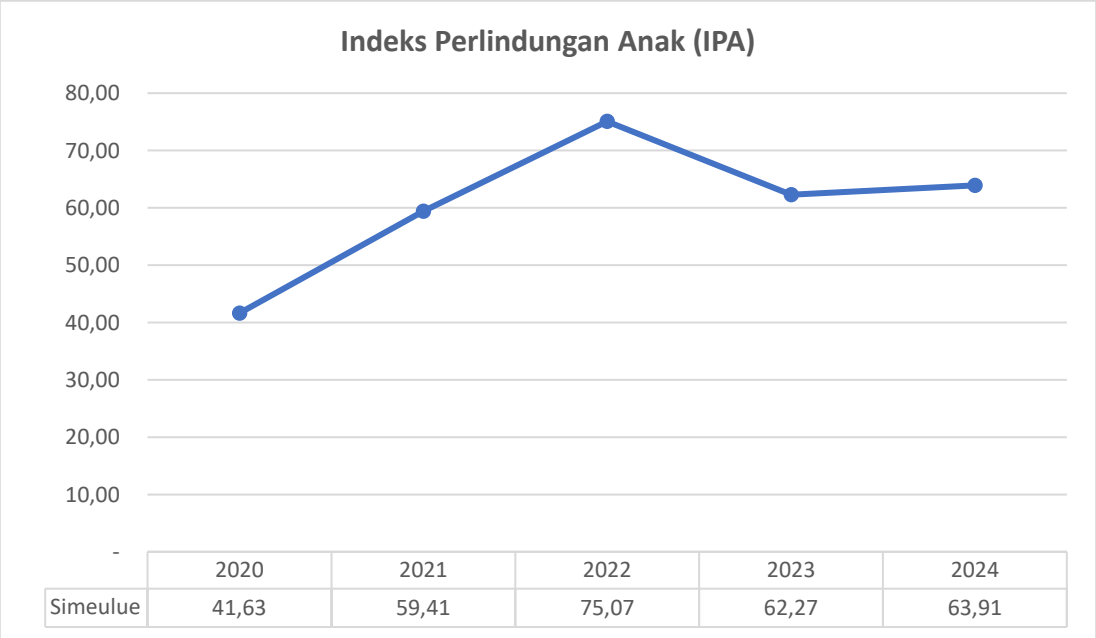

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	41,63	59,41	75,07	62,27	63,91

Sumber : Kementerian PPA RI, Tahun 2025

Grafik 2.31 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, data IPA untuk Kabupaten Simeulue belum tersedia (N.A). Namun, mulai tahun 2021, pengukuran IPA mulai terdokumentasi dengan nilai 59,41. Nilai ini menandai langkah awal yang signifikan dalam pengarusutamaan perlindungan anak di daerah tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2022, nilai IPA meningkat menjadi 61,48, mencerminkan adanya perbaikan dalam pelayanan dasar dan sistem perlindungan terhadap anak. Peningkatan ini terus berlanjut di tahun 2023, di mana IPA tercatat sebesar 62,27, menunjukkan tren positif dalam komitmen daerah terhadap pemenuhan hak anak. Berdasarkan tren data sebelumnya dan menggunakan model proyeksi linear sederhana, nilai IPA untuk tahun 2024 diperkirakan mencapai 63,91. Peningkatan ini mencerminkan konsistensi dalam implementasi kebijakan dan program perlindungan anak, meskipun capaian tersebut masih membuka ruang perbaikan lebih lanjut.

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang memperhitungkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. IPG secara spesifik menunjukkan sejauh mana perempuan dapat menikmati hasil pembangunan dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indeks ini juga menjadi alat penting dalam memantau keberhasilan pengarusutamaan gender (PUG) di tingkat daerah.

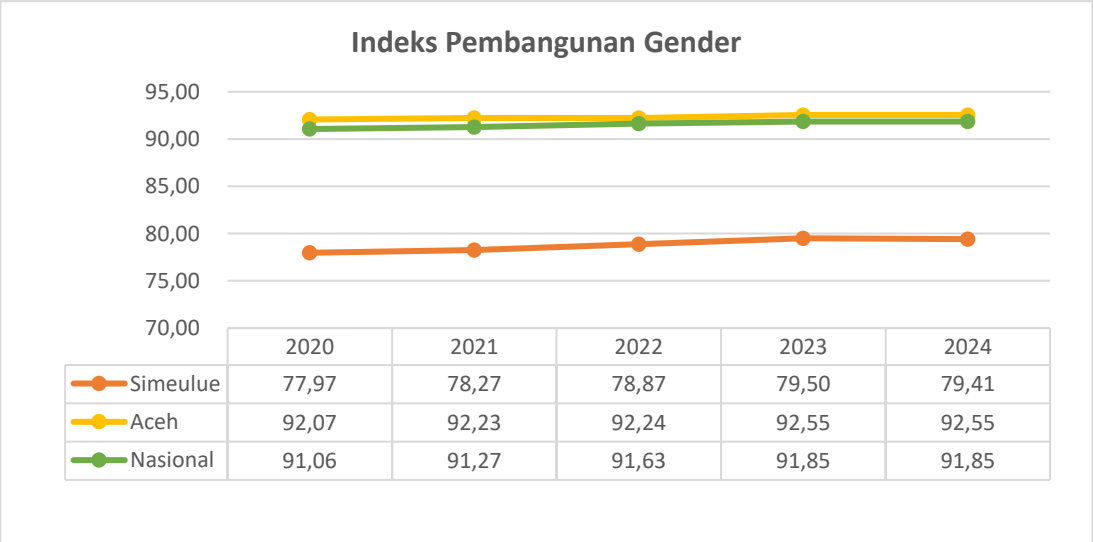

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	77,97	78,27	78,87	79,50	79,41
Aceh	92,07	92,23	92,24	92,55	92,55
Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.32 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Berdasarkan data Grafik diatas, capaian IPG Kabupaten Simeulue menunjukkan tren yang meningkat secara bertahap pada tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, nilai IPG Simeulue tercatat sebesar 77,97, kemudian meningkat secara konsisten menjadi 78,27 pada tahun 2021, 78,87 pada tahun 2022, dan mencapai angka tertinggi sebesar 79,50 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 79,41. Meskipun demikian, secara umum Simeulue menunjukkan arah perkembangan yang positif dalam hal kesetaraan gender.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Aceh dan nasional, IPG Kabupaten Simeulue masih berada pada posisi yang lebih rendah. Selama lima tahun terakhir, IPG Aceh konsisten berada di atas angka 92, sedangkan nasional berada di kisaran 91-92. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

E. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah salah satu indikator utama yang mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IKG secara khusus menilai disparitas atau kesenjangan yang ada antar gender. Nilai IKG yang lebih tinggi mencerminkan ketimpangan yang lebih besar, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kemajuan menuju kesetaraan gender.

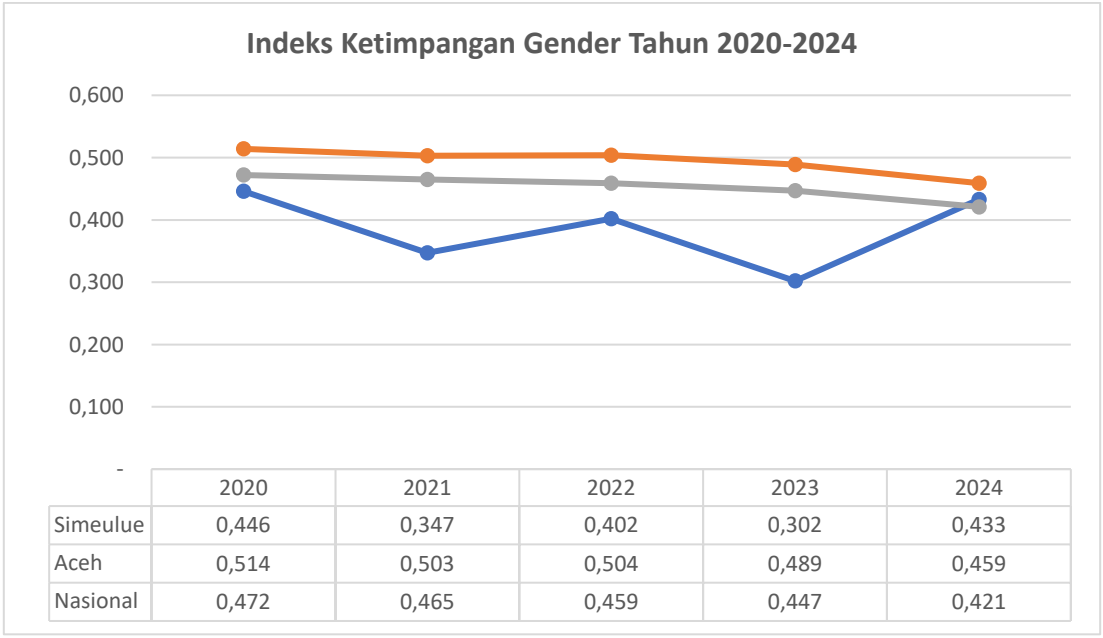

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	0,446	0,347	0,402	0,302	0,433
Aceh	0,514	0,503	0,504	0,489	0,459
Nasional	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.33 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian IKG Kabupaten Simeulue menunjukkan fluktuasi yang menggambarkan dinamika kesetaraan gender di daerah tersebut. Pada tahun 2020, nilai IKG tercatat sebesar 0,446, lalu menurun menjadi 0,347 di tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya pengarusutamaan gender, terutama dalam akses perempuan terhadap layanan dasar dan peluang partisipasi.

Namun, di tahun 2022 terjadi lonjakan nilai IKG menjadi 0,504, yang menandakan meningkatnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam partisipasi ekonomi dan pemberdayaan politik. Kondisi ini berhasil diperbaiki secara signifikan pada tahun 2023 dengan turunnya nilai IKG ke angka 0,302 — nilai terendah dalam lima tahun terakhir — yang mencerminkan peningkatan aksesibilitas dan representasi perempuan di berbagai sektor.

Capaian positif tersebut tidak berlanjut pada tahun 2024, di mana nilai IKG kembali meningkat menjadi 0,459. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa tantangan struktural dan kultural masih menjadi hambatan besar dalam mendorong kesetaraan gender. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini meliputi rendahnya tingkat literasi politik perempuan, minimnya representasi perempuan dalam lembaga legislatif yang hanya mencapai 20%, serta dominasi norma sosial yang masih membatasi peran perempuan di ranah publik dan profesional.

F. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang menggambarkan sejauh mana perempuan berdaya dan terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, pengambilan keputusan, serta memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. IDG dirancang untuk mengukur ketimpangan gender dari sisi pemberdayaan. IDG tidak hanya mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dan manajerial, tetapi juga menyoroti partisipasi perempuan dalam pasar kerja serta keterlibatannya dalam sektor ekonomi produktif.

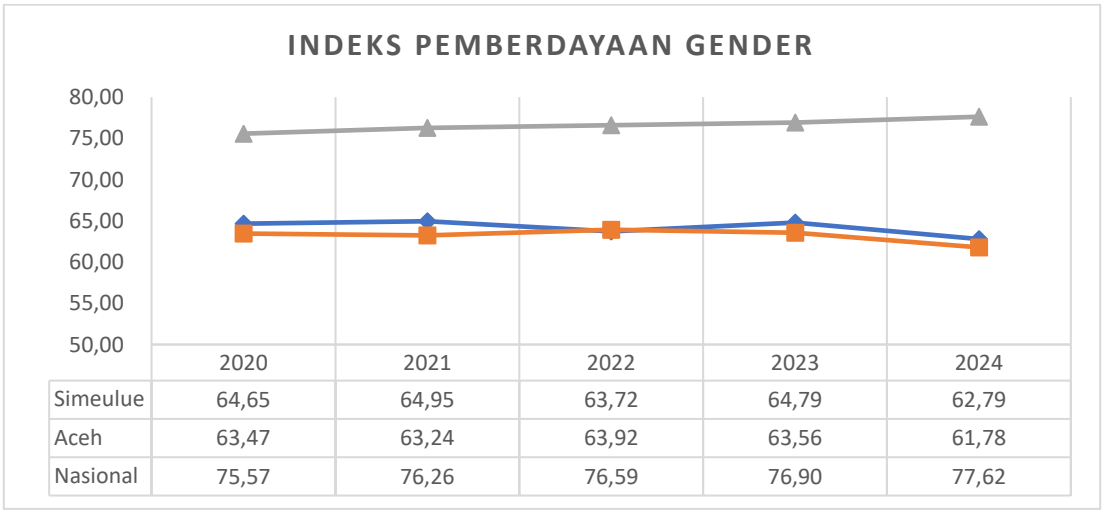

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	64,65	64,95	63,72	64,79	62,79
Aceh	63,47	63,24	63,92	63,56	61,78
Nasional	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.34 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Berdasarkan data IDG Kabupaten Simeulue menunjukkan pada tahun 2020, IDG tercatat sebesar 64,65, naik menjadi 64,95 pada tahun 2021. Namun, pada 2022 terjadi penurunan ke angka 63,72, yang kemudian kembali meningkat ke 64,79 pada tahun 2023 dan tetap pada angka tersebut di tahun 2024. Meskipun peningkatan dari tahun ke tahun tidak signifikan, nilai IDG Simeulue secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Aceh, namun masih tertinggal dibandingkan dengan capaian nasional. Kesenjangan terhadap tingkat pemberdayaan gender nasional masih cukup lebar, yang mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas perempuan dalam sektor publik, ekonomi, dan kepemimpinan.

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana (KB) merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). tujuan dan manfaat program keluarga berencana adalah mewujudkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. Namun, program ini sering kali disalahartikan sebagai program menolak kehadiran anak. Ada beberapa tujuan penting dilaksanakannya program keluarga berencana, di antaranya :

1. Membentuk keluarga kecil sejahtera, sesuai kondisi ekonomi keluarga.
2. Mencanangkan keluarga kecil dengan hanya dua anak.
3. Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini.
4. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua.
5. Menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) sebagai lembaga yang berperan dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Kabupaten Simeulue gencar mengampanyekan gerakan KB dengan penggunaan alat kontrasepsi atau yang disebut akseptor KB. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi tiga fase yaitu menunda atau mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan. Akseptor KB lebih disarankan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan menggunakan alat kontrasepsi. Pada PUS inilah yang lebih berpeluang besar untuk menghasilkan keturunan dan dapat meningkatkan angka kelahiran. Perkembangan Akseptor KB dan Jumlah Pasangan Usia Subur Kabupaten Simeulue Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.48. Perkembangan Akseptor KB dan Jumlah Pasangan Usia Subur Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Jenis Bantuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Akseptor KB	7995	6976	7574	10,546	12,478
2	Jumlah PUS	15.005	14.973	14.087	14.346	14,812
3	Rasio (%)	53,10	46,59	53,76	73,51	74,12

Sumber : DP3AKB Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, menunjukan bahwa perkembangan Akseptor KB di Kabupaten Simeulue mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah aksepror KB sebanyak 7.864 orang dengan jumlah pasangan subur sebanyak 14.650 pasang. tahun 2020 Jumlah akseptor KB sebanyak 7.995 orang dengan jumlah pasangan subur sebanyak 15.005 pasangan, tahun 2021 jumlah akseptor BK sebanyak 6.976 orang dengan jumlah pasangan subur sebanyak 14.973 pasangan, dan tahun 2022 jumlah akseptor BK sebanyak 7.574 orang dengan jumlah PUS sebanyak 14.087 pasangan dan pada tahun 2023 meinfkat signifikan menjadi 73,51% dari 14.346 PUS.

Tabel 2.49. Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	7995	6976	7574	10,546	12,478
2	Jumlah PUS	15.005	14.973	14.087	14.346	14,812
3	Cakupan PUS Peserta KB Aktif Peserta KB Aktif	115,5	114,79	114,03	114,28	114,66

Sumber : DP3AKB Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Untuk meningkatkan kualitas hidup ditingkat kampung pemerintah membentuk beberapa kampung KB di beberapa kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Upaya peningkatan kualitas hidup tersebut dilakukan melalui program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (KKBPK), serta pembangunan di berbagai sektor, dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Selain itu kampung KB dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya mengubah sikap, perilaku, dan cara berpikir masyarakat ke arah lebih baik.

Perkembangan pembentukan kampung KB di Kabupaten Simeulue berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50. Perkembangan Kampung KB Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Teupah Selatan	2	2	3	3	19
2	Simeulue Timur	1	1	1	1	17
3	Teupah Barat	1	1	1	1	18
4	Teupah Tengah	1	1	2	2	12
5	Simeulue Tengah	1	1	2	2	16
6	Teluk Dalam	1	1	1	1	10
7	Simeulue Cut	1	1	1	1	8
8	Salang	1	1	1	1	14
9	Simeulue Barat	1	1	1	1	16
10	Alafan	1	1	2	2	8

Sumber : DP3AKB Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Tabel 2.51. Jumlah Kampung KB yang Aktif Tahun 2024

No	Kecamatan	Kondisi 2024		Keterangan
		Aktif	Tidak Aktif	
1	Teupah Selatan	19	0	
2	Simeulue Timur	17	0	
3	Teupah Barat	18	0	
4	Teupah Tengah	12	0	
5	Simeulue Tengah	16	0	
6	Teluk Dalam	10	0	
7	Simeulue Cut	8	0	
8	Salang	14	0	
9	Simeulue Barat	16	0	
10	Alafan	8	0	

Sumber : DP3AKB Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Kesejahteraan merupakan kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat hidupnya. Kesejahteraan masing-masing individu bisa berbeda-beda, karena bersifat subyektif. Sehingga faktor-faktor untuk menentukan tingkat kesejahteraan juga berbeda. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan ekonomi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kelompok UPPKS. Tujuan dibentuknya kelompok UPPKS adalah upaya peningkatan pendapatan keluarga menuju keluarga sejahtera. Pembinaan kelompok UPPKS dengan melalui pelatihan ketrampilan dan manajemen pengelolaan kelompok. Perkembangan status keluarga di Kabupaten Simeulue tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Perkembangan kelompok kegiatan KB Kabupaten Simeulue tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

H. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indikator komposit yang disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan pemuda dalam berbagai dimensi kehidupan, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi, serta gender dan diskriminasi. IPP menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ditujukan bagi kelompok usia produktif, khususnya mereka yang berada dalam rentang usia 16–30 tahun.

IPP memiliki peran strategis sebagai barometer untuk menilai kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang. Pemuda merupakan aset pembangunan yang potensial, dan tingkat perkembangannya sangat menentukan arah transformasi sosial dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, investasi terhadap pemuda melalui peningkatan akses pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan reproduksi, serta ruang partisipasi politik dan sosial menjadi krusial dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan pembangunan pemuda diarahkan untuk menciptakan generasi muda yang produktif, inovatif, berdaya saing, dan berkarakter.

Tingkat keaktifan organisasi kepemudaan di kabupaten Simeuleu masih belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2023, dari total 25 organisasi pemuda yang terdaftar, hanya sekitar 68% yang tercatat aktif menjalankan kegiatan. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya upaya pemberdayaan dan pembinaan

organisasi kepemudaan di tingkat lokal, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah. Selain itu, tingkat pertumbuhan wirausaha muda di kabupaten Simeuleu masih tergolong rendah. Pada tahun 2023, jumlah pemuda yang tercatat menjalankan usaha mandiri hanya sebanyak 30 orang. Rendahnya angka ini mengindikasikan kurang optimalnya pelaksanaan program pelatihan kewirausahaan yang ditujukan bagi pemuda, sehingga belum mampu mendorong minat dan kemampuan generasi muda untuk terlibat aktif dalam sektor ekonomi produktif. Capaian prestasi olahraga di Kabupaten Simeulue masih tergolong terbatas. Pada tahun 2022, dalam ajang olahraga seperti POPDA, PORA, dan Kejurwil Piala Pangdam, jumlah medali yang diraih terdiri dari 11 emas, 6 perak, dan 19 perunggu. Hasil ini mencerminkan belum optimalnya pembinaan di berbagai cabang olahraga, termasuk pengembangan atlet dan keterbatasan jumlah pelatih bersertifikat. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai turut menjadi faktor penghambat dalam peningkatan prestasi atlet daerah.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan baik nasional maupun daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan adalah dengan mengukur tingkat daya saing (*competitiveness*). Indikator daya saing daerah sebagaimana dikemukan oleh Meyer-Stamer (2008) yaitu tercermin dalam keampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggidan meningkatkan mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut. Oleh karna itu semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatpun semakin tinggi.

A. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan yaitu ukuran yang menunjukan perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (anak-anak dan lansia) dengan penduduk usia produktif dalam suatu populasi. Rasio ketergantungan Kabupaten Simeulue adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan Angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (Angkatan kerja).



Sumber: BPS Kabupaten Simeulue Tahun 2025

Grafik 2.35 Tingkat Ketergantungan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir, tingkat ketergantungan di Kabupaten Simeulue cenderung stabil di kisaran 68%, dengan sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 2020, tingkat ketergantungan tercatat sebesar 68,37, lalu meningkat sedikit menjadi 68,50 pada 2021, dan terus naik menjadi 68,70 di 2022. Meskipun pada 2023 angka ini turun tipis ke 68,48, secara umum tingkat ketergantungan tetap berada pada level yang tinggi dan relatif konstan selama empat tahun pertama.

Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan ke 76,77, peningkatan yang mencolok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan drastis ini menunjukkan adanya perubahan struktural yang cukup besar dalam komposisi penduduk, yang bisa jadi disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia), atau menurunnya proporsi penduduk usia produktif.

B. Penduduk Bekerja

1. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan data BPS Kabupaten Simeulue diketahui bahwa Sebagian besar penduduk Kabupaten Simeulue berumur 15 tahun ke atas dengan status pekerjaan utama dan jenis kelamin yaitu:

Tabel 2.52. Status Pekerja Utama Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
Berusaha sendiri	8.497	2.755	11.252
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	6.613	1096	7709
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	359	-	359
Buruh/Karyawan/Pegawai	8.626	5.898	14.524
Pekerja bebas	1.119	390	1.509
Pekerja keluarga/tak dibayar	3.762	9.357	13.119

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk kabupaten simeulue bekerja menurut status pekerjaan utama yaitu Buruh/Karyawan/Pegawai yang paling tinggi status pekerjaannya yaitu dengan jumlah sebesar 14.524 orang laki-laki dan perempuan, kemudian Berusaha sendiri sebesar 11.252 orang laki-laki dan perempuan, untuk pekerja keluarga/tak dibayar dengan jumlah sebesar 13.119 orang laki-laki dan perempuan, pekerjaan dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 7.709 orang laki-laki dan perempuan, pekerja bebas dengan jumlah sebesar 1.509 orang laki-laki dan perempuan sedangkan jumlah menurut status pekerjaan utama yang paling rendah adalah berusaha sendiri dibantu buruh tetap/buruh bayar dengan jumlah sebesar 359 orang dengan jenis kelamin hanya laki-laki.

2. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tartinggi yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat Pendidikan terakhir yang berhasil diselesaikan dan dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tingkat Pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktifitas tenaga kerja. Data BPS menunjukan bahwa ada korelasi antara tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan partisipasi penduduk dalam Angkatan kerja. Menurut BPS secara umum, semakin tinggi tingkat Pendidikan semakin tinggi pula tingkt partisipasi dalam Angkatan kerja. Penduduk Kabupaten Simeulue berumur 15 tahun ke atas menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan status pekerjaan utama yaitu:

Tabel 2.53. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Kerja Terhadap Angkatan Kerja
0	15.018	175	15.193	98,85
1	7.811	190	8.001	97,63
2	16.629	1.423	18.052	92,12
3	9.014	1.033	10.047	89,72
Jumlah/*Total*	**48.472**	**2.821**	**51.293**	**94,50**

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Data ketenagakerjaan berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan pola yang menarik dan sedikit kontradiktif terhadap asumsi umum. Mereka yang tidak menyelesaikan pendidikan formal (kategori 0) justru mencatat persentase bekerja tertinggi, yakni 98,85%, dengan 15.018 orang dari total 15.193 angkatan kerja berhasil mendapatkan pekerjaan. Disusul oleh kelompok berpendidikan dasar (kategori 1), yang mencapai 97,63% tingkat bekerja. Namun, semakin tinggi tingkat pendidikan, terlihat adanya penurunan persentase kerja: lulusan pendidikan menengah (kategori 2) berada di angka 92,12%, dan lulusan pendidikan tinggi (kategori 3) justru mencatat angka terendah yaitu 89,72%, dengan 1.033 orang dari 10.047 angkatan kerja masih menganggur.

Secara keseluruhan, dari 51.293 orang dalam angkatan kerja, sebanyak 48.472 orang tercatat bekerja dan 2.821 orang menganggur, menghasilkan persentase kerja total sebesar 94,50%. Meski ini merupakan capaian positif secara umum, data ini juga mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam penyerapan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Penurunan tingkat bekerja pada kelompok ini bisa mencerminkan adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan industri lokal, terbatasnya lapangan kerja profesional, atau kurangnya akses ke peluang kerja yang sesuai. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menciptakan pasar kerja yang mampu menampung tenaga kerja terdidik, serta mendorong program peningkatan keterampilan (reskilling dan upskilling) yang lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

C. Kepemudaan dan Olah Raga

1. Kepemudaan

Pemuda merupakan aset strategis dalam pembangunan karena berada pada masa transisi yang penuh potensi antara masa remaja dan kedewasaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 hingga 30 tahun. Dalam rentang usia ini, pemuda diharapkan memiliki semangat, idealisme, serta kapasitas intelektual untuk berkontribusi aktif dalam berbagai aspek pembangunan—baik melalui jalur pendidikan, dunia kerja, kewirausahaan, maupun keterlibatan sosial dan kepemimpinan masyarakat.

Di Kabupaten Simeulue, kelompok pemuda menjadi bagian penting dalam struktur demografi daerah. Data dari BPS Kabupaten Simeulue (2025) menunjukkan bahwa jumlah pemuda dalam tiga kelompok usia utama 16–18 tahun, 19–24 tahun, dan 25–30 tahun mengalami dinamika yang menarik selama periode 2020-2024.

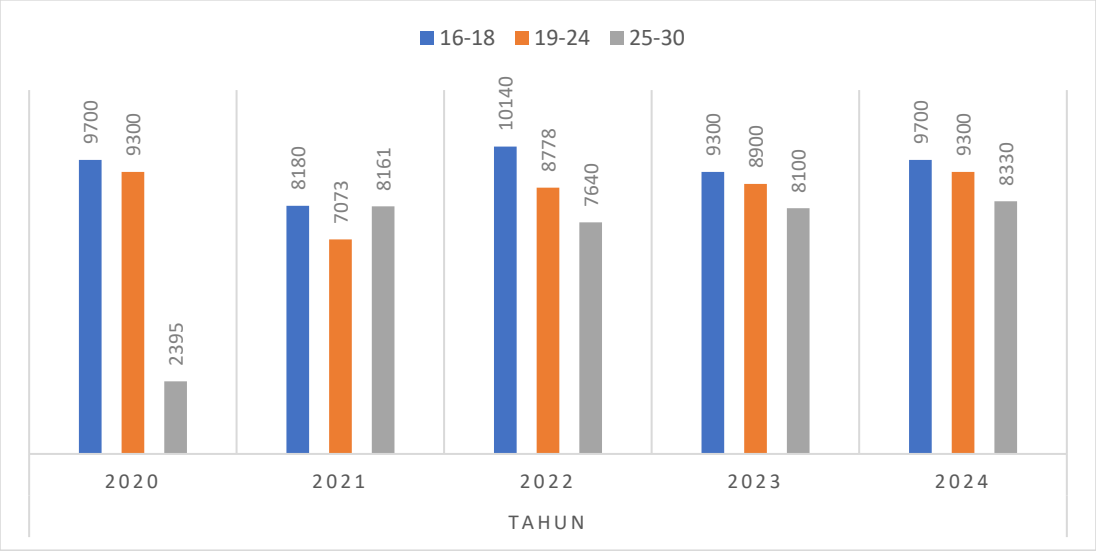

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.36 Jumlah Pemuda Menurut Kelompok Umur Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Grafik di atas memperlihatkan bahwa kelompok usia 16–18 tahun relatif stabil, diawali dan diakhiri dengan angka 9.700 jiwa, dengan puncaknya di 2022 sebesar 10.140 jiwa. Kelompok usia 19–24 tahun mencatat fluktuasi yang lebih tajam, dengan titik terendah di tahun 2021 (7.073 jiwa), lalu naik kembali hingga 9.300 jiwa di 2024. Kelompok usia 25–30 tahun menunjukkan lonjakan paling drastis, dari 2.395 jiwa di 2020 menjadi 8.330 jiwa di 2024. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan kekuatan demografi pemuda Simeulue yang relatif stabil dan bahkan meningkat, khususnya pada kelompok usia dewasa muda.

Pertumbuhan jumlah pemuda ini tentu menjadi peluang besar untuk mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan daerah. Salah satu sarana utama dalam menyalurkan aspirasi dan potensi pemuda adalah melalui organisasi kepemudaan.

Tabel 2.54. Organisasi Pemuda Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Pemuda	17	17	17	17	17

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeuue, Tahun 2025

Namun demikian, data menunjukkan bahwa jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Simeulue tetap sebanyak 17 organisasi dari tahun 2020 hingga 2024, tanpa adanya penambahan baru. Meskipun hal ini mencerminkan keberlangsungan dan eksistensi organisasi yang ada, stagnasi jumlahnya juga mengindikasikan belum berkembangnya wadah baru yang sejalan dengan dinamika kepemudaan masa kini.

2. Keolahragaan

Olahraga adalah aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur, melibatkan Gerakan tubuh berulang, dan bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, sedangkan keolahragwan adalah seseorang yang berpartisipasi dalam olahraga, terutama yang mengikuti pelatihan dan kompetensi secara teratur dan sistematis untuk mencapai prestasi.

Para pemuda yang memiliki potensi fisik yang baik dan memiliki minat di bidang olahraga berpeluang untuk dikembangkan menjadi pemain olahraga. Bidang pembangunan olahraga termasuk dalam agenda prioritas pembangunan sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Simeulue meningkatkan sarana dan prasarana olahraga. Dalam kaitan tersebut, Dinas Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Simeulue telah menyerahkan alat sarana dan prasarana untuk mendorong aktivitas beberapa cabang olahraga, seperti Selam, Dayung, Atletik, Taekwondo, dan Tarung Derajat.

Hasil temuan di setiap kecamatan memperlihatkan bahwa para pemuda sangat menyukai atau menggemari beragam jenis olahraga. Paling kurang 52,69 persen pemuda sangat menyukai Sepak bola, teratas dibandingkan dengan cabang olahraga lainnya. Cabang olah raga Bola Voli juga termasuk yang sangat digemari para pemuda pengangguran sebanyak 32,26 persen. Selebihnya tersebar untuk cabang olahraga lainnya.

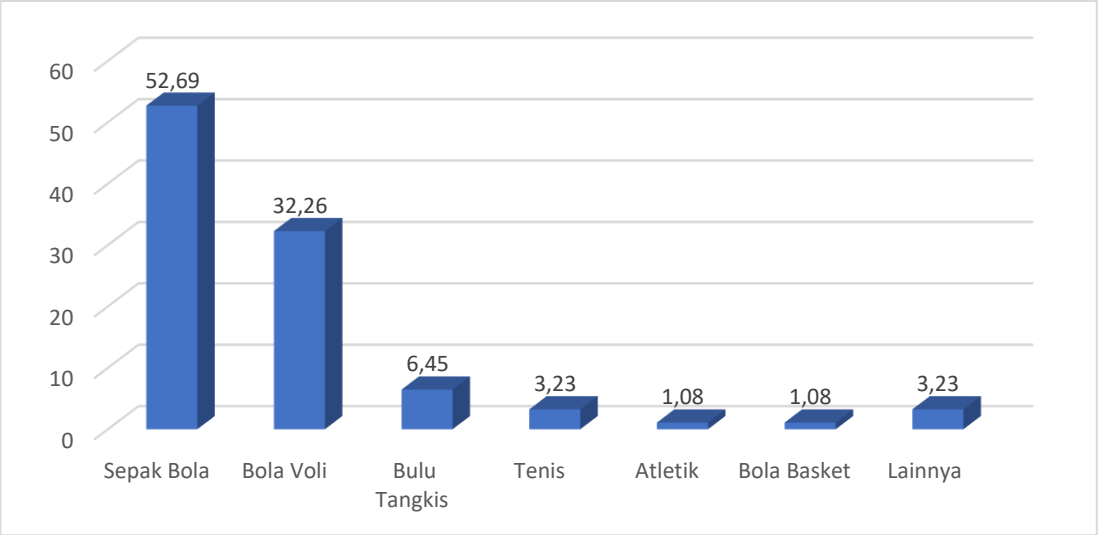

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Simeuue, Tahun 2025

Grafik 2.37 Jenis Olahraga Paling Disukai/Digemari

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Produktivitas ekonomi dan inovasi merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan suatu daerah untuk tumbuh secara berkelanjutan. Produktivitas mencerminkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, sementara inovasi menunjukkan kapasitas untuk beradaptasi, menciptakan nilai tambah, dan mendorong daya saing di tengah perubahan global. Di era digital dan pasca pandemi, peningkatan produktivitas yang berbasis inovasi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Simeulue

A. Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi daerah. Keberadaan industri pengolahan tidak hanya menciptakan nilai tambah dari bahan mentah menjadi barang jadi, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja, memperluas rantai pasok, serta memacu inovasi dan daya saing wilayah. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi berbasis transformasi struktural.

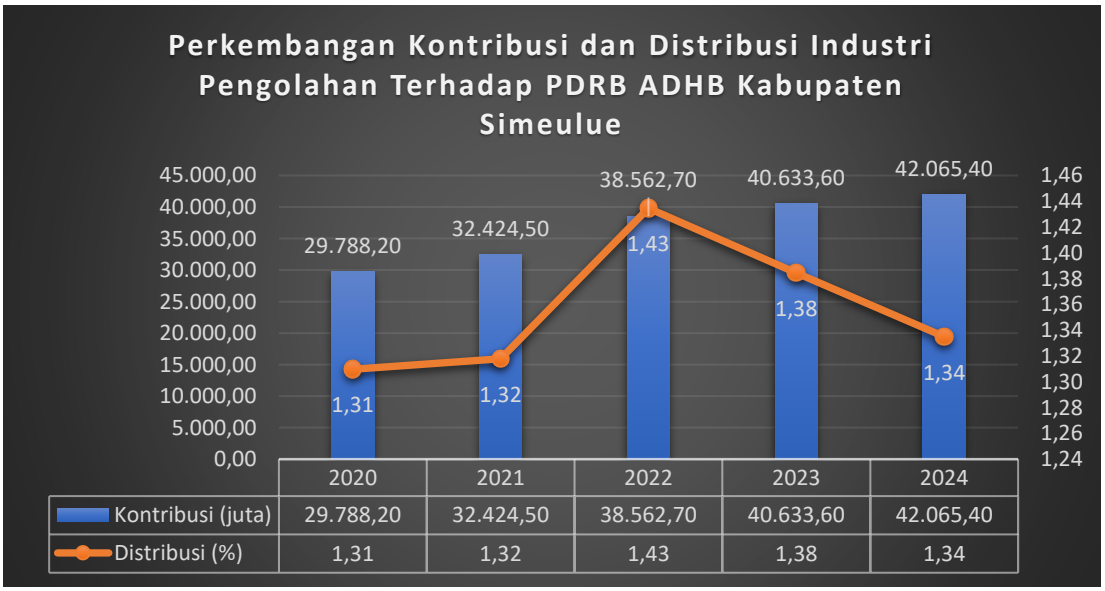

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, 2025

Grafik 2.38 Perkembangan Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 (dalam juta)

Berdasarkan data kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Simeulue selama periode 2020 hingga 2024, terlihat tren yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar Rp29.788,20 juta, dan terus meningkat menjadi Rp32.424,50 juta di 2021. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022, yakni sebesar Rp38.562,70 juta, yang menunjukkan lonjakan pertumbuhan lebih dari 18% dari tahun sebelumnya. Tren kenaikan berlanjut di 2023 dan 2024, masing-masing mencapai Rp40.633,60 juta dan Rp42.065,40 juta.

Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya peran industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti tumbuhnya UMKM berbasis produksi, investasi sektor industri rumah tangga, peningkatan akses bahan baku lokal, serta dukungan infrastruktur dan kebijakan daerah.

B. Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah, terutama di wilayah yang memiliki potensi pariwisata atau mobilitas penduduk yang tinggi. Sektor ini tidak hanya berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga menjadi penggerak sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan jasa. Di Kabupaten Simeulue, perkembangan sektor ini menjadi indikator penting dalam menilai pemulihan ekonomi pasca pandemi serta peningkatan daya tarik wilayah sebagai destinasi kunjungan dan aktivitas ekonomi lokal.

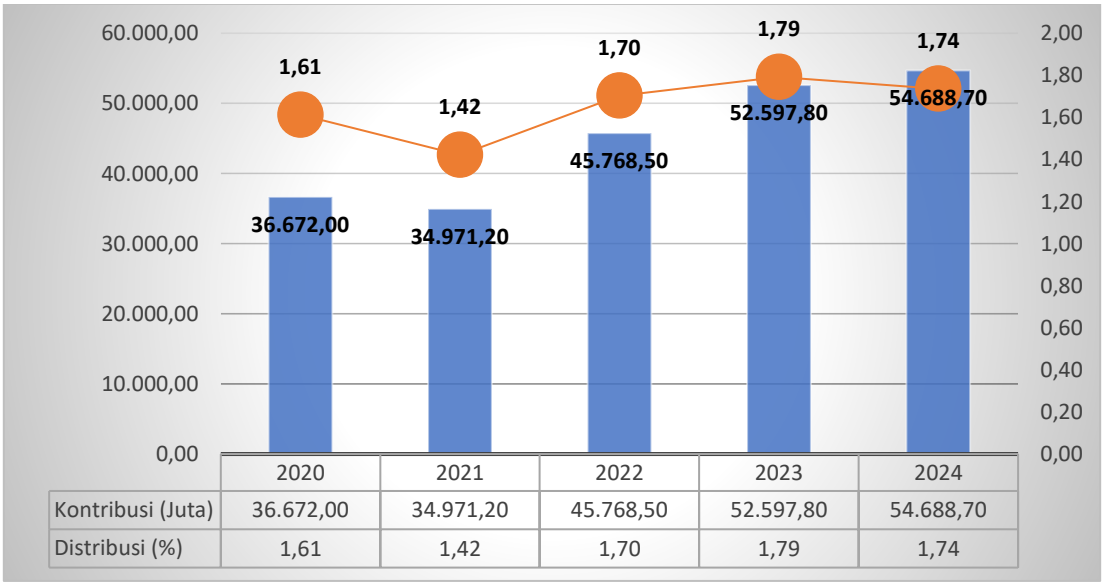

	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi (Juta)	36.672,00	34.971,20	45.768,50	52.597,80	54.688,70
Distribusi (%)	1,61	1,42	1,70	1,79	1,74

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.39 Perkembangan Kontribusi dan Distribusi Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Data menunjukkan bahwa kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB ADHB Kabupaten Simeulue mengalami fluktuasi di awal namun kemudian tumbuh tajam dan konsisten. Pada tahun 2020, kontribusi sektor ini tercatat sebesar Rp36.672,00 juta, menurun menjadi Rp34.971,20 juta pada 2021, kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas pariwisata dan konsumsi masyarakat.

Namun mulai 2022, sektor ini mencatat pemulihan signifikan dengan lonjakan kontribusi menjadi Rp45.768,50 juta, dan terus meningkat pada 2023 hingga mencapai Rp54.688,70 juta di 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap layanan akomodasi dan makan minum, yang bisa disebabkan oleh pulihnya mobilitas penduduk, kegiatan pariwisata, dan tumbuhnya pelaku usaha di sektor ini. Kinerja positif ini menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum merupakan salah satu motor penggerak ekonomi lokal Simeulue.

C. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Pariwisata Simeulue merupakan salah satu sektor unggulan yang selalu memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi Simeulue. Mengutip data yang dirilis BPS Kabupaten Simeulue, dalam kurun waktu 2017-2021, kontribusi sektor pariwisata Simeulue terhadap PDRB Kabupaten Simeulue mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai

dengan tahun 2019, Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,61 persen hingga sampai tahun 2021 angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,43 persen. Namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 pertumbuhan Sektor ini melambat bahkan mencapai -8,30 persen, hal ini diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang melanda.

Perkembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh alam dan budaya, tetapi juga ketersediaan akomodasi yang disediakan untuk wisatawan. Salah satu sarana pokok pariwisata adalah perhotelan/resort. Hotel/resort menyediakan tempat menginap sementara bagi tamu yang datang dari berbagai tempat. Terdapat juga akomodasi tambahan seperti restoran,rumah makan, fasilitas olahraga dan lainnya.

Tabel 2.55. Perkembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Simleulue Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB	36.672,00	34.971,20	45.768,50	52.597,80	54.688,70
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	33.702	25.000	n.a	n.a	n.a

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Tabel 2.56. Jumlah Usaha Akomodasi di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Jenis Usaha	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Losmen/Wisma/Resort	43	43	45	42	42
Rumah Makan/ Kafe	72	72	76	84	84
Rata-rata lama menginap (hari)	3	3	3	5	5

Sumber: Disparbud Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Wilayah kepulauan Simeulue memiliki potensi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Jumlah obyek wisata di Kabupaten Simeulue terutama terletak pada keindahan alamnya yang masih sangat alami. Dari 39 lokasi obyek wisata di kabupaten ini, 24 diantaranya adalah obyek wisata pantai. Kecamatan Teupah Barat memiliki lokasi obyek wisata terbanyak di kabupaten ini mencapai 7 buah, yaitu Pantai Lantik, Pantai Salur, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Sevelak, Pantai Maudil dan Pantai Nancala 7. Kecamatan Simeulue Barat terdapat 5 obyek wisata yaitu Pantai Sigulai, Pantai Layabaung, Mata Ifaung, Pulau Tinggi dan Danau Laulo Laut tawar. Sementara di Teluk Dalam hanya terdapat Danau Laut Tawar Mutiara. Lokasi dan nama obyek wisata yang berkembang sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tersebut pada tabel berikut.

Tabel 2.57. Perkembangan Obyek Wisata yang Berkembang Menurut Kecamatan di Kabupaten Simeulue s.d Tahun 2024

Kecamatan	Objek Wisata
Simeulue Timur	Pantai Ganting, Pulau Simanaha, Pulau Siumat dan Pantai Ujung Babang, Pulau Panjang
Simeulue Tengah	Air Terjun Putra Jaya, Suak Baru, Pantai Araban
Simeulue Barat	Pantai sigulai, Pantai Layabaung, Mata Ifalung, Pulau Tinggi dan Danau Laulo Laut Tawar, Pantai Batu Ragi, Pantai Teluk Sembilan
Teupah Selatan	Pantai Alus-Alus, Pantai Badegong, Pantai Pasir Tinggi, Pantai Bebi, Pantai Thailand, Pulau Batu Belayar, Pulau Lasia, Pulau Babi, Pantai Ujung Balla Pulau Bangkalak
Teupah Barat	Pantai Alaek Sektare, Pantai Salur, Pulau Teupah, Pulau Mincau, Pulau Sevelak, Pantai Maudil dan Pantai Nancala, Pantai Naibos
Salang	pantai Nasreuheu, Pantai Bidadari, Pantai Iseng dan Pantai Along
Teluk Dalam	Danau Laut Tawar Mutiara, Pulau Pinang, Pantai Sambay, Air Terjun Bulu Hadek
Alafan	Pulau Selaut Besar, Pulau Selaut Kecil dan Puklau Lekon, Pantai Batu Alafan, Pantai Lafakha
Teupah Tengah	Pantai Busung, Pantai Lasikin, Taman Jaro Rayo dan Matanurung,
Simeulue Cut	Pulau Simeulue Cut, Pantai Sianduk, dan Pantai Tale-Tale

Sumber: Disparbud Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

D. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, karena berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong. Di daerah seperti Kabupaten Simeulue, koperasi berperan dalam memperkuat ekonomi lokal, mendorong kemandirian pelaku usaha kecil, serta membuka akses terhadap pembiayaan dan distribusi barang maupun jasa.

Pemantauan terhadap jumlah koperasi, tingkat keaktifannya, serta performa ekonomi seperti omzet dan keanggotaan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas peran koperasi dalam pembangunan daerah. Data berikut menggambarkan dinamika perkembangan koperasi di Kabupaten Simeulue dalam kurun waktu lima tahun terakhir, mulai dari tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.58. Perkembangan Koperasi di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Koperasi	Unit	90	90	96	97	111
2.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	34	34	22	39	26
3.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	37,77	37,77	22,91	40,20	23,42
4.	Jumlah Koperasi yang dibina	Unit	10	10	7	8	10
5.	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	3.408	3.408	3.602	3.585	3570
6.	Jumlah Omzet	Miliar Rupiah	20,66	20,66	20,63	21	21,20

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah koperasi di Kabupaten Simeulue menunjukkan tren meningkat. Dari 90 unit pada 2020–2021, jumlahnya bertambah menjadi 96 unit pada 2022, 97 unit di 2023, dan melonjak signifikan menjadi 111 unit pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya upaya pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat secara kuantitatif. Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan jumlah koperasi aktif. Justru terjadi fluktuasi tajam, di mana jumlah koperasi aktif menurun dari 34 unit (2020–2021) menjadi hanya 22 unit pada 2022, sempat naik menjadi 39 unit di 2023, namun kembali menurun ke 26 unit pada 2024. Persentase koperasi aktif juga menggambarkan pola yang serupa, yakni turun dari 37,77% pada 2020–2021 menjadi 22,91% di 2022, naik ke 40,20% pada 2023, lalu turun lagi menjadi 23,42% di 2024. Ini menandakan bahwa meskipun jumlah koperasi bertambah, sebagian besar belum berfungsi secara efektif atau mengalami kendala dalam operasional.

Jumlah koperasi yang dibina juga mengalami penurunan dari 10 unit pada 2020–2021 menjadi 7 unit di 2022, dan 8 unit di 2023. Berdasarkan tren tersebut dan mengingat penurunan koperasi aktif di 2024, diperkirakan jumlah koperasi yang dibina pada 2024 adalah sekitar 6 unit, mencerminkan menurunnya intensitas pembinaan atau selektivitas dalam pendampingan koperasi.

Untuk jumlah anggota koperasi, terjadi kenaikan dari 3.408 orang (2020–2021) menjadi 3.602 orang di 2022, dan sedikit penurunan menjadi 3.585 orang di 2023. Jika melihat stabilitas tren ini, jumlah anggota pada 2024 diperkirakan tetap stabil atau sedikit menurun, yaitu sekitar 3.570 orang. Sementara itu, jumlah omzet koperasi relatif stabil selama empat tahun pertama, yaitu Rp20,66 miliar pada 2020–2021, Rp20,63 miliar di 2022, dan naik ke Rp21 miliar di 2023. Dengan tren ini, diperkirakan omzet pada 2024 meningkat sedikit menjadi sekitar Rp21,2 miliar, mengikuti pertumbuhan ekonomi lokal yang positif.

E. Usaha Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di Kabupaten Simeulue, UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pemerataan pembangunan. Sebagai sektor yang paling adaptif terhadap tekanan ekonomi, UMKM memainkan peran strategis dalam pemulihan pasca pandemi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akar rumput.

Memantau dinamika UMKM dari segi jumlah unit usaha, tenaga kerja yang terserap, serta omzet yang dihasilkan penting untuk menilai efektivitas dukungan kebijakan dan daya saing pelaku usaha kecil di daerah. Data berikut memperlihatkan perkembangan UMKM di Kabupaten Simeulue dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.59. Jumlah UMKM Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UMKM	Unit	2.518	2.599	2.599	2.599	
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	3.751	3.461	3.461	3.829	
3	Jumlah Omset UMKM	Miliar Rupiah	246,99	742.862	742.862	792.862	

Sumber : Disperindagkop dan UKM Kabupaten Simeulue, Tahun 2024

Data menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Simeulue mengalami peningkatan pada 2021, dari 2.518 unit menjadi 2.599 unit, dan cenderung stagnan hingga 2023. Untuk tahun 2024, diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 2.650 unit,

sebagai hasil dari dorongan ekonomi lokal dan program pemulihan usaha kecil pasca pandemi. Jumlah tenaga kerja yang terserap UMKM sempat menurun pada 2021 dan 2022, yakni 3.461 orang, sebelum kembali meningkat pada 2023 menjadi 3.829 orang. Dengan tren pemulihan tersebut, diperkirakan tenaga kerja yang terserap pada 2024 akan mencapai sekitar 3.950 orang, mencerminkan membaiknya aktivitas produksi dan distribusi usaha kecil.

Dari sisi omzet, lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2021, dari Rp246,99 miliar (2020) menjadi Rp742,862 miliar, dan terus meningkat ke Rp792,862 miliar pada 2023. Melihat tren ini, proyeksi omzet UMKM di 2024 diperkirakan mencapai sekitar Rp825 miliar, yang menunjukkan peningkatan kapasitas usaha dan potensi ekonomi lokal yang terus berkembang. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa UMKM di Simeulue mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang cukup positif, baik dari sisi jumlah, tenaga kerja, maupun nilai ekonomi. Dukungan kebijakan yang berkelanjutan akan sangat penting untuk menjaga tren ini dan memperkuat kontribusi UMKM terhadap pembangunan daerah.

F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting dalam mengukur proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK mencerminkan sejauh mana penduduk memanfaatkan potensi tenaga kerja dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kenaikan atau penurunan TPAK tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh dinamika sosial seperti pendidikan, migrasi kerja, serta kondisi kesehatan dan kebijakan pemerintah.

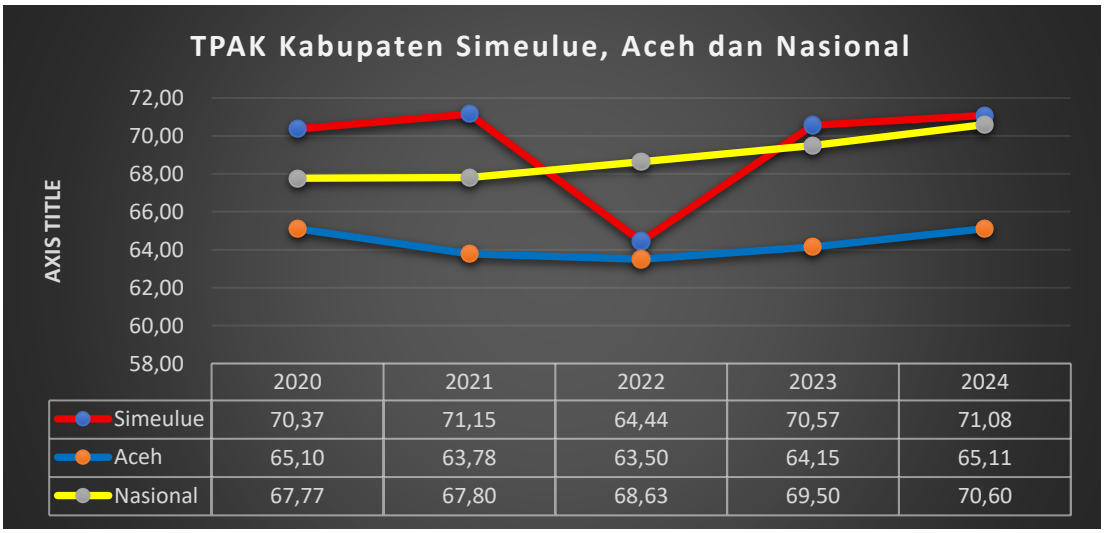

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	70,37	71,15	64,44	70,57	71,08
Aceh	65,10	63,78	63,50	64,15	65,11
Nasional	67,77	67,80	68,63	69,50	70,60

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.40 TPAK Kabupaten Simeulue, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik, TPAK Kabupaten Simeulue menunjukkan fluktuasi signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. TPAK sempat meningkat dari 70,37% pada 2020 menjadi 71,15% pada 2021, menandakan keterlibatan yang cukup tinggi dari penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja. Namun pada tahun 2022, terjadi penurunan tajam ke 64,44%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi, termasuk PHK, minimnya peluang kerja, atau peningkatan jumlah penduduk tidak aktif secara ekonomi seperti pelajar dan ibu rumah tangga.

Pemulihan terlihat pada 2023, di mana TPAK kembali naik ke 70,57%, dan berlanjut stabil di 71,08% pada 2024. Kembalinya angka TPAK ke atas 70% menunjukkan bahwa partisipasi penduduk dalam dunia kerja pulih secara progresif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, peluang kerja, serta membaiknya kepercayaan masyarakat terhadap pasar tenaga kerja.

G. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB ADHB

Sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, merupakan sektor vital yang mencerminkan dinamika aktivitas konsumsi, distribusi barang, dan pelayanan teknis di tingkat masyarakat. Di daerah kepulauan seperti Kabupaten Simeulue, keberlangsungan dan pertumbuhan sektor ini memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi lokal, karena mendukung jalur suplai kebutuhan pokok sekaligus menyerap tenaga kerja informal dan UMKM.

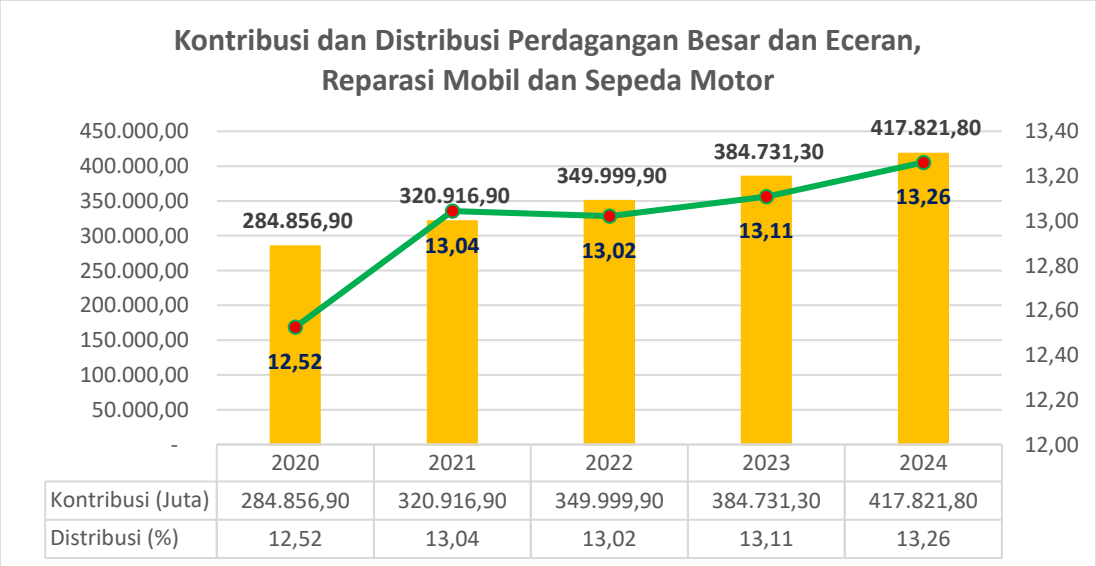

	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi (Juta)	284.856,90	320.916,90	349.999,90	384.731,30	417.821,80
Distribusi (%)	12,52	13,04	13,02	13,11	13,26

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.41 Kontribusi dan Distribusi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB ADHB Kab. Simeulue Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik, terlihat bahwa kontribusi sektor perdagangan dan reparasi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Simeulue mengalami pertumbuhan yang stabil dan signifikan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kontribusinya tercatat sebesar Rp284.856,90 juta, kemudian meningkat menjadi Rp320.916,90 juta pada 2021, dan terus naik menjadi Rp349.999,90 juta di 2022. Tren positif berlanjut hingga Rp384.731,30 juta pada 2023, dan mencapai Rp417.821,80 juta pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan daya tahan dan daya dorong sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah, bahkan di tengah tantangan global seperti pandemi. Pertumbuhan yang konsisten ini juga mengindikasikan membaiknya distribusi logistik, naiknya daya beli masyarakat, serta semakin aktifnya aktivitas usaha, baik formal maupun informal, bergerak di bidang jual beli dan jasa reparasi kendaraan.

H. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan periode tertentu, yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan daerah hal ini sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018. Hasil penilaian inovasi daerah dikategorikan menjadi 4 tingkatan yaitu tidak dapat dinilai (skore 0,00), kurang inovatif (skore 0,01 – 35,00), inovatif (skore 35.01 – 60.00), sangat inovatif (skore 60,01 – 100). Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh dan Inovasi daerah di Kabupaten Simeulue dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 28 Tahun 2022. Hasil Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Simeulue sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 masuk dalam kategori kurang inovatif, tahun 2023 dan 2024 sudah masuk dalam katagori inovatif sebagaimana penilaian pada grafik dibawah ini:

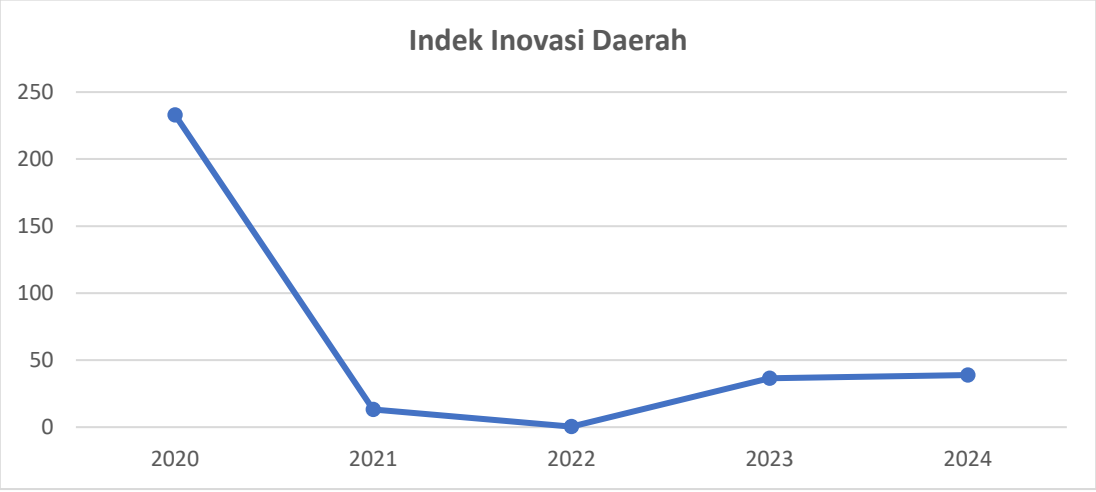

Sumber: Bappeda Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.42 Indek Inovasi Daerah Tahun 2020-2024

Rendahnya inovasi daerah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran, budaya organisasi yang kurang mendukung inovasi, kurangnya pemahaman tentang pentingnya inovasi, serta hambatan birokrasi dan administrative. Tahun 2025 terjadi perubahan skor Indeks Penilaian Inovasi Daerah yaitu tidak dapat dinilai (skore 0,00), kurang inovatif (skore 0,01 – 40,00), inovatif (skore 40.01 – 65.00), sangat inovatif (skore 65,01 – 100) tentu ini menjadi tantangan kedepan dalam pencapaian Pemerintah Dearah menjadi Inovatif dan Sangat Inovatif.

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang di ukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

I. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan jumlah rata-rata uang yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam rumah tangga untuk membeli barang dan jasa konsumsi dalam periode tertentu. Konsumsi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, karena pemenuhan kebutuhan sehari-hari tidak terlepas dari aktivitas ini. Oleh karena itu, pengeluaran konsumsi sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga. Secara umum, pola konsumsi penduduk di kabupaten Simeulue masih didominasi oleh pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan dengan kebutuhan non-makanan.

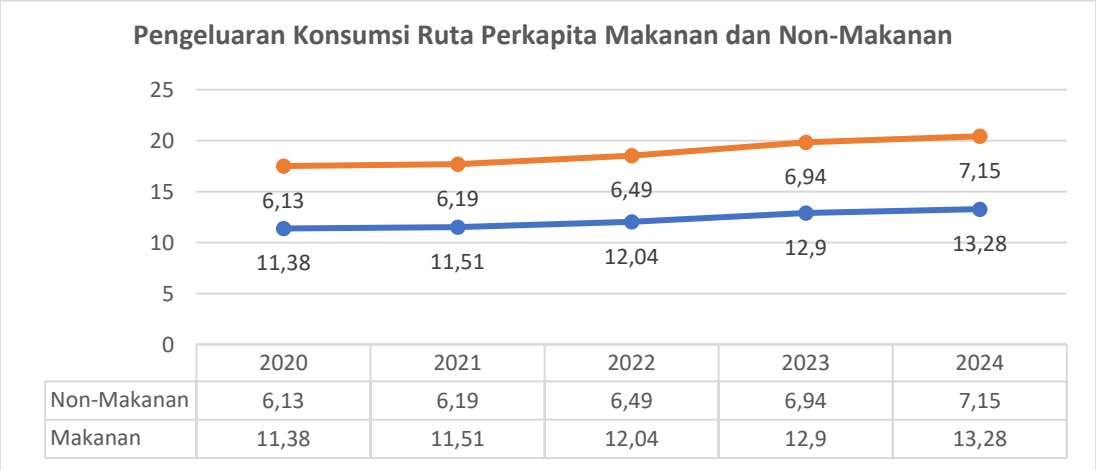

	2020	2021	2022	2023	2024
Non-Makanan	6,13	6,19	6,49	6,94	7,15
Makanan	11,38	11,51	12,04	12,9	13,28

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.43 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Selama periode 2020 hingga 2024, konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Simeulue mengalami peningkatan dari Rp17,51 juta menjadi Rp20,43 juta, yang mencerminkan tren positif dalam pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Konsumsi makanan meliputi belanja bahan pangan pokok dan makanan jadi, sementara konsumsi non-makanan mencakup pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan kebutuhan lainnya. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya daya beli, kesadaran gizi, dan akses terhadap layanan dasar, yang menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat dan perubahan pola konsumsi ke arah yang lebih modern dan beragam.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru merujuk pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga ekosistem darat dan laut. Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Simeulue fokus pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian ramah lingkungan, perikanan berkelanjutan, dan ekowisata bahari untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan tulang punggung ekonomi di banyak wilayah, terutama daerah dengan karakteristik geografis kepulauan dan pedesaan seperti Kabupaten Simeulue. Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan ketergantungan struktural suatu wilayah terhadap kegiatan ekonomi primer.

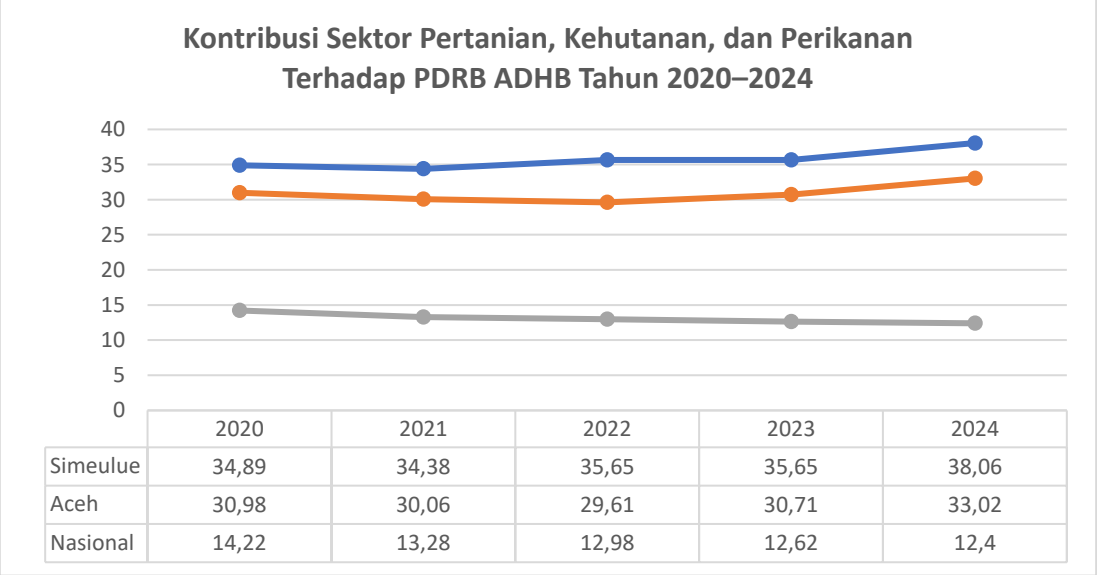

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	34,89	34,38	35,65	35,65	38,06
Aceh	30,98	30,06	29,61	30,71	33,02
Nasional	14,22	13,28	12,98	12,62	12,4

Sumber: BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.44 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB Simeulue, Aceh, dan Nasional Tahun 2020–2024

Berdasarkan data, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB ADHB Simeulue mengalami fluktuasi kecil namun cenderung meningkat dalam jangka panjang. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 34,89%, sempat turun ke 34,38% pada 2021, lalu naik ke 35,65% dan bertahan stabil hingga 2023, sebelum melonjak menjadi 38,06% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer tetap mendominasi struktur ekonomi daerah.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Aceh, kontribusi sektor ini juga cukup besar namun sedikit lebih rendah dari Simeulue. Pada 2020–2024, kontribusinya berkisar antara 30,06% hingga 33,02%, menunjukkan tren sedikit naik pada akhir periode. Sementara di tingkat nasional, terlihat tren penurunan bertahap, dari 14,22% pada 2020 menjadi 12,40% pada 2024. Hal ini menggambarkan bahwa secara nasional, struktur ekonomi semakin bergeser ke sektor sekunder dan tersier.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Simeulue dan Aceh masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan sebagai penggerak ekonomi utama, berbeda dengan tren nasional yang semakin terdiversifikasi. Dengan kontribusi yang besar dan cenderung meningkat di Simeulue, sektor ini masih menjadi sektor prioritas yang perlu terus diperkuat melalui modernisasi alat produksi, peningkatan akses pasar, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi elemen kunci dalam mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing di era ekonomi modern. Di tingkat daerah, digitalisasi membuka peluang baru bagi sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan pelayanan, memperluas akses informasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Kabupaten Simeulue pun mulai mengadopsi pendekatan digital dalam berbagai aspek pembangunan, sebagai langkah strategis menuju tata kelola yang lebih responsif dan masyarakat yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

A. Persandian

Persandian memiliki peran yang sangat vital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama dalam menjamin keamanan informasi. Seiring dengan peningkatan tugas pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategis, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan persandian mengalami transformasi signifikan. Paradigma persandian pun telah bergeser, tidak lagi sebatas pengiriman berita rahasia, melainkan menjadi bagian strategis dalam menjamin ketersediaan, kerahasiaan, dan keutuhan data di era keterbukaan informasi saat ini, melalui tata kelola keamanan informasi yang komprehensif.

Keamanan informasi mencakup berbagai aspek penting, seperti kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentikasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap informasi, baik dalam bentuk fisik (keamanan infrastruktur) maupun logis (keamanan digital). Pemberdayaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memang membawa peluang efisiensi, tetapi juga menghadirkan sejumlah risiko seperti penyadapan, peretasan (hacking), dan berbagai bentuk ancaman siber lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi sangat krusial.

Saat ini, penyelenggaraan persandian difokuskan untuk mewujudkan sistem keamanan informasi yang andal, yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) terlatih. Sistem elektronik yang digunakan oleh instansi pemerintah merupakan kumpulan perangkat dan prosedur elektronik yang memproses informasi secara digital, mulai dari pengumpulan hingga penyebaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi, dilakukan pula pengujian kerentanan dan penilaian risiko terhadap sistem elektronik yang ada. Tingkat kesiapan ini diukur melalui persentase sistem elektronik yang telah diuji dibandingkan dengan jumlah total sistem yang digunakan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (2), yang menegaskan bahwa persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan

dasar. Oleh karena itu, sektor persandian perlu mendapat perhatian dan pengembangan serius, baik dalam aspek pemanfaatannya di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, maupun pemutakhiran teknologi persandian yang mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang andal.

B. Statistik

1. Statistik Sektoral Daerah

Keberadaan Statistik Sektoral Daerah sangat dibutuhkan untuk memperkuat data dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah dari berbagai bidang kegiatan. Untuk itu Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada lingkup daerah masing-masing. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) menyatakan tujuan dari pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) yang turunannya dapat dilaksanakan pada skala Pemerintah Provinsi seperti Satu Data Aceh adalah untuk:

a) Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan.

b) Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

c) Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis pada data.

d) Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pemerintah Aceh juga telah mengatur terkait Satu Data di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh dengan Satu data.

2. Geospasial

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi satu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Selain statistik sektoral, geospasial juga memegang peranan penting dalam mendukung berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Geospasial dapat mengambil peran dalam pembangunan dari berbagai sektor.

Informasi tentang geospasial menjadi bahan pendukung dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berbasis spasial. Informasi Geospasial (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011) adalah informasi yang sangat berharga dan dapat digunakan serta dimanfaatkan untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA), penyusunan rencana tata ruang dan perencanaan lokasi investasi. Selain itu informasi geospasial juga dapat digunakan untuk menentukan garis batas wilayah, pertanahan, pertahanan keamanan, dan lain-lain yang semuanya dapat dijadikan dalam penyusunan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan solusi sempurna untuk mengatasi tumpang tindih izin penggunaan lahan.

Oleh karena itu ketersediaan informasi geospasial yang akurat dapat mendukung dalam mengambil keputusan yang efisien, efektif dan komunikatif. Selembar peta mengandung beragam informasi yang menyangkut aspek keruangan. Informasi geospasial sangat penting untuk mendukung program pembangunan daerah dan nasional. Dengan pemanfaatan informasi geospasial secara optimal, Pemerintah Kabupaten Simeulue berkomitmen untuk membangun sistem tata kelola pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan berbasis data spasial.

C. Perhubungan

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Simeulue merupakan data yang menggambarkan total pergerakan penumpang yang menggunakan sarana transportasi umum, baik darat, laut, maupun udara, dalam kurun waktu tertentu. Pemantauan terhadap arus penumpang penting sebagai dasar perencanaan kebijakan transportasi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.

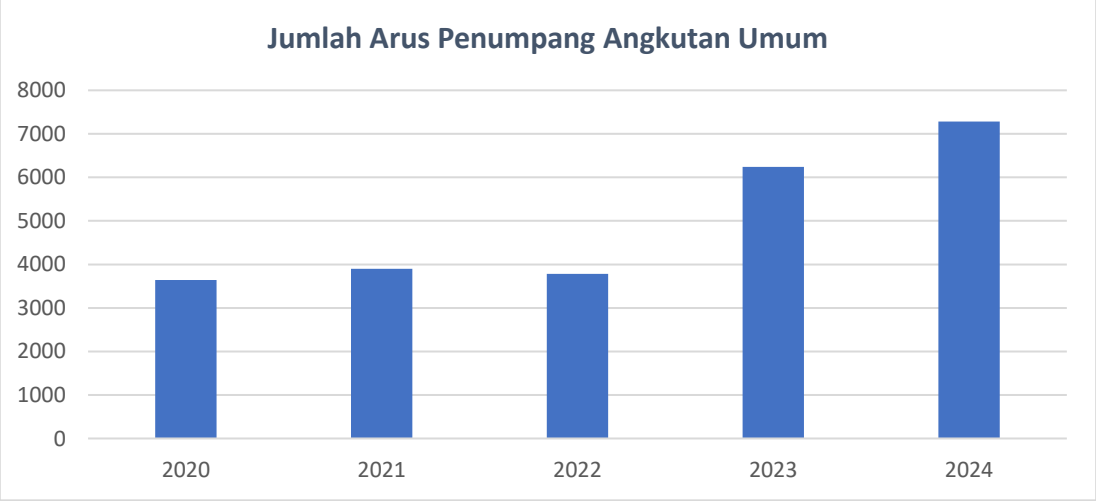

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.45 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Jumlah arus penumpang angkutan umum merujuk pada total pergerakan individu yang menggunakan sarana transportasi publik dalam kurun waktu tertentu, baik itu harian, bulanan, maupun tahunan. Dalam konteks Kabupaten Simeulue, salah satu jenis angkutan umum yang diamati adalah bus sekolah, yang berperan penting dalam mendukung mobilitas pelajar antar wilayah. Data arus penumpang ini memberikan gambaran mengenai intensitas penggunaan moda transportasi tersebut, sekaligus mencerminkan keterjangkauan, kebutuhan, dan efisiensi pelayanan angkutan yang tersedia di daerah kepulauan seperti Simeulue.

Informasi mengenai arus penumpang sangat penting sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan transportasi daerah. Peningkatan jumlah penumpang dari tahun ke tahun dapat menunjukkan keberhasilan penyediaan layanan angkutan umum yang semakin diminati, sementara penurunan atau stagnasi justru dapat menjadi indikator perlunya perbaikan infrastruktur, jadwal operasional, maupun aksesibilitas rute. Dengan demikian, pemantauan data ini berkontribusi besar dalam mendukung pengembangan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Simeulue.

2. Rasio izin trayek

Rasio izin trayek Kabupaten Simeulue merujuk pada perbandingan antara jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki izin trayek resmi dengan jumlah total kendaraan yang beroperasi untuk pelayanan angkutan penumpang di wilayah tersebut. Izin trayek adalah bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mengatur rute, jadwal, dan kapasitas layanan angkutan umum, sehingga operasional angkutan berlangsung tertib, aman, dan sesuai regulasi.

Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepatuhan operator angkutan terhadap regulasi transportasi, sekaligus mencerminkan efektivitas pengawasan dan pelayanan perizinan di sektor perhubungan. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas angkutan umum telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, sedangkan rasio yang rendah bisa menandakan adanya banyak kendaraan yang beroperasi secara tidak resmi atau ilegal, yang berpotensi menimbulkan masalah keselamatan, ketertiban lalu lintas, serta persaingan usaha yang tidak sehat. Pemantauan rasio izin trayek sangat diperlukan dalam mendukung penataan sistem transportasi yang profesional dan berkelanjutan di Kabupaten Simeulue.

3. Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal

Kabupaten Simeulue, sebuah pulau yang berlokasi strategis sebagai salah satu wilayah terdepan di Provinsi Aceh, memiliki infrastruktur transportasi yang esensial untuk menjaga konektivitasnya dengan daerah lain dan mendukung mobilitas internal. Keberadaan fasilitas ini sangat vital mengingat karakteristik geografis Simeulue sebagai pulau.

Di sektor transportasi udara, Simeulue dilayani oleh 1 (satu) Bandar Udara Lasikin (LKI). Bandara ini berperan sebagai pintu gerbang utama via udara, melayani penerbangan domestik yang menghubungkan Simeulue dengan kota-kota besar di sekitarnya. Keberadaan bandara sangat krusial untuk aksesibilitas, terutama dalam situasi darurat, distribusi logistik, dan mendukung pariwisata.

Untuk transportasi laut, Kabupaten Simeulue mengandalkan setidaknya 1 (satu) Pelabuhan Penyeberangan utama, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, yang juga dikenal sebagai Pelabuhan Kolok Sinabang. Pelabuhan ini menjadi tulang punggung konektivitas antara Simeulue dengan daratan Aceh melalui layanan kapal feri. Selain itu, terdapat juga Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Teluk Sinabang, yang secara khusus mendukung aktivitas nelayan dan industri perikanan lokal, memfasilitasi distribusi hasil laut.

Dalam hal transportasi darat, Kabupaten Simeulue dilengkapi dengan 1 (satu) Terminal utama di Sinabang. Terminal ini berfungsi sebagai pusat koordinasi bagi angkutan darat di dalam pulau, seperti bus dan angkutan umum lainnya. Ini memastikan pergerakan orang dan barang antar kecamatan atau desa di Simeulue dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 2.60. Jumlah Pelabuhan/Terminal/Bandara di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Jumlah Pelabuhan/ Bandara/Terminal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	1	1	1	1	1
Jumlah Bandar Udara	1	1	1	1	1
Jumlah Terminal Tipe C	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Secara keseluruhan, meskipun merupakan daerah kepulauan, Kabupaten Simeulue telah dilengkapi dengan infrastruktur transportasi yang cukup memadai, mencakup moda udara, laut, dan darat. Keberadaan bandara, pelabuhan, dan terminal ini mendukung aktivitas ekonomi, sosial, serta mobilitas penduduk, sekaligus memperkuat integrasi Simeulue dalam lingkup regional dan nasional.

4. Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR

Sektor transportasi darat di Kabupaten Simeulue menghadapi tantangan unik, terutama karena karakteristik geografisnya sebagai daerah kepulauan. Meskipun ada terminal utama di Sinabang, persentase cakupan layanan angkutan darat umum untuk seluruh wilayah kabupaten belum teridentifikasi secara spesifik dalam angka persentase. Namun, beberapa indikasi menunjukkan bahwa layanan angkutan umum, khususnya bus dan angkutan trayek, masih terbatas dan terfokus pada rute-rute utama seperti Sinabang ke kecamatan-kecamatan yang lebih jauh misalnya Simeulue Barat dan Alafan.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi di kalangan masyarakat Simeulue. Fenomena ini, yang menyebabkan penurunan jumlah penumpang angkutan umum, mendorong banyak operator angkutan umum untuk mengurangi armadanya bahkan menutup usaha mereka. Akibatnya, pilihan angkutan umum menjadi semakin sedikit, memaksa masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi untuk bergantung pada alternatif yang terbatas atau pada angkutan tidak resmi.

Terkait dengan kepemilikan KIR (uji kelaikan kendaraan bermotor), Pemerintah Kabupaten Simeulue, melalui Dinas Perhubungan, belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang bertugas melaksanakan uji KIR. Sebagaimana diketahui, uji KIR ini wajib dilakukan secara berkala (umumnya setiap 6 bulan) untuk memastikan kendaraan, terutama angkutan umum dan kendaraan niaga, memenuhi standar keselamatan dan

kelayakan jalan. Prosedur uji KIR mencakup pendaftaran, verifikasi dokumen, pemeriksaan kondisi teknis kendaraan, hingga penerbitan sertifikat lulus uji. Meskipun ada regulasi dan fasilitas, tantangan dalam memastikan seluruh kendaraan yang wajib KIR benar-benar menjalani pengujian secara rutin tetap ada, terutama terkait dengan kesadaran dan kepatuhan pemilik kendaraan.

Data mengenai persentase kendaraan yang telah lulus KIR atau persentase angkutan darat yang beroperasi secara resmi dengan izin dan KIR yang valid masih memerlukan studi lebih lanjut. Namun, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Simeulue terus dilakukan untuk menata sektor transportasi darat, meskipun dihadapkan pada dinamika kepemilikan kendaraan pribadi yang tinggi dan tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi kelaikan jalan.

5. Pemasangan Rambu-rambu

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Simeulue merupakan bagian dari upaya penataan dan pengamanan lalu lintas yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan. Rambu-rambu tersebut mencakup berbagai jenis, seperti rambu peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk, yang dipasang di titik-titik strategis sesuai dengan karakteristik wilayah, volume kendaraan, serta potensi risiko lalu lintas.

Di daerah kepulauan seperti Simeulue, pemasangan rambu tidak hanya penting di kawasan perkotaan, tetapi juga di jalur-jalur pedesaan, kawasan sekolah, persimpangan rawan kecelakaan, serta daerah dengan kontur jalan menanjak atau menurun. Pemasangan yang tepat dan merata akan membantu meningkatkan kesadaran pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas, sekaligus mendukung efisiensi mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarwilayah.

6. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Simeulue adalah indikator yang mengukur seberapa seimbang ketersediaan infrastruktur jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang beroperasi di wilayah tersebut. Rasio ini dihitung dengan membagi total panjang jaringan jalan (dalam kilometer) dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa panjang jalan relatif memadai terhadap jumlah kendaraan, sementara rasio yang rendah bisa mengindikasikan potensi kepadatan lalu lintas, keausan infrastruktur lebih cepat, dan risiko kemacetan, meskipun dalam konteks wilayah seperti Simeulue, permasalahan utama lebih cenderung pada aksesibilitas dan keterjangkauan jaringan jalan antarwilayah.

Hal ini menjadi penting karena Simeulue merupakan daerah kepulauan yang memerlukan jaringan jalan fungsional untuk menghubungkan pusat-pusat

permukiman, fasilitas layanan publik, serta pelabuhan. Dengan mempertimbang kan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kebutuhan pengembangan infrastruktur secara lebih objektif, termasuk penambahan jalan baru, peningkatan kualitas jalan yang ada, atau regulasi terhadap pertumbuhan kendaraan.

Tabel 2.61. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Panjang Jalan	767,58	767,58	778,79	778,79	795,28
Total Jumlah Kendaraan	16.560	17.164	18.182	19.031	20.200
Rasio Jumlah Kendaraan Per Panjang Jalan	21,57	22,36	23,34	24,43	25,39
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten SImeulue, Tahun 2025

Perkembangan infrastruktur jalan dan jumlah kendaraan di Kabupaten Simeulue dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Total panjang jalan meningkat dari 767,58 km pada tahun 2020 menjadi 795,28 km pada tahun 2024. Di sisi lain, jumlah kendaraan juga mengalami pertumbuhan signifikan, dari 16.560 unit pada tahun 2020 menjadi 20.200 unit pada tahun 2024. Kenaikan jumlah kendaraan lebih cepat dibanding pertumbuhan panjang jalan tercermin pada rasio jumlah kendaraan per panjang jalan yang meningkat dari 21,57% menjadi 25,39% dalam periode tersebut.

Peningkatan rasio tersebut mengindikasikan bertambahnya kepadatan kendaraan di jaringan jalan yang ada. Meskipun infrastruktur jalan mengalami perbaikan dan perluasan, pertumbuhan kendaraan yang lebih pesat dapat menyebabkan tekanan terhadap kapasitas jalan, khususnya pada jam-jam sibuk atau di pusat aktivitas masyarakat. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang terus menurun dari 0,05% pada tahun 2020 menjadi 0,03% pada tahun 2024 memperkuat indikasi tersebut. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan transportasi dan perencanaan infrastruktur yang berkelanjutan.

7. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Penggunaan angkutan umum di Kabupaten Simeulue memperlihatkan dinamika yang unik. Angkutan darat lokal, seperti minibus, mengalami penurunan

jumlah penumpang signifikan karena meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi. Hal ini membuat banyak operator mengurangi armada atau bahkan berhenti beroperasi, sehingga layanan angkutan umum darat kini lebih terfokus pada rute utama dan sering mengangkut barang. Meski begitu, pemerintah berupaya mempertahankan layanan di rute perintis dengan subsidi bus DAMRI.

Sebaliknya, angkutan laut dan udara sangat vital bagi konektivitas Simeulue dengan daratan Aceh. Moda transportasi ini selalu menunjukkan volume penumpang yang tinggi, terutama saat momen-momen puncak seperti arus mudik Lebaran. Ini menegaskan peran krusial angkutan laut dan udara sebagai penghubung utama, sementara angkutan darat lokal menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan perilaku masyarakat.

8. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada infrastruktur transportasi, khususnya dermaga, bandara, dan terminal, untuk mendukung pergerakan orang dan distribusi barang. Pelabuhan Penyeberangan Sinabang menjadi jalur vital dalam mobilitas laut, melayani ribuan penumpang setiap tahunnya, terutama saat momen puncak seperti libur panjang dan hari besar keagamaan. Pelabuhan ini tidak hanya menjadi titik keberangkatan dan kedatangan utama, tetapi juga memegang peran penting dalam mendukung distribusi logistik dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat di pulau-pulau sekitar.

Di sektor udara, Bandar Udara Lasikin (LKI) menjadi satu-satunya pintu masuk dan keluar Simeulue melalui jalur udara. Bandara ini mencatat angka pergerakan penumpang yang cukup signifikan dan menjadi solusi utama dalam konektivitas cepat, terutama untuk perjalanan yang bersifat mendesak atau penting, seperti urusan kesehatan, pendidikan, maupun pemerintahan. Selain pergerakan orang, bandara ini juga mendukung pengiriman barang dan kargo, menegaskan perannya sebagai salah satu infrastruktur strategis dalam menunjang dinamika ekonomi dan pelayanan publik di Simeulue.

Sementara itu, Terminal Sinabang melayani moda transportasi darat antarwilayah di dalam pulau. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan signifikan jumlah penumpang angkutan darat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi, yang membuat masyarakat lebih memilih moda transportasi sendiri dibanding angkutan umum. Meskipun demikian, transportasi laut dan udara tetap menjadi tulang punggung utama mobilitas keluar-masuk Simeulue, baik untuk kebutuhan logistik maupun pergerakan penduduk, dan menjadi komponen krusial dalam menjaga konektivitas serta keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi daerah.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal sering disebut sebagai investasi di sebuah daerah atau wilayah tertentu. Investasi Daerah adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing di suatu wilayah daerah spesifik.

Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul 18 diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*. Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Simeulue tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62. Nilai Investasi Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)
Nilai Investasi PMA/ PMDN	9.976.625.368	59.749.946.009	181.289.223.765	152.968.828.559	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Simeulue, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa nilai investasi dari tahun 2019- 2023 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 nilai investasi sebesar Rp. 7.976.625.368,- sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 9.976.625.368,-. dan tahun 2021 meningkat tajam sebesar 59.749.946.009,-. Pada tahun 2022 peningkatan yang sangat signifikan kembali terjadi yaitu sebesar Rp. 181.289.223.765,-, namun pada tahun 2023 turun menjadi Rp. 152.968.828.559. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan investasi, kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Peningkatan nilai investasi juga dipengaruhi oleh kemudahan dalam pelayanan perizinan, sehingga investor tidak enggan dalam berinvestasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan investasi dan meningkatkan pelayanan perizinan saat ini masih terus berupaya untuk mengoptimalkan layanan perizinan. Perkembangan pelayanan perizinan di kabupaten Simeulue Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63. Perkembangan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah izin yang diterbitkan	Izin	29	451	849	1672	
2	Jumlah pengajuan izin	Izin	29	451	849	1672	
3	Jumlah aduan yang terselesaikan	Aduan	3	9	6	14	
4	Jumlah aduan yang masuk	Aduan	11	9	7	15	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Simeulue, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, periode tahun 2019-2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan izin sebanyak 1.672 izin dengan jumlah pengajuan sebanyak 1.672 Izin. Dalam pelayanannya sering muncul aduan masyarakat terhadap aktifitas perusahaan yang telah dikeluarkan izinnya, baik aduan langsung maupun aduan melalui media elektronik yang disediakan. Jumlah aduan yang dapat diselesaikan sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 14 aduan dari jumlah aduan yang masuk sebanyak 15 Aduan.

B. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah indikator penting dalam perekonomian daerah yang menggambarkan besarnya investasi pada aset tetap, seperti bangunan, infrastruktur, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam proses

produksi. Pertumbuhan PMTB menunjukkan tingkat penambahan kapasitas ekonomi melalui investasi produktif yang dapat mendukung pembangunan jangka panjang.

Di Kabupaten Simeulue, pertumbuhan PMTB sepanjang periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, PMTB tumbuh 4,03%, namun melambat signifikan menjadi hanya 0,59% di tahun 2021. Kondisi ini semakin melemah dengan terjadinya kontraksi pada 2022 sebesar -0,21%, yang menandakan adanya penurunan investasi. Pemulihan cukup kuat terjadi pada 2023 dengan pertumbuhan mencapai 5,12%, tetapi tren positif ini kembali melandai pada 2024 dengan pertumbuhan hanya 1,44%.

Pola ini menggambarkan dinamika investasi di Simeulue yang masih belum stabil. Penurunan pada 2021–2022 bisa dikaitkan dengan tertundanya proyek-proyek pembangunan atau melemahnya minat investasi, sementara lonjakan pada 2023 menunjukkan adanya realisasi proyek yang sempat tertunda. Namun, melandainya pertumbuhan kembali di 2024 menandakan bahwa pipeline investasi baru masih terbatas. Kondisi ini memberi pesan penting bahwa Simeulue perlu menjaga kesinambungan investasi melalui penguatan iklim usaha, percepatan realisasi proyek infrastruktur, kemudahan perizinan, serta penyediaan pembiayaan bagi sektor-sektor produktif. Dengan langkah tersebut, pertumbuhan PMTB dapat lebih stabil dan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2.64. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	persen	4,03	0,59	-0,21	5,12	1,44

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan produktivitas masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi. Adapun indikator terkait antara lain, Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak, Persentase Desa Mandiri, dan indikator lain.

A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

1. Jalan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas

masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan peritungan rasio pada bagian ini. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan yang merupakan jalan nasional (tidak termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Jalan menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Kriteria yang digunakan untuk pengelompokan jalan sebagai berikut:

1) Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
2) Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
3) Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
4) Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota;
5) Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sistem jaringan jalan yang ada di Kabupaten Simeulue, berdasarkan status jalan, meliputi:

1) Jaringan Jalan Nasional sepanjang 76,39 km (Kepmen PUPR No. 1688/KPTS/M/2022 tanggal 2 Desember 2022) tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional. Panjang Jaringan Jalan Nasional di Kabupaten Simeulue ada 3 Ruas yaitu :
    a) Ruas 054.1 Sinabang – Lasikin sepanjang 11,87 Km
    b) Ruas 054.2 JLN. Elak Bandara Lasikin sepanjang 1,05 Km
    c) Ruas 054.3 Lasikin – Inor – Nasreuhe sepanjang 63, 47 Km
2) Jaringan Jalan Provinsi Sepanjang 238,55 Km (Kep.Gub Aceh No. 600.1.8/603/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Status Ruas

Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Aceh, segabai berikut :

a) Ruas 056.11 Jln. Sinabang – Sibigo sepanjang 102,35 Km
b) Ruas 056.12 Jln. Nasreuhe – Lewak – Sibigo sepanajang 136,20 Km

3) Jaringan Jalan Kabupaten Sepanjang 480,34 Km terdiri atas 196 Ruas (Kep. Bupati Simeulue No. 620/265/2016) tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Dalam Kabupaten Simeulue tanggal 25 Mei 2016.

2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta memudahkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jalan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Simeulue yang memiliki karakter geografis tersendiri. Oleh karena itu, pemenuhan standar kelayakan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Berikut disajikan data panjang jalan menurut status kewenangan (nasional, provinsi, dan kabupaten), disertai kondisi fisik jalan hingga tahun 2024 yang menggambarkan tingkat kemantapan infrastruktur jalan di Kabupaten Simeulue:

Tabel 2.65. Proporsi Panjang Jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Tahun 2024

No	Ruas Jalan	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan (Km)		Proporsi Mantap
			Mantap	Belum Mantap	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Jalan Nasional	76,39	76,39	-	100
2	Jalan Provinsi	238,55	173,24	65,31	72
3	Jalan Kabupaten	480,34	228,57	251,86	47

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa Jalan Nasional sepanjang 76,39 km telah seluruhnya dalam kondisi mantap (100%), yang menandakan perhatian tinggi dari pemerintah pusat terhadap jalur strategis dan konektivitas antarpulau. Jalan Provinsi memiliki total panjang 238,55 km, dengan 173,24 km (72%) tergolong mantap, dan sisanya masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

Sementara itu, tantangan terbesar terdapat pada Jalan Kabupaten. Dengan total panjang mencapai 480,34 km—yang merupakan jaringan jalan terpanjang—hanya 47% atau 228,57 km yang telah mantap. Sebanyak 251,86 km (53%) lainnya masih belum dalam kondisi baik. Tingginya proporsi jalan belum mantap di tingkat kabupaten menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan lokal. Upaya ini penting untuk membuka keterisolasian desa-desa, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, dan mendukung pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Kabupaten Simeulue.

3. Rasio Jumlah Penduduk dengan Panjang Jalan

Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan merupakan indikator penting dalam menilai kecukupan infrastruktur jalan suatu wilayah. Rasio ini dapat menunjukkan seberapa efektif jalan dapat melayani kebutuhan mobilitas penduduk. Dengan rasio jumlah penduduk yang rendah per kilometer jalan, masyarakat dapat menikmati kemudahan aksesibilitas dan mobilitas yang lebih baik. Hal ini juga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya transportasi, sehingga masyarakat dapat lebih produktif dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, rasio jumlah penduduk yang tinggi per kilometer jalan dapat menunjukkan bahwa infrastruktur jalan tidak cukup untuk melayani kebutuhan penduduk. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan, meningkatkan waktu tempuh, dan mengurangi kualitas hidup masyaraka. Oleh karena itu, pemerintah dan stakeholder terkait perlu memperhatikan rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur jalan. Dengan demikian, infrastruktur jalan dapat melayani kebutuhan penduduk dengan efektif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan tahun tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.66. Rasio Jumlah Penduduk per Panjang Jalan Tahun 2020-2024

Tahun	Panjang Jalan (km)				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio (Jiwa/km)
	Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Total Panjang Jalan		
2020	65,18	222,06	480,34	767,58	92.865	121
2021	65,18	222,06	480,34	767,58	93.762	122
2022	76,39	222,06	480,34	778,79	94.876	122
2023	76,39	222,06	480,34	778,79	97.118	125
2024	76,39	238,55	480,34	795,28	98.633	124

Sumber : BPS dan Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan merupakan indikator penting dalam menilai kecukupan infrastruktur jalan suatu wilayah. Berdasarkan tabel di atas, rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan adalah 121, yang berarti bahwa terdapat 121 penduduk per kilometer jalan. Rasio ini meningkat menjadi 122 pada tahun 2021 dan 2022, dan kemudian meningkat lagi menjadi 125 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, rasio ini menurun menjadi 124.

Peningkatan rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan menunjukkan bahwa jumlah penduduk meningkat lebih cepat daripada panjang jalan. Hal ini dapat menyebabkan tekanan pada infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kemacetan, kecelakaan, dan masalah lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah dan stakeholder terkait perlu memperhatikan rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan dan melakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur jalan agar dapat melayani kebutuhan penduduk yang meningkat. Dengan demikian, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai international roughness index/IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai road condition index/RCI). Sedangkan menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantap meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Tabel 2.97.

Tabel 2.67. Rasio Kemantapan Jalan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan (Km)		Proporsi Mantap
			Mantap	Belum Mantap	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	2020	480,34	164,28	316,06	34,2
2	2021	480,34	268,75	211,59	55,95
3	2022	480,34	249,97	230,37	52,04
4	2023	480,34	238,78	241,56	49,71
5	2024	480,34	228,57	251,86	47,58

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Panjang jalan total di wilayah ini adalah 480,34 km dan tidak berubah sepanjang periode 5 tahun. Pada tahun 2020, kondisi jalan yang mantap adalah 164,28 km (34,2% dari total panjang jalan), sedangkan kondisi jalan yang belum mantap adalah 316,06 km. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan pada kondisi jalan yang mantap, yaitu menjadi 268,75 km (55,95% dari total panjang jalan). Kondisi jalan yang belum mantap menurun menjadi 211,59 km.

Namun, pada tahun-tahun berikutnya (2022-2024), kondisi jalan yang mantap mengalami penurunan, sedangkan kondisi jalan yang belum mantap mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya minimnya penanganan pemeliharaan jalan tersebut. Pada tahun 2024, kondisi jalan yang mantap adalah 228,57 km (47,58% dari total panjang jalan), sedangkan kondisi jalan yang belum mantap adalah 251,86 km. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kondisi jalan di wilayah ini mengalami fluktuasi sepanjang periode 5 tahun, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya.

B. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum dan Sanitasi

Akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi merupakan bagian penting dalam pemenuhan pelayanan dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Simeulue, pemenuhan akses ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target nasional pembangunan berkelanjutan.

Air minum yang layak didefinisikan sebagai air dari sumber terlindung dan memenuhi persyaratan kesehatan, baik melalui proses pengolahan maupun tidak, serta dapat langsung dikonsumsi. Sumber-sumber air layak mencakup air ledeng, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH), sumur bor atau pompa, serta mata air dan sumur terlindung. Air dari sumber seperti air kemasan, isi ulang, penjual keliling, tangki, serta air dari sumur tidak terlindung dan air permukaan tidak tergolong sebagai air minum layak.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup penggunaan kloset berleher angsa dan pembuangan akhir berupa septic tank atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD), yang digunakan secara individu atau terbatas bersama oleh beberapa rumah tangga. Berdasarkan data SIMSPAM Periode I Tahun 2025, cakupan akses air minum layak di Kabupaten Simeulue mencapai 34,01% atau sebanyak 32.658 jiwa dari total penduduk sebanyak 96.031 jiwa. Rinciannya, sebanyak 18.590 jiwa (19,36%) memiliki akses terhadap sumber air minum layak secara langsung, sedangkan 14.068 jiwa (14,65%) memperoleh akses melalui bantuan pemerintah atau pihak lain.

Kabupaten Simeulue memiliki 44 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), namun hanya 15 unit yang berfungsi dan 29 unit dilaporkan tidak berfungsi. Kapasitas air baku mencapai 542,45 liter per detik, sementara kapasitas yang benar-benar digunakan hanya 152,45 liter per detik. Dari sisi layanan teknis, kapasitas terpasang sebesar 142,45 lpd, kapasitas produksi 76,81 lpd, kapasitas distribusi 66,55 lpd, dan volume air terjual sebesar 43,66 lpd. Jumlah Sambungan Rumah (SR) aktif yang tercatat adalah 4.716 unit, sementara HU dan KU masih tercatat 0.

Dari total 138 desa/kelurahan di Kabupaten Simeulue, tercatat 108 desa/kelurahan telah mendapatkan layanan SPAM, sementara 30 desa/kelurahan lainnya belum terlayani. Desa-desa yang belum terlayani antara lain: Nancawa, Miteum, Abail, Ujung Tinggi, Lubuk Baik, Lhok Dalam, Lhok Bikhao, Serafon, Lhok Pauh, Lamerem, Lewak, Pulau Siumat, Labuah, Lasikin, Sua Sua, Batu Batu, Sibuluh, Borengan, Simpang Abail, Lanting, Matanurung, Situbuk, Amarabu, Kuta Inang, Kuta Padang, Latak Ayah, Ujung Padang, Langi, Kahat, dan Amabaan.

Capaian ini menunjukkan bahwa Simeulue masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan akses air minum layak secara merata. Dibutuhkan upaya lebih lanjut melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengelolaan, serta dukungan lintas sektor agar target pelayanan dasar dapat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten.

Persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi layak di Kabupaten Simeulue dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif meningkat meskipun fluktuatif. Secara rinci, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Simeulue selama periode 2020–2024 adalah sebagai berikut: 66,51% pada tahun 2020; 71,56% pada tahun 2021; 70,21% pada tahun 2022; 72,67% pada tahun 2023; dan 76,51% pada tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan infrastruktur sanitasi serta tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Meskipun demikian, diperlukan akselerasi program sanitasi terutama di wilayah pedesaan dan terpencil agar target layanan sanitasi layak yang merata dapat tercapai di Kabupaten Simeulue.

C. Persentase Desa mandiri (Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong)

Jumlah desa mandiri di Kabupaten Simeulue menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari total 138 desa, pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat desa yang berstatus mandiri (0 desa). Pada tahun 2022 dan 2023, jumlah desa mandiri mulai muncul sebanyak 2 desa atau sekitar 1,45 persen. Selanjutnya, pada tahun 2024 meningkat menjadi 4 desa atau sekitar 2,90 persen.

Tabel 2.68. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Sangat Tertinggal	Desa	1	0	0	0	0
2	Tertinggal	Desa	44	50	38	31	26
3	Berkembang	Desa	90	85	96	95	90
4	Maju	Desa	3	3	2	10	18
5	Mandiri	Desa	0	0	2	2	4

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

D. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja fasilitas wilayah dan infrastruktur di Kabupaten Simeulue dilakukan untuk menilai sejauh mana sarana dan prasarana yang tersedia mampu mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan. Evaluasi ini mencakup berbagai indikator penting, antara lain rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor, jumlah orang dan barang yang terangkut oleh angkutan umum, serta volume pergerakan orang dan barang melalui dermaga, bandara, dan terminal setiap tahunnya. Selain itu, tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi indikator utama dalam menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang. Luas wilayah produktif dan kawasan industri juga menjadi perhatian dalam menilai potensi ekonomi daerah.

Di sisi lain, wilayah yang terdampak bencana seperti banjir dan kekeringan turut dianalisis untuk melihat kerentanannya terhadap perubahan iklim dan kondisi geografis. Indikator lain yang diamati meliputi luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah lembaga perbankan dan asuransi beserta cabangnya, serta fasilitas pendukung pariwisata seperti restoran dan penginapan berdasarkan jenis dan kelasnya. Akses terhadap layanan dasar masyarakat pun menjadi fokus, yang diukur melalui persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang telah teraliri listrik, serta persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sarana komunikasi seperti telepon atau ponsel. Seluruh indikator ini digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi ketersediaan, pemerataan, dan kualitas infrastruktur di Kabupaten Simeulue, yang pada akhirnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada pelayanan publik.

E. Penataan Ruang

Penataan ruang Kabupaten Simeulue merupakan kerangka utama dalam mengarahkan pembangunan wilayah yang tertib, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis yang khas serta kerentanan tinggi terhadap bencana, kebijakan penataan ruang Simeulue difokuskan pada perlindungan kawasan ekologi penting, penguatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan kegiatan produktif yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2045 menetapkan struktur ruang dan pola ruang yang menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan ruang. Struktur ruang diarahkan untuk membentuk sistem pusat pelayanan dan jaringan transportasi yang efektif, sedangkan pola ruang dibagi ke dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya yang disusun secara seimbang.

1. Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRW

Berdasarkan RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2045, pola ruang wilayah terbagi menjadi dua komponen utama, yakni kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pemisahan ini dirancang untuk menjamin keseimbangan ekologis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Setiap bentuk pembangunan yang dirancang di Simeulue wajib mengacu pada rencana ruang ini agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi, pencemaran lingkungan, atau konflik pemanfaatan lahan. RTRW juga menjadi landasan dalam penerbitan perizinan, pemetaan investasi, serta pengembangan wilayah baru yang strategis secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Kawasan Lindung		Luas (ha)
Badan Air		1332,14
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	57.533,82
Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan sungai/Pantai/ danau	2.045,85
Kawasan Konservasi	Kawasan Pelestarian Alam, Tahura	917.92
Kawasan Ekosistem Mangrove		3843,5
Jumlah		**64.755,31**

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Kabupaten Simeulue mengalokasikan kawasan lindung seluas 64.755,31 hektare yang dibagi dalam lima klasifikasi utama, masing-masing memiliki peran ekologis yang signifikan. Kawasan ini tidak hanya menjadi penyangga sistem kehidupan, tetapi juga pelindung alami dari ancaman bencana geologis dan hidrometeorologis.

a) Badan Air dengan luas 1.332,14 ha berperan sebagai sumber air permukaan dan habitat perairan tawar, menjadi bagian penting dari siklus hidrologi dan penyuplai kebutuhan air domestik maupun irigasi pertanian.

b) Hutan Lindung mencapai 57.533,82 ha, mencerminkan upaya perlindungan hulu sungai, pengendali iklim mikro, serta tempat bernaungnya berbagai spesies endemik.

c) Sempadan Sungai, Pantai, dan Danau seluas 2.045,85 ha, menjadi garis pertahanan alami terhadap risiko abrasi, erosi, dan banjir, sekaligus zona evakuasi saat terjadi tsunami.

d) Tahura dan Kawasan Pelestarian Alam mencakup 917,92 ha, memiliki fungsi multifungsi sebagai kawasan konservasi dan edukasi lingkungan hidup.

e) Ekosistem Mangrove seluas 3.843,50 ha, yang tersebar di pesisir barat dan selatan, menjadi benteng pertahanan alami dari gelombang tinggi dan intrusi air laut, serta berperan sebagai tempat pembibitan ikan dan kerang.

Penetapan kawasan ini mencerminkan kebijakan tata ruang yang pro-lingkungan serta mendukung target pembangunan rendah karbon (low carbon development). Keberadaan kawasan lindung juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam Simeulue.

Tabel 2.70. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Kawasan Budidaya		Luas (ha)
Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	12.770,76
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	10.439,33
	Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi	10.660,53
Kawasan Pertanian	Kawasan Tanaman Pangan	8768,95
	Kawasan Hortikultura	22,91
	Kawasan Perkebunan	4.926,85
	Kawasan Peternakan	2.156,81
	Kawasan Perikanan Budidaya	3,03

Kawasan Budidaya		Luas (ha)
	Kawasan Perikanan Tangkap	46,65
Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pertambangan Batuan	491,07
Kawasan Peruntukan Industri		99,68
Kawasan Pariwisaata		3931,85
Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perkotaan	484,12
	Kawasan Permukiman Perdesaan	2685,24
Kawasan Pertahanan dan Keamanan		32,2
Jumlah		**57.519,98**

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Kawasan budidaya Simeulue yang mencakup 57.519,98 hektare diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif dengan tetap mengindahkan aspek keberlanjutan dan tata kelola ruang yang bijaksana. Kawasan ini terbagi menjadi:

a) Hutan Produksi dengan tiga tipologi, yaitu terbatas (12.770,76 ha), tetap (10.439,33 ha), dan konversi (10.660,53 ha), yang memberikan kontribusi bagi bahan baku lokal dan ekonomi masyarakat adat.

b) Pertanian, mencakup lahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan total luas lebih dari 15.000 ha, menjadikan Simeulue tetap mandiri pangan dan berpotensi ekspor komoditas unggulan seperti pala dan kelapa.

c) Perikanan dengan luas tangkap 46,65 ha dan budidaya 3,03 ha, sangat strategis mengingat Simeulue adalah daerah kepulauan yang berbasis ekonomi kelautan.

d) Pertambangan dan Industri masing-masing seluas 491,07 ha dan 99,68 ha, diatur ketat agar tidak merusak kawasan lindung dan sumber daya air.

e) Pariwisata seluas 3.931,85 ha yang tersebar di kawasan bahari dan daratan, dikembangkan dengan prinsip konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

f) Permukiman terdiri dari kawasan perkotaan (484,12 ha) dan perdesaan (2.685,24 ha) dengan pola pengembangan adaptif terhadap risiko bencana.

g) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dialokasikan secara fungsional di titik-titik strategis seluas 32,20 ha.

Ruang budidaya ini difungsikan untuk mendukung penghidupan masyarakat secara berkelanjutan, serta memberikan ruang bagi investasi yang ramah lingkungan dan berwawasan tata ruang.

2. Ruang Terbuka Hijau

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Simeulue yang sehat, lestari, dan tangguh terhadap perubahan iklim, pemerintah daerah mendorong pengembangan Ruag Terbuka Hijau (RTH) secara terencana, baik di kawasan permukiman maupun di pusat-pusat pelayanan publik. Strategi ini dilakukan melalui penambahan taman kota, pelestarian kawasan konservasi mangrove, serta pembangunan jalur hijau di sepanjang jalur utama dan pesisir.

Tabel 2.71. Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Ruang Terbuka Hijau		Luas (ha)
Taman Kota	Taman Kota Sinabang	1,04
	Taman Impian Sinabang	1,41
Jalur Hijau Jalan	Jalur Dua	2,98
	Kayu Arang-Lasikin	1,94
	Sp. BSM-Sp Dinsos	0,17
	Jalur Sp. Kemuning – Sp. Waserda	1,09
	Jalur Sp. Waserda-Lugu	1,13
	Jalur Kolok Pelabuhan Ferry	2,42
RTH Pemakaman	Makam Pahlawan	0,09
Jumlah		**12,27**

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045

Berdasarkan RTRW Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2045, luas RTH yang telah teridentifikasi mencapai 12,27 hektare, meliputi:

a) Taman Kota Sinabang (1,04 Ha) dan Taman Impian Sinabang (1,41 Ha), yang berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan rekreasi warga;
b) Jalur hijau jalan sepanjang beberapa koridor utama seperti Jalur Dua, Kayu Arang–Lasikin, Sp. BSM–Dinsos, Sp. Kemuning–Sp. Waserda, Sp. Waserda–Lugu, dan Kolok–Pelabuhan Ferry, dengan total luas sekitar 10,73 Ha;
c) RTH Pemakaman (Makam Pahlawan) seluas 0,09 Ha.

Pembangunan dan pelestarian RTH di Simeulue tidak hanya berperan sebagai elemen estetika dan ruang rekreasi, tetapi juga sebagai sistem pendukung lingkungan yang berfungsi dalam menyerap karbon, menstabilkan iklim mikro, menjaga kualitas udara dan air, serta menjadi lokasi evakuasi bencana. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menetapkan bahwa paling sedikit 30% dari kawasan perkotaan harus dialokasikan untuk ruang terbuka hijau, baik publik maupun privat. Dalam jangka menengah, Simeulue akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan dan pengembangan RTH sebagai bagian integral dari sistem tata ruang yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berpihak pada masyarakat.

F. Pengairan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pengelolaan sumber daya air merupakan proses menyeluruh dan berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi guna menjamin ketersediaan air secara kuantitatif dan kualitatif bagi generasi kini dan mendatang. Pengelolaan ini mencakup tiga aspek utama yang saling terintegrasi, yaitu konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi bertujuan menjaga keberadaan dan fungsi air melalui perlindungan sumber air, efisiensi penggunaan, serta pengendalian pencemaran. Sementara itu, pendayagunaan diarahkan untuk pemanfaatan air secara adil dan berkelanjutan dengan prioritas pada kebutuhan dasar masyarakat, serta mendukung sektor pertanian, energi, dan industri melalui infrastruktur dan pengelolaan yang efisien.

Pengendalian daya rusak air merupakan langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif air seperti banjir, kekeringan, dan erosi, melalui pembangunan infrastruktur pengendali, rehabilitasi lahan kritis, serta respons tanggap darurat. Ketiga aspek tersebut dilaksanakan secara terpadu, berbasis data, dan melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan, guna memastikan keberlanjutan fungsi sumber daya air dalam mendukung ketahanan air, pangan, energi, serta menjaga kelestarian ekosistem dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

1. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi merupakan sistem infrastruktur yang terdiri atas bangunan saluran dan bangunan pelengkap lainnya yang berfungsi sebagai satu kesatuan untuk mendukung proses penyediaan, pembagian, pemberian, pemanfaatan, dan pembuangan air irigasi secara efektif. Secara operasional, jaringan irigasi diklasifikasikan menjadi tiga tingkat, yaitu jaringan primer, sekunder, dan tersier, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam pendistribusian air dari sumber hingga ke lahan pertanian. Sementara itu, berdasarkan kewenangan

pengelolaannya, jaringan irigasi dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu jaringan irigasi di bawah kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, yang pengelolaannya ditentukan oleh cakupan wilayah dan skala manfaat sistem irigasi tersebut.

a) Luas dan Jenis Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

Penetapan status Daerah Irigasi (DI), yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota, telah diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam menetapkan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan kriteria luas layanan, lokasi lintas wilayah administrasi, dan tingkat kepentingan strategis. Penetapan yang tepat sangat penting untuk mendukung pengelolaan irigasi yang efisien, berkelanjutan, serta terkoordinasi antar level pemerintahan.

Di Kabupaten Simeulue, luas total Daerah Irigasi mencapai 5.343 hektare, yang tersebar di 52 lokasi Daerah Irigasi. Setiap DI memiliki karakteristik tersendiri baik dari sisi luas layanan, sumber air, maupun kondisi infrastruktur, sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan yang sesuai dengan status dan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Simeulue bertanggung jawab atas sebagian besar jaringan irigasi skala kecil dan menengah, sedangkan jika terdapat irigasi yang mencakup wilayah strategis atau lintas kabupaten, maka pengelolaannya dapat berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi atau pusat. Dengan pengelolaan yang terarah dan berbasis regulasi, sistem irigasi di Simeulue diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian, ketahanan pangan daerah, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi tidak semata-mata diukur dari keberadaan fisik infrastruktur, melainkan dari sejauh mana jaringan tersebut mampu mengalirkan air secara efisien hingga ke areal persawahan sebagai wilayah pelayanannya. Efektivitas ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan fungsi irigasi serta mendukung kelestarian sistem pertanian di daerah tersebut. Namun, pada beberapa Daerah Irigasi, khususnya irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi saat ini cukup memprihatinkan. Penurunan fungsi layanan air irigasi banyak terjadi akibat rusaknya saluran pembawa, tidak berfungsinya pintu-pintu air, serta kerusakan bangunan ukur yang seharusnya mendukung pengaturan distribusi air.

Kondisi infrastruktur irigasi yang menurun ini berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan efisiensi penggunaan air. Kerusakan pada jaringan irigasi permukaan serta bangunan-bangunan pendukungnya perlu segera mendapatkan perhatian melalui upaya rehabilitasi dan pemeliharaan secara berkala. Tanpa adanya

perbaikan yang tepat dan berkelanjutan, maka tujuan utama dari pembangunan jaringan irigasi yaitu menjamin distribusi air secara merata dan berkelanjutan bagi kebutuhan pertanian akan sulit tercapai.

Tabel 2.72. Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan Tahun 2024

Kewenangan	Luas		Kuantitas (Km)	Kondisi Saluran					
	Baku	Fungsional		Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat	
	(Ha)	(Ha)		(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)
Kabupaten					42,10				

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Tabel 2.73. Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2024

Kewenangan	Luas		Kuantitas (Unit)	Kondisi Bangunan			
	Baku	Fungsional		Baik		Rusak	
	(Ha)	(Ha)		(Unit)	(%)	(Unit)	(%)
Kabupaten				24	42,10		

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

b) Persentase Irigasi Kabupaten Simeulue Dalam Kondisi Baik

Persentase Irigasi Kabupaten Simeulue dalam kondisi baik memiliki Indikator untuk mengukur kinerja suatu Daerah Irigasi yang selanjutnya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah Persentase Irigasi Kabupaten Simeulue Dalam Kondisi Baik. Melalui serangkaian kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 yang meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi, Persentase Irigasi Kabupaten Simeulue Dalam Kondisi Baik mencapai 42,10 persen.

Tabel 2.74. Hasil Capaian Persentase Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten Simeulue dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Irigasi Kabupaten Simeulue Dalam Kondisi Baik	57,90	68,42	80,70	84,21	42,10	42,10

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Tahun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, terdapat 57 (lima puluh tujuh) Daerah Irigasi di Kabupaten Simeulue yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Pada tahun 2023, jumlah irigasi yang berada dalam kondisi baik sebanyak 24unit atau sekitar 42,10 persen, sedangkan 33unit atau 57,90 persen berada dalam kondisi rusak. Penurunan kinerja jaringan irigasi ini disebabkan oleh terhentinya pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Irigasi sejak tahun 2021 di Kabupaten Simeulue.

Namun demikian, pada tahun 2025, Kabupaten Simeulue kembali ditetapkan sebagai lokasi prioritas pembangunan melalui alokasi DAK Fisik Sub Bidang Irigasi. Dengan kembalinya dukungan pendanaan tersebut, diharapkan proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik akan meningkat secara signifikan, sehingga menunjang produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan di tingkat daerah.

2. Rawa

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, rawa didefinisikan sebagai wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, yang tergenang secara terus-menerus atau musiman. Rawa terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, ditumbuhi vegetasi, serta merupakan bagian dari suatu ekosistem. Dalam konteks pengembangan wilayah, pemanfaatan rawa di Kabupaten Simeulue diarahkan berdasarkan karakteristik dan lokasi geografisnya. Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk kegiatan budidaya perikanan seperti tambak, sedangkan rawa di wilayah Pantai Barat Selatan lebih diarahkan untuk pengembangan lahan pertanian.

Namun demikian, potensi rawa tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah masih terbatasnya infrastruktur jaringan drainase yang memadai, yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan budidaya maupun pertanian. Pengembangan rawa sebagai lahan produktif harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Simeulue yang telah ditetapkan. Hal ini penting mengingat terdapat beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka margasatwa, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak boleh dialih fungsikan menjadi kawasan budidaya.

Sementara itu, untuk rawa yang berada di luar kawasan lindung dan suaka margasatwa, pemanfaatannya harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini bertujuan agar pengelolaan ruang dilakukan secara terpadu dan seimbang, serta tetap menjaga prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

3. Pantai

Berdasarkan data sepanjang tahun 2017 hingga 2024, panjang pantai dalam kondisi kritis di Kabupaten Simeulue tercatat tetap sebesar 10,54 kilometer setiap tahunnya. Angka ini menunjukkan bahwa selama delapan tahun terakhir tidak terjadi perubahan signifikan dalam panjang pantai yang mengalami kerusakan atau erosi berat. Meskipun demikian, stabilnya angka tersebut tidak serta-merta mengindikasikan perbaikan kondisi, melainkan dapat mencerminkan belum adanya intervensi besar atau perubahan signifikan dalam penanganan kawasan pesisir kritis di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan dan perlindungan pantai yang berkelanjutan guna mencegah perluasan kerusakan di masa mendatang.

Tabel 2.75. Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (Km)

Kabupaten	Panjang Pantai dalam Kondisi Kritis (km)							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54	10.54

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, Tahun 2025

4. Sungai

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS). Dari jumlah tersebut, 3 (tiga) Wilayah Sungai ditetapkan sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional dan 1 (satu) Wilayah Sungai Lintas Provinsi, yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, terdapat 4 (empat) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Pemerintah Aceh, serta 1 (satu) Wilayah Sungai Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Simeulue hanya terdiri dari 5 kecamatan dengan ibu kota di Sinabang, yang terletak di Kecamatan Simeulue Timur. Seiring perkembangan waktu, wilayah administratif kabupaten ini mengalami pemekaran hingga menjadi 10 kecamatan dengan total 138 desa pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 78,51% atau sebanyak 106 desa merupakan desa pesisir, yang sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, dan Teupah Barat. Sementara itu, Kecamatan Simeulue Tengah didominasi oleh desa-desa yang terletak di wilayah dataran. Secara keseluruhan, Kabupaten Simeulue kini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan.

Sementara itu, luas Wilayah Sungai (WS) Simeulue mencapai ±1.604,32 km². Di dalam WS ini terdapat 48 (empat puluh delapan) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue. Keberadaan DAS tersebut memiliki potensi besar sebagai sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik, pertanian, perikanan, serta sektor-sektor lainnya. Untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah, potensi ini perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.

G. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang esensial untuk menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat, berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus ruang tumbuh kembang keluarga dan interaksi sosial. Oleh karena itu, pembangunan perumahan harus dilaksanakan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkelanjutan, memperhatikan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang. Komitmen terhadap penyediaan hunian yang adil dan layak bagi seluruh rakyat adalah cerminan upaya negara dalam mewujudkan masyarakat sejahtera secara berkelanjutan, di mana penyelenggaraan perumahan tak hanya berfokus pada fisik, tapi juga penciptaan lingkungan yang sehat dan berkualitas.

Di Kabupaten Simeulue, pembangunan perumahan menghadapi kendala geografis, infrastruktur terbatas, dan ketimpangan kesejahteraan. Ini menuntut upaya terkoordinasi lintas sektor untuk menjamin ketersediaan hunian layak dan terjangkau. Secara definisi, perumahan adalah kumpulan rumah dengan fasilitas penunjang di kawasan permukiman, yang merupakan bagian dari lingkungan hidup yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan aktivitas masyarakat. Keduanya membentuk sistem terintegrasi yang mencakup pembinaan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perbaikan, pencegahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, pembiayaan, dan pelibatan Masyarakat untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen analisis teknis mengenai kawasan kumuh di kabupaten Simeulue, total luasan kawasan kumuh mencapai 65,38 hektar. sebanyak 43,88 hektar di antaranya merupakan kawasan kumuh yang terletak di permukiman nelayan, tersebar di desa Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, dan Suka Jaya. kawasan ini umumnya memiliki karakteristik permukiman padat, infrastruktur dasar yang belum memadai, serta sanitasi dan drainase yang kurang baik. Selain itu, terdapat tambahan 21,5 hektar kawasan kumuh lainnya yang belum diidentifikasi secara rinci lokasi pastinya. kondisi ini menunjukkan perlunya penanganan lebih lanjut, termasuk verifikasi lapangan serta penetapan resmi melalui regulasi daerah agar program penataan kawasan kumuh dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

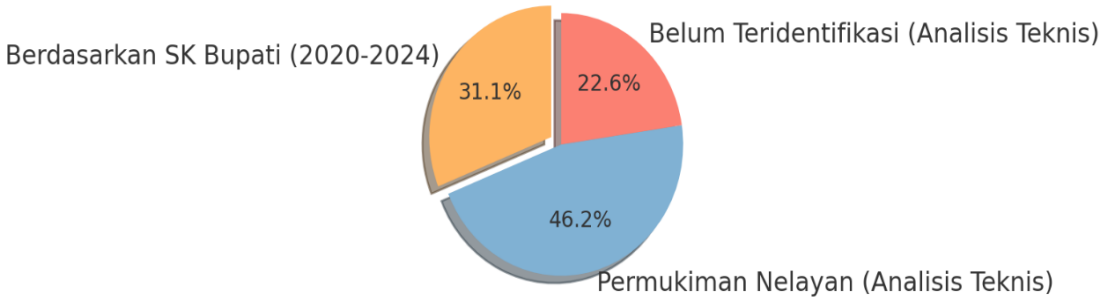

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.46 Perbandingan Sumber Data Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Simeulue Tahun 2024

Tabel 2.76. Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Simeulue 2020-2024

SK Bupati 2020	SK Bupati 2021	SK Bupati 2022	SK Bupati 2023	SK Bupati 2024
Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
29,55	29,55	29,55	29,55	29,55

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Luas kawasan kumuh di Kabupaten Simeulue berdasarkan SK Bupati dari tahun 2020 hingga 2024 tetap konsisten, yaitu sebanyak 1 kawasan seluas 29,55 hektar setiap tahunnya. Jika tidak ada intervensi atau perubahan kebijakan, maka proyeksi hingga tahun 2025 menunjukkan kondisi yang stagnan. Namun, dengan asumsi adanya program pengurangan kawasan kumuh, luasnya dapat berkurang secara bertahap hingga di bawah 20 hektar pada tahun 2025.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Terhadap PDRB

1. Nilai PDRB

Valuasi kondisi perekonomian suatu wilayah dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator makro ini menampilkan keterbandingan antar wilayah satu dengan yang lain. Nilai PDRB mencerminkan seberapa tinggi nilai tambah dari semua lapangan usaha/kategori di suatu wilayah. PDRB tidak identik dengan penghasilan riil yang diterima oleh setiap masyarakat.

PDRB ADHB adalah indikator yang menggambarkan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu daerah dalam periode tertentu dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB ADHB menunjukkan besarnya ukuran ekonomi suatu wilayah secara nominal tanpa memperhitungkan faktor inflasi.

Berdasarkan data 2020–2024, PDRB ADHB Kabupaten Simeulue terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020, PDRB tercatat sebesar Rp2.274.361,90 juta, naik menjadi Rp2.460.291,40 juta pada 2021, lalu bertambah lagi menjadi Rp2.688.028,30 juta di 2022. Tren kenaikan berlanjut pada 2023 dengan nilai Rp2.935.101,30 juta, hingga mencapai Rp3.150.757,60 juta pada 2024.

Kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun ini menunjukkan adanya pertumbuhan skala ekonomi Simeulue secara nominal. Walaupun persentase pertumbuhan tahunan bervariasi (ada periode melambat dan ada periode melonjak), namun secara nilai total PDRB tetap meningkat. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, investasi, serta belanja pemerintah tetap tumbuh dan memberikan kontribusi terhadap ekspansi ukuran ekonomi daerah.

Dengan demikian, tren PDRB ADHB Simeulue 2020–2024 mencerminkan perkembangan positif perekonomian daerah, meskipun evaluasi lebih mendalam tetap diperlukan melalui PDRB ADHK (harga konstan) untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil yang mengabaikan pengaruh harga/inflasi.PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 mencapai 2,94 trilliun rupiah yang berarti mengalami peningkatan sebesar 247,07 miliar rupiah dari tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

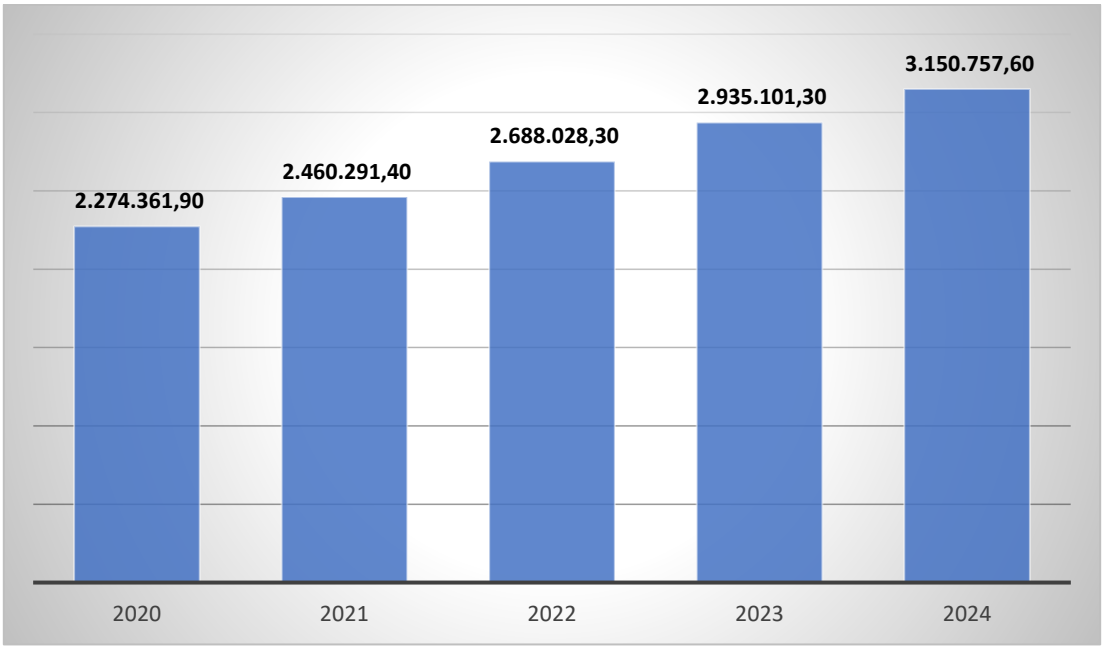

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.47 PDRB ADHB Simeulue, 2020-2024 (juta rupiah)

Selain PDRB ADHB, terdapat pula PDRB ADHK yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi riil suatu daerah. Perhitungan PDRB ADHK menggunakan harga pada satu tahun dasar sehingga pengaruh inflasi dapat dihilangkan. Dengan cara ini, perubahan nilai PDRB ADHK dari tahun ke tahun benar-benar mencerminkan pertumbuhan volume produksi barang dan jasa, bukan sekadar perubahan harga.

Di Kabupaten Simeulue, PDRB ADHK menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai PDRB ADHK tercatat sebesar 1.602.411,20 juta rupiah, lalu naik menjadi 1.657.046,10 juta rupiah pada tahun 2021. Pertumbuhan berlanjut dengan capaian 1.726.630,00 juta rupiah pada tahun 2022, meningkat lagi menjadi 1.806.610,00 juta rupiah pada tahun 2023, hingga mencapai 1.886.610,00 juta rupiah pada tahun 2024.

Pertumbuhan riil dari tahun ke tahun memperlihatkan pola yang positif. Laju pertumbuhan ekonomi Simeulue tercatat 3,41 persen pada 2021, meningkat menjadi 4,20 persen pada 2022, lalu mencapai puncaknya di 4,63 persen pada 2023, sebelum sedikit melambat menjadi 4,43 persen pada 2024. Jika dirata-ratakan, pertumbuhan ekonomi riil Simeulue selama empat tahun terakhir mencapai sekitar 4,17 persen per tahun. Kondisi ini menegaskan bahwa kapasitas produksi riil perekonomian Simeulue terus menguat secara konsisten dari tahun ke tahun.

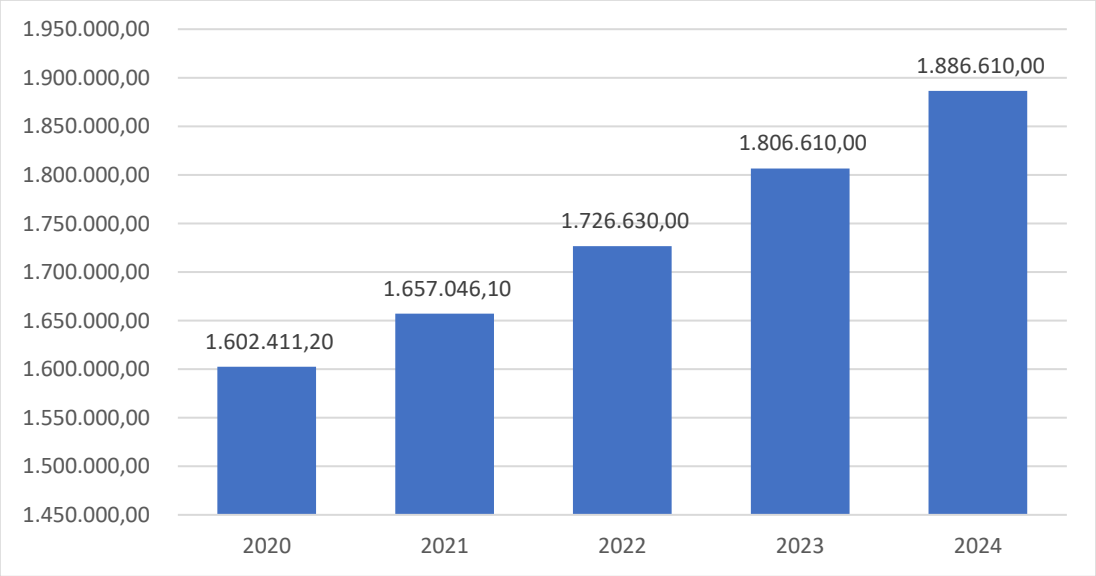

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.48 PDRB ADHK Simeulue, 2020-2024 (juta rupiah)

2. Struktur Ekonomi

Kontribusi dari masing-masing kategori lapangan usaha diperlihatkan dari Distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha. Dari sinilah akan terlihat bagaimana struktur perekonomiannya.

Pada tahun 2024, Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) perekonomian Simeulue dengan persentase sebesar masih mendominasi 38,06% selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

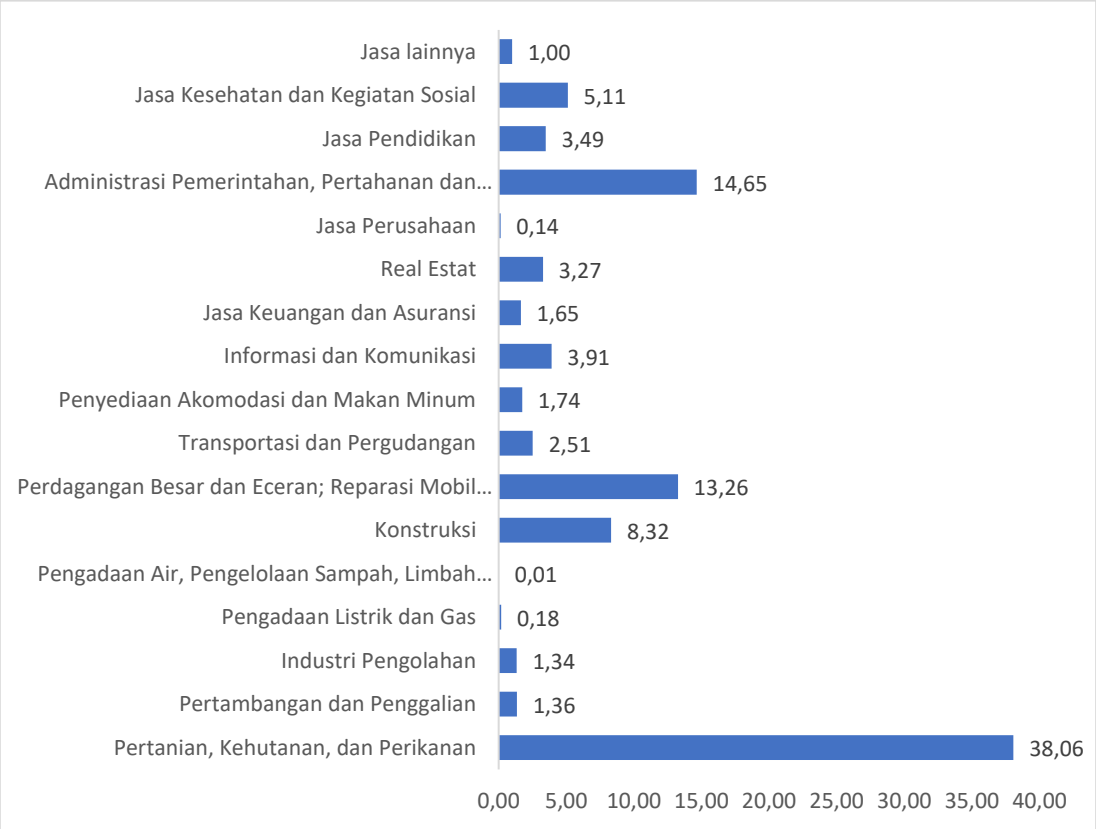

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.49 Distribusi Persentase PDRB ADHB Simeulue Menurut Kategori, Tahun 2024 (%)

Kategori 0 (Administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib) menjadi kontributor terbesar kedua PDRB ADHB tahun 2024 dengan kontribusi 14,65%. Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) menyumbang 13,26% dari PDRB ADHB 2023. Sebanyak 8,67% PDRB berasal dari nilai tambah bruto Kategori F (Konstruksi). Kategori Q (Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial) memberikan peranan sebesar 5,11% perekonomian tahun 2024.

Selama lima tahun terakhir, perekonomian Simeulue cenderung konsisten dimana sektor tersier (perdagangan, transportasi, dan jasa- jasa) mendominasi, sedangkan sektor primer (kategori pertanian pertambangan) berada di bawahnya dan sektor sekunder (pengolahan, listrik, air dan konstruksi) paling kecil kontribusinya. Pada tahun 2024, sektor tersier mempunyai kontribusi 50,73 % pada perekonomian, disusul sektor primer dengan kontribusi 39,42 % dan sektor sekunder dengan kontribusi 9,85 %.

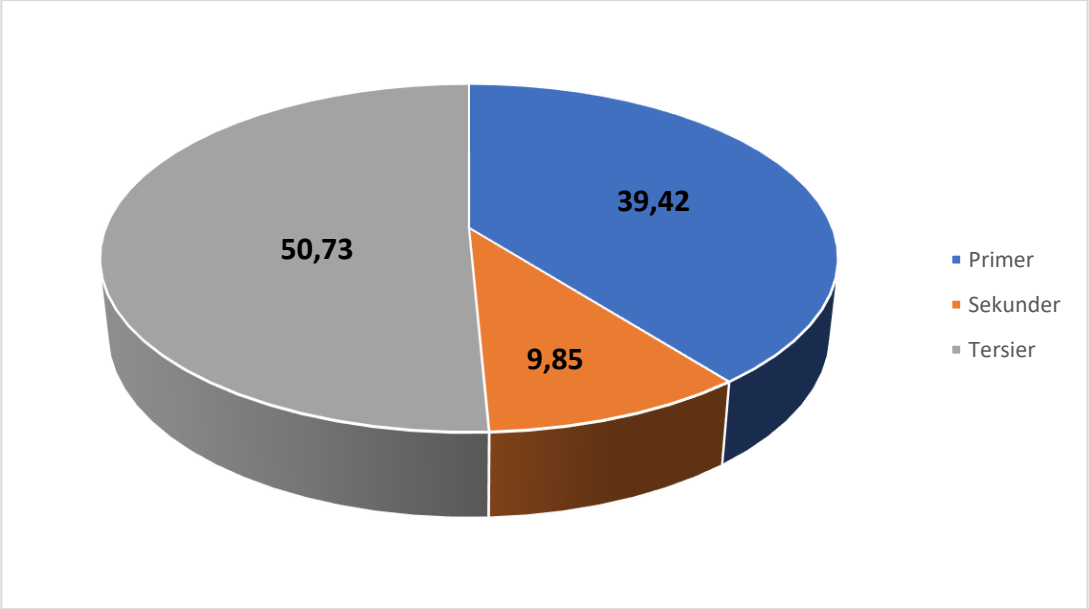

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.50 Distribusi Persentase PDRB ADHB Simeulue Menurut Sektor Tahun 2024 (%)

3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) menggambarkan peningkatan volume produksi barang dan jasa di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) setiap tahunnya. Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kecepatan pembangunan perekonomian suatu daerah. Pembangunan ekonomi yang berhasil adalah yang berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi meningkat secara fluktuatif. Dapat dilihat terdapat penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar -4,48% dan terjadi peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 3,29%. Setelahnya, terdapat tren yang positif pada tahun 2021-2023. Selama lima tahun terakhir, secara rata-rata laju pertumbuhan pertumbuhan selama lima adalah sebesar 0,87 %. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

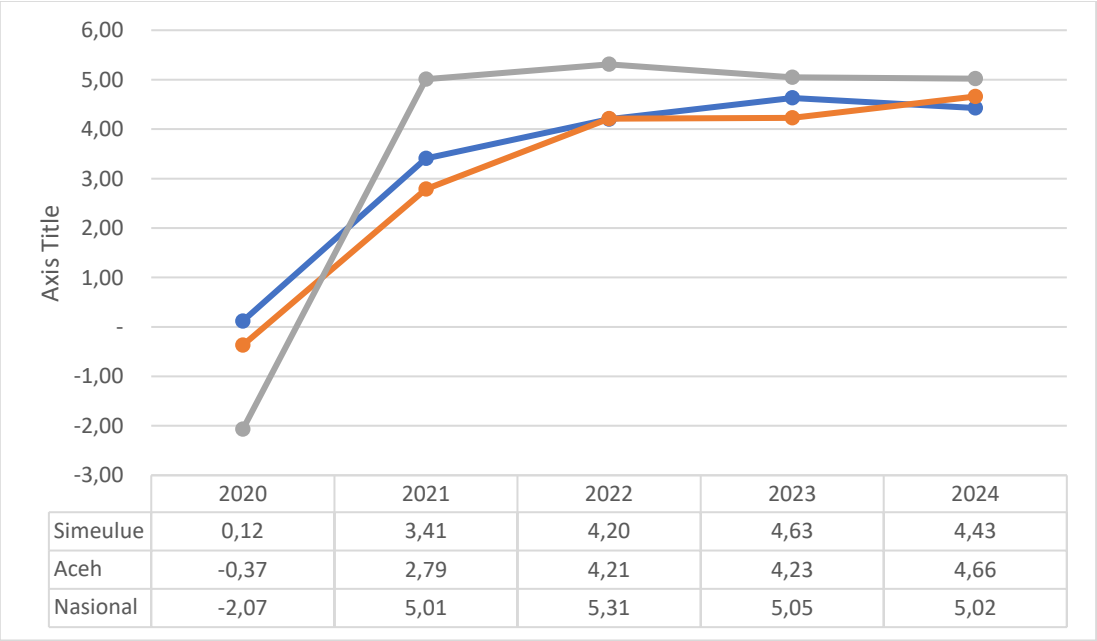

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	0,12	3,41	4,20	4,63	4,43
Aceh	-0,37	2,79	4,21	4,23	4,66
Nasional	-2,07	5,01	5,31	5,05	5,02

Sumber : BPS Kbupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.51 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi meningkat secara fluktuatif. Dapat dilihat terdapat peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 3,29%, terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,79%, terjadi peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,43% dan terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar -0,20%. Setelahnya, terdapat tren yang positif pada tahun 2020-2024. Selama lima tahun terakhir, secara rata-rata laju pertumbuhan pertumbuhan selama lima adalah sebesar 1,08 %. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue Menurut lapangan usaha tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

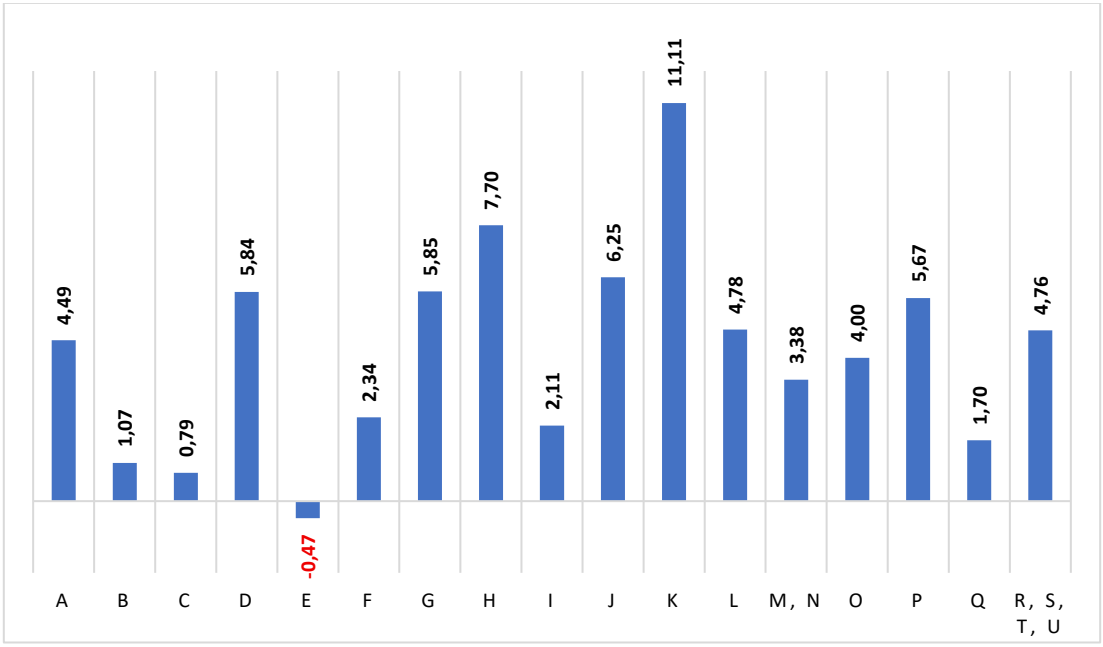

Keterangan :

A	: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	: Pertambangan dan Penggalian
C	: Industri Pengolahan
D	: Pengadaan Listrik dan Gas
E	: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	: Konstruksi
G	: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	: Transportasi dan Pergudangan
I	: Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	: Informasi dan Komunikasi
K	: Jasa Keuangan dan Asuransi
L	: Real Estat
M, N	: Jasa Perusahaan
O	: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	: Jasa Pendidikan
Q	: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R, S, T, U	: Jasa lainnya

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.52 Laju Pertumbuhan Ekonomi Simeulue Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2024

Kategori/lapangan usaha melaju paling cepat di tahun 2024 adalah kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi) mencapai 11,11%. Di peringkat kedua ada kategori H (Transportasi dan Pergudangan) yang juga melaju dengan kecepatan 7,70%.

4. PDRB Perkapita

PDRB Per Kapita merupakan indikator agregat/makro yang menunjukkan rata-rata PDRB tiap penduduk di suatu wilayah. PDRB yang digunakan ialah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk menunjukkan kondisi terkini, atau dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk menunjukkan kondisi dengan harga pada tahun dasar 2010. Pada tahun 2018, PDRB ADHB per kapita mencapai 22,11 juta rupiah sedangkan PDRB ADHK 16,56 juta rupiah. Pada tahun 2023 PDRB ADHB per kapita mengalami peningkatan hingga mencapai 27,93 juta rupiah sedangkan PDRB ADHK per kapita mencapai 18 juta rupiah. PDRB Per Kapita di Kabupaten Simeulue tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

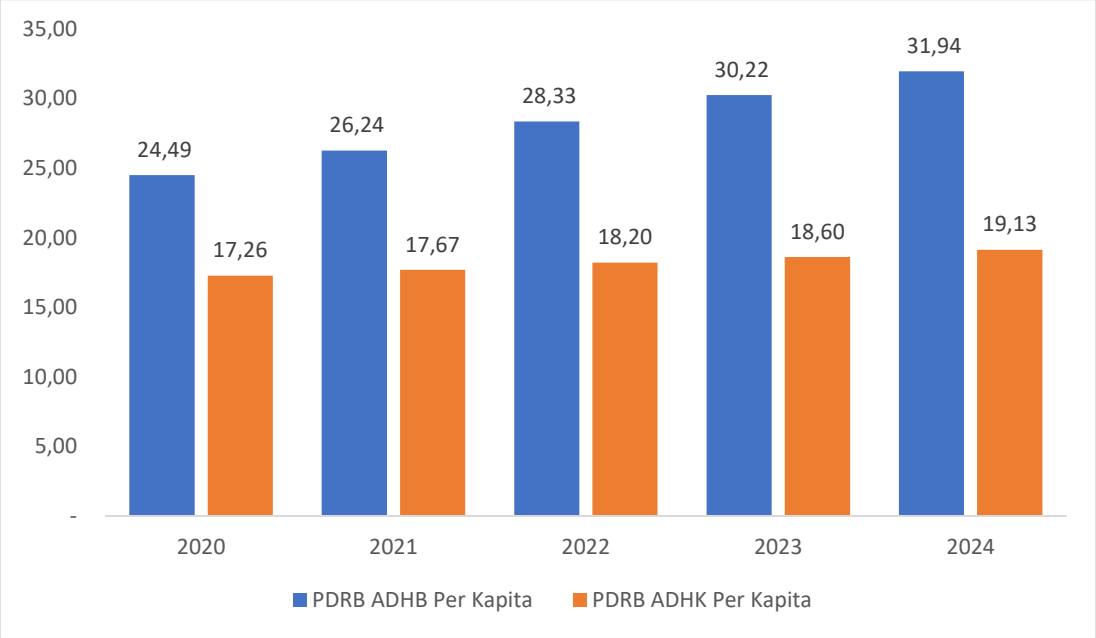

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.53 PDRB Per Kapita Kabupaten Simeulue, 2020-2024 (juta rupiah)

Bila dilihat selama lima tahun terakhir terdapat tren positif pada PDRB ADHB per kapita dengan kenaikan tertinggi yaitu pada tahun 2024 sebesar 1,72 juta Rupiah dibandingkan PDRB ADHB per kapita tahun sebelumnya. Sedangkan untuk PDRB ADHK per kapita selama lima tahun terakhir juga mengalami kenaikan tetapi kenaikannya relatif rendah. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir mencapai 1,03%, rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB per kapita mencapai 7,36%, sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK per kapita mencapai 3,36%.

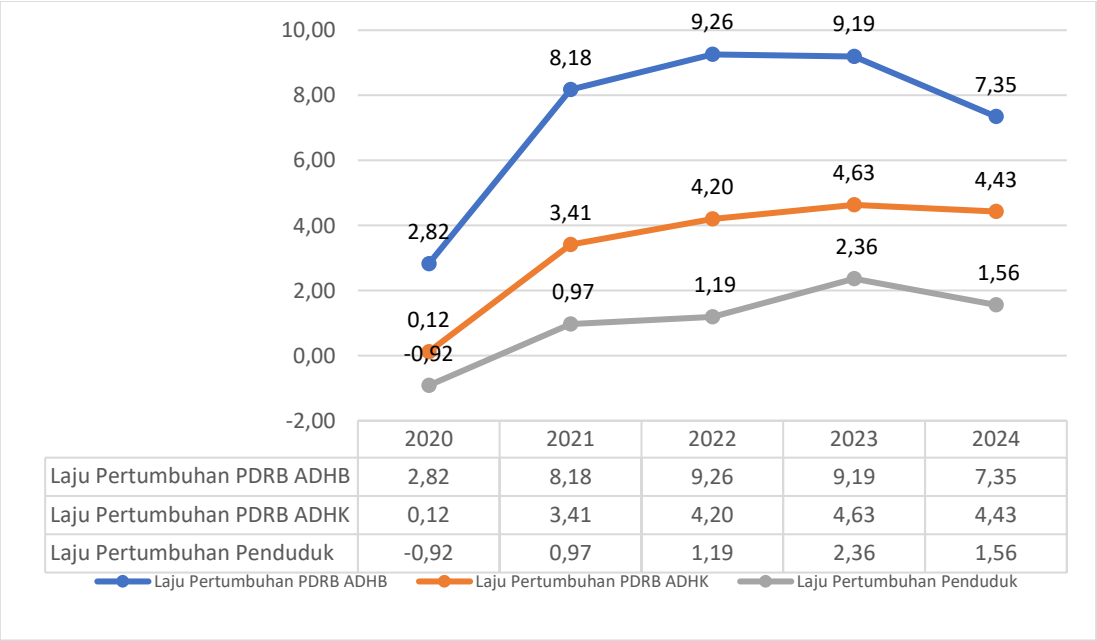

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.54 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Laju ketiga komponen mengalami pertumbuhan yang negatif dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan pada tahun 2021 hingga 2024 mengalami pertumbuhan yang cenderung positif. Pada tahun 2024, PDRB ADHK per kapita, laju PDRB ADHB per kapita dan laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan.

B. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi menyebabkan kemerosotan nilai uang dan menurunnya daya beli masyarakat. Inflasi terjadi karena tidak seimbangnya arus uang dan barang atau karena banyaknya dan cepatnya uang yang beredar. Namun kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi.

Perhitungan inflasi di Kabupaten Simeulue sampai dengan tahun 2023 belum pernah dilakukan, namun sampai dengan tahun 2023 tersebut Inflasi di Kabupaten Simeulue mengacu pada tingkat Inflasi Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya isu resesi yang merupakan isu global di seluruh dunia pemerintah melakukan upaya pengendalian Inflasi di seluruh kabupaten/kota sebagai tindak lanjut dari himbauan pemerintah pusat. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Simeulue kondisi Maret 2024 yang diperoleh dari BPS Simeulue, terjadi kenaikan harga secara kumulatif sebesar 2,31%. Komoditas penyumbang kenaikan harga diantaranya Beras, Daging Sapi dan Cabe Merah.

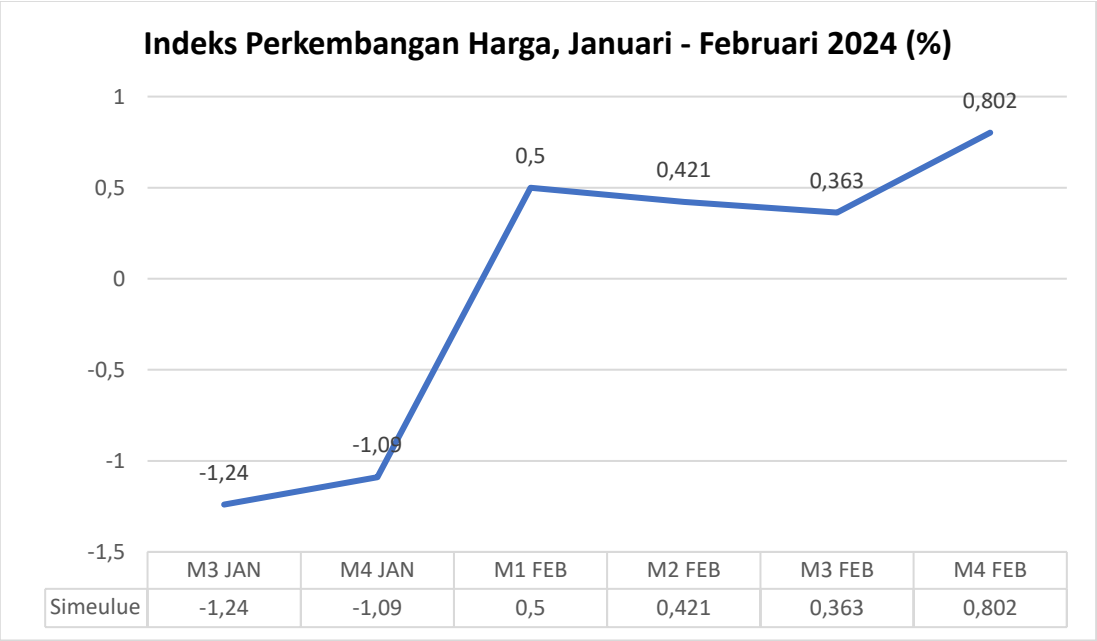

Sumber : BPS Kabupaten Simeulue, Tahun 2024

Grafik 2.55 Perkembangan Harga Kondisi Januari – Februari Tahun 2024

Perkembangan Inflasi Kabupaten Simeulue dari minggu ke-3 Januari s.d minggu ke-4 Februari mengalami fluktuasi sebagaimana gambar diatas, kondisi Februari sebesar 0,80 persen lebih tinggi dari bulan Januari 2024 yaitu sebesar -1,24 persen. Secara umum, perkembangan harga komoditas di Kabupaten Simeulue selalu mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh kondisi transportasi kapal dari daratan Sumatera ke Kabupaten Simeulue yang terkadang mengalami penundaan akibat cuaca buruk serta kurangnya minat masyarakat dalam bertani untuk memenuhi kebutuhan komoditas di Kabupaten Simeulue.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum di Kabupaten Simeulue perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan, dengan fokus pada pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, dan efisiensi birokrasi. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menciptakan sistem pemerintahan atau kelembagaan yang bersih, terpercaya, dan siap menghadapi dinamika zaman. Kabupaten Simeulue membutuhkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Regulasi

yang transparan dan adil serta kebijakan yang responsif terhadap perubahan dan tantangan geografis akan memperkuat pelayanan publik dan pengembangan potensi lokal seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.

A. Indeks Reformasi Hukum

Adalah alat ukur atau instrumen yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya suatu negara, khususnya lembaga-lembaga negara dan instansi terkait, dalam melakukan reformasi hukum secara menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan. Reformasi hukum sendiri mencakup perubahan regulasi, institusi, serta budaya hukum yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.77. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	Skor	n.a	n.a	n.a	45,62	86,82

Sumber : Profil RB Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

B. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Simeulue mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Meskipun telah terjadi perbaikan dalam beberapa sektor layanan, hasil penilaian masih menunjukkan bahwa pelayanan publik di Simeulue belum sepenuhnya optimal. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, belum meratanya kualitas SDM aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi yang masih terbatas. Upaya perbaikan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan prosedur layanan, dan digitalisasi pelayanan agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Data dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.78. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Simeulue 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik

Sumber : Profil RB Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

C. Komunikasi dan informatika (Indeks SPBE)

Penguatan komunikasi dan informatika di Kabupaten Simeulue tercermin dari peningkatan Indeks SPBE melalui digitalisasi layanan publik, pembangunan infrastruktur TIK, dan literasi digital untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif, khususnya di wilayah kepulauan.

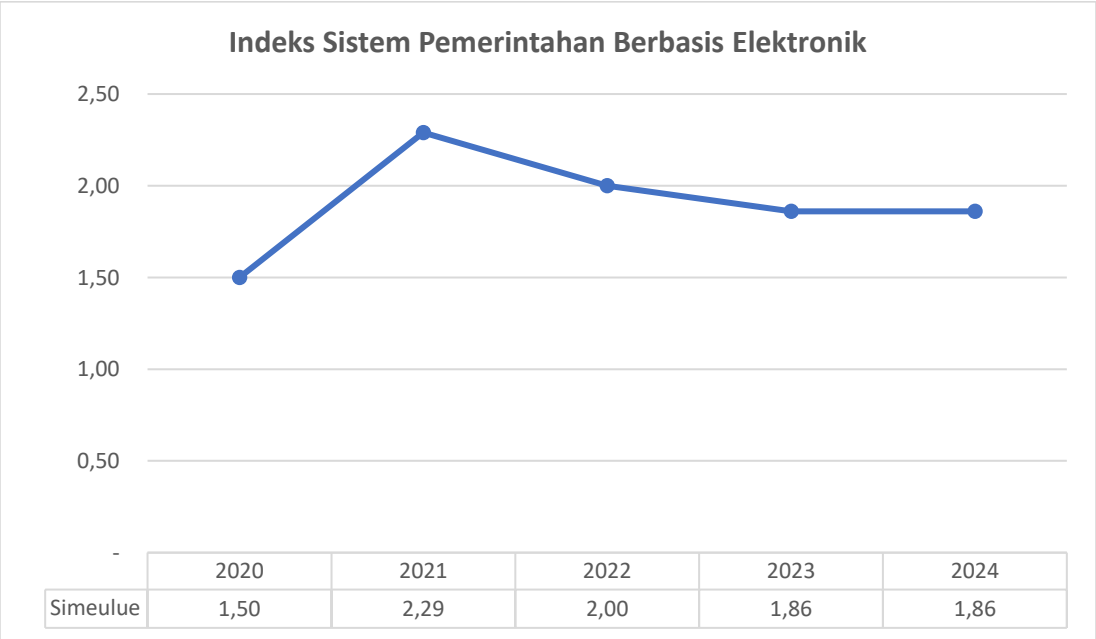

	2020	2021	2022	2023	2024
Simeulue	1,50	2,29	2,00	1,86	1,86

Sumber: Diskominsa Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.56 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Simeulue Tahun 2020 - 2024

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang digital dan efisien, Pemerintah Kabupaten Simeulue terus mendorong peningkatan Indeks SPBE sebagai indikator reformasi birokrasi. Selama periode 2020–2024, nilai SPBE mengalami fluktuasi, dari 1,50 pada 2020, meningkat menjadi 2,29 pada 2021, namun menurun hingga 1,80 pada 2023 dan kembali naik menjadi 1,86 di tahun 2024. Dan Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti tertera pada Tabel berikut. Dinamika ini mencerminkan perlunya penguatan infrastruktur TIK, peningkatan kapasitas SDM, dan konsistensi implementasi sistem digital dalam rangka mendukung pelayanan publik yang lebih transparan, adaptif, dan terintegrasi.

D. Perpustakaan

Perpustakaan adalah lembaga atau tempat yang mengelola dan menyediakan berbagai jenis informasi dan bahan pustaka, baik cetak maupun elektronik, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pengguna (pemustaka)

Perpustakaan umum Kabupaten Simeulue adalah Gedung Layanan Perpustakaan Kabupaten Simeulue yang dapat meningkatkan kecerdasan dan wawasan generasi muda Simeulue agar mampu menghadapi tantangan teknologi masa depan. Perpustakaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan literasi masyarakat. Berikut Perkembangan layanan perpustakaan di Kabupaten Simeulue tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79. Jumlah Sarana dan Prasaran Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Gedung Pustaka Umum Simeulue	Unit	1	1	1	1	1
2	Jumlah Mobil Pustaka Keliling	Unit	-	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa gedung dan mobil perpustakaan termasuk dalam kategori sarana dan prasarana. Gedung perpustakaan merupakan prasarana, sedangkan mobil perpustakaan yang digunakan untuk layanan keliling digunakan untuk menunjang kegiatan perpustakaan. Jumlah Gedung Pustaka Umum Simeulue dari tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki 1 unit, yang baru diresmikan pada tanggal 16 Juli 2024 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perpustakaan Nasional RI. Sedangkan jumlah mobil Pustaka keliling, yang pengadaannya sejak tahun 2021, hingga tahun 2024 belum ada penambahannya.

Perpustakaan yang baik tidak hanya menyediakan tempat yang nyaman untuk membaca, tetapi juga memiliki koleksi yang lengkap dan relevan dengan kebutuhan pemustaka. Adapun data rinci mengenai jumlah koleksi buku perpustakaan umum Simeulue tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.80. Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Umum Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Buku Perpustakaan Umum	Eksemplar	4.702	5.320	5.320	7.968	8.276
2	Jumlah Buku Perpustakaan Keliling	Eksemplar	-	600	600	600	600
3	Jumlah Judul Buku Perpustakaan Umum	Judul	1.068	1.471	1.471	2.540	2.591
4	Jumlah Judul Buku Perpustakaan Keliling	Judul	-	300	300	300	300

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Tabel di atas menjelaskan bahwa koleksi buku perpustakaan merupakan salah satu informasi ilmu pengetahuan masyarakat melalui minat baca masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan yaitu jumlah judul buku perpustakaan umum sebanyak 8.276 Eksemplar dengan judul sebanyak 2.591 judul dan jumlah buku perpustakaan keliling sebanyak 600 Eksemplar dengan judul sebanyak 300 judul.

Berdasarkan diatas, diketahui bahwa jumlah koleksi buku perpustakaan di Kabupaten Simeulue setiap tahunnya terus meningkat sehingga berdampak positif kepada jumlah pemustaka baik secara offline maupun online, yang setiap tahunnya juga terus meningkat. Peningkatan jumlah kunjungan dapat dilihat pada grafik dibawah ini grafik dibawah:

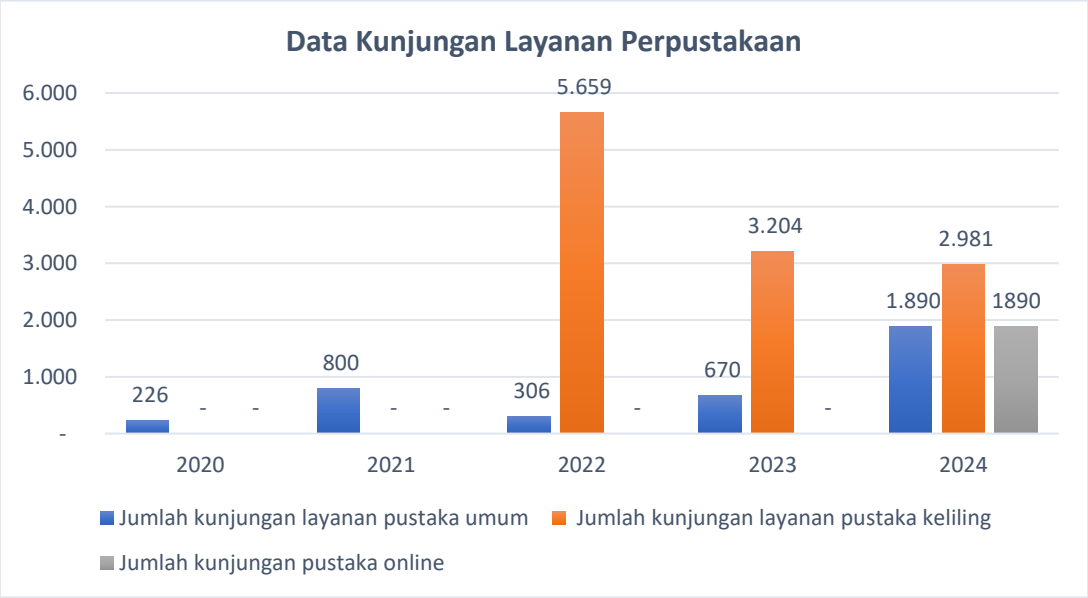

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Grafik 2.57 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Jumlah kunjungan layanan Pustaka umum :
   Tahun 2020 sebanyak 226 pengunjung, tahun 2021 meningkat menjadi 800 pengunjung, tahun 2022 mengalami penurunan hingga 306 pengunjung, tahun 2023 kembali menaingkat sebanyak 670 pengunjung, dan pada tahun 2024 juga meningkat sebanyak 1.890 pengunjung, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk fasilitas yang nyaman dan memadai, pelayanan yang baik dari pustakawan, serta adanya program dan kegiatan menarik yang diselenggarakan oleh perpustakaan.

2. Jumlah kunjungan layanan pustaka keliling :
   Tahun 2020 dan 2021 belum manunjukan adanya pengunjung hal ini disebabkan penyediaan mobil pustaka keliling di akhir tahun 2021, tahun 2022 sebanyak 5.659 pengunjung rata-rata pengunjungnya diminati oleh anak-anak sekolah, tahun 2023 menurun sebanyak 3.204 pengunjung, tahun 2024 kembali meningkat sebanyak 2.981 pengunjung.

3. Jumlah kunjungan layanan online:
   Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 belum tersedianya layanan pustaka online, pada 2024 sebanyak 1.890 pengunjung, Perpustakaan online juga dikenal sebagai perpustakaan digital merupakan sebuah sistem yang menyediakan akses ke koleksi buku, jurnal, artikel, dan sumber informasi lainnya dalam format digital melalui internet. Intinya, ini adalah perpustakaan yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital.

Dengan adanya layanan perputakaan umum Kabupaten Simeulue maka akan membutukan petugas fungsional perpustakaan, atau pustakawan, adalah pegawai negeri sipil yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jabatan ini memiliki jenjang terampil dan ahli, dengan tugas meliputi pengelolaan koleksi, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem perpustakaan. Adapun data mengenai jumlah fungsional pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simeulue disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.81. Jumlah Tenaga Fungsiaonal Perpustakaan Umum Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tenaga Perpustakaan Sesuai Strandar	-	3	2	2	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simeulue, 2025

Tabel diatas menunjukan bahwa tenaga fungsional Perpustakaan Umum Kabupaten Simeulue masih kurang sekali tenaga funsional pustakawannya hal ini dapat terlihat tahun 2020 belum tesedia, tahun 2021 sebanyak 3 orang, tahun 2023 dan 2024 berkurang menjadi sebanyak 2 orang karena adanya mutasi/pindah tugas ke instansi lain sebanyak 1 orang. Perpustakaan Umum Kabupaten Simeulue sangat membutukan peningkatan tenaga fungsional Perpustakaan dengan memperhatikan beberapa faktor yang dapat meningkatkan petugas fungsional perpustakaan meliputi peningkatan kompetensi, pengembangan karir, dan dukungan dari berbagai pihak.

E. Kearsipan

Kearsipan adalah proses, kegiatan, atau sistem pengaturan dan pengelolaan arsip (dokumen) mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pemusnahan arsip. Kearsipan bertujuan untuk memastikan arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat saat dibutuhkan, serta untuk menjaga kelangsungan informasi dan bukti kegiatan suatu organisasi atau lembaga.

Dalam Pengelolaan kearsipan daerah pada Kabupaten Simeulue mencakup kegiatan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip pada organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Simeulue. Untuk dapat menerapkan pengelolaan arsip yang handal dan sesuai dengan kaidah kearsipan perlu diadakan kegiatan pembinaan kearsipan dan penyelamatan serta pelestarian dokumen/arsip. Pencapaian kegiatan pembinaan kearsipan pada organisasi perangkat daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan pengelolaan arsip daerah tidak terlepas dari kesadaran masing-masing unit kerja tentang pentingnya arsip. Pencapaian kegiatan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin bertambahnya Khasanah arsip yang tersimpan di lembaga kearsipan daerah. Capaian Pengelolaan Kearsipan dapat diliat dari peningkatan unit kerja yang sudah menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan. Perkembangan pengelolaan kerarsipan Kabupaten Simeulue tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82. Perkembangan Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perangkat Daerah	45	45	45	45	45
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	18	23	29	32	36
3	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	40,00	51,11	64,44	71,11	80,00

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukan bahwa :

1. Jumlah Perangkat Daerah:
   Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2020 hingga tahun 2024 sebanyak 45 OPD, Faktor penyebab OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak bertambah bisa beragam, tetapi beberapa faktor umum meliputi: keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, efisiensi birokrasi, dan penataan organisasi. Perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan juga dapat mempengaruhi kebutuhan akan OPD baru. Selain itu, proses perizinan dan birokrasi yang rumit juga dapat menjadi penghambat.
2. Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan :
   Pada tahun 2020 sebanyak 18 OPD, tahun 2021 sebanyak 23 OPD hal ini setiap tahunnya meningkat hingga tahun 2024 sebanyak 36 OPD yang telah menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan. Peningkatan jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya kearsipan, dukungan regulasi dan kebijakan yang jelas, serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk pengelolaan arsip.
3. Persentase perangkat daerah yang menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan :
   Pada tahun 2020 mencapai 40 persen, tahun 2021 meningkat mencapai 51,11 persen, begitu juga tahun tahun berikutnya meningkat hingga tahun 2024 meningkat mencapai 80,00 persen. Peningkatan persentase perangkat daerah yang menerapkan kaidah kearsipan yang benar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip, serta adanya regulasi dan pelatihan yang mendukung.

Dalam menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan, hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan tenaga arsiparis dan tenaga teknis pengelola kearsipan yang ada di masing-masing perangkat daerah. Jumlah tenaga arsiparis dan tenaga teknis kearsipan diseluruh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83. SDM Pengelola Arsip Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga arsiparis	2	2	2	3	5
2	Jumlah tenaga teknis pengelola kearsipan	18	23	29	32	36

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa :

1. Jumlah tenaga arsiparis :

   Tahun 2020, 2021, 2023 sebanyak 2 orang, tahun 2023 meningkat sebanyak 3 orang, tahun 2024 meningkat menjadi sebanyak 5 orang, Peningkatan jumlah tenaga arsiparis disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kebutuhan akan pengelolaan arsip yang semakin kompleks, pertumbuhan lembaga kearsipan, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya arsip. Selain itu, adanya peluang karir yang menjanjikan dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan profesi ini juga turut mendorong peningkatan jumlah arsiparis.

2. Jumlah tenaga teknis pengelola kearsipan,
   Tahun 2020 sebanyak 18 orang/OPD, tahun 2021 sebanyak 23 orang/OPD, tahun 2022 sebanyak 29 orang/OPD, tahun 2023 sebanyak 32 orang/OPD, dan tahun 2024 sebanyak 36 orang/OPD, ini menunjukkan setiap tahunnya terjadi peningkatan. Peningkatan jumlah tenaga teknis pengelola kearsipan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik, kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi, perkembangan teknologi yang menuntut pengelolaan arsip digital, regulasi dan standar kearsipan yang semakin ketat.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh Dan Demokrasi Substansial

A. Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Simeulue

Indeks Demokrai Indonesia (IDI) merupakan alat ukur untuk menilai tingkat perkembangan demokrasi di suatu daerah, yang mencakup beberapa aspek antara lain:

1) *Proses Pemilu* yaitu menilai kualitas proses pemilu dan adanya kebebasan dalam berpartisipasi dalam pemilu
2) *Partisipasi Politik* yaitu menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik
3) *Keberfungsian Pemerintahan* yaitu Mengukur efektivitas dan efesiensi kerja pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan
4) *Budaya Politik* yaitu mengukur sejauhmana kebebasan individu dijamin dan dilindungi oleh negara
5) *Kebebasan Sipil* yaitu menilai sejauhmana kebebasan individu dijamin dan dilindungi oleh negara

Secara umum Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Simeulue belum tersedia secara spesifik dalam data public. Dilansir dari data BPS Pada tahun 2010, Indeks Demokrasi Indonesia 2009 untuk pertama kalinya dirilis. Pada tahun 2019, untuk pertama kalinya Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona (Bappenas) secara resmi mengawali kajian revisi IDI. Revisi ini dilakukan berkolaborasi dengan tiga lembaga riset, yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU Research Institute, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina

Pada tahun 2023 Indeks Demokrasi Indonesia melakukan metode baru dalam metode perhitungan yang disajikan pada table dibawah dengan perbandingan antara metode lama dan metode baru.

Tabel 2.84. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru IDI

Aspek	Metode Lama	Metode Baru
Teoritik	Demokrasi Politik ▪ Hanya mengukur demokrasi politik ▪ Memiliki porsi besar pada institutional democracy, seperti Lembaga Pemilu, DPRD, Birokrasi, dll	Demokrasi Lebih Luas ▪ Melibatkan aspek ekonomi dan sosial ▪ Mengurangi porsi ukuran institutional democracy
Indeks dan Penyusun	3 Aspek, 11 variabel dan 28 indikator ▪ Indeks kabupaten, indeks provinsi dan indeks nasiona	Lebih Komprehensif: 3 aspek dan 22 indikator Indeks kabupaten, indeks provinsi, indeks pusat, dan indeks nasional
Tahapan Kerja	▪ Koding koran dan reviu dokumen ▪ Focus Group Discussion (FGD) ▪ Wawancara Mendalam	Lebih Singkat: ▪ Koding koran dan reviu dokumen ▪ Pengumpulan data sekunder dari K/L/D/I ▪ Pengumpulan data portal berita online ▪ FGD
Sumber Data	▪ Koran Cetak ▪ Dokumen/Peraturan yang dikeluarkan Instansi	Lebih Lengkap: ▪ Data resmi dan indeks dari K/L/Pemda ▪ Koran cerak dan portal berita online ▪ Dokumen/peraturan yang dikeluarkan Instansi

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

B. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan, rasa aman dan ternteram dalam masyarakat. Ini adalah bagian penting dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu dibentuk satuan perlindungan masyarakat di desa/kelurahan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota satuan perlindungan masyarakat. Sesuai ketentauan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950.

Peran serta masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, hal ini bisa dilakukan dengan

1) Mentaati peraturan yaitu mematuhi aturan dan norma yang berlaku dilingkugan sekira
2) Melaporkan pelanggaran yaitu memberikan informasi kepada pihak berwenang jika melihat adanya pelanggaran atau potensi gangguan
3) Berpartisipasi dalam kegiatan yaitu turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau komunitas dalam rangka menjaga ketertiban umum.

C. Sosial

Sosial yaitu meupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, interaksi antar manusia, dan kehidupan Bersama. Dalam menunjang urusan kesejahteraan sosial diperlukan dukungan sumber daya manusia Kesejahteraan Sosial memiliki kompetensi yang tersertikasi, potensi sumber kesejahteraan sosial Lembaga yang terakreditasi, perorangan yang tersertifikasi dan pilar-pilar sosial lainnya.

Ada beberapa elemen-elemen sosial dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

1) Interaksi sosial yang mencakup bagaimana individua tau kelompok saling interaksibaik secara langsung maupun tidak langsung, serta bagaimana interaksi ini membentuk hubungan dan pola prilaku

2) Kelompok sosial, jtruktur Sosial, ini merujuk pada pola organisasi dan hirarki dalam masyarakat, termasuk stratifikasi sosial, Lembaga sosial, dan peran serta fungsi yang dimiliki oleh setiap individua tau kelompok
3) Nilai dan Norma, ini juga melibatkan pemahaman tentang nila-nilai dan norma-norma yang anut oleh suatu masyarakat, yang mempengaruhi perilaku dan interaksi soial
4) Perilaku Sosial, ini mencakup berbagai Tindakan dan pola prilaku yang dilakukan oleh individu dalam kontek sosial, baik yang bersifat positif maupun negative
5) Budaya, ini juga mencakup pemahaman tentang budaya suatu masyarakat, termasuk tradisi, kepercayaan, Bahasa, seni, dan cara hidup yang semuanya memengaruhi interaksi sosial dan struktur sosial

1. Kegiatan dalam Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Tujuan utama dari pembinaan LSM. Ormas dan OKP yaitu untuk memastikan bahwa Terhadap LSM, Ormas dan OKP dapat beroperasi secara professional, efektif, dan berkelanjutan serta berkontribusi secara pasif bagi pembangunan masyarakat dan bangsa.

Sesuai Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2013 yang berbunyi bahwa Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi dipisahkan menjadi kesamaan agama, LSM, kesamaan profesi dan kesamaan fungsi tetapi sudah menjadi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, dengan (Surat Keterangan Terdaftar) SKT yang dikeluarkan dari Kementerian Dalam Negeri dan yayasan yang berbadan hukum dikeluarkan SK Kemenkumham Oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh kepala Badan Kesatuan dan politik (Kesbangpol) Kabupaten simeulue bahwa jumlah terdapat 60 Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar dan hanya 13 Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif. LSM. Ormas dan OKP didirikan melalui penguatan tata Kelola organisasi melalui rapat anggota dalam penyusunan AD/ART yang baik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta peningktatan partisipasi anggota dan kemudian baru dibuat badan hukumnya melaui akta notaris dan dan selanjutnya didaftarkan ke Kebangpol dengan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diakui oleh pemerintah daerah.

Kegiatan dalam Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP antara lain:

a. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas
   1) Pelatihan manajemen organisasi, keuangan dan sumberdaya manusia
   2) Pelatihan teknis yang sesuai bidang kegiatan LSM, Ormas dan OKP
   3) Peningkatan pemahaman tentang regulasi terkait
   4) Peningkatan kapasitas kepemimpinan

b. Konsultasi dan Pendampingan
   1) Konsultasi terkait penyusunan program dan kegiatan
   2) Pendampingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
   3) Bantuan teknis dalam pengelolaan organisasi
   4) Fasilitasi akses informasi dan jaringan

c. Fasilitasi
   1) Fasilitasi pertemuan, diskusi, dan kegiatan bersama LSM, Ormas dan OKP
   2) Fasilitasi akses ke sumberdaya
   3) Fasilitasi kerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait

d. Pengawasan dan Evaluasi
   1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan
   2) Evaluasi kinerja organisasi
   3) Pemberian umpan balik dan rekomendasi

2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan partispasi masyarakat dalam proses politik, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah yang mencakup berbagai aspek seperti Pendidikan politik, pembinaan partai politik, fasilitasi pemilihan umum, dan penanganan sosial.

Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Simeulue telah melakukan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Tingkat Kabupaten, berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Simeulue hasil Pemilu Periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Simeulue hasil Pemilu Periode berikutnya.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya gentar kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam era global saat ini menuntut pemerintah daerah terus meningkatkan daya saing, baik dalam skala lokal, nasional dan internasional. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam upaya pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing daerah merupakan salah satu parameter konsep pembangunan berkelanjutan, dimana semakin tinggi tingkat daya saing daerah maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tingggi.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat diartikan dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan Internasional. Indeks Daya Saing Daerah dapat memberi gambaran kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional, demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Pengukuran IDSD ini melibatkan empat aspek utama, yaitu Ekosistem Inovasi,Pasar/Market, Sumber Daya Manusia (SDM)/Human Capital, dan Penguat/Enabling Environment. Secara keseluruhan, ada 12 pilar, 23 dimensi, dan 97 indikator yang digunakan untuk menilai keempat aspek tersebut.

Sebelum tahun 2022 penilaian IDSD menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, namun sejak tahun 2022 nilai IDSD yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tidak lagi menggunakan kategori seperti sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Sebagai gantinya, pendekatan yang digunakan lebih berbasis pada perbandingan antar daerah secara objektif dan terukur, dengan menggunakan indikator yang lebih spesifik.

Nilai IDSD Kabupaten Simeulue tahun 2022 dengan skore 2,45 dan tahun 2023 Skor nilai IDSD Kabupaten Simeulue 2,71 dan di tahun 2024 terjadi peningkatan yang menggembirakan dengan skor 3,15 dibandingkan dengan rata-rata Aceh skore 3,49.

Tabel 2.85. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	Skor	n.a	n.a	2,45	2,71	3.15

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional RI, Tahun 2025

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

A. Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Berdasarkan Indikator Kinerja Makro (IKM) Tahun 2020–2024

Indikator Kinerja Makro merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh dalam dimensi ekonomi, sosial, dan kualitas hidup masyarakat. Indikator ini tidak hanya mencerminkan capaian program secara sektoral, tetapi juga menunjukkan hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi. Kinerja makro umumnya diukur melalui indikator seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, indeks pembangunan manusia, hingga indikator sosial seperti harapan hidup dan pendidikan.

Di Kabupaten Simeulue, pengukuran capaian pembangunan melalui indikator kinerja makro menjadi acuan penting untuk menilai dampak nyata pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Periode 2020–2024 menjadi fase krusial yang dipengaruhi oleh tantangan global seperti pandemi COVID-19, sekaligus menjadi momentum pemulihan dan konsolidasi pembangunan lokal.

Berdasarkan data capaian indikator makro tersebut, terlihat bahwa beberapa indikator telah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, seperti PDRB per kapita, IPM, dan rasio gini yang membaik. Di sisi lain, masih terdapat indikator yang belum mencapai target, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Evaluasi terhadap indikator makro ini memberikan gambaran umum mengenai arah capaian pembangunan dan menjadi pijakan dalam merumuskan strategi pembangunan daerah yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Simeulue ke depan. Adapun Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Simeulue 2020–2024 diauraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.86. Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Berdasarkan Indikator Kinerja Makro Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja										Target Akhir 2026	Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%)
			RPJMK 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020		2021		2022		2023		2024			
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,15	0,12	5,26	3,41	5,37	4,20	2,95	4,63	3,00	4,43	3,10	89,99%
2	PDRB Perkapita ADHK	Rp. Juta	17,98	24,49	17,49	26,23	17,00	28,33	30,22	30,22	17,89	31,94	18,10	110,62%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,00	5,47	7,50	5,71	7,00	6,00	5,22	5,85	4,99	5,85	4,56	78,23%
4	Tingkat Kemiskinan	%	17,98	18,49	17,49	18,98	17,00	18,37	17,92	17,92	17,99	17,69	17,05	103,55%
5	Rasio Gini	Rasio	N/A	0,296	N/A	0,310	N/A	0,279	0,288	0,388	0,286	0,259	0,281	112,64%
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,03	66,03	66,03	66,41	67,67	67,27	66,79	68,06	67,18	70,95	67,95	101,50%

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026

B. Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020–2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah yang bersifat strategis, lintas sektor, dan mencerminkan prioritas capaian kinerja pemerintah daerah. IKU disusun untuk menilai sejauh mana visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah dapat direalisasikan melalui program dan kegiatan yang dijalankan oleh seluruh perangkat daerah. IKU juga menjadi instrumen utama dalam mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan laporan kinerja dan kebijakan pembangunan selanjutnya.

Di Kabupaten Simeulue, pelaksanaan pembangunan selama lima tahun terakhir (2020–2024) telah diarahkan pada pencapaian indikator kunci yang mewakili aspek ekonomi, sosial, lingkungan, pelayanan dasar, hingga tata kelola pemerintahan. Evaluasi atas capaian IKU menjadi penting tidak hanya untuk melihat realisasi terhadap target, tetapi juga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan data IKU tahun 2020 hingga 2024, diketahui bahwa capaian pembangunan menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa indikator berhasil melampaui target dan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, seperti peningkatan PDRB per kapita, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan indeks kualitas lingkungan hidup. Namun demikian, sejumlah indikator lain masih belum mencapai target, bahkan stagnan, seperti nilai LPPD, jumlah kunjungan wisatawan, serta indikator kesehatan dasar seperti angka kematian bayi dan ibu.

Evaluasi menyeluruh terhadap capaian IKU ini menjadi fondasi penting untuk merancang perencanaan pembangunan ke depan secara lebih adaptif dan berbasis hasil. Hal ini juga memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Simeulue.

Tabel 2.87. Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%)
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Indek Kepuasan Masyarakat Dalam Layanan RSUD Simeulue	Indeks	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	75%
2	Presentase PAD terhadap pendapatan	%	7,0	11,47	7,5	15,18	8,0	5,49	1,0	1,83	1,4	1,84	2,0	137,76%
3	Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
4	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	N/A	63,43	N/A	66,45	N/A	67,50	66,07	68,40	66,15	68,40	67,1	103,47%
5	Produksi Komoditi Utama (Padi)	Ton	19.000	31.503	22.000	27.532	24.000	25.913	31.809	32.988	31.903	23.304	32.553	92,37%
6	Produksi Hail Perkebunan	Ton	12.071	9.540	12.113	11.030	14.154	11.110	11.876	12.135	11.967	9.175	12.586	85,49%
7	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,76	13,47	13,90	13,57	13,67	14,98	14,08	15,20	14,53	15,35	99%
8	Angka Kematian Bayi per 100,000 kelahiran Hidup	/1000 Kelahiran Hidup	0	22	0	26	0	25	0	23	0	28	5	0%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%)
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
9	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran Hidup	0	4	0	5	0	4	0	5	0	5	1	0%
10	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	46,85	54,00	51,84	64,00	56,84	54,07	66,00	54,62	68,17	47,58	70,45	97,28%
11	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	%	63,36	66,51	67,01	71,56	71,08	70,21	80,15	72,67	80,55	76,51	81,0	107,66%
12	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum layak	%	47,59	43,28	53,09	39,52	58,63	41,60	89,10	52,38	89,25	77,77	89,98	76,45%
13	Indeks Resiko Pengurangan Bencana	Indeks	147	162	142	162	137	162	143	162	143	162	142,1	113,82%
14	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	%	N/A	25,25	N/A	30,00	N/A	83,55	10,00	90,27	20,00	87,83	30,55	670,93%
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	N/A	51,38	N/A	64,00	N/A	77,77	75,54	78,82	76,07	78,82	76,52	103,98%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%)
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
16	Indeks sistem pemerintah berbasis elektronik	Indeks	N/A	1,50	N/A	2,29	N/A	2,00	1,19	1,80	1,55	1,86	2,55	135,63%
17	Usaha Mikro dan Kecil	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,01	0,01	0,012	0,012	0,017	N/A
16	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Myliar)	0,9	0,82	0,95	0,91	1,0	0,96	1,0	1,0	1,0	1,0	25	100%
19	Persentase pemuda berprestasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,12	0,12	0,18	0,18	0,35	N/A
20	Jumlah kwaran pramuka yang dibina	Kwaran	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%
21	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
22	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	2	0	2	1	2	3	3	5	3	1	4	80%
23	Kunjungan wisata	Orang	60.000	36.494	70.000	33.702	80.000	28.000	34.151	42.922	34.257	N/A	35.091	67,41%
24	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha	4,0	4,0	4,0	4,18	4,0	4,32	4,25	5,10	4,5	4,5	5,0	123,10%

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%)
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
25	Nilai Tukar Peternak (NTPt)	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96,99	96,99	99,08	99,08	103,12	N/A
26	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96,81	96,81	99,05	99,05	103,17	N/A
27	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	96,71	96,71	99,10	99,10	103,20	N/A
28	Produksi perikanan tangkap	Ton	18.000	19.210	19.000	21.113	20.000	21.113	21.400	18.677	22.898	22.898	26.216	102,14%
29	Produksi perikanan budidaya	Ton	52,73	21,11	62,73	62,0	72,73	54,30	82,73	65,78	92,73	92,73	112,73	78,76%
30	Indeks Pembangunan Syariat Islam (IPS)	Indeks	N/A	81,84	N/A	81,84	82,0	81,84	82,5	81,84	82,5	81,84	84	100%
31	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	N/A	Kurang	N/A	Kurang	N/A	Kurang	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	64	100%
32	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Simeulue	Skor	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	0%
33	Indeks Demokrasi Kabupaten Simeulue	Indeks	N/A	71,20	N/A	72,22	N/A	74,25	71,20	72,22	72,22	74,25	74,25	99%
34	Laju Inflasi	%	N/A	4,24	N/A	2,07	N/A	2,07	4,46	1,42	3,43	1,42	3,25	277,82%

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026

C. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pembangunan daerah merupakan proses yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Untuk menjamin bahwa pembangunan berjalan secara efektif dan tepat sasaran, diperlukan alat ukur kinerja yang terstruktur, objektif, dan akuntabel.

Salah satu instrumen penting dalam pengukuran tersebut adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam setiap urusan pemerintahan daerah. IKK dirancang agar mampu merepresentasikan kinerja dari masing-masing perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan pilihan, maupun urusan pendukung.

Evaluasi atas IKK Kabupaten Simeulue periode 2020–2024 memberikan gambaran umum tentang efektivitas capaian pembangunan daerah selama lima tahun terakhir, mencakup konsistensi antara target dan realisasi, kecenderungan capaian sektoral, serta titik-titik kelemahan yang memerlukan perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan ke depan. Adapun capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 diuraikan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.88. Capaian Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	**PENDIDIKAN**													
1	Akreditasi Sekolah	%	80	78	82	80	85	82	90	83	91	85	9.56	93%
2	**KESEHATAN**													
1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran Hidup	24	22	23	26	22	25	10	24	8	23	1	288%
2	Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	/1000 Kelahiran Hidup	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
3	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	/1000 satuan penduduk	0,045	0,040	0,046	0,042	0,048	0,045	0,052	0,047	0,057	0,050	0,061	82%
4	Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	/1500 satuan penduduk	0,003	0,002	0,004	0,003	0,005	0,004	0,007	0,004	0,013	0,005	0,017	77%
5	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luar biasa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
3	**PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**													
1	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	%	50	68,42	55	80,70	60	84,21	75	42,10	80	74,86	100	45%
2	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRW	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	25	n.a	27	n.a	30	n.a
3	Persentase Luas Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	25	n.a	27	n.a	35	n.a
4	Persentase ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik	%	13	13	50	60,77	65	75,59	70.2	84,99	70.5	13	71	120%
4	**PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**													
1	Persentase Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Pemukiman	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	30	n.a	40	n.a	60	n.a
2	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	Rumah	n.a	n.a	n.a	6,68	n.a	n.a	250,00	1.031	250	1031	300	27%
3	Rasio rumah layak huni	Rasio	53,01	n.a	56,19	38,85	59,85	38,85	40	43,27	55	43,27	70	80,23
4	Presentase areal kawasan kumuh	%	29,6	29,55	29,6	29,55	29,6	29,55	20	29,55	25	29,55	35	85%
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
	Indeks Ketahanan Daerah	%	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,50	0,29	0,5	0,30	0,59	85%

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
6	**DINAS SOSIAL**													
	Persentase PSKS/PMKS yang mendapatkan penguatan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100	n.a	100	60	100	60%
7	**PEMBERDAYAAN PEREMUPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**													
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	77	75	78	77	80	79	85	80	90	82	100	91%
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	78	77,97	78,3	78,27	78,6	78,87	77.47	79,50	77.47	79,41	77.47	98%
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	n.a	n.a	60	59,41	62	61,48	75.30	62,27	76.10	63,91	77.50	82%
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,7	64,65	65	64,95	65	63,72	60.32	64,79	60.45	64,79	60.99	98%
8	**PANGAN**													
1	Ketersediaan energi	kkal/ kapita/ hari	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1876,98	1.876,5	1877,01	1.880	1879,75	98%
2	Ketersediaan protein perkapita	gram/ kapita/ hari	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	52,17	51,5	53,35	52,0	55,67	94%

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
9	**LINGKUNGAN HIDUP**													
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	60	60,83	63.36	63,33	63.46	62,50	63.66	98%
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87	87,00	88	88,63	90	91,48	88.2	91,12	88.3	94,44	88.5	105%
3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	72	71,71	73	81,51	75	81,51	72	82,67	72.8	82,51	73.51	112%
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	51	51,38	52	n.a	54	77,77	75.4	78,82	75.98	79,82	76.91	98%
10	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**													
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	n.a	n.a	0,63	0,6229	0,64	0,6413	0.6962	0,6589	0.6978	0,6695	0.7082	94%
11	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													
	Total Tingkat Kesuburan	Rate	2,60	2,58	2,58	2,57	2,56	2,56	2.65	2,55	2.75	2,54	2.98	103%
12	**PERHUBUNGAN**													
1	Rasio ijin trayek	Rasio	—	n.a	—	n.a	—	n.a	1:5014	0,35	1:4015	0,40	1:4025	—
2	Persentase layanan angkutan darat	%	—	n.a	—	n.a	—	n.a	12	45	10	47	9.5	401%
3	Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Kabupaten	%	—	n.a	—	n.a	—	n.a	5	30	10.12	35	10.89	343%

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
13	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**													
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	60	n.a	63	65	66	67	55.35	68	55.75	70	65.78	102%
14	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH**													
1	Persentase koperasi aktif	%	29,0	29,5	29,5	29,8	29,8	30,0	30.23	30,2	31.39	30,23	33.73	100%
15	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**													
1	Jumlah Kwaran yang dibina	Kwaran	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	10	100%
16	**KEBUDAYAAN DAN ADAT**													
1	Jumlah pengunjung objek kebudayaan	Rasio Pengunjung/ 1000	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	50.55	1,5	51.76	1,7	52.78	—
2	Persentase Pelestarian nilai-nilai adat istiadat	%	45	45	46	46	47	47	60,00	49	71,00	50	85,00	96%
17	**PERPUSTAKAAN**													
1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0.43	0,27	0.65	0,27	1.08	98%
18	**KEARSIPAN**													
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	40	40	45	45	50	50	6.67	55	5	60	6.77	90%

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
19	**PARIWISATA**													
1	Lama kunjungan Wisata	Hari	2,5	2,5	2,7	2,7	2,9	2,9	3	3,0	4	3,0	4	96%
2	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	Orang	—	n.a	—	n.a	1.100	1.200	50	1.250	100	1.300	200	114%
20	**PERTANIAN**													
1	Peningkatan Produksi daging Ternak Besar	Ton	380	380	385	385	390	390	429.166	395	446.333	396,8	482753	101%
21	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**													
	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	%	4,5	4,5	5,0	5,0	5,3	5,3	10.55	5,5	10.76	5,58	10.98	98%
22	**PERDAGANGAN**													
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp	450 jt	450 jt	470 jt	470 jt	480 jt	480 jt	1 M	490 jt	2 M	500 jt	6 M	103%
22	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**													
1	Nilai Ekspor Perikanan	Rp	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	3 M	1,9 M	5 M	2,0 M	15 M	111%
2	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	Indeks	92	n.a	94	95	96	97	90.71	99	91.1	100	100	103%
3	Nilai tukar nelayan	Indeks	93	n.a	95	96	97	98	96.71	99	99.1	101	103.2	104%

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
23	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**													
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
24	**KEUANGAN**													
1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0,020	0,020	0,015	0,015	0,012	0,012	1	0,011	1.15	0,010	2	104%
2	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20,0	20,1	20,0	20,5	20,0	20,7	20	21,0	20	21,0	20	105%
3	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10,0	10,2	10,0	10,3	10,0	10,1	10	10,0	10	10,0	10	101%
4	Penetapan APBD	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100%
25	**KEPEGAWAIAN, PENDIDKAN DAN PELATIHAN**													
1	ASN yang mengikuti pendidikan formal	%	15	15	16	16	18	18	25	19	30	20	40	96%
2	ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis	%	10	10	12	12	14	14	12	16	14	18	17	98%
3	sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	%	5	5	7	7	10	10	40.55	12	40.98	15	45.98	97%

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
26	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**													
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	10	10	15	15	20	20	1.15	22	5.45	25	20.18	94%
27	**PENGAWASAN**													
1	Meningkatnya level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	1	1	1	1	2	2	Level 2	2	Level 2	2	Level 3	100%
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK RI Perwakilan Aceh	%	65	65	70	70	75	75	100	80	100	85	100	98%
3	Persentase Pelanggaran PNS	%	60	60	65	65	70	70	100	72	100	75	100	98%
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Inspektorat	%	70	70	75	75	80	80	100	82	100	85	100	98%
28	**SEKRETARIAT DPRK**													
1	Persentase Qanun yang ditetapkan	Rasio	80	80	85	85	90	90	2	92	4	95	4	100%
29	**SYARIAT ISLAM**													
	Angka Melek Alquran	Angka	75	75	76	76	77	77	3322	78	6900	79	6900	98%

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
30	**MAJELIS ADAT ACEH**													
	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Rasio	55	55	56	56	57	57	70	59	73	60	80	95%
31	**MPU**													
	Persentase Pengkaderan Ulama	%	8	8	9	9	9	9	20	10	20	10	35	100%
32	**BAITUL MAL**													
1	Rasio Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	%	80	80	81	81	82	82	85	83	90	83	95	98%
33	**MPD**													
1	Persentase sekolah yang menyelenggarakan kurikulum islam	%	12	12	13	13	14	14	20	15	25	15	35	96%
34	**SEKRETARIAT DAERAH**													
1	**Pemerintahan dan Otonomi Daerah**													
1	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	60	60	65	65	70	70	5	72	5	75	9	92%
2	**Ekonomi**													
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	49	49	50	50	51	51	41.45	52	42.47	53	43.58	104%

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
35	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**													
1	Persentase Pembinaan LSM/ORMAS	%	70	70	72	72	74	74	5,00	75	5,50	76	7,20	100%
2	Skor aspek hak-hak politik	Skor	70	70	71	71	72	72	60,94	73	65,50	74	66,95	98%
3	Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	68	68	69	69	70	70	74,04	71	74,25	72	74,99	103%
36	**TRANSMIGRASI**													
	Persentase ketersediaan sarana prasarana kawasan transmigrasi	%	50	50	52	52	55	55	70,00	57	73,00	60	79,00	96%
37	**PENANAMAN MODAL**													
1	Rasio daya serap tenaga kerja perusahaan sekala nasional	%	0,15	0,15	0,18	0,18	0,19	0,19	0,1/0,1	0,20	0,1/0,1	0,20	0,6/0,5	100%
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	25 M	25 M	27 M	27 M	29 M	29 M	1 M	30 M	1 M	31,5 M	35,5 M	104%
3	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Investor	10	10	11	11	12	12	3/1	12	3/1	16	24/6	108%

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026

1. Kinerja Sangat Kuat dan On Track

Sejumlah indikator menunjukkan capaian maksimal bahkan melampaui target. Layanan kesehatan pada kondisi krisis/KLB stabil di angka 100%, konsistensi perencanaan–penganggaran (RPJMD, RKPD, APBD) tercapai penuh 100%, serta kualitas udara (IKU) berhasil melampaui target (>100%). Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Kominfo, persentase koperasi aktif, serta indikator pengawasan (SPIP, tindak lanjut BPK dan Inspektorat) juga berada pada kisaran 98–100%. Dari sisi ekonomi, nilai dan jumlah investasi berskala nasional tumbuh melampaui target, sementara di sektor perhubungan, realisasi pemasangan perlengkapan jalan bahkan mencapai lebih dari 300% target tahunan.

2. Indikator yang Memerlukan Akselerasi Moderat

Beberapa indikator kunci sudah berada pada jalur yang baik, misalnya, rasio dokter umum baru sekitar 82% dan dokter gigi sekitar 77%. Ketersediaan energi per kapita mendekati target (98%) dan protein per kapita masih 94%. Selain itu, Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), rasio EBT/Listrik, rasio perpustakaan, serta indeks gender (IPG/IDG) rata-rata masih di bawah 100% sehingga memerlukan tambahan upaya dalam dua tahun ke depan.

3. Kinerja Tertinggal dan Perlu Perbaikan Prioritas

Beberapa indikator strategis masih jauh dari target. Irigasi dalam kondisi baik hanya mencapai 45% dengan tren menurun pada 2023. Sektor perumahan sangat tertinggal, rumah layak huni yang dibangun baru sekitar 27% target, sementara rasio rumah layak huni masih jauh dari 70%. Kawasan kumuh juga belum berkurang signifikan dengan capaian sekitar 85% target. Bidang pendidikan melalui indikator akreditasi sekolah menunjukkan data yang tidak konsisten antara capaian dan target, sehingga perlu klarifikasi. Transportasi juga menunjukkan anomali satuan pada rasio izin trayek dan layanan angkutan (1:5014 dan 401%). Indikator negatif seperti TFR dan SILPA justru mencatat capaian >100%, padahal idealnya semakin rendah. Hal ini menandakan perlunya koreksi formula capaian.

4. Sorotan Per Urusan Strategis

- Kesehatan: Layanan KLB kuat, tetapi angka kematian balita masih tinggi dengan target (1/1000) yang sulit dicapai. Rasio tenaga medis masih kurang.
- Pekerjaan Umum dan Tata Ruang: Irigasi buruk (45%), memukul produktivitas pertanian. Infrastruktur baik tercatat 120%, namun ada kemungkinan mismatch definisi.
- Perumahan dan Permukiman: Rumah layak huni stagnan, kawasan kumuh tidak berkurang signifikan.

- Lingkungan Hidup: IKA, IKU, dan IKL relatif baik (98–112%).
- Pangan: Energi kapita on-track, protein masih rendah perlu diversifikasi pangan lokal.
- Perhubungan: Fasilitas jalan tinggi, indikator layanan angkutan tidak valid.
- Perdagangan dan Perikanan: Ekspor melampaui target momentum positif untuk logistik dan pasar.
- Keuangan Daerah: SILPA meningkat → cerminan perencanaan kas lemah.
- Komunikasi dan Informatika: IKIP >100% → transparansi meningkat.
- Pengawasan: SPIP dan TL BPK/Itko bagus → perlu dipertahankan.

5. Anomali Data

Terdapat sejumlah masalah data:

- Kesalahan satuan (contoh: "/1000 kelahiran hidup" muncul di indikator layanan bencana).
- Angka absolut dicampur dengan persentase (contoh: 6900 ditaruh sebagai persentase).
- Inkonsistensi desimal (titik vs koma).
- Perhitungan capaian indikator negatif yang keliru.
- Nilai capaian sangat besar (>300%) menandakan baseline tidak tepat.

6. Kesimpulan Kinerja

Secara umum, capaian kinerja 2020–2024 dapat dikatakan baik, dengan sebagian besar indikator berada pada jalur target 2026. Beberapa sektor mencatat kinerja sangat kuat, seperti layanan kesehatan pada kondisi krisis/KLB yang konsisten 100%, konsistensi perencanaan–penganggaran yang stabil, kualitas udara yang melampaui target, serta pengawasan SPIP dan tindak lanjut BPK yang hampir sempurna. Di bidang ekonomi, investasi perdagangan dan perikanan tumbuh melampaui target, memperlihatkan ketahanan ekonomi daerah.

Meski demikian, terdapat bottleneck utama yang masih menjadi tantangan. Irigasi dalam kondisi baik baru mencapai sekitar 45%, pembangunan rumah layak huni masih rendah, kawasan kumuh belum berkurang signifikan, dan rasio dokter umum serta dokter gigi masih jauh dari target. Selain itu, indikator negatif seperti angka kematian balita, TFR, dan SILPA masih ditafsirkan keliru, sehingga capaian terlihat tinggi padahal secara substansi menunjukkan persoalan yang perlu ditangani.

Dengan percepatan program di sektor prioritas serta perbaikan tata kelola data, mayoritas target 2026 masih realistis untuk dicapai. Namun, beberapa indikator sensitif perlu penyesuaian target berbasis evidensi agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Upaya ini penting agar capaian pembangunan lebih merata, berkelanjutan, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU ini diundangkan pada 5 Januari 2022 dan menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2022 bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Beberapa aspek penting yang diatur dalam UU ini meliputi:

1) Pemberian Sumber Penerimaan Daerah, Penguatan kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi melalui restrukturisasi jenis pajak dan pemberian sumber perpajakan baru;
2) Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD), Pengelolaan TKD berbasis kinerja untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin;
3) Pengelolaan Belanja Daerah, Peningkatan kualitas belanja daerah melalui disiplin penganggaran dan sinergi belanja antara pemerintah pusat dan daerah;
4) Pemberian Kewenangan Pembiayaan Daerah, Pemberian kewenangan kepada daerah untuk melakukan pembiayaan, termasuk pinjaman daerah, dengan pengaturan yang lebih jelas dan terukur;
5) Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional, Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien.

Dengan diberlakukannya UU ini, diharapkan tercipta alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien dan efektif, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1) Pengelola Keuangan Daerah: Mengatur peran dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah;
2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, dan penatausahaan APBD;
3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Tata cara pelaporan realisasi anggaran, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

4) Kekayaan dan Utang Daerah: Pengelolaan aset dan kewajiban daerah, termasuk utang daerah;
5) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Pengaturan mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD;
6) Pembinaan dan Pengawasan: Mekanisme pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah pusat.

Untuk implementasi teknis dari PP ini, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini memberikan panduan rinci mengenai prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan ini dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tercermin dalam kemampuan untuk merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

Pengelolaan keuangan mencakup pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja, dan sumber-sumber pembiayaan. Daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan ketergantungan pada pendapatan dana transfer memiliki peluang untuk menjadi daerah yang maju dan mandiri. Oleh karena itu, menilai tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Simeulue dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penilaian kinerja keuangan Kabupaten Simeulue merupakan bagian penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Evaluasi ini mencakup tiga komponen utama dalam APBK, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan mencerminkan kemampuan daerah dalam menghimpun dana, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah, serta sumber lain yang sah. Belanja menggambarkan seberapa efektif anggaran digunakan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan, termasuk belanja operasional dan belanja modal. Sementara itu, pembiayaan mencakup transaksi keuangan yang memengaruhi posisi kas daerah, seperti penerimaan pinjaman dan pelunasan kewajiban.

Data kinerja keuangan Kabupaten Simeulue tahun 2020–2024 yang digunakan dalam penilaian ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sehingga memberikan gambaran akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penilaian ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Pelaksanaan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue dapat dievaluasi dari beberapa aspek penting, termasuk ketepatan waktu dalam penetapan APBK serta tingkat realisasi anggaran. Ketepatan waktu dalam penetapan APBK menjadi indikator penting karena mencerminkan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait. Pengesahan APBK adalah proses persetujuan akhir antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan anggaran tahunan. Setelah disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, APBK menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran.

Tabel 2.89. Pengesahan/Penetapan APBK Tahun 2020-2024

Tahun	Nomor Qanun	Tanggal Pengesahan	Pagu (Rp)
1	2	3	4
2020	Qanun Nomor 1 Tahun 2020	21 Januari 2020	947.917.963,696,47
2021	Qanun Nomor 1 Tahun 2021	12 Maret 2021	886.989.447.228,00
2022	Qanun Nomor 6 Tahun 2021	30 Desember 2021	847.039.199.949,00
2023	Qanun Nomor 6 Tahun 2022	30 Desember 2022	846.568.423.184,00
2024	Qanun Nomor 4 Tahun 2023	29 Desember 2023	878.923.594.453,00

Sumber: *BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025*

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue secara umum tidak sepenuhnya memenuhi batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Dari lima tahun anggaran yang dianalisis, hanya APBK Tahun Anggaran 2020 yang disahkan lebih awal, yakni pada 21 Januari 2020. Sementara itu, APBK Tahun Anggaran 2021 hingga 2024 seluruhnya disahkan pada akhir bulan Desember tahun sebelumnya, yang

secara teknis sudah mendekati atau bahkan melewati batas waktu ideal sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pola ini mencerminkan tantangan dalam konsistensi perencanaan anggaran, yang dapat berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan di awal tahun anggaran. Secara umum, APBK tersebut terdiri dari:

2.2.1.2 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Anggaran Pendapatan Kabupaten Simeulue dikelompokkan ke dalam tiga komponen utama, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
2) Pendapatan Transfer, meliputi transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer dari Pemerintah Pusat mencakup dana perimbangan, dana insentif daerah, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), sedangkan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang berasal dari hibah, dana darurat, serta pendapatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang relatif stabil, meskipun terjadi fluktuasi antara kenaikan dan penurunan anggaran. Kebijakan keuangan daerah selama periode ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2017–2022 dan RPD 2023–2026. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja daerah, serta mendorong investasi yang produktif dan terukur.

Untuk mendukung sasaran tersebut, strategi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan melalui penguatan aspek penerimaan daerah. Di antaranya, penerimaan dari pajak dan retribusi diarahkan untuk peningkatan layanan publik, hasil pengelolaan aset dipakai memperkuat kapasitas usaha daerah, serta pemanfaatan dana transfer seperti DAU, DAK, dan dana bagi hasil disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan prioritas daerah. Fluktuasi total pendapatan daerah yang terjadi selama lima tahun terakhir mencerminkan dinamika ekonomi serta kebijakan fiskal, sehingga diperlukan strategi fiskal yang adaptif dan efisien guna menjaga kesinambungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Simeulue.

Tabel 2.90. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PENDAPATAN DAERAH	**844.509.438.522,42**	**839.807.660.088,82**	**820.957.268.570,64**	**828.613.591.392,32**	**811.766.241.840,82**	**-0,98**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**96.837.497.099,48**	**127.487.366.439,44**	**77.395.841.554,60**	**71.692.529.122,86**	**78.767.445.122,70**	**-5,03**
Pajak Daerah	5.303.407.081,86	6.184.430.065,97	5.286.391.921,01	6.278.177.236,40	5.703.595.043,16	1,84
Retribusi Daerah	1.436.520.621,75	3.393.661.656,25	3.326.577.860,00	1.065.927.099,00	5.750.371.984,00	41,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.014.055.009,00	4.869.313.504,00	5.142.468.378,00	5.161.472.121,00	4.816.985.889,00	-1,00
Lain-lain PAD yang Sah	78.746.971.429,95	106.370.133.566,14	56.853.818.655,50	52.249.491.313,09	53.990.513.565,37	-9,00
Zakat	6.336.542.956,92	6.669.827.647,08	6.786.584.740,09	6.937.461.353,37	8.505.978.641,17	7,64
PENDAPATAN TRANSFER	**725.998.461.204,00**	**695.410.579.863,00**	**736.737.011.708,04**	**743.954.520.486,00**	**723.597.678.737,00**	**-0,08**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	490.513.268.234,00	540.254.208.004,00	519.417.966.880,00	574.484.721.760,00	561.360.788.620,00	3,43
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	201.699.216.628,00	151.351.258.151,00	182.997.227.619,51	126.177.574.404,00	136.641.792.295,00	-9,28
Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.785.976.342,00	3.805.113.708,00	34.321.817.208,53	43.292.224.322,00	25.595.097.822,00	-6,71
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**21.673.480.218,94**	**16.909.713.786,38**	**6.824.415.308,00**	**12.966.541.783,46**	**9.401.117.981,12**	**-18,85**
Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	57.941.260,48	16.844.060.000,00	0,00	12.924.715.271,42	9.110.019.761,00	254,11
Pendapatan Hibah	21.615.538.958,46	65.653.786,38	6.824.415.308,00	41.826.512,04	291.098.220,12	-65,93

Sumber: *BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (Audited)*

Pendapatan daerah Kabupaten Simeulue periode 2020–2024 menunjukkan tren berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp844.509.438.522,42, turun pada tahun 2021 menjadi Rp839.807.660.088,82 dan kembali berkurang pada tahun 2022 menjadi Rp820.957.268.570,64. Tahun 2023 sempat meningkat menjadi Rp828.613.591.392,32, namun pada tahun 2024 kembali melemah hingga Rp811.766.241.840,82, angka terendah dalam lima tahun terakhir.

Fluktuasi tersebut memperlihatkan ketergantungan yang sangat tinggi pada transfer pemerintah pusat yang setiap tahunnya menyumbang lebih dari delapan puluh lima persen pendapatan daerah. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih kecil dan tidak stabil, bahkan cenderung menurun setelah tahun 2021. Hal ini menyebabkan struktur APBD Simeulue sangat rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional, terutama dalam penyaluran dana perimbangan dan transfer lainnya. Kondisi tersebut menegaskan lemahnya kemandirian fiskal daerah. Pajak dan retribusi masih terbatas, hasil pengelolaan kekayaan daerah stagnan, sementara peningkatan PAD pada tahun 2024 belum mampu menutup pelemahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, strategi diversifikasi sumber PAD melalui intensifikasi pajak, penguatan tata kelola retribusi, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah menjadi penting agar Simeulue tidak terus bergantung pada transfer pusat dan mampu membangun fondasi fiskal yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Simeulue dalam periode 2020–2024 memperlihatkan pola yang tidak stabil dengan fluktuasi tajam dari tahun ke tahun. Pada 2020 PAD tercatat Rp96.837.497.099,48, lalu melonjak signifikan pada 2021 menjadi Rp127.487.366.439,44 atau meningkat lebih dari 31 persen. Namun, setelah itu tren berbalik, di mana PAD anjlok menjadi Rp77.395.841.554,60 pada 2022 dan terus melemah pada 2023 sebesar Rp71.692.529.122,86. Pada 2024 PAD mengalami sedikit perbaikan menjadi Rp78.767.445.122,70, meskipun belum kembali menyamai capaian tahun 2020, apalagi tahun 2021. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal Simeulue masih rapuh karena PAD dipengaruhi oleh penerimaan insidentil, efektivitas pemungutan, dan dinamika ekonomi lokal yang terbatas.

1. Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan komponen PAD lainnya dan cenderung stagnan. Tahun 2020 tercatat Rp5.303.407.081,86, meningkat pada 2021 menjadi Rp6.184.430.065,97, kemudian turun pada 2022 menjadi Rp5.286.391.921,01. Pada 2023 terjadi kenaikan kembali ke angka Rp6.278.177.236,40, tetapi pada 2024 turun lagi menjadi Rp5.703.595.043,16.

Stagnasi ini menggambarkan sempitnya basis pajak daerah Simeulue yang terutama bergantung pada sektor jasa, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, serta pajak penerangan jalan. Mengingat Simeulue adalah daerah kepulauan dengan keterbatasan akses transportasi dan aktivitas pariwisata yang masih rendah, potensi pajak dari sektor ini relatif terbatas. Fluktuasi kecil tiap tahun lebih banyak dipengaruhi oleh naik-turunnya aktivitas ekonomi lokal dan belum adanya terobosan kebijakan dalam memperluas basis pajak, misalnya dari sektor properti atau pajak berbasis teknologi.

2. Retribusi Daerah

Komponen retribusi memperlihatkan fluktuasi yang sangat tajam. Pada 2020 nilainya Rp1.436.520.621,75, melonjak menjadi Rp3.393.661.656,25 pada 2021, lalu relatif stabil pada 2022 sebesar Rp3.326.577.860,00. Namun, pada 2023 retribusi anjlok drastis hingga hanya Rp1.065.927.099,00, sebelum naik signifikan menjadi Rp5.750.371.984,00 pada 2024, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Penurunan drastis pada 2023 kemungkinan disebabkan oleh lemahnya intensifikasi pemungutan retribusi, rendahnya kepatuhan masyarakat, serta terbatasnya layanan publik yang dapat dijadikan dasar pemungutan retribusi. Sementara itu, lonjakan besar pada 2024 mengindikasikan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pemungutan, termasuk kemungkinan pemberlakuan regulasi tarif baru dan peningkatan kualitas layanan publik. Fakta ini menunjukkan bahwa retribusi memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun masih sangat bergantung pada efektivitas tata kelola dan konsistensi kebijakan pemungutan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Komponen ini relatif stabil, meskipun kontribusinya cenderung kecil. Pada 2020 tercatat Rp5.014.055.009,00, menurun pada 2021 menjadi Rp4.869.313.504,00, meningkat pada 2022 sebesar Rp5.142.468.378,00, dan Rp5.161.472.121,00 pada 2023, sebelum kembali turun pada 2024 menjadi Rp4.816.985.889,00.

Stabilitas angka ini mencerminkan bahwa BUMD maupun aset daerah di Simeulue belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD. Faktor penyebab utamanya adalah skala usaha BUMD yang masih kecil, terbatasnya diversifikasi unit usaha, serta kapasitas manajerial yang belum memadai. Dengan demikian, meski relatif stabil, kontribusi komponen ini stagnan dan tidak menunjukkan tren pertumbuhan jangka panjang. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan penguatan BUMD agar dapat menjadi sumber pendapatan yang lebih signifikan di masa depan.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Komponen ini merupakan penyumbang terbesar PAD, tetapi juga yang paling tidak stabil. Pada 2020 nilainya Rp78.746.971.429,95, melonjak tajam pada 2021 menjadi Rp106.370.133.566,14, kemudian turun drastis pada 2022 sebesar Rp56.853.818.655,50 dan terus melemah pada 2023 menjadi Rp52.249.491.313,09, sebelum sedikit naik pada 2024 menjadi Rp53.990.513.565,37.

Fluktuasi tajam ini menggambarkan bahwa sebagian besar penerimaan dalam komponen ini bersifat insidentil, misalnya dari denda, hasil lelang, klaim, atau penerimaan tidak tetap lainnya. Lonjakan pada 2021 kemungkinan besar dipengaruhi oleh adanya penerimaan insentif tertentu atau dana insidentil, sementara penurunan pada 2022–2023 menunjukkan ketiadaan sumber tambahan tersebut. Fakta ini menjadi tantangan serius karena meski nilainya besar, sifatnya tidak dapat dijadikan basis perencanaan jangka panjang yang andal.

5. Zakat

Zakat menjadi satu-satunya komponen PAD yang menunjukkan tren pertumbuhan konsisten. Pada 2020 tercatat Rp6.336.542.956,92, meningkat menjadi Rp6.669.827.647,08 pada 2021, naik lagi pada 2022 sebesar Rp6.786.584.740,09, kemudian Rp6.937.461.353,37 pada 2023, mencapai Rp8.505.978.641,17 pada 2024.

Kenaikan yang konsisten ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, sekaligus keberhasilan lembaga pengelola zakat dalam memperluas basis penerimaan dan meningkatkan mekanisme penghimpunan. Selain itu, perkembangan ini menunjukkan adanya potensi besar dari sektor sosial-keagamaan yang dapat menjadi penopang PAD secara stabil. Jika dikelola lebih optimal, zakat tidak hanya menjadi instrumen keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mendukung pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan di Simeulue.

Kondisi PAD Simeulue periode 2020–2024 menunjukkan beberapa poin penting. Pertama, PAD masih sangat rentan terhadap fluktuasi, terutama karena bergantung pada penerimaan insidentil dalam komponen lain-lain PAD yang sah. Kedua, pajak daerah dan retribusi belum mampu memberikan kontribusi signifikan akibat basis yang sempit dan lemahnya intensifikasi pemungutan. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah cenderung stagnan karena BUMD belum berdaya. Keempat, zakat justru tampil sebagai komponen dengan tren pertumbuhan konsisten, yang mencerminkan potensi besar untuk penguatan basis PAD. Dengan kondisi ini, strategi yang diperlukan adalah memperluas basis pajak, memperkuat tata kelola retribusi, mengoptimalkan peran BUMD, dan menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal sosial yang berkelanjutan.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menjadi penopang utama struktur pendapatan Kabupaten Simeulue selama periode 2020–2024. Jumlahnya selalu mendominasi lebih dari 85 persen dari total pendapatan daerah, sehingga perubahan kecil sekalipun pada komponen transfer akan langsung berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Pada tahun 2020 total pendapatan transfer tercatat sebesar Rp725.998.461.204,00, turun pada 2021 menjadi Rp695.410.579.863,00. Tahun 2022 terjadi peningkatan cukup besar hingga Rp736.737.011.708,04, bahkan naik lagi pada 2023 menjadi Rp743.954.520.486,00. Akan tetapi, pada 2024 nilainya kembali turun menjadi Rp723.597.678.737,00. Fluktuasi ini tidak terlepas dari dinamika kebijakan fiskal nasional, baik dalam bentuk alokasi dana perimbangan maupun dana nonperimbangan, yang sifatnya sangat menentukan besaran transfer ke daerah.

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah komponen terbesar dari transfer pusat. Pada tahun 2020 jumlahnya Rp490.513.268.234,00, naik menjadi Rp540.254.208.004,00 pada 2021. Namun pada 2022 sempat menurun ke Rp519.417.966.880,00, sebelum meningkat signifikan pada 2023 hingga Rp574.484.721.760,00. Pada 2024, alokasinya turun kembali menjadi Rp561.360.788.620,00. Pergerakan ini mencerminkan adanya penyesuaian rutin kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH) yang setiap tahunnya dipengaruhi oleh kondisi keuangan negara. Kenaikan pada 2021 dan 2023 kemungkinan besar terkait dengan tambahan dana pemulihan ekonomi pasca pandemi dan stimulus pusat, sedangkan penurunan pada 2022 dan 2024 menggambarkan proses normalisasi fiskal pusat. Dengan kata lain, Simeulue masih sangat bergantung pada arah kebijakan pusat, khususnya dalam distribusi dana perimbangan.

2. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Komponen ini justru memperlihatkan fluktuasi paling tajam. Pada 2020 nilainya mencapai Rp201.699.216.628,00, lalu merosot pada 2021 menjadi Rp151.351.258.151,00. Tahun 2022 sempat naik kembali menjadi Rp182.997.227.619,51, namun pada 2023 menurun drastis hingga Rp126.177.574.404,00, dan sedikit membaik pada 2024 dengan nilai Rp136.641.792.295,00. Besar kecilnya angka ini sangat bergantung pada kebijakan transfer nonperimbangan dari pemerintah pusat, seperti dana insentif daerah, dana penyesuaian, maupun alokasi khusus terkait kinerja dan prioritas nasional. Ketika Simeulue berhasil memenuhi kriteria tertentu, seperti pengendalian inflasi, pengelolaan fiskal sehat, atau kinerja pelayanan publik, maka insentif bisa meningkat. Sebaliknya, ketika tidak memenuhi indikator tersebut, alokasi yang diterima akan berkurang. Inilah yang membuat tren komponen ini sangat tidak stabil setiap tahun.

3. Transfer Antar Daerah

Transfer antar daerah memperlihatkan pola yang lebih ekstrem lagi. Tahun 2020 nilainya sebesar Rp33.785.976.342,00, namun pada 2021 anjlok menjadi hanya Rp3.805.113.708,00. Tahun 2022 meningkat tajam ke Rp34.321.817.208,53, bahkan melonjak lagi pada 2023 hingga Rp43.292.224.322,00, sebelum kembali menurun pada 2024 menjadi Rp25.595.097.822,00. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa mekanisme transfer antar daerah di Simeulue belum konsisten. Besar kecilnya transfer sangat dipengaruhi oleh kerja sama lintas daerah, misalnya dana bagi hasil dari provinsi atau kabupaten lain, serta perjanjian kerja sama program tertentu. Lonjakan pada 2022–2023 dapat mencerminkan adanya proyek kerja sama lintas wilayah yang signifikan, sedangkan penurunan pada 2021 dan 2024 menunjukkan rapuhnya kesinambungan mekanisme tersebut. Hal ini menjadi catatan penting bahwa Simeulue perlu memperkuat kolaborasi fiskal dengan daerah lain agar penerimaan dari transfer antar daerah lebih terjamin.

Secara keseluruhan, pendapatan transfer Simeulue pada periode 2020–2024 menegaskan dominasi transfer pusat dalam menopang APBD. Ketergantungan ini membawa konsekuensi bahwa setiap perubahan kebijakan nasional langsung memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Dana perimbangan relatif stabil namun tetap berfluktuasi mengikuti kondisi keuangan negara, transfer pusat lainnya sangat bergantung pada capaian indikator kinerja, sementara transfer antar daerah masih bersifat insidentil dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, meski transfer menjadi tulang punggung keuangan Simeulue, sifatnya yang fluktuatif menimbulkan risiko tinggi bagi keberlanjutan fiskal daerah. Ke depan, strategi untuk memperkuat PAD menjadi kunci agar Simeulue tidak terlalu rentan terhadap dinamika kebijakan transfer pusat maupun antar daerah.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen lain-lain pendapatan yang sah selama periode 2020–2024 memang bukan penyumbang utama dalam struktur pendapatan Kabupaten Simeulue, namun tetap memiliki peran penting sebagai pelengkap dalam menopang kapasitas fiskal daerah. Nilai realisasinya berfluktuasi cukup tajam, yang menunjukkan bahwa pos ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor insidentil. Pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp21.673.480.218,94, kemudian turun menjadi Rp16.909.713.786,38 pada 2021. Tahun 2022 justru mengalami penurunan signifikan hingga hanya Rp6.824.415.308,00, sebelum meningkat kembali pada 2023 sebesar Rp12.966.541.783,46, dan melemah lagi pada 2024 menjadi Rp9.401.117.981,12. Pergerakan ini mencerminkan bahwa sumber penerimaan dari kategori lain-lain pendapatan yang sah tidak dapat diandalkan secara jangka panjang, karena sangat bergantung pada kebijakan dan momentum tertentu.

1. Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Komponen ini menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Pada tahun 2020 nilainya hanya Rp57.941.260,48, kemudian melonjak drastis pada 2021 hingga mencapai Rp16.844.060.000,00. Namun pada 2022, penerimaan dari pos ini nihil atau tidak terealisasi sama sekali. Tahun 2023 kembali muncul sebesar Rp12.924.715.271,42, dan pada 2024 menurun lagi menjadi Rp9.110.019.761,00. Fluktuasi tajam ini disebabkan karena sumber penerimaan pada pos ini biasanya berasal dari denda, hasil sitaan, kompensasi tertentu, atau penerimaan insidentil lainnya yang sifatnya tidak berulang setiap tahun. Lonjakan tahun 2021 dan 2023 dapat diasosiasikan dengan adanya realisasi penerimaan khusus atau penyelesaian kewajiban hukum/administratif tertentu, sementara ketiadaan penerimaan pada 2022 menandakan tidak adanya kejadian yang memicu masuknya pendapatan ke dalam pos ini.

2. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir dan cenderung tidak konsisten. Pada tahun 2020 realisasinya mencapai Rp21.615.538.958,46, angka yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya. Pada 2021, penerimaan hibah turun sangat tajam menjadi hanya Rp65.653.786,38, dan pada 2022 sempat naik kembali menjadi Rp6.824.415.308,00. Namun pada 2023 jumlahnya kembali menurun drastis hingga hanya Rp41.826.512,04, dan pada 2024 sedikit membaik menjadi Rp291.098.220,12, meskipun tetap jauh di bawah capaian awal periode. Penurunan ini menegaskan bahwa hibah, baik dari pemerintah pusat, lembaga donor, maupun pihak swasta, tidak dapat dijadikan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berkurangnya program hibah berbasis proyek, ketatnya persyaratan penerimaan hibah, maupun pergeseran prioritas lembaga donor ke wilayah lain.

Jika ditinjau secara keseluruhan, lain-lain pendapatan yang sah di Kabupaten Simeulue memperlihatkan karakteristik yang tidak stabil dan sangat bergantung pada kondisi eksternal. Angkanya cenderung mengalami lonjakan besar ketika terdapat penerimaan insidentil, seperti hibah proyek atau hasil lelang, namun kembali menurun tajam ketika momentum tersebut tidak ada. Hal ini menegaskan bahwa komponen ini bukanlah sumber pendapatan yang dapat diproyeksikan dengan pasti. Dari sisi tata kelola fiskal, kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk menempatkan pos lain-lain pendapatan yang sah hanya sebagai tambahan, bukan sebagai sumber utama.

2.2.1.3 Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut:

1) Belanja Operasi, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.
2) Belanja Modal, yaitu untuk pembelian atau pembangunan aset tetap seperti jalan, gedung, dan infrastruktur lainnya.
3) Belanja Tidak Terduga (BTT), digunakan untuk keperluan mendesak dan darurat seperti bencana alam.
4) Belanja Transfer, seperti transfer ke desa atau bantuan keuangan antar daerah.

Belanja daerah Kabupaten Simeulue difokuskan untuk meningkatkan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, dan penguatan daya saing daerah. Pola realisasi belanja selama lima tahun terakhir menunjukkan konsistensi dalam mendukung program prioritas pembangunan, sekaligus mencerminkan arah kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target pembangunan daerah. Meskipun terjadi fluktuasi akibat dinamika fiskal dan pandemi COVID-19, realisasi belanja menunjukkan respons yang adaptif, serta komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Tabel 2.91. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun Realisasi					
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
BELANJA DAERAH	**815.256.628.198,87**	**872.989.130.173,28**	**809.950.545.261,30**	**835.932.995.808,65**	**859.666.663.392,60**	**1,33**
BELANJA OPERASI	**542.860.925.825,43**	**608.338.061.518,82**	**582.767.815.909,08**	**608.146.889.876,80**	**638.719.649.433,14**	**4,15**
Belanja Pegawai	349.209.322.156,20	307.823.730.672,22	311.596.491.555,70	344.627.773.218,24	373.015.949.701,59	1,66
Belanja Barang dan Jasa	187.596.078.129,46	277.326.752.902,58	254.130.473.068,13	244.098.264.244,56	234.620.348.268,55	5,75
Belanja Bunga	498.039,77	2.183.008,02	284.143,25	210.000,00	0,00	-100,00
Belanja Subsidi	298.238.500,00	202.499.500,00	160.632.500,00	7.464.000,00	1.000.000.000,00	35,32
Belanja Hibah	3.956.789.000,00	8.242.477.586,00	4.473.151.583,00	9.098.376.156,00	17.395.533.908,00	44,80
Belanja Bantuan Sosial	1.800.000.000,00	14.740.417.850,00	12.406.783.059,00	10.314.802.258,00	12.687.817.555,00	62,94
BELANJA MODAL	**99.814.585.272,94**	**94.006.951.920,52**	**72.627.116.905,00**	**75.869.452.230,85**	**66.822.204.038,46**	**-9,55**
Belanja Modal Tanah	91.762.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.399.299.841,00	19.863.653.245,83	16.434.465.206,16	21.797.190.168,98	26.528.791.575,72	8,14
Belanja Gedung dan Bangunan	21.886.276.671,00	22.049.221.077,69	14.566.263.406,61	29.192.332.013,87	7.940.574.191,44	-22,39
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.370.389.375,00	52.019.077.597,00	41.363.775.292,23	24.290.907.148,00	17.936.118.806,00	-24,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.066.856.714,94	75.000.000,00	262.613.000,00	589.022.900,00	14.416.719.465,30	37,22

Uraian	Tahun Realisasi					
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
BELANJA TAK TERDUGA	**7.548.387.700,00**	**7.412.721.820,00**	**2.800.670.280,00**	**1.588.417.500,00**	**325.853.800,00**	**-54,42**
Belanja Tak terduga	7.548.387.700,00	7.412.721.820,00	2.800.670.280,00	1.588.417.500,00	325.853.800,00	-54,42
BELANJA TRANSFER	**165.032.729.400,50**	**163.231.394.913,94**	**151.754.942.167,22**	**150.328.236.201,00**	**153.798.956.121,00**	**-1,75**
Belanja Bagi Hasil	780.003.116,50	789.353.813,94	796.601.722,22	0,00	688.580.921,00	-3,07
Belanja Bantuan Keuangan	164.252.726.284,00	162.442.041.100,00	150.958.340.445,00	150.328.236.201,00	153.110.375.200,00	-1,74

Sumber: *BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (Audited)*

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah Kabupaten Simeulue sepanjang 2020–2024. Realisasinya menunjukkan tren naik-turun dengan kecenderungan meningkat di akhir periode. Pada 2020 tercatat Rp542.860.925.825,43, meningkat menjadi Rp608.338.061.518,82 pada 2021. Namun, pada 2022 terjadi penurunan menjadi Rp582.767.815.909,08, sebelum kembali naik ke Rp608.146.889.876,80 pada 2023, dan mencapai Rp638.719.649.433,14 pada 2024. Fluktuasi ini memperlihatkan upaya penyesuaian kebijakan fiskal, di mana efisiensi dilakukan di tengah keterbatasan pendapatan, namun kebutuhan pelayanan publik tetap menuntut peningkatan belanja, terutama pada sektor pegawai dan pelayanan dasar.

1. Belanja Pegawai

Komponen ini merupakan bagian dominan dari belanja operasi. Pada 2020 nilainya Rp349.209.322.156,20, turun signifikan menjadi Rp307.823.730.672,22 pada 2021. Penurunan ini erat kaitannya dengan kebijakan efisiensi aparatur, pembatasan rekrutmen, dan pengetatan anggaran birokrasi. Namun, pada 2022 belanja pegawai mulai meningkat ke Rp311.596.491.555,70, naik lebih besar lagi pada 2023 sebesar Rp344.627.773.218,24, hingga mencapai Rp373.015.949.701,59 pada 2024. Tren kenaikan kembali ini menunjukkan bahwa faktor penyesuaian gaji, tunjangan, serta kebutuhan tenaga kerja di sektor pelayanan publik tidak dapat dihindari, sehingga belanja pegawai tetap menjadi beban utama APBD.

2. Belanja Barang dan Jasa

Pergerakannya menunjukkan pola fluktuasi cukup tajam. Tahun 2020 sebesar Rp187.596.078.129,46, melonjak pada 2021 hingga Rp277.326.752.902,58, lalu turun menjadi Rp254.130.473.068,13 pada 2022. Tren menurun berlanjut pada 2023 dengan nilai Rp244.098.264.244,56, dan semakin rendah pada 2024 sebesar Rp234.620.348.268,55. Lonjakan 2021 dapat dihubungkan dengan kebutuhan tambahan untuk pemulihan pasca-pandemi, termasuk penyediaan sarana kesehatan, bantuan operasional, dan dukungan kegiatan pembangunan. Sedangkan tren penurunan setelahnya mencerminkan adanya konsolidasi fiskal, upaya efisiensi pengadaan, serta penekanan terhadap pengeluaran rutin.

3. Belanja Bunga

Jumlahnya relatif sangat kecil dan hampir tidak memberi pengaruh signifikan pada struktur belanja daerah. Pada 2020 tercatat hanya Rp498.039,77, meningkat sedikit menjadi Rp2.183.008,02 pada 2021, lalu menurun menjadi Rp284.143,25 pada 2022, Rp210.000,00 pada 2023, dan bahkan nol pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa Simeulue memiliki beban utang yang sangat minim, sehingga kewajiban pembayaran bunga tidak menjadi masalah berarti bagi fiskal daerah.

4. Belanja Subsidi

Komponen ini mengalami penurunan tajam sejak awal periode. Pada 2020 nilainya Rp298.238.500,00, turun menjadi Rp202.499.500,00 pada 2021, lalu Rp160.632.500,00 pada 2022, dan merosot drastis pada 2023 hanya Rp7.464.000,00. Namun, pada 2024 kembali meningkat menjadi Rp1.000.000.000,00. Pola ini menandakan bahwa subsidi bukanlah prioritas utama dalam struktur belanja Simeulue. Kenaikan kembali pada 2024 menunjukkan adanya kebutuhan tertentu, misalnya subsidi transportasi atau sektor strategis lain yang dianggap mendesak.

5. Belanja Hibah

Pada 2020 realisasinya Rp3.956.789.000,00, naik menjadi Rp8.242.477.586,00 pada 2021. Tahun 2022 sempat menurun ke Rp4.473.151.583,00, lalu melonjak tajam pada 2023 sebesar Rp9.098.376.156,00, bahkan hampir dua kali lipat pada 2024 mencapai Rp17.395.533.908,00. Tren kenaikan di akhir periode menunjukkan adanya peningkatan peran hibah dalam mendukung organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan kegiatan sosial keagamaan. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pemerintah daerah mulai memfokuskan sebagian belanjanya untuk memperkuat kolaborasi dengan aktor nonpemerintah.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bansos memperlihatkan pola yang sangat dinamis. Pada 2020 nilainya Rp1.800.000.000,00, melonjak drastis pada 2021 hingga Rp14.740.417.850,00. Tahun 2022 turun menjadi Rp12.406.783.059,00, lalu menurun lagi ke Rp10.314.802.258,00 pada 2023, dan kembali naik ke Rp12.687.817.555,00 pada 2024. Lonjakan pada 2021 erat kaitannya dengan kebutuhan penanganan dampak sosial-ekonomi pandemi, sementara tren penurunan berikutnya menandakan adanya pergeseran kebijakan dari bantuan langsung menuju program pemberdayaan masyarakat. Namun, kenaikan pada 2024 memperlihatkan respons terhadap kebutuhan sosial masyarakat yang kembali meningkat.

B. Belanja Modal

Belanja modal Kabupaten Simeulue pada periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 realisasinya tercatat Rp99.814.585.272,94, lalu turun menjadi Rp94.006.951.920,52 pada 2021. Penurunan semakin besar pada 2022 dengan nilai Rp72.627.116.905,00. Tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp75.869.452.230,85, namun pada 2024 justru menurun lagi ke Rp66.822.204.038,46, angka terendah selama periode lima tahun terakhir. Fluktuasi ini memperlihatkan bahwa ruang fiskal Simeulue untuk pembangunan fisik dan investasi jangka panjang semakin terbatas, meski tetap ada alokasi pada sektor-sektor strategis.

1. Belanja Modal Tanah

Komponen ini hanya muncul pada 2020 dengan realisasi **Rp91.762.671,00**, dan tidak lagi dialokasikan pada 2021–2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak lagi melakukan pengadaan tanah baru, melainkan fokus pada optimalisasi aset tanah yang telah ada. Minimnya alokasi juga mencerminkan keterbatasan fiskal, sehingga pengadaan tanah tidak menjadi prioritas.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Komponen ini menunjukkan tren positif dengan kecenderungan meningkat, terutama di akhir periode. Pada 2020 realisasinya Rp19.399.299.841,00, naik sedikit pada 2021 menjadi Rp19.863.653.245,83. Tahun 2022 sempat menurun ke Rp16.434.465.206,16, namun kembali meningkat pada 2023 menjadi Rp21.797.190.168,98, dan melonjak pada 2024 sebesar Rp26.528.791.575,72. Pola ini mencerminkan adanya prioritas pengadaan sarana pendukung pemerintahan dan pelayanan publik, seperti kendaraan dinas, alat kesehatan, maupun perangkat teknologi. Lonjakan pada 2024 dapat ditafsirkan sebagai upaya modernisasi pelayanan berbasis peralatan yang lebih efisien.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pergerakan anggaran ini menunjukkan pola fluktuasi tajam. Pada 2020 nilainya Rp21.886.276.671,00, naik tipis pada 2021 menjadi Rp22.049.221.077,69, lalu turun cukup drastis pada 2022 menjadi Rp14.566.263.406,61. Tahun 2023 justru melonjak besar menjadi Rp29.192.332.013,87, tertinggi dalam periode lima tahun, namun pada 2024 turun tajam menjadi Rp7.940.574.191,44. Fluktuasi ini dapat dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan. Lonjakan pada 2023 menandakan adanya proyek besar yang dilaksanakan sekaligus, sedangkan penurunan pada 2024 mencerminkan keterbatasan pendanaan sehingga proyek baru ditunda atau dipangkas.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Komponen ini memiliki porsi besar pada awal periode, namun menurun tajam dari tahun ke tahun. Pada 2020 nilainya Rp54.370.389.375,00, turun tipis ke Rp52.019.077.597,00 pada 2021. Tahun 2022 menurun signifikan menjadi Rp41.363.775.292,23, lalu pada 2023 turun lagi menjadi Rp24.290.907.148,00, dan mencapai titik terendah pada 2024 sebesar Rp17.936.118.806,00. Penurunan ini menunjukkan bahwa belanja infrastruktur dasar, seperti jalan dan irigasi, semakin terpinggirkan akibat keterbatasan ruang fiskal. Padahal sektor ini penting untuk konektivitas antarwilayah dan penguatan sektor pertanian.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Komponen ini sangat fluktuatif dengan perubahan tajam dari tahun ke tahun. Pada 2020 nilainya Rp4.066.856.714,94, lalu turun drastis pada 2021 menjadi hanya Rp75.000.000,00. Tahun 2022 naik sedikit ke Rp262.613.000,00, meningkat lagi pada 2023 menjadi Rp589.022.900,00, dan melonjak tinggi pada 2024 dengan realisasi Rp14.416.719.465,30. Lonjakan besar pada 2024 kemungkinan besar berasal dari pengadaan aset strategis yang tidak rutin, seperti teknologi informasi, aset budaya, atau aset penunjang pelayanan daerah lainnya. Fluktuasi ekstrem ini menunjukkan bahwa pos ini sangat dipengaruhi oleh proyek insidentil, bukan kebutuhan rutin tahunan.

C. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga di Kabupaten Simeulue sepanjang 2020–2024 relatif kecil dibandingkan total belanja daerah, dan cenderung terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2020 tercatat sebesar Rp7.548.387.700,00, sedikit menurun pada 2021 menjadi Rp7.412.721.820,00. Tahun 2022 turun lebih tajam menjadi Rp2.800.670.280,00, kemudian berkurang lagi pada 2023 sebesar Rp1.588.417.500,00, dan mencapai titik terendah pada 2024 hanya Rp325.853.800,00. Penurunan yang signifikan ini menggambarkan bahwa kondisi darurat atau kebutuhan belanja mendesak semakin terkendali, sehingga alokasi anggaran pada pos ini semakin ditekan.

Komponen ini sepenuhnya terdiri atas belanja tak terduga yang dialokasikan untuk menghadapi keadaan darurat, bencana, atau kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Angkanya yang cukup besar pada 2020–2021 erat kaitannya dengan penanganan dampak pandemi Covid-19 serta kebutuhan respons cepat terhadap situasi krisis. Namun, setelah memasuki 2022 hingga 2024, anggaran ini semakin kecil seiring berkurangnya tekanan darurat, normalisasi kondisi sosial-ekonomi, dan meningkatnya kepercayaan bahwa kebutuhan mendesak dapat ditangani melalui pos belanja rutin. Dengan demikian, tren penurunan ini mencerminkan pergeseran prioritas fiskal ke arah belanja yang lebih terencana dan produktif.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer Kabupaten Simeulue dalam periode 2020–2024 memperlihatkan kecenderungan relatif stabil dengan sedikit penurunan di pertengahan periode, lalu mengalami kenaikan kembali di akhir periode. Pada 2020 realisasinya sebesar Rp165.032.729.400,50, turun tipis pada 2021 menjadi Rp163.231.394.913,94. Tahun 2022 mengalami penurunan lebih signifikan menjadi Rp151.754.942.167,22, dan berlanjut pada 2023 sebesar Rp150.328.236.201,00.

Namun, pada 2024 meningkat kembali menjadi Rp153.798.956.121,00. Pola ini memperlihatkan bahwa meskipun transfer tetap konsisten menjadi bagian penting dari belanja daerah, alokasinya masih sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal daerah maupun kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah.

1. Belanja Bagi Hasil

Komponen ini relatif kecil dalam struktur belanja transfer, namun tetap mencerminkan kewajiban daerah dalam membagi hasil penerimaan tertentu. Pada 2020 nilainya Rp780.003.116,50, sedikit naik pada 2021 menjadi Rp789.353.813,94, dan meningkat lagi pada 2022 sebesar Rp796.601.722,22. Namun pada 2023 realisasinya nihil, yang menunjukkan tidak adanya alokasi pembagian hasil pada tahun tersebut, kemungkinan karena penurunan basis penerimaan yang harus dibagikan. Pada 2024 komponen ini kembali muncul dengan nilai Rp688.580.921,00, meski lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Komponen ini mendominasi hampir seluruh belanja transfer dengan porsi di atas 99% setiap tahunnya. Pada 2020 realisasinya mencapai Rp164.252.726.284,00, turun sedikit pada 2021 menjadi Rp162.442.041.100,00. Tahun 2022 turun cukup tajam menjadi Rp150.958.340.445,00, kemudian kembali turun pada 2023 menjadi Rp150.328.236.201,00, sebelum meningkat lagi pada 2024 menjadi Rp153.110.375.200,00. Stabilitas angka ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan keuangan, baik ke pemerintah desa, lembaga tertentu, maupun organisasi yang mendapat dukungan keuangan dari APBD.

2.2.1.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus dalam APBD, dan terdiri atas dua komponen utama:

a. Penerimaan Pembiayaan, seperti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pencairan dana cadangan, dan penerimaan pinjaman daerah.
b. Pengeluaran Pembiayaan, seperti penyertaan modal pemerintah daerah (investasi), pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada 2021 terjadi peningkatan signifikan sebesar 34,4% dibanding tahun sebelumnya. Namun, tahun 2022 mengalami penurunan tajam 35,6%, sebelum kembali naik 7,1% di 2023. Pada 2024, realisasi pembiayaan kembali turun 15,2%.

Tabel 2.92. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PEMBIAYAAN DAERAH	**73.407.676.967,99**	**98.665.618.821,94**	**63.484.148.742,48**	**67.990.719.259,44**	**57.671.314.843,11**	**-5,85**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**69.907.676.967,99**	**95.665.618.821,94**	**59.484.148.742,48**	**66.490.719.259,44**	**57.671.314.843,11**	**-4,70**
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	69.907.676.967,99	95.665.618.821,94	59.484.148.742,48	66.490.719.259,44	57.671.314.843,11	-4,70
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**3.500.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**4.000.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0,00**	**-100,00**
Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	-100,00
PEMBIAYAAN NETTO	**66.407.676.967,99**	**92.665.618.821,94**	**55.484.148.742,48**	**64.990.719.259,44**	**57.671.314.843,11**	**-3,46**

Sumber: *BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (Audited)*

Dari sisi penerimaan, komponen terbesar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang menjadi sumber dominan sepanjang periode. Sedangkan dari sisi pengeluaran, penyertaan modal daerah berfluktuasi, bahkan pada 2024 tidak lagi dialokasikan. Pembiayaan daerah sangat dipengaruhi oleh besaran SiLPA. Fluktuasi besar tiap tahun menunjukkan adanya ketergantungan pada sisa anggaran serta penyesuaian kebutuhan penyertaan modal.

A. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Simeulue sepanjang 2020–2024 seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Ketergantungan penuh pada SILPA menunjukkan bahwa daerah belum memanfaatkan instrumen pembiayaan lain, seperti pinjaman daerah. Pola realisasi penerimaan pembiayaan ini memperlihatkan tren yang tidak stabil. Pada 2020, tercatat Rp69.907.676.967,99 dan melonjak signifikan pada 2021 menjadi Rp95.665.618.821,94. Namun, pada 2022 terjadi penurunan tajam ke Rp59.484.148.742,48, lalu kembali meningkat pada 2023 sebesar Rp66.490.719.259,44, sebelum melemah lagi di 2024 menjadi Rp57.671.314.843,11.

Kondisi ini menandakan bahwa pengelolaan kas daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menyerap belanja dan realisasi pendapatan. Peningkatan SILPA biasanya menunjukkan adanya efisiensi atau keterlambatan penyerapan belanja, sedangkan penurunan SILPA di akhir periode dapat menjadi indikator adanya perbaikan dalam perencanaan dan realisasi anggaran.

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

SILPA sebagai satu-satunya komponen penerimaan pembiayaan memperlihatkan bahwa manajemen APBD sangat ditentukan oleh hasil kinerja tahun sebelumnya. Kenaikan SILPA pada 2021 mengindikasikan akumulasi kas yang besar, yang mungkin berasal dari ketidakterserapan belanja pasca pandemi. Namun, pada 2022 terjadi koreksi yang cukup dalam, mencerminkan penyerapan belanja lebih efektif. Fluktuasi di tahun-tahun berikutnya memperlihatkan bahwa meskipun efisiensi dilakukan, SILPA tetap muncul dalam jumlah signifikan, sehingga ke depan perlu strategi untuk menjaga keseimbangan antara perencanaan dan realisasi.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah bersumber dari Penyertaan Modal Daerah, dengan nilai yang relatif kecil jika dibandingkan penerimaan, namun cukup penting karena mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung badan usaha milik daerah (BUMD) atau bentuk investasi lainnya. Realisasi menunjukkan kecenderungan menurun. Pada 2020 tercatat Rp3.500.000.000,00, menurun ke Rp3.000.000.000,00

pada 2021, meningkat kembali pada 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00, lalu turun drastis menjadi Rp1.500.000.000,00 pada 2023, dan tidak direalisasikan pada 2024.

Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan daerah dalam pengelolaan pembiayaan keluar. Berkurangnya alokasi penyertaan modal hingga nihil di 2024 mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menempatkan modal pada BUMD, mungkin karena keterbatasan fiskal atau hasil evaluasi kinerja penyertaan modal yang kurang optimal.

1. Penyertaan Modal Daerah

Pola fluktuasi penyertaan modal memperlihatkan bahwa pada awal periode masih terdapat upaya memperkuat BUMD melalui suntikan modal. Namun, setelah 2022, tren ini semakin ditekan hingga akhirnya dihentikan pada 2024. Hal ini dapat dimaknai sebagai langkah konsolidasi fiskal, di mana pemerintah lebih memfokuskan pembiayaan untuk belanja yang bersifat langsung pada pelayanan publik, dibandingkan menempatkan modal pada unit usaha yang manfaat ekonominya belum terlalu signifikan bagi pendapatan asli daerah.

C. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto sebagai selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan memperlihatkan pola yang sangat dipengaruhi oleh SILPA. Pada 2020, realisasi sebesar Rp66.407.676.967,99, kemudian meningkat drastis pada 2021 menjadi Rp92.665.618.821,94. Akan tetapi, pada 2022 turun tajam menjadi Rp55.484.148.742,48. Tahun 2023 membaik dengan capaian Rp64.990.719.259,44, namun kembali menurun pada 2024 sebesar Rp57.671.314.843,11.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pembiayaan netto masih sangat volatil. Tingginya nilai pada 2021 dapat dihubungkan dengan tingginya SILPA, sedangkan penurunan pada 2022 dan 2024 memperlihatkan semakin kecilnya sisa lebih anggaran yang terbawa ke tahun berikutnya. Dari sisi kebijakan fiskal, hal ini sebenarnya positif, karena semakin kecil SILPA berarti semakin efektif perencanaan dan realisasi anggaran. Ke depan, tantangan bagi pemerintah daerah adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan belanja dengan penerimaan, sehingga pembiayaan netto dapat dikelola lebih stabil, tidak terlalu besar, namun tetap memadai untuk menopang defisit anggaran bila terjadi.

Tabel 2.93. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Surplus/(Defisit)	29.252.810.323,55	-33.181.470.084,46	11.006.723.309,34	-7.319.404.416,33	-47.900.421.551,78	13.12
Pembiayaan Netto	66.407.676.967,99	92.665.618.821,94	55.484.148.742,48	64.990.719.259,44	57.671.314.843,11	-3.46
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	**95.660.487.291,54**	**59.484.148.737,48**	**66.490.872.051,82**	**57.671.314.843,11**	**9.770.893.291,33**	**-43.47**

Sumber: BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (Audited)

2.2.1.5 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah salah satu komponen laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada akhir periode anggaran. Laporan ini mencerminkan tiga unsur utama, yaitu :

a. Aset – semua sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.
b. Kewajiban – utang atau beban pemerintah daerah kepada pihak lain yang harus diselesaikan di masa depan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
c. Ekuitas – hak residual atas aset pemerintah daerah setelah dikurangi kewajiban, yang mencerminkan kekayaan bersih daerah.

Neraca daerah bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah, digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pengelolaan keuangan, serta sebagai alat pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah.

Untuk lebih rinci mengenai kondisi Neraca Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.94. Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
ASET	**1.678.123.633.372,59**	**1.651.145.348.790,44**	**1.602.109.777.775,09**	**1.586.079.130.087,78**	**1.466.190.857.747,00**	**-3,32**
ASET LANCAR	**130.461.064.810,79**	**101.218.173.230,24**	**110.204.172.472,94**	**101.226.352.567,15**	**34.360.097.293,65**	**-28,36**
Kas dan Setara Kas	**95.662.310.399,54**	**63.222.075.385,66**	**66.519.575.760,41**	**57.681.246.186,42**	**9.770.893.291,33**	**-43,47**
Kas di Kas Daerah	88.642.583.374,69	54.462.832.594,70	60.959.548.392,24	55.134.163.959,96	6.018.803.913,03	-48,95
Kas di Bendahara Penerimaan	41.494.416,26	5.585.500,00	0,00	0,00	0,00	N/A
Kas di Bendahara Pengeluaran	17.600,00	0,00	37.476,00	3.148.800,00	78.778.701,00	N/A
Kas di BLUD	1.482.529.951,18	7.809.854.857,90	5.285.815.650,73	2.557.621.906,72	1.600.691.577,59	1,94
Kas Dana BOS	4.615.601.714,26	153.087.548,14	240.827.773,55	4.477.640,40	51.216,40	-94,23
Kas Dana Kapitasi pada FK TP	876.021.943,74	771.884.296,46	4.527.442,92	67.179.916,03	18.056.294,31	-62,11
Kas Lainnya	4.061.399,41	18.830.588,46	28.819.024,97	9.931.343,31	0,00	N/A
Piutang Pajak Daerah	**2.300.661.819,70**	**2.426.349.190,70**	**2.560.202.972,70**	**2.695.947.403,70**	**2.974.250.558,70**	**6,63**
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.300.661.819,70	2.426.349.190,70	2.560.202.972,70	2.695.947.403,70	2.974.250.558,70	6,63
Piutang Retribusi Daerah	**0,00**	**0,00**	**62.496.000,00**	**33.456.000,00**	**783.706.800,00**	N/A
Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	6,00	757.390.800,00	N/A
Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	62.496.000,00	33.456.000,00	26.316.000,00	N/A

Uraian	Tahun Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**0,00**	**0,00**	**325.111,72**	**8.327.159.834,00**	**9.606.025.789,00**	**N/A**
Piutang Pendapatan BLUD	0,00	0,00	325.111,72	8.327.159.834,00	9.606.025.789,00	N/A
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	**2.959.608.772,00**	**2.568.441.325,00**	**0,00**	**21.099.699,00**	**0,00**	**N/A**
Piutang Dana Perimbangan	2.959.608.772,00	2.568.441.325,00	0,00	21.099.699,00	0,00	N/A
Piutang Transfer Antar Daerah	**3.662.386.566,00**	**5.567.874.024,00**	**6.322.225.430,00**	**6.421.160.171,00**	**0,00**	**N/A**
Piutang Bagi Hasil	3.662.386.566,00	5.567.874.024,00	6.322.225.430,00	6.421.160.171,00	0,00	N/A
Piutang Lainnya	**5.494.780.495,82**	**8.041.152.923,82**	**6.676.220.504,82**	**2.292.955.123,82**	**2.287.955.123,82**	**-20,1**
Uang Muka	5.494.780.495,82	8.041.152.923,82	6.676.220.504,82	2.292.955.123,82	2.287.955.123,82	-20,1
Penyisihan Piutang	**-1.947.756.635,05**	**-1.918.871.704,87**	**-2.038.793.921,70**	**-4.113.851.901,22**	**-4.310.461.816,35**	22,26
Penyisihan Piutang Pendapatan	-851.136.114,28	-845.890.386,96	-946.853.232,88	-1.957.387.537,40	-2.154.497.452,53	25,62
Penyisihan Piutang Lainnya	-1.096.620.520,77	-1.072.927.317,91	-1.091.940.688,82	-2.156.464.363,82	-2.155.964.363,82	19,42
Beban Dibayar Dimuka	**7.916.666,64**	**2.916.666,66**	**119.522.250,00**	**0,00**	**7.961.100,00**	**N/A**
Beban Dibayar Dimuka-Sewa	7.916.666,64	2.916.666,66	119.522.250,00	0,00	7.961.100,00	N/A
Persediaan	**22.321.156.726,14**	**21.308.235.419,27**	**29.982.398.364,99**	**27.867.180.050,43**	**13.239.766.447,15**	-12,08
Barang Pakai Habis	22.321.156.726,14	21.308.235.419,27	29.982.398.364,99	27.867.180.050,43	13.239.766.447,15	-12,08
JUMLAH ASET LANCAR	**130.461.064.810,79**	**97.539.186.523,78**	**107.810.868.499,65**	**101.226.352.567,15**	**34.360.097.293,65**	-25,3

Uraian	Tahun Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
INVESTASI JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.622.204.134,00**	**88.126.264.603,00**	**N/A**
JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**N/A**
Investasi Jangka Panjang Permanen	**106.394.584.186,43**	**102.229.495.598,00**	**99.710.530.767,00**	**98.622.204.134,00**	**88.126.264.603,00**	**-4,71**
Penyertaan Modal	106.394.584.186,43	102.229.495.598,00	99.710.530.767,00	98.622.204.134,00	88.126.264.603,00	-4,71
JUMLAH INVESTASI PERMANEN	**106.394.584.186,43**	**102.229.495.598,00**	**99.710.530.767,00**	**98.622.204.134,00**	**88.126.264.603,00**	**-4,71**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**106.394.584.186,43**	**102.229.495.598,00**	**99.710.530.767,00**	**98.622.204.134,00**	**88.126.264.603,00**	**-4,71**
ASET TETAP	**1.418.599.689.733,37**	**1.429.297.910.276,66**	**1.371.241.252.217,44**	**1.358.170.339.166,63**	**1.321.446.554.330,35**	**-1,78**
Tanah	**92.703.572.180,48**	**100.947.186.470,48**	**101.894.412.024,48**	**101.894.412.024,48**	**101.894.412.024,48**	**2,36**
Peralatan dan Mesin	**366.107.242.326,65**	**388.144.331.689,65**	**402.613.720.594,15**	**437.203.805.017,13**	**461.540.351.310,13**	**5,90**
Gedung dan Bangunan	**676.077.189.416,15**	**699.330.778.265,15**	**701.253.026.627,40**	**726.663.482.583,27**	**749.094.807.903,38**	**2,59**
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**911.922.532.753,00**	**934.369.953.588,60**	**994.089.137.256,23**	**1.001.342.537.586,23**	**1.003.632.024.954,23**	**2,42**
Aset Tetap Lainnya	**16.905.474.522,00**	**16.613.391.162,00**	**16.613.391.162,00**	**15.441.913.102,00**	**18.712.580.073,21**	**2,56**
Konstruksi Dalam Pengerjaan	**92.242.790.831,30**	**133.063.172.285,99**	**98.593.745.700,62**	**129.236.534.968,62**	**143.357.027.189,08**	**11,65**
Akumulasi Penyusutan	**-737.359.112.296,21**	**-843.170.903.185,21**	**-943.816.181.147,44**	**-1.053.612.346.115,10**	**-1.156.784.649.124,16**	**N/A**
JUMLAH ASET TETAP	**1.418.599.689.733,37**	**1.429.297.910.276,66**	**1.371.241.252.217,44**	**1.358.170.339.166,63**	**1.321.446.554.330,35**	**-1,78**

Uraian	Tahun Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N/A
ASET LAINNYA	22.668.294.642,00	22.078.756.392,00	23.347.126.291,00	28.060.234.220,00	22.257.941.520,00	-0,46
Tagihan Jangka Panjang	26.838.000,00	26.838.000,00	26.838.000,00	26.838.000,00	26.838.000,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	426.200.000,00	426.200.000,00	583.913.000,00	724.813.100,00	744.715.400,00	14,93
Aset Lain-lain	22.449.737.372,00	21.913.467.872,00	21.737.258.957,00	21.737.258.957,00	21.737.258.957,00	-0,80
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-234.480.730,00	-287.749.480,00	-341.382.450,00	-393.761.837,00	-393.761.837,00	14,18
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	1.340.498.784,00	5.965.086.000,00	142.891.000,00	N/A
JUMLAH ASET LAINNYA	22.668.294.642,00	22.078.756.392,00	23.347.126.291,00	28.060.234.220,00	22.257.941.520,00	-0,46
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET	1.678.123.633.372,59	1.651.145.348.790,44	1.602.109.777.775,09	1.586.079.130.087,78	1.466.190.857.747,00	-3,31
KEWAJIBAN	6.032.961.696,00	15.545.006.806,72	19.007.772.772,29	23.639.540.003,04	45.871.556.017,06	64,22
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.032.961.696,00	15.545.006.806,72	19.007.772.772,29	25.639.540.003,04	45.871.556.017,06	64,22
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	17.600,00	201.634.960,00	365.905.236,00	0,00	0,00	N/A
Pendapatan Diterima Dimuka	141.956.525,00	85.783.758,00	83.989.287,00	107.278.184,00	105.382.333,00	-7,32
Utang Belanja	5.891.005.171,00	13.341.414.172,00	17.080.949.428,70	21.899.859.297,92	44.143.645.917,06	63,63
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	1.830.390.158,72	1.476.928.820,59	1.632.402.521,12	1.622.527.767,00	N/A

Uraian	Tahun Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2020 (Rp.)	2021 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)	
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**6.032.961.696,00**	**15.545.006.806,72**	**19.007.772.772,29**	**23.639.540.003,04**	**45.871.556.017,06**	**64,22**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utang Dalam Negeri	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utang Jangka Panjang Lainnya	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**6.032.961.696,00**	**15.545.006.806,72**	**19.007.772.772,29**	**23.639.540.003,04**	**45.871.556.017,06**	**64,22**
EKUITAS	**1.672.090.654.077,19**	**1.635.686.125.741,72**	**1.585.495.308.976,09**	**1.562.439.590.084,74**	**1.420.319.301.729,94**	**-3,99**
EKUITAS	**1.672.090.654.077,19**	**1.635.686.125.741,72**	**1.585.495.308.976,09**	**1.562.439.590.084,74**	**1.420.319.301.729,94**	**-3,99**
Ekuitas	**1.672.090.654.077,19**	**1.635.686.125.741,72**	**1.585.495.308.976,09**	**1.562.439.590.084,74**	**1.420.319.301.729,94**	**-3,99**
Ekuitas	1.672.090.654.077,19	1.635.686.125.741,72	1.585.495.308.976,09	1.562.439.590.084,74	1.562.439.590.084,74	-1,68
Surplus/Defisit-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	142.120.288.354,80	N/A
JUMLAH EKUITAS	**1.672.090.654.077,19**	**1.635.686.125.741,72**	**1.585.495.308.976,09**	**1.562.439.590.084,74**	**1.420.319.301.729,94**	**-3,99**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1.678.123.615.773,19**	**1.651.231.132.548,44**	**1.604.503.081.748,38**	**1.586.079.130.087,78**	**1.466.190.857.747,00**	**-3,31**

Sumber: BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (Audited)

A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Secara umum, neraca daerah Kabupaten Simeulue 2020–2024 memperlihatkan penurunan signifikan pada total aset, terutama akibat melemahnya kas dan tingginya akumulasi penyusutan aset tetap. Likuiditas daerah menurun tajam, investasi jangka panjang berkurang, sementara aset tetap tetap mendominasi dengan pertumbuhan fisik yang positif meskipun nilai bukunya tergerus penyusutan. Aset lainnya relatif stabil dan tidak memberikan pengaruh besar terhadap total neraca. Kondisi ini menunjukkan bahwa ke depan pemerintah daerah perlu memfokuskan strategi pada penguatan kas dan aset lancar, efisiensi belanja, optimalisasi pemanfaatan aset tetap, serta pengendalian kewajiban, agar keberlanjutan fiskal dan pencapaian sasaran RPJMD dapat terjaga.

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah aset yang dapat digunakan dalam satu tahun anggaran. Penurunan aset lancar Kabupaten Simeulue disebabkan oleh berkurangnya kas dan persediaan, tanpa diimbangi peningkatan piutang yang memadai. Kondisi ini perlu direspons dengan perencanaan keuangan yang lebih strategis untuk menjaga kesehatan fiskal daerah.

Aset lancar Kabupaten Simeulue mengalami fluktuasi sepanjang periode 2020–2024, dengan kecenderungan penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, aset lancar tercatat sebesar Rp 125.892.385.229,20, kemudian menurun menjadi Rp 94.925.226.241,71 di tahun 2021.

Untuk melihat rincian kontribusi aset Lancar 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah

Tabel 2.95. Kontribusi Aset Daerah Tahun 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	Persentase
1	*2*	*3*	*4*
1	**Aset**	**1.466.190.857.747,00**	**100,00**
1.1	Aset Lancar	34.360.097.293,65	2,34
1.2	Investasi Jangka Panjang	88.126.264.603,00	6,01
1.3	Aset Tetap	1.321.446.554.330,35	90,13
1.4	Dana Cadangan	-	-
1.5	Aset Lainnya	22.257.941.520,00	1,52

Sumber: BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (Audited)

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penanaman dana atau pengadaan aset oleh pemerintah daerah untuk mendukung tugas pemerintahan dan pelayanan publik selama lebih dari satu tahun, meliputi aset tetap seperti gedung, infrastruktur, dan fasilitas yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan, serta berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Investasi jangka panjang Kabupaten Simeulue menurun secara bertahap dari Rp106.394.584.186,43 pada 2020, menjadi Rp102.229.495.598,00 pada 2021, lalu Rp99.710.530.767,00 pada 2022, Rp98.622.204.134,00 pada 2023, dan terakhir Rp88.126.264.603,00 pada 2024. Penurunan sebesar Rp18.268.319.583,43 atau 17,1 persen ini menggambarkan menurunnya penyertaan modal jangka panjang.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud milik pemerintah daerah yang digunakan dalam operasional jangka panjang dan tidak untuk dijual, seperti tanah, bangunan, jalan, peralatan, dan infrastruktur yang memberi manfaat berkelanjutan.

Aset tetap menjadi akun terbesar Neraca Daerah Kabupaten Simeulue, meskipun cenderung menurun dari Rp1.418.599.689.733,37 pada 2020 menjadi Rp1.321.446.554.330,35 pada 2024. Ironisnya, kategori aset tetap seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi justru menunjukkan kenaikan nominal. Penurunan total aset tetap disebabkan oleh laju

Akumulasi Penyusutan yang sangat cepat, meningkat dari Rp737.359.112.296,21 menjadi Rp1.156.784.649.124,16. Laju penyusutan yang tinggi ini mencerminkan berkurangnya nilai ekonomis aset fisik daerah seiring waktu, yang bisa mengindikasikan kurangnya investasi baru untuk menggantikan aset yang sudah tua atau usang

4. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan strategis atau mendesak di masa depan guna menjaga stabilitas fiskal daerah. Berdasarkan data, tidak terdapat alokasi maupun realisasi dana cadangan selama periode yang ditampilkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue belum memprioritaskan pembentukan dana cadangan dalam struktur keuangannya.

5. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset milik pemerintah daerah yang tidak termasuk aset lancar, tetap, atau investasi, seperti aset tak berwujud atau dalam penyelesaian. Meskipun nilainya relatif kecil, pencatatan aset ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah secara menyeluruh.

Nilai aset lainnya Kabupaten Simeulue selama 2020–2024 cenderung stabil, dengan fluktuasi ringan. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2023, sedangkan tahun-tahun lainnya relatif seimbang. Tren ini menunjukkan bahwa aset lainnya bukan komponen dominan, namun tetap dijaga konsistensinya dalam struktur aset daerah.

B. Kewajiban

Kewajiban (Liabilitas) dalam Neraca Daerah merepresentasikan utang atau beban pemerintah daerah kepada pihak lain yang harus diselesaikan di masa depan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Struktur kewajiban daerah terdiri dari dua komponen utama, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban daerah Kabupaten Simeulue menunjukkan pertumbuhan yang eksplosif, terutama pada Kewajiban Jangka Pendek yang melonjak dari Rp6.032.961.696,00 pada 2020 menjadi Rp45.871.556.017,06 pada 2024. Ini merefleksikan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan yang sangat tinggi, didorong oleh kenaikan utang belanja yang tumbuh rata-rata 63,5% per tahun. Pertumbuhan utang yang masif ini adalah indikator utama adanya ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan, serta menjadi beban finansial yang signifikan bagi pemerintah daerah.

C. Solvabilitas

Solvabilitas daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi solvabilitas, semakin rendah risiko ketidakmampuan daerah dalam melunasi kewajiban finansialnya.

Rasio solvabilitas daerah Kabupaten Simeulue selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan tajam, yaitu: tahun 2020 0,36%, tahun 2021 0,52%, tahun 2022 0,64%, tahun 2023 1,49%, tahun 2024 3,13%

Walaupun angka ini masih dalam batas aman dibawah 10%, kenaikan hampir 9 kali lipat dalam lima tahun menunjukkan adanya tren peningkatan ketergantungan pada sumber pembiayaan eksternal dan akumulasi kewajiban jangka pendek. Lonjakan kewajiban daerah dari Rp 6.032.961.696,00 pada tahun 2020 menjadi Rp 45.871.556.017,06 pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mulai menghadapi tekanan likuiditas yang berpotensi mengurangi ruang fiskal di masa depan.

Kenaikan kewajiban yang tidak diimbangi pertumbuhan aset baru menyebabkan menurunnya tingkat solvabilitas daerah. Jika tren ini berlanjut, risiko fiskal dapat meningkat, terutama bila sumber pendapatan daerah tidak cukup kuat untuk menutupi beban kewajiban di masa mendatang. Dengan kata lain, struktur keuangan daerah semakin padat kewajiban namun tidak memperlihatkan ekspansi aset produktif yang sepadan.

Untuk menjaga kesehatan solvabilitas, pemerintah daerah Kabupaten Simuelue perlu memperkuat strategi manajemen kewajiban, antara lain:

1. membatasi pembiayaan jangka pendek yang bersifat rutin,
2. memastikan pengendalian utang belanja dan piutang pihak ketiga,
3. serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan diterima dimuka.

Langkah-langkah tersebut akan menekan rasio kewajiban terhadap aset agar tetap berada pada tingkat ideal dan menjaga kepercayaan publik terhadap stabilitas fiskal daerah.

Untuk lebih rinci mengenai kontribusi masing-masing Kewajiban dan Solvabilitas Pemerintah Kabupaten Simeulue tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.96. Kontribusi Kewajiban Tahun 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	Persentase
1	*2*	*3*	*4*
2	**Kewajiban**	**45.871.556.017,06**	**100,00**
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	**45.871.556.017,06**	**100,00**
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	105.382.333,00	0,23
2.1.06	Utang Belanja	44.143.645.917,06	96,23
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.622.527.767,00	3,54
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**45.871.556.017,06**	**100,00**
2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**	**45.871.556.017,06**	**100,00**
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**
	Jumlah Kewajiban	**45.871.556.017,06**	**100,00**

Sumber: BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (Audited)

D. Ekuitas

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban yang mencerminkan kekayaan bersih pemerintah pada suatu saat. Ekuitas terdiri dari beberapa komponen, seperti surplus/defisit operasional, saldo anggaran lebih (SAL), koreksi kesalahan periode lalu, dan dampak perubahan kebijakan akuntansi. Ekuitas juga mencerminkan akumulasi hasil pelaksanaan anggaran dan transaksi lainnya dari tahun ke tahun. Ekuitas menjadi indikator penting untuk menilai kesehatan fiskal, kapasitas pendanaan masa depan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Ekuitas dan Kewajiban pada Neraca Daerah Kabupaten Simeulue priode tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. tahun 2020 hingga 2024 terlihat adanya tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2020 ekuitas tercatat sebesar 1.672.090.654.077,19, kemudian menurun menjadi 1.635.686.125.741,72 pada tahun 2021. Penurunan berlanjut di tahun 2022 dengan nilai ekuitas sebesar 1.585.495.308.976,09, dan pada 2023 masih tercatat stabil di angka 1.562.439.590.084,74. Namun, pada tahun 2024 ekuitas turun cukup signifikan menjadi 1.420.319.301.729,94. Penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh pencatatan defisit operasional (LO) sebesar 142.120.288.354,80 pada tahun tersebut.

Jika dilihat secara total, dalam kurun waktu lima tahun ekuitas mengalami penurunan sekitar 251.771.352.347,25 atau setara dengan hampir 15 persen dari nilai awal 2020. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan pada kondisi fiskal daerah, baik karena peningkatan kewajiban maupun ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja. Hal ini tercermin pula pada jumlah kewajiban dan ekuitas yang pada tahun 2020 sebesar 1.678.123.615.773,19, kemudian menurun menjadi 1.466.190.857.747,00 pada tahun 2024.

Dari sisi pertumbuhan, tren negatif ini menunjukkan perlunya strategi perencanaan keuangan yang lebih hati-hati. Daerah harus fokus pada penguatan pendapatan asli daerah, pengendalian defisit, serta efisiensi belanja agar ekuitas tidak terus tergerus. Selain itu, optimalisasi aset daerah dan pemanfaatan investasi produktif perlu ditingkatkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung prioritas pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Untuk lebih rinci mengenai kontribusi Ekuitas Kabupaten Simeulue 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.97. Kontribusi Ekuitas Tahun 2024

No	Uraian	2024 (Rp)	Persentase
1	*2*	*3*	*4*
3	**Ekuitas**	**1.420.319.301.729,94**	
3.1	**Ekuitas**	**1.420.319.301.729,94**	
3.1.01	**Ekuitas**	**1.420.319.301.729,94**	**100,00**
3.1.01.01	Ekuitas	1.562.439.590.084,74	106,56
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	142.120.288.354,80	9,69
	Jumlah Ekuitas	**1.420.319.301.729,94**	

Sumber: BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (Audited)

2.2.1.6 Opini Badan Pmeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020–2024

Sejak Tahun Anggaran 2020 hingga Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Simeulue secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Capaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Sebagai gambaran atas perkembangan capaian tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.98. Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024

No.	Tahun	Opini BPK Atas LKPD	Ringkasan Opini
1	*2*	*3*	*4*
1	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Pemkab Simeulue memperoleh opini WTP pertama dalam periode lima tahun terakhir; menunjukkan kepatuhan terhadap SAP berbasis akrual.
2	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Konsistensi pelaporan meningkat dengan tindak lanjut hasil audit lebih cepat.
3	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Penguatan sistem pengendalian intern; menjadi WTP ke-8 secara beruntun.
4	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Ditetapkan sebagai WTP ke-9 berturut-turut; mencerminkan tata kelola fiskal yang kredibel dan berkelanjutan.
5	2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Simeulue kembali meraih WTP ke-10; memperkuat kepercayaan publik terhadap akuntabilitas fiskal daerah.

Sumber: BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (*Diolah*)

Capaian opini WTP selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Simeulue telah berhasil mengimplementasikan prinsip good governance dan clean government dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan:

1. Kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah dan penerapan SAP berbasis akrual dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern (SPIP) yang berkelanjutan setiap tahun.
3. Sinergi kelembagaan antara BPKD, Inspektorat, DPRK, dan perangkat daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
4. Konsistensi tindak lanjut rekomendasi BPK, yang menjadi faktor kunci dalam mempertahankan opini WTP secara berturut-turut.

Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan selama periode 2020–2024 menegaskan bahwa tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue telah berada pada tingkat maturitas yang tinggi. Keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan wujud nyata dari budaya kerja birokrasi yang berintegritas, disiplin, dan berorientasi hasil (result-based management).

2.2.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan bagian penting dalam RPJMD yang menggambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendukung pendanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan APBD terdiri dari tiga komponen utama: pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Selain itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, kerangka pendanaan daerah disusun hingga tahun 2030. Hal ini dilakukan untuk memberikan cakupan fiskal jangka menengah yang lebih luas dan menjadi dasar kesinambungan kebijakan pembangunan lintas periode.

Proyeksi keuangan disusun dengan menggunakan pendekatan pertumbuhan tetap tahunan (fixed annual growth rate) atau trend eksponensial sederhana, dengan asumsi pertumbuhan bervariasi antara 0,25% hingga 1,5% per tahun, tergantung karakteristik masing-masing komponen pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat secara bertahap, sementara pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah disesuaikan tren historis dan kebijakan fiskal nasional.

2.2.2.1 Proyeksi Pendapatan

Total Pendapatan Daerah pada tahun 2025 direalisasikan sebesar Rp893.838.415.583,85. Pada tahun 2026, nilai ini sedikit menurun menjadi Rp890.478.864.303,19 atau turun sebesar Rp3.359.551.280,66 (-0,38%) dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi antara turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stagnasi pada pendapatan transfer.

Namun, pada tahun 2027, pendapatan daerah diproyeksikan kembali meningkat menjadi Rp895.550.459.176,21, seiring pemulihan ekonomi daerah dan perbaikan kinerja penerimaan daerah secara umum.

Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2028, yaitu menjadi Rp862.499.020.029,13, atau turun sebesar Rp33.051.439.147,08 (-3,7%) dari tahun sebelumnya. Hal ini utamanya disebabkan oleh berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada tahun 2027, yang berdampak langsung pada menurunnya penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat pada tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2029 dan 2030 menunjukkan upaya pemulihan bertahap, dengan pendapatan daerah masing-masing diproyeksikan mencapai Rp867.633.934.531,87 dan Rp872.801.379.026,17, mencerminkan peningkatan yang bersumber dari sektor PAD dan sinergi pendapatan antar-daerah.

Tabel 2.99. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026-2030

URAIAN	KONDISI AWAL	TAHUN PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)	2030 (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	**893.838.415.583,85**	**890.190.013.361,00**	**903.340.718.258,00**	**882.588.205.480,00**	**889.806.630.318,00**	**900.660.859.438,00**	**0,16**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**87.855.351.068,85**	**90.306.948.846,00**	**93.886.779.680,42**	**99.251.647.477,23**	**103.225.163.952,00**	**106.507.954.545,73**	**3,93**
Pajak Daerah	5.765.000.000,00	7.611.000.000,00	8.516.330.092,81	10.577.493.393,74	11.239.268.327,68	12.301.668.922,15	16,77
Retribusi Daerah	9.442.260.400,00	9.442.260.400,00	10.448.404.928,90	12.542.888.978,19	13.638.317.867,97	14.735.701.452,83	9,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.000.000.000,00	5.451.597.777,15	6.326.712.201,43	6.889.979.323,45	7.453.879.116,68	7.918.417.106,09	9,68
Lain-lain PAD yang Sah	67.648.090.668,85	67.802.090.668,85	68.595.332.457,28	69.241.285.781,85	70.893.698.639,67	71.552.167.064,66	1,13
Pendapatan Transfer	**795.554.516.288,00**	**789.154.516.288,00**	**798.225.390.350,58**	**771.408.009.775,77**	**774.152.918.139,00**	**781.124.356.665,27**	**-0,35**
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	766.638.754.000,00	760.638.754.000,00	769.020.470.439,70	741.611.040.665,78	743.660.979.337,91	750.034.498.476,17	-0,42
Transfer Antar Daerah	28.915.762.288,00	28.515.762.288,00	29.204.919.910,88	29.796.969.109,99	30.491.938.801,09	31.089.858.189,10	1,47
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**10.428.548.227,00**	**10.928.548.227,00**	**11.228.548.227,00**	**11.928.548.227,00**	**12.428.548.227,00**	**13.028.548.227,00**	**4,56**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.428.548.227,00	10.928.548.227,00	11.228.548.227,00	11.928.548.227,00	12.428.548.227,00	13.028.548.227,00	4,56

Sumber : BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (Diolah)

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp87.855.351.068,85. Pada tahun 2026 nilainya naik menjadi Rp90.306.948.846,00, kemudian terus bertambah pada tahun 2027 sebesar Rp93.886.779.680,42, tahun 2028 sebesar Rp99.251.647.477,23, tahun 2029 sebesar Rp103.225.163.952,00, hingga mencapai Rp106.507.954.545,73 pada tahun 2030. Kenaikan ini berarti dalam kurun waktu lima tahun terjadi pertumbuhan PAD sebesar Rp18.652.603.476,88 atau sekitar 21,24%. Perkembangan ini menggambarkan bahwa Simeulue mulai mampu memperluas basis penerimaan daerah dari sumber-sumber asli, meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil.

1. Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah pada tahun 2025 tercatat Rp5.765.000.000,00 dan meningkat konsisten hingga mencapai Rp12.301.668.922,15 pada tahun 2030. Kenaikan Rp6.536.668.922,15 atau lebih dari 113% menunjukkan adanya langkah nyata dari pemerintah daerah dalam memperkuat sektor perpajakan. Peningkatan ini didorong oleh perluasan objek pajak, penyusunan regulasi daerah yang mendukung optimalisasi pemungutan, serta penerapan sistem digital yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari sisi kebijakan, perkembangan ini menandakan keberhasilan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah pada tahun 2025 dan 2026 tetap sebesar Rp9.442.260.400,00, namun mulai meningkat pada 2027 menjadi Rp10.448.404.928,90, naik lagi pada 2028 sebesar Rp12.542.888.978,19, tahun 2029 sebesar Rp13.638.317.867,97, hingga mencapai Rp14.735.701.452,83 pada tahun 2030. Dengan kenaikan Rp5.293.441.052,83 atau 56,1% dalam lima tahun, tren ini menunjukkan bahwa layanan publik yang menjadi dasar pungutan retribusi semakin baik, sehingga masyarakat bersedia membayar lebih atas jasa pelayanan pemerintah daerah. Peningkatan ini mencerminkan kebijakan pelayanan yang lebih berkualitas, meskipun kontribusinya masih terbatas dibanding pajak dan lain-lain PAD.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2025 senilai Rp5.000.000.000,00, kemudian naik menjadi Rp5.451.597.777,15 pada 2026, Rp6.326.712.201,43 pada 2027, Rp6.889.979.323,45 pada 2028, Rp7.453.879.116,68 pada 2029, hingga Rp7.918.417.106,09 pada 2030. Pertumbuhan sebesar 58,37% ini mencerminkan adanya upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah, baik berupa tanah, bangunan, maupun infrastruktur yang sebelumnya belum produktif.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Komponen lain-lain PAD yang sah menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PAD Simeulue. Pada tahun 2025 nilainya Rp67.648.090.668,85, meningkat sedikit pada 2026 menjadi Rp67.802.090.668,85, naik lagi pada 2027 sebesar Rp68.595.332.457,28, tahun 2028 sebesar Rp69.241.285.781,85, tahun 2029 sebesar Rp70.893.698.639,67, hingga mencapai Rp71.552.167.064,66 pada 2030. Kenaikan sekitar Rp3.904.076.395,81 atau 5,77% ini menggambarkan stabilitas meskipun fluktuatif, karena sifatnya insidentil, misalnya dari denda, hasil lelang, maupun penerimaan lain yang sah. Walaupun relatif tidak stabil, kontribusinya yang besar membuat komponen ini menjadi penopang utama PAD Simeulue.

Secara keseluruhan, PAD Kabupaten Simeulue memperlihatkan arah pertumbuhan yang positif dengan peningkatan merata pada setiap komponennya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal, meski kontribusinya terhadap total pendapatan masih terbatas dibandingkan transfer dari pusat.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah Simeulue. Pada tahun 2025 nilainya sebesar Rp795.554.516.288,00, menurun pada 2026 menjadi Rp789.154.516.288,00, kemudian meningkat pada 2027 menjadi Rp798.225.390.350,58. Namun, pada 2028 turun menjadi Rp771.408.009.775,77, sebelum naik kembali pada 2029 sebesar Rp774.152.918.139,00 dan mencapai Rp781.124.356.665,27 pada tahun 2030. Dengan rata-rata kontribusi di atas 85% dari total pendapatan daerah, transfer masih menjadi pilar utama keuangan Simeulue.

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Komponen terbesar dari pendapatan transfer adalah dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2025 dan 2026 jumlahnya tercatat Rp766.638.754.000,00, meningkat tipis pada 2027 menjadi Rp769.020.470.439,70. Namun, pada tahun 2028 nilai ini menurun tajam menjadi Rp741.611.040.665,78, kemudian sedikit pulih pada 2029 sebesar Rp743.660.979.337,91, dan mencapai Rp750.034.498.476,17 pada 2030.

Penurunan yang terjadi pada 2028 disebabkan oleh berakhirnya masa berlaku Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Dana ini sejak tahun 2008 menjadi salah satu instrumen fiskal pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemulihan daerah pascakonflik serta pascabencana, termasuk bagi Kabupaten Simeulue. Nilainya setiap tahun cukup signifikan dan dialokasikan melalui pos dana perimbangan. Dengan dihentikannya penyaluran dana Otsus pada 2028, penerimaan Simeulue dari pemerintah pusat berkurang sekitar Rp20–30 miliar per tahun.

2. Transfer Antar Daerah

Komponen ini relatif kecil, tetapi menunjukkan tren meningkat dari Rp28.915.762.288,00 pada 2025 menjadi Rp31.089.858.189,10 pada 2030. Kenaikan Rp2.174.095.901,10 atau 7,5% menunjukkan adanya peran penting kerjasama antar daerah, terutama dalam mendukung pembangunan lintas wilayah kepulauan.

Pendapatan transfer yang masih sangat dominan memperlihatkan bahwa Simeulue belum sepenuhnya mandiri dalam hal fiskal. Meski stabil dalam jumlah besar, kerentanannya tinggi terhadap kebijakan nasional, sehingga memperkuat PAD menjadi tantangan strategis jangka panjang.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah juga berkontribusi dalam menambah kapasitas fiskal daerah. Pada tahun 2025 nilainya sebesar Rp10.428.548.227,00, meningkat pada 2026 menjadi Rp10.928.548.227,00, tahun 2027 sebesar Rp11.228.548.227,00, tahun 2028 sebesar Rp11.928.548.227,00, tahun 2029 sebesar Rp12.428.548.227,00, hingga mencapai Rp13.028.548.227,00 pada tahun 2030. Kenaikan Rp2.600.000.000,00 atau 24,92% dalam lima tahun menunjukkan konsistensi pertumbuhan, meskipun porsinya relatif kecil. Penerimaan ini biasanya bersumber dari hibah, bantuan pemerintah, maupun inisiatif insidentil yang sesuai peraturan perundangan. Meski jumlahnya tidak besar, tren pertumbuhan yang stabil memberikan tambahan fleksibilitas dalam anggaran daerah. Dalam jangka panjang, komponen ini dapat dioptimalkan melalui kerjasama dengan lembaga donor, sektor swasta, maupun partisipasi masyarakat.

2.2.2.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja ini wujud nyata dari intervensi kebijakan fiskal daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara struktural, belanja daerah terbagi menjadi empat kelompok utama: Belanja Operasi, yang ditujukan untuk mendukung kelangsungan kegiatan pemerintahan sehari-hari; Belanja Modal, yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan aset tetap; Belanja Tidak Terduga, yang dialokasikan untuk penanganan kondisi darurat dan kejadian luar biasa; serta Belanja Transfer, yang merupakan pengeluaran daerah untuk mendukung kinerja pemerintah desa atau lembaga lain melalui mekanisme bantuan keuangan dan bagi hasil.

Dalam kerangka RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029, total belanja daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan relatif stabil sepanjang tahun perencanaan. Dimulai dari Rp894.090.013.361,00 pada tahun 2025, angka ini meningkat menjadi Rp906.840.718.258,00 pada tahun 2026, lalu mencapai Rp885.788.205.480,00 pada 2027. Namun demikian, pada tahun 2028 hingga 2030 terjadi tren penurunan total belanja daerah, dengan nilai masing-masing Rp892.606.630.318,00, Rp903.160.859.438,00, dan proyeksi Rp911.000.000.000,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berakhirnya alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh yang selama ini menjadi bagian dari sumber pembiayaan transfer pemerintah pusat. Dengan berakhirnya dana tersebut pada tahun anggaran 2027, terjadi penyesuaian fiskal yang mempengaruhi kemampuan belanja daerah, terutama dalam mendanai belanja modal dan transfer. Adapun uraian proyeksi belanja daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2026-2030 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.100. Proyeksi Belanja Kabupaten Simeulue Tahun 2026-2030

URAIAN	KONDISI AWAL	TAHUN PROYEKSI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	2025 (Rp.)	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)	2030 (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
BELANJA DAERAH	**864.266.414.700,65**	**893,575,013,361,00**	**905.831.591.052,99**	**885.672.918.938,00**	**892,481,358,045,00**	**902,916,859,438,00**	**0,90**
BELANJA OPERASI	**630.638.019.222,55**	**657.205.266.563,12**	**600.842.109.651,10**	**584.101.217.806,14**	**588.636.552.191,91**	**595.656.609.860,70**	**-1,14**
Belanja Pegawai	395.966.895.038,70	360.833.981.833,61	272.052.215.477,40	265.736.461.644,00	267.781.989.095,40	270.948.257.831,40	−6,77
Belanja Barang dan Jasa	214.789.879.580,85	290.590.674.577,65	322.925.210.230,31	312.638.238.579,58	315.083.593.280,51	318.869.452.101,47	9,04
Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	490.272.785,18	497.313.774,92	485.684.251,12	489.421.145,98	495.208.053,74	−9,98
Belanja Hibah	4.297.985.069,00	205.914.569,77	208.871.785,47	203.987.385,47	205.556.881,31	207.987.382,57	−18,83
Belanja Bantuan Sosial	14.583.259.534,00	5.084.422.796,91	5.157.442.082,99	5.036.836.946,97	5.075.590.787,71	5.135.604.491,59	−12,82
BELANJA MODAL	**73.210.170.262,55**	**80.404.952.904,76**	**146.785.819.118,96**	**147.066.604.351,73**	**148.150.934.058,51**	**149.725.455.945,52**	**18,93**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.666.235.276,00	21.067.901.544,19	39.659.514.738,37	41.177.104.663,31	41.484.867.658,69	41.858.452.073,99	156,78
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.524.315.490,55	5.115.095.195,83	23.963.391.605,65	24.978.718.442,55	25.171.340.351,98	25.468.974.649,79	58,94
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.101.671.900,00	51.555.239.917,97	80.457.898.824,71	78.269.023.182,99	78.832.642.079,57	79.704.468.815,42	27,73
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.917.947.596,00	2.666.716.246,77	2.705.013.950,23	2.641.758.062,88	2.662.083.968,27	2.693.560.406,32	-16,64
BELANJA TIDAK TERDUGA	**6.837.541.869,55**	**4.412.455.066,59**	**4.475.823.974,27**	**4.371.158.260,04**	**4.404.790.313,82**	**4.456.872.483,68**	**-6,88**
Belanja Tidak Terduga	6.837.541.869,55	4.412.455.066,59	4.475.823.974,27	4.371.158.260,04	4.404.790.313,82	4.456.872.483,68	-6,88
BELANJA TRANSFER	**153.580.683.346,00**	**151.552.338.826,53**	**153.728.838.308,66**	**150.133.938.520,09**	**151.289.081.480,76**	**153.077.921.148,10**	**-0,05**
Belanja Bagi Hasil	2.907.331.246,00	908.204.254,48	921.247.313,43	899.704.239,22	906.626.638,17	917.346.576,96	-13,54
Belanja Bantuan Keuangan	150.673.352.100,00	150.644.134.572,05	152.807.590.995,23	149.234.234.280,87	150.382.454.842,59	152.160.574.571,14	0,21

Sumber : BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (Diolah)

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja Kabupaten Simeulue. Pada tahun 2025 realisasinya mencapai Rp630.638.019.222,55. Angka ini meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp657.205.266.563,12, lalu bertambah lagi pada tahun 2027 menjadi Rp666.553.981.542,15. Namun, pada tahun 2028 terjadi penurunan menjadi Rp653.791.445.381,46, sebelum kembali meningkat menjadi Rp658.864.107.750,21 pada tahun 2029 dan Rp666.714.871.358,96 pada tahun 2030. Perubahan ini menunjukkan pola relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, di mana kenaikan di awal periode mencerminkan dorongan pelayanan publik yang semakin besar, sedangkan penurunan pada tahun 2028 erat kaitannya dengan berkurangnya kapasitas fiskal akibat penghentian Dana Otonomi Khusus Aceh.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2025 berjumlah Rp395.966.895.038,70, kemudian turun signifikan pada tahun 2026 menjadi Rp360.833.981.833,61. Penurunan ini menandakan adanya kebijakan efisiensi belanja aparatur, baik melalui pembatasan rekrutmen baru, restrukturisasi jabatan, maupun rasionalisasi tunjangan. Setelah itu, belanja pegawai berangsur meningkat menjadi Rp365.926.398.607,49 pada tahun 2027, sedikit turun menjadi Rp365.293.942.464,45 pada tahun 2028, lalu kembali naik menjadi Rp368.107.641.322,98 pada tahun 2029 dan Rp372.460.202.828,81 pada tahun 2030. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meski ada upaya pengendalian, faktor inflasi dan kebutuhan tenaga kerja di sektor pelayanan dasar tetap mendorong peningkatan belanja pegawai.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa mengalami lonjakan signifikan dari Rp214.789.879.580,85 pada tahun 2025 menjadi Rp290.590.674.577,65 pada tahun 2026, atau naik hampir Rp75,8 miliar. Kenaikan ini merefleksikan peningkatan kegiatan operasional pemerintahan, penyediaan fasilitas publik, serta dukungan terhadap program pembangunan prioritas. Pada tahun 2027, belanja barang dan jasa naik lagi menjadi Rp294.763.955.291,28, namun menurun pada tahun 2028 menjadi Rp282.770.994.333,45. Penurunan sekitar Rp12 miliar ini terkait langsung dengan berkurangnya pendapatan daerah pasca berakhirnya Dana Otsus. Meski demikian, pada tahun 2029 dan tahun 2030 angkanya kembali meningkat menjadi Rp284.985.897.612,23 dan Rp288.415.868.602,25, menandakan pemulihan kapasitas fiskal serta adanya upaya menjaga kualitas pelayanan publik.

3. Belanja Subsidi

Komponen belanja subsidi berjumlah Rp1.000.000.000,00 pada tahun 2025, kemudian turun menjadi Rp490.272.785,18 pada tahun 2026. Selanjutnya nilainya relatif stabil, yakni Rp497.313.774,92 pada tahun 2027, Rp485.684.251,12 pada tahun 2028, Rp489.421.145,98 pada tahun 2029, dan Rp495.208.053,74 pada tahun 2030. Penurunan lebih dari 50 persen sejak tahun 2026 ini mencerminkan adanya perubahan strategi, di mana belanja subsidi dipangkas agar tidak terlalu membebani fiskal, dengan prioritas diarahkan pada belanja produktif lain.

4. Belanja Hibah

Belanja hibah sebesar Rp4.297.985.069,00 pada tahun 2025, namun turun drastis menjadi hanya Rp205.914.569,77 pada tahun 2026. Pada tahun-tahun berikutnya nilainya tetap rendah, yakni Rp208.871.785,47 pada tahun 2027, Rp203.987.385,47 pada tahun 2028, Rp205.556.881,31 pada tahun 2029, dan Rp207.987.382,57 pada tahun 2030. Penurunan lebih dari 95 persen ini jelas menggambarkan kebijakan pengendalian hibah yang lebih ketat, agar belanja daerah lebih terarah pada prioritas pembangunan strategis dan tidak digunakan untuk belanja yang kurang produktif.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada tahun 2025 mencapai Rp14.583.259.534,00, namun pada tahun 2026 turun drastis menjadi Rp5.084.422.796,91. Setelah itu nilainya relatif stabil di kisaran Rp5 miliar, yakni Rp5.157.442.082,99 pada tahun 2027, Rp5.036.836.946,97 pada tahun 2028, Rp5.075.590.787,71 pada tahun 2029, dan Rp5.135.604.491,59 pada tahun 2030. Penurunan lebih dari Rp9,4 miliar pada tahun 2026 menandakan adanya perubahan pendekatan kebijakan, dari bantuan langsung menuju program pemberdayaan masyarakat berbasis kinerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja sosial dan mendorong kemandirian penerima manfaat.

Secara keseluruhan, belanja operasi Simeulue menunjukkan adanya strategi konsolidasi fiskal. Pada awal periode, terdapat pemangkasan besar pada belanja pegawai, hibah, dan bantuan sosial untuk memberi ruang pada belanja barang dan jasa. Penurunan pada tahun 2028 memperlihatkan dampak langsung berakhirnya Dana Otsus Aceh, yang membuat daerah harus menekan belanja agar seimbang dengan penerimaan yang lebih kecil. Namun, kenaikan kembali pada tahun 2029 dan tahun 2030 menunjukkan adanya pemulihan, dengan fokus tetap pada belanja barang/jasa dan pegawai sebagai tulang punggung pelayanan publik.

B. Belanja Modal

Belanja modal Kabupaten Simeulue pada tahun 2025 berjumlah Rp73.210.170.262,55. Angka ini meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp80.919.952.904,76, kemudian kembali naik pada tahun 2027 menjadi Rp82.082.074.432,92. Namun, pada tahun 2028 terjadi penurunan menjadi Rp77.491.663.318,41, sebelum kembali naik secara perlahan pada tahun 2029 menjadi Rp78.048.650.773,21 dan mencapai Rp78.911.194.447,26 pada tahun 2030. Pola ini memperlihatkan bahwa belanja modal sangat dipengaruhi oleh kondisi pendapatan daerah. Peningkatan tajam pada awal periode mencerminkan dorongan pembangunan infrastruktur, sedangkan penurunan pada tahun 2028 erat kaitannya dengan berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang selama ini berperan penting mendukung belanja pembangunan fisik.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal untuk peralatan dan mesin pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp25.524.315.490,55, lalu turun drastis pada tahun 2026 menjadi Rp5.115.095.195,83. Setelah itu nilainya relatif stabil di sekitar Rp5 miliar, yakni Rp5.188.554.979,63 pada tahun 2027, Rp5.067.222.278,46 pada tahun 2028, Rp5.106.209.906,46 pada tahun 2029, dan Rp5.166.585.650,31 pada tahun 2030. Penurunan besar lebih dari Rp20 miliar menunjukkan bahwa kebutuhan pengadaan peralatan utama sudah banyak dipenuhi pada tahun sebelumnya, sehingga alokasi berikutnya lebih diarahkan untuk pemeliharaan dan penggantian terbatas.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2025 belanja gedung dan bangunan hanya sebesar Rp2.666.235.276,00, namun melonjak hampir sepuluh kali lipat pada tahun 2026 menjadi Rp21.582.901.544,19. Kenaikan besar ini menandakan adanya program pembangunan fasilitas publik berskala besar, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, atau gedung pemerintahan. Setelah itu nilainya relatif stabil di kisaran Rp21–22 miliar, yaitu Rp21.892.861.617,38 pada tahun 2027, Rp21.380.904.040,22 pada tahun 2028, Rp21.545.410.487,19 pada tahun 2029, dan Rp21.800.163.074,43 pada tahun 2030. Meskipun sempat turun sedikit pada tahun 2028, belanja ini tetap dijaga tinggi karena menyangkut pembangunan infrastruktur layanan dasar.

3. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja untuk jalan, jaringan, dan irigasi pada tahun 2025 senilai Rp28.101.671.900,00, kemudian melonjak tajam pada tahun 2026 menjadi Rp51.555.239.917,97. Pada tahun 2027 nilainya meningkat lagi menjadi Rp52.295.643.885,68, lalu turun pada tahun 2028 menjadi Rp48.401.778.936,85. Setelah itu meningkat tipis pada tahun 2029 menjadi Rp48.734.946.411,29 dan

Rp49.250.885.316,20 pada tahun 2030. Lonjakan pada 2026–2027 menggambarkan prioritas pembangunan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar, sementara penurunan pada 2028 memperlihatkan dampak langsung dari menurunnya transfer pusat setelah Dana Otsus dihentikan.

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp16.917.947.596,00, lalu anjlok pada tahun 2026 menjadi hanya Rp2.666.716.246,77. Setelah itu nilainya stabil di kisaran Rp2,6–2,7 miliar, yaitu Rp2.705.013.950,23 pada tahun 2027, Rp2.641.758.062,88 pada tahun 2028, Rp2.662.083.968,27 pada tahun 2029, dan Rp2.693.560.406,32 pada tahun 2030. Penurunan lebih dari 80 persen menunjukkan adanya pergeseran fokus dari aset tambahan ke infrastruktur prioritas seperti jalan, jaringan, dan fasilitas publik.

Kecenderungan belanja modal Simeulue memperlihatkan dua pola penting. Pertama, adanya lonjakan besar pada 2026–2027 yang diarahkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur fisik, khususnya jalan, jaringan, dan gedung publik. Kedua, adanya penurunan pada tahun 2028 yang menandakan keterbatasan kemampuan fiskal daerah setelah berakhirnya Dana Otsus Aceh. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap menjaga alokasi pada 2029 dan 2030 agar tidak turun lebih jauh, menunjukkan komitmen untuk mempertahankan pembangunan infrastruktur meski ruang fiskal semakin sempit.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan sebagai dana cadangan untuk menghadapi kebutuhan darurat atau kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam, krisis sosial, atau keadaan mendesak lainnya. Pada tahun 2025 belanja ini tercatat sebesar Rp6.837.541.869,55. Namun pada tahun 2026 terjadi penurunan cukup tajam menjadi Rp4.412.455.066,59. Selanjutnya pada tahun 2027 meningkat sedikit menjadi Rp4.475.823.974,27, tetapi kembali menurun pada tahun 2028 menjadi Rp4.371.158.260,04. Pada tahun 2029 angkanya naik tipis menjadi Rp4.404.790.313,82, dan pada tahun 2030 mencapai Rp4.456.872.483,68.

Penurunan lebih dari Rp2,4 miliar dari tahun 2025 ke tahun 2026 mencerminkan adanya kebijakan rasionalisasi belanja darurat, dengan tujuan mengefisiensikan APBD dan mengalihkan sebagian dana ke pos belanja yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Meskipun terjadi fluktuasi kecil, angkanya relatif stabil di kisaran Rp4,3–4,4 miliar.

Pola stabilitas dari tahun 2027 hingga tahun 2030 menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menjaga ketersediaan cadangan fiskal minimal untuk antisipasi risiko darurat, meskipun jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan

keuangan daerah. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, menjaga belanja tidak terduga dalam batas realistis adalah strategi yang tepat agar keseimbangan antara kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kebutuhan pembangunan tetap terjaga.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan alokasi anggaran yang disalurkan kepada pihak ketiga, terutama pemerintah desa, baik dalam bentuk bagi hasil maupun bantuan keuangan. Pada tahun 2025 jumlah belanja transfer Simeulue mencapai Rp153.580.683.346,00. Pada tahun 2026 terjadi penurunan menjadi Rp151.552.338.826,53, kemudian meningkat kembali pada tahun 2027 menjadi Rp153.728.838.308,66. Namun, pada tahun 2028 turun lagi menjadi Rp150.133.938.520,09, sebelum naik pada tahun 2029 menjadi Rp151.289.081.480,76 dan mencapai Rp153.077.921.148,10 pada tahun 2030. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami fluktuasi, belanja transfer cenderung stabil di atas Rp150 miliar, menandakan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2.907.331.246,00, kemudian menurun tajam pada tahun 2026 menjadi hanya Rp908.204.254,48. Setelah itu nilainya relatif stabil di kisaran Rp900 juta, yaitu Rp921.247.313,43 pada tahun 2027, Rp899.704.239,22 pada tahun 2028, Rp906.626.638,17 pada tahun 2029, dan Rp917.346.576,96 pada tahun 2030. Penurunan lebih dari 65 persen pada tahun 2026 menandakan menurunnya potensi pendapatan daerah yang dapat dibagikan kembali ke desa, terutama dari sumber pajak dan retribusi. Stabilitas di tahun-tahun berikutnya menunjukkan bahwa meski nilainya kecil, pemerintah tetap menjaga keberlanjutan mekanisme bagi hasil sebagai kewajiban fiskal kepada desa.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan memiliki porsi terbesar dalam belanja transfer. Pada tahun 2025 jumlahnya Rp150.673.352.100,00, sedikit turun pada tahun 2026 menjadi Rp150.644.134.572,05, lalu meningkat pada tahun 2027 menjadi Rp152.807.590.995,23. Namun, pada tahun 2028 kembali turun menjadi Rp149.234.234.280,87, sebelum naik lagi pada tahun 2029 menjadi Rp150.382.454.842,59 dan mencapai Rp152.160.574.571,14 pada tahun 2030. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa bantuan keuangan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. Penurunan pada tahun 2028 jelas terkait dengan berkurangnya kapasitas pendapatan setelah Dana Otsus Aceh dihentikan, sementara kenaikan kembali pada 2029–2030 menandakan pemulihan kemampuan fiskal meskipun masih terbatas.

Secara keseluruhan, belanja transfer Simeulue relatif stabil di atas Rp150 miliar per tahun dan tetap menjadi instrumen penting untuk mendukung pembangunan desa serta pemerataan antarwilayah. Penurunan belanja bagi hasil sejak tahun 2026 menandakan keterbatasan sumber pendapatan daerah yang bisa dibagikan, sedangkan belanja bantuan keuangan tetap dijaga besarannya karena lebih strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan desa. Fluktuasi kecil yang terjadi, khususnya pada tahun 2028, memperlihatkan dampak nyata dari berakhirnya Dana Otsus Aceh terhadap kemampuan fiskal daerah.

2.2.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena berfungsi sebagai penyeimbang ketika terjadi defisit maupun sebagai wadah penampung saat terjadi surplus. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029 yang diproyeksikan hingga tahun 2030, pembiayaan tidak hanya dilihat sebagai angka pelengkap dalam struktur APBD, melainkan juga sebagai strategi fiskal untuk memastikan kelancaran program pembangunan dan menjaga stabilitas keuangan daerah.

Tabel 2.101. Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Simeulue Tahun 2026-2030

URAIAN	KONDISI AWAL	TAHUN REALISASI					RATA-RATA PETUMBUHAN (%)
	2025	2026 (Rp.)	2027 (Rp.)	2028 (Rp.)	2029 (Rp.)	2030 (Rp.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
PEMBIAYAAN DAERAH	**32.977.264.416,80**	**3.385.000.000,00**	**2.490.872.794,99**	**3.084.713.458,00**	**2.674.727.727,00**	**2.256.000.000,00**	**−7,87**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**32.977.264.416,80**	**3.385.000.000,00**	**2.490.872.794,99**	**3.084.713.458,00**	**2.674.727.727,00**	**2.256.000.000,00**	**−7,87**
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	32.977.264.416,80	3.385.000.000,00	2.490.872.794,99	3.084.713.458,00	2.674.727.727,00	2.256.000.000,00	−7,87
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	32.977.264.416,80	3.385.000.000,00	2.490.872.794,99	3.084.713.458,00	2.674.727.727,00	2.256.000.000,00	−7,87
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**500.000.0000**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**0**
Penyertaan Modal Daerah	500.000.0000	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.0000	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0
Pembiayaan Netto	**32.477.264.416,80**	**1.885.000.000,00**	**990.872.794,99**	**1.584.713.458,00**	**1.174.727.727,00**	**756.000.000,00**	**−12,24**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber : BPKD Kabupaten Simeulue, Tahun 2025 (Diolah)

A. Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun 2025 penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp32.977.264.416,80, angka yang relatif tinggi karena adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya. Kondisi ini biasanya mencerminkan adanya efisiensi atau ketidakmampuan daerah menyerap seluruh anggaran pada tahun berjalan. Namun, mulai tahun 2026 penerimaan pembiayaan menurun drastis menjadi Rp5.200.000.000,00 dan terus mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2030, yaitu Rp5.000.000.000,00 pada 2027, Rp4.700.000.000,00 pada 2028, Rp4.300.000.000,00 pada 2029, dan Rp4.000.000.000,00 pada 2030.

Penurunan tajam dari tahun 2025 ke tahun 2026 mengindikasikan dua hal penting. Pertama, adanya perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran sehingga SiLPA tidak lagi terlalu besar, yang berarti APBD semakin efektif dan efisien digunakan. Kedua, semakin terbatasnya ruang fiskal daerah untuk mengandalkan saldo anggaran tahun lalu sebagai penerimaan pembiayaan. Kondisi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meminimalisir ketergantungan pada pembiayaan non-produktif. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan karena kapasitas fiskal untuk menopang program pembangunan harus semakin bergantung pada pendapatan riil, baik dari PAD maupun transfer pusat.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diarahkan sepenuhnya untuk penyertaan modal daerah. Pada tahun 2025 jumlahnya masih kecil, yaitu Rp500.000.000,00, namun pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp1.500.000.000,00 dan angka ini diproyeksikan bertahan stabil hingga tahun 2030. Peningkatan tiga kali lipat dari 2025 ke 2026 memperlihatkan adanya komitmen strategis pemerintah daerah untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta meningkatkan kapasitas investasi daerah.

Dengan alokasi yang konsisten setiap tahun, penyertaan modal daerah diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian Simeulue, baik dalam bentuk peningkatan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, maupun kontribusi terhadap PAD di masa mendatang. Strategi ini sangat penting mengingat Simeulue sebagai daerah kepulauan memiliki keterbatasan sumber pendapatan. Melalui penguatan BUMD dan kerja sama investasi, pemerintah daerah berupaya membangun basis ekonomi baru yang lebih mandiri.

C. Pembiayaan Netto

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto. Pada tahun 2025, nilai pembiayaan netto sangat tinggi yaitu Rp32.477.264.416,80. Namun pada tahun 2026 nilainya turun drastis menjadi Rp3.700.000.000,00 dan terus menurun secara bertahap menjadi Rp3.500.000.000,00 pada 2027, Rp3.200.000.000,00 pada 2028, Rp2.800.000.000,00 pada 2029, hingga Rp2.500.000.000,00 pada 2030. Tren penurunan ini selaras dengan semakin kecilnya SiLPA sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan.

Mengecilnya pembiayaan netto menggambarkan bahwa ruang fiskal daerah untuk mengandalkan pembiayaan sebagai sumber belanja semakin terbatas. Hal ini dapat dipandang positif karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak lagi terlalu bergantung pada saldo anggaran tahun lalu, namun di sisi lain dapat menekan fleksibilitas fiskal ketika menghadapi kebutuhan mendesak.

Struktur pembiayaan Kabupaten Simeulue periode 2026–2030 menunjukkan konsolidasi fiskal yang lebih disiplin. Penurunan penerimaan pembiayaan dari Rp32,9 miliar pada 2025 menjadi Rp5,2 miliar pada 2026 mencerminkan semakin kecilnya SiLPA sekaligus meningkatnya efektivitas penggunaan APBD. Di sisi lain, alokasi penyertaan modal yang konsisten sebesar Rp1,5 miliar per tahun memperlihatkan strategi jangka panjang memperkuat BUMD, sementara tren penurunan pembiayaan netto menuntut pemerintah daerah lebih kreatif menggali PAD. Dengan arah kebijakan fiskal yang tidak lagi bergantung pada SiLPA besar, strategi ini diharapkan memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

2.3. Evaluasi Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024

Evaluasi hasil capaian pembangunan merupakan instrumen penting dalam menilai sejauh mana program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Evaluasi ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga menjadi bahan strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depan secara lebih adaptif dan berbasis bukti.

Dalam konteks Kabupaten Simeulue, evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020–2024 menjadi sangat relevan karena berada pada fase transisi menuju RPJMD baru 2025–2029 dan perumusan visi jangka panjang Simeulue sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap indikator-indikator kinerja utama pembangunan yang mencakup tiga aspek utama: kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Berikut di tampilkan hasil evaluasi dimaksud pada tabel di bawah ini, yang memuat ringkasan capaian indikator utama pembangunan Kabupaten Simeulue tahun 2020–2024.

Tabel 2.102. Evaluasi Hasil Capaian Pembangunan Kabupaten Simeulue Tahun 2020–2024

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**													
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,00	9,34	9,13	9,48	9,16	9,73	9,55	9,81	9,75	9,89	9,99	99,0
2	Angka usia harapan hidup	Tahun	65,38	65,26	65,53	65,28	65,68	65,48	66,02	65,61	66,30	65,61	66,99	97,9
3	Persentase balita Stunting	%	29,0	29,00	26,0	25,90	23,0	37,20	20,0	30,70	18,0	25,50	14,00	55,6
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,0	70,37	71,0	71,15	70,0	64,44	71,0	70,57	71,5	71,08	72,02	98,7
5	Rasio penduduk yang bekerja	%	90,0	66,52	90,5	67,09	91,0	60,58	93,0	66,45	94,0	67,17	95,00	71,5
6	Kontribusi sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	%	34,0	34,1	34,5	34,6	35,0	35,1	35,0	35,0	35,2	35,1	35,5	98,9
7	Kontribusi sektor pertanian tanaman pangan terhadap PDRB	%	34,0	34,1	34,5	34,6	35,0	35,1	35,0	35,0	35,2	35,1	35,5	98,9
8	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	7,5	7,48	7,6	7,65	7,7	7,72	7,8	7,805	7,9	7,82	8,00	99,94
9	Persentase kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	1,05	1,05	1,08	1,08	1,10	1,10	1,20	1,11	1,25	1,22	1,35	90,4
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,50	1,48	1,55	1,55	1,60	1,61	1,65	1,65	1,70	1,68	1,80	93,3

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
11	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	31,5	31,5	32,0	32,0	32,1	32,1	32,2	32,2	33,4	33,3	34,71	95,9
12	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,0	12,0	12,2	12,3	12,4	12,5	12,5	12,52	12,8	12,7	13,5	94,1
13	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	1,20	1,20	1,25	1,26	1,30	1,32	1,35	1,35	1,38	1,37	1,41	97,2
14	Pertumbuhan Industri	%	0,3	—	0,4	0,50	0,6	0,70	1,0	1,50	1,2	—	—	—
15	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta Rupiah	750	2.274	760	2.460	770	2.688	772	2.935	782	3.150	795	—
16	Persentase Gampong berstatus mandiri	%	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	1,45	2,00	1,45	3,00	2,90	0.007	78,54
B	**ASPEK PELAYAN UMUM**													
1	**PENDIDIKAN**													
1	Akreditasi Sekolah	%	80	78	82	80	85	82	90	83	91	85	9.56	93%
2	**KESEHATAN**													
1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran Hidup	24	22	23	26	22	25	10	24	8	23	1	288%

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2	Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	/1000 Kelahiran Hidup	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
3	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	/1000 satuan penduduk	0,045	0,040	0,046	0,042	0,048	0,045	0,052	0,047	0,057	0,050	0,061	82%
4	Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	/1500 satuan penduduk	0,003	0,002	0,004	0,003	0,005	0,004	0,007	0,004	0,013	0,005	0,017	77%
5	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi luar biasa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
3	**PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**													
1	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	%	50	68,42	55	80,70	60	84,21	75	42,10	80	74,86	100	45%
2	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRW	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	25	n.a	27	n.a	30	n.a
3	Persentase Luas Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	25	n.a	27	n.a	35	n.a
4	Persentase ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik	%	13	13	50	60,77	65	75,59	70.2	84,99	70.5	13	71	120%

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
4	**PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**													
1	Persentase Sistem Jaringan Sarana dan Prasarana Pemukiman	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	30	n.a	40	n.a	60	n.a
2	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	Rumah	n.a	n.a	n.a	6,68	n.a	n.a	250,00	1.031	250	1031	300	27%
3	Rasio rumah layak huni	Rasio	53,01	n.a	56,19	38,85	59,85	38,85	40	43,27	55	43,27	70	80,23
4	Presentase areal kawasan kumuh	%	29,6	29,55	29,6	29,55	29,6	29,55	20	29,55	25	29,55	35	85%
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**													
	Indeks Ketahanan Daerah	~~%~~	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,50/ Sedang	0,29	0,55/ Sedang	0,30	0,59/ Sedang	85%
6	**DINAS SOSIAL**													
	Persentase PSKS/PMKS yang mendapatkan penguatan	~~%~~	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100	n.a	100	60	100	60%
7	**PEMBERDAYAAN PEREMUPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**													
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	77	75	78	77	80	79	85	80	90	82	100	91%

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	78	77,97	78,3	78,27	78,6	78,87	77.47	79,50	77.47	79,41	77.47	98%
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	n.a	n.a	60	59,41	62	61,48	75.30	62,27	76.10	63,91	77.50	82%
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64,7	64,65	65	64,95	65	63,72	60.32	64,79	60.45	64,79	60.99	98%
8	**PANGAN**													
1	Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita	kkal/ kapita/ hari	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1876,98	1.876,5	1877,01	1.880	1879,75	98%
2	Tingkat Ketersediaan Protein Perkapita	gram/ kapita/ hari	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	52,17	51,5	53,35	52,0	55,67	94%
9	**LINGKUNGAN HIDUP**													
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	60	60,83	63.36	63,33	63.46	62,50	63.66	98%
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87	87,00	88	88,63	90	91,48	88.2	91,12	88.3	94,44	88.5	105%
3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	72	71,71	73	81,51	75	81,51	72	82,67	72.8	82,51	73.51	112%
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	51	51,38	52	n.a	54	77,77	75.4	78,82	75.98	79,82	76.91	98%
10	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**													
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	n.a	n.a	0,63	0,6229	0,64	0,6413	0.6962	0,6589	0.6978	0,6695	0.7082	94%

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
11	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**													
	Total Tingkat Kesuburan	Rate	2,60	2,58	2,58	2,57	2,56	2,56	2.65	2,55	2.75	2,54	2.98	103%
12	**PERHUBUNGAN**													
1	Rasio ijin trayek	Rasio	—	n.a	—	n.a	—	n.a	1:5014	0,35	1:4015	0,40	1:4025	—
2	Persentase layanan angkutan darat	%	—	n.a	—	n.a	—	n.a	12	45	10	47	9.5	401%
3	Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Kabupaten	%	—	n.a	—	n.a	—	n.a	5	30	10.12	35	10.89	343%
13	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**													
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Indeks	60	n.a	63	65	66	67	55.35	68	55.75	70	65.78	102%
14	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH**													
1	Persentase koperasi aktif	%	29,0	29,5	29,5	29,8	29,8	30,0	30.23	30,2	31.39	30,23	33.73	100%
15	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**													
1	Jumlah Kwaran yang dibina	Kwaran	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	10	100%
16	**KEBUDAYAAN DAN ADAT**													
1	Jumlah pengunjung objek kebudayaan	Rasio Pengunjung/ 1000	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	50.55	1,5	51.76	1,7	52.78	—
2	Persentase Pelestarian nilai-nilai adat istiadat	%	45	45	46	46	47	47	60,00	49	71,00	50	85,00	96%

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
17	**PERPUSTAKAAN**													
1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0.43	0,27	0.65	0,27	1.08	98%
18	**KEARSIPAN**													
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	40	40	45	45	50	50	6.67	55	5	60	6.77	90%
19	**PARIWISATA**													
1	Lama kunjungan Wisata	Hari	2,5	2,5	2,7	2,7	2,9	2,9	3	3,0	4	3,0	4	96%
2	Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata	Orang	—	n.a	—	n.a	1.100	1.200	50	1.250	100	1.300	200	114%
20	**PERTANIAN**													
1	Peningkatan Produksi daging Ternak Besar	Ton	380	380	385	385	390	390	429.166	395	446.333	396,8	482753	101%
21	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**													
	Rasio ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap Pemakaian Energi Listrik	%	4,5	4,5	5,0	5,0	5,3	5,3	10.55	5,5	10.76	5,58	10.98	98%
22	**PERDAGANGAN**													
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp	450 jt	450 jt	470 jt	470 jt	480 jt	480 jt	1 M	490 jt	2 M	500 jt	6 M	103%

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
22	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**													
1	Nilai Ekspor Perikanan	Rp	1,5 M	1,5 M	1,7 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	3 M	1,9 M	5 M	2,0 M	15 M	111%
2	Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi)	Indeks	92	n.a	94	95	96	97	90.71	99	91.1	100	100	103%
3	Nilai tukar nelayan	Indeks	93	n.a	95	96	97	98	96.71	99	99.1	101	103.2	104%
23	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**													
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
24	**KEUANGAN**													
1	Persentase SILPA terhadap APBD	%	0,020	0,020	0,015	0,015	0,012	0,012	1	0,011	1.15	0,010	2	104%
2	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20,0	20,1	20,0	20,5	20,0	20,7	20	21,0	20	21,0	20	105%
3	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10,0	10,2	10,0	10,3	10,0	10,1	10	10,0	10	10,0	10	101%
4	Penetapan APBD	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	100%
25	**KEPEGAWAIAN, PENDIDKAN DAN PELATIHAN**													
1	ASN yang mengikuti pendidikan formal	%	15	15	16	16	18	18	25	19	30	20	40	96%

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2	ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis	%	10	10	12	12	14	14	12	16	14	18	17	98%
3	sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	%	5	5	7	7	10	10	40.55	12	40.98	15	45.98	97%
26	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**													
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	10	10	15	15	20	20	1.15	22	5.45	25	20.18	94%
27	**PENGAWASAN**													
1	Meningkatnya level Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	1	1	1	1	2	2	Level 2	2	Level 2	2	Level 3	100%
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK RI Perwakilan Aceh	%	65	65	70	70	75	75	100	80	100	85	100	98%
3	Persentase Pelanggaran PNS	%	60	60	65	65	70	70	100	72	100	75	100	98%
4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Inspektorat	%	70	70	75	75	80	80	100	82	100	85	100	98%
28	**SEKRETARIAT DPRK**													
1	Persentase Qanun yang ditetapkan	Rasio	80	80	85	85	90	90	2	92	4	95	4	100%

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
29	**SYARIAT ISLAM**													
	Angka Melek Alquran	Angka	75	75	76	76	77	77	3322	78	6900	79	6900	98%
30	**MAJELIS ADAT ACEH**													
	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat	Rasio	55	55	56	56	57	57	70	59	73	60	80	95%
31	**MPU**													
	Persentase Pengkaderan Ulama	%	8	8	9	9	9	9	20	10	20	10	35	100%
32	**BAITUL MAL**													
1	Rasio Pendapatan dan Pendistribusian serta Pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Agama	%	80	80	81	81	82	82	85	83	90	83	95	98%
33	**MPD**													
1	Persentase sekolah yang menyelenggarakan kurikulum islam	%	12	12	13	13	14	14	20	15	25	15	35	96%
34	**SEKRETARIAT DAERAH**													
1	**Pemerintahan dan Otonomi Daerah**													
1	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	%	60	60	65	65	70	70	5	72	5	75	9	92%

No	Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Capaian Kinerja											Tingkat Capaian 2020 s.d. 2024 (%
			RPJMD 2017-2022						RPD 2023-2026					
			2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	TargetAkhir 2026	
			T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
2	**Ekonomi**													
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	49	49	50	50	51	51	41.45	52	42.47	53	43.58	104%
35	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**													
1	Persentase Pembinaan LSM/ORMAS	%	70	70	72	72	74	74	5,00	75	5,50	76	7,20	100%
2	Skor aspek hak-hak politik	Skor	70	70	71	71	72	72	60,94	73	65,50	74	66,95	98%
3	Skor aspek lembaga demokrasi	Skor	68	68	69	69	70	70	74,04	71	74,25	72	74,99	103%
36	**TRANSMIGRASI**													
	Persentase ketersediaan sarana prasarana kawasan transmigrasi	%	50	50	52	52	55	55	70,00	57	73,00	60	79,00	96%
37	**PENANAMAN MODAL**													
1	Rasio daya serap tenaga kerja perusahaan sekala nasional	%	0,15	0,15	0,18	0,18	0,19	0,19	0,1/0,1	0,20	0,1/0,1	0,20	0,6/0,5	100%
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	25 M	25 M	27 M	27 M	29 M	29 M	1 M	30 M	1 M	31,5 M	35,5 M	104%
3	Jumlah investor (PMDN/PMA)	Investor	10	10	11	11	12	12	3/1	12	3/1	16	24/6	108%

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPD Kabupaten Simeulue Tahun 2023-2026

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Capaian pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simeulue periode 2020–2024 memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti. Dari sisi pendidikan, angka rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,00 tahun pada 2020 menjadi 9,75 tahun pada 2024, mendekati target 2026 sebesar 9,99 tahun dengan tingkat capaian 99%. Peningkatan ini menunjukkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan semakin baik, meskipun kualitas pendidikan tetap perlu diperkuat agar berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi lulusan.

Indikator kesehatan dasar juga memperlihatkan tren positif, khususnya pada angka harapan hidup yang naik dari 65,38 tahun pada 2020 menjadi 66,30 tahun pada 2024 (97,9% dari target 66,99 tahun). Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan, meskipun masih relatif rendah dibanding rata-rata provinsi. Namun, prevalensi stunting masih tinggi dengan capaian 25,50% pada 2024, jauh dari target 14% pada 2026. Kondisi ini menuntut adanya intervensi lintas sektor, seperti peningkatan akses pangan bergizi, layanan kesehatan ibu dan anak, sanitasi lingkungan, serta kampanye pola asuh keluarga.

Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) relatif stabil di kisaran 70–71% dengan capaian 98,7% dari target. Namun, rasio penduduk yang bekerja menunjukkan penurunan signifikan, dari 90% pada 2020 menjadi sekitar 67% pada 2024, jauh dari target 95%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun angkatan kerja meningkat, serapan tenaga kerja masih terbatas, sehingga kebijakan penciptaan lapangan kerja baru perlu menjadi prioritas.

Dari sisi ekonomi sektoral, kontribusi pertanian, perikanan, dan kehutanan terhadap PDRB berada di kisaran 34–35% dengan capaian mendekati target. Sub-sektor perkebunan juga stabil dengan capaian hampir 100%. Sementara itu, perdagangan, industri, dan pariwisata menunjukkan tren kenaikan meski relatif kecil dalam total PDRB. Pertumbuhan industri baru mencapai 1,2% pada 2024, namun tetap menunjukkan arah yang positif.

Di tingkat lokal, persentase gampong mandiri masih rendah, baru mencapai sekitar 3% pada 2023–2024, jauh dari target 7% pada 2026 (capaian 78,54%). Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan desa perlu diperkuat, baik dari aspek kelembagaan, ekonomi lokal, maupun pelayanan dasar, agar transformasi kesejahteraan benar-benar dirasakan sampai ke tingkat gampong.

Secara keseluruhan, indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan capaian rata-rata di atas 90% dari target, kecuali pada stunting, rasio penduduk bekerja, dan gampong mandiri yang masih menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti.

B. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum di Kabupaten Simeulue secara umum menunjukkan tren positif, meskipun masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Pada bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat, Indeks Ketahanan Daerah meningkat dari kategori rendah (0,29) menjadi kategori sedang (0,55) pada tahun 2024 dengan capaian 85%. Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai 90% pada tahun 2024 mendekati target 100%. Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang stabil di kisaran 77–79 (98% dari target) menegaskan arah pembangunan yang semakin inklusif dan berbasis kesetaraan gender.

Dari sisi perekonomian, kontribusi sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata relatif stabil. Nilai ekspor perikanan tumbuh pesat dari Rp1,5 miliar pada 2020 menjadi Rp5 miliar pada 2024, dengan target Rp15 miliar pada 2026 (111%). Hal serupa terlihat pada ekspor bersih perdagangan yang melonjak dari Rp450 juta pada 2020 menjadi Rp2 miliar pada 2024, dengan proyeksi Rp6 miliar di 2026 (103%). Perbaikan indikator nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) dan nilai tukar nelayan juga mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat pesisir.

Di bidang lingkungan hidup, capaian indikator menunjukkan hasil yang memuaskan. Indeks kualitas air mencapai 63,46 pada 2024 atau 98% dari target, sementara indeks kualitas udara bahkan melampaui target dengan capaian 105%. Indeks kualitas lahan juga mencatat perbaikan signifikan dengan capaian 112%. Meskipun demikian, beberapa persoalan seperti banjir akibat luapan sungai dan keberadaan kawasan kumuh masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius agar capaian lingkungan hidup lebih berkelanjutan.

Dalam hal tata kelola pemerintahan dan keuangan, Kabupaten Simeulue berhasil menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan capaian 100% pada keterkaitan antara RPJMD, RKPD, dan APBD. Belanja pendidikan juga telah memenuhi amanat konstitusi di atas 20%, demikian pula belanja kesehatan yang sudah lebih dari 10% APBD. Namun demikian, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang cenderung meningkat hingga 2% menunjukkan masih adanya permasalahan efisiensi perencanaan anggaran yang perlu diperbaiki agar penggunaan APBD lebih optimal.

Reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan juga menunjukkan progres yang cukup baik. Tingkat maturitas SPIP naik dari level 1 menjadi level 2 dengan target level 3 pada 2026. Sementara itu, tindak lanjut atas temuan BPK dan Inspektorat telah mencapai lebih dari 98%, menandakan adanya peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Dari sisi pengembangan sumber daya aparatur, sekitar

30% ASN telah mengikuti pendidikan formal maupun pelatihan teknis pada tahun 2024 dengan tingkat capaian 96–98%, yang penting untuk mendukung pelayanan publik yang lebih profesional.

Pada bidang sosial budaya, agama, dan adat, hasil pembangunan juga cukup menggembirakan. Pelestarian nilai-nilai adat istiadat mencapai 71% pada 2024 (96% dari target), dan angka melek Alquran menunjukkan tren yang terus meningkat. Peran lembaga adat dan keagamaan seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), dan Baitul Mal semakin menguat dalam mendukung pembangunan daerah, dengan capaian rata-rata di atas 95%. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan di Simeulue tidak hanya menitikberatkan pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan penguatan identitas budaya, nilai keagamaan, dan solidaritas sosial masyarakat.

C. Kesimpulan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Simeulue periode 2020–2024 menunjukkan bahwa secara umum capaian indikator strategis berada pada arah yang positif dengan rata-rata tingkat keberhasilan di atas 90%. Aspek Kesejahteraan Masyarakat memperlihatkan kemajuan terutama pada indikator pendidikan, harapan hidup, serta kontribusi sektor-sektor unggulan terhadap PDRB. Meski demikian, persoalan stunting, penyerapan tenaga kerja, dan gampong mandiri masih menjadi tantangan utama yang memerlukan intervensi lebih komprehensif lintas sektor.

Di sisi lain, Pelayanan Umum telah menunjukkan peningkatan kinerja di sebagian besar urusan pemerintahan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, lingkungan hidup, hingga pemberdayaan aparatur dan kelembagaan daerah. Beberapa indikator bahkan telah melampaui target, seperti ekspor perdagangan dan perikanan, kualitas udara dan lahan, serta tindak lanjut temuan pengawasan. Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu percepatan pencapaian, terutama di bidang perumahan layak huni, infrastruktur dasar, serta efisiensi keuangan daerah terkait tingginya SILPA.

Secara keseluruhan, pembangunan Kabupaten Simeulue telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD 2017–2022 dan RPD 2023–2026. Keberhasilan capaian ini menjadi modal penting dalam menyongsong perencanaan pembangunan jangka menengah berikutnya, dengan fokus pada penguatan sektor prioritas, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Adapun tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

A. Kualitas dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Masih Rendah

Permasalahan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Simeulue masih menjadi isu utama pembangunan. Kualitas SDM yang rendah berdampak pada daya saing daerah, produktivitas ekonomi, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang pembangunan. Dibandingkan capaian Provinsi Aceh, Simeulue menunjukkan kondisi relatif tertinggal pada beberapa indikator utama, baik pendidikan, kesehatan, maupun ketenagakerjaan. Permasalahan utama pembangunan SDM di Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah. Tahun 2024, IPM Simeulue sebesar 70,95, jauh di bawah rata-rata Aceh sebesar 75,36 dan nasional 75,00. Hal ini menunjukkan ketertinggalan Simeulue dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

b. Mutu pendidikan belum merata. Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang 7–12 tahun di Simeulue sudah 99,72%, lebih tinggi dari Aceh 99,42% dan Nasional 99,19% sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang 13-15 tahun di Simeulue sudah 99,33%, lebih tinggi dari Aceh 97,77% dan Nasional 96,17%.
c. Literasi masyarakat masih rendah. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Simeulue tahun 2024 baru 45,43, lebih rendah dari Aceh 72,42 dan masuk kategori sedang.
d. Kualitas tenaga kerja masih lemah. Tahun 2024, tenaga kerja Simeulue masih didominasi lulusan SMA (36,25%), sementara lulusan diploma/universitas hanya 12,5%, lebih rendah dibandingkan Aceh (17,54%).
e. Rasio ketergantungan penduduk tinggi. Tahun 2024, rasio ketergantungan Simeulue 76,77%, lebih tinggi dari Aceh (48,61%) maupun nasional (46,80%).
f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi. Tahun 2024, TPT Simeulue 5,50%, lebih tinggi dibandingkan Aceh (5,75%) dan nasional (4,90%).
g. Partisipasi Angkatan Kerja Perempu rendah. TPAK perempuan Simeulue tahun 2024 tercatat 45,2%, lebih rendah dari Aceh (49,62%) dan nasional (55,41%).
h. Kesehatan masyarakat belum optimal. Angka Harapan Hidup (AHH) Simeulue tahun 2024 hanya 69,69 tahun, lebih rendah dibandingkan Aceh (73,2 tahun) dan nasional (74,2 tahun).
i. Angka kematian ibu tinggi. Tahun 2024, Angka Kematian Ibu (AKI) di Simeulue tercatat 5 orang per 100.000 kelahiran hidup.
j. Prevalensi stunting masih tinggi. Tahun 2024, prevalensi stunting Simeulue sebesar 25,50%, meski lebih rendah dari Aceh (28,60%), namun masih jauh di atas target nasional 19,80%.
k. Penduduk miskin relatif tinggi. Tahun 2024, angka kemiskinan Simeulue 17,69%, lebih tinggi dibandingkan Aceh (14,23%) dan nasional (8,57%).
l. Pendapatan per kapita rendah. Tahun 2024, pendapatan per kapita Simeulue hanya Rp29,5 juta, lebih rendah dibandingkan Aceh (Rp39,16 juta) dan jauh tertinggal dari nasional (Rp71,03 juta).
m. Ketimpangan gender masih nyata. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Simeulue tahun 2024 hanya 64,79, lebih rendah dibandingkan Aceh (63,56) dan nasional (76,90).

Permasalahan rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Simeulue tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor mendasar yang saling berkaitan. Kondisi geografis kepulauan dengan akses transportasi yang terbatas membuat layanan pendidikan, kesehatan, dan pasar kerja belum merata ke seluruh wilayah. Masyarakat di kecamatan yang jauh dari pusat pelayanan sering menghadapi hambatan dalam memperoleh pendidikan bermutu maupun layanan kesehatan yang memadai.

Selain itu, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Banyak guru dan tenaga kesehatan yang ditempatkan di Simeulue menghadapi kendala sarana dan prasarana, sehingga kualitas layanan belum optimal. Keterbatasan ini berimplikasi langsung pada rendahnya capaian indikator pendidikan dan kesehatan daerah.

Di sisi lain, pembangunan SDM juga terhambat oleh keterbatasan anggaran. Alokasi pembiayaan dari APBD maupun dukungan pemerintah pusat masih belum mencukupi untuk mendukung program-program pengembangan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, yang menyebabkan banyak keluarga kesulitan berinvestasi pada pendidikan anak maupun kebutuhan kesehatan keluarga.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menengah, kesehatan ibu dan anak, serta pola hidup sehat. Masih ada keluarga yang memandang pendidikan hanya sebatas tingkat dasar, sementara isu kesehatan seperti gizi seimbang, sanitasi, dan imunisasi belum menjadi prioritas.

Apabila kondisi ini tidak ditangani secara serius, ketertinggalan Simeulue dalam pembangunan SDM akan semakin melebar dibandingkan Provinsi Aceh maupun rata-rata nasional. Hal ini bukan hanya memperdalam disparitas pembangunan, tetapi juga melemahkan daya saing daerah dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.

B. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Masih Lambat dan Rentan Fluktuasi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue masih menghadapi tantangan serius. Meskipun memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata, kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, tidak stabil, dan relatif tertinggal dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh maupun nasional.

Permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi Simeulue adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi relatif rendah dan tidak stabil. Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Simeulue hanya sekitar 4,43 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4,66 persen dan nasional 5,02 persen. Ketergantungan pada sektor primer (pertanian dan perikanan) yang rentan iklim dan harga pasar global membuat Simeulue lebih mudah terdampak fluktuasi.

b. Pendapatan per kapita masih rendah. PDRB per kapita Simeulue pada tahun 2024 tercatat sekitar Rp31,94 juta, jauh di bawah rata-rata Aceh Rp43,78 juta dan nasional Rp78,60 juta. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat Simeulue masih lemah dan kesenjangan dengan nasional semakin lebar.
c. Struktur ekonomi masih didominasi sektor primer. Lebih dari 52 persen PDRB Simeulue masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sedangkan sektor industri pengolahan dan jasa modern masih sangat terbatas. Di tingkat Aceh, kontribusi sektor primer hanya 29 persen, menunjukkan diversifikasi ekonomi Simeulue masih jauh tertinggal.
d. Investasi rendah dan belum merata. Nilai investasi yang masuk ke Simeulue tahun 2024 hanya sekitar Rp142 miliar, atau kurang dari 1 persen dari total investasi di Aceh. Rendahnya infrastruktur pendukung, aksesibilitas transportasi, serta ketersediaan energi listrik dan internet membuat Simeulue kurang menarik bagi investor.
e. Pengembangan UMKM masih terkendala produktivitas dan akses pembiayaan. Dari sekitar 7.500 UMKM yang ada, lebih dari 70 persen masih beroperasi pada skala mikro dengan keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar. Rendahnya literasi digital juga membuat UMKM Simeulue tertinggal dibandingkan UMKM di daerah lain di Aceh.
f. Ekspor minim nilai tambah. Komoditas unggulan Simeulue seperti ikan tuna, cakalang, dan kopra sebagian besar dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekspor tahun 2024 hanya Rp18,5 miliar, jauh di bawah potensi. Sementara itu, rata-rata kabupaten pesisir Aceh mampu mengekspor produk olahan perikanan dengan nilai lebih besar.
g. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah. Tahun 2024, PAD Simeulue hanya menyumbang 5,7 persen dari total APBD, jauh di bawah rata-rata Aceh (10,4 persen). Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat membatasi fleksibilitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi Simeulue terutama disebabkan oleh struktur ekonomi yang belum bertransformasi dari sektor primer ke sektor bernilai tambah tinggi. Ketergantungan pada pertanian subsisten, perikanan tangkap tradisional, dan keterbatasan industri pengolahan membuat Simeulue rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.

Selain itu, rendahnya investasi swasta akibat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan konektivitas antarwilayah menjadi hambatan utama. Kondisi ini diperparah dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, rendahnya inovasi UMKM, serta minimnya pemanfaatan potensi ekspor.

Apabila tidak segera diatasi, maka perekonomian Simeulue akan tetap tertinggal dibandingkan daerah lain di Aceh, dengan risiko meningkatnya ketimpangan kesejahteraan dan lemahnya daya saing daerah di masa depan.

1. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Belum Optimal

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembangunan daerah yang efektif. Namun, kondisi di Kabupaten Simeulue masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kinerja birokrasi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi digital, maupun kualitas pelayanan publik. Rendahnya tata kelola ini berdampak pada belum optimalnya efektivitas pembangunan, rendahnya kepercayaan masyarakat, dan lambatnya peningkatan daya saing daerah dibandingkan Provinsi Aceh secara keseluruhan. Adapun permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) masih rendah. Nilai indeks RB Kabupaten Simeulue tahun 2024 berada pada kategori Cukup, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh yang telah mencapai kategori Baik. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya penerapan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam birokrasi.
b. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum optimal. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Simeulue tahun 2024 masih berada pada kategori CC, sementara rata-rata Aceh berada pada B. Kondisi ini mencerminkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja belum sepenuhnya berbasis hasil (outcome).
c. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum merata. Indeks SPBE Simeulue tahun 2024 tercatat 1,86 (cukup), lebih rendah dari rata-rata Aceh 3,64 (baik). Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan masih terbatas pada layanan dasar, sementara integrasi antar-sistem dan pemanfaatan big data masih sangat minim.
d. Kualitas pelayanan publik masih rendah. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Simeulue tahun 2024 berada pada angka 82,91 (baik), lebih rendah dibandingkan rata-rata Aceh 80,45. Keluhan masyarakat terutama terkait pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan perizinan.
e. Kapasitas dan distribusi ASN belum merata. Proporsi ASN dengan kualifikasi pendidikan sarjana di Simeulue masih rendah dibandingkan rata-rata provinsi, dan distribusinya terkonsentrasi di ibu kota kabupaten. Di daerah terpencil, pelayanan publik sering terhambat karena keterbatasan tenaga aparatur.

f. Kualitas pelayanan perizinan belum optimal. Meskipun sudah menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), masih banyak masyarakat dan pelaku usaha mengeluhkan lamanya proses dan minimnya pendampingan. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan di Simeulue lebih lama dibandingkan kabupaten/kota lain di Aceh.
g. Transparansi dan integritas birokrasi masih perlu diperkuat. Meskipun Simeulue mengikuti pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Integritas Nasional melalui KPK dan BPS, skor Simeulue masih berada di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan masih adanya praktik-praktik birokrasi yang belum sepenuhnya bersih dan transparan.
h. Efisiensi belanja daerah belum maksimal. Belanja pegawai masih mendominasi struktur APBD Simeulue, sementara alokasi belanja publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur relatif terbatas. Kondisi ini mengurangi ruang fiskal untuk memperluas pelayanan publik.
i. Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik masih terbatas. Beberapa layanan digital sudah berjalan, seperti e-SKP, e-Planning, dan aplikasi pelayanan dasar, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi. Banyak pelayanan masyarakat masih dilakukan secara manual, yang berimplikasi pada rendahnya efisiensi dan akuntabilitas.

Secara umum, permasalahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Simeulue dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas ASN, rendahnya adopsi teknologi digital, lemahnya budaya kinerja berbasis hasil, serta minimnya pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini membuat kualitas pelayanan publik belum dapat memenuhi ekspektasi masyarakat, memperlambat investasi, serta menurunkan daya saing daerah dibandingkan Aceh secara keseluruhan.

Jika tidak segera dibenahi, tata kelola pemerintahan yang lemah dan pelayanan publik yang belum optimal akan menjadi hambatan serius dalam upaya Simeulue untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lain, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

C. Ketimpangan Antar Wilayah dan Aksesibilitas Masih Tinggi

Ketimpangan antarwilayah di Kabupaten Simeulue masih menjadi permasalahan pembangunan yang serius. Kondisi geografis Simeulue sebagai daerah kepulauan dengan 10 kecamatan yang sebagian besar berada jauh dari ibu kota kabupaten, menyebabkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar, infrastruktur, dan peluang ekonomi belum merata. Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Aceh, capaian Simeulue dalam berbagai indikator pemerataan wilayah relatif lebih rendah, sehingga memperbesar disparitas kesejahteraan antarwilayah. Permasalahan utama yang dihadapi Simeulue antara lain:

a. Disparitas ekonomi antar wilayah masih nyata. PDRB per kapita Simeulue tahun 2024 hanya sekitar Rp 31,94 juta, lebih rendah dari rata-rata Aceh Rp 43,78 juta. Di dalam Simeulue sendiri, perbedaan antar kecamatan cukup lebar; kawasan pesisir dan ibu kota lebih produktif dibandingkan wilayah pedalaman dan pulau-pulau kecil. Tingginya tingkat kemiskinan (17,69 persen) juga menunjukkan konsentrasi kemiskinan yang relatif tinggi di kecamatan kepulauan.
b. Kondisi infrastruktur jalan belum merata. Dari total panjang jalan kabupaten 768 km, kondisi jalan mantap baru sekitar 47 persen pada tahun 2024, lebih rendah dari rata-rata Aceh 72 persen. Kecamatan terpencil seperti Teupah Selatan dan Simeulue Barat masih menghadapi keterbatasan akses jalan darat yang menghambat distribusi barang dan jasa.
c. Akses transportasi laut dan udara masih terbatas. Meskipun Simeulue memiliki Pelabuhan Sinabang dan Bandara Lasikin, frekuensi pelayaran dan penerbangan masih belum rutin dan terbatas kapasitasnya. Hal ini membuat harga kebutuhan pokok di Simeulue relatif lebih mahal dibandingkan rata-rata Aceh daratan, yang memperburuk kesenjangan ekonomi antar wilayah.
d. Kesenjangan pelayanan pendidikan antar kecamatan. Rasio guru bersertifikasi di Simeulue masih rendah dan tidak merata. Kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten umumnya kekurangan guru PNS dan guru bersertifikat, sehingga kualitas pendidikan tidak merata. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan rata-rata Aceh yang sudah mencapai lebih dari 60 persen sertifikasi untuk guru SMK.
e. Distribusi tenaga kesehatan belum seimbang. Fasilitas kesehatan masih terkonsentrasi di ibu kota kabupaten. Tahun 2024, hanya ada 1 rumah sakit umum daerah dengan keterbatasan tenaga spesialis. Sementara di kecamatan luar Sinabang, rasio dokter umum dan bidan masih jauh di bawah standar pelayanan minimal, menyebabkan akses masyarakat pada layanan kesehatan masih terbatas.
f. Akses air minum dan sanitasi layak belum merata. Cakupan akses air minum layak Simeulue tahun 2024 baru 77,77 persen, lebih rendah dibandingkan Aceh 79,4 persen. Cakupan sanitasi layak juga masih 76,51 persen, di bawah capaian provinsi yang sudah mendekati 80 persen. Kondisi ini terutama dirasakan oleh masyarakat di wilayah pedalaman dan pulau kecil.
g. Pengelolaan sampah dan lingkungan belum optimal Rasio pengelolaan sampah di Simeulue baru 39,61 persen tahun 2024, lebih rendah dibandingkan Aceh 56 persen. Keterbatasan TPA dan armada angkutan sampah membuat penanganan sampah di luar kota Sinabang masih minim, meningkatkan kesenjangan kualitas lingkungan antar wilayah.

h. Keterbatasan akses listrik dan energi di wilayah terpencil. Meskipun rasio elektrifikasi Simeulue sudah di atas 95 persen, pasokan listrik di wilayah kepulauan kecil masih belum stabil. Masih ada desa yang mengalami pemadaman bergilir, berbeda dengan wilayah Aceh daratan yang relatif lebih andal pasokan energinya.

i. Keterbatasan akses telekomunikasi dan internet. Jangkauan internet di Simeulue masih rendah, terutama di desa-desa luar Sinabang. Tahun 2024, sekitar 28 persen desa di Simeulue belum memiliki akses internet 4G yang stabil, sementara rata-rata Aceh sudah mencapai lebih dari 85 persen desa terjangkau layanan digital. Hal ini memperlebar kesenjangan akses informasi, pendidikan daring, dan layanan publik berbasis elektronik.

j. Kerentanan wilayah kepulauan terhadap bencana. Dengan kondisi geografis rawan gempa dan tsunami, daerah-daerah pesisir Simeulue lebih rentan terhadap bencana dibandingkan Aceh daratan. Namun, fasilitas jalur evakuasi, shelter, dan sistem peringatan dini belum merata di semua kecamatan, memperparah kesenjangan ketahanan wilayah.

Ketimpangan antarwilayah di Simeulue terjadi akibat keterbatasan infrastruktur dasar, distribusi layanan publik yang belum merata, dan hambatan geografis sebagai daerah kepulauan. Dibandingkan Provinsi Aceh, Simeulue tertinggal hampir di semua indikator pemerataan, mulai dari akses jalan, air minum, internet, hingga distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya inklusivitas pembangunan: masyarakat di wilayah pedalaman dan kepulauan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati layanan dasar, mengakses pasar kerja, maupun memanfaatkan peluang ekonomi. Apabila ketimpangan ini tidak segera diatasi, maka kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah akan semakin melebar dan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam pembangunan daerah.

1. Implementasi Keistimewaan Aceh, Sosial-Budaya, dan Kearifan Lokal Belum Maksimal

Kabupaten Simeulue sebagai bagian dari Provinsi Aceh memperoleh status keistimewaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keistimewaan ini memberikan ruang khusus bagi pelaksanaan syariat Islam, penguatan adat istiadat, pengembangan kebudayaan, serta pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Namun demikian, hingga tahun 2024 implementasi keistimewaan tersebut di Simeulue belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi tata kelola, pemanfaatan sumber daya, maupun keterlibatan masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

a. Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus belum optimal. Tahun 2024 Simeulue menerima alokasi Dana Otsus sebesar Rp145 miliar atau sekitar 2,3 persen dari total Aceh. Namun serapan anggaran masih di bawah 90 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Aceh (94 persen). Pemanfaatannya juga masih dominan pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara sektor penguatan SDM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pelayanan syariat Islam relatif terbatas.
b. Implementasi syariat Islam belum maksimal. Penegakan qanun syariat di Simeulue masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan aparatur pengawasan. Tahun 2024 jumlah personel Wilayatul Hisbah (WH) Simeulue hanya 48 orang, jauh di bawah kebutuhan minimal untuk menjangkau seluruh kecamatan. Selain itu, pemahaman masyarakat di beberapa wilayah terpencil terhadap nilai-nilai syariat masih rendah, sehingga pelaksanaan syariat cenderung formalistik dan belum membentuk kesadaran kolektif.
c. Kelembagaan adat dan peran Majelis Adat Aceh (MAA) belum optimal. Walaupun struktur adat di tingkat desa relatif masih terpelihara, peran MAA Kabupaten Simeulue dalam pembinaan adat dan hukum adat laut (panglima laot) belum berjalan maksimal karena keterbatasan anggaran dan SDM. Akibatnya, peran adat dalam menjaga kohesi sosial dan pengelolaan sumber daya lokal semakin melemah.
d. Pelestarian budaya lokal belum terintegrasi dalam pembangunan daerah. Seni tradisi Simeulue seperti *nandong* dan *sikambang*, serta pengetahuan lokal mitigasi tsunami (*smong*), masih terbatas pada acara seremonial. Upaya dokumentasi, regenerasi seniman, dan integrasi dalam pendidikan maupun pariwisata belum berjalan optimal. Kontribusi pariwisata budaya Simeulue terhadap PDRB tahun 2024 baru 1,68 persen, jauh di bawah rata-rata Aceh sebesar 3,8 persen.
e. Perlindungan bahasa daerah semakin menurun. Bahasa Sigulai, Lekon, dan Devayan yang menjadi identitas masyarakat Simeulue mulai jarang digunakan generasi muda. Belum ada kurikulum muatan lokal bahasa daerah yang kuat di sekolah, berbeda dengan beberapa kabupaten di Aceh daratan yang sudah mengintegrasikan bahasa daerah ke dalam pendidikan formal.
f. Kerukunan antarumat beragama masih rentan. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Aceh tahun 2024 sebesar 76,47 (kategori tinggi). Namun, di Simeulue forum komunikasi lintas agama masih terbatas dan program pembinaan kerukunan antarumat belum merata. Hal ini menimbulkan kerentanan sosial, terutama di daerah dengan komunitas non-Muslim.
g. Kelembagaan dayah belum mandiri. Jumlah dayah di Simeulue relatif sedikit dan masih bergantung pada bantuan pemerintah. Keterbatasan fasilitas, tenaga pengajar, serta anggaran membuat peran dayah sebagai pusat pendidikan Islam dan pembinaan generasi Qur'ani belum berjalan maksimal.

h. Pemanfaatan kearifan lokal belum maksimal. Kearifan lokal seperti *smong*, pengelolaan laut tradisional, dan praktik pertanian organik masih sebatas pengetahuan turun-temurun tanpa kebijakan yang mengintegrasikan ke dalam program resmi pemerintah. Padahal, nilai-nilai ini dapat menjadi modal sosial sekaligus instrumen penting untuk mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, lemahnya implementasi keistimewaan, minimnya pelestarian budaya, rendahnya perlindungan bahasa daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal membuat Simeulue belum mampu menjadikan status keistimewaan Aceh sebagai keunggulan strategis. Jika tidak ditangani secara serius, maka identitas budaya, kohesi sosial, dan keberlanjutan nilai-nilai lokal Simeulue akan semakin melemah dalam arus modernisasi.

D. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana Masih Rendah

Kabupaten Simeulue memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama dari sektor kelautan, perikanan, pertanian, serta ekosistem pesisir. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih jauh dari optimal. Di sisi lain, kualitas lingkungan hidup belum terjaga dengan baik, sementara tingkat kerentanan terhadap bencana masih sangat tinggi. Kondisi ini membuat Simeulue tertinggal dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh, serta menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutan pembangunan di masa depan. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

a. Pemanfaatan potensi perikanan belum optimal. Produksi perikanan tangkap Simeulue tahun 2024 mencapai 22,898 ribu ton (6,4 persen dari total Aceh), namun nilai tambah masih rendah. Minimnya industri pengolahan hasil laut membuat nilai ekspor hanya Rp5 miliar, jauh di bawah rata-rata kabupaten pesisir Aceh.
b. Pertanian masih bersifat subsisten dan produktivitas rendah. Produksi padi tahun 2024 sebesar 28,3 ribu ton (2,1 persen dari produksi Aceh), dengan produktivitas hanya 4,3 ton/ha. Rendahnya akses pupuk, bibit unggul, serta teknologi pasca panen membuat sektor pertanian belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani.
c. Degradasi lingkungan masih terjadi. Kehilangan tutupan hutan Simeulue pada 2024 mencapai 142 ha. Pengawasan kawasan hutan lemah karena keterbatasan personel polisi hutan, sehingga ancaman deforestasi tetap tinggi meski skala relatif kecil dibandingkan Aceh secara keseluruhan.
d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih rendah. Tahun 2024, IKLH Simeulue hanya 78,82. Hal ini menunjukkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan belum terjaga dengan baik.

e. Pengelolaan sampah belum optimal. Rasio pengelolaan sampah tahun 2024 baru 39,4 persen, jauh di bawah rata-rata Aceh 56 persen. Kapasitas TPA yang hanya 20 ton/hari tidak mampu menampung timbulan sampah harian sebesar 38 ton/hari.
f. Akses air minum layak dan sanitasi masih terbatas. Cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak baru 77,77 persen, lebih rendah dibandingkan Aceh (79,4 persen) dan nasional (91 persen). Sementara akses sanitasi layak baru 76,51,7 persen, dengan desa berstatus Open Defecation Free (ODF) baru mencapai 58 persen.
g. Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum memenuhi standar. Proporsi RTH di kawasan perkotaan Simeulue baru 0,15 persen, masih jauh di bawah ketentuan minimal 30 persen sesuai UU Penataan Ruang.
h. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum tersedia. Hingga kini Simeulue belum memiliki fasilitas pengelolaan limbah B3 medis maupun industri. Seluruh pengelolaan masih bergantung pada fasilitas di provinsi, yang menyebabkan risiko pencemaran meningkat.
i. Rehabilitasi ekosistem pesisir masih terbatas. Upaya rehabilitasi mangrove dan terumbu karang belum berjalan optimal, padahal ekosistem ini krusial dalam mendukung perikanan berkelanjutan serta mitigasi abrasi dan tsunami.
j. Kerentanan terhadap bencana masih tinggi. Simeulue berada di jalur rawan gempa dan tsunami dengan IRBI tahun 2024 sebesar 162, termasuk kategori tinggi, lebih buruk dibandingkan Aceh (144,29). Infrastruktur mitigasi bencana seperti jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan sistem peringatan dini masih terbatas dan belum merata di seluruh kecamatan.

Rendahnya kualitas pengelolaan SDA, lingkungan hidup, dan ketahanan bencana di Simeulue tidak terlepas dari beberapa faktor utama, yaitu: keterbatasan sarana-prasarana dan teknologi pengolahan hasil perikanan–pertanian, lemahnya kelembagaan dan pengawasan lingkungan, minimnya investasi sektor lingkungan dan ekonomi hijau, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Kondisi ini berimplikasi pada eksploitasi sumber daya tanpa nilai tambah, menurunnya kualitas lingkungan, serta tingginya risiko bencana yang dapat menghambat keberlanjutan pembangunan daerah.

E. Infrastruktur dan Layanan Publik Belum Merata

Ketersediaan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Simeulue masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun pemerataan. Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan memperberat keterjangkauan masyarakat terhadap layanan dasar, logistik, maupun konektivitas dengan pusat-pusat ekonomi. Hal ini menyebabkan capaian Simeulue masih tertinggal dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh. Permasalahan utama antara lain:

a. Akses jalan masih terbatas. Tahun 2024, persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap baru mencapai 47 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Aceh sebesar 72 persen. Sebagian besar jalan di pedalaman dan pesisir masih berupa jalan tanah atau kerikil, sehingga sulit dilalui saat musim hujan.
b. Transportasi antarpulau belum memadai. Konektivitas Simeulue dengan daratan Sumatera masih bergantung pada kapal feri Sinabang–Singkil dan penerbangan perintis. Frekuensi layanan kapal terbatas, sedangkan Bandara Lasikin belum optimal melayani rute reguler, sehingga membatasi arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk.
c. Pelabuhan dan bandara terbatas kapasitasnya. Pelabuhan Sinabang belum berfungsi optimal sebagai pusat distribusi logistik, sedangkan Bandara Lasikin hanya dapat didarati pesawat berbadan kecil. Hal ini menghambat aksesibilitas Simeulue terhadap pasar regional maupun nasional.
d. Infrastruktur logistik belum tersedia. Simeulue belum memiliki fasilitas cold storage dan container yard yang memadai, sehingga produk perikanan dan pertanian sulit dipasarkan dalam kondisi segar atau sesuai standar ekspor.
e. Akses energi belum merata. Rasio elektrifikasi Simeulue tahun 2024 tercatat 96,2 persen, lebih rendah dibandingkan Aceh (98,7 persen) dan nasional (99,6 persen). Beberapa desa di pulau-pulau kecil masih mengalami keterbatasan pasokan listrik, terutama pada malam hari. Pemanfaatan energi alternatif seperti PLTS dan PLTMH juga baru menjangkau sebagian kecil wilayah.
f. Layanan air minum masih terbatas. Tahun 2024, cakupan air minum layak Simeulue baru mencapai 77,77 persen, tertinggal dari Aceh (79,4 persen) dan nasional (91 persen). Sementara itu, pelayanan PDAM hanya menjangkau sekitar 25 persen rumah tangga perkotaan, lebih rendah dari rata-rata Aceh 37 persen, dengan distribusi yang belum kontinyu 24 jam.
g. Sanitasi dasar belum merata. Akses sanitasi layak Simeulue tahun 2024 baru mencapai 76,51 persen, lebih rendah dibandingkan capaian Aceh (77,5 persen). Desa berstatus Open Defecation Free (ODF) baru 58 persen, sehingga risiko penyakit berbasis lingkungan masih tinggi.
h. Akses telekomunikasi dan internet terbatas. Jaringan seluler 4G belum menjangkau seluruh kecamatan. Kecepatan internet rata-rata Simeulue baru 6,2 Mbps, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata Aceh 12,8 Mbps. Cakupan internet di sekolah dan fasilitas kesehatan hanya 54 persen, menghambat layanan pendidikan dan kesehatan digital.
i. Sarana pendidikan belum merata. Sekolah menengah atas masih terkonsentrasi di ibu kota kabupaten. Beberapa kecamatan harus menempuh jarak jauh untuk mengakses SMA/SMK, sehingga berdampak pada rendahnya angka partisipasi sekolah menengah.

j. Fasilitas kesehatan terbatas. Tahun 2024, Simeulue hanya memiliki 1 RSUD, 11 puskesmas, dan 72 posyandu. Rasio tempat tidur rumah sakit baru 0,68 per 1.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan standar ideal 1 per 1.000. Sebagian besar puskesmas belum memiliki tenaga medis spesialis, sehingga rujukan masih harus dilakukan ke Banda Aceh atau Medan.

k. Perumahan layak huni masih rendah. Proporsi rumah tangga dengan akses rumah layak huni di Simeulue tahun 2024 baru 78,5 persen, lebih rendah dibandingkan Aceh (84,2 persen). Masih terdapat backlog perumahan, terutama bagi keluarga miskin dan nelayan.

Secara keseluruhan, ketidakmerataan infrastruktur dan layanan publik di Simeulue dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya investasi sektor infrastruktur, serta minimnya keterlibatan swasta. Jika persoalan ini tidak segera ditangani, maka keterbatasan akses jalan, konektivitas, energi, telekomunikasi, serta layanan dasar pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan perumahan akan semakin memperlebar ketertinggalan Simeulue dibandingkan kabupaten lain di Aceh. Kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk kesenjangan antarwilayah, serta menghambat peningkatan kualitas hidup, pembangunan SDM, produktivitas ekonomi, dan daya saing daerah dalam jangka panjang.

F. Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat Belum Optimal

Kesejahteraan sosial masyarakat Simeulue masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tingginya kemiskinan, keterbatasan perlindungan sosial, serta belum optimalnya layanan bagi kelompok rentan. Permasalahan ini semakin kompleks akibat kondisi kepulauan, terbatasnya akses layanan dasar, dan minimnya lapangan kerja di sektor formal. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

a. Tingkat kemiskinan masih tinggi. Tahun 2024 angka kemiskinan Simeulue tercatat 17,69 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Aceh sebesar 14,23 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa banyak keluarga di Simeulue masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

b. Ketimpangan pendapatan masih terjadi. Nilai Gini Ratio Simeulue tahun 2024 sebesar 0,259 sedikit lebih rendah dibandingkan Aceh (0,294). Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan belum merata.

c. Kesejahteraan kelompok rentan belum terjamin. Simeulue masih memiliki jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, dan lansia miskin yang cukup besar. Tahun 2024, penerima bantuan sosial dari program PKH dan BPNT baru menjangkau sekitar 11,5 ribu keluarga, namun belum mencakup seluruh keluarga miskin ekstrem.

d. Perlindungan anak belum maksimal. Angka perkawinan usia anak di Simeulue mencapai 9,7 persen pada 2024, lebih tinggi dari rata-rata Aceh (8,2 persen). Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dan pendidikan menengah.
e. Kerentanan ketenagakerjaan tinggi. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal, khususnya nelayan dan petani kecil. Tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Simeulue tercatat 5,85 persen.
f. Perumahan bagi masyarakat miskin belum memadai. Masih terdapat backlog rumah layak huni, terutama bagi keluarga miskin dan nelayan. Akses bantuan perumahan dari pemerintah terbatas karena keterbatasan anggaran daerah.
g. Peran kelembagaan sosial belum kuat. Lembaga kesejahteraan sosial masyarakat (LKSM), karang taruna, dan organisasi masyarakat sipil masih lemah dari sisi kapasitas dan pembiayaan, sehingga belum mampu menjadi mitra pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial.

Secara umum, lemahnya kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat di Simeulue dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal daerah, rendahnya kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya program perlindungan sosial berbasis data terpadu. Kondisi ini berdampak pada tingginya kerentanan sosial-ekonomi, terutama bagi keluarga miskin, nelayan kecil, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Apabila tidak segera diatasi, kesenjangan sosial di Simeulue akan semakin melebar dan berpotensi menghambat pencapaian pembangunan.

G. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Sosial Belum Terjaga Sepenuhnya

Stabilitas keamanan dan ketertiban sosial merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Di Kabupaten Simeulue, kondisi keamanan relatif terkendali, namun masih terdapat sejumlah persoalan yang menunjukkan bahwa stabilitas belum sepenuhnya terjaga. Tantangan ini mencakup persoalan kriminalitas, penyalahgunaan narkotika, kekerasan sosial, konflik antarwarga, serta keterbatasan kapasitas aparatur keamanan dan sistem deteksi dini. Adapun permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

a. Tingkat kriminalitas masih terjadi. Tahun 2024, jumlah tindak pidana di Simeulue tercatat 168 kasus, dengan angka penyelesaian perkara sebesar 82 persen. Meski lebih rendah dibandingkan rata-rata Aceh, kasus pencurian, penganiayaan, dan perkelahian antarwarga masih menjadi dominasi. Kondisi ini menunjukkan potensi gangguan keamanan masih perlu diwaspadai.
b. Penyalahgunaan narkotika meningkat. Simeulue mulai menjadi jalur peredaran gelap narkotika karena posisinya yang strategis di jalur laut. Pada tahun 2024, Polres Simeulue mengungkap 27 kasus narkoba, meningkat

dibandingkan 22 kasus tahun 2023. Angka ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama menyasar kalangan usia muda produktif.

c. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Tahun 2024 tercatat 1 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 16 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini mencerminkan masih rentannya kelompok rentan terhadap gangguan sosial, serta lemahnya sistem perlindungan masyarakat.
d. Konflik sosial berpotensi muncul. Konflik terkait sumber daya, batas lahan, dan sengketa adat masih ditemukan di beberapa kecamatan, meski dalam skala kecil. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat dan kelembagaan lokal perlu terus diperkuat agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
e. Ancaman bencana sosial. Simeulue yang rawan bencana alam seperti gempa dan tsunami juga berpotensi menghadapi bencana sosial bila penanganan tidak tepat. Misalnya, pada saat terjadi bencana, kepanikan masyarakat dapat menimbulkan ketertiban sosial terganggu bila kapasitas aparatur tidak memadai.
f. Keterbatasan kapasitas aparatur keamanan. Rasio personel polisi terhadap penduduk Simeulue tahun 2024 masih 1:950, lebih rendah dibandingkan rata-rata Aceh 1:720. Kondisi geografis kepulauan membuat distribusi aparat di kecamatan-kecamatan belum merata, sehingga penanganan gangguan keamanan membutuhkan waktu lebih lama.
g. Sistem deteksi dini konflik belum optimal. Forum koordinasi antar unsur keamanan, pemerintahan, dan masyarakat telah berjalan, tetapi belum terintegrasi penuh. Mekanisme informasi masyarakat (early warning system) masih lemah, sehingga potensi konflik atau tindak kriminal sering terdeteksi setelah kejadian berlangsung.

Secara umum, permasalahan keamanan dan ketertiban sosial di Simeulue tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tingginya pengangguran dan kemiskinan memperbesar kerentanan terhadap kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana prasarana keamanan memperlambat respon terhadap gangguan yang terjadi.

Apabila stabilitas keamanan dan ketertiban sosial tidak terjaga dengan baik, hal ini dapat menurunkan iklim investasi, memperlemah rasa aman masyarakat, dan pada akhirnya menghambat pencapaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan koordinasi kelembagaan adat dan formal, serta pengendalian narkotika harus menjadi prioritas ke depan.

2.4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Simeulue mengacu kepada isu strategis nasional, aceh dan kondisi Kabupaten Simeulue yang memerlukan penanganan. Isu strategis merupakan perbedaan antara kondisi saat ini dengan harapan yang tergambar tujuan pembangunan dalam masa 20 (dua puluh) tahun.

A. Isu Strategis Global

Isu Strategis Global meliputi:

1. Perkembangan Demografi Global
2. Dinamika geopolitik dan geoekonomi global
3. Perkembangan Teknologi
4. Peningkatan Urbanisasi Dunia
5. Perubahan konstelasi global
6. Pergeseran tata kelola keuangan global
7. Pertumbuhan kelas menengah
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam
9. Pemanfaatan luar angkasa
10. Perubahan iklim. Isu Strategis perubahan iklim meliputi:
    a. Perubahan iklim yaitu kenaikan suhu global dikhawatirkan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat Celsius tahun 2100
    b. Daya tampung kualitas dan kapasitas air, udara, lahan dan laut menurun, daya dukung dan daya tampung wilayah berbeda beda.
    c. Daya Dukung : daya dukung Lingkungan mengalami penurunan.

B. Isu strategis Nasional

Isu dan tantangan pembangunan Nasional yang termuat di dalam Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi (IPTEKIN)
3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
7. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah
8. Produktivitas tenaga kerja indonesia selama kurun waktu 2010 -2022 masih relatif tertinggal

9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
10. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan masih rendahnya efisiensi energi.
11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau
12. Ditengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas
13. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas
14. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
15. Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045 tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial
16. Kualitas pendidikan yang masih rendah
17. Adapun tantangannya dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerjaan informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah
18. Regulasi yang berlebih dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebakan terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi baik di pusat maupun daerah
19. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif
20. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptil.
21. Belum terimplementasinya manajemen talenta ASN secara merata
22. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik
23. Belum meratanya kualitas pelayanan publik
24. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat
25. Transformasi digital di tingkat pemerinthan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar
26. Permasalahan terkait integritas masih terjadi padapartai politik
27. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demograsi belum optimal

28. Prinsip ketebukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan
29. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan
30. Dalam aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan
31. Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan terutama di perbatasan
32. Stabilitas ekonomi makro indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fisal dan moneter yang pro pertumbuhan.
33. Pancasila belum sepenuhnya iimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan karakater dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat
34. Ketahanan teknologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
35. Ketimpangan antar jawa dan luar jawa masih cukup tinggi
36. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya
37. Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektifitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal
38. Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, kementerian/lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang
39. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan
    pembangunan dan sektor publik pusat dan daerah serta non publik masih terbatas.

Dari isu tersebut disimpulkan 14 Isu strategis pembangunan Nasional yang meliputi:

1. Produktivitas rendah
2. IPTEKIN dan Riset lemah;
3. Deindustrial Dini;
4. Pariwisata di bawah potensi
5. Ekonomi laut belum optimal;

6. Kontribusi koperasi dan UMKM rendah
7. Infraatruktur dan literasi rendah
8. Pembangunan belum berkelanjutan
9. Integrasi domestik terbatas
10. Kualitas SDM masih rendah.
11. Tata kelola pemerintahan belum optimal
12. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah
13. Demokratisasi belum optimal
14. Kesenjangan jawa dan luar jawa.

C. Isu Strategis Aceh

Pemerintah Aceh telah menetapkan 11 (sebelas) isu strategis pembangunan Aceh yang termuat di dalam Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025- 2045. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Aceh, serta memperhatikan isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 5 (lima) tahun mendatang (2025-2029). Isu strategis adalah hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Aceh karena dampaknya dapat mempengaruhi Aceh secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis Aceh diuraikan di bawah ini:

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penurunan Stunting.
2. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.
3. Penanggulangan Kemiskinan.
4. Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Memaksimalkan
5. Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital.
6. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkat Produktivitas Masyarakat.
7. Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekport.
8. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.
9. Memperkuat Perkotaan & Pendesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
10. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas.
11. Memperkuat Otonomi Khusus.
12. Kemandirian Dalam Ruang Fiskal.
13. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh.
14. Penangganan PMKS dan Disablitas, Memperkuat Gender dan Keluarga.
15. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan.
16. Pengurangan Risiko Bencana.
17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan.
18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas.

D. Isu Strategis Kabupaten Simeulue

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Simeulue.

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu internasional, isu nasional, isu regional, dan amanat dalam RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045, maka dirumuskan Isu Strategis pembangunan daerah Kabupaten Simeulue sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial
2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal dan Keberlanjutan SDA
3. Penguatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas, dan Aksesibilitas Wilayah
4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Implementasi Keistimewaan Aceh
5. Penguatan Stabilitas Keamanan, Ketertiban, dan Keharmonisan Sosial

Isu strategis tersebut di atas dirumuskan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola. Adapun dasar perumusan isu strategis tersebut di atas yaitu diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial

Sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Simeulue masih menghadapi tantangan kualitas SDM yang rendah dan belum merata, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, maupun keterampilan tenaga kerja. Permasalahan ini berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan, pengangguran, serta terbatasnya perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Dalam bidang pendidikan, masih terdapat kesenjangan akses antarwilayah, terutama untuk jenjang menengah atas. Keterbatasan sarana-prasarana dan tenaga pendidik berkualitas juga membuat mutu pendidikan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing lulusan di pasar kerja, serta lambatnya akselerasi peningkatan IPM.

Di sektor kesehatan, tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan layanan kesehatan rujukan. Kesehatan ibu dan anak serta stunting masih menjadi perhatian serius, karena berimplikasi langsung terhadap kualitas generasi mendatang. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses pelayanan kesehatan di kecamatan-kecamatan terpencil, akibat kondisi geografis kepulauan Simeulue.

Di bidang ketenagakerjaan, struktur ekonomi yang masih dominan sektor primer menjadikan tenaga kerja Simeulue rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Keterbatasan keterampilan dan rendahnya investasi di sektor padat karya membuat penyerapan tenaga kerja formal belum optimal. Hal ini mendorong tingginya angka pengangguran terbuka, setengah pengangguran, serta pekerja rentan dengan produktivitas rendah.

Kesejahteraan sosial masyarakat juga masih menghadapi tantangan. Tingginya angka kemiskinan, khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman, menimbulkan kerentanan sosial yang memerlukan intervensi kebijakan lebih intensif. Perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, belum optimal karena keterbatasan kapasitas lembaga perlindungan sosial serta minimnya program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Apabila tidak diatasi, permasalahan SDM dan kesejahteraan sosial ini akan memperlebar ketimpangan dengan daerah lain di Aceh, menurunkan daya saing Simeulue, serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM perlu menjadi isu strategis utama yang dikelola secara lintas sektor, dengan memperkuat pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, serta sistem perlindungan sosial yang inklusif.

2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Lokal dan Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Perekonomian Simeulue masih ditandai dengan pertumbuhan yang lambat, struktur ekonomi yang sempit, serta ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sektor-sektor ini sejatinya memiliki potensi besar, namun belum memberikan nilai tambah signifikan karena masih bersifat subsisten, minimnya industri pengolahan, serta keterbatasan akses pasar. Akibatnya, kontribusi ekonomi lokal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

Pertanian di Simeulue didominasi oleh produksi padi dan komoditas perkebunan rakyat seperti kelapa dan kakao. Namun, rendahnya produktivitas, keterbatasan akses pupuk, bibit unggul, serta teknologi pascapanen membuat sektor ini belum mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Kondisi

serupa juga terjadi di sektor perikanan. Meskipun Simeulue dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi kelautan terbesar di Aceh, kegiatan perikanan masih terfokus pada tangkap tradisional dengan nilai tambah yang rendah karena keterbatasan industri pengolahan hasil laut dan fasilitas penyimpanan dingin.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Aktivitas ekonomi masih sering mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga berpotensi memperburuk degradasi hutan, kerusakan pesisir, dan pencemaran lingkungan. Indikator kualitas lingkungan hidup menunjukkan bahwa Simeulue masih menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan sampah, akses air minum dan sanitasi, serta rehabilitasi ekosistem pesisir. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan belum sepenuhnya menjadi prioritas.

Masalah lainnya adalah terbatasnya akses permodalan, infrastruktur pendukung ekonomi, serta rendahnya investasi dari pihak swasta. Akibatnya, banyak usaha mikro dan kecil (UMK) di Simeulue berjalan dengan produktivitas rendah dan sulit berkembang. Hal ini juga berdampak pada rendahnya daya saing produk lokal di pasar regional, nasional, bahkan internasional.

Secara keseluruhan, ekonomi Simeulue belum inklusif karena pertumbuhan yang ada belum dinikmati secara merata oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil. Jika tidak segera dilakukan transformasi, Simeulue akan tetap terjebak dalam jebakan pertumbuhan rendah dengan kerentanan sosial-ekonomi yang tinggi.

Oleh karena itu, isu strategis pembangunan ekonomi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan mengoptimalkan potensi lokal berbasis pertanian, perikanan, dan kelautan, sekaligus menjamin keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini memerlukan intervensi berupa peningkatan produktivitas sektor unggulan, pengembangan industri pengolahan, penguatan UMK, serta penerapan prinsip ekonomi hijau yang ramah lingkungan.

3. Penguatan Infrastruktur Dasar, Konektivitas, dan Aksesibilitas Wilayah

Sebagai daerah kepulauan yang terletak cukup jauh dari daratan utama Sumatera, Simeulue menghadapi tantangan besar dalam hal keterhubungan wilayah, baik internal antar-kecamatan maupun eksternal dengan pusat-pusat ekonomi di Aceh dan Sumatera Utara. Keterbatasan infrastruktur dasar, transportasi, serta layanan publik membuat aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pasar masih sangat terbatas.

Kondisi jalan kabupaten yang belum merata kualitasnya menyebabkan banyak desa dan pesisir kesulitan mengakses layanan publik dan pusat ekonomi, terutama saat musim hujan. Keterbatasan ini diperburuk dengan kondisi transportasi antarpulau yang belum memadai, di mana konektivitas Simeulue masih bergantung pada kapal feri dengan jadwal terbatas dan penerbangan perintis yang frekuensinya rendah. Bandara Lasikin dan pelabuhan Sinabang yang ada pun belum sepenuhnya berfungsi optimal sebagai pintu utama arus logistik dan mobilitas penduduk.

Akses energi juga masih menjadi persoalan. Rasio elektrifikasi memang mendekati universal, tetapi pasokan listrik di beberapa wilayah masih belum stabil. Pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTS terbatas pada sebagian desa terpencil, sehingga ketergantungan pada sumber energi konvensional masih tinggi. Demikian pula dengan layanan dasar lainnya, seperti air minum, sanitasi, dan perumahan. Akses air minum dan sanitasi layak di Simeulue masih tertinggal dibandingkan Aceh dan nasional. Hal ini menimbulkan persoalan kesehatan lingkungan, terutama di desa-desa dengan kondisi geografis sulit. Sementara itu, backlog perumahan masih terjadi, terutama bagi keluarga miskin dan nelayan.

Infrastruktur pendukung ekonomi juga belum berkembang. Ketiadaan fasilitas logistik modern seperti cold storage maupun gudang distribusi menyebabkan produk unggulan daerah seperti perikanan dan pertanian sulit dipasarkan dalam kondisi segar atau sesuai standar ekspor. Kondisi ini menghambat daya saing Simeulue dalam memanfaatkan potensi pasar luar daerah. Selain itu, layanan telekomunikasi dan internet masih terbatas. Walaupun sebagian besar wilayah sudah terjangkau sinyal telepon, kualitas jaringan internet masih rendah, bahkan belum menjangkau seluruh fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Secara keseluruhan, lemahnya infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah menjadi faktor utama ketertinggalan Simeulue dibandingkan daerah lain di Aceh. Oleh karena itu, isu strategis ke depan adalah bagaimana memperkuat pembangunan infrastruktur dasar dan meningkatkan konektivitas, baik internal maupun eksternal, untuk membuka keterisolasian Simeulue. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap layanan publik, pasar, dan peluang ekonomi dapat meningkat, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah di kabupaten ini.

4. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Implementasi Keistimewaan Aceh

Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Di Simeulue, tata kelola pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan, dari sisi birokrasi, manajemen pelayanan, maupun pemanfaatan keistimewaan Aceh yang memberikan ruang khusus dalam pelaksanaan syariat Islam, pelestarian adat, dan budaya lokal.

Dari sisi birokrasi, capaian reformasi birokrasi, SAKIP, dan SPBE menunjukkan bahwa Simeulue masih perlu meningkatkan kapasitas aparatur dan konsistensi penerapan prinsip good governance. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis data, koordinasi lintas perangkat daerah masih lemah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efisiensi birokrasi belum optimal. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program daerah dan pelayanan publik.

Pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kualitas layanan dasar yang belum merata hingga rendahnya kepuasan masyarakat pada beberapa sektor. Akses layanan publik di wilayah pedalaman dan kepulauan kecil lebih tertinggal dibandingkan pusat kabupaten. Keterbatasan SDM aparatur, infrastruktur layanan, serta digitalisasi pelayanan membuat masyarakat belum sepenuhnya merasakan layanan yang cepat, mudah, dan transparan.

Dari perspektif keistimewaan Aceh, implementasi syariat Islam di Simeulue belum sepenuhnya berjalan maksimal. Keterbatasan aparatur Wilayatul Hisbah, dukungan anggaran, dan rendahnya pemahaman masyarakat di beberapa kecamatan menyebabkan pelaksanaan syariat masih lebih menekankan aspek formal hukum daripada pembinaan kesadaran. Hal ini membuat internalisasi nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat belum optimal.

Kelembagaan adat dan budaya Simeulue juga masih menghadapi tantangan. Lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan lembaga adat desa memiliki peran penting dalam menjaga kohesi sosial dan pelestarian kearifan lokal. Namun, dukungan kapasitas dan pendanaan masih terbatas, sehingga hukum adat laut, tradisi smong, maupun kesenian lokal belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam pembangunan daerah. Demikian pula dengan pendidikan dayah yang memiliki kontribusi besar dalam pembinaan generasi Qur'ani, masih terkendala dukungan sarana dan pembiayaan.

Pelestarian bahasa dan seni budaya daerah Simeulue menghadapi tantangan serius akibat arus modernisasi. Bahasa daerah mulai ditinggalkan generasi muda, kesenian tradisional semakin terpinggirkan, dan dokumentasi budaya masih minim. Padahal, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Simeulue memiliki potensi besar sebagai identitas daerah sekaligus sumber daya pengembangan pariwisata berbasis budaya.

Secara umum, kelemahan tata kelola pemerintahan dan belum optimalnya pemanfaatan keistimewaan Aceh menyebabkan Simeulue kehilangan peluang untuk memperkuat pelayanan publik dan memperkokoh identitas daerah. Isu strategis ke depan adalah bagaimana meningkatkan reformasi birokrasi, mempercepat transformasi digital, memperkuat pelayanan publik yang merata, serta mengoptimalkan implementasi keistimewaan Aceh, baik melalui syariat Islam, adat, maupun budaya, sebagai bagian integral pembangunan daerah.

5. Penguatan Stabilitas Keamanan, Ketertiban, dan Keharmonisan Sosial

Kabupaten Simeulue sebagai wilayah kepulauan memiliki karakteristik sosial yang relatif homogen, namun tetap menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga keamanan dan kohesi sosial. Dari sisi ketertiban masyarakat, permasalahan yang muncul antara lain masih adanya tindak kriminalitas, peredaran gelap narkoba, serta konflik horizontal yang dipicu oleh sengketa lahan atau persoalan adat. Keterbatasan aparat penegak hukum dan infrastruktur keamanan di pulau-pulau kecil membuat respons terhadap potensi gangguan keamanan belum optimal.

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu ancaman serius, khususnya di kalangan generasi muda. Akses masuk melalui jalur laut yang terbuka menjadikan Simeulue rawan sebagai jalur transit peredaran narkotika. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan produktivitas generasi muda Simeulue.

Dari aspek kerukunan, Simeulue relatif kondusif, dengan tingkat toleransi antarumat beragama yang baik. Namun, keberadaan komunitas minoritas di beberapa wilayah tetap memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi potensi gesekan sosial. Peran FKUB masih terbatas, sehingga ruang dialog lintas agama dan kegiatan bersama yang memperkuat harmoni sosial perlu lebih diperluas.

Selain itu, pelaksanaan syariat Islam di Simeulue juga menuntut keseimbangan antara aspek penegakan hukum dan pembinaan kesadaran masyarakat. Jika tidak dikelola dengan bijak, potensi ketegangan antara penegakan formal dan penerimaan sosial masyarakat dapat mengganggu kohesi sosial.

Secara umum, stabilitas keamanan dan ketertiban di Simeulue relatif terjaga, tetapi masih menghadapi tantangan dari sisi narkoba, kriminalitas, konflik berbasis lahan/adat, serta penguatan kerukunan antarumat beragama. Isu strategis ke depan adalah bagaimana memperkuat kapasitas aparat keamanan, memperluas partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, menekan peredaran narkoba, serta menguatkan kohesi sosial melalui nilai-nilai adat, budaya, dan agama.

2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Keberhasilan pencapaian target SPM tidak hanya diwujudkan oleh Perangkat Daerah (PD) yang menangani tugas dan fungsi urusan pemerintahan wajib tersebut, namun juga didukung oleh semua pihak, baik dari berbagai unsur Pemerintahan sebagai pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan dukungan semua pihak diharapkan target SPM yang telah ditetapkan dapat tercapai seluruhnya. Karena pencapaian target SPM adalah komitmen Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Capaian SPM mengalami fluktuasi baik itu di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, maupun Sosial. Pada 2021 Capaian SPM Kabupaten Simeulue pada angka 67,33 persen pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 81,67 persen pada tahun 2022 naik kembali menjadi 83,55 persen tahun 2023 kembali naik menjadi 90,27 persen dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 87,83 persen untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.

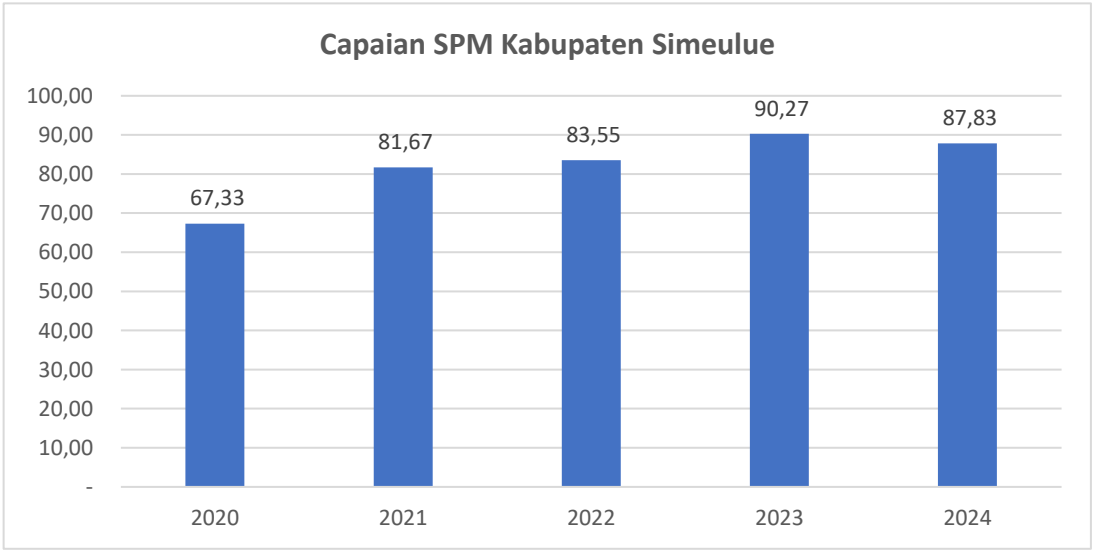

Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri,2025 (data diolah)

Grafik 2.58 Capaian SPM Kabupaten Simeulue Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pasal 4 jenis SPM terdiri dari 6 (enam) SPM yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas (Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat), serta Sosial.

A. SPM Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. SPM Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

Dalam bidang pendidikan, SPM mengamanatkan bahwa setiap anak usia 7–15 tahun wajib mendapatkan pelayanan pendidikan dasar. Hal ini merupakan wujud komitmen negara untuk menjamin hak anak atas pendidikan dasar yang berkualitas, sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Pelayanan ini mencakup penyediaan akses pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), termasuk penyediaan guru yang memenuhi kualifikasi, sarana dan prasarana pendidikan, serta kegiatan belajar mengajar yang sesuai standar nasional.

Capaian SPM Pendidikan mengalami fluktuasi pada tahun 2020 yaitu 55,00 persen, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 87,00 persen, tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 91,40 persen, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 88,20 persen sarta pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 84,62 persen dikarenakan penyesuaian indikator dan mekanisme pengukuran SPM Pendidikan dan menurunnya alokasi dana anggaran transfer ke daerah Kabupaten Simeulue sehingga mempengaruhi penurunan SPM Pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.51.

B. SPM Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan) adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, SPM bidang kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses pelayanan kesehatan dasar secara gratis, tepat waktu, dan berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan Daerah kabupaten/kota. Jenis layanan mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia produktif, dan lansia. Selain itu, pelayanan kesehatan juga diberikan untuk penanggulangan penyakit menular seperti TBC, HIV, malaria, serta penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes;

Capaian SPM Kesehatan mengalami fluktuasi pada tahun 2020 yaitu 47,00 persen, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 64,00 persen, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 57,70 persen di sebabkanya masih rendahnya kepatuhan pelaporan dan pencatatan data SPM di tingkat fasilitas kesehatan, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 65,50 persen sarta pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi 76,60 persen Capaian SPM dapat dilihat pada gambar 2.51.

C. SPM Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum (SPM PU) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

Dalam bidang ini, SPM menekankan pada pelayanan akses air minum yang aman dan sanitasi lingkungan yang layak. Hal ini menjadi sangat penting karena air dan sanitasi berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Simeulue harus memastikan tersedianya infrastruktur dan layanan air minum perpipaan atau non-perpipaan yang sesuai standar mutu, serta sistem pengelolaan limbah domestik (air limbah) yang ramah lingkungan. Selain pembangunan fisik, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi dan penggunaan air bersih juga merupakan bagian dari implementasi SPM ini.

Capaian SPM Pekerjaan Umum mengalami fluktuasi pada tahun 2020 yaitu 85,00 persen, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 67,00 persen, tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 62,70 persen, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 96,50 persen sarta pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi 100,00 persen yang disebabkan perbaikan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja SPM dapat dilihat pada gambar 2.51

D. SPM Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat (SPM PR) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM bidang ini menitikberatkan pada pelayanan terhadap rumah tidak layak huni (RTLH). Tujuannya adalah agar masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dapat hidup di lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni.

Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan identifikasi rumah tidak layak huni melalui pendataan dan verifikasi lapangan, serta menyediakan program bantuan stimulan untuk perbaikan rumah, baik dalam bentuk dana, material bangunan, maupun pendampingan teknis. Intervensi ini sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan penciptaan permukiman yang layak.

Capaian SPM Perumahan Rakyat mengalami fluktuasi pada tahun 2020 yaitu 85,00 persen, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 67,00 persen, tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 62,70 persen, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 96,50 persen sarta pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali menjadi 100,00 persen yang di sebabkan penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data spasial Capaian SPM dapat dilihat pada gambar 2.51

E. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. SPM di bidang ini berkaitan dengan pelayanan penanganan kebakaran dan penyelamatan.

Pemerintah Kabupaten Simeulue bertanggung jawab menyediakan sistem peringatan dini, fasilitas dan sarana pemadam kebakaran, serta personel yang terlatih dan siap siaga. Pelayanan ini menjamin respons cepat kejadian kebakaran, penyelamatan korban bencana, serta edukasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Kecepatan dan ketepatan penanganan kebakaran sangat menentukan keselamatan jiwa dan aset masyarakat, serta mencegah kerugian yang lebih besar.

Capaian SPM Trantibum mengalami fluktuasi pada tahun 2020 yaitu 91,00 persen, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 92,00 persen, tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 94,30 persen, tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 96,80 persen sarta pada tahun 2024 yang di sebabkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan mengalami penurunan menjadi 90,35 persen yang disebabkan terbatasnya anggaran operasional dan sumber daya aparatur Satpol PP dan Linmas Capaian SPM dilihat pada gambar 2.51.

6. SPM Sosial

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (SPM Sosial) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM bidang sosial difokuskan pada pelayanan rehabilitasi sosial dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana, gelandangan, dan pengemis.

Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui dinas sosial wajib mengidentifikasi PMKS, memberikan layanan rehabilitasi sosial seperti bantuan permakanan, konseling, pelatihan keterampilan, serta reintegrasi sosial. Layanan ini bertujuan untuk mengembalikan kemandirian dan martabat sosial kelompok rentan agar mereka dapat berfungsi sosial secara optimal dalam masyarakat.

Capaian SPM Sosial mengalami fluktuasi pada tahun 2020 yaitu 26,00 persen, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 80,00 persen, tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 95,20 persen, tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 97,60 persen sarta pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 80,40 persen yang disebabkan perubahan kebijakan bantuan sosial dan mekanisme pendataan Capaian SPM dapat dilihat pada gambar 2.51.

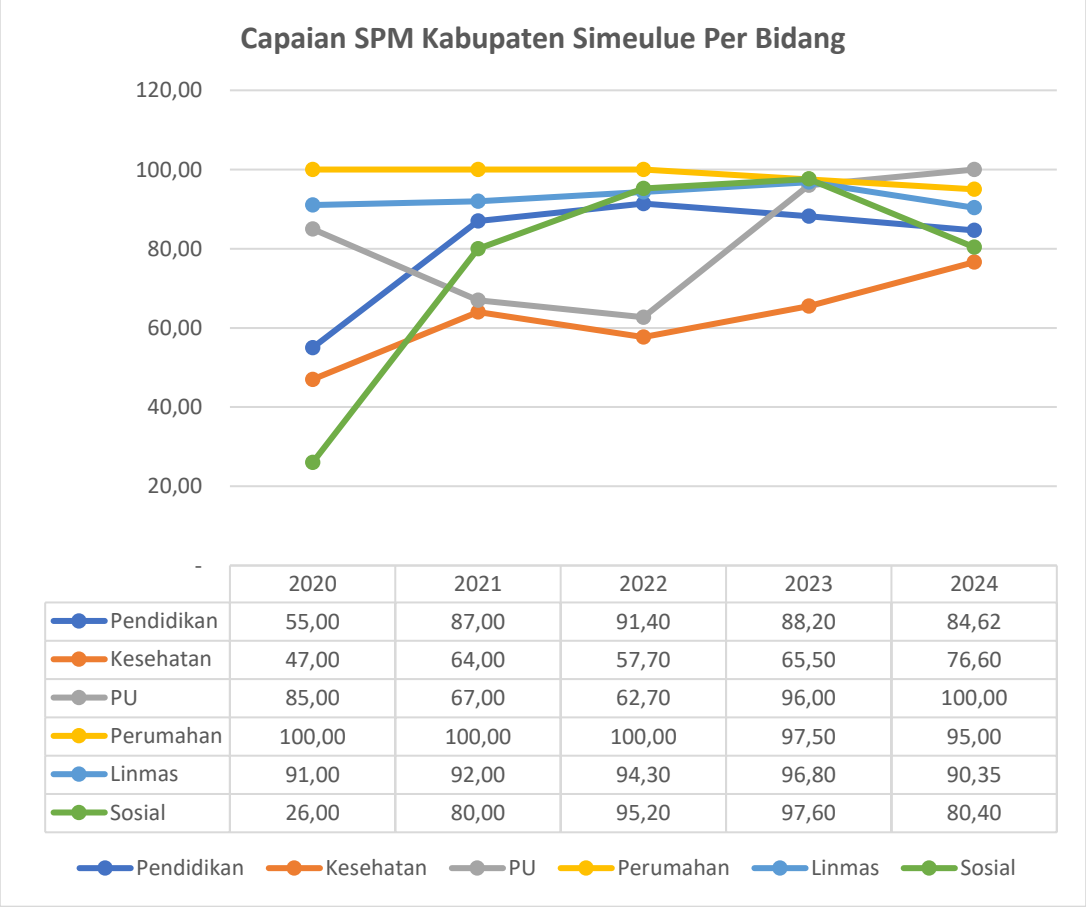

	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	55,00	87,00	91,40	88,20	84,62
Kesehatan	47,00	64,00	57,70	65,50	76,60
PU	85,00	67,00	62,70	96,00	100,00
Perumahan	100,00	100,00	100,00	97,50	95,00
Linmas	91,00	92,00	94,30	96,80	90,35
Sosial	26,00	80,00	95,20	97,60	80,40

Sumber: Sekretariat Bersama SPM Kemendagri, Tahun 2025 (data diolah)

Grafik 2.59 Capaian SPM Kabupaten Simeulue Per Bidang Tahun 2020-2024

2.6. Rencana Pembangunan Infrastruktur Sumber Pendanaan APBN dan APBA

2.6.1 Rencana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Simeulue Sumber Pendanaan APBA

A. Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkar Simeulue

Jalan dan jembatan Lingka Simeulue adalah merupakan salah infrastruktur yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan akses terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan kondisi geografis di kabupaten Simeulue, baik buruknya jalan mampu mempengaruhi kecepatan akses terhadap pembangunan ekonomi diseluruhi wilayah kecamatan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600/1243/2015 tentang Penetapan Status Ruas - Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi terdapat 2 ruas jalan Porvinsi di wilayah Kabupaten Simeulue dengan total Panjang 222,06 Km dengan rincian ruas jalan yaitu:

1) Nasreuhe – Lewak – Sibigo dengan panjang 129,420 Km
2) Sinabang – Sibigo dengan panjang 92,640 Km

Hingga tahun 2024 ruas jalan Nasreuhe – Lewak – Sibigo dalama kondisi mantap baru mencapai panjang 73,011 km atau sekitar 56,4 % sedangkan untuk ruas Jalan Sinabang – Sibgo kondisi mantap sudah mencapai 92,440 Km atau 100 % namun masih terdapat kerusakan parah di beberapa segmen ruas jalan yang diperkirakan mencapai 5,00 Km.

Dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Simeulue diperlukan peningkatan ruas jalan Nasreuhe – Lewak – Sibigo sepanjang 62,30 km tersebut, hal ini juga untuk mendukung aksesibilitas menuju Jalan Nasional yang merupakan Jalan Lingkar Simeulue, meningkatkan aksesibilitas sentra pertanian, perkebunan dan pariwisata serta akses menuju pelabuhan Sinabang sebagai Tol Laut

Tabel 2.103. Peningkatan Jalan Lingkar Simeulue pada Ruas Jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo sepanjang, 62,30 Km dengan rincian ruas

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	**Peningkatan Jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo**	**62,30**	**Km**		**373.800.000.000**
1	Lubuk Baik - Serafon	17,75	Km	6.000.000.000	106.500.000.000
2	Lewak Pantai - Lewak Hulu	4,96	Km	6.000.000.000	29.760.000.000
3	Lewak Hulu - Lhok Bikhao	25,43	Km	6.000.000.000	152.580.000.000
4	Amabaan - Babul Makmur	14,16	Km	6.000.000.000	84.960.000.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Tabel 2.104. Pembangunan Jembatan Lingkar Simeulue pada Ruas Jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo sepanjang, 308 meter dengan rincian ruas

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
B	**Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo**	**308**	**m**		**77.000.000.000**
1	Luan Lalla	36	m	250.000.000	9.000.000.000
2	Luan Tameng	40	m	250.000.000	10.000.000.000
3	Suak Simahao	30	m	250.000.000	7.500.000.000
4	Luan Along	60	m	250.000.000	15.000.000.000
5	Luan Datimon	15	m	250.000.000	3.750.000.000
6	Luan Dilla	12	m	250.000.000	3.000.000.000
7	Geloa Miteum I	10	m	250.000.000	2.500.000.000
8	Geloa Selur	20	m	250.000.000	5.000.000.000
9	Geloa Sefurung Kaol	20	m	250.000.000	5.000.000.000
10	Donggek	18	m	250.000.000	4.500.000.000
11	Jembatan Liang Buntung	12	m	250.000.000	3.000.000.000
12	Jembatan Lewak Hulu	10	m	250.000.000	2.500.000.000
13	Jembatan Sorep	15	m	250.000.000	3.750.000.000
14	Jembatan Dima	10	m	250.000.000	2.500.000.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

A. Lanjutan Pembangunan Irigasi Sigulai seluas 1983 Ha.

Di Kabupaten Simeulue terdapat Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Kabupaten dan Kewenangan Provinsi. Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten terdiri dari 52 Daerah Irigasi dan kewenangan Provinsi terdiri dari 2 Daerah Irigasi. Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi adalah Daerah Irigasi Sigulai dan Daerah Irigasi Along.

Daerah Irigasi Sigulai terletak di Kecamatan Simeulue Barat dan memiliki luasan sebesar 1.983 hektar. Areal persawahan yang akan dialiri irigasi tersebut meliputi 8 (delapan) desa yaitu Desa Sigulai, Desa Babul Makmur, Desa Lamamek, Desa Batu Ragi, Desa Malasen, Desa Miteum, Desa Sinar Bahagia dan Desa Sembilan di Kecamatan Simeulue Barat. Dengan terbangunnya daerah irigasi Sigulai tersebut luas panen padi masyarakat bisa mencapai 3.370 ha/tahun dengan asumsi produktivitas 6 – 8 ton per hektare atau produksi 23.600 ton per tahun. Pembangunan Irigasi Sigulai telah dilaksanakan sejak Tahun 2022, namun saat ini Irigasi tersebut belum fungsional. Sehingga dalam rangka keberlanjutan dan kemanfaatan, perlu untuk dilakukan pelaksanaan lanjutan Pembangunan Irigasi Sigulai di Kabupaten Simeulue dengan estimasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000.000.



Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Gambar 2.8. Peta Lokasi dan Foto Existing Irigasi Sigulai Kabupaten Simeulue

B. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Kota Sinabang Kabupaten Simeulue

Sebagiamana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana salah satu standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Air Minum. Sedangkan standar minimal yang harus dipenuhi ialah dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Dalam pemenuhan layanan air minum jaringan perpipaan di daerah permukiman perkotaan untuk saat ini dilayani oleh BUMD PDAM Tirta Fulawan sejak tahun 2006, sedangkan untuk daerah permukiman perdesaan di layani oleh SPAM IKK. Dalam melaksakan pelayanannya PDAM Tirta Fulawan di daerah perkotaan sinabang di layani oleh IPA Sefoyan di Kecamatan Simeulue Timur dengan Kapasitas terpasang sebesar 60 Liter per/detik. Dengan tingkat kebocoran saat ini hampir 60%, dan kondisi layanan pada tahun 2024, untuk Kecamatan Simeulue Timur total pelanggan sebesar 3.422 SR. Dimana pelanggan yang aktif sebesar 1987 SR.

Hal ini disebabkan salah satunya karena kecilnya kapasitas anggaran PDAM dalam dalam mengelola bisnisnya sehingga tidak mampu melakukan peremajaan sarana dan prasarana yang sudah dibangunan 20 tahun yang lalu. Dan saat ini PDAM Tirta Fulawan masih bergantung dari anggaran penyertaan modal yang di kucurkan oleh pemerintah Kabupaten Simeulue. Oleh sebab itu dukungan dana APBA sangat dibutuhkan untuk optimalsisasi kinerja Sistem Pengelolaan Air Minum Kawasan Perkotaan Sinabang yaitu sebesar Rp. 21.351.813.000.

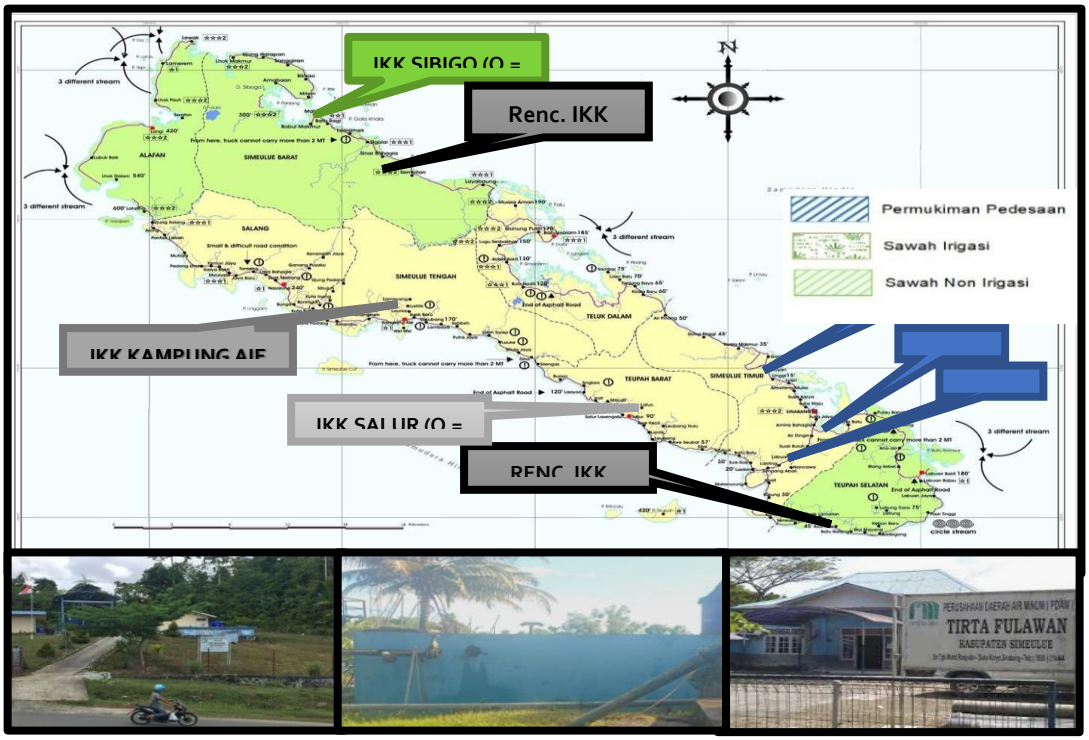

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Gambar 2.9. Peta tempat SPAM IKK PDAM Tirta Fulawan

C. Lanjutan Pembangunan Stadion Olahraga Kabupaten Simeulue

Seiring dengan berkembangnya minat masyarakat terhadap olahraga, kebutuhan akan fasilitas olahraga yang memadai menjadi sangat penting. Stadion olahraga yang sedang dibangun ini direncanakan untuk menjadi pusat kegiatan olahraga yang dapat mendukung berbagai jenis cabang olahraga, baik untuk kompetisi lokal, maupun regional.

Kabupaten Simeulue yang merupakan bagian dari wilayah provinsi Aceh belum memiliki stadion olahraga yang memadai. Stadion yang dibangun pada tahun 2008 oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui sumber pendanaan APBA belum dapat difungsikan dengan maksimal. Upaya pemanfaatan stadion pernah dilakukan pada tahun 2024 pada saat pelaksanaan turnamen sepak bola untuk memperebutkan piala Penjabat Bupati Simeulue yang diikuti oleh 30 klub bola kaki dari berbagai sekolah di 10 Kecamatan di Kabupaten Simeulue. Pemanfaatan lainya yang pernah dilaksanakan yaitu sebagai tempat pelaksanaan upacara sumpah pemuda ke-96 tahun tingkat Daerah Kabupaten Simeulue.

Dengan demikian lanjutan Pembangunan stadion olahraga Kabupaten Simeulue ini sangat penting dan perlu mendapat perhatian dari Pemetintah baik Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Simeulue agar dapat mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya dalam hal kesehatan dan prestasi olahraga. Adapun estimasi kebutuhan anggaran pada tabel di bawah ini.



Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Gambar 2.10. Peta Lokasi dan Foto Existing Stadion Kabupaten Simeulue

E. Pembangunan gedung transito transmigrasi

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memprogramkan kawasan transmigrasi. Terdapat 2 Kawasan transmigrasi yaotu Transmigrasi Latiung dan Kawasan transmigrasi Selaut. Sebagai upaya pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Simeulue diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang sesuai standar dimana salah satunya adalah ketersediaan Gedung Transito Transmigrasi,

Dikarenakan kemampuan APBD Kabupaten Simeulue yang sangat terbatas, diperlukan dukungan dari Pemerintah Aceh melalui pendanaan APBA dengan estimasi Anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000.

F. Pembangunan Rumah Layak Huni.

Pembangunan rumah layak huni serta Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program Proritas baik Pemerintah Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh serta Pemerintah Pusat. Kebutuhan akan hunian yang layak di Kabupaten Simeulue masih tergolong sangat besar yaitu ± 6000 Unit, sehingga sangat memerlukan dukungan dari Pemerintah Aceh melalui pendanaan APBA dengan estimasi Anggaran sebesar Rp. 23.750.000.000,- untuk pembangunan rumah sebanyak 125 unit.

2.6.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Simeulue Sumber APBN

B. Peningkatan Jalan dan Jembatan Lingkar Simeulue

Jalan dan jembatan Lingkar Simeulue adalah merupakan salah infrastruktur yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan akses terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan kondisi geografis di kabupaten Simeulue, baik buruknya jalan mampu mempengaruhi kecepatan akses terhadap pembangunan ekonomi diseluruhi wilayah kecamatan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600/1243/2015 tentang Penetapan Status Ruas - Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi terdapat 2 ruas jalan Porvinsi di wilayah Kabupaten Simeulue dengan total Panjang 222,06 Km dengan rincian ruas jalan yaitu:

1) Nasreuhe – Lewak – Sibigo dengan panjang 129,420 Km
2) Sinabang – Sibigo dengan panjang 92,640 Km

Hingga tahun 2024 ruas jalan Nasreuhe – Lewak – Sibigo dalam kondisi mantap baru mencapai panjang 73,011 km atau sekitar 56,4 % sedangkan untuk ruas Jalan Sinabang – Sibgo kondisi mantap sudah mencapai 92,440 Km atau 100 % namun masih terdapat kerusakan parah di beberapa segmen ruas jalan yang diperkirakan mencapai 5,00 Km. Dikarenakan kemampuan pendanaan APBA sangat terbatas, Pemerintah Kabupaten Simeulue berharap dukungan pemerintah pusat agar dapat

mengalihkan ruas jalan Nasreuhe-Lewak-Sibigo menjadi kewenangan pemerintah pusat sekaligus dukungan pendanaan Peningkatan Jalan di ruas jalan Nasreuhe-Lewak-Sibigo sepanjang 62,3 km dengan Esmasi Biaya sebesar Rp. 373.800.000.000,-

C. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo.

Sebagai upaya percepatan pembangunan Kabupaten Simeulue pada wilayah Barat, keberadaan Pelabuhan Peneybereangan Sibigo sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 552/1246/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Penetapan Kawasan pemanfaatan umum zona Pelabuhan pada Pelabuhan Penyeberangan Sibigo.. Pelabuhan ini nantinya akan melayani lntasan Sibigo-Melaboh. Dikarenakan kemampuan APBD Kabupaten Simeulue yang sangat terbatas, diperlukan dukungan dari Pemerintah Aceh melalui pendanaan APBA dengan estimasi Anggaran sebesar Rp. 36.000.000.000,-

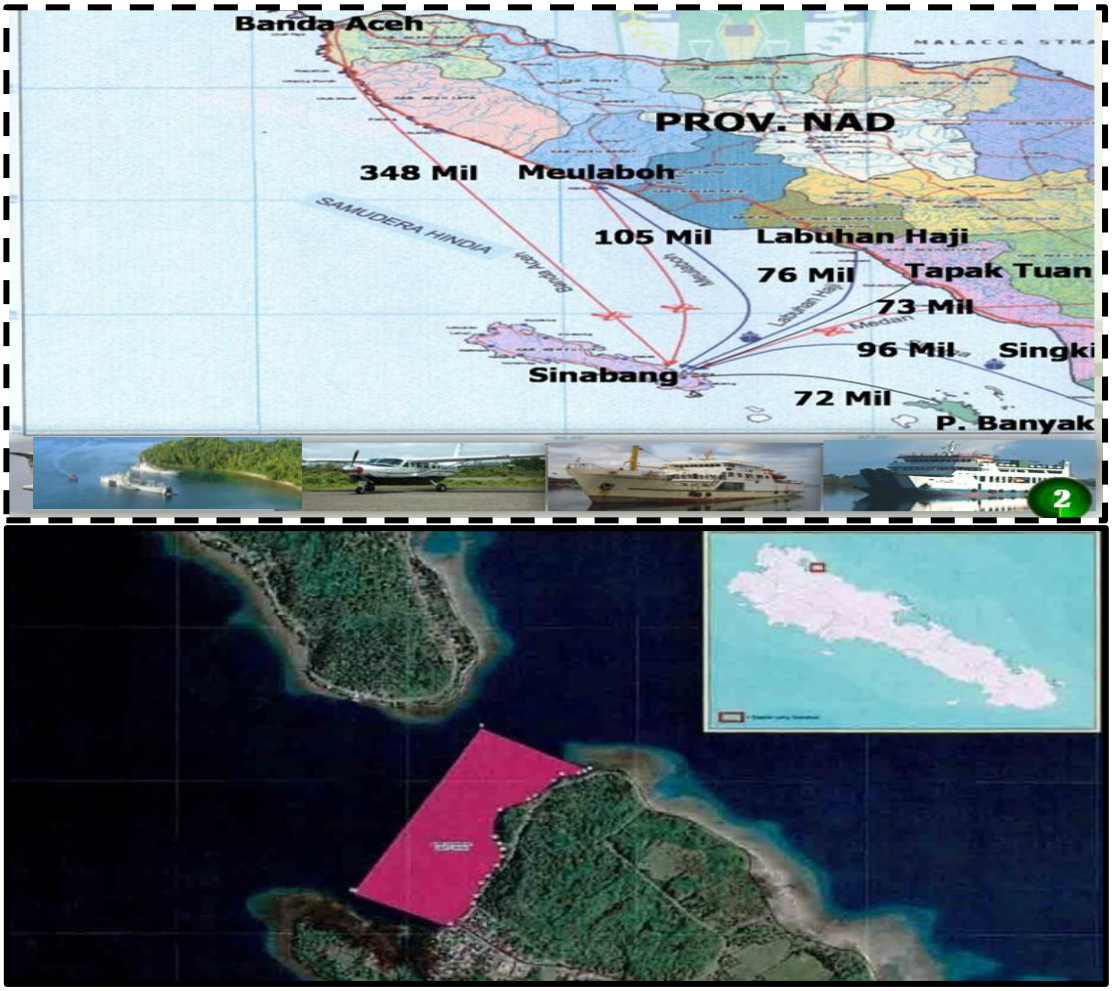

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Gambar 2.11. Peta Lokasi dan Foto Jalur Pelabuhan ke luar Kabupaten Simeulue.

D. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi PPK Trans Simeulue.

Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presicen 2024-2029 khususnya membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui Pembangunan Ketransmigrasian Aceh berdasarkan RPA tahun 2023-2026. Pemerintah Kabupaten Simeulue berupaya untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi Simeulue, baik dalam hal penanganan imfrastuktur dan pemberdayaan transmigrasi. Namun demikian dikarenakan keterbatasan anggaran baik dari Pemerintah Kabupaten Simeulue maupun pemerintah Aceh, Kabupaten Simeulue sangat membutuhkan dukungan pendanaan dari APBN untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Simeulue sebesar.Rp. 65.966.840.000,- dengan rincian pekerjaan:

Tabel 2.105. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

No	Program /Kegiatan/ Output	Volume	Anggaran
I	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**		
A	**SP Sigulai (Kawasan Transmigrasi Selaut)**		**41.806.670.000**
1	Pembangunan RTJK	100 Unit	9.500.000.000
2	Tebas tebang Potong	105,5 Ha	844.000.000
3	Pilah Kumpul Bersih	105,5 Ha	474.750.000
4	Penyemprotran RTJK	100 Unit	16.200.000
5	Pembangunan Jalan Lingkungan	3 km	1.950.000.000
6	Lanjutan Pembangunan Drainase Lahan Usaha	5600 M3	1.288.000.000
7	Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih	4,5 km	2.025.000.000
8	Pembangunan Jembatan Semi Permanen	36 M3	1.620.000.000
9	Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan	2400 m3	2.640.000.000
10	Pembangunan Talud Sungai Sigulai	3840 m3	4.224.000.000
11	Normalisasi Sungai Etutuk	23040 m3	5.299.200.000
12	Pembangunan Jalan usaha Tani	10 km	6.500.000.000
13	Pembangunan Gorong-Gorong Plat Beton	60 m3	900.000.000
14	Pembangunan Mesjid	1 unit	4.285.520.000

No	Program /Kegiatan/ Output	Volume	Anggaran
15	Pembangunan Lapangan Olahraga (Bola Volley)	200 m3	240.000.000
B	**SP Latiung (Kawasan Transmigrasi Latiung)**		**24.160.170.000**
1	Pembangunan RTJK	100 Unit	9.500.000.000
2	Tebas tebang Potong	105,5 Ha	844.000.000
3	Pilah Kumpul Bersih	105,5 Ha	474.750.000
4	Penyemprotran RTJK	100 Unit	16.200.000
5	Pembangunan Jalan Poros	5,7 km	5.415.000.000
6	Pembangunan Sarana Air Bersih	4,3 km	2.565.000.000
7	Pembangunan Jembatan Semi Permanen	24 m'	1.080.000.000
8	Pembangunan Jalan Lingkungan	3 km'	1.950.000.000
9	Pembangunan gorong-gorong plat beton	36 km'	540.000.000
10	Pembangunan Balai Desa	176 m2	528.000.000
11	Pebangunan Gudang	67,5 m2	202.500.000
12	Pembangunan Rumah Ibadah	111,24 m2	333.720.000
13	Pembangunan Kantor Unit	67,5 m2	202.500.000
14	Pembangunan Rumah Ka. Unit	67,5 m2	202.500.000
15	Pembangunan Rumah Petugas Couple	102 m2	306.000.000

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

D. Peningkatan Layanan Pelabuhan Penumpang Lokal melalui Penyediaan Armada Kapal Penumpang Lokal sebanyak 2 unit.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan, dimana terdapat 3 pual kecil berpenduduk yang sangat strategis untuk dikembangkan yaitu Pulau Siumat, Pulau Teupah dan Pulau Simeulue Cut. Sampai dengan saat ini layanan transportasi penyeberangan penumpang lokal baru tersedia pada lintasan Sinabang-Pulau Siumat, sedangkan untuk dua pulau lainya belum tersedia. Dikarenakan kemampuan APBD Kabupaten Simeulue yang sangat terbatas, diperlukan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui pendanaan APBN dengan estimasi Anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- untuk pengadaan kapal penumpang lokal sebanyak 2 unit.

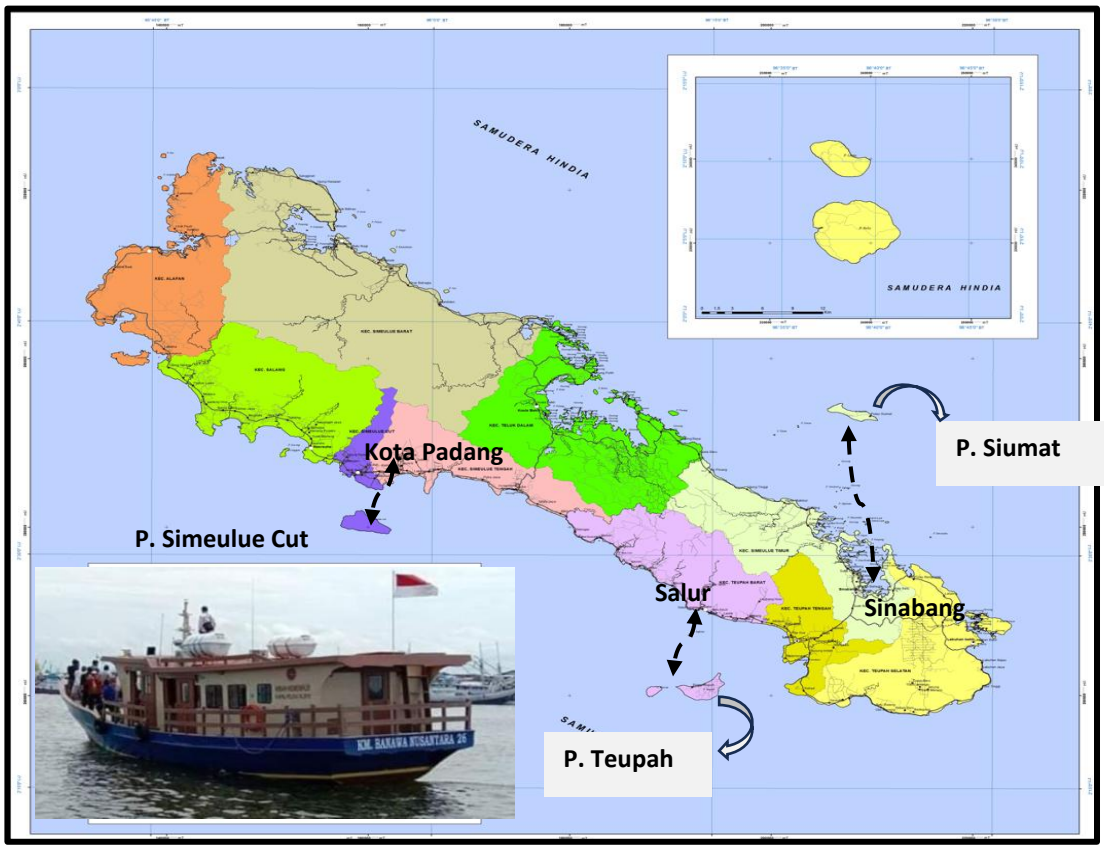

Sumber : Bappeda Kabupaten Simeulue, Tahun 2025

Gambar 2.12. Peta Lokasi dan Foto Pelabuhan Lokal di Kabupaten Simeulue.

E. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap melalui Modernisasi Armada Tangkap Ikan Kapal Pukat 30 GT

Kabupaten Simeulue, yang terletak di Provinsi Aceh, memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Dengan luas wilayah lebih dari 2.000 km² dan dikelilingi oleh perairan laut yang kaya, Simeulue memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Perairan sekitar Simeulue, yang merupakan bagian dari Laut Andaman, mendukung keanekaragaman hayati laut yang sangat beragam, mulai dari ikan komersial seperti tuna, cakalang, ikan tongkol, hingga berbagai jenis ikan karang bernilai ekonomis tinggi.

Namun, sektor perikanan di Kabupaten Simeulue menghadapi tantangan besar terkait kapasitas armada tangkap yang masih terbatas dan teknologi yang kurang efisien. Sebagian besar armada kapal perikanan di daerah ini masih mengandalkan kapal-kapal kecil dengan kapasitas terbatas, yang berdampak pada rendahnya hasil tangkapan serta ketergantungan pada metode penangkapan yang kurang ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan hasil tangkapan ikan tidak optimal, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan nelayan serta keberlanjutan ekosistem laut. Produksi Perikanan Tangkap : 18.677 Ton.

Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan modernisasi armada kapal pukat dengan kapasitas 30 GT, yang dapat meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, memperpanjang umur kapal, dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan. Melalui modernisasi armada ini, diharapkan dapat tercipta sistem perikanan yang lebih efisien dan berkelanjutan, yang mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan nelayan. Dikarenakan kemampuan APBD Kabupaten Simeulue yang sangat terbatas, diperlukan dukungan dari Pemerintah Aceh melalui pendanaan APBA dengan estimasi Anggaran sebesar Rp. 24.000.000.000.

2.7. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Simeulue

Keberadaan BUMD memiliki landasan hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Regulasi tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD sebagai salah satu instrumen strategis untuk melaksanakan fungsi pembangunan dan pelayanan publik. Suatu perusahaan dapat digolongkan sebagai BUMD apabila paling sedikit 51% kepemilikan modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah memberikan penjelasan mendalam mengenai karakteristik BUMD. Pertama, BUMD didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan status badan usaha yang terpisah dari struktur organisasi perangkat daerah. Kedua, kepemilikan modal dapat berasal dari satu daerah, beberapa daerah, maupun kolaborasi dengan pihak non-daerah. Ketiga, seluruh atau sebagian besar modal yang digunakan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Keempat, BUMD tidak boleh diperlakukan sebagai perangkat daerah, melainkan sebagai entitas bisnis yang beroperasi mengikuti kelaziman dunia usaha. Dengan demikian, posisi BUMD berada pada persimpangan antara badan publik dan badan privat, sehingga pengelolaannya harus tunduk pada dua rezim regulasi sekaligus, yaitu regulasi sektor publik dan tata kelola korporasi sektor privat.

BUMD juga memiliki karakteristik berbeda dibandingkan badan usaha swasta. Aktivitasnya diprioritaskan untuk memberikan kemanfaatan umum, seperti menyediakan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai potensi lokal daerah. Dengan posisi ini, BUMD diharapkan berperan sebagai agen pembangunan sekaligus motor penggerak perekonomian daerah.

1. Profil BUMD Kabupaten Simeulue

Pemerintah Kabupaten Simeulue hingga saat ini memiliki kepemilikan modal pada dua BUMD, yaitu Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Fulawan, dengan status kepemilikan 100% Pemerintah Daerah.

Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Pendirian PDKS didasarkan pada Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 dengan Akta Notaris H. Nasrullah, SH Nomor 01 tanggal 1 November 2002. PDKS mengelola areal perkebunan sawit seluas ±5.000 Ha yang terbagi di Kebun Ate Fulawan I Kecamatan Teluk Dalam seluas 3.539,15 Ha dan Kebun Ate Fulawan II Kecamatan Teupah Selatan seluas 1.460,85 Ha. Dari sisi legalitas, perusahaan ini telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.128/Menhut-II/2009 tentang perubahan fungsi sebagian hutan lindung, namun proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) masih berlangsung. Sejak tahun 2009, PDKS merencanakan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), namun hingga kini belum terealisasi secara penuh. Dari sisi permodalan, modal dasar ditetapkan Rp17,5 miliar, sementara modal yang telah disetor Pemerintah Kabupaten Simeulue mencapai Rp255,38 miliar.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Fulawan didirikan melalui Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2007. PDAM ini memiliki fungsi vital dalam menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat. Permodalan dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp1 miliar, dengan modal disetor mencapai Rp12,92 miliar. Seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Sebagai penyedia layanan dasar, PDAM Tirta Fulawan berperan penting dalam menjamin hak masyarakat atas air bersih, walaupun cakupan pelayanan masih terbatas pada wilayah perkotaan dan sebagian wilayah kecamatan.

2. Kinerja Pelayanan BUMD

Secara faktual, kinerja kedua BUMD Kabupaten Simeulue masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun operasional. PDKS sejak awal pendiriannya belum mampu berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Luas areal yang cukup besar belum sepenuhnya memberikan nilai tambah karena pembangunan PKS tertunda, sehingga produktivitas sawit tidak optimal. Hambatan administrasi dalam penyelesaian HGU juga menjadi faktor penghambat utama. Keterbatasan ini membuat kontribusi PDKS terhadap penciptaan lapangan kerja maupun pengembangan ekonomi lokal belum maksimal.

Sementara itu, PDAM Tirta Fulawan sudah lebih beroperasi secara nyata karena fungsi pelayanan air bersih bersifat wajib. Namun, cakupan layanannya masih terbatas, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah dengan kondisi geografis sulit. Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur perpipaan, kebocoran distribusi, serta keterbatasan kapasitas produksi. Walaupun demikian, PDAM tetap menjadi salah satu tulang punggung pelayanan dasar di Simeulue, khususnya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan kualitas hidup.

3. Arah Kebijakan Pelayanan BUMD Tahun 2025–2029

Untuk periode perencanaan 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu menempatkan penguatan BUMD sebagai agenda strategis. Pertama, optimalisasi aset PDKS harus menjadi prioritas, melalui penyelesaian HGU, peningkatan produktivitas kebun sawit, serta percepatan pembangunan PKS. Keberhasilan langkah ini akan membuka ruang peningkatan PAD dan menciptakan lapangan kerja baru. Kedua, penguatan PDAM Tirta Fulawan diperlukan agar dapat memperluas cakupan layanan hingga ke desa-desa, sekaligus meningkatkan kualitas distribusi air bersih. Hal ini selaras dengan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum.

Ketiga, BUMD perlu didorong untuk menjalankan praktik Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten, mulai dari transparansi laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, hingga efektivitas pengambilan keputusan. Keempat, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan kemitraan strategis antara BUMD dengan sektor swasta, baik dalam bentuk penyertaan modal bersama, alih teknologi, maupun akses pasar, tanpa mengurangi kendali mayoritas pemerintah daerah. Kelima, diversifikasi usaha BUMD dapat diarahkan pada sektor-sektor potensial lain di Simeulue, seperti perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan, agar BUMD tidak hanya bertumpu pada sawit dan air bersih.

Dengan posisi strategisnya, BUMD diharapkan mampu menjadi agen pembangunan daerah sekaligus penggerak ekonomi rakyat. PDKS perlu segera diberdayakan agar mampu memberikan nilai tambah yang nyata, sementara PDAM Tirta Fulawan harus terus diperkuat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat. Melalui strategi penguatan aset, penerapan tata kelola yang baik, serta pengembangan sektor baru yang berbasis potensi lokal, BUMD Kabupaten Simeulue dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE



BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2025-2029



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses penyusunan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) Simeulue Tahun 2025-2045, disebutkan bahwa RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam pembangunan jangka Panjang. Dokumen RPJPK Simeulue Tahun 2025-2045 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam perspektif pembangunan 20 tahun kedepan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simeulue. Berdasarkan substansi pembangunan yang ingin dicapai pada tahap pertama RPJPK Simeulue, serta merujuk pada Visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 dan RPJMA Tahun 2025-2029, maka visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Simeulue untuk Tahun 2025-2029 adalah:

"MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"

Penjelasan sekaligus merupakan pembatasan makna dari kata kunci yang terdapat dalam visi diatas sebagai berikut:

1. **Bermartabat**

   Dalam 5 (lima) tahun ke depan pemerintah Kabupaten Simeulue dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan berupaya untuk menciptakan Simeulue sebagai wilayah yang dihormati dan memiliki nilai-nilai luhur. Dalam konteks ini, Simeulue bermartabat berarti bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal, nilai-nilai budaya, dan norma-norma agama, khususnya penerapan syariat Islam yang kuat.

   Dari sisi pembangunan internal, Simeulue Bermartabat sangat ditentukan oleh Kesejahteraan dan Keadilan Sosial dimana proses pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat Simeulue dalam bentuk peningkatan kualitas hidup, di mana kesejahteraan dan keadilan sosial terjamin. Hal ini termasuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Simeulue Bermartabat dalam aspek hubungan eksternal ditentukan oleh kemandirian dan kehormatan di mata daerah lain. Simeulue diharapkan menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi dan politik, sehingga dapat berdiri sejajar dengan daerah lain di Provinsi Aceh dan Indonesia secara keseluruhan. Kemandirian ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar Simeulue dalam kerja sama regional dan nasional.

2. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030

Konsep Ekonomi Biru berfokus pada pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Simeulue memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari. Menjadikan Simeulue sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru berarti memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya laut secara lestari, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem laut.

Pengembangan Sektor Kelautan mencakup pengembangan industri perikanan, pelabuhan ikan berstandar internasional, budidaya laut, dan pengolahan hasil laut untuk ekspor. Pengembangan ini harus dilakukan dengan teknologi modern dan ramah lingkungan untuk memastikan keberlanjutan.

Mengembangkan Simeulue sebagai spot Pariwisata Bahari unggulan dengan mempromosikan pulau-pulau eksotis seperti Pulau Lasia dan Pulau Teupah, dapat menarik wisatawan domestik dan internasional. Pengembangan wisata ini juga harus didukung dengan infrastruktur pariwisata yang baik dan promosi yang masif.

Tahun 2030 mencerminkan pembangunan di Simeulue merupakan proses yang berlangsung dalam Jangka Panjang dan Keberlanjutan. Tahun 2030 menunjukkan adanya target jangka panjang untuk menciptakan perubahan yang signifikan di Simeulue. Pembangunan yang terarah dan berkelanjutan dalam dekade ini akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi biru, akan mencapai puncaknya.

Tahun 2030 merupakan milestone atau tonggak pencapaian dalam menciptakan Kesiapan menghadapi tantangan global terutama dalam konteks perubahan iklim dan tantangan global lainnya. visi ini menyiratkan bahwa Simeulue harus siap beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam sektor kelautan yang rentan terhadap perubahan ekosistem dan ekonomi global.

3.1.2 Misi

Untuk mencapai visi pembangunan Kepala Daerah Kabupaten Simeulue, maka Pemerintah Daerah 9 (sembilan) Misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam periode 2025-2029. Adapun misi Kabupaten Simeulue adalah:

1. **Penegakan Syariat Islam dan Penguatan Nilai-Nilai Keislaman dalam Kehidupan Masyarakat**. misi ini merupakan upaya untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam dalam setiap sisi kehidupan seluruh penduduk Simeulue. Diharapkan melalui penguatan nilai-nilai keislaman akan melahirkan SDM Simeulue yang berkualitas, berkarakter, shaleh, Tangguh, berdaya saing, serta sehat secara fisik dan psikologis, pada saat yang sama akan dilakukan upaya sistematis untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari.
2. **Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.** Diharapkan pemerintah Simeulue dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah sehingga mengurangi ketimpangan di seluruh Simeulue, pembangunan juga merupakan upaya dalam menjamin ketersediaan akses terhadap berbagai layanan dasar sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. selain itu, pemerintah dapat melakukan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat lokal yang berimplikasi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
3. **Mitigasi Risiko Bencana dan Penguatan Ketahanan Daerah.** Diharapkan kesiapsiagaan masyarakat Simeulue tetap terjaga sepanjang waktu melalui internalisasi nilai budaya dalam seluruh aspek kehidupan terutama sistem Pendidikan dan layanan publik sehingga dapat mengurangi risiko dampak bencana. Keberlanjutan pembangunan sangat dipengaruhi oleh ketangguhan daerah menghadapi bencana termasuk kemampuan daerah dalam membangun melindungi dan infrastruktur vital.
4. **Diversifikasi Ekonomi melalui Sektor Ekonomi Biru.** merupakan langkah dalam meningkatkan citra, daya saing dan kemandirian daerah berlandaskan potensi maritim Simeulue. Diversifikasi ekonomi biru diarahkan pada upaya pergesersan pengembangan pola produksi dari tradisional menjadi pola produksi yang modern yang dicirikan melalui penigkatan nilai tambah potensi laut Simeulue.
5. **Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM.** Misi tersebut merupakan upaya peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, budidaya laut hingga teknologi maritim. Diharapkan metode pengelolaan sumber daya

ekonomi biru Simeulue akan bergeser dari pendekatan tradisional menuju pengelolaan yang lebih modern yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Simeulue.

6. **Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Tertinggal.** misi ini merupakan upaya sistematis dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, mengembangkan potensi daerah yang mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan menciptakan kemandirian daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk Simuelue.
7. **Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Pariwisata.** adalah upaya daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan laut dalam wilayah administrasi Kabupaten Simeulue oleh masyarakat Simeulue dengan memanfaatan investasi lokal maupun dari luar Simeulue berbasis kesejahteraan penduduk dan kemandirian ekonomi lokal.
8. **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.** Misi ini menekankan perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Simeulue. Fokus utamanya mencakup peningkatan layanan dasar, gizi, imunisasi, pengendalian penyakit, serta promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan tangguh.
9. **Penguatan Reformasi Birokrasi.** Misi ini bertujuan membangun birokrasi yang bersih, efisien, akuntabel, dan melayani. Upaya dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, dan penguatan budaya kerja yang profesional guna mendukung pelayanan publik yang transparan dan responsif.

3.1.3 Keterkaitan Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Simeulue yang Bermartabat dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030”, menjadi arah strategis pembangunan jangka menengah daerah. Visi ini memuat dua pokok utama, yakni “Bermartabat” dan “Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru”, yang menjadi dasar dalam perumusan misi pembangunan daerah. Setiap misi dirancang sebagai pilar strategis yang menjabarkan langkah-langkah konkret di berbagai bidang, seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.

Keterkaitan antara masing-masing misi dan pokok-pokok visi secara sistematis dapat dilihat pada Tabel 3.1, yang menunjukkan kontribusi setiap misi dalam mendukung arah pembangunan daerah.

Tabel 3.1. Keterkaitan Misi terhadap Pokok-Pokok Visi Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029

No.	Pokok Visi yang Terkait	Misi
1	*2*	*3*
1	Bermartabat	Penegakan Syariat Islam dan Penguatan Nilai-Nilai Keislaman dalam Kehidupan Masyarakat
2	Bermartabat	Mitigasi Risiko Bencana dan Penguatan Ketahanan Daerah
3	Bermartabat	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM
4	Bermartabat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
5	Bermartabat	Penguatan Reformasi Birokrasi
6	Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru	Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Pariwisata
7	Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru	Diversifikasi Ekonomi Melalui Sektor Ekonomi Biru
8	Bermartabat, Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru	Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Tertinggal
9	Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru	Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

3.1.4 Penyelarasan Visi dan Misi Kabupaten Simeulue dengan Visi Misi dan Aceh dan Nasional

Penyelarasan visi dan misi pembangunan daerah dengan arah kebijakan provinsi dan nasional penting untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan. Visi Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Simeulue yang Bermartabat dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030”, memiliki keterkaitan strategis dengan visi Provinsi Aceh dan visi nasional Indonesia Emas 2045.

Pokok visi “Bermartabat” sejalan dengan nilai religius, keadilan, dan tata kelola yang diusung oleh Provinsi Aceh dan nasional. Sementara “Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru” selaras dengan fokus pembangunan Aceh di sektor maritim dan misi nasional dalam penguatan ekonomi biru, hijau, dan digital. Keterkaitan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2. Penyelarasan Visi dan Misi Kabupaten Simeulue dengan Visi dan Misi Aceh dan Nasional

Visi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029: ***"Mewujudkan Simeulue yang Bermartabat dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030"***	**Visi RPJMA Tahun 2025-2029:** ***"Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan"***	**Visi RPJMN Tahun 2025-2029:** ***"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"***
Misi Kabupaten Simeulue	**Keterkaitan dengan Misi Aceh**	**Keterkaitan dengan Misi Nasional (Asta Cita)**
1	*2*	*3*
Misi 1: Penegakan Syariat Islam dan Penguatan Nilai-Nilai Keislaman Dalam Kehidupan Masyarakat	**Misi 1:** Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah **Misi 2:** Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA	**Asta Cita 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); **Asta Cita 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi 2: Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	**Misi 4:** Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan	**Asta Cita 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan berkualitas, kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Visi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029: *"Mewujudkan Simeulue yang Bermartabat dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030"*	Visi RPJMA Tahun 2025-2029: *"Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan"*	Visi RPJMN Tahun 2025-2029: *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"*
Misi Kabupaten Simeulue	**Keterkaitan dengan Misi Aceh**	**Keterkaitan dengan Misi Nasional (Asta Cita)**
1	*2*	*3*
Misi 3: Mitigasi Risiko Bencana dan Penguatan Ketahanan Daerah	**Misi 7:** Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya	**Asta Cita 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi 4: Diversifikasi Ekonomi Melalui Sektor Ekonomi Biru	**Misi 3:** Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas	**Asta Cita 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; **Asta Cita 5:** Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Visi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029: *"Mewujudkan Simeulue yang Bermartabat dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030"*	Visi RPJMA Tahun 2025-2029: *"Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan"*	Visi RPJMN Tahun 2025-2029: *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"*
Misi Kabupaten Simeulue	**Keterkaitan dengan Misi Aceh**	**Keterkaitan dengan Misi Nasional (Asta Cita)**
1	*2*	*3*
Misi 5: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM	**Misi 5:** Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas	**Asta Cita 4:** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
Misi 6: Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Tertinggal	**Misi 3:** Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas	**Asta Cita 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Misi 7: Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Pariwisata	**Misi 3:** Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas	**Asta Cita 3:** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan berkualitas, kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Visi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029: *"Mewujudkan Simeulue yang Bermartabat dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030"*	Visi RPJMA Tahun 2025-2029: *"Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan"*	Visi RPJMN Tahun 2025-2029: *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"*
Misi Kabupaten Simeulue	**Keterkaitan dengan Misi Aceh**	**Keterkaitan dengan Misi Nasional (Asta Cita)**
1	*2*	*3*
		Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Misi 8: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	**Misi 5:** Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas	**Asta Cita 4:** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
Misi 9: Penguatan Reformasi Birokrasi	**Misi 6:** Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum	**Asta Cita 7:** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

3.1.5 Penyelarasan Visi dan Misi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPK Simelue Tahun 2025-2045

Keselarasan antara RPJMK Simeulue 2025–2029 dan RPJPK Simeulue 2025–2045 merupakan langkah penting untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan konsisten dan berkesinambungan. Sebagai dokumen jangka menengah, RPJMK harus menjadi penjabaran operasional dari arah pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPK, sehingga setiap visi, misi, dan strategi yang ditetapkan dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian target jangka panjang daerah.

Melalui pemetaan keselarasan ini, terlihat bahwa fokus pembangunan lima tahunan, seperti penguatan syariat Islam, peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi biru, pemerataan wilayah, perbaikan tata kelola, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, sepenuhnya mendukung visi besar Kabupaten Simeulue menuju daerah yang maju, Islami, dan berkelanjutan pada tahun 2045. Dengan demikian, pemetaan ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa arah kebijakan dalam RPJMK berada dalam satu jalur yang sama dengan agenda transformasi jangka panjang daerah.

Berikut disajikan tabel pemetaan keselarasan Visi dan Misi RPJMK 2025–2029 dengan Visi dan Misi RPJPK Simeulue 2025–2045.

Tabel 3.3 Penyelarasan Visi dan Misi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPK Simelue Tahun 2025-2045

Visi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029: **"Mewujudkan Simeulue yang Bermartabat dan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030"**	**Visi RPPK Simeulue Tahun 2025-2029:** **"Simeulue yang Maju, Islami dan Berkelanjutan"**	**Keselarasan**
Misi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029	**Misi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029**	
1	*2*	*3*
Misi 1: Penegakan Syariat Islam dan Penguatan Nilai-Nilai Keislaman dalam Kehidupan Masyarakat.	**Misi I:** Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi serta **Misi IV:** Mewujudkan Kemanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, Stabilitas Ekonomi dan Pembangunan Syariat Islam	Keduanya menekankan pentingnya akhlak, karakter, moral, dan penerapan Syariat Islam sebagai pondasi pembentukan SDM dan stabilitas sosial.
Misi 2: Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.	**Misi II:** Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah, **Misi VI:** Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, dan Misi VII: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Infrastruktur dalam RPJMK mendukung transformasi ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah, serta peningkatan sarpras yang berkelanjutan.
Misi 3: Mitigasi Risiko Bencana dan Penguatan Ketahanan Daerah.	**Misi V:** Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dan Misi VIII: Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah	Kedua misi RPJPK menekankan ketahanan sosial, budaya, lingkungan, serta pembangunan yang responsif terhadap risiko bencana.

Visi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029: "Mewujudkan Simeulue yang Bermartabat dan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030"	Visi RPPK Simeulue Tahun 2025-2029: "Simeulue yang Maju, Islami dan Berkelanjutan"	Keselarasan
Misi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029	**Misi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029**	
1	*2*	*3*
Misi 4: Diversifikasi Ekonomi Melalui Sektor Ekonomi Biru.	**Misi II:** Mewujudkan Transformasi Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah dan Misi VIII: Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah	Ekonomi biru merupakan bagian dari transformasi ekonomi daerah sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Misi 5: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM.	**Misi I:** Mewujudkan Transformasi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi dan Misi VII: Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi ini selaras dengan pengembangan SDM unggul, serta dukungan sarana pendidikan dan pelatihan yang memadai.
Misi 6: Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Tertinggal	**Misi VI:** Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan serta Misi II: Transformasi Ekonomi Daerah	Fokus pemerataan wilayah dan pemberdayaan ekonomi lokal sepenuhnya sejalan dengan misi kewilayahan dan transformasi ekonomi RPJPK.
Misi 7: Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Pariwisata	**Misi II:** Transformasi Ekonomi Daerah dan Misi VII: Peningkatan Sarana dan Prasarana Berkualitas	Kedua misi RPJPK menekankan peningkatan daya saing ekonomi daerah termasuk pariwisata, serta kebutuhan infrastruktur pendukung.

Visi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029: "Mewujudkan Simeulue yang Bermartabat dan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030"	Visi RPPK Simeulue Tahun 2025-2029: "Simeulue yang Maju, Islami dan Berkelanjutan"	Keselarasan
Misi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029	**Misi RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029**	
1	*2*	*3*
Misi 8: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	**Misi I:** Transformasi SDM Berkualitas dan Misi VII: Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar	Kesehatan merupakan unsur utama SDM unggul dan membutuhkan sarpras pelayanan dasar yang berkualitas.
Misi 9: Penguatan Reformasi Birokrasi	**Misi III:** Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Baik	Sangat selaras karena kedua misi menitikberatkan pada tata kelola yang efisien, transparan, modern, dan akuntabel.

3.1.6 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran dalam RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Tujuan dan sasaran tersebut disusun untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, serta menjawab berbagai tantangan strategis, hambatan, dan kebutuhan pembangunan yang dihadapi Simeulue. Proses penetapannya mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dan provinsi (RPJMA), sehingga terwujud kesinambungan dan integrasi antar tingkat pemerintahan.

Tujuan pembangunan daerah berfungsi sebagai arah utama atau *road map* dalam pelaksanaan pembangunan, yang akan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam sasaran dan program kegiatan setiap perangkat daerah. Dalam RPJMK ini ditetapkan sebanyak 9 tujuan pembangunan yang mencerminkan prioritas utama daerah, masing-masing dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang terukur, guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya.

Untuk mengukur capaian pembangunan secara menyeluruh, digunakan indikator makro yang menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah. Indikator makro tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, PDRB Perkpitad ADHB, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Keberhasilan dalam capaian indikator-indikator ini tidak hanya ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Simeulue, serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029 ini menetapkan sebanyak 12 sasaran pembangunan yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan tujuan secara lebih operasional. Penetapan sasaran tersebut disertai indikator yang SMART (*Spesifik, Measureable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*), untuk memastikan pencapaian target pembangunan dapat diukur dan dievaluasi secara berkala.

Fokus strategis pembangunan Simeulue antara lain meliputi: penguatan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakat, baik melalui jalur pendidikan formal dan non-formal maupun melalui media sosial; pemberdayaan ekonomi berbasis syariah; peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama aparatur sipil negara (ASN) agar memenuhi standar nasional; serta penguatan SDM kesehatan melalui dorongan pendidikan bagi calon tenaga kesehatan.

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan melalui pemetaan sektor unggulan, peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur yang mendukung perluasan akses ekonomi, serta penguatan kemandirian daerah. Selain itu, pembangunan diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong kualitas pelayanan publik, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Penetapan tujuan dan sasaran yang terukur merupakan fondasi penting dalam menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah. Hal ini memungkinkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian pembangunan secara objektif pada akhir periode RPJMK.

Misi 1. Penegakan Syariat Islam dan Penguatan Nilai-Nilai Keislaman dalam Kehidupan Masyarakat.

1.1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Simeulue Berlandaskan Nilai-Nilai Syariat Islam dan Norma Adat Istiadat.

1.1.1. Meningkatnya Nilai-Nilai Pengamalan Syariat Islam yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, dan Beradab sesuai Syariat Islam serta Nilai-Nilai Adat Istiadat Aceh.

Misi 2. Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

2.1. Meningkatkan Konektivitas Antarwilayah dalam Kabupaten Simeulue serta Menjamin Kualitas dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

2.1.1. Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Jasa Perhubungan yang Berkualitas, Terpadu, dan Berkelanjutan.

Misi 3. Mitigasi Risiko Bencana dan Penguatan Ketahanan Daerah.

3.1. Meningkatkan Kapasitas dan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana serta Efektivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.1.1. Terwujudnya Daerah yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana serta Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Misi 4. Diversifikasi Ekonomi Melalui Sektor Ekonomi Biru.

4.1. Mewujudkan Ekonomi Biru sebagai Penggerak Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Perekonomian Daerah.

4.1.1. Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Biru terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah.

Misi 5. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM

5.1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing serta Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Terintegrasi.

5.1.1. Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Aksesibilitas Layanan Pengembangan SDM Masyarakat yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

5.1.2. Meningkatnya Kapasitas Kehidupan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif Disertai Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Terintegrasi.

Misi 6. Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Tertinggal.

6.1. Mewujudkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Produktif, dan Berkeadilan Berlandaskan Keunggulan Kompetitif serta Berdaya Saing sebagai Penggerak Perekonomian.

6.1.1. Meningkatnya Desa yang Berdaya Saing, Maju, dan Mandiri.

6.1.2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berorientasi pada Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Tertinggal.

Misi 7. Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Pariwisata.

7.1. Meningkatkan Daya Tarik Investasi dan Pengembangan Pariwisata yang Berdaya Saing.

7.1.1. Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi serta Daya Saing Destinasi dan Produk Pariwisata Daerah.

Misi 8. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

8.1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat.

8.1.1. Tercapainya Masyarakat yang Sehat dan Produktif sesuai Siklus Hidup.

Misi 9. Penguatan Reformasi Birokrasi.

9.1 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Melayani.

9.1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, Transparan, dan Responsif.

9.1.2 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Publik.

Untuk memastikan tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan perumusan indikator kinerja yang disertai target capaian tahunan. Rincian indikator dan target setiap tujuan dan sasaran secara lengkap dapat dilihat pada **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"											
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**KONDISI AWAL (2024)**	**TARGET CAPAIAN (TAHUN)**						**KONDISI AKHIR (2030)**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Misi 1: Penegakan Syariat Islam dan Penguatan Nilai-Nilai Keislaman dalam Kehidupan Masyarakat											
1.1	**Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Simeulue Berlandaskan Nilai-Nilai Syariat Islam dan Norma Adat Istiadat**	**Indeks Pembangunan Syariah**	**Indeks**	**81,84**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**87**
1.1.1	Meningkatnya Nilai-Nilai Pengamalan Syariat Islam yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, dan Beradab sesuai Syariat Islam Serta Nilai-Nilai Adat Istiadat Aceh	Persentase Penerapan Kurikulum Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Islami pada Tingkat Pendidikan Dasar	%	0	5	10	20	30	40	50	60
		Persentase Pusat Dakwah yang Representatif	%	78	81	84	88	91	94	100	100
		Persentase Pertumbuhan Zakat yang Terkumpul terhadap Potensi Zakat	%	17,22	19,29	21,59	24,18	27,08	30,33	33,97	33,97
		Persentase Desa dengan Kelembagaan Adat yang Aktif dan Dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"											
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**KONDISI AWAL (2024)**	**TARGET CAPAIAN (TAHUN)**						**KONDISI AKHIR (2030)**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Konflik Sosial yang Ditangani dan Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Misi 2: Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkelanjutan											
2.1	**Meningkatkan Konektivitas Antarwilayah dalam Kabupaten Simeulue serta Menjamin Kualitas dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**	**Rasio Konektivitas**	**%**	**72,96**	**75**	**77,25**	**79,50**	**81,75**	**84**	**86,25**	**86,25**
2.1.1	Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Jasa Perhubungan yang Berkualitas, Terpadu, dan Berkelanjutan	Cakupan Wilayah Yang Dilayani Angkutan Umum Darat Dan Penyeberangan	%	55	60	65	70	75	80	85	85
		Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar dan Sarana Utilitas Umum dan Kawasan Permukiman	%	84,99	86	87	88	89	90	91	91

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"											
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**KONDISI AWAL (2024)**	**TARGET CAPAIAN (TAHUN)**						**KONDISI AKHIR (2030)**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Misi 3: Mitigasi Risiko Bencana dan Penguatan Ketahanan Daerah											
3.1	**Meningkatkan Kapasitas dan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana serta Efektivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	**Indeks**	**0,30**	**0,31**	**0,32**	**0,33**	**0,34**	**0,35**	**0,36**	**0,36**
3.1.1	Terwujudnya Daerah yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana serta Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	162	161	160	159	158	157	156	156
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,82	84,03	84,20	84,37	84,55	84,72	84,98	84,60
Misi 4: Diversifikasi Ekonomi Melalui Sektor Ekonomi Biru											
4.1	**Mewujudkan Ekonomi Biru sebagai Penggerak Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Perekonomian Daerah**	**PDRB Per Kapita ADHB**	**Juta Rupiah**	**31,94**	**33,846**	**35,747**	**37,649**	**39,550**	**41,452**	**43,353**	**43,353**
4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Biru terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	22.990	24.392	25.794	27.323	28.945	30.664	32.486	32.486
		Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB	%	1,74	1,86	1,98	2,11	2,23	2,35	2,48	1,86

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"											
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**KONDISI AWAL (2024)**	**TARGET CAPAIAN (TAHUN)**						**KONDISI AKHIR (2030)**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Misi 5: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM											
5.1	**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing serta Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Terintegrasi**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	**69,01**	**72,18**	**73,41**	**74,64**	**75,87**	**77,10**	**78,33**	**78,33**
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	**Indeks**	**0,433**	**0,396**	**0,360**	**0,323**	**0,286**	**0,249**	**0,213**	**0,213**
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**%**	**5,50**	**5,43**	**5,36**	**5,29**	**5,22**	**5,15**	**5,08**	**5,08**
5.1.1	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Aksesibilitas Layanan Pengembangan SDM Masyarakat yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	10,03	10,16	10,30	10,44	10,57	10,71	10,71
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,53	14,74	14,95	15,16	15,37	15,58	15,79	15,79
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	45,43	47,92	50,41	52,90	55,39	57,88	60,37	60,37
		Persentase Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Kebudayaan, Adat, Termasuk Kesenian Tradisional dan Warisan Budaya	%	55	60	65	70	75	80	85	85
		Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	60	62	64	66	68	70	72	72
		Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional yang Diikuti	%	64	70	75	80	85	90	95	95
		Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	%	85	85	85	85	85	95	95	95

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"											
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**KONDISI AWAL (2024)**	**TARGET CAPAIAN (TAHUN)**						**KONDISI AKHIR (2030)**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
5.1.2	Meningkatnya Kapasitas Kehidupan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif Disertai Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Terintegrasi	Tingkat Kemiskinan	%	17,69	17,26	16,83	16,40	15,97	15,54	15,11	15,11
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,08	71,26	71,44	71,61	71,79	71,97	72,15	72,15
		Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	66,29	64,50	62,20	59,80	57,30	54,90	52,50	52,50
		Total Fertility Rate (Angka kelahitan total)	Anak Per Perempuan	2,67	2,58	2,48	2,38	2,29	2,19	2,10	2,10
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,27	63,06	63,85	64,64	65,43	66,22	67,01	67,01
Misi 6: Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Tertinggal											
6.1	**Mewujudkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Produktif, dan Berkeadilan Berlandaskan Keunggulan Kompetitif serta Berdaya Saing sebagai Penggerak Perekonomian**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**4,43**	**4,77**	**5,11**	**5,45**	**5,79**	**6,13**	**6,47**	**6,47**
		Rasio Gini	**Indeks**	**0,259**	**0,250**	**0,241**	**0,231**	**0,222**	**0,213**	**0,204**	**0,204**
		Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	**Indeks**	**2,35**	**2,49**	**2,56**	**2,62**	**2,69**	**2,76**	**2,79**	**2,79**
		Indeks Desa	**Indeks**	**0,6695**	**0,6850**	**0,7005**	**0,7161**	**0,7316**	**0,7471**	**0,7626**	**0,7626**

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"											
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**KONDISI AWAL (2024)**	**TARGET CAPAIAN (TAHUN)**						**KONDISI AKHIR (2030)**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
6.1.1	Meningkatnya Desa yang Berdaya Saing, Maju, dan Mandiri	Persentase Desa yang Mengalami Peningkatan Status	%	7	15	25	35	45	65	75	75
6.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berorientasi pada Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Tertinggal	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB Simeulue	%	38,06	38,80	39,54	40,27	41,01	41,74	42,48	42,48
		Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB ADHB	%	38,06	13,41	13,57	13,72	13,87	14,03	14,18	13,41
		Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB	%	1,34	1,36	1,39	1,41	1,44	1,46	1,49	1,34
Misi 7: Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Pariwisata											
7.1	**Meningkatkan Daya Tarik Investasi dan Pengembangan Pariwisata yang Berdaya Saing**	**Nilai Investasi (PMA dan PMDN)**	**Juta Rupiah**	**26.555**	**35.487**	**42.512**	**56.763**	**63.777**	**74.533**	**85.666**	**85.666**
7.1.1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi serta Daya Saing Destinasi dan Produk Pariwisata Daerah	Persentase Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	%	98,29	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisata	%	10	20	30	40	50	60	70	70

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"											
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**KONDISI AWAL (2024)**	**TARGET CAPAIAN (TAHUN)**						**KONDISI AKHIR (2030)**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Misi 8: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat											
8.1.	**Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat**	**Umur Harapan Hidup**	**Tahun**	**69,69**	**71,16**	**72,63**	**74,10**	**75,57**	**77,04**	**78,51**	**78,51**
8.1.1	Tercapainya Masyarakat yang Sehat dan Produktif sesuai Siklus Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	5	0	0	0	0	0	0	0
		Jumlah Kematian Bayi	Kasus	28	0	0	0	0	0	0	0
		Prevalensi Balita Stunting	%	25,50	22,60	18,70	14,80	10,90	7,00	4,10	4,10
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	48,50	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98	100	100	100	100	100	100	100
		Angka Keberhasilan Pengobatan TB	%	57,38	90	90	90	90	90	90	90
		Tipe Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simeulue	Tipe	C	C	C	C	B	B	B	B
		Total Fertility Rate (Angka kelahitan total)	Anak Per Perempuan	2,67	2,58	2,48	2,38	2,29	2,19	2,10	2,10

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"											
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**KONDISI AWAL (2024)**	**TARGET CAPAIAN (TAHUN)**						**KONDISI AKHIR (2030)**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Misi 9: Penguatan Reformasi Birokrasi											
9.1	**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Melayani**	**Nilai LPPD**	**Kategori**	**Rendah**	**42 (Rendah**	**45 (Rendah)**	**49 (Rendah)**	**53 (Sedang)**	**57 (Sedang)**	**62 (Sedang)**	**62 (Sedang)**
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	**Indeks**	**59,35 (CC)**	**62 (B)**	**66 (B)**	**69 (B)**	**73 (BB)**	**76 (BB)**	**79 (BB)**	**79 (BB)**
		Indeks Pelayanan Publik	**Indeks**	**3.81 (B)**	**4.00 (B)**	**4,18 (A-)**	**4,31 (A)**	**4,50 (A)**	**5,00 (A)**	**5,00 (A)**	**5,00 (A)**
9.1.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, Transparan, dan Responsif	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	50,03 (CC)	53,50 (CC)	57 (CC)	61 (B)	65 (B)	69,50 (B)	74 (BB)	74 (BB)
		Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	87,91 (B)	88,00 (B)	88,20 (A)	88,50 (A)	88,50 (A)	88,50 (A)	88,50 (A)	88,50 (A)
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,86	2,10	2,35	2,60	2,80	3,10	3,30	3,30
		Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP)	Indeks	92,34	93,09	93,84	94,59	95,34	96,09	96,84	96,84
		Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	38,81	41,00	43,20	45,40	47,60	49,80	52,00	52,00
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	65,07	67,30	70,50	73,30	78,40	81,00	84,10	84,10
		Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"											
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**INDIKATOR KINERJA**	**SATUAN**	**KONDISI AWAL (2024)**	**TARGET CAPAIAN (TAHUN)**						**KONDISI AKHIR (2030)**
					2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Indeks BerAhklak	Indeks	0	C	B	B	B	A	A	A
		Indeks Sistem Merit	Indeks	121	130	140	150	160	170	180	180
		Tingkat Kepuasan Anggota DPRK Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRK	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
9.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,91	84,00	85,10	86,25	87,40	88,10	88,90	88,90

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Simeulue

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, diperlukan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang terarah dan terpadu. Penyusunannya didasarkan pada isu strategis, potensi unggulan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi. Program prioritas difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong transformasi menuju Simeulue yang bermartabat dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi biru secara berkelanjutan.

3.2.1 Strategi Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu merumuskan strategi pembangunan yang terarah, terpadu, dan responsif terhadap tantangan serta potensi daerah. Strategi ini menjadi panduan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan lintas sektor secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk itu, strategi pembangunan Kabupaten Simeulue disusun sebagai manifestasi dari komitmen pemerintah dalam menerjemahkan agenda pembangunan nasional, Provinsi Aceh, dan kebutuhan lokal ke dalam bentuk kebijakan daerah yang konkret. Strategi ini merupakan langkah sistematis untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya daerah baik sumber daya alam, manusia, maupun kelembagaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Adapun strategi pembangunan Kabupaten Simeulue periode 2026–2030 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat nilai-nilai keislaman dan adat dalam kehidupan masyarakat melalui peningkatan pendidikan agama sejak dini, penguatan dakwah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media digital, serta penguatan peran tokoh adat dan lembaga adat dalam menjaga norma, etika, dan tatanan sosial masyarakat.
2. Mendorong peningkatan kesadaran berzakat dan semangat gotong royong masyarakat melalui penguatan lembaga keagamaan, penyuluhan zakat yang lebih luas dan terstruktur, serta penguatan lingkungan sosial yang rukun, tertib, dan peduli melalui berbagai program berbasis komunitas.

3. Mengupayakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, energi, air bersih, dan permukiman untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk desa terpencil, memperoleh akses layanan publik yang setara serta mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
4. Memperkuat kesiapsiagaan bencana dan kelestarian lingkungan melalui pelibatan masyarakat dalam penguatan desa tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini, perbaikan kawasan rawan bencana, serta penguatan kampanye hidup bersih dan ramah lingkungan.
5. Mengembangkan potensi kelautan dan pariwisata bahari dengan memperkuat kelompok nelayan, mendukung pengolahan hasil laut yang bernilai tambah, serta memperkenalkan dan mempercantik destinasi wisata pantai dan laut, sambil melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan homestay, jasa wisata, dan promosi budaya daerah.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses literasi melalui penguatan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyediaan ruang literasi berbasis komunitas, yang diiringi dengan pelestarian budaya daerah melalui festival budaya, dokumentasi tradisi, dan pengembangan seni lokal.
7. Membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan, pemuda, dan masyarakat umum melalui penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, pengembangan kepemimpinan dan potensi generasi muda, serta peningkatan kesadaran kebangsaan dan etika demokrasi melalui berbagai kegiatan edukatif dan pembinaan karakter.
8. Menyiapkan tenaga kerja kompeten dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, kemitraan dengan dunia usaha, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga, terutama bagi keluarga miskin dan kelompok rentan di desa-desa.
9. Meningkatkan kemandirian desa tertinggal melalui penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
10. Mengembangkan desa tertinggal menjadi wilayah yang mandiri dan produktif melalui penguatan infrastruktur dasar, peningkatan sektor pertanian dan perkebunan, serta revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

11. Memberdayakan pelaku UMKM dan usaha rumahan melalui pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses permodalan, serta penguatan promosi produk lokal dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.
12. Meningkatkan kemudahan berinvestasi dan pengembangan kawasan wisata potensial melalui promosi potensi unggulan daerah, penyederhanaan perizinan, serta penyiapan kawasan ekonomi yang mendukung sektor produktif dan pariwisata.
13. Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak, melalui penguatan layanan dasar di puskesmas, edukasi pola hidup sehat, serta perluasan layanan keluarga berencana dan pendampingan keluarga di tingkat desa..
14. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, penerapan SPBE lintas sektor, serta penguatan kebijakan berbasis data yang partisipatif dan terintegrasi.
15. Menguatkan sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran serta penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin efisiensi dan kepatuhan.
16. Meningkatkan kapasitas legislatif dan aparatur pemerintahan melalui pelatihan, pengembangan karier, serta penguatan regulasi daerah yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional dan beretika.
17. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi digital, peningkatan kapasitas petugas pelayanan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kepuasan masyarakat dan keterlibatan publik.

Berdasarkan strategi pembangunan diatas, maka skenario pembangunan Kabupaten Simuelue disusun untuk menciptakan pembangunan inklusif wilayah tertinggal dan penguatan ketangguhan Simuelue dengan fokus utama pada pemerataan dan ketahanan wilayah terhadap bencana dan pengutangan ketimpangan di wilayah Simeulue serta mengurangi gap pembangunan dari daerah lain di Aceh.

Tabel 3.5. Strategi dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"		
MISI/ TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	*2*	*3*
Misi 1: Penegakan Syariat Islam dan Penguatan Nilai-Nilai Keislaman dalam Kehidupan Masyarakat		
1.1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Simeulue Berlandaskan Nilai-Nilai Syariat Islam dan Norma Adat Istiadat	1.1.1 Meningkatnya Nilai-Nilai Pengamalan Syariat Islam yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, dan Beradab sesuai Syariat Islam Serta Nilai-Nilai Adat Istiadat Aceh	Memperkuat nilai-nilai keislaman dan adat dalam kehidupan masyarakat melalui peningkatan pendidikan agama sejak dini, penguatan dakwah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media digital, serta penguatan peran tokoh adat dan lembaga adat dalam menjaga norma, etika, dan tatanan sosial masyarakat
		Mendorong peningkatan kesadaran berzakat dan semangat gotong royong masyarakat melalui penguatan lembaga keagamaan, penyuluhan zakat yang lebih luas dan terstruktur, serta penguatan lingkungan sosial yang rukun, tertib, dan peduli melalui berbagai program berbasis komunitas.

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"		
MISI/ TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	*2*	*3*
Misi 2: Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkelanjutan		
2.1 Meningkatkan Konektivitas Antarwilayah Dalam Kabupaten Simeulue serta Menjamin Kualitas dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi	2.1.1 Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Jasa Perhubungan yang Berkualitas, Terpadu, dan Berkelanjutan	Mengupayakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, energi, air bersih, dan permukiman untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk desa terpencil, memperoleh akses layanan publik yang setara serta mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Misi 3: Mitigasi Risiko Bencana dan Penguatan Ketahanan Daerah		
3.1 Meningkatkan Kapasitas dan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana serta Efektivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.1.1 Terwujudnya Daerah yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana serta Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Memperkuat kesiapsiagaan bencana dan kelestarian lingkungan melalui pelibatan masyarakat dalam penguatan desa tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini, perbaikan kawasan rawan bencana, serta penguatan kampanye hidup bersih dan ramah lingkungan

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"		
MISI/ TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	*2*	*3*
Misi 4: Diversifikasi Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata Bahari dan Ekonomi Biru		
4.1 **Mewujudkan Ekonomi Biru sebagai Penggerak Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Perekonomian Daerah**	4.1.1 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Biru terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah	Mengembangkan potensi kelautan dan pariwisata bahari melalui penguatan kelompok nelayan, peningkatan nilai tambah pengolahan hasil laut, serta pengembangan destinasi wisata pantai dan laut yang lebih menarik dan dikelola secara profesional, disertai pemberdayaan masyarakat lokal dalam penyediaan layanan wisata dan promosi budaya daerah.
Misi 5: Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM		
5.1 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing serta Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Terintegrasi		

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"		
MISI/ TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	*2*	*3*
	5.1.1 Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Aksesibilitas Layanan Pengembangan SDM Masyarakat yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses literasi melalui penguatan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyediaan ruang literasi berbasis komunitas, yang diiringi dengan pelestarian budaya daerah melalui festival budaya, dokumentasi tradisi, dan pengembangan seni lokal.
	5.1.2 Meningkatnya Kapasitas Kehidupan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif Disertai Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Terintegrasi	Membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan, pemuda, dan masyarakat umum melalui penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, pengembangan kepemimpinan dan potensi generasi muda, serta peningkatan kesadaran kebangsaan dan etika demokrasi melalui berbagai kegiatan edukatif dan pembinaan karakter

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"		
MISI/ TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	*2*	*3*
		Menyiapkan tenaga kerja kompeten dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, kemitraan dengan dunia usaha, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga, terutama bagi keluarga miskin dan kelompok rentan di desa-desa.
Misi 6: Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Tertinggal		
6.1 Mewujudkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Produktif, dan Berkeadilan Berlandaskan Keunggulan Kompetitif serta Berdaya Saing sebagai Penggerak Perekonomian		
	6.1.1 Meningkatnya Desa yang Berdaya Saing, Maju, dan Mandiri	Meningkatkan kemandirian desa tertinggal melalui penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"		
MISI/ TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	*2*	*3*
	6.2.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berorientasi pada Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Tertinggal	Mengembangkan desa tertinggal menjadi wilayah yang mandiri dan produktif melalui penguatan infrastruktur dasar, peningkatan sektor pertanian dan perkebunan, serta revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
		Memberdayakan pelaku UMKM dan usaha rumahan melalui pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses permodalan, serta penguatan promosi produk lokal dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah
Misi 7: Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Pariwisata		
7.1 Meningkatkan Daya Tarik Investasi dan Pengembangan Pariwisata yang Berdaya Saing	7.1.1 Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi serta Daya Saing Destinasi dan Produk Pariwisata Daerah	Meningkatkan kemudahan berinvestasi dan pengembangan kawasan wisata potensial melalui promosi potensi unggulan daerah, penyederhanaan perizinan, serta penyiapan kawasan ekonomi yang mendukung sektor produktif dan pariwisata

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"		
MISI/ TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	*2*	*3*
Misi 8: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		
8.1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	8.1.1 Tercapainya Masyarakat yang Sehat dan Produktif sesuai Siklus Hidup	Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak, melalui penguatan layanan dasar di puskesmas, edukasi pola hidup sehat, serta perluasan layanan keluarga berencana dan pendampingan keluarga di tingkat desa.
Misi 9: Penguatan Reformasi Birokrasi		
9.1 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Melayani		
	9.1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, Transparan, dan Responsif	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, penerapan SPBE lintas sektor, serta penguatan kebijakan berbasis data yang partisipatif dan terintegrasi

"VISI: MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"		
MISI/ TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	*2*	*3*
		Menguatkan sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran serta penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin efisiensi dan kepatuhan
		Meningkatkan kapasitas legislatif dan aparatur pemerintahan melalui pelatihan, pengembangan karier, serta penguatan regulasi daerah yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional dan beretika
	9.2.1 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi digital, peningkatan kapasitas petugas pelayanan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kepuasan masyarakat dan keterlibatan publik

3.2.2 Strategi Pencapaian Simeulue Bermartabat dan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru melalui Pembangunan Wilayah Berbasis Potensi Kewilayahan

Pembangunan Kabupaten Simeulue dalam periode menuju tahun 2030 diarahkan untuk mewujudkan visi *Simeulue Bermartabat* sekaligus sebagai *Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru*. Arah pembangunan ditempuh melalui pendekatan berbasis kewilayahan, dengan menekankan pada pemanfaatan potensi lokal yang beragam, penguatan daya saing daerah, serta penerapan prinsip berkelanjutan.

Setiap kawasan di Simeulue memiliki karakteristik dan peran strategis yang berbeda, mulai dari pusat pertumbuhan utama, kawasan pertanian dan perkebunan, wilayah kelautan dan perikanan, hingga pariwisata, hutan produksi, industri, permukiman, dan kawasan strategis kabupaten. Pengembangan wilayah tersebut tidak dipandang secara terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan sistem yang saling melengkapi dan terintegrasi.

Melalui strategi ini, Simeulue diarahkan untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan yang inklusif, memperkuat ketahanan pangan, mendorong industrialisasi, mengembangkan ekonomi biru, melestarikan lingkungan, serta meneguhkan identitas budaya. Dengan demikian, setiap wilayah berkontribusi nyata dalam mewujudkan Simeulue yang tangguh, berdaya saing, dan bermartabat di tingkat regional maupun global.

Dengan potensi dan fungsi kewilayahan, arah pengembangan wilayah Simeulue ditetapkan dalam beberapa kawasan strategis sebagai berikut:

1. Wilayah Pusat Pertumbuhan Utama

Wilayah Pusat Pertumbuhan Utama ini mencakup Kecamatan Simeulue Timur dan sebagian Teupah Tengah/Kota Sinabang dan sekitarnya. Wilayah ini berfungsi sebagai jantung aktivitas pemerintahan, perdagangan, jasa, dan distribusi di Kabupaten Simeulue. Kota Sinabang menjadi simpul strategis yang menghubungkan arus barang, jasa, dan penumpang baik dari maupun menuju daratan Sumatra, sekaligus menghubungkan antar-kecamatan di Simeulue. Keberadaan pelabuhan laut, terminal angkutan, serta pusat perniagaan menjadikan wilayah ini pintu gerbang utama keluar-masuk logistik dan pusat interaksi ekonomi masyarakat.

Berdasarkan rencana pola ruang, kawasan ini mencakup permukiman perkotaan seluas ± 511,81 ha, hutan produksi tetap ± 505,45 ha, hortikultura ± 290,09 ha, tanaman pangan ± 335,23 ha, perikanan budidaya ± 0,47 ha, serta pertambangan batuan ± 357,22 ha. Kombinasi tersebut menegaskan peran kawasan ini bukan hanya sebagai pusat administrasi, melainkan juga sebagai pusat ekonomi maritim, agribisnis, dan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.

Letak strategis Kota Sinabang pada jalur utama transportasi laut, ditambah kedekatannya dengan sentra-sentra produksi pangan dan hasil laut, membuka peluang besar untuk membangun pusat perdagangan, industri pengolahan, logistik, sekaligus pariwisata perkotaan. Infrastruktur dasar yang relatif lengkap memperkuat peranannya, sehingga pembangunan diarahkan untuk menjadikan Sinabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terintegrasi yang menopang Simeulue Bermartabat sekaligus mendorong Simeulue sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru 2030.

Dengan mempertimbangkan posisi strategis dan fungsi kawasan, pengembangan diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelabuhan, meningkatkan kualitas pasar, menata wajah kota berbasis bahari, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Cakupan ini termasuk sebagian Kecamatan Teupah Tengah yang terintegrasi dengan Kota Sinabang sebagai pusat pertumbuhan utama.

a. Optimalisasi Pelabuhan Sinabang

Pelabuhan Sinabang adalah urat nadi perekonomian Simeulue. Namun kapasitas dan fasilitasnya kini tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan arus logistik. Optimalisasi pelabuhan diarahkan agar kawasan ini mampu berfungsi sebagai simpul distribusi regional yang modern.

Dalam kerangka itu, pembangunan pelabuhan akan ditujukan pada penguatan kapasitas fisik dan efisiensi tata kelola logistik, yang diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain:

- Pembangunan dermaga tambahan agar mampu melayani kapal berukuran besar.
- Pembangunan gudang logistik modern dengan sistem manajemen berbasis digital.
- Penyediaan lapangan penumpukan peti kemas yang dapat mempercepat proses bongkar-muat barang.
- Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, termasuk pembangunan cold storage dan tempat pelelangan ikan yang lebih representatif.

Dengan penguatan tersebut, diharapkan pelabuhan Sinabang bertransformasi menjadi simpul logistik modern yang mendukung ekonomi maritim Simeulue secara berkelanjutan.

b. Pengembangan Pasar Modern Sinabang

Pasar merupakan jantung kehidupan ekonomi rakyat, tempat bertemunya nelayan, petani, pedagang kecil, dan konsumen. Seiring meningkatnya kebutuhan akan kualitas, higienitas, dan standar layanan, pasar tradisional Sinabang memerlukan transformasi menuju pasar modern yang terintegrasi dengan rantai pasok lokal.

Pengembangan ini diarahkan untuk menciptakan pusat perdagangan yang lebih tertata dan berdaya saing, dengan fasilitas yang mendukung pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi produk. Dalam konteks itu, penguatan pasar akan diwujudkan melalui langkah-langkah seperti:

- Penyediaan area khusus pengolahan ikan dan hasil pertanian.
- Pembangunan fasilitas cold storage dengan kapasitas memadai.
- Penyediaan ruang pemasaran higienis dengan standar mutu yang baik.
- Rehabilitasi dan pengembangan pasar ikan modern di Sinabang sebagai pusat distribusi hasil laut.

Melalui modernisasi pasar ini, diharapkan nilai tambah produk lokal meningkat, daya saing pelaku usaha kecil menguat, serta distribusi komoditas strategis lebih efisien.

c. Penataan Kawasan Waterfront

Tepi laut Sinabang menyimpan potensi besar sebagai etalase kota. Selama ini kawasan tersebut tumbuh tanpa tata kelola yang optimal, sehingga keindahan dan nilai ruang publik belum dimanfaatkan sepenuhnya. Penataan kawasan waterfront diarahkan untuk mempercantik wajah kota, memperkuat identitas bahari, sekaligus menjadi ruang interaksi sosial yang inklusif. Upaya penataan akan diwujudkan melalui berbagai pembangunan konkrit, seperti:

- Pembangunan jalur pedestrian tepi laut yang terhubung dengan pusat kota.
- Penataan taman tematik dan ruang publik terbuka untuk aktivitas masyarakat.
- Pengembangan pusat kuliner bahari sebagai ikon wisata perkotaan.

Dengan penataan tersebut, kawasan waterfront akan tampil sebagai wajah baru Sinabang yang ramah, hidup, dan menjadi magnet wisata bahari yang mendukung sektor jasa dan pariwisata.

d. Pembangunan Terminal Angkutan Terpadu

Konektivitas darat dan laut merupakan faktor penentu efisiensi distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Saat ini, Sinabang membutuhkan terminal terpadu yang mampu mengintegrasikan berbagai moda transportasi sehingga aliran logistik dan pergerakan penumpang dapat berlangsung lebih lancar.

Dalam kerangka itu, pembangunan terminal diarahkan pada penguatan konektivitas regional dan integrasi moda, melalui inisiatif seperti:

- Pembangunan terminal terpadu menghubungkan angkutan darat dan laut.
- Penyediaan akses menuju sentra-sentra produksi di wilayah penyangga.
- Fasilitas transit yang ramah bagi pengguna transportasi umum.

Kehadiran terminal terpadu ini akan mempercepat arus logistik, mengurangi biaya transportasi, memperkuat posisi Sinabang sebagai simpul utama mobilitas Simeulue.

e. Penguatan Sentra Produksi Lokal dan Pengelolaan Sumber Daya

Kawasan Sinabang dan sekitarnya juga memiliki basis produksi pertanian, hortikultura, perikanan, serta potensi pertambangan yang menjadi penopang aktivitas ekonomi. Agar fungsi tersebut optimal, pengelolaan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan keterkaitan dengan industri pengolahan. Penguatan sentra produksi lokal akan diwujudkan melalui langkah-langkah berikut:

- Pemanfaatan lahan ± 625,32 ha (hortikultura dan tanaman pangan) sebagai penyedia bahan baku industri pangan.
- Penerapan praktik pertanian yang baik serta inovasi sistem pertanian modern.
- Pengembangan perikanan budidaya ramah lingkungan dengan teknologi tepat guna.
- Pemanfaatan kawasan pertambangan batuan secara terukur disertai kewajiban reklamasi.

Dengan pengelolaan sumber daya yang terarah, kawasan ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, melainkan juga penopang ketahanan pangan, energi, dan bahan baku industri Simeulue.

2. Wilayah Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Wilayah Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan mencakup Kecamatan Simeulue Tengah, Simeulue Timur, Teupah Tengah, Teupah Selatan, Teupah Barat, Teluk Dalam, Salang, Simeulue Barat, dan Alafan.

Pertanian, perkebunan, dan peternakan merupakan fondasi ekonomi rakyat Simeulue serta penopang utama ketahanan pangan daerah. Lahan pertanian pangan tersebar hampir di seluruh kecamatan dengan dominasi padi sawah, jagung, ubi kayu, dan kacang-kacangan. Kawasan hortikultura berkembang di Simeulue Tengah dan Teluk Dalam dengan produksi sayuran serta buah tropis untuk konsumsi lokal maupun peluang pasar regional.

Komoditas perkebunan yang menonjol meliputi kelapa, kelapa sawit, dan sagu. Lahan perkebunan kelapa dalam tersebar luas, sementara program replanting kelapa telah dijalankan untuk menjamin keberlanjutan produksi. Peternakan sapi dan kerbau juga berkembang di berbagai kecamatan, terutama di Alafan yang telah ditetapkan sebagai pusat peternakan terpadu dengan luas lahan ± 500 ha.

Namun, pengembangan sektor ini menghadapi berbagai kendala, seperti produktivitas rendah akibat sistem budidaya tradisional, akses pasar terbatas, penerapan teknologi sederhana, serta minimnya industri pengolahan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar hasil dipasarkan mentah dengan nilai tambah rendah.

Dengan potensi sumber daya yang besar, pengembangan kawasan ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, membangun industrialisasi hasil pertanian dan perkebunan, serta memperkuat sistem peternakan terpadu. Strategi ini merupakan kunci bagi Simeulue Bermartabat sekaligus mendukung visi Simeulue sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru 2030.

Transformasi diarahkan pada penerapan pertanian modern, pemanfaatan teknologi pasca-panen, pengembangan kawasan agroindustri, serta penguatan infrastruktur logistik dan pemasaran. Dengan langkah tersebut, kawasan ini diharapkan tumbuh menjadi basis agribisnis berdaya saing yang menopang kesejahteraan masyarakat. Cakupan ini menegaskan peran Teupah Tengah sebagai salah satu sentra hortikultura dan tanaman pangan.

a. Penguatan Ketahanan Pangan dan Hortikultura

Pengembangan diarahkan untuk menjaga kemandirian pangan serta meningkatkan produktivitas pertanian, melalui:

- Intensifikasi lahan tanaman pangan seluas ±335,23 ha dengan teknologi modern serta rehabilitasi jaringan irigasi.
- Diversifikasi hortikultura seluas ±290,09 ha guna memenuhi konsumsi lokal dan mendukung industri olahan.
- Penerapan praktik pertanian yang baik serta pertanian organik.
- Pembangunan sarana penunjang seperti gudang penyimpanan, embung desa, dan cold storage skala kecil.
- Pengembangan wisata Air Terjun Bau Simaknem di Desa Leubang Hulu sebagai akses perkebunan serta sumber air irigasi.

Dengan langkah ini, Simeulue ditargetkan menjadi lumbung pangan daerah yang mampu memenuhi kebutuhan lokal sekaligus memasok wilayah luar.

b. Hilirisasi Kelapa, Sawit, dan Sagu

Komoditas perkebunan Simeulue memiliki potensi hilirisasi besar untuk meningkatkan nilai tambah. Arah pengembangan meliputi:

- Kelapa : industri VCO, tepung kelapa, santan instan, briket arang, nata de coco, hingga produk kosmetika.
- Sawit : pemanfaatan tandan kosong dan ampas untuk pupuk organik, pakan ternak, serta pabrik turunan CPO (minyak goreng, sabun, industri).
- Sagu : pembangunan pabrik tepung sagu dan makanan olahan, berlokasi di Salang, Teupah Selatan, Simeulue Tengah, dan Simeulue Barat.
- Rotan : penanaman rotan manao dan pengolahannya untuk industri furnitur.

Dengan hilirisasi, Simeulue dapat menembus pasar regional hingga internasional.

c. Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu

Kecamatan Alafan menjadi pusat pengembangan peternakan sapi/kerbau terpadu di atas lahan ± 500 ha. Konsep pengembangan meliputi:

- Penyediaan kandang modern, embung, dan sistem pemagaran.
- Unit pembibitan, penggemukan, serta pengolahan limbah ternak menjadi pupuk cair, pupuk organik, dan biogas.
- Pembangunan rumah potong hewan serta unit pengolahan daging dan susu.

Dengan skema ini, kawasan peternakan berperan ganda: sebagai penyedia pangan hewani sekaligus sumber energi terbarukan berbasis biogas.

d. Diversifikasi Produk Olahan dan UMKM Pangan

Untuk mendorong nilai tambah, hasil pertanian dan perkebunan dikembangkan melalui UMKM pangan, dengan strategi:

- Pengembangan sentra industri pangan lokal (beras kemasan, produk hortikultura olahan, frozen food).
- Industri makanan berbasis kelapa, sagu, dan hasil ternak.
- Pendirian workshop teknologi pengolahan dan pengemasan pangan.
- Branding dan digital marketing dengan label Simeulue Bermartabat.

Diversifikasi ini memperluas peluang kerja dan memperkuat daya saing produk lokal.

e. Peningkatan Infrastruktur dan Akses Pasar

Keberhasilan sektor ini sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur, logistik, dan pasar. Program penguatan diarahkan pada:

- Perbaikan jalan produksi menuju sentra pertanian dan perkebunan.
- Pembangunan gudang hasil panen, cold storage, dan lumbung pangan desa.
- Fasilitasi pasar agribisnis modern terintegrasi simpul logistik Sinabang.
- Pemanfaatan platform digital untuk promosi dan pemasaran produk unggulan.

Dengan infrastruktur yang baik, produk Simeulue tidak hanya menopang kebutuhan lokal, tetapi juga mampu bersaing di pasar regional.

3. Wilayah Pengembangan Perikanan dan Kelautan

Wilayah Pengembangan Perikanan dan Kelautan mencakup Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Tengah, Teupah Barat, Simeulue Tengah, Simeulue Cut, Teluk Dalam, Salang, Alafan, dan Simeulue Barat.

Perikanan dan kelautan merupakan sektor utama penggerak ekonomi Simeulue. Letaknya yang strategis di Samudera Hindia menjadikan wilayah ini kaya akan sumber daya ikan, mulai dari tuna, tongkol, cakalang, hingga ikan karang. Aktivitas perikanan

tangkap tradisional masih mendominasi mata pencaharian nelayan, sedangkan perikanan budidaya (rumput laut, keramba jaring apung, dan tambak ikan) masih terbatas dengan luas ± 0,47 ha dan belum berkembang optimal.

Selain itu, Simeulue memiliki Kawasan Konservasi Laut seluas ± 111.935,74 ha dan Kawasan Konservasi Terumbu Karang seluas ± 2.064,32 ha. Kedua kawasan ini tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga menjadi basis ekowisata bahari dan edukasi lingkungan. Cakupan ini termasuk penambahan Kecamatan Teupah Tengah sebagai wilayah pengembangan perikanan dan kelautan.

Fasilitas pendukung sudah tersedia, seperti Pelabuhan Perikanan Sinabang, namun kapasitasnya masih terbatas pada cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan (TPI), serta sistem distribusi rantai dingin (cold chain). Kondisi ini mengakibatkan sebagian besar hasil laut masih dipasarkan dalam bentuk segar, tanpa melalui proses pengolahan yang memberikan nilai tambah lebih besar.

Kondisi eksisting tersebut menegaskan bahwa sektor perikanan Simeulue memiliki potensi luar biasa untuk menjadi motor penggerak ekonomi biru, tetapi membutuhkan modernisasi, hilirisasi, dan penguatan kelembagaan nelayan.

Dengan kekayaan laut yang melimpah, pengembangan wilayah ini diarahkan untuk:

- Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya dengan teknologi tepat guna.
- Mengembangkan hilirisasi dan industrialisasi produk perikanan agar bernilai tambah tinggi.
- Membangun infrastruktur rantai dingin dan logistik perikanan yang efisien.
- Mendorong pemberdayaan nelayan dan kelembagaan usaha basis koperasi.
- Menjaga keberlanjutan melalui konservasi laut dan ekosistem pesisir.

Arah pengembangan ini diharapkan menjadikan Simeulue pusat industri perikanan berorientasi ekspor sekaligus model pengelolaan ekonomi biru yang berkelanjutan.

a. Modernisasi Pelabuhan Perikanan dan Fasilitas Pendukung

Pelabuhan perikanan merupakan simpul utama distribusi hasil laut. Namun fasilitas yang ada saat ini belum memadai untuk melayani potensi produksi. Modernisasi diarahkan pada penguatan infrastruktur dan kapasitas layanan, melalui:

- Pembangunan dermaga khusus perikanan di Sinabang serta dermaga tambahan di Teupah Selatan, Teupah Tengah, Teluk Dalam, dan Alafan.
- Penyediaan cold storage, pabrik es, dan lapangan penumpukan peti kemas khusus hasil perikanan.
- Peningkatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) higienis.
- Penyediaan armada tangkap modern yang ramah lingkungan.
- Pengaktifan Pelabuhan Teluk Dalam sebagai simpul pengumpan perikanan.

Dengan modernisasi ini, Sinabang akan berperan sebagai simpul distribusi hasil laut regional, mendukung rantai pasok industri dan ekspor.

b. Pengembangan Budidaya Laut dan Rumput Laut

Selain perikanan tangkap, pengembangan budidaya laut diarahkan untuk memperkuat diversifikasi usaha dan basis ekspor. Fokus pengembangan mencakup:

- Kawasan budidaya rumput laut ± 100 ha di Teupah Selatan dan Teupah Tengah, dengan dukungan pabrik pengolahan (karagenan, tepung rumput laut, kosmetik).
- Pengembangan tambak ikan air payau di Teluk Dalam, Teupah Selatan, Simeulue Timur, dan Simeulue Barat, termasuk pemanfaatan Danau Laulo dan Danau Mutiara.
- Penerapan teknologi keramba jaring apung untuk budidaya kerapu, kakap, dan lobster.
- Pelatihan dan penguatan kelembagaan bagi kelompok pembudidaya pesisir.

Dengan langkah ini, Simeulue dapat mengembangkan basis perikanan budidaya ramah lingkungan yang berorientasi ekspor.

c. Hilirisasi Produk Perikanan

Untuk meningkatkan nilai tambah, hilirisasi hasil laut menjadi prioritas utama. Pengembangannya diarahkan pada:

- Pembangunan pabrik pengalengan ikan (tuna, tongkol, cakalang).
- Industri olahan ikan beku, fillet, abon ikan, kerupuk, hingga nugget.
- Penyediaan fasilitas pengemasan higienis berstandar ekspor.
- Pengembangan branding produk perikanan Simeulue serta distribusi berbasis gudang berpendingin.

Dengan industrialisasi, Simeulue tidak hanya dikenal sebagai penghasil ikan segar, tetapi juga produsen produk olahan bernilai tinggi yang kompetitif di pasar regional maupun internasional.

d. Pemberdayaan Ekosistem Nelayan

Nelayan sebagai pelaku utama perlu diperkuat kapasitas dan kelembagaannya agar lebih mandiri dan sejahtera. Arah pemberdayaan mencakup:

- Pembentukan koperasi nelayan sebagai pusat distribusi dan pengolahan hasil.
- Pelatihan teknologi tangkap modern, navigasi, dan pascapanen.
- Penyediaan akses permodalan mikro dan sistem asuransi nelayan.
- Pendampingan usaha untuk nelayan kecil.
- Pengembangan wisata pukat pantai di Lasikin–Situbuk.

Dengan langkah ini, nelayan Simeulue dapat berperan aktif sebagai penggerak ekonomi biru sekaligus pelaku usaha yang berdaya saing.

e. Pengembangan Ekowisata Bahari dan Konservasi Laut

Potensi bahari Simeulue sangat mendukung pengembangan wisata berbasis konservasi, dengan fokus pada:

- Diving dan snorkeling di Pantai Babang (Simeulue Timur), Pulau Mincau, dan Pulau Lasia.
- Penangkaran penyu di Putra Jaya, Along, dan Pulau Selaut sebagai destinasi ekowisata edukatif.
- Program eco diving, wisata mangrove, dan konservasi terumbu karang.
- Edukasi lingkungan laut berbasis partisipasi masyarakat.

Dengan pengembangan ini, wisata bahari dan konservasi dapat berjalan seiring sebagai pilar ekonomi biru Simeulue.

f. Konservasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan

Untuk menjamin keberlanjutan sumber daya laut, konservasi menjadi strategi penting. Fokus utama meliputi:

- Perlindungan Kawasan Konservasi Laut ± 111.935,74 ha.
- Perlindungan ekosistem terumbu karang ± 2.064,32 ha di seluruh kecamatan.
- Rehabilitasi pesisir melalui penanaman mangrove dan padang lamun.
- Integrasi konservasi dengan riset kelautan lokal dan ekowisata edukatif.

Dengan prinsip ini, sektor kelautan Simeulue akan tetap produktif sekaligus lestari bagi generasi mendatang.

4. Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Konservasi Alam

Wilayah Pengembangan Pariwisata dan Konservasi Alam mencakup Kecamatan Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Timur, Simeulue Barat, Teluk Dalam, Simeulue Cut, Salang, dan Alafan.

Kabupaten Simeulue memiliki kekayaan alam bahari dan daratan yang unik, dengan kombinasi pantai, pulau-pulau kecil, danau, air terjun, serta kawasan konservasi hutan dan laut. Pulau Lasia, Pulau Mincau, Pulau Baby, dan Pulau Salaut Besar merupakan destinasi bahari potensial dengan keindahan laut kelas dunia. Simeulue juga dikenal sebagai surga selancar internasional, dengan ombak di Pantai Nancala, Pantai Matanurung, Pantai Maudil, Pantai Alus-Alus, dan Pulau Batu Berlayar.

Selain bahari, terdapat destinasi darat seperti Danau Laulo dan Danau Mutiara, air terjun di Leubang Hulu, Putra Jaya, dan Tanjung Raya, serta situs budaya dan sejarah seperti Makam Tengku Diujung, Makam Bakudo Batu, dan bunker peninggalan

Jepang. Keberadaan Tahura Suak Buluh (328,07 ha) dan Tahura Ana'ao (591,52 ha) memperkuat potensi ekowisata darat. Sementara itu, Kawasan Konservasi Laut ± 111.935,74 ha dan Terumbu Karang ± 2.064,32 ha menjadi aset ekologi sekaligus daya tarik wisata edukatif.

Namun, keterbatasan infrastruktur, fasilitas penunjang, dan promosi masih menjadi hambatan utama. Potensi besar yang dimiliki Simeulue memerlukan pengelolaan berbasis keberlanjutan agar pariwisata tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga ekologi dan memperkuat identitas budaya lokal.

Dengan modal keindahan bahari, budaya, dan ekosistem yang khas, arah pengembangan kawasan ini ditujukan untuk menjadikan Simeulue sebagai destinasi ekowisata bahari dan budaya berbasis konservasi. Strategi difokuskan pada:

- Pengembangan destinasi bahari unggulan di pulau-pulau kecil dan pantai.
- Penguatan wisata surfing, diving, dan sport fishing.
- Pengelolaan kawasan konservasi dan ekowisata berbasis masyarakat lokal.
- Revitalisasi wisata sejarah dan budaya sebagai pelengkap wisata bahari.
- Peningkatan infrastruktur wisata, aksesibilitas, dan promosi digital.

Dengan strategi ini, pariwisata Simeulue akan menjadi pilar ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Cakupan ini menegaskan posisi Teupah Selatan dan Teupah Barat sebagai pusat destinasi surfing dan diving internasional.

a. Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Unggulan

Pulau-pulau kecil Simeulue menyimpan daya tarik bahari kelas internasional. Pengembangannya diarahkan pada:

- Pembangunan cottage ramah lingkungan di Pulau Baby, Lasia, Mincau, dan Salaut Besar.
- Penyediaan fasilitas snorkeling, diving, sea walk, jet ski, dan perahu kaca (glass bottom boat).
- Dermaga kecil dan transportasi laut reguler untuk akses wisatawan.
- Pengembangan atraksi edukatif seperti Tsunami Heritage di Pulau Baby dan Salaut Besar.

Dengan langkah ini, pulau-pulau Simeulue akan tampil sebagai ikon wisata bahari premium berbasis ekowisata.

b. Wisata Surfing dan Diving Bertaraf Internasional

Ombak Simeulue sudah dikenal komunitas surfer dunia, sementara terumbu karangnya sangat potensial untuk diving. Penguatan dilakukan melalui:

- Pembangunan surf camp dan diving center berstandar internasional.
- Penyediaan peralatan selancar, menyelam, speedboat, dan perahu kaca (glass bottom boat).
- Pelatihan pemandu surfing dan diving berbasis masyarakat lokal.
- Penyelenggaraan event tahunan surfing dan diving sebagai promosi global.

Dengan strategi ini, Simeulue dapat menempatkan diri sebagai surga surfing dan diving dunia.

c. Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Ekowisata

Kawasan konservasi laut dan Tahura dikelola sebagai pusat ekowisata sekaligus pelindung ekosistem. Pengembangan meliputi:

- Penangkaran penyu di Putra Jaya, Along, dan Pulau Selaut sebagai destinasi ekowisata edukatif.
- Pengelolaan Tahura Suak Buluh dan Ana'ao secara terpadu sebagai kawasan konservasi sekaligus destinasi ekowisata melalui penyediaan fasilitas perkemahan, jalur wisata gunung, serta sarana penelitian dan pusat pembelajaran konservasi, lokasi penangkaran flora dan fauna endemik sebagai wahana edukasi ekologi, destinasi agrowisata berbasis buah-buahan.
- Pemanfaatan konservasi terumbu karang sebagai destinasi diving education.
- Pelibatan masyarakat lokal sebagai pengelola wisata berbasis konservasi.

Dengan pengelolaan ini, konservasi berperan ganda sebagai pelindung ekologi dan sumber ekonomi baru.

d. Wisata Sejarah dan Budaya Lokal

Warisan sejarah dan budaya Simeulue memperkaya daya tarik wisata. Pengembangannya diarahkan pada:

- Revitalisasi situs sejarah (Makam Tengku Diujung, Makam Bakudo Batu, Bunker Jepang).
- Pembangunan pusat informasi sejarah dan budaya.
- Festival tahunan seperti Dragon Boat Festival di Teluk Sinabang.
- Paket wisata terpadu berbasis homestay, kuliner lokal, dan seni tradisional.

Dengan penguatan ini, Simeulue tampil sebagai destinasi yang tidak hanya indah secara alam, tetapi juga kaya nilai budaya.

e. Ekowisata Danau dan Air Terjun

Destinasi darat juga berpotensi besar untuk wisata alam ramah lingkungan, melalui:

- Wisata outbound, memancing, dan permainan air di Danau Mutiara dan Danau Laulo.

- Pembangunan camping ground dan jalur trekking sekitar air terjun dan danau.
- Wisata edukasi budidaya ikan darat (lele, ikan air tawar).
- Pengembangan Air Terjun Bau Simaknem di Desa Leubang Hulu sebagai destinasi wisata alam pemandian alami, jalur hiking, panorama hutan sekitarnya, penataan akses serta fasilitas dasar wisata.
- Fasilitas dasar wisata seperti shelter, papan informasi, dan toilet umum.

Dengan langkah ini, wisata darat Simeulue akan memperkaya diversifikasi ekowisata.

f. Peningkatan Aksesibilitas dan Promosi Wisata

Keberhasilan pariwisata bergantung pada aksesibilitas dan promosi. Pengembangan diarahkan pada:

- Peningkatan jalan menuju lokasi wisata utama.
- Penyediaan transportasi laut wisata (speedboat, kapal wisata).
- Promosi digital pada platform nasional dan internasional.
- Kerja sama dengan investor dan lembaga pariwisata.

Dengan penguatan ini, Simeulue akan semakin dikenal sebagai destinasi wisata bahari dan budaya unggulan di barat Indonesia.

g. Penguatan Infrastruktur Wisata dan Olahraga

Pengembangan destinasi wisata Simeulue perlu ditunjang oleh sarana olahraga dan rekreasi yang terintegrasi dengan pariwisata, sehingga mampu meningkatkan daya tarik daerah dan memperkuat identitas bahari.

- Pembangunan Bahari Sport Park berkolaborasi dengan wisata bahari.
- Lanjutan pembangunan stadion olahraga Simeulue.
- Lanjutan pembangunan GOR Kota Sinabang.
- Pembangunan stadion mini di beberapa kecamatan.

Dengan penguatan infrastruktur ini, Simeulue diharapkan mampu menjadi tuan rumah berbagai kegiatan wisata dan olahraga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Wilayah Pengembangan Hutan Produksi dan Sumber Daya Alam

Wilayah Pengembangan Hutan Produksi dan Sumber Daya Alam mencakup Kecamatan Simeulue Barat, Teupah Barat, Teupah Tengah, Simeulue Tengah, Alafan, dan sebagian wilayah lainnya.

Wilayah pengembangan hutan produksi dan sumber daya alam di Kabupaten Simeulue mencakup kawasan hutan yang masih relatif luas, termasuk hutan produksi tetap, hutan lindung, dan kawasan yang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) di Desa Suak Buluh seluas ± 328,07 ha serta Desa Ana'ao seluas ± 591,52 ha.

Kawasan hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekologis, tetapi juga memiliki potensi ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non-kayu, seperti rotan, bambu, madu hutan, hingga potensi wisata berbasis alam.

Selain itu, kawasan ini juga menyimpan kekayaan sumber daya alam lain berupa bahan tambang seperti batuan, mineral tertentu, serta hasil kelapa yang melimpah yang dapat dikembangkan melalui hilirisasi. Dalam konteks pembangunan Simeulue Bermartabat dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru 2030, peran kawasan ini bukan sekadar sebagai penghasil komoditas, tetapi juga sebagai benteng ekologis yang menjaga keseimbangan lingkungan di tengah ancaman bencana alam, erosi, maupun perubahan iklim.

Potensi hutan produksi dan sumber daya alam yang dimiliki Simeulue memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan berupa kerentanan terhadap kerusakan ekosistem, praktik eksploitasi yang tidak berkelanjutan, serta keterbatasan teknologi pengolahan masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, arah pengembangan kawasan ini difokuskan pada strategi yang memadukan keberlanjutan ekologis dengan peningkatan nilai tambah ekonomi.

Fokus utama diarahkan pada: pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pengembangan industri berbasis rotan dan batang kelapa, penguatan konservasi dan restorasi kawasan hutan, serta pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Dengan demikian, wilayah ini dapat berfungsi ganda: menjaga keseimbangan ekologi sekaligus menopang ekonomi lokal melalui hilirisasi produk dan pariwisata alam. Cakupan ini termasuk Kecamatan Teupah Tengah yang memiliki kawasan hutan produksi dan potensi rotan.

a. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Industri Rotan

Hasil hutan bukan kayu seperti rotan memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola secara baik. Simeulue memiliki potensi penanaman rotan jenis *manao* yang dapat mendukung industri kerajinan maupun furnitur. Upaya pengembangannya meliputi:

- Penanaman rotan secara berkelanjutan di kawasan potensial (Teupah Barat, Simeulue Tengah, dan Alafan).
- Pendirian unit pengolahan bahan baku rotan menjadi produk setengah jadi.
- Pengembangan industri furnitur dan kerajinan berbasis rotan dengan desain modern.
- Penyediaan workshop dan pusat pelatihan pengrajin lokal.

Dengan model ini, rotan Simeulue tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi menjadi produk bernilai tambah yang dapat menembus pasar nasional.

b. Pemanfaatan Batang dan Kelapa Dalam

Kelapa sebagai salah satu komoditas utama Simeulue berpotensi besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi. Batang kelapa yang sudah tidak produktif dapat diolah menjadi bahan industri kayu, sementara buah kelapa bisa diolah menjadi beragam produk turunan. Konkret pengembangan diarahkan pada:

- Pendirian industri pengolahan batang kelapa menjadi bahan baku furnitur dan kayu bangunan.
- Replanting kelapa seluas ± 7.000 ha dalam jangka 7 tahun untuk memastikan regenerasi pohon.
- Pengembangan industri olahan kelapa dalam, seperti nata de coco, virgin coconut oil (VCO), briket, santan instan, kosmetika, hingga tepung kelapa.
- Penyediaan workshop dan mesin pengolahan modern di sentra-sentra kelapa.

Dengan diversifikasi produk ini, Simeulue dapat mengurangi ketergantungan pada kopra mentah dan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa.

c. Pengolahan Ampas dan Tandan Kelapa Sawit

Potensi pengembangan lain adalah pemanfaatan limbah kelapa sawit yang dapat dijadikan produk bernilai ekonomi. Pengembangan diarahkan melalui:

- Pendirian pabrik pengolahan pupuk organik dari tandan kosong.
- Produksi pakan ternak berbasis ampas sawit.
- Pengembangan pabrik turunan CPO dengan sistem ramah lingkungan.
- Pengadaan mesin dan workshop pengolahan.

Langkah ini tidak hanya mengurangi limbah sawit, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang berorientasi pada ekonomi sirkular.

d. Penguatan Konservasi Hutan dan Kawasan Rawan Bencana

Simeulue merupakan daerah rawan bencana, mulai dari gempa tektonik, tsunami, hingga gerakan tanah. Oleh karena itu, kawasan hutan perlu diperkuat fungsinya sebagai benteng ekologis. Penguatan diarahkan pada:

- Rehabilitasi kawasan hutan kritis dengan program penghijauan terpadu.
- Pengelolaan Tahura di Suak Buluh dan Ana'ao sebagai pusat konservasi dan wisata edukasi.
- Penyusunan tata kelola kawasan konservasi laut dan terumbu karang (± 111.935,74 ha dan ± 2.064,32 ha) agar pemanfaatannya berkelanjutan.
- Penyediaan sistem pemantauan kawasan rawan bencana berbasis teknologi.

Dengan pengelolaan ini, fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem, penyedia air, dan pelindung bencana tetap terjaga, sekaligus memberi peluang wisata alam.

6. Wilayah Pengembangan Industri dan Hilirisasi

Wilayah Pengembangan Industri dan Hilirisasi mencakup Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah, Teluk Dalam, Salang, Simeulue Barat, dan Alafan.

Sektor industri di Simeulue saat ini masih didominasi oleh usaha kecil-menengah berbasis pengolahan sederhana hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan bukan kayu. Komoditas utama seperti kelapa, kelapa sawit, sagu, rotan, dan hasil laut melimpah, namun sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah ekonomi rendah.

Kelapa dalam tersebar luas di Simeulue Tengah, Teupah Selatan, dan Teluk Dalam, sementara perkebunan kelapa sawit berkembang di Teupah Selatan dan Teluk Dalam. Sagu banyak dijumpai di Salang, Teupah Selatan, Simeulue Tengah, dan Simeulue Barat, sedangkan potensi rotan terdapat di Teupah Barat, Simeulue Tengah, dan Alafan. Hasil laut, baik dari tangkap maupun budidaya, berpotensi menjadi bahan baku industri perikanan olahan.

Namun, kapasitas industri pengolahan masih terbatas, infrastruktur kawasan industri belum terbangun, investasi rendah, serta rantai pasok belum terintegrasi. Akibatnya, Simeulue masih bergantung pada penjualan bahan mentah keluar daerah dan belum menikmati nilai tambah secara maksimal.

Pengembangan industri dan hilirisasi diarahkan untuk memperkuat transformasi Simeulue dari penjual bahan mentah menjadi produsen produk olahan bernilai tambah tinggi. Strategi utama difokuskan pada:

- Penguatan industri pengolahan kelapa dan sawit sebagai basis perkebunan unggulan.
- Pengembangan industri sagu dan rotan sebagai diversifikasi hasil hutan bukan kayu.
- Hilirisasi hasil laut dan rumput laut untuk memperkuat industri berbasis ekonomi biru.
- Penyediaan infrastruktur industri terpadu dan dukungan riset untuk inovasi.
- Kemitraan pemerintah–swasta–masyarakat dalam pengembangan UMKM industri.

Dengan strategi ini, Simeulue diproyeksikan tumbuh menjadi pusat industri lokal yang kompetitif dan berkelanjutan. Cakupan ini menegaskan peran Teupah Selatan dan Teluk Dalam sebagai basis utama sawit dan sagu untuk hilirisasi.

a. Industri Pengolahan Kelapa dan Turunannya

Kelapa merupakan komoditas unggulan Simeulue dengan potensi diversifikasi produk yang luas. Arah pengembangan mencakup:

- Industri olahan kelapa: Virgin Coconut Oil (VCO), tepung kelapa, santan instan, briket arang, nata de coco, hingga kosmetik berbasis kelapa.
- Pengolahan batang kelapa untuk bahan bangunan, sawmill, dan furnitur.
- Program replanting kelapa ± 7.000 ha dalam 7 tahun untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku.

Dengan hilirisasi, Simeulue berpotensi menjadi pusat industri kelapa di kawasan barat Indonesia.

b. Hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit yang berkembang di Teupah Selatan dan Teluk Dalam diarahkan untuk hilirisasi berkelanjutan, melalui:

- Pemanfaatan ampas dan tandan kosong sawit menjadi pupuk organik dan pakan ternak.
- Pendirian pabrik turunan CPO untuk minyak goreng, sabun, dan bahan baku industri.
- Penyediaan workshop dan mesin pengolahan skala UMKM dan menengah.

Dengan langkah ini, nilai tambah sawit dinikmati langsung masyarakat Simeulue.

c. Industri Pengolahan Sagu

Sagu adalah pangan khas Simeulue dengan potensi besar untuk industri makanan. Pengembangannya diarahkan pada:

- Pembangunan pabrik pengolahan tepung sagu modern.
- Industri makanan berbasis sagu (mie sagu, kue sagu, pangan olahan).
- Pengemasan higienis berstandar ekspor.
- Lokasi pengembangan: Salang, Teupah Selatan, Simeulue Tengah, dan Simeulue Barat.

Industri sagu akan memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus memperluas peluang ekspor.

d. Industri Rotan dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Rotan jenis manao yang tumbuh di Simeulue Barat, Simeulue Tengah, dan Alafan berpotensi ekspor. Program pengembangan meliputi:

- Penanaman rotan jenis unggul.
- Pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi.
- Industri furnitur rotan dan kerajinan rumah tangga berbasis UMKM.

- Pemberdayaan masyarakat desa dalam rantai industri rotan.

Dengan pengembangan ini, hasil hutan bukan kayu menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

e. Hilirisasi Hasil Laut dan Rumput Laut

Untuk memperkuat basis ekonomi biru, hasil laut Simeulue perlu diolah menjadi produk bernilai tambah. Arah pengembangan:

- Pembangunan pabrik pengalengan ikan (tuna, tongkol, cakalang).
- Industri olahan hasil laut: abon ikan, nugget, kerupuk, fillet, dan produk beku.
- Budidaya dan pengolahan rumput laut ± 100 ha di Teupah Selatan dengan pabrik (karagenan, kosmetik, tepung rumput laut).
- Pemasaran produk laut berstandar ekspor dengan dukungan gudang berpendingin.

Dengan hilirisasi, Simeulue akan lebih kompetitif di pasar domestik dan internasional.

f. Pengembangan Infrastruktur dan Kelembagaan Industri

Keberhasilan hilirisasi tidak terlepas dari dukungan infrastruktur dan kelembagaan. Arah pengembangan meliputi:

- Pembangunan kawasan industri terpadu yang terhubung dengan Pelabuhan Sinabang.
- Workshop dan inkubator bisnis untuk UMKM pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- Pusat riset dan inovasi industri berbasis potensi lokal.
- Pembangunan Rumah Garam berstandar SNI ISO 9001/2015.
- Pembangunan Rumah Kemasan UMKM sebagai pusat desain, pengemasan, dan branding produk lokal.
- Skema kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Dengan dukungan ini, Simeulue akan mampu bertransformasi menuju ekonomi berbasis industri olahan bernilai tambah tinggi.

7. Wilayah Pengembangan Permukiman, Layanan Publik, dan Konektivitas

Wilayah pengembangan permukiman, layanan publik, dan konektivitas memiliki peranan penting dalam membentuk kualitas hidup masyarakat Simeulue sekaligus menunjang aktivitas ekonomi daerah. Pola permukiman masih terpusat di kawasan perkotaan seperti Sinabang, sementara wilayah pedesaan tumbuh secara tersebar dengan keterbatasan akses infrastruktur dasar. Beberapa kecamatan telah memiliki fasilitas layanan publik seperti sekolah, pusat kesehatan, serta kantor pelayanan administrasi, namun penyebarannya belum merata.

Dari sisi konektivitas, sistem transportasi darat, laut, dan udara masih menghadapi kendala kapasitas dan keterhubungan. Jalan penghubung antar-kecamatan belum seluruhnya terhubung dengan baik, pelabuhan di luar Sinabang masih terbatas fasilitasnya, dan lapangan udara perintis hanya melayani skala terbatas. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada efisiensi distribusi barang, pergerakan penumpang, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Dengan karakteristik tersebut, kawasan ini merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan permukiman, serta penguatan konektivitas intra dan antarwilayah, yang kesemuanya akan menopang pencapaian visi *Simeulue Bermartabat dan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru 2030*.

Letak Simeulue yang strategis di jalur perairan barat Sumatra, serta fungsinya sebagai pusat layanan pemerintahan dan perdagangan daerah, menjadikan sektor permukiman, layanan publik, dan konektivitas sangat vital untuk dikembangkan. Potensi lahan yang masih tersedia, kebutuhan layanan publik yang meningkat, serta keharusan memperlancar mobilitas masyarakat menjadi dasar utama pengembangan wilayah ini.

Arah pembangunan kawasan ini difokuskan pada penataan permukiman yang lebih layak dan berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan publik yang merata di seluruh kecamatan, serta pembangunan jaringan konektivitas darat, laut, dan udara yang lebih efisien dan terpadu. Dengan begitu, kawasan ini tidak hanya menjadi pusat pelayanan, tetapi juga ruang hidup yang nyaman, produktif, dan inklusif bagi masyarakat Simeulue. Cakupan ini menekankan peran Kota Sinabang sebagai simpul utama layanan publik dan permukiman perkotaan.

Sebagai turunan dari arah tersebut, pengembangan diarahkan pada beberapa prioritas berikut:

a. Penguatan Permukiman Layak dan Berkelanjutan

Permukiman merupakan kebutuhan dasar masyarakat, namun kondisi eksisting masih diwarnai keterbatasan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan layak. Untuk itu, pengembangan diarahkan pada peningkatan kualitas hunian dan lingkungan. Inisiatif yang ditempuh meliputi:

- Pembangunan kawasan permukiman baru dilengkapi sarana prasarana dasar.
- Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi hunian sehat.
- Penyediaan infrastruktur air bersih, sanitasi, dan jaringan drainase.
- Penataan kawasan permukiman pesisir yang rentan bencana agar lebih aman.

Langkah ini akan menjadikan permukiman Simeulue lebih tertata, sehat, dan tangguh terhadap risiko bencana, sekaligus menopang kualitas hidup masyarakat.

b. Peningkatan Layanan Publik Dasar

Ketersediaan layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan, masih belum merata. Beberapa wilayah terpencil kesulitan mengakses fasilitas tersebut karena keterbatasan jarak dan transportasi. Penguatan layanan publik diarahkan melalui:

- Pembangunan sekolah baru di wilayah dengan jumlah penduduk besar namun fasilitas terbatas.
- Penguatan layanan kesehatan dasar melalui Puskesmas dan klinik dengan tenaga medis serta sarana yang memadai, termasuk peningkatan RSUD Simeulue dari tipe C ke tipe B, penambahan RS tipe C di wilayah barat dan tengah, serta pembangunan Puskesmas baru di Karya Bakti, Salang.
- Peningkatan akses layanan administrasi masyarakat melalui pembangunan pusat layanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan, digitalisasi layanan publik, serta pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
- Peningkatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi serta pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Melalui penguatan layanan publik, masyarakat di seluruh pelosok Simeulue diharapkan memperoleh pelayanan dasar yang adil, cepat, dan berkualitas.

c. Pembangunan Terminal dan Sistem Transportasi Terpadu

Konektivitas antarwilayah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Simeulue. Saat ini, mobilitas barang dan orang masih terhambat oleh keterbatasan terminal dan jaringan transportasi. Oleh karena itu, pembangunan terminal angkutan terpadu menjadi prioritas strategis. Arah pembangunan diarahkan pada:

- Pembangunan terminal darat di Sinabang terintegrasi dengan pelabuhan laut.
- Penyediaan fasilitas transit dan parkir terpadu yang ramah pengguna.
- Penguatan konektivitas darat menuju sentra-sentra produksi dan kawasan wisata.
- Integrasi moda transportasi laut dengan pelabuhan-pelabuhan pengumpan di kecamatan.

Dengan hadirnya terminal dan sistem transportasi terpadu, distribusi logistik menjadi lebih efisien, mobilitas masyarakat lebih lancar, dan biaya transportasi dapat ditekan.

d. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Darat, Laut, dan Udara

Selain terminal, konektivitas makro Simeulue perlu diperkuat agar daerah ini semakin terbuka dan terhubung dengan wilayah lain. Upaya pengembangan diarahkan pada:

- Peningkatan kualitas jalan lintas antar-kecamatan agar lebih aman dan lancar.
- Modernisasi pelabuhan pengumpan di beberapa kecamatan untuk mendukung arus barang dan penumpang.

- Peningkatan kapasitas bandara perintis agar mampu melayani pesawat berukuran lebih besar.
- Penyediaan jaringan transportasi publik lokal untuk meningkatkan mobilitas harian masyarakat.

Dengan penguatan konektivitas, Simeulue akan terintegrasi dengan daratan Sumatra maupun wilayah regional, sehingga mendukung daya saing ekonomi dan pariwisata.

e. Integrasi Permukiman dengan Kawasan Produktif dan Pariwisata

Permukiman dan konektivitas perlu dikembangkan secara terintegrasi dengan kawasan produktif dan destinasi pariwisata. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal layak, tetapi juga akses ekonomi yang memadai. Inisiatif diarahkan melalui:

- Penataan permukiman yang dekat dengan sentra pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.
- Penyediaan akses jalan dan transportasi ke kawasan wisata unggulan.
- Pembangunan homestay dan akomodasi berbasis masyarakat di desa wisata.
- Penyediaan energi dan jaringan komunikasi untuk mendukung kawasan produktif.

Dengan integrasi ini, permukiman Simeulue tidak hanya menjadi ruang tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi lokal dan pariwisata berkelanjutan.

8. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Wisata Bahari dan Sosial Budaya

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Wisata Bahari dan Sosial Budaya meliputi Pulau Baby, Pulau Lasia, Pulau Teupah, Pulau Mincau, serta kawasan adat di Simeulue Barat.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Wisata Bahari dan Sosial Budaya merupakan kombinasi antara keindahan pulau-pulau kecil Simeulue dengan kekayaan sejarah, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Pulau Baby, Pulau Lasia, Pulau Teupah, dan Pulau Mincau menawarkan pantai berpasir putih, laut biru jernih, ekosistem terumbu karang, serta spot wisata bahari untuk surfing, snorkeling, diving, dan sport fishing.

Di sisi lain, Simeulue juga menyimpan warisan budaya dan sejarah. Situs bersejarah seperti Makam Tengku Diujung di Simeulue Cut, Makam Bakudo Batu di Teupah Barat, dan bunker peninggalan Jepang menjadi aset wisata heritage. Kawasan adat di Simeulue Barat mencerminkan pola hidup tradisional masyarakat lokal yang sarat nilai budaya dan kearifan lingkungan. Kombinasi antara pesona bahari dan kekayaan sosial budaya ini menjadikan KSK sebagai pilar penting pembangunan pariwisata Simeulue berbasis ekonomi biru, dengan prinsip konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat adat.

KSK Wisata Bahari dan Sosial Budaya diarahkan untuk menjadi destinasi unggulan internasional dengan integrasi wisata bahari premium dan wisata budaya berbasis masyarakat. Arah pengembangan difokuskan pada:

- Penguatan infrastruktur wisata bahari dengan fasilitas ramah lingkungan.
- Revitalisasi situs sejarah dan budaya untuk wisata heritage.
- Pengembangan wisata minat khusus (surfing, diving, sport fishing).
- Penyelenggaraan festival budaya dan event internasional untuk branding Simeulue.
- Pelibatan masyarakat lokal sebagai pelaku utama ekowisata.

Dengan strategi ini, KSK akan menjadi etalase internasional Simeulue yang memperkuat identitas bahari sekaligus budaya lokal. Cakupan ini mencakup pulau-pulau kecil strategis serta kawasan adat di Simeulue Barat sebagai pilar identitas sosial budaya.

a. Pengembangan Pulau Baby dan Pulau Lasia

Pulau Baby dan Pulau Lasia memiliki daya tarik bahari premium. Pulau Baby terkenal dengan ombak surfing dan sport fishing, sementara Pulau Lasia menawarkan panorama laut biru, snorkeling, dan diving. Pengembangannya diarahkan pada:

- Pembangunan cottage ramah lingkungan berbasis energi terbarukan.
- Fasilitas wisata bahari: snorkeling, diving, jet ski, windsurf, dan perahu kaca (glass bottom boat).
- Pembangunan dermaga kecil, penyediaan air bersih, listrik, dan jalur trekking.
- Promosi internasional sebagai destinasi unggulan ekowisata Simeulue.

Dengan penguatan ini, Pulau Baby dan Pulau Lasia dapat diposisikan sebagai ikon wisata bahari premium berkelanjutan.

b. Pengembangan Pulau Mincau dan Pulau Teupah

Pulau Mincau di Teupah Barat dan Pulau Teupah memiliki ombak dan ekosistem laut yang potensial untuk surfing dan diving. Arah pengembangan mencakup:

- Pembangunan penginapan dengan konsep alam atau cottage wisata bahari berkonsep ramah lingkungan.
- Pengembangan area surfing bertaraf internasional dengan dukungan fasilitas profesional.
- Penyediaan speedboat dan perahu kaca (glass bottom boat), serta fasilitas aqua tourism.
- Integrasi dengan konservasi laut dan terumbu karang sebagai daya tarik ekowisata.

Dengan langkah ini, Simeulue semakin kuat sebagai surfing paradise di Samudera Hindia.

c. Wisata Sejarah dan Budaya

Warisan sejarah dan budaya Simeulue memperkaya daya tarik wisata, meliputi:

- Revitalisasi dan penataan Makam Tengku Diujung, Makam Bakudo Batu, serta bunker Jepang.
- Pusat informasi sejarah dan interpretasi budaya lokal.
- Penguatan kawasan adat di Simeulue Barat sebagai destinasi wisata budaya.
- Pelibatan masyarakat dalam pelestarian tradisi dan pengelolaan wisata budaya.
- Pembangunan Tugu Smong sebagai ikon edukasi kebencanaan.

Dengan pengembangan ini, wisata sejarah dan budaya akan menjadi pelengkap wisata bahari sekaligus penguat identitas Simeulue Bermartabat.

d. Wisata Minat Khusus dan Event Budaya

Wisata minat khusus berperan penting dalam menarik wisatawan niche internasional. Arah pengembangan difokuskan pada:

- Fasilitas surfing kelas dunia di Pantai Nancala, Pantai Matanurung, Pantai Maudil, dan Pantai Alus-Alus.
- Pengembangan Babang Diving dan Snorkeling Center di Simeulue Timur dengan fasilitas lengkap.
- Wisata memancing (sport fishing) di perairan Pulau Baby, Pulau Lasia, dan Pulau Simanaha.
- Penyelenggaraan Dragon Boat Festival di Teluk Sinabang dan festival budaya tahunan lainnya.
- Festival budaya dan event internasional.
- Penguatan Literasi dan Digitalisasi melalui penyediaan Pojok baca digital dengan fasilitas Wi-Fi di 10 kecamatan.

Dengan penguatan ini, Simeulue akan dikenal sebagai destinasi eksklusif yang menggabungkan bahari premium dengan event budaya berkelas dunia.

Seluruh arah pengembangan wilayah yang telah dirumuskan merupakan satu kesatuan strategi terpadu untuk mewujudkan Simeulue yang bermartabat dan berdaya saing. Setiap kawasan memiliki peran strategis yang saling melengkapi, mulai dari pusat pertumbuhan utama, basis ketahanan pangan dan agribisnis, penguatan ekonomi biru melalui sektor kelautan, pengembangan pariwisata dan konservasi, pemanfaatan hutan produksi dan sumber daya alam, transformasi industri dan hilirisasi, hingga penguatan permukiman, layanan publik, dan konektivitas.

3.2.3 Strategi Pendanaan dalam Mewujudkan Simeulue Bermartabat dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru

Dalam rangka mewujudkan visi Simeulue Bermartabat dan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru, diperlukan strategi pendanaan yang komprehensif, inovatif, dan berlapis. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah menuntut agar pembiayaan pembangunan tidak hanya bergantung pada APBK maupun dana transfer reguler, melainkan juga mengoptimalkan dukungan dari APBA, APBN, serta berbagai skema pembiayaan alternatif, berorientasi keberlanjutan dan *cost recovery*.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD tetap menjadi sumber utama pendanaan yang harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Strateginya meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi, penguatan manajemen aset daerah, serta pengembangan BUMD yang diarahkan tidak hanya sebagai agen pelayanan, tetapi juga motor kegiatan ekonomi biru yang dapat menghasilkan pendapatan dan *cost recovery*.

2. Optimalisasi Anggaran Berbasis APBK

APBK Simeulue difokuskan untuk program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat: layanan dasar, ketahanan pangan, energi, dan air bersih. Penyusunan program diarahkan agar *eligible* untuk mendapatkan DAK tematik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)**,** dan Dana Insentif Fiskal berbasis kinerja, dengan penekanan pada pembangunan ekonomi biru.

3. Dana Transfer Pusat dan Provinsi

DAU, DAK, Dana Desa, dan DOKA tetap menjadi tulang punggung. Untuk memaksimalkan dukungan, Pemkab perlu memperkuat advokasi agar program afirmatif bagi daerah kepulauan dan 3T (terluar, terdepan, tertinggal) lebih besar dialokasikan ke Simeulue.

4. Dana Desa

Selain untuk infrastruktur dasar, Dana Desa diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal (BUMDes sektor perikanan, pengolahan hasil laut, ekowisata, pertanian unggulan). Pemanfaatannya dikolaborasikan dengan padat karya tunai, CSR, dan dana lain agar berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan.

5. Skema KPBU / PPP (Public-Private Partnership)

KPBU menjadi pilihan penting untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti pelabuhan perikanan, bandara, logistik, energi terbarukan, pariwisata bahari, dan telekomunikasi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan *feasibility study* dan regulasi pendukung agar investasi lebih menarik.

6. Pendanaan PHLN, SBSN, dan PINA

- Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dapat diarahkan untuk proyek-proyek strategis yang mendukung konservasi laut, mitigasi perubahan iklim, dan infrastruktur kepulauan.
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk proyek dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi, seperti rumah sakit daerah, sekolah, atau jaringan air bersih.
- Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) dapat dijajaki untuk proyek jangka panjang yang bersifat *cost recovery*, misalnya kawasan pariwisata biru atau energi terbarukan.

7. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan TJSLP (CSR)

Perusahaan swasta dapat mendukung pembangunan melalui investasi langsung maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)**.** Fokusnya diarahkan pada sektor perikanan berkelanjutan, pengolahan hasil laut, pemberdayaan pesisir, dan pengembangan wisata bahari.

8. Hibah, Donor, dan Pendanaan Internasional

Simeulue berpeluang mengakses hibah internasional terkait isu global seperti perubahan iklim, konservasi laut, dan energi hijau. Dukungan donor dapat diarahkan pada rehabilitasi ekosistem pesisir, energi terbarukan, dan *blue economy value chain*.

9. Skema Pembiayaan Inovatif dan Kreatif

Instrumen seperti blue financing, green bond, blue bond, dana bergulir**,** dan pembiayaan berbasis komunitas perlu dijajaki untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. Skema ini tidak hanya memperluas basis pendanaan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat.

10. Sinergi Multipihak dalam Ekosistem Pembiayaan

Keberhasilan strategi pendanaan sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas pihak: pemerintah, perbankan, lembaga keuangan non-bank, perguruan tinggi, BUMD, BUMDes, dunia usaha, hingga masyarakat sipil. Sinergi ini membuka peluang insentif fiskal berbasis kinerja, memperluas akses modal bagi UMKM, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi biru Simeulue secara inklusif.

3.2.4 Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pembangunan daerah merupakan pedoman penting yang mengarahkan rumusan strategi agar lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Ia berfungsi sebagai penjabaran misi kepala daerah yang dirancang secara sistematis untuk menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan selama periode pemerintahan.

Arah kebijakan disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul, baik internal maupun eksternal. Ia tidak hanya berperan sebagai respon terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga sebagai instrumen antisipatif untuk menjawab isu-isu strategis kewilayahan dan pembangunan sektoral. Oleh karena itu, arah kebijakan tidak dibatasi secara tahunan, melainkan bersifat lintas waktu dan menjadi pijakan utama dalam perencanaan lima tahunan serta penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah.

Meskipun RPJMK Kabupaten Simeulue mencakup periode 2025–2029, arah kebijakan dalam dokumen ini tetap mempertimbangkan kesinambungan hingga tahun 2030. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa tahun 2030 merupakan masa transisi menuju siklus perencanaan jangka panjang berikutnya, sehingga arah kebijakan yang dirumuskan dapat tetap digunakan sebagai pedoman pembangunan daerah dalam menjaga keberlanjutan dan konsolidasi hasil pembangunan.

Berikut adalah perincian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Simeulue tahun 2026–2030 yang telah diselaraskan dengan strategi pembangunan daerah dan visi Simeulue Bermartabat dan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru 2030.

Tabel 3.6. Strategi dan Arah Kebijakan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*
1.	Memperkuat nilai-nilai keislaman dan adat dalam kehidupan masyarakat melalui peningkatan pendidikan agama sejak dini, penguatan dakwah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media digital, serta penguatan peran tokoh adat dan lembaga adat dalam menjaga norma, etika, dan tatanan sosial masyarakat	a. Penguatan pendidikan agama berbasis keluarga dan sekolah pada seluruh jenjang wilayah. b. Peningkatan kapasitas penyuluh agama dan dai muda dalam pemanfaatan media digital sebagai sarana dakwah. c. Revitalisasi fungsi lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial dan nilai budaya.
2.	Mendorong peningkatan kesadaran berzakat dan semangat gotong royong masyarakat melalui penguatan lembaga keagamaan, penyuluhan zakat yang lebih luas dan terstruktur, serta penguatan lingkungan sosial yang rukun, tertib, dan peduli melalui berbagai program berbasis komunitas	a. Peningkatan literasi zakat melalui penguatan penyuluhan berbasis masjid dan sekolah. b. Penguatan program pemberdayaan sosial berbasis gotong royong di tingkat kecamatan. c. Peningkatan kinerja lembaga zakat dan komunitas sosial dalam penyaluran bantuan bagi kelompok rentan.
3.	Mengupayakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar—meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, energi, air bersih, dan permukiman—untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk desa terpencil, memperoleh akses layanan publik yang setara serta mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat	a. Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan serta jembatan penghubung antarwilayah prioritas. b. Perluasan akses energi dan layanan air bersih di wilayah terpencil. c. Penguatan program penataan permukiman layak huni bagi masyarakat miskin dan rentan.

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*
		d. Peningkatan kualitas jaringan layanan transportasi dan konektivitas antarwilayah.
4.	Memperkuat kesiapsiagaan bencana dan kelestarian lingkungan melalui pelibatan masyarakat dalam penguatan desa tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini, perbaikan kawasan rawan bencana, serta penguatan kampanye hidup bersih dan ramah lingkungan	a. Penyusunan dan penerapan rencana kontinjensi berbasis risiko di desa dan kecamatan rawan bencana. b. Pengembangan sistem informasi dan peringatan dini bencana yang terintegrasi. c. Rehabilitasi dan konservasi wilayah pesisir, aliran sungai, dan ekosistem rentan lainnya. d. Penguatan kampanye lingkungan hidup, termasuk sekolah adiwiyata dan gerakan hidup bersih..
5.	Mengembangkan potensi kelautan dan pariwisata bahari melalui penguatan kelompok nelayan, peningkatan nilai tambah pengolahan hasil laut, serta pengembangan destinasi wisata pantai dan laut yang lebih menarik dan dikelola secara profesional, disertai pemberdayaan masyarakat lokal dalam penyediaan layanan wisata dan promosi budaya daerah	a. Penguatan kelembagaan, akses pasar, dan kapasitas usaha kelompok nelayan tradisional. b. Peningkatan teknologi, kualitas, dan kapasitas pengolahan hasil laut bernilai ekonomi. c. Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu berbasis komunitas dan kearifan lokal. d. Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan layanan wisata, kuliner laut, dan promosi budaya daerah.

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*
6.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses literasi melalui penguatan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyediaan ruang literasi berbasis komunitas, yang diiringi dengan pelestarian budaya daerah melalui festival budaya, dokumentasi tradisi, dan pengembangan seni lokal	a. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana-prasarana pendidikan dasar dan menengah. b. Penguatan kompetensi tenaga pendidik secara berkelanjutan. c. Penyediaan ruang literasi dan pengembangan gerakan literasi desa dan sekolah. d. Pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan festival budaya dan dokumentasi tradisi.
7.	Membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan, pemuda, dan masyarakat umum melalui penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, pengembangan kepemimpinan dan potensi generasi muda, serta peningkatan kesadaran kebangsaan dan etika demokrasi melalui berbagai kegiatan edukatif dan pembinaan karakter	a. Penguatan kapasitas kepemimpinan pemuda dan perempuan tingkat desa. b. Pemberdayaan forum anak, karang taruna, dan organisasi kepemudaan lokal. c. Peningkatan edukasi kebangsaan dan demokrasi partisipatif. d. Penguatan perlindungan sosial bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
8.	Menyiapkan tenaga kerja kompeten dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, kemitraan dengan dunia usaha, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga, terutama bagi keluarga miskin dan kelompok rentan di desa-desa	a. Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. b. Penguatan kemitraan antara pemerintah, UMKM, dan industri lokal dalam penyerapan tenaga kerja. c. Pemberdayaan kelompok usaha perempuan dan rumah tangga melalui dukungan sarana dan peningkatan kapasitas usaha.

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*
9.	Meningkatkan kemandirian desa tertinggal melalui penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa	a. Peningkatan dukungan teknis dan pendanaan pembangunan infrastruktur desa prioritas. b. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan tata kelola partisipatif. c. Penguatan forum musyawarah desa yang inklusif dan responsif.
10.	Mengembangkan desa tertinggal menjadi wilayah yang mandiri dan produktif melalui penguatan infrastruktur dasar, peningkatan sektor pertanian dan perkebunan, serta revitalisasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	a. Peningkatan dukungan fasilitas dasar untuk kawasan transmigrasi dan desa berkembang. b. Pengembangan model pertanian dan perkebunan rakyat berbasis demplot dan inovasi lokal. c. Fasilitasi investasi mikro untuk pengembangan desa mandiri pangan dan energi.
11.	Memberdayakan pelaku UMKM dan usaha rumahan melalui pelatihan kewirausahaan, kemudahan akses permodalan, serta penguatan promosi produk lokal dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.	a. Penyediaan pelatihan kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi UMKM baru. b. Penguatan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro dan skema pembiayaan syariah. c. Promosi produk lokal melalui kampanye daerah dan festival ekonomi kreatif.

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*
12.	Meningkatkan kemudahan berinvestasi dan pengembangan kawasan wisata potensial melalui promosi potensi unggulan daerah, penyederhanaan perizinan, serta penyiapan kawasan ekonomi yang mendukung sektor produktif dan pariwisata	a. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pelayanan perizinan terpadu. b. Promosi potensi investasi di sektor kelautan, pariwisata, dan energi terbarukan. c. Pengembangan kawasan ekonomi strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
13.	Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, termasuk layanan kesehatan ibu dan anak, melalui penguatan layanan dasar di puskesmas, edukasi pola hidup sehat, serta perluasan layanan keluarga berencana dan pendampingan keluarga di tingkat desa	a. Peningkatan fasilitas, SDM, dan sarana prasarana layanan kesehatan dasar dan rujukan. b. Peningkatan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil melalui model layanan bergerak. c. Edukasi perilaku hidup sehat, gizi, dan layanan keluarga berencana berbasis desa.
14.	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penguatan sistem perencanaan, penerapan SPBE lintas sektor, serta penguatan kebijakan berbasis data yang partisipatif dan terintegrasi	a. Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah berbasis dashboard digital. b. Peningkatan kapasitas penyusunan perencanaan berbasis SIPD dan partisipasi masyarakat. c. Peningkatan interoperabilitas antar-sistem informasi SKPD.
15.	Menguatkan sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran serta penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin efisiensi dan kepatuhan	a. Peningkatan konsistensi penerapan e-budgeting dan e-audit pada seluruh SKPD. b. Penguatan fungsi APIP sebagai pengawas internal pemerintah daerah.

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*
		c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pengelolaan APBK melalui forum keterbukaan informasi.
16.	Meningkatkan kapasitas legislatif dan aparatur pemerintahan melalui pelatihan, pengembangan karier, serta penguatan regulasi daerah yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional dan beretika.	a. Peningkatan kompetensi aparatur legislatif dan eksekutif sesuai kebutuhan jabatan. b. Penguatan mekanisme konsultasi legislatif–eksekutif dalam pembentukan regulasi daerah. c. Penguatan evaluasi kinerja dan etika pelayanan publik.
17.	Meningkatkan kualitas layanan publik melalui inovasi digital, peningkatan kapasitas petugas pelayanan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kepuasan masyarakat dan keterlibatan publik	a. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat terpadu berbasis aplikasi digital. b. Penyusunan dan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala. c. Pemberian penghargaan bagi unit layanan publik berprestasi berdasarkan penilaian masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap Arah Pembangunan Kewilayahan yang tercantum dalam Lampiran IV RPJMN Tahun 2025–2029. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung Kawasan Afirmasi Simeulue sebagai daerah terdepan dan percepatan pemerataan pembangunan.

Perumusan strategi dan kebijakan ini mencakup penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan ketahanan bencana, pengembangan sektor unggulan seperti perikanan dan perkebunan, serta penguatan layanan dasar dan transformasi digital yang mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Simeulue.

Namun demikian, tidak seluruh strategi dan arah kebijakan dalam RPJMK Simeulue berfokus langsung pada Arah Pembangunan Kewilayahan yang tercantum dalam Lampiran IV RPJMN. Hanya beberapa strategi dan arah kebijakan yang telah disesuaikan dan terkait langsung dengan prioritas pembangunan dalam Kawasan Afirmasi Simeulue, yang mencakup sektor-sektor yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah terdepan ini.

Adapun keselarasan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Arah Pembangunan Kewilayahan yang tercantum dalam Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029 tersebut diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7. Keselarasan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan	**Strategi 3**: Mengupayakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar—meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, energi, air bersih, dan permukiman untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk desa terpencil, memperoleh akses layanan publik yang setara serta mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.	- Membangun dan merehabilitasi jalan dan jembatan penghubung antar wilayah prioritas. - Meningkatkan cakupan jaringan listrik dan air bersih khususnya di daerah terpencil. - Memperluas program rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan rentan. - Meningkatkan kualitas layanan konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten Simeulue.
2	Peningkatan ketahanan bencana	**Strategi 4:** Memperkuat kesiapsiagaan bencana dan kelestarian lingkungan melalui pelibatan masyarakat dalam penguatan desa tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini, perbaikan kawasan rawan bencana, serta penguatan kampanye hidup bersih dan ramah lingkungan	- Menyusun dan menerapkan rencana kontinjensi berbasis desa dan kecamatan rawan bencana. - Mengembangkan sistem peringatan dini dan pusat informasi bencana yang terintegrasi. - Melaksanakan rehabilitasi dan konservasi wilayah pesisir dan hulu sungai. - Melakukan kampanye hidup bersih dan sekolah adiwiyata untuk peningkatan kesadaran lingkungan.

NO.	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*
3	Preservasi jalan Lingkar Simeulue	**Strategi 3**: Mengupayakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar—meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, energi, air bersih, dan permukiman untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk desa terpencil, memperoleh akses layanan publik yang setara serta mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Meningkatkan kualitas layanan konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten Simeulue, termasuk preservasi jalan lingkar Simeulue.
4	Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah	**Strategi 6**: Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses literasi melalui penguatan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyediaan ruang literasi berbasis komunitas, yang diiringi dengan pelestarian budaya daerah melalui festival budaya, dokumentasi tradisi, dan pengembangan seni lokal.	- Membangun dan merehabilitasi fasilitas pendidikan dasar dan menengah. - Mengembangkan pelatihan peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan. - Memfasilitasi taman baca dan program literasi berbasis desa dan sekolah. - Melaksanakan festival budaya tahunan dan dokumentasi digital warisan tradisi lokal.

NO.	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*
5	Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perikanan dan perkebunan (kelapa dan pala)	**Strategi 5**: Mengembangkan potensi kelautan dan pariwisata bahari melalui penguatan kelompok nelayan, peningkatan nilai tambah pengolahan hasil laut, serta pengembangan destinasi wisata pantai dan laut yang lebih menarik dan dikelola secara profesional, disertai pemberdayaan masyarakat lokal dalam penyediaan layanan wisata dan promosi budaya daerah.	- Memperkuat kelembagaan dan akses pasar kelompok nelayan tradisional. - Memberi dukungan peralatan dan pelatihan pengolahan hasil laut bernilai ekonomi. - Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu berbasis komunitas. - Mendorong keterlibatan masyarakat dalam homestay, kuliner laut, dan kegiatan budaya lokal.
6	Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Sinabang (PHTC)	**Strategi 3**: Mengupayakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, energi, air bersih, dan permukiman untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk desa terpencil, memperoleh akses layanan publik yang setara serta mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Memperluas program rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan rentan di kawasan perkotaan Sinabang (PHTC).

NO.	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*
7	Pengembangan SPAM Perkotaan Sinabang	**Strategi 3**: Mengupayakan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, pelabuhan, energi, air bersih, dan permukiman untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk desa terpencil, memperoleh akses layanan publik yang setara serta mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Pengembangan SPAM Perkotaan Sinabang untuk meningkatkan akses terhadap air bersih di wilayah perkotaan.
8	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut	**Strategi 9**: Meningkatkan kemandirian desa tertinggal melalui penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.	Mendukung program transmigrasi lokal dengan fasilitas dasar yang memadai serta mendorong investasi mikro untuk pengembangan desa mandiri pangan dan energi.
9	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kab. Simeulue (PHTC)	**Strategi 6**: Meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses literasi melalui penguatan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penyediaan ruang literasi berbasis komunitas, yang diiringi dengan pelestarian budaya daerah melalui festival budaya, dokumentasi tradisi, dan pengembangan seni lokal.	Meningkatkan fasilitas, SDM, dan peralatan medis di puskesmas dan pustu, serta menyediakan layanan kesehatan keliling di wilayah terpencil.

NO.	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN RPJMN TAHUN 2025-2029	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	*2*	*3*	*4*
10	Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital	**Strategi 12**: Meningkatkan kemudahan berinvestasi dan pengembangan kawasan wisata potensial melalui promosi potensi unggulan daerah, penyederhanaan perizinan, serta penyiapan kawasan ekonomi yang mendukung sektor produktif dan pariwisata.	Percepatan transformasi digital melalui perluasan jaringan telekomunikasi dan pengembangan SDM TIK untuk meningkatkan daya saing daerah.
11	Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan	**Strategi 2**: Mendorong peningkatan kesadaran berzakat dan semangat gotong royong masyarakat melalui penguatan lembaga keagamaan, penyuluhan zakat yang lebih luas dan terstruktur, serta penguatan lingkungan sosial yang rukun, tertib, dan peduli melalui berbagai program berbasis komunitas.	Memperluas jangkauan program gotong royong kampung di seluruh kecamatan, serta mendukung lembaga pengelola zakat dan komunitas sosial untuk distribusi bantuan ke kelompok rentan.

3.2.5 Penahapan Pembangunan

Untuk mendukung pencapaian strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMK Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029, diperlukan langkah-langkah operasional yang sistematis dan terarah. Salah satu langkah tersebut adalah penyusunan penahapan pembangunan tahunan yang diselaraskan dengan skala prioritas, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan strategis lintas sektor selama periode lima tahun.

Penahapan pembangunan dirancang untuk menerjemahkan strategi ke dalam fokus tematik tahunan yang konkret, dengan tujuan memperkuat konsolidasi kebijakan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta percepatan pencapaian target kinerja pembangunan. Melalui pendekatan ini, kesinambungan antarprogram dan konsistensi pelaksanaan pembangunan dapat dijaga, sehingga strategi yang telah dirumuskan diimplementasikan secara efektif adaptif terhadap perubahan kondisi.

Dengan demikian, penahapan pembangunan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah, serta menjamin keterpaduan dan efisiensi pelaksanaan program setiap tahunnya. Rincian tahapan pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Penahapan Pembangunan RPMJD Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pembangunan Tahap I Diarahkan pada: Penguatan Fondasi Tata Kehidupan Sosial, Budaya, dan Keagamaan; Peningkatan Kualitas Layanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial; Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar; Penguatan Ekonomi Komunitas; serta Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan sebagai Pijakan Awal Menuju Simeulue Bermartabat dan Pengembangan Ekonomi Biru di Masa Berikutnya	**Pembangunan Tahap II difokuskan pada:** Peningkatan Konektivitas Antarwilayah, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Dasar Publik, serta Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Maritim, Kelautan, dan Pariwisata sebagai Dasar Transformasi Ekonomi Biru yang Inklusif, Produktif, dan Berdaya Saing	**Pembangunan Tahap III diarahkan pada:** Akselerasi Ketahanan Sosial, Ekologis, dan Kelembagaan; Penguatan Mitigasi Risiko Bencana; serta Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan ntuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Biru, Layanan Publik, dan Kualitas Hidup Masyarakat di Tengah Perubahan Iklim dan Dinamika Sosial.	**Pembangunan Tahap IV diarahkan pada:** Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi Lokal Berbasis Maritim, Penguatan Rantai Nilai Ekonomi Biru, Peningkatan Kualitas Pariwisata Bahari, serta Konsolidasi Kelembagaan Pemerintahan, Desa, dan Komunitas Pesisir untuk Memperkuat Simeulue Sebagai Wilayah yang Maju, Inklusif, dan Berdaya Saing	**Pembangunan Tahap V diarahkan pada:** Peneguhan Simeulue yang Bermartabat dan Berdaya Saing Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru melalui Konsolidasi Pembangunan Maritim yang Terintegrasi, Inovasi Ekonomi Daerah, Penguatan Investasi, serta Penyediaan Pelayanan Publik Modern yang Inklusif Ddan Berkelanjutan.

Setiap tahap pembangunan mengusung tema tahunan yang disusun berdasarkan skala prioritas pembangunan, kebutuhan strategis sektoral, serta tantangan pembangunan yang berkembang. Pendekatan ini menjadi landasan untuk memastikan setiap kebijakan dan program memiliki daya dorong optimal terhadap pencapaian target pembangunan daerah secara progresif.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan pada masing-masing tahun dirancang untuk memperkuat kesinambungan antara tahapan sebelumnya dan tahapan selanjutnya, sehingga terjadi akselerasi pencapaian kinerja pembangunan daerah yang selaras dengan strategi RPJMK dan RPJP Simeulue 2005–2030. Penahapan ini sekaligus merepresentasikan transformasi bertahap dari fase fondasi pembangunan menuju fase penguatan daya saing dan pengokohan Simeulue sebagai simpul ekonomi biru yang berkelanjutan.

Dengan kerangka penahapan yang terstruktur, Pemerintah Daerah dapat lebih responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, sekaligus menjaga arah pembangunan tetap dalam rel yang telah dirancang secara partisipatif dan berorientasi hasil.

Tabel 3.9. Arah Kebijakan dalam Penahapan Pembangunan

NO.	ARAH KEBIJAKAN	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Penguatan pendidikan agama berbasis keluarga dan sekolah pada seluruh jenjang wilayah	✓	✓	✓		
2	Peningkatan kapasitas penyuluh agama dan dai muda dalam pemanfaatan media digital sebagai sarana dakwah	✓	✓	✓		
3	Revitalisasi fungsi lembaga adat sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial dan nilai budaya	✓	✓	✓		
4	Peningkatan literasi zakat melalui penguatan penyuluhan berbasis masjid dan sekolah	✓	✓	✓		
5	Penguatan program pemberdayaan sosial berbasis gotong royong di tingkat kecamatan	✓	✓	✓		
6	Peningkatan kinerja lembaga zakat dan komunitas sosial dalam penyaluran bantuan bagi kelompok rentan		✓	✓	✓	
7	Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur jalan serta jembatan penghubung antarwilayah prioritas	✓	✓	✓	✓	✓
8	Perluasan akses energi dan layanan air bersih di wilayah terpencil	✓	✓	✓	✓	✓
9	Penguatan program penataan permukiman layak huni bagi masyarakat miskin dan rentan	✓	✓	✓	✓	✓
10	Peningkatan kualitas jaringan layanan transportasi dan konektivitas antarwilayah	✓	✓	✓	✓	✓
11	Penyusunan dan penerapan rencana kontinjensi berbasis risiko di desa dan kecamatan rawan bencana	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	ARAH KEBIJAKAN	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
12	Pengembangan sistem informasi dan peringatan dini bencana yang terintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓
13	Rehabilitasi dan konservasi wilayah pesisir, aliran sungai, dan ekosistem rentan lainnya			✓	✓	✓
14	Penguatan kampanye lingkungan hidup, termasuk sekolah adiwiyata dan gerakan hidup bersih	✓	✓	✓	✓	✓
15	Penguatan kelembagaan, akses pasar, dan kapasitas usaha kelompok nelayan tradisional		✓	✓	✓	✓
16	Peningkatan teknologi, kualitas, dan kapasitas pengolahan hasil laut bernilai ekonomi		✓	✓	✓	✓
17	Pengembangan kawasan wisata bahari terpadu berbasis komunitas dan kearifan lokal			✓	✓	✓
18	Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan layanan wisata, kuliner laut, dan promosi budaya daerah			✓	✓	✓
19	Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana-prasarana pendidikan dasar dan menengah	✓	✓	✓	✓	✓
20	Penguatan kompetensi tenaga pendidik secara berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓
21	Penyediaan ruang literasi dan pengembangan gerakan literasi desa dan sekolah	✓	✓	✓	✓	✓
22	Pelestarian budaya lokal melalui penyelenggaraan festival budaya dan dokumentasi tradisi	✓	✓	✓	✓	✓
23	Penguatan kapasitas kepemimpinan pemuda dan perempuan tingkat desa	✓	✓	✓		
24	Pemberdayaan forum anak, karang taruna, dan organisasi kepemudaan lokal		✓	✓	✓	
25	Peningkatan edukasi kebangsaan dan demokrasi partisipatif	✓	✓	✓		
26	Penguatan perlindungan sosial bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya	✓	✓	✓	✓	✓

NO.	ARAH KEBIJAKAN	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
27	Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja	✓	✓	✓	✓	✓
28	Penguatan kemitraan antara pemerintah, UMKM, dan industri lokal dalam penyerapan tenaga kerja		✓	✓	✓	✓
29	Pemberdayaan kelompok usaha perempuan dan rumah tangga melalui dukungan sarana dan peningkatan kapasitas usaha	✓	✓	✓	✓	✓
30	Peningkatan dukungan teknis dan pendanaan pembangunan infrastruktur desa prioritas	✓	✓	✓		
31	Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan dan tata kelola partisipatif	✓	✓	✓		
32	Penguatan forum musyawarah desa yang inklusif dan responsif	✓	✓	✓		
33	Peningkatan dukungan fasilitas dasar untuk kawasan transmigrasi dan desa berkembang		✓	✓	✓	✓
34	Pengembangan model pertanian dan perkebunan rakyat berbasis demplot dan inovasi lokal		✓	✓	✓	✓
35	Fasilitasi investasi mikro untuk pengembangan desa mandiri pangan dan energi			✓	✓	✓
36	Penyediaan pelatihan kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi UMKM baru	✓	✓	✓	✓	✓
37	Penguatan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro dan skema pembiayaan syariah	✓	✓	✓	✓	✓
38	Promosi produk lokal melalui kampanye daerah dan festival ekonomi kreatif		✓	✓	✓	✓
39	Peningkatan kapasitas dan efektivitas pelayanan perizinan terpadu	✓	✓	✓	✓	✓
40	Promosi potensi investasi di sektor kelautan, pariwisata, dan energi terbarukan		✓	✓	✓	✓
41	Pengembangan kawasan ekonomi strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil			✓	✓	✓

NO.	ARAH KEBIJAKAN	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
42	Peningkatan fasilitas, SDM, dan sarana prasarana layanan kesehatan dasar dan rujukan	✓	✓	✓	✓	✓
43	Peningkatan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil melalui model layanan bergerak	✓	✓	✓	✓	✓
44	Edukasi perilaku hidup sehat, gizi, dan layanan keluarga berencana berbasis desa	✓	✓	✓	✓	✓
45	Pengembangan sistem informasi pembangunan daerah berbasis dashboard digital	✓	✓	✓	✓	✓
46	Peningkatan kapasitas penyusunan perencanaan berbasis SIPD dan partisipasi masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
47	Peningkatan interoperabilitas antar-sistem informasi SKPD		✓	✓	✓	✓
48	Peningkatan konsistensi penerapan e-budgeting dan e-audit pada seluruh SKPD	✓	✓	✓	✓	✓
49	Penguatan fungsi APIP sebagai pengawas internal pemerintah daerah		✓	✓	✓	✓
50	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pengelolaan APBK melalui forum keterbukaan informasi		✓	✓	✓	✓
51	Peningkatan kompetensi aparatur legislatif dan eksekutif sesuai kebutuhan jabatan	✓	✓	✓	✓	✓
52	Penguatan mekanisme konsultasi legislatif–eksekutif dalam pembentukan regulasi daerah		✓	✓	✓	✓
53	Penguatan evaluasi kinerja dan etika pelayanan publik		✓	✓	✓	✓
54	Pengembangan sistem pengaduan masyarakat terpadu berbasis aplikasi digital	✓	✓	✓	✓	✓
55	Penyusunan dan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓
56	Pemberian penghargaan bagi unit layanan publik berprestasi berdasarkan penilaian masyarakat			✓	✓	✓

3.2.6 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029

Program-program prioritas daerah dirumuskan sebagai hasil dari proses *cascading* kinerja yang terstruktur, dimulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam capaian outcome beserta indikator kinerjanya pada setiap tingkatan. Penyusunan program prioritas ini bertujuan untuk memastikan konsistensi antara arah kebijakan strategis daerah dengan implementasi teknis di tingkat perangkat daerah.

Program prioritas dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam sembilan program strategis daerah yang dirancang secara tematik dan berfungsi sebagai pengungkit utama pencapaian visi *"Simeulue yang Bermartabat dan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030."* Program strategis tersebut meliputi: *Simeulue Islami Berseri, Simeulue Terhubung 24/7, Simeulue Zero Victim, The Blue Economy Hub – Economy of Sumatera, Akademi Maritim Simeulue dan Reformasi SDM Unggul, Gerakan 100 Desa Maju, Invest in Paradise, Simeulue Sehat dan Keluarga Tangguh,* serta *Simeulue Smart Governance.*

3.2.6.1 Program Prioritas Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2029

Sebagai upaya untuk mengarahkan pembangunan daerah secara fokus, terukur, dan berdampak, Pemerintah Kabupaten Simeulue telah menetapkan sejumlah program prioritas yang menjadi pendukung utama implementasi RPJMK Tahun 2025–2029. Program-program ini dirancang untuk menjawab isu-isu strategis daerah yang bersifat lintas sektor serta memperkuat keterpaduan antara arah kebijakan makro dan pelaksanaan teknis di tingkat perangkat daerah.

Program-program prioritas daerah dirumuskan sebagai hasil dari proses cascading kinerja yang terstruktur, dimulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, yang kemudian dijabarkan ke dalam capaian outcome beserta indikator kinerjanya pada setiap tingkatan

Secara rinci, daftar dan uraian program-program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029 disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Program Prioritas RPJMK Kabupaten Simuelue Tahun 2025-2029

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
Misi 1 : Penegakan Syariat Islam dan Penguatan Nilai-Nilai Keislaman dalam Kehidupan Masyarakat					
1.1	**Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Simeulue Berlandaskan Nilai-Nilai Syariat Islam dan Norma Adat Istiadat**		**Indeks Pembangunan Syariah**		
1.1.1	**Meningkatnya Nilai-Nilai Pengamalan Syariat Islam yang Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, dan Beradab sesuai Syariat Islam Serta Nilai-Nilai Adat Istiadat Aceh**		**Persentase Penerapan Kurikulum Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Islami pada Tingkat Pendidikan Dasar**		
			Persentase Pusat Dakwah yang Representatif		
			Persentase Pertumbuhan Zakat yang Terkumpul terhadap Potensi Zakat		
			Persentase Desa dengan Kelembagaan Adat yang Aktif dan Dibina		
			Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Konflik Sosial yang Ditangani dan Diselesaikan		

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keislaman Di Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Islami	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
		Meningkatnya Kualitas Dayah	Persentase Dayah yang Mengalami Peningkatan Akreditasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
		Adanya Pusat Dakwah sebagai Wadah Edukasi Keislaman	Persentase Pusat Dakwah yang Aktif	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
		Meningkatnya Peran Lembaga Keagamaan dalam Penyikapan Isu Sosial dan Kebijakan Publik	Jumlah Tausyiah dan atau Rekomendasi yang Dikeluarkan Terkait Isu Sosial, Keagamaan, dan Kebijakan Publik	PROGRAM MAJELIS PERMUSYARAWATAN ULAMA	MAJELIS PERMUSYARAWATAN ULAMA
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Ziswaf	Persentase ZISWAF yang Dikumpulkan dan Disalurkan	PROGRAM BAITUL MAL	BAITUL MAL
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Adat Aceh	Persentase Desa yang Dibina dan Melestarikan Adat Aceh Sesuai dengan Norma, Nilai, dan Kelembagaan Adat yang Berlaku	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	MAJELIS ADAT ACEH

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang Dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYTUL HISBAH
		Meningkatkan Penegakan Qanun dan Perbup untuk Menjamin Ketertiban dan Kepatuhan Masyarakat	Persentase Qanun dan Perbup yang Ditegakkan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYTUL HISBAH
		Meningkatkan Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satpol PP dan WH untuk Mendukung Penegakan Hukum	Jumlah PPNS pada Satpol PP dan WH	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYTUL HISBAH
		Meningkatkan Ketersediaan SOP yang Efektif untuk Penegakan Qanun, Perbup, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Presentase SOP Yang Tersedia dalam Penegakan Qanun dan Perbup serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYTUL HISBAH
		Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang yang Memadai dalam Penegakan Qanun, Perbup, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Sarana Prasarana Minimal yang Digunakan sebagai Penunjang dalam Penegakan Qanun dan Perbup serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYTUL HISBAH

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatkan Jumlah Anggota Satpol PP dan WH yang Telah Mengikuti Diklat Dasar untuk Meningkatkan Kemampuan dan Kinerja	Persentase Jumlah Anggota Satpol PP dan WH yang Telah Mengikuti Diklat Dasar	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYTUL HISBAH
		Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Penyelesaian Konflik Sosial di Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Misi 2 : Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkelanjutan					
2.1	**Meningkatkan Konektivitas Antarwilayah dalam Kabupaten Simeulue serta Menjamin Kualitas dan Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**		**Rasio Konektivitas**		
2.1.1	**Meningkatnya Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Jasa Perhubungan yang Berkualitas, Terpadu, dan Berkelanjutan**		**Cakupan Wilayah Yang Dilayani Angkutan Umum Darat Dan Penyeberangan**		
			Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar dan Sarana Utilitas Umum dan Kawasan Permukiman		

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi di Wilayah Kabupaten	Konektivitas Kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Perusahaan Angkutan Umum dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Keterhubungan Antar Wilayah dalam Mendukung Mobilitas Orang dan Barang Secara Efisien	Cakupan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Antar Pulau	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	Presentasi Jembatan Dengan Kondisi Baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Rasio Layanan Jaringan Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Berfungsi Baik	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengolaan Air Limbah	Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
Misi 3 : Mitigasi Risiko Bencana dan Penguatan Ketahanan Daerah					
3.1	**Meningkatkan Kapasitas dan Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana serta Efektivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup**		**Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**		
3.1.1	**Terwujudnya Daerah yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana serta Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan**		**Indeks Risiko Bencana (IRB)**		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
		Meningkatnya Kesadaran dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Risiko Bencana.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Efektivitas Penyusunan dan Legalitas Dokumen Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya Penanganan Pra Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya Ketersediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam, Sosial, dan Non Alam pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Korban Bencana yang Memenuhi Standar	Persentase Sarana Prasarana Bagi Korban Bencana Kabupaten yang Disediakan Sesuai Standar	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
		Meningkatnya Profesionalisme Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan dalam Penanganan Korban Bencana Sesuai Standar	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
		Meningkatnya Pengelolaan Museum Smong sebagai Pusat Edukasi dan Pelestarian Budaya Daerah	Pengelolaan Museum Smong	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Persentase Pengelolaan Kawasan Tahura	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Menurunnya Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Menurunnya Pencemaran Udara	Indeks Kualitas Udara	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Menurunnya Pencemaran Lahan	Indeks Kualitas Lahan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun B3 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah B3 (Limbah B3)	Persentase Limbah (B3) yang Dikelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan /atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLLH dan PUU LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Misi 4 Diversifikasi Ekonomi Melalui Sektor Ekonomi Biru					
4.1	**Mewujudkan Ekonomi Biru sebagai Penggerak Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Perekonomian Daerah**		**PDRB Per Kapita ADHB**		
4.1.1	**Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Biru terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian Daerah**		**Jumlah Total Produksi Perikanan**		
			Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB		
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Total Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Asing melalui Penguatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah	Persentase Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Misi 5 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengembangan SDM					
5.1	**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing serta Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Terintegrasi**		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
5.1.1	**Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Aksesibilitas Layanan Pengembangan SDM Masyarakat yang Berkualitas dan Berkelanjutan**		**Rata-Rata Lama Sekolah**		
			Harapan Lama Sekolah		
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
			Persentase Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Kebudayaan, Adat, Termasuk Kesenian Tradisional dan Warisan Budaya		
			Indeks Pembangunan Pemuda		
			Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional yang Diikuti		
			Tingkat Partispasi Politik Masyarakat		
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang PAUD	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang (APS) Usia 5-6 (PAUD)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Jenjang Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang (APS) Usia 7-15 (SD/SMP)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Jenjang Kesetraan	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang (APS) 7-18 (Kesetaraan)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya PAUD yang Terakreditasi Minimal B	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Kenyamanan Belajar	Satuan Pendidikan Dasar dengan Kondisi Bangunan Baik	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Kemampuan Literasi Peserta Didik Jenjang SD	Skor Kemampuan Literasi SD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Kemampuan Literasi Peserta Didik Jenjang SMP	Skor Kemampuan Literasi SMP	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Kemampuan Numerasi Peserta Didik Jenjang SD	Skor Kemampuan Numerasi SD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Kemampuan Numerasi Peserta Didik Jenjang SMP	Skor Kemampuan Numerasi SMP	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Iklim Keamanan di Lingkungan Pembelajaran SD	Iklim Keamanan SD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Iklim Keamanan di Lingkungan Pembelajaran SMP	Iklim Keamanan SMP	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Iklim Kebhinekaan dan Toleransi di SD	Iklim Kebhinekaan SD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Iklim Kebhinekaan dan Toleransi di SMP	Iklim Kebhinekaan SMP	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Iklim Inklusivitas dan Ramah bagi Semua Peserta Didik di SD	Iklim Inklusivitas SD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Iklim Inklusivitas dan Ramah bagi Semua Peserta Didik di SMP	Iklim Inklusivitas SMP	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik PAUD	Proporsi Guru Paud dengan Kualifikasi S1 / D-IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Dasar	Proporsi Guru Pendidikan Dasar dengan Kualifikasi S1 / D-IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Meningkatnya Minat dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat melalui Penguatan Akses, Kemampuan, dan Budaya Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya melalui Upaya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya Secara Berkelanjutan	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kebudayaan melalui Sertifikasi Profesi di Bidang Kebudayaan	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifkasi Profesi Dibidang Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri (Wirausaha Muda)	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Meningkatnya Peran Aktif Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Dibina dan Aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Pemuda melalui Partisipasi dalam Pelatihan, Kursus, dan Program Sertifikasi	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Training dan Memperoleh Sertifikat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Meningkatnya capaian prestasi atlet daerah pada ajang PORA dari cabang olahraga yang diikuti	Persentase Prestasi Olahraga dari Cabang Olahraga PORA yang Diikuti	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Meningkatnya prestasi pelajar pada ajang POPDA dari cabang olahraga yang diikuti	Persentase Prestasi Olahraga dari Cabang Olahraga POPDA yang Diikuti	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi Atlet Daerah melalui Peningkatan Jumlah Atlet yang Lolos Pelatda Provinsi	Persentase Atlet yang Berasal dari Kabupaten yang Masuk Pelatda Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Meningkatnya Partisipasi Kepramukaan dalam Pembinaan Karakter Pemuda	Persentase Gerakan Kepramukaan yang Aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Masayarakat	Persentase Masyarakat yang Menguat Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Meningkatnya Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Meningkat Perannya dalam	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
		Meningkatnya Pembinaan dan Keteraturan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang Dibinia dan Tertib	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.1.2	**Meningkatnya Kapasitas Kehidupan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Inklusif Disertai Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Terintegrasi**		**Tingkat Kemiskinan**		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		
			Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		
			Total Fertility Rate (TFR/ Angka Kelahitan Total)		
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
		Terjalinnya Kerjasama Produktif dengan Lembaga yang Menyediakan Layanan Peningkatan Kapasitas SDM dan Produktivitas Industri Lokal	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Meningkatnya Penempataan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan dengan Rencana Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Meningkatnya Implementasi Program dan Kegiatan yang Selaras dengan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Daerah	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Menjamin Perlindungan Sosial Bagi Semua Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar untuk Pelayanan Sosial di Luar Panti	Persentase Sarana Prasarana yang Disediakan Sesuai Standar untuk Pelayanan Sosial Di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial yang Dilakukan oleh Pekerja Sosial dan Relawan Sosial Sesuai Standar di Luar Panti	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Di Luar Panti Sesuai Standar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS Lainnya di Luar HIV/AIDS di Luar Panti.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar HIV/Aidsyang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Pelayanan Sosial yang Dilaksanakan oleh PSKS Perorangan Sosial Sesuai Standar	Persentase Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penerima Manfaat Program Sosial	Pesentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Penerima Manfaat Program Sosial	Pesentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Pemutahiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan Setiap Tahun	Jumlah Pemutahiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan Selama Satu Tahun	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai Cerminan Kesetaraan Peran dan Akses Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Tersedianya Data Mikro Keluarga Yang Akurat dan Termutakhir Di Setiap Desa	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Pembinaan dan Keberfungsian Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Menurunnya Proporsi Keluarga Berisiko Stunting	Proporsi Keluarga Berisiko Stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Meningkatknya Kualitas Keluarga Sejahtera melalui iBangga.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Meningkatnya Keterlibatan Remaja dalam Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Menurunkan Angka Kelahiran Total untuk Mencapai Keseimbangan Pertumbuhan Penduduk yang Berkelanjutan	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Menurunkan Angka Kelahiran Remaja untuk Meningkatkan Kesehatan Reproduksi dan Kualitas Hidup Remaja	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Hunian yang Layak dan Sehat	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Hunian yang Layak dan Sehat	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (Tora)	Luas Tanah Potensi TORA untuk Ditindaklanjuti Kegiatan Redistribusi Tanah dan Jumlah Potensi Subjek Penerima Manfaat yang Dapat Ditindaklanjuti dengan Penataan Akses melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun Anggaran	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DINAS PERTANAHAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
Misi 6 : Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Tertinggal					
6.1	**Mewujudkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Produktif, dan Berkeadilan Berlandaskan Keunggulan Kompetitif serta Berdaya Saing sebagai Penggerak Perekonomian**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**		
			Rasio Gini		
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)		
			Indeks Desa		
6.1.1	**Meningkatnya Desa yang Berdaya Saing, Maju, dan Mandiri**		**Persentase Desa yang Mengalami Peningkatan Status**		
		Meningkatnya Jumlah Desa dengan Status Mandiri melalui Penguatan Tata Kelola dan Kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya Penataan Desa Melalui Peningkatan Kualitas Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya Kerjasama Antar Desa melalui Fasilitasi Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Tertibnya Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya BUMDes yang Aktif	Persentase BUMDes Aktif	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat melalui Fasilitasi Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Peningkatan Fasilitasi Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya Aktivitas dan Kinerja PKK dalam Mendukung Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat	Persentase PKK Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Tertibnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KANTOR CAMAT
6.2.1	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berorientasi pada Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Tertinggal**		**Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap PDRB Simeulue**		
			Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi menuju Status Maju		
			Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB ADHB		
			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB Simeulue		
		Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Meningkatnya Produksi Tanaman Holtikultura	Peningkatan Produksi Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
		Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Manjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
		Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh dari Surveylance Penyakit dari 5 PHMS)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebuna	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigrasi dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Meningkatanya Produktivitas Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi Merah Putih	Persentase Koperasi Merah Putih Aktif dan Dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatnya Kewirausahaan Mikro yang Produktif	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kapasitas Usaha Pelaku UMKM	Persentase UMKM yang Dibina (Mendapatkan Pelatihan Manajemen Usaha atau Digital Marketing)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatnya Kinerja dan Pertumbuhan Usaha Koperasi melalui Penguatan Manajemen dan Akses Pembiayaan	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatnya Transformasi Usaha Mikro dari Sektor Informal ke Sektor Formal	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas Wirausaha Baru yang Produktif dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Terkendalinya Laju Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatnya Kualitas Industri Kerajinan dan Pengolahan Skala Rumah Tangga, Kecil, dan Menengah	Jumlah Kelompok Pengrajin dan Unit Usaha Industri Pengolahan Skala Rumah Tangga, Kecil, dan Menengah yang Aktif dan Dibina	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Kabupaten	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
Misi 7 : Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Pariwisata					
7.1	**Meningkatkan Daya Tarik Investasi dan Pengembangan Pariwisata yang Berdaya Saing**		**Nilai Investasi (PMA dan PMDN)**		
7.1.1	**Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi serta Daya Saing Destinasi dan Produk Pariwisata Daerah**		**Persentase Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)**		
			Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisata		

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Kabupaten melalui Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya Pencapaian Target Realisasi Investasi Kabupaten	Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya Realisasi Investasi pada Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Ketersediaan dan Aksesibilitas Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatnya Investasi pada Sektor Akomodasi, Makan, dan Minum	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Misi 8 : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat					
8.1.	**Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat**		**Umur Harapan Hidup**		
8.1.1	**Tercapainya Masyarakat yang Sehat dan Produktif sesuai Siklus Hidup**		**Jumlah Kematian Ibu**		
			Jumlah Kematian Bayi		
			Prevalensi Balita Stunting		
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		
			Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
			Angka Keberhasilan Pengobatan TB		
			Tipe Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simeulue		
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)		

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Menurunnya Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia > 18 Tahun	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Proporsi Tempat Pengelolaan Pangan yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Persentase mpat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (TB)	Cakupan Penemuan Kasus TB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Menurunnya Angka Kematian Ibu Melalui Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Maternal	Jumlah Kematian Ibu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Menurunnya Prevalensi Stunting Melalui Peningkatan Gizi dan Layanan Kesehatan Balita	Prevalensi Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Warga Usia 60 Tahun Ke Atas Sesuai Standar	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persentase Kasus Gizi Buruk pada Bayi 0-59 Bulan yang Mendapat Tata Layanan Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persentase Kasus Gizi Kurang pada Bayi 0-59 Bulan yang Mendapat Tata Layanan Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Meningkatnya Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Meningkatnya Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang Proporsional terhadap Jumlah Penduduk	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Ketersediaan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pemerintah Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Meningkatnya Ketersediaan SDMK di Puskesmas Sesuai Standar yang Ditentukan	Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Kepatuhan Pelaku IRT terhadap Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Ketentuan	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP IRT Sesuai Standar	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Industri Rumah Tangga	Persentase Pangan Industri Rumah Tanggan Aman dan Bermutu	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan Keamanan, Higiene, dan Sanitasi	Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Kepatuhan Apotek dan Toko Obat dalam Memenuhi dan Memelihara Persyaratan Perizinan	Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Tindak Lanjut Pemerintah Daerah terhadap Rekomendasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB Melalui Penggunaan Alat dan Cara Kontrasepsi Modern	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Proportion Of Demand Satisfied By Modern)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan KB Pasca Persalinan untuk Mencegah Kehamilan yang Tidak Direncanakan	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Meningkatnya Jumlah Peserta Aktif Keluarga Berencana (KB) Secara Berkelanjutan	Cakupan Peserta KB Aktif	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Meningkatnya Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Oleh Peserta KB	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi pada Perempuan Menikah Usia 15–49 Tahun	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Alat dan Obat Kontrasepsi Secara Merata	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Meningkatnya Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi Modern pada Perempuan Usia Subur Yang Menikah	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Rate (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Menurunnya Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi pada Pasangan Usia Subur	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB
		Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga Melalui Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas	Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KB

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
Misi 9 : Penguatan Reformasi Birokrasi					
9.1	**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Melayani**	**Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Melayani**	**Nilai LPPD**		
			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		
			Indeks Pelayanan Publik		
9.1.1	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, Transparan, dan Responsif**		**Nilai SAKIP Kabupaten**		
			Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik		
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
			Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP)		
			Indeks Inovasi Daerah (IID)		
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan		
			Indeks BerAhklak		
			Indeks Sistem Merit		
			Tingkat Kepuasan Anggota DPRK Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRK		

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Indikator Kinerja Terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Di Implementasikan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Efektivitas Sistem Kerja dalam Mendukung Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Pemanfaatan Kerja Sama Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Capaian Pelayanan Dasar Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Hukum yang Adil, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Hukum	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Implementasi Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik tentang Kegiatan dan Kebijakan Pimpinan Daerah	Persentase Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Dipublikasikan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kualitas dan Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap Standar Pelayanan	Persentase Unit Pelayanan Publik yang Memenuhi Standar Pelayanan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang DiImplementasikan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Terkendalinya Laju Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Peran BUMD dalam Pendapatan Daerah dan Perekonomian Masyarakat Simuelue	Tingkat Kontribusi BUMD Terhadap PAD	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program Strategis Daerah	Tingkat Realisasi Program Strategis Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Transparan, Akuntabel, dan Bebas dari Praktik Korupsi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
		Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Layanan Akses Internet bagi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominsa	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kecepatan dan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Sistem Lapor	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (Lapor) yang Sudah Diselesaikan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
		Meningkatnya Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
		Meningkatnya Konektivitas Perangkat Daerah melalui Penguatan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
		Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
		Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berbasis Data	Persentase SKPK yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Kesiapan dan Ketahanan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sesuai Standar Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN
		Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Digitalisasi Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ASRSIP
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Industri Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha	Persentase Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM
		Meningkatnya Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Prioritas Nasional melalui Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Terhadap Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah	Persentase Keselarasan RPJMK dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya Konsistensi dan Keterpaduan Antara Renstra SKPK dan RPJMK	Persentase Keselarasan RPJMK dengan Renstra SKPK	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Konsistensi Renja SKPK dengan RKPD	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja SKPK	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah dalam Mendukung Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Meningkatnya Tertib Pemanfaatan Tanah untuk Fasilitas Umum	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PERTANAHAN
		Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penganggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya Kepatuhan dan Akurasi Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Standar	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Ketepatan Penyaluran Belanja Transfer dan Bantuan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Transfer/Bantuan Keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya Efisiensi dan Ketepatan Pengalokasian Belanja Pegawai melalui TKD	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah melalui Penurunan SILPA	Persentase Penurunan SILPA	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya Alokasi Belanja Infrastruktur untuk Mendukung Pelayanan Publik Daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Aset Tetap Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Meningkatnya Kejelasan Hak-Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	DINAS PERTANAHAN

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Menurunnya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Tindak Lanjut Rekomondasi BPK Tahun Anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Opini Audit yang Lebih Baik	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Mendukung Pengawasan yang Efektif dan Profesional	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
		Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah melalui Penguatan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
		Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif	Manajemen Risiko Indeks	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
		Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Survei Penilaian Integritas (SPI)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan dan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Qanun APBK Tahun N	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRK
		Meningkatnya Ketepatan Rancngan Qanun pada Tahun N	Persentase Penetapan Rancangan Qanun Tahun N	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRK
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRK
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		Meningkatnya PNS dengan Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	Rasio PNS dengan Pendidikan Tinggi (Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Terciptanya pejabat ASN yang kompeten, profesional, dan siap memimpin organisasi pemerintahan secara efektif.	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		Meningkatnya Kompetensi Dasar dan Fungsional ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
		Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu dan Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
9.2.1	**Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Publik**		**Survey Kepuasan Masyarakat**		
		Meningkatkan Perekaman Data KTP-El yang Mencapai Seluruh Penduduk yang Memenuhi Syarat	Persentase Perekaman KTP-El	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL
		Meningkatkan Kepemilikan Identitas Digital bagi Penduduk yang Telah Terdaftar di Sistem	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatkan Jumlah Anak yang Terdaftar dan Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL
		Meningkatkan Pelaporan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian yang Sesuai dengan Pelaporan	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL
		Meningkatkan Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran yang Diterbitkan berdasarkan Pelaporan yang Diterima	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL
		Meningkatkan Pelaporan Perkawinan dan Penerbitan Akta Perkawinan yang Sesuai dengan Laporan yang Diterima	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL
		Meningkatkan Pelaporan Perceraian dan Penerbitan Akta Perceraian yang Sesuai dengan Pelaporan yang Diterima	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL

'VISI : MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"					
MISI/ TUJUAN/ SASARAN		**OUTCOME (PROGRAM)**	**INDIKATOR KINERJA**	**PROGRAM PRIORITAS**	**SKPK PELAKSANA**
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		Meningkatkan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Izin Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatkan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten Sesuai Ketentuan	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah Kabupaten	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KANTOR CAMAT

3.2.7 Prioritas Pembangunan Kabupaten Simeulue

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah "Simeulue yang Bermartabat dan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru Tahun 2030", Pemerintah Kabupaten Simeulue menetapkan sembilan Prioritas Pembangunan Kabupaten Simeulue sebagai instrumen utama pelaksanaan pembangunan lima tahunan. Program-program strategis ini dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik yang mengintegrasikan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan ke dalam kerangka program tematik yang konkret dan terukur.

Setiap prioritas pembangunan secara langsung mendukung misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta diperkuat oleh program-program perangkat daerah yang dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan demikian, keberadaan program strategis ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul penggerak utama dari keseluruhan sistem perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitannya terhadap misi pembangunan dijelaskan secara eksplisit agar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat terukur secara konsisten melalui indikator kinerja utama.

Adapun program Program Strategis Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025–2029 yaitu sebagai berikut:

1. Simeulue Islami Berseri

Otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh melalui mekanisme desentralisasi asimetris telah membuka ruang bagi pengembangan model pembangunan yang khas dan berbeda dari daerah lain di Indonesia. Keistimewaan ini memungkinkan Aceh, termasuk Kabupaten Simeulue, untuk merancang pendekatan demokratisasi yang berakar pada nilai-nilai lokal, dengan menekankan warisan keislaman, adat istiadat, dan kebudayaan yang kuat sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Simeulue berkomitmen untuk mengimplementasikan amanat otonomi khusus secara menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui pengaturan khusus yang mencakup penyelenggaraan kehidupan beragama, pelestarian adat, penguatan sistem pendidikan berbasis nilai-nilai Islam, serta pelibatan aktif ulama dalam proses perumusan kebijakan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Simeulue berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Islami, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan.

Upaya ini menjadi bagian integral dari Misi 1, yang menempatkan nilai-nilai syariat Islam sebagai landasan pembangunan daerah, sekaligus menjadikan kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan sebagai manifestasi dari iman dan budaya lokal. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, tokoh

adat, dan masyarakat, Simeulue terus bergerak menuju tatanan kehidupan yang harmonis, bermartabat, dan berdaya saing dalam bingkai keistimewaan Aceh.

Penguatan Simeulue Islami Berseri dilakukan dengan menitikberatkan pada penguatan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Simeulue. Sasaran pembangunan terkait mencakup meningkatnya pendidikan berbasis nilai Islami, partisipasi dakwah digital, dan pelestarian adat istiadat. Program ini diterjemahkan kegiatan sektoral seperti peningkatan kapasitas lembaga dayah, rumah tahfiz, dan revitalisasi lembaga adat gampong.

2. Simeulue Terhubung 24/7

Sebagai wujud nyata pelaksanaan Misi 2 dalam RPJMD Kabupaten Simeulue, "Simeulue Terhubung 24/7" diarahkan untuk memperkuat infrastuktur dasar dan memperluas konektivitas antar wilayah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Beberapa wilayah di Kabupaten Simeulue belum sepenuhnya terhubung dengan wilayah lainnya, sehingga "Simeulue Terhubung 24/7" menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrim.

Implementasi yang akan dilakukan meliputi :

a. Peningkatan konektivitas antarwilayah, baik darat, laut, maupun udara, guna memperlancar mobilitas barang dan orang serta memperkuat integrasi antarwilayah dalam satu kesatuan sistem logistik daerah.
b. Perluasan cakupan layanan dasar, khususnya akses terhadap listrik dan air bersih yang layak.

Implementasi program ini akan didukung oleh pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis, antara lain :

a. Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan untuk membuka keterisolasian wilayah dan memperkuat konektivitas antar kecamatan dan desa;
b. Pembangunan pelabuhan Sibigo dan dermaga penyeberangan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Simeulue;
c. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk menjamin akses air bersih yang merata dan berkelanjutan.
d. Pembangunan dan perluasan Base Transceiver Station (BTS) guna menjamin akses telekomunikasi dan internet yang merata hingga ke wilayah terpencil.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, program ini diharapkan mampu mendorong Simeulue menjadi wilayah yang terhubung secara fisik dan digital selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu—untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik yang efisien, dan peningkatan daya saing daerah.

3. Simeulue Zero Victim

Sebagai wilayah kepulauan yang berada di zona seismik aktif dan memiliki sejarah panjang terhadap kejadian gempa bumi dan tsunami, Kabupaten Simeulue menghadapi tantangan serius dalam membangun ketahanan daerah terhadap bencana. Simeulue *Zero Victim* merupakan respons strategis terhadap kondisi geografis dan kerentanan terhadap bencana, sekaligus menjadi implementasi nyata dari misi ketiga RPJMD yang berfokus pada peningkatan kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan perlindungan lingkungan.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Simeulue sebagai daerah yang memiliki kapasitas untuk mengantisipasi, menyerap, dan memulihkan diri dari dampak bencana secara cepat dan efektif. Pendekatan resiliensi yang diusung mencakup dimensi fisik, sosial, kelembagaan, dan lingkungan, dengan fokus strategis sebagai berikut:

- Penguatan sistem peringatan dini dan respons cepat, yang terintegrasi dengan jaringan komunikasi lokal dan nasional, serta berbasis teknologi dan kearifan lokal;
- Peningkatan kapasitas tanggap darurat di tingkat desa, melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana, pelatihan masyarakat , simulasi evakuasi secara berkala, dan penyediaan sarana dan prasarana darurat;
- Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan rawan bencana, dengan pendekatan berbasis ekosistem dan tata ruang adaptif.

4. The Blue Economy Hub – Economy of Sumatera

Sebagai wilayah kepulauan yang kaya akan potensi sumber daya laut dan pesisir, Kabupaten Simeulue memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi ekonomi biru di kawasan barat Indonesia, Program ini merupakan pengejawantahan dari Misi Keempat RPJMD Simeulue, yang berfokus pada penguatan sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis sumber daya lokal.

Program ini selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, khususnya dalam pilar transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi biru (*blue economy*) yang menekankan efisiensi sumber daya laut, keberlanjutan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat pesisir. Simeulue diposisikan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi biru di kawasan barat Sumatera, dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.

Fokus strategis program ini meliputi :

- Peningkatan hasil tangkapan ikan bernilai tambah, melalui modernisasi alat tangkap, penguatan rantai pasok, dan pengembangan sistem logistik perikanan yang efisien;
- Diversifikasi produk laut, termasuk pengolahan hasil perikanan, budidaya laut berkelanjutan, dan pengembangan industri kreatif berbasis sumber daya pesisir;
- Pengembangan destinasi wisata pesisir berbasis komunitas, dengan pendekatan ekowisata, pelibatan masyarakat lokal, dan pelestarian budaya maritim.

Implementasi program ini diperkuat melalui:

a. Peningkatan kapasitas nelayan dan pelaku usaha pesisir, melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pendampingan teknologi;
b. Revitalisasi pelabuhan perikanan dan infrastruktur pendukung, untuk memperkuat fungsi produksi, distribusi, dan ekspor hasil laut;
c. Promosi wisata bahari dan *branding* Simeulue sebagai destinasi ekonomi biru, melalui kampanye digital, festival maritim, dan kemitraan dengan sektor swasta.

5. Akademi Maritim Simeulue dan Reformasi SDM Unggul

Sebagai wilayah kepulauan yang kaya akan potensi kelautan dan pariwisata, Kabupaten Simeulue menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Program “Akademi Maritim Simeulue dan Reformasi SDM Unggul” merupakan implementasi dari *Misi Kelima* RPJMD, yang berfokus pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan SDM sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Sebagai wilayah kepulauan yang kaya akan potensi kelautan dan pariwisata, Kabupaten Simeulue menghadapi tantangan sekaligus peluang besar dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Program “Akademi Maritim Simeulue dan Reformasi SDM Unggul” merupakan implementasi dari *Misi Kelima* RPJMD, yang berfokus pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan SDM sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Fokus strategis program ini meliputi:

- **Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan relevan**, melalui skema beasiswa vokasi, penguatan pendidikan menengah kejuruan, dan pembukaan jalur pendidikan berbasis potensi lokal.
- **Pengembangan Akademi Maritim Simeulue**, sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kelautan yang berorientasi pada kebutuhan industri perikanan, pelayaran, dan pariwisata bahari. Akademi ini diharapkan menjadi inkubator SDM unggul yang mampu mendukung transformasi ekonomi biru Simeulue.
- **Reformasi layanan dasar berbasis digital**, termasuk digitalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan sistem informasi keluarga, serta pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas layanan publik.

Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis potensi lokal, program ini diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Simeulue secara signifikan, mendorong terciptanya ekosistem pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan daerah, dan memperkuat daya saing Simeulue sebagai wilayah kepulauan yang memiliki SDM unggul, sehat, dan berkarakter.

6. Gerakan 100 Desa Maju

Sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan desa-desa pesisir dengan aksesibilitas terbatas, Kabupaten Simeulue menghadapi tantangan nyata dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Program "Gerakan 100 Desa Maju" merupakan bentuk konkret pelaksanaan *Misi Keenam* RPJMD Simeulue, yang berfokus pada percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan berbasis desa.

Program ini sejalan dengan arah kebijakan *RPJPN 2025–2045*, khususnya dalam agenda transformasi wilayah dan penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, ketahanan sosial, dan inovasi pelayanan publik. Pada saat yang sama, program ini juga mendukung *RPJMA Aceh*, yang menekankan pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan status desa, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas sebagai strategi utama pembangunan daerah provinsi.

Fokus strategis program ini meliputi:

- Peningkatan status desa, dari kategori tertinggal menuju berkembang dan mandiri, melalui intervensi terukur di bidang infrastruktur, layanan dasar, dan kapasitas kelembagaan.
- Penguatan UMKM desa dan ekonomi lokal, melalui pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pasar, dan pengembangan produk unggulan berbasis sumber daya desa.

- Digitalisasi layanan desa, termasuk sistem informasi kependudukan, layanan administrasi berbasis aplikasi, dan integrasi data desa ke dalam sistem perencanaan daerah.

Implementasi program diperkuat dengan pendekatan lintas sektor, antara lain:

a. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur desa, seperti jalan lingkungan, sanitasi, listrik, dan fasilitas publik yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
b. Pelatihan dan pendampingan ekonomi lokal, dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan mitra pembangunan untuk meningkatkan kapasitas SDM desa.
c. Penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis data, melalui pemanfaatan teknologi digital, pelatihan aparatur desa, dan integrasi sistem pelaporan serta perencanaan berbasis data.

Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis potensi lokal, program ini diharapkan mampu mendorong transformasi desa sebagai pusat inovasi dan pelayanan publik yang responsif, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dan memperkuat ketahanan sosial, dan mempercepat pencapaian target pembangunan wilayah tertinggal dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.

7. Invest in Paradise

Kabupaten Simeulue memiliki potensi luar biasa sebagai destinasi investasi berbasis pariwisata bahari, kelautan, dan ekonomi kreatif. Dengan kekayaan alam yang masih alami, budaya lokal yang unik, dan posisi strategis di jalur barat Sumatera, Simeulue siap menjadi magnet investasi baru di wilayah kepulauan Indonesia. Program “Invest in Paradise” merupakan tulang punggung pelaksanaan *Misi Ketujuh* RPJMD Simeulue, yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan.

Program ini dirancang untuk memperkuat daya tarik Simeulue sebagai kawasan investasi strategis, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal. Secara nasional, program ini sejalan dengan *RPJPN 2025–2045*, yang menekankan penciptaan ekosistem investasi yang kondusif, simplifikasi regulasi, dan pengembangan kawasan ekonomi unggulan. Di tingkat provinsi, *RPJMA Aceh 2025–2029* juga menempatkan Simeulue sebagai bagian dari koridor pariwisata dan investasi pesisir yang perlu didorong melalui insentif usaha dan promosi potensi daerah.

Fokus strategis program ini meliputi :

- Peningkatan investasi swasta, baik dari investor nasional maupun internasional, melalui penyediaan informasi peluang usaha, kemudahan perizinan, dan jaminan kepastian hukum;
- Insentif usaha lokal dan UMKM, termasuk fasilitasi pembiayaan, pelatihan bisnis, dan kemitraan strategis antara pelaku usaha lokal dan investor eksternal;
- Promosi potensi unggulan Simeulue, seperti wisata selancar kelas dunia, ekowisata bahari, kuliner khas, dan produk kreatif berbasis budaya lokal.

8. Simeulue Sehat dan Keluarga Tangguh

Sebagai wilayah kepulauan dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan dasar, Kabupaten Simeulue menempatkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai prioritas strategis pembangunan jangka menengah. Program "Simeulue Sehat dan Keluarga Tangguh" merupakan implementasi dari *Misi Kedelapan* RPJMD Simeulue, yang berfokus pada penguatan sistem kesehatan primer dan rujukan, penurunan angka stunting, dan penguatan ketahanan keluarga sebagai unit dasar pembangunan manusia.

Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan lokal sekaligus mendukung arah kebijakan nasional dalam *RPJPN 2025–2045*, yang menekankan transformasi layanan kesehatan menuju sistem yang promotif, preventif, dan berbasis komunitas. Di tingkat provinsi, *RPJMA Aceh 2025–2029* juga menempatkan peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu-anak, penguatan Posyandu, dan penurunan stunting sebagai prioritas utama pembangunan sosial.

Fokus strategis program ini meliputi:

- Penurunan angka stunting dan peningkatan gizi keluarga, melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, edukasi keluarga, serta penguatan peran kader kesehatan di tingkat desa;
- Peningkatan cakupan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan memperluas jangkauan layanan antenatal, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak;
- Perluasan akses layanan primer di wilayah terpencil, melalui pembangunan dan operasionalisasi Puskesmas keliling, serta penguatan jejaring rujukan antarwilayah;
- Pembangunan rumah sakit pratama tipe D untuk mengurangi jarak tempuh rujukan dari puskesmas di wilayah Kecamatan Alafan, Simeulue Barat dan Salang.

Implementasi program ini meliputi :

- Revitalisasi Posyandu dan integrasi layanan kesehatan keluarga, dengan pendekatan berbasis komunitas, digitalisasi pencatatan, dan pelibatan aktif tokoh masyarakat serta lembaga adat;
- Penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader desa, melalui pelatihan berkelanjutan, insentif berbasis kinerja, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai;
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan kesehatan, termasuk sistem informasi keluarga sehat, *telemedicine* untuk wilayah terpencil, dan dashboard pemantauan stunting berbasis data real-time.

Program ini secara langsung mendukung Misi 8, yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sasaran utama mencakup menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan layanan kesehatan ibu-anak, serta perluasan akses layanan primer di wilayah terpencil. Pelaksanaannya mencakup pembangunan Puskesmas keliling, revitalisasi Posyandu, dan integrasi layanan kesehatan keluarga berbasis komunitas.

9. Simeulue Smart Governance

Dalam era transformasi digital dan tuntutan pelayanan publik yang semakin adaptif, Kabupaten Simeulue menempatkan reformasi birokrasi sebagai fondasi utama pembangunan jangka menengah. Program "*Simeulue Smart Governance*" merupakan implementasi dari Misi Kesembilan RPJMD Simeulue, yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Program ini sejalan dengan arah kebijakan RPJPN 2025–2045, yang menekankan modernisasi birokrasi, integrasi sistem pelayanan publik digital, dan penguatan perencanaan berbasis data sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Di tingkat provinsi, RPJMA Aceh 2025–2029 juga menegaskan pentingnya reformasi birokrasi daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja ASN, dan digitalisasi layanan publik sebagai strategi utama peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

Fokus strategis program ini meliputi :

- Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, melalui penerapan e-kinerja ASN, pelaporan berbasis indikator, dan penguatan mekanisme evaluasi kinerja perangkat daerah;
- Integrasi layanan publik digital, termasuk pengembangan portal terpadu, digitalisasi dan kemudahan proses perizinan, dan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat respons pelayanan kepada masyarakat;

- Penguatan sistem perencanaan berbasis data, melalui integrasi dan pemanfaatan data statistik sektoral, dan sinergitas perencanaan pembangunan dengan Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat.

Implementasi program diperkuat melalui :

a. Penerapan e-kinerja ASN dan sistem *reward* berbasis capaian, untuk mendorong budaya kerja yang produktif, transparan, dan berorientasi hasil;
b. Pengembangan *dashboard* perencanaan dan penganggaran, yang terintegrasi dengan SIPD dan sistem monitoring kinerja daerah, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan program pembangunan;
c. Pelibatan publik dalam pemantauan kinerja pemerintah, melalui kanal partisipatif digital, forum konsultasi publik, dan transparansi data pembangunan daerah.

Seluruh program strategis di atas dibangun dengan prinsip integratif, sehingga meskipun dikaitkan secara langsung dengan masing-masing misi, implementasinya tetap bersifat lintas sektor dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Keberhasilan implementasi program-program strategis ini akan sangat menentukan tercapainya indikator makro pembangunan Simeulue, serta mengakselerasi transformasi daerah menuju pusat pertumbuhan ekonomi biru di kawasan barat Indonesia.

3.2.8 Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025–2029 terhadap Kabupaten Simeulue

Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025, Kabupaten Simeulue ditetapkan sebagai Kawasan Afirmasi (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan). Penetapan ini diberikan karena Simeulue memiliki karakteristik sebagai wilayah kepulauan terluar yang menghadapi tantangan geografis berat, keterisolasian antarwilayah, risiko bencana tinggi termasuk gempa bumi dan tsunami, keterbatasan layanan dasar, serta ketimpangan akses infrastruktur jika dibandingkan dengan wilayah daratan utama. Penetapan Simeulue sebagai Kawasan Afirmasi menandai komitmen kuat Pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terluar. Dengan status ini, Simeulue menjadi penerima Intervensi Afirmasi Nasional, yaitu intervensi khusus pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kewilayahan agar dapat mengejar kesenjangan pembangunan nasional. Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025–2029 terhadap Simeulue mencakup berbagai aspek strategis berikut ini:

1. **Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan.**

Intervensi ini diarahkan untuk menutup kesenjangan layanan dasar di Kabupaten Simeulue, terutama ketersediaan air minum layak, sanitasi sehat, energi listrik yang stabil, serta kebutuhan perumahan layak huni yang masih sangat terbatas. Penyediaan layanan dasar ini tidak hanya bertujuan memenuhi hak dasar masyarakat tetapi juga menjadi prasyarat terbentuknya ketahanan air, energi, dan pangan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan terpencil.

2. **Peningkatan ketahanan bencana.**

Simeulue merupakan salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana tertinggi di Indonesia karena berada pada jalur megathrust dan rawan tsunami. Intervensi ini diarahkan untuk memperkuat sistem mitigasi bencana, memperbaiki infrastruktur tahan gempa, meningkatkan kemampuan evakuasi, dan membangun kapasitas masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana alam yang mengancam.

3. **Preservasi jalan Lingkar Simeulue.**

Jalan lingkar merupakan infrastruktur strategis yang menghubungkan seluruh kecamatan dan desa di Pulau Simeulue. Preservasi jalan ini sangat penting untuk memastikan mobilitas barang dan orang, mempercepat distribusi logistik, memudahkan akses layanan dasar, serta mendukung ketahanan pangan dan energi.

4. **Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah.**

Intervensi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia lokal melalui penyediaan akses pendidikan tinggi berbasis potensi daerah. Kehadiran PSDKU memungkinkan generasi muda di Simeulue mengakses program studi relevan tanpa harus menempuh pendidikan keluar daerah. Program studi diarahkan pada sektor unggulan, seperti maritim, perikanan, teknologi hasil laut, agribisnis, dan bidang lain yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Pengembangan PSDKU juga bertujuan menciptakan tenaga kerja kompetitif, meningkatkan peluang kerja lokal, mengurangi migrasi tenaga kerja keluar daerah, serta mendukung industrialisasi daerah.

5. **Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perikanan dan perkebunan (kelapa dan pala).**

Intervensi ini difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan bernilai tinggi. Untuk sektor perikanan, intervensi diarahkan pada peningkatan produktivitas penangkapan dan budidaya, industrialisasi hasil laut,

pengolahan modern, penyimpanan dingin, dan peningkatan kualitas pemasaran. Untuk sektor perkebunan, pengembangan kelapa dan pala diarahkan pada peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, penguatan hilirisasi seperti VCO, kopra putih, minyak kelapa, dan produk pala bernilai ekspor seperti oleoresin dan bubuk pala. Pemberdayaan ini juga mencakup pembinaan UMKM agroindustri, peningkatan sertifikasi mutu, serta digitalisasi pemasaran.

6. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Sinabang (PHTC).

Intervensi ini bertujuan menyediakan akses hunian layak, sehat, dan terjangkau bagi kelompok produktif dan rentan, termasuk pekerja, masyarakat berpenghasilan rendah, dan generasi muda. Pembangunan rumah murah dilaksanakan di pusat pertumbuhan kawasan perkotaan Sinabang (PHTC). Program ini meliputi penyediaan unit rumah lengkap dengan sanitasi sehat, sistem drainase lingkungan, ruang terbuka hijau, dan akses layanan dasar. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kepadatan permukiman tidak layak, dan membentuk permukiman modern yang adaptif terhadap risiko bencana.

7. Pengembangan SPAM Perkotaan Sinabang.

Intervensi ini memastikan tersedianya akses air minum berkualitas melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang mencakup ketersediaan air baku, instalasi pengolahan air minum, jaringan perpipaan, reservoir, serta distribusi ke rumah tangga. Pengembangan SPAM menjadi sangat penting karena keterbatasan sumber air bersih di Pulau Simeulue dan meningkatnya kebutuhan air minum bagi masyarakat perkotaan.

8. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut.

Intervensi ini diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan permukiman transmigrasi yang terintegrasi dengan pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Kawasan Transmigrasi Selaut diharapkan menjadi pusat redistribusi penduduk, memperkuat ketahanan pangan lokal, meningkatkan kesempatan kerja, dan membuka jaringan konektivitas baru mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kab. Simeulue (PHTC).

Intervensi ini menargetkan penguatan layanan kesehatan rujukan berjenjang melalui peningkatan kapasitas RSUD Simeulue sebagai pusat pelayanan kesehatan kepulauan. Fokus utamanya adalah layanan kesehatan ibu-anak, penanganan penyakit katastropik seperti kanker, jantung, dan stroke, peningkatan alat kesehatan

standar nasional, peningkatan kapasitas dokter spesialis, serta perbaikan sistem rujukan dari puskesmas ke RSUD. Intervensi ini penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta memastikan akses layanan kesehatan kritis tersedia di tingkat kabupaten.

10. **Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital.**

Transformasi digital diarahkan untuk memperluas akses jaringan telekomunikasi di desa-desa yang masih blank spot, meningkatkan kemampuan masyarakat menggunakan teknologi digital, memperkuat layanan pemerintahan digital, meningkatkan akses informasi masyarakat kepulauan, serta mendukung pengembangan UMKM digital. Perluasan layanan penyiaran digital juga diarahkan untuk mendukung mitigasi bencana melalui peningkatan akses terhadap informasi dan siaran darurat.

11. **Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan.**

Intervensi ini bertujuan memastikan bantuan sosial menyasar kelompok miskin dan rentan berdasarkan pendekatan data terpadu dan analisis kerentanan. Bansos adaptif diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial yang responsif terhadap guncangan sosial-ekonomi, bencana, maupun kondisi darurat. Program ini memperkuat ketahanan sosial masyarakat Simeulue dan mendukung penurunan kemiskinan ekstrem.

3.2.9 Arah Pembangunan Kewilayahan Aceh RPJMA Tahun 2025–2029 terhadap Kabupaten Simeulue

Dalam RPJMA Tahun 2025–2029, Pemerintah Aceh menyusun arah pembangunan kewilayahan sebagai tindak lanjut dari kerangka kewilayahan RPJMN. Pengembangan kewilayahan Aceh diarahkan untuk mendukung keterhubungan antarkawasan, pemerataan layanan dasar, peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan ketahanan pangan–air–energi, dan penguatan layanan publik berbasis kepulauan. Pembangunan kewilayahan Aceh difokuskan pada lima kategori utama yaitu: Kawasan Pertumbuhan, Kawasan Komoditas Unggulan, Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi, Kawasan Afirmasi, dan Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

Kabupaten Simeulue ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Afirmasi, sejajar dengan Pulo Aceh dan Pulau Banyak. Penetapan ini didasarkan pada karakter kepulauan Simeulue yang memerlukan intervensi khusus untuk mempercepat pembangunan dan mengejar ketertinggalan layanan dasar. Adapun arah pembangunan kewilayahan Aceh terhadap Kabupaten Simeulue yaitu mencakup:

1. Pemenuhan infrastruktur layanan dasar di Kabupaten Simeulue yang meliputi pendidikan, kesehatan (peningkatan status rumah sakit daerah), perpanjangan runway bandara Lasikin, lanjutan pembangunan irigasi Sigulai, pembangunan SPAM terintegrasi, konektivitas, perumahan dan permukiman, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan).
2. Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi informasi komunikasi dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital.

Selain masuk dalam Kawasan Afirmasi, Kabupaten Simeulue juga mendapatkan perhatian khusus dalam Kegiatan Prioritas Utama yang dirumuskan dalam RPJMA Aceh Tahun 2025–2029. Kegiatan Prioritas Utama ini merupakan program strategis provinsi yang diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan, mempercepat pemerataan pembangunan, dan mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Kabupaten Simeulue termasuk sebagai salah satu wilayah yang mendapatkan intervensi prioritas pada tiga kegiatan strategis berikut:

1. **Pengembangan Hilirisasi Kelapa — Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam Kabupaten Simeulue**

Komoditas kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Simeulue yang telah lama menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir dan pedesaan. Namun, sebagian besar tanaman kelapa di Simeulue saat ini sudah berumur tua, berproduksi rendah, atau mengalami penurunan kualitas buah. Kondisi ini menghambat peningkatan pendapatan petani dan mengurangi potensi Simeulue untuk memasuki pasar ekspor produk olahan kelapa yang bernilai tinggi.

Kegiatan Prioritas Utama pada sektor ini diarahkan untuk melakukan peremajaan tanaman kelapa dalam (replanting) secara bertahap, sehingga produktivitas kelapa dapat kembali optimal.

2. **Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) / Lumbung Pangan Lainnya — Pengadaan/Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)**

Sebagai wilayah kepulauan, Simeulue memiliki tantangan serius terkait ketahanan pangan. Distribusi bahan pangan sangat dipengaruhi kondisi cuaca, gelombang laut, serta keterbatasan transportasi logistik. Untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang tahun dan mengurangi ketergantungan pada suplai dari luar daerah, RPJMA menempatkan Simeulue sebagai bagian dari Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP).

Penguatan KSPP di Simeulue juga mencakup pengembangan sentra produksi pangan berbasis potensi wilayah, penyediaan sarana prasarana pertanian, penguatan irigasi seperti lanjutan pembangunan Irigasi Sigulai, serta penyediaan fasilitas

penyimpanan pangan. Dengan langkah ini, Simeulue diharapkan mampu mencapai ketahanan pangan yang lebih kuat dan mandiri.

3. Pengembangan Pangan Hewani — Pengembangan Kawasan Peternakan Kerbau Terpadu (di Gayo Lues dan Simeulue)

Kerbau merupakan salah satu potensi peternakan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Aceh. Kabupaten Simeulue, meskipun wilayah kepulauan, memiliki karakter ekologi tertentu yang cocok untuk pengembangan peternakan kerbau secara terpadu, terutama di wilayah dataran lembah dan padang rumput alami. Oleh karena itu, RPJMA menetapkan Simeulue sebagai salah satu lokasi Kawasan Peternakan Kerbau Terpadu bersama Kabupaten Gayo Lues.

Pengembangan kawasan peternakan kerbau terpadu ini diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan hewani, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, dan memperkuat ketahanan pangan berbasis protein hewani di Kabupaten Simeulue.

3.2.10 Dukungan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 terhadap Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN dan RPJMA Tahun 2025–2029

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 dirancang sebagai dokumen strategis yang menjabarkan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Simeulue terhadap berbagai intervensi kewilayahan yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJMA Aceh 2025–2029. Kedua dokumen pembangunan tersebut menempatkan Kabupaten Simeulue sebagai Kawasan Afirmasi, yaitu wilayah yang memiliki karakteristik terdepan, terluar, tertinggal, keterisolasian tinggi, dan membutuhkan percepatan pemerataan pembangunan untuk menjamin kesetaraan layanan dasar, peningkatan konektivitas, penguatan ketahanan bencana, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

Dalam RPJMN 2025–2029, Simeulue mendapatkan intervensi afirmatif yang sangat komprehensif, mulai dari penyediaan infrastruktur layanan dasar, peningkatan ketahanan bencana, pengembangan pendidikan tinggi melalui PSDKU, penguatan layanan kesehatan rujukan, percepatan transformasi digital, hingga pengembangan ekonomi high-value seperti perikanan, kelapa, dan pala. Sementara itu, dalam RPJMA Aceh 2025–2029, Simeulue mendapatkan prioritas melalui pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, konektivitas, perumahan, irigasi, dan telekomunikasi, serta melalui sejumlah Kegiatan Prioritas Utama Aceh, seperti peremajaan kelapa dalam, penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP), dan pengembangan peternakan kerbau terpadu.

Dukungan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 diarahkan untuk memastikan semua intervensi nasional dan provinsi tersebut dapat terimplementasi secara terukur, sistematis, dan efektif dalam konteks kewilayahan Simeulue. RPJMK berfungsi sebagai jembatan kebijakan yang menerjemahkan arahan pembangunan RPJMN dan RPJMA ke dalam program daerah yang operasional. Dukungan ini mencakup pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kapasitas SDM, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta transformasi sosial dan digital.

Adapun uraian lengkap mengenai arah pembangunan kewilayahan RPJMN dan RPJMA serta dukungan RPJMK Simeulue terhadap keduanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11. Dukungan RPJMK Simeulue terhadap Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN 2025–2029 dan RPJMA Aceh 2025–2029

No.	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025–2029	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMA Tahun 2025–2029	Dukungan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029
1	*2*	*3*	*4*
1	Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan.	Pemenuhan infrastruktur layanan dasar di Kabupaten Simeulue yang meliputi pendidikan, kesehatan, perpanjangan runway Bandara Lasikin, lanjutan pembangunan irigasi Sigulai, pembangunan SPAM terintegrasi, konektivitas, perumahan dan permukiman, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan antar kecamatan; penyediaan air bersih; pengembangan energi terbarukan; pembangunan rumah layak huni; penyediaan sanitasi sehat; dan penguatan ketahanan air–energi–pangan di wilayah kepulauan dan desa terpencil.
2	Peningkatan ketahanan bencana.	Simeulue sebagai wilayah rawan tsunami dan gempa menjadi prioritas peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan sistem peringatan dini.	Rehabilitasi kawasan pesisir, penguatan sistem peringatan dini tsunami, pembentukan desa tangguh bencana, serta peningkatan kapasitas 3masyarakat dalam mitigasi b4encana.
3	Preservasi jalan Lingkar Simeulue.	Penguatan konektivitas wilayah melalui jalan, jembatan, pelabuhan, dan akses transportasi kepulauan.	Pr5]eservasi dan peningkatan kualitas Jalan Lingkar Simeulue sebagai tulang punggung distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan akses layanan dasar.

No.	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025–2029	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMA Tahun 2025–2029	Dukungan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029
1	*2*	*3*	*4*
4	Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah.	Pengembangan pendidikan vokasi kelautan dan ekonomi biru.	Pembentukan dan pengembangan PSDKU dengan program studi perikanan, maritim, dan agribisnis untuk memperkuat ketersediaan SDM unggul lokal.
5	Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perikanan dan perkebunan (kelapa dan pala).	Kegiatan Prioritas: Pengembangan Hilirisasi Kelapa — Peremajaan tanaman kelapa dalam Simeulue.	Penguatan sektor perikanan, pengolahan hasil laut, peremajaan kelapa dalam, pengembangan produk turunan kelapa dan pala, UMKM agroindustri, dan hilirisasi ekonomi berbasis komoditas unggulan.
6	Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Sinabang (PHTC).	Pengembangan perumahan layak huni dan permukiman berbasis sanitasi dan lingkungan sehat.	Pembangunan rumah murah bersanitasi sehat di kawasan Sinabang untuk pekerja produktif, masyarakat berpenghasilan rendah, dan generasi muda.
7	Pengembangan SPAM Perkotaan Sinabang.	Pembangunan SPAM terintegrasi sebagai prioritas layanan dasar Aceh.	Pengembangan dan perluasan SPAM Perkotaan Sinabang untuk meningkatkan akses air minum berkualitas bagi masyarakat perkotaan.

No.	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025–2029	Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMA Tahun 2025–2029	Dukungan RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029
1	*2*	*3*	*4*
8	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut.	Pengembangan pusat pertumbuhan baru melalui transmigrasi kepulauan.	Pengembangan kawasan transmigrasi Selaut sebagai pusat pertanian, permukiman produktif, dan agropolitan baru.
9	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Kab. Simeulue (PHTC).	Peningkatan status RSUD Simeulue sebagai pusat layanan kesehatan kepulauan.	Penguatan layanan RSUD Simeulue, peningkatan alat kesehatan, penguatan SDM medis, serta sistem rujukan berjenjang untuk pelayanan ibu–anak dan penyakit katastropik.
10	Percepatan transformasi digital: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital.	Perluasan telekomunikasi, peningkatan SDM TIK, digitalisasi masyarakat, dan peningkatan layanan penyiaran digital di wilayah kepulauan.	Pembangunan menara telekomunikasi, perluasan jaringan internet cepat, digitalisasi layanan publik, pengembangan SDM TIK, serta penguatan penyiaran digital untuk mitigasi bencana dan pendidikan masyarakat.
11	Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan.	Penanganan kemiskinan berbasis data terpadu dan intervensi adaptif.	Implementasi Bansos Adaptif berbasis data keluarga miskin dan kerentanan sosial untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.

PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE



BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2025-2029



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Penyusunan Program Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue untuk periode 2025–2030 diarahkan pada pemenuhan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayah, tantangan aktual, serta agenda strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029. Setiap program disusun sebagai bagian dari upaya sistematis untuk mendorong perubahan yang berdampak, terukur, dan berkelanjutan dalam berbagai sektor pembangunan.

Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan sinergi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Simeulue mendorong keterpaduan antar Perangkat Daerah agar pelaksanaan program berjalan selaras dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029. Integrasi ini penting untuk menghindari fragmentasi perencanaan serta memastikan keberhasilan pembangunan secara komprehensif.

Program-program yang direncanakan telah tercantum dalam Bab IV Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Cakupan program terdiri atas program prioritas yang mendukung pencapaian outcome pembangunan daerah, serta program penunjang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab sekretariat perangkat daerah dalam pelaksanaan fungsi administratif pemerintahan.

Dengan penyusunan program yang sistematis, konsisten, dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Simeulue menekankan pentingnya tata kelola pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini menjadi landasan dalam menjamin ketercapaian visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung transisi menuju periode perencanaan jangka menengah selanjutnya.

Informasi lebih rinci mengenai rencana program dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditinjau pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
TOTAL PAGU SEMUA URUSAN					**893,575,013,361**		**905,831,591,053**		**885,672,918,938**		**892,481,358,045**		**902,916,859,438**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**467,291,646,376**		**471,851,467,739**		**452,885,271,724**		**456.911.908.294**		**460,122,863,740**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					**209,370,032,780**		**208,826,557,919**		**200,000,748,147**		**200,122,419,996**		**198,871,638,119**
DINAS PENDIDIKAN					**206,426,800,217**		**205,763,895,108**		**197,112,683,576**		**197,162,683,576**		**195,844,646,259**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**158,099,792,968**		**158,099,792,968**		**158,099,792,968**		**158,099,792,968**		**158,099,792,968**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					**47,527,007,249**		**46,814,102,140**		**38,112,890,608**		**38,112,890,608**		**36,744,853,291**
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Jenjang PAUD	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang (APS) Usia 5-6 (PAUD)	%	83,08	88,98		91,93		94,48		97,03		99,58	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Jenjang Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang (APS) Usia 7-15 (SD/SMP)	%	99,61	99,75		99,82		99,89		99,96		100	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Jenjang Kesetraan	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang (APS) 7-18 (Kesetaraan)	%	8,42	9,94		10,71		11,47		12,23		13	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya PAUD yang Terakreditasi Minimal B	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	51,43	55,28		56,53		57,39		61,45		76,06	
Meningkatnya Kemampuan Literasi Peserta Didik Jenjang SD	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	53,57	58,57		61,07		63,57		66,07		68,57	
Meningkatnya Kemampuan Literasi Peserta Didik Jenjang SMP	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	61,09	63,29		64,39		65,49		66,59		67,69	
Meningkatnya Kemampuan Numerasi Peserta Didik Jenjang SD	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	49,54	55,34		58,24		61,14		64,04		66,94	
Meningkatnya Kemampuan Numerasi Peserta Didik Jenjang SMP	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	57,50	60,50		62,00		63,50		65,00		66,50	
Meningkatnya Iklim Keamanan di Lingkungan Pembelajaran SD	Iklim Keamanan SD	Nilai	60,05	65,05		67,55		70,05		72,55		75,05	
Meningkatnya Iklim Keamanan di Lingkungan Pembelajaran SMP	Iklim Keamanan SMP	Nilai	59,04	63,84		66,24		68,64		71,04		73,44	
Meningkatnya Iklim Kebhinekaan dan Toleransi di SD	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	78,20	80,00		80,90		81,80		82,70		83,60	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Iklim Kebhinekaan dan Toleransi di SMP	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	71,36	74,36		75,86		77,36		78,86		80,36	
Meningkatnya Iklim Inklusivitas dan Ramah bagi Semua Peserta Didik di SD	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	68,65	70,65		71,65		72,65		73,65		74,65	
Meningkatnya Iklim Inklusivitas dan Ramah bagi Semua Peserta Didik di SMP	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	70,00	72,00		73,00		74,00		75,00		76,00	
Meningkatnya Kenyamanan Belajar	Satuan Pendidikan Dasar dengan Kondisi Bangunan Baik	%	78,21	88,10		93,51		99,25		100		100	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					**800,000,000**		**850,000,000**		**900,000,000**		**950,000,000**		**1,000,000,000**
Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik PAUD	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	%	43,8	65,12		65,87		66,62		67,37		68,12	
Meningkatnya Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan Dasar	Proporsi Guru Pendidikan Dasar dengan kualifikasi S1/D4	%	80,91	83,71		85,14		86,60		88,08		89,58	
Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pendidik	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	%	18,19	22		24		26		28		30	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH					**527,402,764**		**618,772,902**		**414,711,547**		**455,447,125**		**492,219,481**
PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH					**527,402,764**		**618,772,902**		**414,711,547**		**455,447,125**		**492,219,481**
Meningkatnya Kualitas Dayah	Persentase Dayah yang Mengalami Peningkatan Akreditasi	%	71.43	64.29		71.43		78.57		85.71		92.86	
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH					**2,415,829,799**		**2,443,889,909**		**2,473,353,024**		**2,504,289,295**		**2,534,772,379**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**1,854,627,605**		**1,854,627,605**		**1,854,627,605**		**1,854,627,605**		**1,854,627,605**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100	1,854,627,605	100	1,854,627,605	100	1,854,627,605	100	1,854,627,605	100	1,854,627,605
PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH					**561,202,194**		**589,262,304**		**618,725,419**		**649,661,690**		**680,144,774**
Meningkatnya Kualitas dan Akses Pendidikan yang Berlandaskan Nilai-Nilai Keislaman Di Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Islami	%	14,44	25		30		35		40		50	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					**185.892.775.487**		**185.287.947.194**		**179.789.285.639**		**180.696.981.518**		**182.111.094.898**
DINAS KESEHATAN					**92.579.967.618**		**92.892.793.055**		**89.311.741.531**		**89.736.904.096**		**90.168.373.162**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**64,744,967,618**		**64,744,967,618**		**64,694,904,096**		**64,429,314,653**		**64,429,314,653**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**23,745,000,000**		**23,977,000,000**		**21,017,000,000**		**21,557,000,000**		**21,988,000,000**
Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	0	10		15		2		25		30	
Menurunnya Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia > 18 Tahun	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	25	20		18		15		10		10	
Meningkatnya Proporsi Tempat Pengelolaan Pangan yang Memenuhi Syarat Kesehatan	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	%	20	25		30		35		40		45	
Meningkatnya Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	%	26,67	46,66		66,66		80		100		100	
Meningkatnya Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (TB)	Cakupan Penemuan Kasus TB	%	43,35	51,64		52,65		53,57		54,42		55,20	
Menurunnya Angka Kematian Ibu Melalui Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Maternal	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	5	0		0		0		0		0	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Menurunnya Prevalensi Stunting Melalui Peningkatan Gizi dan Layanan Kesehatan Balita	Prevalensi Stunting	%	25,50	18,70		14,80		10,90		7,00		4,10	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Warga Usia 60 Tahun Ke Atas Sesuai Standar	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persentase Kasus Gizi Buruk pada Bayi 0-59 Bulan yang Mendapat Tata Layanan Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Kurang	Persentase Kasus Gizi Kurang pada Bayi 0-59 Bulan yang Mendapat Tata Layanan Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	40	46,66		60		66,66		100		100	
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	84	85,5		87		88,4		90,5		90,5	
Meningkatnya Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					**3,395,000,000**		**3,395,000,000**		**3,120,000,000**		**3,140,589,443**		**3,141,058,509**
Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang Proporsional terhadap Jumlah Penduduk	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	Per 1000 Penduduk	7,71	8,00		8,15		8,30		8,45		8,60	
Meningkatnya Ketersediaan SDMK di Puskesmas Sesuai Standar yang Ditentukan	Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar	%	85	90		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					**355,000,000**		**385,825,437**		**289,837,435**		**330,000,000**		**330,000,000**
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku IRT terhadap Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Ketentuan	Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP IRT Sesuai Standar	%	73	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Industri Rumah Tangga	Persentase Pangan Industri Rumah Tanggan Aman dan Bermutu	%	73	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan Keamanan, Higiene, dan Sanitasi	Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan	%	73	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Kepatuhan Apotek dan Toko Obat dalam Memenuhi dan Memelihara Persyaratan Perizinan	Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Tindak Lanjut Pemerintah Daerah terhadap Rekomendasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**340,000,000**		**390,000,000**		**190,000,000**		**280,000,000**		**280,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH					**64,876,032,143**		**63,883,345,413**		**61,890,768,382**		**62,298,301,696**		**63,205,946,010**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**1,988,547,475**		**1,988,547,475**		**1,988,547,475**		**1,988,547,475**		**1,988,547,475**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**62,400,000,000**		**61,400,000,000**		**59,400,000,000**		**59,800,000,000**		**60,700,000,000**
Meningkatnya Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	40	46,66		60		66,66		100		100	
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	84	85,5		87		88,4		90,5		90,5	
Meningkatnya Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKN)	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memiliki Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					**487,484,668**		**494,797,938**		**502,220,907**		**509,754,221**		**517,398,535**
Meningkatnya Ketersediaan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pemerintah Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar	%	87,5	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang Proporsional terhadap Jumlah Penduduk	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi	Per 1000 Penduduk	7,71	8,00		8,15		8,30		8,45		8,60	
PUSKESMAS TEUPAH SELATAN					**1,737,652,828**		**1,742,685,828**		**1,747,652,828**		**1,752,652,828**		**1,757,652,828**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**1,727,652,828**		**1,727,685,828**		**1,727,652,828**		**1,727,652,828**		**1,727,652,828**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS ALUS-ALUS					**1,185,646,000**		**1,190,646,000**		**1,195,646,000**		**1,200,646,000**		**1,205,646,000**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**1,175,646,000**		**1,175,646,000**		**1,175,646,000**		**1,175,646,000**		**1,175,646,000**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS SIMEULUE TIMUR					**3,183,918,631**		**3,188,918,631**		**3,193,918,631**		**3,198,918,631**		**3,203,918,631**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**3,173,918,631**		**3,173,918,631**		**3,173,918,631**		**3,173,918,631**		**3,173,918,631**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS KUALA MAKMUR					**1,868,699,960**		**1,873,699,960**		**1,878,699,960**		**1,883,699,960**		**1,888,699,960**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**1,858,699,960**		**1,858,699,960**		**1,858,699,960**		**1,858,699,960**		**1,858,699,960**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PUSKESMAS TEUPAH TENGAH					**1,987,515,268**		**1,992,515,268**		**1,997,515,268**		**2,002,515,268**		**2,007,515,268**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**1,977,515,268**		**1,977,515,268**		**1,977,515,268**		**1,977,515,268**		**1,977,515,268**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS TEUPAH BARAT					**2,060,010,666**		**2,065,010,666**		**2,070,010,666**		**2,075,010,666**		**2,080,010,666**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**2,050,010,666**		**2,050,010,666**		**2,050,010,666**		**2,050,010,666**		**2,050,010,666**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PUSKESMAS SIMEULUE TENGAH					**3,126,030,872**		**3,131,030,872**		**3,136,030,872**		**3,141,030,872**		**3,146,030,872**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**3,116,030,872**		**3,116,030,872**		**3,116,030,872**		**3,116,030,872**		**3,116,030,872**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS TELUK DALAM					**1,372,814,310**		**1,377,814,310**		**1,382,814,310**		**1,387,814,310**		**1,392,814,310**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**1,362,814,310**		**1,362,814,310**		**1,362,814,310**		**1,362,814,310**		**1,362,814,310**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS LUAN BALU					**1,313,653,697**		**1,318,653,697**		**1,323,653,697**		**1,328,653,697**		**1,333,653,697**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**1,303,653,697**		**1,303,653,697**		**1,303,653,697**		**1,303,653,697**		**1,303,653,697**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS SIMEULUE CUT					**1,841,160,464**		**1,846,160,464**		**1,851,160,464**		**1,856,160,464**		**1,861,160,464**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**1,831,160,464**		**1,831,160,464**		**1,831,160,464**		**1,831,160,464**		**1,831,160,464**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS SALANG					**2,501,110,000**		**2,506,110,000**		**2,511,110,000**		**2,516,110,000**		**2,521,110,000**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**2,491,110,000**		**2,491,110,000**		**2,491,110,000**		**2,491,110,000**		**2,491,110,000**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS SIMEULUE BARAT					**2,711,480,000**		**2,716,480,000**		**2,721,480,000**		**2,726,480,000**		**2,731,480,000**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**2,701,480,000**		**2,701,480,000**		**2,701,480,000**		**2,701,480,000**		**2,701,480,000**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS SANGGIRAN					**1,346,103,999**		**1,351,103,999**		**1,356,103,999**		**1,361,103,999**		**1,366,103,999**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**1,336,103,999**		**1,336,103,999**		**1,336,103,999**		**1,336,103,999**		**1,336,103,999**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS ALAFAN					**1,092,884,707**		**1,097,884,707**		**1,102,884,707**		**1,107,884,707**		**1,112,884,707**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**1,082,884,707**		**1,082,884,707**		**1,082,884,707**		**1,082,884,707**		**1,082,884,707**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	
PUSKESMAS LAMEREM					**1,108,094,324**		**1,113,094,324**		**1,118,094,324**		**1,123,094,324**		**1,128,094,324**
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					**1,098,094,324**		**1,098,094,324**		**1,098,094,324**		**1,098,094,324**		**1,098,094,324**
Meningkatnya Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					**10,000,000**		**15,000,000**		**20,000,000**		**25,000,000**		**30,000,000**
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	25	35		40		45		55		65	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**38,091,512,300**		**42,342,012,300**		**36.442.012.300**		**37,592,012,300**		**39.992.012.300**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**38,091,512,300**		**42,342,012,300**		**36.442.012.300**		**37,592,012,300**		**39.992.012.300**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**5,042,012,300**		**5,042,012,300**		**5,042,012,300**		**5,042,012,300**		**5,042,012,300**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					**5,000,000,000**		**5,250,000,000**		**5,500,000,000**		**5,650,000,000**		**6,000,000,000**
Meningkatnya Rasio Layanan Jaringan Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kabupaten	%	45	47		49		51		53		55	
Meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Berfungsi Baik	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	42,10	60		70		80		90		100	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					**5,000,000,000**		**5,750,000,000**		**5,500,000,000**		**5,650,000,000**		**6,000,000,000**
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	%	77,77	80,17		82,57		84,97		87,37		89,77	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					**1,200,000,000**		**1,300,000,000**		**1,400,000,000**		**1,500,000,000**		**1,600,000,000**
Meningkatkan Pengelolaan Sampah di TPA/TPST untuk Lingkungan yang Bersih dan Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	%	93,66	95		96		97		98		99	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					**5,000,000,000**		**6,000,000,000**		**5,500,000,000**		**5,650,000,000**		**6,000,000,000**
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengolaan Air Limbah	Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	%	76,51	78,91	5,000,000,000	81,31	6,000,000,000	83,71	5,500,000,000	86,11	5,650,000,000	89,31	6,000,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					**500,000,000**		**300,000,000**		**300,000,000**		**300,000,000**		**400,000,000**
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	50	54		58		62		66		70	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					**900,000,000**		**800,000,000**		**800,000,000**		**500,000,000**		**600,000,000**
Meningkatkan Kepatuhan Terhadap PBG dan SLF untuk Menjamin Keamanan dan Kelayakan Bangunan Gedung	Persentase Kepatuhan PBG dan SLF Kabupaten	%	75	85		90		95		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					**15,000,000,000**		**17,500,000,000**		**12,000,000,000**		**13,000,000,000**		**14,000,000,000**
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	47,58	49,62		51,66		53,70		55,74		57,78	
Meningkatnya Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persentase Jembatan Dengan Kondisi Baik	%	43,47	60		70		80		90		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					**449,500,000**		**400,000,000**		**400,000,000**		**300,000,000**		**350,000,000**
Meningkatkan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten Sesuai Ketentuan	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah Kabupaten	%	55,56	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					**9.969.930.355**		**11.111.232.532**		**12.044.792.013**		**12,412,924,763**		**13.902.157.341**
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					**9.969.930.355**		**11.111.232.532**		**12.044.792.013**		**12,412,924,763**		**13.902.157.341**
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					**900,000,000**		**900,000,000**		**1.000,000,000**		**1,000,000,000**		**1,000,000,000**
Meningkatkan Persentase Warga yang Terkena Relokasi yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	0	100		100		100		100		100	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					**4,000,000,000**		**4,500,000,000**		**5,000,000,000**		**5,250,000,000**		**6,000,000,000**
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Hunian yang Layak dan Sehat	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					**4,000,000,000**		**4,500,000,000**		**5,000,000,000**		**5,250,000,000**		**6,000,000,000**
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Hunian yang Layak dan Sehat.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	46,55	55,32		60,56		65,67		70,95		75,23	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					**1.069.930.355**		**1.211.232.532**		**1.044.792.013**		**912,924,763**		**902.157.341**
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**14,640,751,132**		**14,706,989,084**		**14,770,618,007**		**15.977.144.581**		**14,850,858,319**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH					**5,419,472,978**		**5,461,054,447**		**5,498,794,063**		**6.678.136.864**		**5,523,307,641**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**4,803,658,289**		**4,803,658,289**		**4,803,658,289**		**4,803,658,289**		**4,803,658,289**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**615,814,689**		**657,396,158**		**695,135,774**		**1.874.478.575**		**719,649,352**
Meningkatkan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang Dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatkan Penegakan Qanun dan Perbup untuk Menjamin Ketertiban dan Kepatuhan Masyarakat	Persentase Qanun dan Perbup yang Ditegakkan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatkan Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satpol PP dan WH untuk Mendukung Penegakan Hukum	Jumlah PPNS pada Satpol PP dan WH	Orang	2	6		7		8		9		10	
Meningkatkan Ketersediaan SOP yang Efektif untuk Penegakan Qanun, Perbup, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Presentase SOP Yang Tersedia dalam Penegakan Qanun dan Perbup serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	25	50		75		100		100		100	
Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang yang Memadai dalam Penegakan Qanun, Perbup, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Sarana Prasarana Minimal yang Digunakan sebagai Penunjang dalam Penegakan Qanun dan Perbup serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	%	20	50		60		75		90		100	
Meningkatkan Jumlah Anggota Satpol PP dan WH yang Telah Mengikuti Diklat Dasar untuk Meningkatkan Kemampuan dan Kinerja	Persentase Jumlah Anggota Satpol PP dan WH yang Telah Mengikuti Diklat Dasar	%	80	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					**9,221,278,154**		**9,245,934,637**		**9,271,823,944**		**9,299,007,717**		**9,327,550,678**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**7,728,148,490**		**7,728,148,490**		**7,728,148,490**		**7,728,148,490**		**7,728,148,490**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					**493,129,664**		**517,786,147**		**543,675,454**		**570,859,227**		**599,402,188**
Meningkatnya Kesadaran dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Risiko Bencana.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Kemampuan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Efektivitas Penyusunan dan Legalitas Dokumen Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	50	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Penanganan Pra Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Ketersediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					**9,326,644,322**		**9,576,728,710**		**9,837,815,618**		**10,110,425,136**		**10,395,102,763**
DINAS SOSIAL					**9,326,644,322**		**9,576,728,710**		**9,837,815,618**		**10,110,425,136**		**10,395,102,763**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2,923,256,613**		**2,923,256,613**		**2,923,256,613**		**2,923,256,613**		**2,923,256,613**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					**2,502,833,248**		**2,552,889,913**		**2,603,947,711**		**2,656,026,665**		**2,709,147,199**
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS Lainnya di Luar HIV/Aids di Luar Panti.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatkan Pelayanan Sosial yang Dilaksanakan oleh PSKS Perorangan Sosial Sesuai Standar	Persentase Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	%	8,58	15		20		25		30		35	
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penerima Manfaat Program Sosial	Pesentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	8,58	15		20		25		30		35	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					**3,021,706,600**		**3,172,791,930**		**3,331,431,527**		**3,498,003,103**		**3,672,903,258**
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	60,8	100		100		100		100		100	
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	56,4	100		100		100		100		100	
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	52,5	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar untuk Pelayanan Sosial di Luar Panti	Persentase Sarana Prasarana yang Disediakan Sesuai Standar untuk Pelayanan Sosial Di Luar Panti	%	47,4	100		100		100		100		100	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial yang Dilakukan oleh Pekerja Sosial dan Relawan Sosial Sesuai Standar di Luar Panti	Persentase Pekerja Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Di Luar Panti Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	19,64	30		35		40		45		50	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					**221,856,864**		**227,949,707**		**234,347,193**		**241,064,552**		**248,117,780**
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Penerima Manfaat Program Sosial	Pesentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	8,58	15		20		25		30		35	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatkan Pemutahiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan Setiap Tahun	Jumlah Pemutahiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan Selama Satu Tahun	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA					**601,409,097**		**641,479,552**		**683,553,529**		**727,731,206**		**774,117,766**
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam, Sosial, dan Non Alam pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Korban Bencana yang Memenuhi Standar	Persentase Sarana Prasarana Bagi Korban Bencana Kabupaten yang Disediakan Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Profesionalisme Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan dalam Penanganan Korban Bencana Sesuai Standar	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					**55,581,900**		**58,360,995**		**61,279,045**		**64,342,997**		**67,560,147**
Meningkatkan Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik dan Terawat Secara Berkala	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	Lokasi	1	1		1		1		1		1	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**69,147,169,384**		**68,910,557,452**		**72,915,153,974**		**70,657,375,054**		**73,234,591,606**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					**4,439,668,920**		**4,514,668,920**		**4,589,668,920**		**4,714,668,920**		**4,874,668,920**
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					**4,439,668,920**		**4,514,668,920**		**4,589,668,920**		**4,714,668,920**		**4,874,668,920**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,479,668,920**		**3,479,668,920**		**3,479,668,920**		**3,479,668,920**		**3,514,668,920**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					**110,000,000**		**120,000,000**		**130,000,000**		**140,000,000**		**150,000,000**
Meningkatnya Kesesuaian Kegiatan dengan Rencana Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	%	46,71	47		48,5		50		51,71		53	
Meningkatnya Implementasi Program dan Kegiatan yang Selaras dengan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					**700,000,000**		**750,000,000**		**800,000,000**		**900,000,000**		**1,000,000,000**
Terjalinnya Kerjasama Produktif dengan Lembaga yang Menyediakan Layanan Peningkatan Kapasitas SDM dan Produktivitas Industri Lokal	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	11,64	20		25		30		35		40	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah /Orang	41,38 (2022)	50,34		53,42		57,53		61,53		65,32	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					**100,000,000**		**110,000,000**		**120,000,000**		**130,000,000**		**140,000,000**
Meningkatnya Penempataan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	%	12,5	16		20		22		25		27	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					**50,000,000**		**55,000,000**		**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**
Meningkatnya Kualitas Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Daerah	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	20	30		35		40		45		50	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatkan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Menjamin Perlindungan Sosial Bagi Semua Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	29,13	33,50		40,50		47,77		55,24		64,34	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					**5,196,132,509**		**5,248,047,226**		**5,302,557,678**		**5,359,793,655**		**5,267,798,215**
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,DAN KELUARGA BERENCANA					**5,196,132,509**		**5,248,047,226**		**5,302,557,678**		**5,359,793,655**		**5,267,798,215**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**4,157,838,173**		**4,157,838,173**		**4,157,838,173**		**4,157,838,173**		**4,156,838,191**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					**440,610,040**		**462,640,542**		**485,772,569**		**510,061,198**		**462,640,524**
Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	4,82	5,25		5,50		5,75		6,00		6,25	
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai Cerminan Kesetaraan Peran dan Akses Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	79,78	80,69		81,14		81,59		82,04		82,50	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					**53,340,400**		**56,007,420**		**58,807,791**		**61,748,181**		**59,807,791**
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					**113,438,400**		**119,110,320**		**125,065,836**		**131,319,128**		**113,438,400**
Meningkatkan Pemanfaatan Data Gender dan Anak untuk Kebijakan yang Inklusif	Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					**240,905,517**		**252,950,793**		**265,598,332**		**278,878,249**		**265,598,332**
Meningkatkan Cakupan Implementasi Kebijakan untuk Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Cakupan Implementasi Kebijakan Menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	20	30		40		50		60		70	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					**189,999,979**		**199,499,978**		**209,474,977**		**219,948,726**		**209,474,977**
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**700,000,000**		**780,000,000**		**860,000,000**		**940,000,000**		**1,020,000,000**
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					**700.000.000**		**780.000.000**		**860.000.000**		**940.000.000**		**1.020.000.000**
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					**150.000.000**		**160.000.000**		**170.000.000**		**180.000.000**		**190.000.000**
Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	%	59%	70		75		80		85		90	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					**350.000.000**		**400.000.000**		**450.000.000**		**500.000.000**		**550.000.000**
Meningkatnya Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten	Skor	68,4	72,4		73,4		74,4		75,4		76,4	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					**100.000.000**		**110.000.000**		**120.000.000**		**130.000.000**		**140.000.000**
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	%	45	40		35		30		25		20	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					**100.000.000**		**110.000.000**		**120.000.000**		**130.000.000**		**140.000.000**
Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					**2,064,558,449**		**2,093,528,242**		**2,124,087,892**		**2,153,534,118**		**2,184,104,485**
DINAS PERTANAHAN					**2,064,558,449**		**2,093,528,242**		**2,124,087,892**		**2,153,534,118**		**2,184,104,485**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**1,636,830,022**		**1,636,830,022**		**1,636,830,022**		**1,636,830,022**		**1,636,830,022**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					**70,000,000**		**75,000,000**		**80,000,000**		**85,000,000**		**90,000,000**
Meningkatnya Ketepatan Waktu dalam Persiapan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					**35,973,427**		**40,672,895**		**45,386,353**		**50,114,080**		**55,856,362**
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (Tora)	Luas Tanah Potensi TORA untuk Ditindaklanjuti Kegiatan Redistribusi Tanah dan Jumlah Potensi Subjek Penerima Manfaat yang Dapat Ditindaklanjuti dengan Penataan Akses melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun Anggaran	Ha											

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					**55,080,000**		**60,181,600**		**65,305,232**		**70,451,337**		**75,620,364**
Meningkatnya Tertib Pemanfaatan Tanah untuk Fasilitas Umum.	Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH					**175,760,000**		**180,000,000**		**185,779,904**		**190,395,502**		**195,083,412**
Meningkatnya Kejelasan Hak-Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	28,04	30,60		31,88		33,16		34,44		35,78	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN					**60,915,000**		**65,843,725**		**70,786,381**		**75,743,177**		**80,714,325**
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Pertanahan	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN					**30,000,000**		**35,000,000**		**40,000,000**		**45,000,000**		**50,000,000**
Meningkatnya Penyelesaian Kasus Tanah Garapan melalui Mediasi	Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	100	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					**8,734,774,547**		**8,691,321,001**		**8,341,944,264**		**8,458,607,333**		**9,233,708,355**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					**8,734,774,547**		**8,691,321,001**		**8,341,944,264**		**8,458,607,333**		**9,233,708,355**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,651,474,518**		**3,631,474,518**		**3,611,474,518**		**3,621,474,867**		**3,621,474,518**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					**155,000,000**		**250,000,000**		**175,000,000**		**25,000,000**		**300,500,000**
Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					**354,000,000**		**379,000,000**		**380,500,000**		**382,030,000**		**383,590,600**
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,82	84,20		84,37		84,55		84,72		84,98	
Menurunnya Pencemaran Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	94,44	85,88		86,08		86,28		86,48		86,68	
Menurunnya Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air	Indeks	62,50	80,58		80,78		80,98		81,18		81,38	
Menurunnya Pencemaran Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	82,51	87,32		87,39		87,46		87,53		87,60	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					**174,449,216**		**335,000,000**		**303,000,000**		**156,060,000**		**159,181,200**
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	0.15	0.15		1		2		3		4	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					**40,200,000**		**41,004,000**		**41,824,080**		**42,660,200**		**43,513,404**
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun B3 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah B3	Persentase Limbah (B3) yang Dikelola	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					**62,000,000**		**75,000,000**		**85,000,000**		**110,000,000**	**100**	**110,000,000**
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan /atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH	%	11,11	22,22		90		95		100		100	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**62,500,000**		**62,500,000**		**62,500,000**		**62,500,000**		**62,500,000**
Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	%	66,67	73,45		77,34		81,53		84,63		89,34	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	0	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**		**150,000,000**		**150,000,000**
Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti	%	70	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					4,185,150,813		3,867,342,483		3,632,645,666		3,883,882,266		4,377,948,633
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	39,01	47,16		51.09		55.02		58.95		62.88	
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan Daerah	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS)	Indeks	39,01	47,16		51,09		55,02		58,95		62,88	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**4,690,096,254**		**4,757,148,186**		**4,813,556,402**		**4,861,725,029**		**4,917,157,087**
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					**4,690,096,254**		**4,757,148,186**		**4,813,556,402**		**4,861,725,029**		**4,917,157,087**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,796,621,146**		**3,796,621,146**		**3,796,621,146**		**3,796,621,146**		**3,796,621,146**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					**360,150,000**		**378,157,500**		**397,065,375**		**416,918,644**		**437,764,576**
Meningkatkan Perekaman Data KTP-El yang Mencapai Seluruh Penduduk yang Memenuhi Syarat	Persentase Perekaman KTP-El	%	97,78	100		100		100		100		100	
Meningkatkan Kepemilikan Identitas Digital bagi Penduduk yang Telah Terdaftar di Sistem	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	5,23	25		35		45		55		65	
Meningkatkan Jumlah Anak yang Terdaftar dan Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	47,69	65	-	75	-	85	-	95	-	100	-

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENCATATAN SIPIL					**290,426,643**		**304,947,975**		**320,195,374**		**336,205,143**		**353,015,400**
Meningkatkan Pelaporan Kematian dan Penerbitan Akta Kematian yang Sesuai dengan Pelaporan	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatkan Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran yang Diterbitkan berdasarkan Pelaporan yang Diterima	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	94,85	100		100		100		100		100	
Meningkatkan Pelaporan Perkawinan dan Penerbitan Akta Perkawinan yang Sesuai dengan Laporan yang Diterima	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	73,60	100		100		100		100		100	
Meningkatkan Pelaporan Perceraian dan Penerbitan Akta Perceraian yang Sesuai dengan Pelaporan yang Diterima	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	62,24	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					**134,341,753**		**141,058,841**		**148,111,783**		**155,517,372**		**163,293,241**
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	34,09	45,45		56.82		68.18		79.55		90.91	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					**108,556,712**		**136,362,724**		**151,562,724**		**156,462,724**		**166,462,724**
Meningkatnya Penyusunan Data Profil Kependudukan	Persentase Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					**4,159,331,620**		**4,192,049,666**		**4,225,754,250**		**4,260,482,690**		**4,296,281,023**
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					**4,159,331,620**		**4,192,049,666**		**4,225,754,250**		**4,260,482,690**		**4,296,281,023**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,014,605,987**		**3,014,605,987**		**3,014,605,987**		**3,014,605,987**		**3,014,605,987**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENATAAN DESA					**50,000,000**		**52,000,000**		**54,000,000**		**56,000,000**		**58,000,000**
Meningkatnya Jumlah Desa dengan Status Mandiri melalui Penguatan Tata Kelola dan Kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	2,9	10		15		22		30		40	
Meningkatnya Penataan Desa Melalui Peningkatan Kualitas Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Kerjasama Antar Desa melalui Fasilitasi Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					**70,000,000**		**72,000,000**		**74,000,000**		**76,000,000**		**78,000,000**
Meningkatnya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerja Sama Desa Hingga Selesai	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					**274,117,763**		**287,823,651**		**302,215,834**		**317,326,625**		**333,193,957**
Tertibnya Desa dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya BUMDes yang Aktif	Persentase BUMDes Aktif	%	9,25	20		25		30		35		40	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					**750,607,870**		**765,620,028**		**780,932,429**		**796,550,078**		**812,481,079**
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Peningkatan Fasilitasi Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat melalui Fasilitasi Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Aktivitas dan Kinerja PKK dalam Mendukung Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat	Persentase PKK Aktif	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					**5,928,900,886**		**6,098,878,903**		**6,264,656,480**		**6,436,349,611**		**6,614,076,602**
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA					**5,928,900,886**		**6,098,878,903**		**6,264,656,480**		**6,436,349,611**		**6,614,076,602**
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					**113,950,668**		**127,629,681**		**133,982,274**		**143,061,920**		**154,923,158**
Menurunkan Angka Kelahiran Total untuk Mencapai Keseimbangan Pertumbuhan Penduduk yang Berkelanjutan	Total Fertility Rate (TFR/ Angka Kelahitan Total)	Anak Per Perempuan Usia 15–49 Tahun	2,67	2,48		2,38		2,29		2,19		2,10	
Menurunkan Angka Kelahiran Remaja untuk Meningkatkan Kesehatan Reproduksi dan Kualitas Hidup Remaja	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Per 1.000 Perempuan	10	8,33		7,50		6,67		5,83		5,23	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					**4,683,950,668**		**4,817,629,681**		**4,953,982,274**		**5,093,061,920**		**5,234,923,158**
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB Melalui Penggunaan Alat dan Cara Kontrasepsi Modern	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Proportion Of Demand Satisfied By Modern)	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Cakupan Pelayanan KB Pasca Persalinan untuk Mencegah Kehamilan yang Tidak Direncanakan	Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Jumlah Peserta Aktif Keluarga Berencana (KB) Secara Berkelanjutan	Cakupan Peserta KB Aktif	%	67	73		76		79		82		85	
Meningkatnya Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Oleh Peserta KB	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	50,55	57,03		60,27		63,51		66,75		70	
Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi pada Perempuan Menikah Usia 15–49 Tahun	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	47,54	52,02		54,26		56,50		58,74		65	
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Alat dan Obat Kontrasepsi Secara Merata	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	70,75	78,83		82,87		86,91		90,95		95,25	
Meningkatnya Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi Modern pada Perempuan Usia Subur Yang Menikah	Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Rate (mCPR)	%	62,61	67,07		69,30		71,53		73,76		80,32	
Menurunnya Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi pada Pasangan Usia Subur	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	6,59	5,39		4,79		4,19		3,59		2,89	
Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga Melalui Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas	Kampung Keluarga Berkualitas (KB)	Desa	138	138		138		138		138		138	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					**1,130,999,550**		**1,153,619,541**		**1,176,691,932**		**1,200,225,771**		**1,224,230,286**
Tersedianya Data Mikro Keluarga Yang Akurat dan Termutakhir Di Setiap Desa	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa	%	100	100		100		100		100		100	
Menurunnya Proporsi Keluarga Berisiko Stunting	Proporsi Keluarga Berisiko Stunting	%	56	42,34		35,51		28,68		21,85		15	
Meningkatnya Pembinaan dan Keberfungsian Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	%	82	88		91		94		97		100	
Meningkatnya Keterlibatan Remaja dalam Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	%	38,55	56,37		65,28		74,19		83,10		90	
Meningkatknya Kualitas Keluarga Sejahtera melalui iBangga.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	70	74		76		78		80		82	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					**4,992,201,445**		**5,504,135,187**		**5,527,007,093**		**5,550,269,011**		**5,573,928,067**
DINAS PERHUBUNGAN					**4,992,201,445**		**5,504,135,187**		**5,527,007,093**		**5,550,269,011**		**5,573,928,067**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,613,442,611**		**3,727,750,611**		**3,766,883,411**		**3,880,909,491**		**3,852,599,491**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					**524,858,000**		**1,576,384,576**		**1,060,123,682**		**826,137,017**		**734,395,017**
Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi di Wilayah Kabupaten	Konektivitas Kabupaten	%	72,96	75,42		79,50		81,75		84,53		86,25	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten	%	64,45	78,96		76,35		79,32		83,34		89,92	
Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Perusahaan Angkutan Umum dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					**853,900,834**		**200,000,000**		**700,000,000**		**843,222,503**		**986,933,559**
Meningkatnya Keterhubungan Antar Wilayah dalam Mendukung Mobilitas Orang dan Barang Secara Efisien	Cakupan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Antar Pulau	%	50	50		65		80		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**4,740,727,487**		**4,778,995,591**		**4,817,829,057**		**4,857,239,193**		**4,897,237,531**
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN					**4,740,727,487**		**4,778,995,591**		**4,817,829,057**		**4,857,239,193**		**4,897,237,531**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,067,322,267**		**3,067,322,267**		**3,067,322,267**		**3,067,322,267**		**3,067,322,267**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					**260,000,000**		**270,000,000**		**280,000,000**		**290,000,000**		**300,000,000**
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Layanan Akses Internet bagi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominsa	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Kecepatan dan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui Sistem Lapor	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	Skor	1	2		2		3		3		4	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1,413,405,220		1,441,673,324		1,470,506,790		1,499,916,926		1,529,915,264
Meningkatnya Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Level	0	1,5		2		2,5		3		3	
Meningkatnya Konektivitas Perangkat Daerah melalui Penguatan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) Di Tingkat Kabupaten yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) oleh Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	100	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH					**4,536,269,065**		**4,616,276,328**		**4,716,583,736**		**4,797,197,292**		**4,878,123,119**
DINAS PERINDUSTERIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					**4,536,269,065**		**4,616,276,328**		**4,716,583,736**		**4,797,197,292**		**4,878,123,119**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,255,905,930**		**3,255,905,930**		**3,255,905,930**		**3,255,905,930**		**3,255,905,930**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					**70,000,000**		**75,000,000**		**80,000,000**		**85,000,000**		**90,000,000**
Meningkatnya Tata Kelola dan Kelembagaan Koperasi yang Efektif dan Berdaya Saing	Persentase Koperasi yang Diawasi dan mendapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					**100,000,000**		**110,000,000**		**130,000,000**		**140,000,000**		**150,000,000**
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	50	60		70		80		90		10	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					**100,000,000**		**110,000,000**		**130,000,000**		**140,000,000**		**150,000,000**
Meningkatanya Produktivitas Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	30	32		34		36		38		40	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi Merah Putih	Persentase Koperasi Merah Putih Aktif dan Dibina	%	0	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					**750,363,135**		**765,370,398**		**780,677,806**		**796,291,362**		**812,217,189**
Meningkatnya Kewirausahaan Mikro yang Produktif	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	1	2		3		4		5		6	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					**260,000,000**		**300,000,000**		**340,000,000**		**380,000,000**		**420,000,000**
Meningkatnya Kapasitas Usaha Pelaku UMKM	Persentase UMKM yang Di Bina (Mendapatkan Pelatihan Manajemen Usaha atau Digital Marketing)	%	1	2		3		4		5		6	
Meningkatnya Kinerja dan Pertumbuhan Usaha Koperasi melalui Penguatan Manajemen dan Akses Pembiayaan	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	50	60		70		80		90		10	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Transformasi Usaha Mikro dari Sektor Informal ke Sektor Formal	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	1	2		3		4		5		6	
Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas Wirausaha Baru yang Produktif dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Wirausaha	%	1	2		3		4		5		6	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					**4,148,442,434**		**4,269,442,434**		**4,390,442,434**		**4,511,442,434**		**4,476,442,434**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					**4,148,442,434**		**4,269,442,434**		**4,390,442,434**		**4,511,442,434**		**4,476,442,434**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,225,346,707**		**3,291,346,707**		**3,357,346,707**		**3,423,346,707**		**3,333,346,707**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					**100,000,000**		**110,000,000**		**120,000,000**		**130,000,000**		**140,000,000**
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi di Kabupaten melalui Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten	%	5	15		20		25		30		35	
Meningkatnya Pencapaian Target Realisasi Investasi Kabupaten	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	98,29	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					**150,000,000**		**165,000,000**		**180,000,000**		**195,000,000**		**210,000,000**
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	2	2		2		2		2		2	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					**438,095,727**		**453,095,727**		**468,095,727**		**483,095,727**		**498,095,727**
Meningkatkan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Izin Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					**200,000,000**		**210,000,000**		**220,000,000**		**230,000,000**		**240,000,000**
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					**35,000,000**		**40,000,000**		**45,000,000**		**50,000,000**		**55,000,000**
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					**7,741,444,151**		**6,121,444,151**		**6.646.444.151**		**7.171.444.151**		**8,246,444,151**
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					**7,741,444,151**		**6,121,444,151**		**6.646.444.151**		**7.171.444.151**		**8,246,444,151**

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2,866,444,151**		**2,866,444,151**		**2,866,444,151**		**2,866,444,151**		**2,866,444,151**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					**125,000,000**		**145,000,000**		**165,000,000**		**185,000,000**		**205,000,000**
Meningkatnya Kompetensi dan Daya Saing Pemuda melalui Partisipasi dalam Pelatihan, Kursus, dan Program Sertifikasi	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Training dan Memperoleh Sertifikat	%	3,14	10		13		16		19		22	
Meningkatnya Peran Aktif Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Dibina dan Aktif	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					**4,650,000,000**		**3,000,000,000**		**3,500,000,000**		**4,000,000,000**		**5,050,000,000**
Meningkatnya capaian prestasi atlet daerah pada ajang PORA dari cabang olahraga yang diikuti	Persentase Prestasi Olahraga dari Cabang Olahraga PORA yang Diikuti	%	25	50		75		100		100		100	
Meningkatnya prestasi pelajar pada ajang POPDA dari cabang olahraga yang diikuti	Persentase Prestasi Olahraga dari Cabang Olahraga POPDA yang Diikuti	%	8,3	30		40		50		60		70	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi Atlet Daerah melalui Peningkatan Jumlah Atlet yang Lolos Pelatda Provinsi	Persentase Atlet yang Berasal dari Kabupaten yang Masuk Pelatda Provinsi	%	30	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					**100.000.000**		**110.000.000**		**115.000.000**		**120.000.000**		**125.000.000**
Meningkatnya Partisipasi Kepramukaan dalam Pembinaan Karakter Pemuda	Persentase Gerakan Kepramukaan yang Aktif	%	100	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					**70.000.000**		**75.000.000**		**80.000.000**		**85.000.000**		**90.000.000**
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN					**70.000.000**		**75.000.000**		**80.000.000**		**85.000.000**		**90.000.000**
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					**70.000.000**		**75.000.000**		**80.000.000**		**85.000.000**		**90.000.000**
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berbasis Data	Persentase SKPK yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,64	3,60		3,90		4,20		4,40		4,60	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					**70.000.000**		**75.000.000**		**80.000.000**		**85.000.000**		**90.000.000**
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN PERSANDIAN					**70.000.000**		**75.000.000**		**80.000.000**		**85.000.000**		**90.000.000**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					**70.000.000**		**75.000.000**		**80.000.000**		**85.000.000**		**90.000.000**
Meningkatnya Kesiapan dan Ketahanan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sesuai Standar Keamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					**2,586,553,142**		**2,671,553,142**		**6,636,553,142**		**2,841,553,142**		**2.926.553.142**
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					**350,000,000**		**385,000,000**		**4,300,000,000**		**455,000,000**		**490,000,000**
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					**100.000.000**		**110.000.000**		**120.000.000**		**130.000.000**		**140.000.000**
Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival	1	1		1		1		1		1	
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya melalui Upaya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Budaya Secara Berkelanjutan	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	55	65		70		75		80		90	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					**100.000.000**		**110.000.000**		**120.000.000**		**130.000.000**		**140.000.000**
Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kebudayaan melalui Sertifikasi Profesi di Bidang Kebudayaan	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifkasi Profesi Dibidang Kebudayaan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					**50.000.000**		**55.000.000**		**60.000.000**		**65.000.000**		**70.000.000**
Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Warisan Budaya Tak Benda	Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan	%	55,54	75		85		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					**100.000.000**		**110.000.000**		**4.000.000.000**		**130.000.000**		**140.000.000**
Meningkatnya Pengelolaan Museum Smong sebagai Pusat Edukasi dan Pelestarian Budaya Daerah	Pengelolaan Museum Smong	Unit	0	0		1		1		1		1	
SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH					**2,236,553,142**		**2,286,553,142**		**2,336,553,142**		**2,386,553,142**		**2,436,553,142**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**1,736,553,142**		**1,736,553,142**		**1,736,553,142**		**1,736,553,142**		**1,736,553,142**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)					**500,000,000**		**550,000,000**		**600,000,000**		**650,000,000**		**700,000,000**
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Adat Aceh	Persentase Desa yang Dibina dan Melestarikan Adat Aceh Sesuai dengan Norma, Nilai, dan Kelembagaan Adat yang Berlaku	%	100	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					**4,173,068,475**		**4,223,068,475**		**3,273,068,475**		**3,323,068,475**		**3,373,068,475**
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					**4,173,068,475**		**4,223,068,475**		**3,273,068,475**		**3,323,068,475**		**3,373,068,475**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2,773,068,475**		**2,773,068,475**		**2,773,068,475**		**2,773,068,475**		**2,773,068,475**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					**1,400,000,000**		**1,450,000,000**		**500,000,000**		**550,000,000**		**600,000,000**
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	Kunjungan	670	2050		2100		2150		2200		2250	
Meningkatnya Minat dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	N/A	7,407		7,510		7,702		7,815		8,000	
Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat melalui Penguatan Akses, Kemampuan, dan Budaya Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	45,43	50,41		52,90		55,39		57,88		60,37	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					**175,000,000**		**200,000,000**		**225,000,000**		**250,000,000**		**275,000,000**
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					**175,000,000**		**200,000,000**		**225,000,000**		**250,000,000**		**275,000,000**
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					**175,000,000**		**200,000,000**		**225,000,000**		**250,000,000**		**275,000,000**
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	26,52	36,08		45,64		55,20		74,32		83,88	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**41,400,819,900**		**43,988,544,339**		**42,034,874,627**		**44,147,122,390**		**46,056,757,731**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					**10,729,584,394**		**11,529,584,394**		**12,329,584,394**		**13,129,584,394**		**13,893,535,498**
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					**10,729,584,394**		**11,529,584,394**		**12,329,584,394**		**13,129,584,394**		**13,893,535,498**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,819,584,394**		**3,819,584,394**		**3,819,584,394**		**3,819,584,394**		**3,819,584,394**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					**5,500,000,000**		**5,750,000,000**		**6,000,000,000**		**6,250,000,000**		**6,500,000,000**
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	22.898	25.686		27,207		28,819		30,528		32,339	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					**1,000,000,000**		**1,500,000,000**		**2,000,000,000**		**2,500,000,000**		**3,000,000,000**
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	92,73	108,16		116.81		126.14		136.23		147.13	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					**60,000,000**		**60,000,000**		**60,000,000**		**60,000,000**		**60,000,000**
Meningkatnya Pengawasan terhadap Kawasan Konservasi	Persentase Luasan Kawasan Konservasi yang Diawasi	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					**350,000,000**		**400,000,000**		**450,000,000**		**500,000,000**		**513,951,104**
Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	1202	1.325		1,391		1,460		1,533		1,610	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					**4,444,310,064**		**5,004,310,064**		**5,564,310,064**		**6,124,310,064**		**6,684,310,064**
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					**4,444,310,064**		**5,004,310,064**		**5,564,310,064**		**6,124,310,064**		**6,684,310,064**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2,444,310,064**		**2,444,310,064**		**2,444,310,064**		**2,444,310,064**		**2,444,310,064**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					**1,500,000,000**		**2,000,000,000**		**2,500,000,000**		**3,000,000,000**		**3,500,000,000**
Meningkatnya Investasi pada Sektor Akomodasi, Makan, dan Minum	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	5	15		20		25		30		35	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					**350,000,000**		**400,000,000**		**450,000,000**		**500,000,000**		**550,000,000**
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Asing melalui Penguatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata Daerah	Persentase Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing	%	24,40	30		35		40		45		50	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					**150,000,000**		**160,000,000**		**170,000,000**		**180,000,000**		**190,000,000**
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	100	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					**21,556,989,996**		**22,034,715,727**		**20,039,547,332**		**20,673,766,438**		**21,139,861,446**
DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN					**10,010,532,911**		**10,361,018,642**		**9,238,365,447**		**9,744,850,057**		**10,082,955,880**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**4,868,175,595**		**4,868,175,595**		**4,868,175,595**		**4,868,175,595**		**4,868,175,595**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					**1,118,000,000**		**1,229,800,000**		**852,780,000**		**1,088,058,000**		**1,136,863,800**
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	9.175	10.441		11,159		11.943		12.799		13.733	
Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	312,09	331,10		341,03		351,26		361,80		372,65	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					**3,275,000,000**		**3,438,750,000**		**2,610,687,500**		**2,791,221,875**		**2,980,782,969**
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	9.175	10.441		11,159		11.943		12.799		13.733	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					**463,300,000**		**509,630,000**		**560,593,000**		**616,652,300**		**678,317,000**
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					**150,000,000**		**165,000,000**		**181,500,000**		**199,650,000**		**219,615,000**
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	%	100	100		100		100		100		100	
Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh dari Surveylance Penyakit dari 5 PHMS)	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					**136,057,316**		**149,663,047**		**164,629,352**		**181,092,287**		**199,201,516**
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	50	60		70		80		90		100	
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN					**11,546,457,085**		**11,673,697,085**		**10,801,181,885**		**10,928,916,381**		**11,056,905,566**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**8,324,457,085**		**8,324,457,085**		**8,324,457,085**		**8,324,457,085**		**8,324,457,085**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					**2,000,000,000**		**2,100,000,000**		**1,200,000,000**		**1,300,000,000**		**1,400,000,000**
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton	4,50	4,50		4,50		4,50		4,50		4,50	
Meningkatnya Produksi Tanaman Holtikultura	Peningkatan Produksi Hortikultura	Kwintal	10.281	11.335		11.902		12.497		13.122		13.778	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					**612,000,000**		**624,240,000**		**636,724,800**		**649,459,296**		**662,448,481**
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Manjadi LP2B	%	63	65		67		69		71		73	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					**50,000,000**		**55,000,000**		**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**
Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Persentase Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					**560,000,000**		**570,000,000**		**580,000,000**		**590,000,000**		**600,000,000**
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	50	52		54		56		58		60	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					**60.000.000**		**695.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					**60.000.000**		**695.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					**60.000.000**		**695.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**		**60.000.000**
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Persentase Pengawasan Kawasan Tahura	%	8	50		50		50		50		50	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					**1.787.653.731**		**1.828.406.805**		**1.069.774.941**		**1.111.770.440**		**1.154.405.849**
DINAS PERINDUSTERIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					**1.787.653.731**		**1.828.406.805**		**1.069.774.941**		**1.111.770.440**		**1.154.405.849**
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					**285.004.920**		**290.705.018**		**296.519.118**		**302.449.501**		**308.498.491**
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	25	27		29		31		33		35	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					**1.252.648.811**		**1.277.701.787**		**503.255.823**		**529.320.939**		**555.907.358**
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	19,73	21,73		23,73		25,73		27,73		29,73	
Terkendalinya Laju Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	%	3,29	3,10		3		3		3		3	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					**250.000.000**		**260.000.000**		**270.000.000**		**280.000.000**		**290.000.000**
Meningkatnya Kepatuhan dan Kelayakan Alat Ukur, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) sesuai Standar Metrologi Legal	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	28	47		56,50		66		75,50		85	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					**2.262.281.715**		**2.306.527.349**		**2.351.657.896**		**2.397.691.054**		**2.444.644.874**
DINAS PERINDUSTERIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH					**2.262.281.715**		**2.306.527.349**		**2.351.657.896**		**2.397.691.054**		**2.444.644.874**
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					**137.861.883**		**140.619.120**		**143.431.503**		**146.300.133**		**149.226.135**
Meningkatnya Kualitas Industri Kerajinan dan Pengolahan Skala Rumah Tangga, Kecil, dan Menengah	Jumlah Kelompok Pengrajin dan Unit Usaha Industri Pengolahan Skala Rumah Tangga, Kecil, dan Menengah yang Aktif dan Dibina	Kelompok	14,45	16,45		18,45		20,45		22,45		24,45	
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Kabupaten	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB	%	1,34	1,39		1,41		1,44		1,46		1,49	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					**2.074.419.832**		**2.115.908.229**		**2.158.226.393**		**2.201.390.921**		**2.245.418.739**
Meningkatnya Realisasi Investasi pada Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**
Meningkatnya Ketersediaan dan Aksesibilitas Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	70	100		100		100		100		100	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					**560.000.000**		**590.000.000**		**620.000.000**		**650.000.000**		**680.000.000**
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					**560.000.000**		**590.000.000**		**620.000.000**		**650.000.000**		**680.000.000**
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					**200.000.000**		**210.000.000**		**220.000.000**		**230.000.000**		**240.000.000**
Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan untuk Pembangunan dan Pengembangan	%	58,45	59,45		59,95		60,45		60,95		61,45	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					**160.000.000**		**170.000.000**		**180.000.000**		**190.000.000**		**200.000.000**
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	%	58,45	59,45		59,95		60,45		60,95		61,45	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					**200.000.000**		**210.000.000**		**220.000.000**		**230.000.000**		**240.000.000**
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigrasi dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	%	58,45	59,45		59,95		60,45		60,95		61,45	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					**41,032,355,524**		**41,582,355,524**		**42,132,355,524**		**42,682,355,524**		**43,232,355,524**
SEKRETARIAT DAERAH					**23,783,872,373**		**24,083,872,373**		**24,383,872,373**		**24,683,872,373**		**24,983,872,373**
SEKRETARIAT DAERAH					**23,783,872,373**		**24,083,872,373**		**24,383,872,373**		**24,683,872,373**		**24,983,872,373**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**18,533,872,373**		**18,533,872,373**		**18,533,872,373**		**18,533,872,373**		**18,533,872,373**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					**3,000,000,000**		**3,150,000,000**		**3,300,000,000**		**3,450,000,000**		**3,600,000,000**
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Indikator Kinerja Terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	73	95		95		95		95		95	
Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Di Implementasikan	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Efektivitas Sistem Kerja dalam Mendukung Penyederhanaan Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Nilai	1	2		2,5		3		3,5		4	
Meningkatnya Pemanfaatan Kerja Sama Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Capaian Pelayanan Dasar Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	87,83	92		94		96		98		100	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Hukum yang Adil, Transparan, dan Akuntabel	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86,82	89,54		90,90		92,26		93,62		95,31	
Meningkatnya Kualitas Perumusan dan Implementasi Kebijakan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	0	75 (Baik)		80 (Sangat Baik)		90 (Sangat Baik)		100 (Unggul)		100 (Unggul)	
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik tentang Kegiatan dan Kebijakan Pimpinan Daerah	Persentase Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Dipublikasikan	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Kualitas dan Kepatuhan Unit Pelayanan Publik terhadap Standar Pelayanan	Persentase Unit Pelayanan Publik yang Memenuhi Standar Pelayanan	%	36	60		70		80		90		100	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					**2,250,000,000**		**2,400,000,000**		**2,550,000,000**		**2,700,000,000**		**2,850,000,000**
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang DiImplementasikan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Terkendalinya Laju Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	%	3,29	3,10		3		3		3		3	
Meningkatnya Peran BUMD dalam Pendapatan Daerah dan Perekonomian Masyarakat Simuelue	Tingkat Kontribusi BUMD Terhadap PAD	%	6,12	10		12		14		16		20	
Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program Strategis Daerah	Tingkat Realisasi Program Strategis Daerah	%	89,6	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Transparan, Akuntabel, dan Bebas dari Praktik Korupsi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	48,37	70		78		85		91		95	
SEKRETARIAT DPRD					**17,248,483,151**		**17,498,483,151**		**17,748,483,151**		**17,998,483,151**		**18,248,483,151**
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN					**17,248,483,151**		**17,498,483,151**		**17,748,483,151**		**17,998,483,151**		**18,248,483,151**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**12.248.483.151**		**12.248.483.151**		**12.248.483.151**		**12.248.483.151**		**12.248.483.151**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					**5.000.000.000**		**5.250.000.000**		**5.500.000.000**		**5.750.000.000**		**6.000.000.000**
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan dan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Qanun APB Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat		Tepat		Tepat		Tepat		Tepat	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Ketepatan Rancngan Qanun pada Tahun N	Persentase Penetapan Rancangan Qanun Tahun N	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%	100	100		100		100		100		100	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**199.953.350.748**		**200.750.765.840**		**201.549.690.905**		**202.400.128.742**		**203.252.082.147**
PERENCANAAN					**9.227.512.000**		**9.427.512.000**		**9.627.512.000**		**9.827.512.000**		**10.027.512.000**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN DAERAH					**9.227.512.000**		**9.427.512.000**		**9.627.512.000**		**9.827.512.000**		**10.027.512.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**6.127.512.000**		**6.127.512.000**		**6.127.512.000**		**6.127.512.000**		**6.127.512.000**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					**1,200,000,000**		**1,300,000,000**		**1,400,000,000**		**1,500,000,000**		**1,600,000,000**
Meningkatnya Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Prioritas Nasional melalui Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	%	95	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Terhadap Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah	Persentase Keselarasan RPJMK dengan RKPD	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Konsistensi dan Keterpaduan Antara Renstra SKPK dan RPJMK	Persentase Keselarasan RPJMK dengan Renstra SKPK	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					**1.900.000.000**		**2.000.000.000**		**2.100.000.000**		**2.200.000.000**		**2.300.000.000**
Meningkatnya Konsistensi Renja SKPK dengan RKPD	Persentase Keselarasan RKPK dengan Renja SKPK	%	100	100		100		100		100		100	
KEUANGAN					**183.998.894.411**		**184.411.309.503**		**184.825.234.568**		**185.240.672.405**		**185.657.625.810**
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					**183.998.894.411**		**184.411.309.503**		**184.825.234.568**		**185.240.672.405**		**185.657.625.810**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**19.909.396.907**		**19.909.396.907**		**19.909.396.907**		**19.909.396.907**		**19.909.396.907**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					**163.189.497.504**		**163.551.912.596**		**163.915.837.661**		**164.281.275.498**		**164.648.228.903**
Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penganggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Kepatuhan dan Akurasi Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Standar	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Sesuai Standar	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Ketepatan Penyaluran Belanja Transfer dan Bantuan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Transfer/Bantuan Keuangan	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Efisiensi dan Ketepatan Pengalokasian Belanja Pegawai melalui TKD	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD												
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Anggaran Daerah melalui Penurunan SILPA	Persentase Penurunan SILPA												
Meningkatnya Alokasi Belanja Infrastruktur untuk Mendukung Pelayanan Publik Daerah	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik												

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					**450,000,000**		**475,000,000**		**500,000,000**		**525,000,000**		**550,000,000**
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Aset Tetap Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					**450.000.000**		**475.000.000**		**500.000.000**		**525.000.000**		**550.000.000**
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9,7	11,7		12,2		13,7		14,2		15,7	
KEPEGAWAIAN					**6,226,944,337**		**6,376,944,337**		**6,526,944,337**		**6,726,944,337**		**6,926,944,337**
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**6,226,944,337**		**6,376,944,337**		**6,526,944,337**		**6,726,944,337**		**6,926,944,337**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,726,944,337**		**3,726,944,337**		**3,726,944,337**		**3,726,944,337**		**3,726,944,337**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					**2,500,000,000**		**2,650,000,000**		**2,800,000,000**		**3,000,000,000**		**3,200,000,000**
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	%	70	90		95		100		100		100	
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya PNS dengan Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	Persentase PNS dengan Pendidikan Tinggi (tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	70	75		78		82		86		90	
Terciptanya pejabat ASN yang kompeten, profesional, dan siap memimpin organisasi pemerintahan secara efektif.	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	54	65		70		75		80		85	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					**100.000.000**		**110.000.000**		**120.000.000**		**130.000.000**		**140.000.000**
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**100.000.000**		**110.000.000**		**120.000.000**		**130.000.000**		**140.000.000**
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**100.000.000**		**110.000.000**		**120.000.000**		**130.000.000**		**140.000.000**
Meningkatnya Kompetensi Dasar dan Fungsional ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	10	20		25		30		35		40	
Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu dan Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	1	10		15		20		25		30	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					**400.000.000**		**425.000.000**		**450.000.000**		**475.000.000**		**500.000.000**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNGAN DAERAH					**400.000.000**		**425.000.000**		**450.000.000**		**475.000.000**		**500.000.000**
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					400.000.000		425.000.000		450.000.000		475.000.000		500.000.000
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah	%	20	22,22		26,67		31,11		35,56		40,69	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Penerapan Kebijakan Inovasi Daerah dalam Mendukung Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	27,78	38,89		55,56		72,22		88,89		100	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					**8,068,792,280**		**8,218,792,280**		**8,268,792,280**		**8,318,792,280**		**8,368,792,280**
INSPEKTORAT DAERAH					**8,068,792,280**		**8,218,792,280**		**8,268,792,280**		**8,318,792,280**		**8,368,792,280**
INSPEKTORAT					**8,068,792,280**		**8,218,792,280**		**8,268,792,280**		**8,318,792,280**		**8,368,792,280**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**5,978,152,248**		**6,452,652,248**		**6,127,652,248**		**6,177,652,248**		**6,227,652,248**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					**1,690,640,032**		**1,431,140,032**		**1,716,140,032**		**1,716,140,032**		**1,716,140,032**
Menurunnya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Tindak Lanjut Rekomondasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	66,14	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Opini Audit yang Lebih Baik	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					**400,000,000**		**335,000,000**		**425,000,000**		**425,000,000**		**425,000,000**
Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Mendukung Pengawasan yang Efektif dan Profesional	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3		4		4		4		4	
Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah melalui Penguatan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3		4		4		5		5	
Meningkatnya Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3	3		4		4		5		5	
Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	%	0	40		60		65		70		75	
Meningkatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Survei Penilaian Integritas (SPI)	%	74,15	78		78		80		80		80	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
UNSUR KEWILAYAHAN					**29,030,342,834**		**31,878,670,809**		**29,976,342,834**		**30,316,342,834**		**30,921,342,834**
KECAMATAN					**29,030,342,834**		**31,878,670,809**		**29,976,342,834**		**30,316,342,834**		**30,921,342,834**
KANTOR CAMAT TEUPAH SELATAN					**3,421,956,701**		**5,854,284,676**		**3,531,956,701**		**3,519,456,701**		**3,641,956,701**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2,826,956,701**		**2,826,956,701**		**2,826,956,701**		**2,826,956,701**		**2,826,956,701**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**135,000,000**		**2,522,327,975**		**155,000,000**		**165,000,000**		**175,000,000**
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**300,000,000**		**325,000,000**		**350,000,000**		**375,000,000**		**400,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa yang Aktif dan Dibina Oleh Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**		**7,500,000**		**80,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan dan Terselesaikan Ditingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**50,000,000**		**60,000,000**		**70,000,000**		**80,000,000**		**90,000,000**
Meningkatkan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Oleh Camat dengan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**50,000,000**		**55,000,000**		**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**
Meningkatkan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100	
KANTOR CAMAT SIMEULUE TIMUR					**2,532,690,308**		**2,587,690,308**		**2,642,690,308**		**2,630,190,308**		**2,747,690,308**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**1,942,690,308**		**1,942,690,308**		**1,942,690,308**		**1,942,690,308**		**1,942,690,308**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					135,000,000		145,000,000		155,000,000		165,000,000		170,000,000
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**300,000,000**		**325,000,000**		**350,000,000**		**375,000,000**		**400,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa yang Aktif dan Dibina Oleh Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**		**7,500,000**		**80,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan dan Terselesaikan Ditingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**50,000,000**		**60,000,000**		**70,000,000**		**80,000,000**		**90,000,000**
Meningkatkan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Oleh Camat dengan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**45,000,000**		**50,000,000**		**55,000,000**		**60,000,000**		**65,000,000**
Meningkatkan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
KANTOR CAMAT TEUPAH TENGAH					**2,549,739,994**		**2,599,739,994**		**2,649,739,994**		**2,699,739,994**		**2,749,739,994**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2,049,739,994**		**2,049,739,994**		**2,049,739,994**		**2,049,739,994**		**2,049,739,994**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**110,000,000**		**120,000,000**		**130,000,000**		**140,000,000**		**150,000,000**
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**275,000,000**		**300,000,000**		**325,000,000**		**350,000,000**		**375,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa yang Aktif dan Dibina Oleh Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**25,000,000**		**30,000,000**		**35,000,000**		**40,000,000**		**45,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan dan Terselesaikan Ditingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**		**75,000,000**		**80,000,000**
Meningkatkan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Oleh Camat dengan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**30,000,000**		**35,000,000**		**40,000,000**		**45,000,000**		**50,000,000**
Meningkatkan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100	
KANTOR CAMAT TEUPAH BARAT					**3,790,566,004**		**3,845,566,004**		**3,900,566,004**		**3,955,566,004**		**4,010,566,004**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,200,566,004**		**3,200,566,004**		**3,200,566,004**		**3,200,566,004**		**3,200,566,004**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**135,000,000**		**145,000,000**		**155,000,000**		**165,000,000**		**175,000,000**
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**300,000,000**		**325,000,000**		**350,000,000**		**375,000,000**		**400,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa yang Aktif dan Dibina Oleh Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**		**75,000,000**		**80,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan dan Terselesaikan Ditingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**50,000,000**		**60,000,000**		**70,000,000**		**80,000,000**		**90,000,000**
Meningkatkan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Oleh Camat dengan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**45,000,000**		**50,000,000**		**55,000,000**		**60,000,000**		**65,000,000**
Meningkatkan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
KANTOR CAMAT TELUK DALAM					**2,543,620,195**		**2,589,620,195**		**2,639,620,195**		**2,689,620,195**		**2,739,620,195**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2,039,620,195**		**2,039,620,195**		**2,039,620,195**		**2,039,620,195**		**2,039,620,195**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**110,000,000**		**120,000,000**		**130,000,000**		**140,000,000**		**150,000,000**
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**279,000,000**		**300,000,000**		**325,000,000**		**350,000,000**		**375,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa yang Aktif dan Dibina Oleh Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**25,000,000**		**30,000,000**		**35,000,000**		**40,000,000**		**45,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan dan Terselesaikan Ditingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**		**75,000,000**		**80,000,000**
Meningkatkan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Oleh Camat dengan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**30,000,000**		**35,000,000**		**40,000,000**		**45,000,000**		**50,000,000**
Meningkatkan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100	
KANTOR CAMAT SIMEULUE TENGAH					**2,549,739,994**		**2,599,739,994**		**2,649,739,994**		**2,699,739,994**		**2,749,739,994**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2,049,739,994**		**2,049,739,994**		**2,049,739,994**		**2,049,739,994**		**2,049,739,994**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**110,000,000**		**120,000,000**		**130,000,000**		**140,000,000**		**150,000,000**
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**275,000,000**		**300,000,000**		**325,000,000**		**350,000,000**		**375,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa yang Aktif dan Dibina Oleh Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**25,000,000**		**30,000,000**		**35,000,000**		**40,000,000**		**45,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan dan Terselesaikan Ditingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**		**75,000,000**		**80,000,000**
Meningkatkan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Oleh Camat dengan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**30,000,000**		**35,000,000**		**40,000,000**		**45,000,000**		**50,000,000**
Meningkatkan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
KANTOR CAMAT SIMEULUE CUT					**2,051,121,503**		**2,101,121,503**		**2,151,121,503**		**2,201,121,503**		**2,251,121,503**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**1,551,121,503**		**1,551,121,503**		**1,551,121,503**		**1,551,121,503**		**1,551,121,503**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**110,000,000**		**120,000,000**		**130,000,000**		**140,000,000**		**150,000,000**
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**275,000,000**		**300,000,000**		**325,000,000**		**350,000,000**		**375,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa yang Aktif dan Dibina Oleh Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**25,000,000**		**30,000,000**		**35,000,000**		**40,000,000**		**45,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan dan Terselesaikan Ditingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**		**75,000,000**		**80,000,000**
Meningkatkan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Oleh Camat dengan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**30,000,000**		**35,000,000**		**40,000,000**		**45,000,000**		**50,000,000**
Meningkatkan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100	
KANTOR CAMAT SALANG					**3,242,094,535**		**3,297,094,535**		**3,352,094,535**		**3,407,094,535**		**3,462,094,535**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2,652,094,535**		**2,652,094,535**		**2,652,094,535**		**2,652,094,535**		**2,652,094,535**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**135,000,000**		**145,000,000**		**155,000,000**		**165,000,000**		**175,000,000**
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**300,000,000**		**325,000,000**		**350,000,000**		**375,000,000**		**400,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa yang Aktif dan Dibina Oleh Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**		**75,000,000**		**80,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan dan Terselesaikan Ditingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**50,000,000**		**60,000,000**		**70,000,000**		**80,000,000**		**90,000,000**
Meningkatkan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Oleh Camat dengan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**45,000,000**		**50,000,000**		**55,000,000**		**60,000,000**		**65,000,000**
Meningkatkan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
KANTOR CAMAT SIMEULUE BARAT					**3,665,886,926**		**3,720,886,926**		**3,775,886,926**		**3,830,886,926**		**3,885,886,926**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,075,886,926**		**3,075,886,926**		**3,075,886,926**		**3,075,886,926**		**3,075,886,926**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**135,000,000**		**145,000,000**		**155,000,000**		**165,000,000**		**175,000,000**
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**300,000,000**		**325,000,000**		**350,000,000**		**375,000,000**		**400,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa yang Aktif dan Dibina Oleh Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**60,000,000**		**65,000,000**		**70,000,000**		**75,000,000**		**80,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan dan Terselesaikan Ditingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**50,000,000**		**60,000,000**		**70,000,000**		**80,000,000**		**90,000,000**
Meningkatkan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Oleh Camat dengan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**45,000,000**		**50,000,000**		**55,000,000**		**60,000,000**		**65,000,000**
Meningkatkan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100	
KANTOR CAMAT ALAFAN					**2,682,926,674**		**2,682,926,674**		**2,682,926,674**		**2,682,926,674**		**2,682,926,674**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2,182,926,674**		**2,182,926,674**		**2,182,926,674**		**2,182,926,674**		**2,182,926,674**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					**110,000,000**		**110,000,000**		**110,000,000**		**110,000,000**		**110,000,000**
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**275,000,000**		**275,000,000**		**275,000,000**		**275,000,000**		**275,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa yang Aktif dan Dibina Oleh Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**		**25,000,000**
Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan dan Desa	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan dan Terselesaikan Ditingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					**60,000,000**		**60,000,000**		**60,000,000**		**60,000,000**		**60,000,000**
Meningkatkan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkoordinasi di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Oleh Camat dengan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					**30,000,000**		**30,000,000**		**30,000,000**		**30,000,000**		**30,000,000**
Meningkatkan Ketertiban dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					**5,219,931,347**		**5,429,931,347**		**5,639,931,347**		**5,849,931,347**		**6,059,931,347**
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**5,219,931,347**		**5,429,931,347**		**5,639,931,347**		**5,849,931,347**		**6,059,931,347**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					**5,219,931,347**		**5,429,931,347**		**5,639,931,347**		**5,849,931,347**		**6,059,931,347**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2,819,931,347**		**2,819,931,347**		**2,819,931,347**		**2,819,931,347**		**2,819,931,347**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					**600,000,000**		**650,000,000**		**700,000,000**		**750,000,000**		**800,000,000**
Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Masayarakat	Persentase Masyarakat yang Menguat Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya	%	0,3	1		1.3		1.6		2		2.5	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					**1,100,000,000**		**1,200,000,000**		**1,300,000,000**		**1,400,000,000**		**1,500,000,000**
Meningkatnya Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Meningkat Perannya dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	100	100		100		100		100		100	
Meningkatnya Pembinaan dan Keteraturan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang Dibinia dan Tertib	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA					**150,000,000**		**160,000,000**		**170,000,000**		**180,000,000**		**190,000,000**
Meningkatnya Pemahaman dan Partisipasi Masyarakat dalam Ketahanan Sosial, Budaya, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, serta Kerukunan Umat Beragama	Persentase Masyarakat yang Meningkat Pemahamannya Tentang Ketahanan Sosial, Budaya, Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama	%	0,1	0,5		1		1.4		1.7		2	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					**550,000,000**		**600,000,000**		**650,000,000**		**700,000,000**		**750,000,000**
Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Penyelesaian Konflik Sosial di Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100		100		100		100		100	
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN					**32,430,604,968**		**33,220,505,723**		**30,270,505,723**		**31,197,401,580**		**31,668,142,229**
KEKHUSUSAN ACEH					**32,430,604,968**		**33,220,505,723**		**30,270,505,723**		**31,197,401,580**		**31,668,142,229**
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA					**2,240,889,691**		**2,290,889,691**		**2,340,889,691**		**2,390,889,691**		**2,440,889,691**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**1,740,889,691**		**1,740,889,691**		**1,740,889,691**		**1,740,889,691**		**1,740,889,691**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, PROGRAM, DAN OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)	TARGET	PAGU (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)					**500,000,000**		**550,000,000**		**600,000,000**		**650,000,000**		**700,000,000**
Meningkatnya Peran Lembaga Keagamaan dalam Penyikapan Isu Sosial dan Kebijakan Publik	Jumlah Fatwa dan atau Rekomendasi yang Dikeluarkan Terkait Isu Sosial, Keagamaan dan Kebijakan Publik	Fatwa	5	6		7		8		9		10	
SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN					**15,538,349,454**		**15,538,349,454**		**15,538,349,454**		**15,538,349,454**		**15,538,349,454**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**3,853,349,454**		**3,853,349,454**		**3,853,349,454**		**3,853,349,454**		**3,853,349,454**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM BAITUL MAL					**11,685,000,000**		**11,685,000,000**		**11,685,000,000**		**11,685,000,000**		**11,685,000,000**
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Ziswaf	Persentase ZISWAF yang Dikumpulkan dan Disalurkan	%	100	100		100		100		100		100	
DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH					**14,651,365,823**		**15,391,266,578**		**12,391,266,578**		**13,268,162,435**		**13,688,903,084**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**10,798,016,369**		**11,537,917,124**		**8,537,917,124**		**9,414,812,981**		**9,835,553,630**
Meningkatnya Kelancaran Layanan Administrasi untuk Mendukung Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah	Tingkat Kelancaran Layanan Administrasi dan Penunjang Urusan Perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH					**3,853,349,454**		**3,853,349,454**		**3,853,349,454**		**3,853,349,454**		**3,853,349,454**
Adanya Pusat Dakwah sebagai Wadah Edukasi Keislaman	Persentase Pusat Dakwah yang Aktif	%	**77**	**85**		90		95		100		100	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tolok ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan fungsi pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Evaluasi diarahkan untuk menilai pencapaian visi dan misi kepala daerah, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, kualitas layanan publik, dan daya saing daerah.

Tolok ukur pertama adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan secara selektif untuk mengukur langsung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK. IKU bersifat fokus, strategis, serta relevan dengan misi pembangunan daerah, sehingga berfungsi sebagai instrumen utama evaluasi kinerja. Rinciannya disajikan pada Tabel 4.2.

Lebih lanjut, Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan secara lebih komprehensif. IKD mencakup efektivitas urusan pemerintahan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, kualitas pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap regulasi. Di dalam IKD juga terintegrasi Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu indikator teknis yang menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing urusan secara lebih operasional. Dengan demikian, IKD tidak hanya merefleksikan hasil jangka pendek, tetapi juga arah pencapaian pembangunan jangka menengah secara agregatif. Indikator Kinerja Daerah (IKD) ini telah mengintegrasikan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang termaktub dalam RPJPK Simeulue Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMK Simeulue Tahun 2025-2029. Daftar lengkap IKD dan IKK dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI EKSISTING 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,43	4,77	5,11	5,45	5,79	6,13	6,47
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,01	72,18	73,41	74,64	75,87	77,10	78,33
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,50	5,43	5,36	5,29	5,22	5,15	5,08
4	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	31,94	33,846	35,747	37,649	39,550	41,452	43,353
5	Rasio Gini	Indeks	0,259	0,250	0,241	0,231	0,222	0,213	0,204
6	Tingkat Kemiskinan	%	17,69	17,26	16,83	16,40	15,97	15,54	15,11
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,53	14,74	14,95	15,16	15,37	15,58	15,79
8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	10,03	10,16	10,30	10,44	10,57	10,71
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	45,43	47,92	50,41	52,90	55,39	57,88	60,37
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,433	0,396	0,360	0,323	0,286	0,249	0,213
11	Umur Harapan Hidup	Tahun	69,69	71,16	72,63	74,10	75,57	77,04	78,51
12	Prevalensi Balita Stunting	%	25,50	22,60	18,70	14,80	10,90	7,00	4,10
13	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,82	84,03	84,20	84,37	84,55	84,72	84,98

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI EKSISTING 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
15	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	162	161	160	159	158	157	156
16	Rasio Konektivitas	%	72,96	75	77,25	79,50	81,75	84	86,25
17	Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Juta Rupiah	N/A	40.487	42.512	46.763	53.777	64.533	80.666
18	Indeks Desa	Indeks	0,6695	0,6850	0,7005	0,7161	0,7316	0,7471	0,7626
19	Persentase Desa yang Mengalami Peningkatan Status	%	7	15	25	35	45	65	75
20	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB	%	1,74	1,86	1,98	2,11	2,23	2,35	2,48
21	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	22.990	24.392	25.794	27.323	28.945	30.664	32.486
22	Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisata	%	10	20	30	40	50	60	70
23	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	59,35 (CC)	62 (B)	66 (B)	69 (B)	73 (BB)	76 (BB)	79 (BB)
24	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,86	2,10	2,35	2,60	2,80	3,10	3,30
26	Nilai LPPD	Kategori	Rendah	42 (Rendah	45 (Rendah)	49 (Rendah)	53 (Sedang)	57 (Sedang)	62 (Sedang)
27	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.81 (B)	4.00 (B)	4,18 (A-)	4,31 (A)	4,50 (A)	5,00 (A)	5,00 (A)
28	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	50,03 (CC)	53,50 (CC)	57 (CC)	61 (B)	65 (B)	69,50 (B)	74 (BB)

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	89,30	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	%	7,42	7,20	7,00	6,80	6,60	6,40	6,20
3	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/kapita	1.173	1.220	1.270	1.320	1.370	1.420	1.470
4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	%	77,77	78,97	80,17	82,57	84,97	87,37	89,77
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,82	84,03	84,20	84,37	84,55	84,72	84,98
6	Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	%	76,51	77,71	78,91	81,31	83,71	86,11	89,31
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan *(proxy: Persentase Penanganan Sampah)*	%	39,30	43,23	47,16	51,09	55,02	58,95	62,88
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah *(proxy: Persentase Penanganan Sampah)*	%	39,30	43,23	47,16	51,09	55,02	58,95	62,88

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
9	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	162	161	160	159	158	157	156
10	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,56	2,18	2,80	3,42	4,04	4,66	5,27
12	Rasio Penduduk	%	76,77	75,00	73,00	71,00	69,00	67,00	65,00
13	Kepadatan Penduduk	Orang/km²	89	90	92	93	95	96	98
14	Rasio Konektivitas	%	72,96	75	77,25	79,50	81,75	84	86,25
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,43	4,77	5,11	5,45	5,79	6,13	6,47
2	Tingkat Kemiskinan	%	17,69	17,26	16,83	16,40	15,97	15,54	15,11
3	PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rupiah	31,94	33,846	35,747	37,649	39,550	41,452	43,353
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,50	5,43	5,36	5,29	5,22	5,15	5,08
5	Rasio Gini	Indeks	0,259	0,250	0,241	0,231	0,222	0,213	0,204
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,01	72,18	73,41	74,64	75,87	77,10	78,33
7	Umur Harapan Hidup	Tahun	69,69	71,16	72,63	74,10	75,57	77,04	78,51

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	Prevalensi Balita Stunting	%	25,50	22,60	18,70	14,80	10,90	7,00	4,10
9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	10,03	10,16	10,30	10,44	10,57	10,71
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,53	14,74	14,95	15,16	15,37	15,58	15,79
11	Angka Literasi/Numerasi (SD & SMP)	Indeks	53,6	56,1	58,6	61,1	63,6	66,1	68,6
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	45,43	47,92	50,41	52,90	55,39	57,88	60,37
13	Indeks Literasi Digital	Indeks	38,8	41,0	43,2	45,4	47,6	49,8	52,0
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	29,13	23,77	33,50	40,50	47,77	55,24	64,34
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	83	84	85	86	87	88	89
16	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,3	63,1	63,9	64,6	65,4	66,2	67,0
17	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Ibangga)	Indeks	70	72	74	76	78	80	82
18	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,433	0,396	0,360	0,323	0,286	0,249	0,213
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	79,8	80,2	80,7	81,1	81,6	82,0	82,5
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	60	62	64	66	68	70	72
21	Indeks Pembangunan Syariah	Indeks	81,8	82	83	84	85	86	87
22	Angka Kesakitan Penduduk	‰	11,9	10,8	9,9	9,1	8,3	7,3	6,2

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Angka Ketergantungan	%	53,20	52,80	52,40	52,00	51,60	51,20	50,80
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB	%	1,34	1,36	1,39	1,41	1,44	1,46	1,49
3	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB ADHB	%	1,74	1,86	1,98	2,11	2,23	2,35	2,48
4	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB ADHB	%	38,06	13,41	13,57	13,72	13,87	14,03	14,18
5	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	38,06	38,80	39,54	40,27	41,01	41,74	42,48
6	Rasio Kewirausahaan	%	1,5	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,08	71,26	71,44	71,61	71,79	71,97	72,15
8	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	38,81	41,00	43,20	45,40	47,60	49,80	52,00
9	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	46,55	50,42	55,32	60,56	65,67	70,95	75,23
10	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	2,9	6	10	15	22	30	40
11	Tingkat Inflasi	%	3,29	3,20	3,10	3,00	3,00	3,00	3,00
12	Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Juta Rupiah	N/A	40.487	42.512	46.763	53.777	64.533	80.666

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86,82	88,45	89,54	90,90	92,26	93,62	95,31
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,86	2,10	2,35	2,60	2,80	3,10	3,30
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.81 (B)	4.00 (B)	4,18 (A-)	4,31 (A)	4,50 (A)	5,00 (A)	5,00 (A)
4	Persentase Penegakan Qanun Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	59,35 (CC)	62 (B)	66 (B)	69 (B)	73 (BB)	76 (BB)	79 (BB)
6	Nilai LPPD	Kategori	Rendah	42 (Rendah	45 (Rendah)	49 (Rendah)	53 (Sedang)	57 (Sedang)	62 (Sedang)
7	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	50,03 (CC)	53,50 (CC)	57 (CC)	61 (B)	65 (B)	69,50 (B)	74 (BB)
9	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	65,07	67,30	70,50	73,30	78,40	81,00	84,10
10	Indeks Sistem Merit	Indeks	121,00	130,00	140,00	150,00	160,00	170,00	180,00
11	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	%	82,91	84,00	85,50	87,00	88,40	89,50	90,30
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,15	3,45	3,75	4,05	4,35	4,65	5,00

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
A	**Pendidikan**								
1	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang (APS) Usia 5-6 (PAUD)	%	83,08	86,03	88,98	91,93	94,48	97,03	99,58
2	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang (APS) Usia 7-15 (SD/SMP)	%	99,61	99,68	99,75	99,82	99,89	99,96	100
3	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang (APS) 7-18 (Kesetaraan)	%	8,42	9,18	9,94	10,71	11,47	12,23	13
4	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	53,57	56,07	58,57	61,07	63,57	66,07	68,57
5	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	61,09	62,19	63,29	64,39	65,49	66,59	67,69
6	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	49,54	52,44	55,34	58,24	61,14	64,04	66,94
7	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	57,50	59,00	60,50	62,00	63,50	65,00	66,50
8	Iklim Keamanan SD	Nilai	60,05	62,55	65,05	67,55	70,05	72,55	75,05
9	Iklim Keamanan SMP	Nilai	59,04	61,44	63,84	66,24	68,64	71,04	73,44
10	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	78,20	79,10	80,00	80,90	81,80	82,70	83,60
11	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	71,36	72,86	74,36	75,86	77,36	78,86	80,36

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
12	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	68,65	69,65	70,65	71,65	72,65	73,65	74,65
13	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00
14	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	%	43,80	64,37	65,12	65,87	66,62	67,37	68,12
15	Proporsi Guru Pendidikan Dasar dengan kualifikasi S1/D4	%	80,91	81,53	83,71	85,14	86,60	88,08	89,58
B	**Kesehatan**								
1	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	5	0	0	0	0	0	0
2	Prevalensi Balita Stunting	%	25,50	22,60	18,70	14,80	10,90	7,00	4,10
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kabupaten	%	45	46	47	49	51	53	55
2	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	42,10	50	60	70	80	90	100
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	%	77,77	78,78	80,17	82,57	84,97	87,37	89,77
4	Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	%	76,51	77,45	78,91	81,31	83,71	86,11	89,31
5	Persentase Kepatuhan PBG dan SLF Kabupaten	%	75	80	85	90	95	100	100
6	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	47,58	48,60	49,62	51,66	53,73	55,74	57,78
7	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Di Daerah Kabupaten	%	55,56	100	100	100	100	100	100
D	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**								
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	0	100	100	100	100	100	10

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	46,55	50,42	55,32	60,56	65,67	70,95	75,23
4	Persentase Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100
E	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**								
1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang Dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Qanun dan Perbup yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP dan WH	Orang	2	3	6	7	8	9	10
4	Presentase SOP Yang Tersedia dalam Penegakan Qanun dan Perbup serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	25	35	50	75	100	100	100
5	Persentase Jumlah Sarana Prasarana Minimal yang Digunakan sebagai Penunjang dalam Penegakan Qanun dan Perbup serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	%	20	30	50	60	75	90	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
6	Persentase Jumlah Anggota Satpol PP dan WH yang Telah Mengikuti Diklat Dasar	%	80	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	50	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
F	**Sosial**								
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	60,8	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	56,4	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	52,5	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Sarana Prasarana yang Disediakan Sesuai Standar untuk Pelayanan Sosial Di Luar Panti	%	47,4	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pekerja Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Di Luar Panti Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial, dan Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	Persentase Sarana Prasarana Bagi Korban Bencana Kabupaten yang Disediakan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar HIV/AIDS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Pesentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	8,58	11,79	15	20	25	30	35
13	Pesentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	%	8,58	11,79	15	20	25	30	35
14	Persentase Jumlah Pemutahiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan Selama Satu Tahun	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
G	**Tanaga Kerja**								
1	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	11,64	15	20	25	30	35	40
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Orang	41,38 (2022)	46,56	50,34	53,42	57,53	61,53	65,32
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB. LKS. Bipartit. Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	20	25	30	35	40	45	50
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	%	12	14	16	20	22	25	27
H	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	79,78	80,23	80,69	81,14	81,59	82,04	82,50
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	4,82	5,04	525	5,50	5,75	6,00	6.25
3	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**Pangan**								
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	%	59	65	70	75	80	85	90
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten	Nilai	68,4	70,4	72,4	73,4	74,4	75,4	76,4
3	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	%	45	42	40	35	30	25	20
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100
J	**Pertanahan**								
1	Luas Tanah Potensi TORA untuk Ditindaklanjuti Kegiatan Redistribusi Tanah dan Jumlah Potensi Subjek Penerima Manfaat yang Dapat Ditindaklanjuti dengan Penataan Akses melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun Anggaran	%	30	40	50	60	70	80	90
2	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	%	28,04	29,32	30,60	31,88	33,16	34,44	35,78
3	Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
K	**Lingkungan Hidup**								
1	Indek Kualitas Lingkugan Hidup (IKLH)	Indeks	79,82	84,03	84,20	84,37	84,55	84,72	84,98
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS)	Indeks	39,01	43,23	47,16	51,09	55,02	58,95	62,88
3	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan /atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan. Izin PPLH Dan PUU LH	%	77,77	81,39	85	90	95	100	100
L	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	73,60	86,80	100	100	100	100	100
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	62,24	81,12	100	100	100	100	100
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	94,85	97,42	100	100	100	100	100
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	47,69	56,35	65	75	85	95	100
6	Persentase Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	25	5,23	15,11	25	35	45	55	65

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
M	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	100	100	100	100
N	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Anak Per Perempuan	2,67	2,58	2,48	2,38	2,29	2,19	2,10
2	Angka prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Rate (mCPR)	%	62,61	64,84	67,07	69,30	71,53	73,76	80,32
3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	6,59	5,99	539	4,79	4,19	3,59	2,89
4	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Per 1.000 Perempuan	10	9,17	8,33	7,52	6,67	5,83	5,23
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	70	72	74	76	78	80	82

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
O	**Perhubungan**								
1	Konektivitas Kabupaten	%	72,96	75,42	77,25	79,50	81,75	84,53	86,25
2	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten	%	64,45	76,33	78,96	76,35	79,32	83,34	89,92
3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
P	**Komunikasi dan Informatika**								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominsa	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) Di Tingkat Kabupaten yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Q	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**								
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	50	55	60	70	80	90	10
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	1	1,5	2	3	4	5	6
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	1	1,5	2	3	4	5	6
R	**Penanaman Modal**								
1	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten	%	5	10	15	20	25	30	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	98,29	100	100	100	100	100	100
S	**Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Training dan Memperoleh Sertifikat	%	3,14	7	10	13	16	19	22
2	Persentase Atlet yang Berasal dari Kabupaten yang Masuk Pelatda Provinsi	%	30	60	100	100	100	100	100
T	**Statistik**								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,64	3,20	3,60	3,90	4,20	4,40	4,60
U	**Persandian**								
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
V	**Kebudayaan**								
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	55	60	65	70	75	80	90
2	Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan	%	55,54	65	75	85	100	100	100
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifkasi Profesi Dibidang Kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100	100
W	**Perpustakaan**								
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	N/A	7,205	7,407	7,510	7,702	7,815	8,000
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	45,43	47,92	50,41	52,90	55,39	57,88	60,37
X	**Kearsipan**								
1	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	26,52	36,08	45,64	55,20	64,76	74,32	83,88
Y	**Kelautan dan Perikanan**	%	5	10	15	20	25	30	35
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	22.898	24.292	25.686	27.207	28.819	30.528	32.339
2	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Ton	92,73	100,45	108,16	116,81	126,14	136,23	147,13

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Z	**Pariwisata**								
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,74	1,86	1,98	2,11	2,23	2,35	2,48
2	Persentase Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing	%	24,40	27,20	30	35	40	45	50
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	100	100	100	100	100	100	100
AA	**Pertanian**								
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Ton	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Kwintal	10.281	10.808	11.335	11.902	12.497	13.122	13.778
3	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	9.175	9.575	10.441	11,159	11.943	12.799	13.733
4	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	312,09	322,56	331,10	341,03	351,26	361,80	372,65
5	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh dari Surveylance Penyakit dari 5 PHMS)	%	100	100	100	100	100	100	100
AB	**Kehutanan**								
1	Persentase Pengelolaan Kawasan Tahura	%	34	40	45	50	55	60	65

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
AC	**Perdagangan**								
2	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapan nya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	28	37,50	47	56,50	66	75,50	85
AD	**Perindustrian**								
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB	%	1,34	1,36	1,39	1,41	1,44	1,46	1,49
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	%	98	100	100	100	100	100	100
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	70	85	100	100	100	100	100
AE	**Transmigrasi**								
1	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan untuk Pembangunan dan Pengembangan	%	58,45	58,95	59,45	59,95	60,45	60,95	61,45
2	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunannya	%	58,45	58,95	59,45	59,95	60,45	60,95	61,45
3	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	%	58,45	58,95	59,45	59,95	60,45	60,95	61,45

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
AF	**Sekretariat Daerah**								
1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	73	84	95	95	95	95	95
2	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Di Implementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Nilai	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
4	Efektivitas Kerja Sama Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	87,83	89,92	92	94	96	98	100
6	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86,82	88,18	89,54	90,90	92,26	93,62	95,31
7	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	n.a	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Unggul	Unggul
8	Persentase Publikasi Kegiatan Pimpinan Daerah yang Dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang DiImplementasikan	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Tingkat Inflasi	%	3,29	3,20	3,10	3	3	3	3

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
11	Tingkat Kontribusi BUMD Terhadap PAD	%	6,12	8,06	10	12	14	16	20
12	Tingkat Realisasi Program Strategis Daerah	%	89,6	94,80	100	100	100	100	100
13	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	48,37	59,19	70	78	85	91	95
AG	**Sekretariat DPRK**								
1	Ketepatan Penetapan Qanun APB Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan Rancangan Qanun Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100
AH	**Perencanaan**								
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	%	95	100	100	100	100	100	100
AI	**Keuangan**								
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	43,42	45,82	40,36	30	30	30	30
2	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	51	55	52,29	52,10	51,16	51,20	50,97

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Persentase Penurunan SILPA	%	13,26	5,94	2,86	1,35	1,32	1,21	1,1
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	7,77	8,47	9,05	9,05	8,75	8,74	8,74
5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	7,77	8,47	9,05	9,05	8,75	8,74	8,74
6	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9,7	10,70	11,7	12,2	13,7	14,2	15,7
AJ	**Kepegawaian**								
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	%	70	85	90	95	100	100	100
2	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase PNS dengan Pendidikan Tinggi (tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	70	72	75	78	82	86	90
4	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	54	60	65	70	75	80	85
AK	**Pendidikan dan Pelatihan**								
1	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	10	15	20	25	30	35	40
2	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	1	2	10	15	20	25	30

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
AL	**Penelitian dan Pengembangan**								
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah	%	20	21,11	22,22	26,67	31,11	35,56	40,69
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	27,78	33,34	38,89	55,56	72,22	88,89	100
AM	**Inspektorat Daerah**								
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	4	4	5	5
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	4	4	4	4
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3	3	3	4	4	4	4
5	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	66,14	75	100	100	100	100	100
AN	**Kecamatan Administrasi**								
1	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Desa yang Aktif dan Dibina Oleh Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan dan Terselesaikan Ditingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum yang Terkoordinasi Oleh Camat dengan Pemangku Kepentingan Di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Desa yang Tertib dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100	100
AO	**Kesatuan Bangsa dan Politik**								
1	Persentase Masyarakat yang Menguat Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya	%	0,30	0,65	1,00	1,30	1,60	2,00	2,50
2	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Meningkat Perannya dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang Dibina dan Tertib	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	Persentase Masyarakat yang Meningkat Pemahamannya Tentang Ketahanan Sosial, Budaya, Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama	%	0,10	0,30	0,50	1,00	1,40	1,70	2,00
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
AP	**Kekhususan Aceh**								
1	Jumlah Fatwa dan atau Rekomendasi yang Dikeluarkan Terkait Isu Sosial, Keagamaan dan Kebijakan Publik	Fatwa	5	5	6	7	8	9	10
2	Persentase ZISWAF yang dikumpulkan dan disalurkan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pusat Dakwah yang Aktif	%	77	80	85	90	95	100	100
4	Persentase Desa yang Dibina dan Melestarikan Adat Aceh Sesuai dengan Norma, Nilai, dan Kelembagaan Adat yang Berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Islami	%	14,44	20	25	30	35	40	40

PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE



BAB V
PENUTUP



BAB V

PENUTUP

RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun secara sistematis, terukur, dan terpadu untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam arah kebijakan, strategi pembangunan, serta indikator kinerja pembangunan yang akan dicapai selama periode perencanaan.

RPJMK ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta prosedur penyusunan dan perubahan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Sebagai dokumen utama perencanaan pembangunan jangka menengah, RPJMK ini memuat berbagai aspek penting, meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, gambaran kondisi umum daerah, isu-isu strategis pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan, arah kebijakan, kerangka pendanaan, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja pembangunan.

RPJMK ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) Simeulue dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Simeulue, serta sebagai alat integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Dengan mengusung visi *"MEWUJUDKAN SIMEULUE YANG BERMARTABAT DAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BIRU TAHUN 2030"*, RPJMK ini diharapkan mampu mengarahkan pembangunan daerah secara lebih fokus, berdampak, dan adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan RPJMK ini sangat ditentukan oleh komitmen, kolaborasi, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, serta lembaga pemerintah di semua tingkatan.

5.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjamin kesinambungan arah pembangunan daerah, pedoman transisi disusun sebagai kerangka strategis untuk menjembatani masa peralihan

antara berakhirnya RPJMK periode 2025–2029 dengan belum tersusunnya dokumen RPJMK periode berikutnya. Pada fase transisi pemerintahan pasca tahun 2029, RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 berperan sebagai acuan sementara dalam perencanaan program dan kegiatan prioritas, hingga ditetapkannya dokumen perencanaan yang baru, yang akan digunakan untuk penyusunan RKPK Simeulue Tahun 2030.

Pelaksanaan pembangunan pada masa transisi difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, melanjutkan program dan kegiatan strategis yang capaian kinerjanya belum optimal selama periode RPJMK berjalan. Kedua, memastikan keberlangsungan pelayanan publik agar tidak terjadi stagnasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ketiga, menyusun arah kebijakan berbasis pada hasil evaluasi kinerja program terdahulu sebagai landasan perbaikan dan penyesuaian kebijakan ke depan.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan arah pembangunan, sekaligus memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran tetap berjalan secara teknokratis, sistematis, dan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 ini akan tetap dijadikan acuan utama untuk penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2030, memastikan bahwa semua program prioritas dapat terus dilanjutkan tanpa ada gangguan dalam transisi pemerintahan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan RPJMK disusun sebagai norma pelaksanaan teknis dan administratif yang wajib diikuti oleh seluruh perangkat daerah dan pihak terkait, dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, transparansi, konsistensi, partisipasi, dan tanggung jawab. Ketentuan utama dalam pelaksanaan RPJMK meliputi:

1. SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue wajib melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan RPJMK, serta menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. RPJMK dijabarkan ke dalam dokumen RKPK Simeulue Tahun 2026–2030, serta Renja-SKPK tahunan, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Simeulue.
3. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah, maka kelembagaan baru wajib menyesuaikan urusan pemerintahan yang diampu dengan substansi RPJMK, serta melakukan revisi terhadap dokumen Renstra.
4. Pendanaan pelaksanaan program/kegiatan dapat berasal dari APBK, APBA, APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), CSR, hibah dalam/luar negeri, maupun swadaya masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bappeda Kabupaten Simeulue melakukan fasilitasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan RPJMK, guna memastikan konsistensi antara RPJMK dengan dokumen turunan (Renstra dan Renja).
6. Pemerintah Kabupaten Simeulue memperoleh fasilitasi dan pembinaan teknis dari Pemerintah Aceh (Bappeda Aceh), serta melakukan penyelarasan dengan RPJMA dan RPJMN 2025–2029.
7. Perubahan RPJMK dimungkinkan apabila terjadi:
    a. Ketidaksesuaian proses penyusunan dengan kaidah perencanaan;
    b. Ketidaksesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan;
    c. Perubahan mendasar seperti bencana, konflik, krisis ekonomi, pemekaran wilayah, atau perubahan kebijakan nasional.

Kaidah pelaksanaan dalam dokumen RPJMK Simeulue Tahun 2025–2029 menekankan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dan antar level pemerintahan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam memastikan pelaksanaan pembangunan yang responsif dan inklusif. Penetapan program prioritas dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara adil dan merata.

Sebagai instrumen pengendalian yang bersifat strategis, RPJMK ini juga mengatur secara jelas mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) terhadap seluruh proses pelaksanaan pembangunan. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, sedangkan evaluasi difokuskan pada pencapaian kinerja, efektivitas penggunaan sumber daya, serta tingkat akuntabilitas dari setiap intervensi kebijakan yang dijalankan. Penguatan fungsi monev menjadi kunci dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kinerja, pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan mampu berjalan secara konsisten, efisien, dan berkelanjutan. Visi, misi, serta sasaran strategis RPJMK akan menjadi rujukan utama dalam mengarahkan seluruh aktivitas pembangunan, agar senantiasa terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing Kabupaten Simeulue secara berkelanjutan.

BUPATI SIMEULUE

MOHAMMAD NASRUN MIKARIS